

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK**

**Laporan keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2017, 2016 dan 2015**

***PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES***

***Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2017, 2016 and 2015***

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES**

Daftar Isi	Halaman/ <u>Page</u>	Table of Contents
Surat Pernyataan Direksi		<i>Directors' Statement Letter</i>
Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditor's Report</i>
Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015		<i>Consolidated Financial Statements For the Years Ended December 31, 2017, 2016 and 2015</i>
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	1	<i>Consolidated Statements of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	4	<i>Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	5	<i>Consolidated Statements of Changes in Equity</i>
Laporan Arus Kas Konsolidasian	6	<i>Consolidated Statements of Cash Flows</i>
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian	7	<i>Notes to the Consolidated Financial Statements</i>



**SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN PT PELABUHAN INDONESIA III
(PERSERO) DAN ENTITAS ANAK ("GRUP")
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2017, 2016, DAN 2015**

**DIRECTOR'S STATEMENT LETTER REGARDING THE
RESPONSIBILITY FOR THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS OF PT PELABUHAN INDONESIA III
(PERSERO) AND SUBSIDIARIES ("GROUP")
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2017, 2016 AND 2015**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

We the undersigned:

- | | | |
|--|--|----------------------------------|
| 1. Nama | I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra | Name |
| Alamat Kantor | Jl. Tanjung Perak Timur No. 610
Surabaya | Office Address |
| Alamat Domisili sesuai
KTP atau Identitas | Jl. Sunan Derajat No 52 Jati,
Pulogadung, Jakarta Timur | Domicile as stated
in ID Card |
| Nomor Telepon | +62-31-3298631 | Phone Number |
| Jabatan | Direktur Utama / President Director | Position |
| | | |
| 2. Nama | U Saefudin Noer | Name |
| Alamat Kantor | Jl Tanjung Perak Timur No, 610
Surabaya | Office Address |
| Alamat Domisili sesuai
KTP atau Identitas | Puri Sriwedari Blok S No 1-2
Kelurahan Harjamukti - Depok | Domicile as stated
in ID Card |
| Nomor Telepon | +62-31-3298631 | Phone Number |
| Jabatan | Direktur Keuangan / Director of Finance | Position |

Menyatakan bahwa :

State that :

- | | |
|--|---|
| 1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian Grup. | 1. We are responsible for the preparation and presentation of the Group's consolidated financial statements. |
| 2. Laporan keuangan konsolidasian Grup telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. | 2. The Group's consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards. |
| 3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian Grup disajikan secara lengkap dan benar. | 3. a. All information contained in the Group's consolidated financial statements are complete and correct. |
| b. Laporan keuangan konsolidasian Grup tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material. | b. The Group's consolidated financial statements do not contain misleading material information or facts and do not omit material information or facts. |
| 4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Grup. | 4. We are responsible for the Group's internal control system. |

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This Statement letter is made truthfully.

Atas nama dan mewakili Direksi / For and on behalf of the Board of Directors
Surabaya,

26 Februari / February 26, 2018

I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra
Direktur Utama / President Director

U Saefudin Noer
Direktur Keuangan / Director of Finance



Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan
Registered Public Accountants

Nomor/Number : R/022.AGA/bna.1/2018

SOHO SKYLOFT
Unit 1888-1898
Ciputra World Surabaya
Jl. Mayjen Sungkono No. 89
Surabaya - 60224

T +62 31 9953 3999, +62 31 9953 3333
F +62 31 9953 2121

www.rsm.id

Laporan Auditor Independen/ Independent Auditor's Report

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi/
The Stockholders, Board of Commissioners and Directors

PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) dan entitas anaknya terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2017, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) and its subsidiaries, which comprise the consolidated statements of financial position as of December 31, 2017, and the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the consolidated financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such consolidated financial statements are free from material misstatement.

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
AUDIT | TAX | CONSULTING

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2017, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) and its subsidiaries as of December 31, 2017, and their consolidated financial performance and cash flows for the years then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan



Benny Andria

Nomor Izin Akuntan Publik: AP.181/
Public Accountant License Number: AP.181

Surabaya, 26 Februari 2018/ February 26, 2018

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 Desember 2017, 2016 dan 2015
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION**

December 31, 2017, 2016 and 2015
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2017 Rp	2016*) Rp	2015*) Rp	
ASET					ASSETS
ASET LANCAR					CURRENT ASSETS
Kas dan Setara Kas	4,46	2,750,527,471	1,815,986,830	2,618,040,351	Cash and Cash Equivalents
Kas yang Dibatasi Penggunaannya	5,46	5,149,595	33,213,107	42,244,106	Restricted Cash
Investasi Jangka Pendek	6	10,988,190	4,917,631	--	Short Term Investment
Piutang Usaha					Trade Receivables
Pihak Berelasi	7,8,46	268,879,466	43,286,454	80,957,627	Related Parties
Pihak Ketiga	7,46	557,624,460	484,023,080	381,831,641	Third Parties
Piutang Lain-lain					Other Receivables
Pihak Berelasi	8,9,46	194,736,334	191,968,284	19,732,086	Related Parties
Pihak Ketiga	9,46	27,384,747	34,396,494	19,360,685	Third Parties
Persediaan	10	35,651,066	25,152,456	24,934,487	Inventories
Uang Muka	11	218,067,687	1,176,361,747	1,160,713,389	Advances
Biaya Dibayar di Muka	12	67,790,205	71,536,742	68,797,859	Prepaid Expenses
Pajak Dibayar di Muka	20a	291,446,197	130,469,123	102,895,964	Prepaid Taxes
Aset Tetap yang Dimiliki untuk Dijual		1,411,936	955,584	1,382,834	Fixed Assets held for Sale
Total Aset Lancar		4,429,657,354	4,012,267,532	4,520,891,029	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR					NON - CURRENT ASSETS
Investasi pada Entitas Asosiasi	13	1,193,403,689	1,101,729,177	1,025,955,568	Investments in Associates
Properti Investasi	14	49,443,955	55,178,190	58,967,386	Investment Properties
Aset Tetap	15	11,811,833,204	9,770,759,518	7,436,153,760	Fixed Assets
Piutang Lain-lain	16,46	3,500,000	7,000,000	10,500,000	Other Receivables
Aset Takberwujud	17a	7,439,730,077	6,487,110,116	5,378,941,272	Intangible Assets
Goodwill	17b	1,143,301	1,143,301	1,143,301	Goodwill
Estimasi Tagihan Pajak	20b	444,237,232	622,146,461	471,449,499	Estimated Claims for Tax Refund
Aset Pajak Tangguhan	20d	20,355,840	115,098,327	58,910,201	Deferred Tax Asset
Aset Tidak Lancar Lainnya	18	15,599,021	9,119,642	7,695,421	Other Non - Current Assets
Total Aset Tidak Lancar		20,979,246,319	18,169,284,732	14,449,716,408	Total Non - Current Assets
TOTAL ASET		25,408,903,673	22,181,552,264	18,970,607,437	TOTAL ASSETS

*) Direklasifikasi, Catatan 52

*) As Reclassified, Note 52

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
31 Desember 2017, 2016 dan 2015
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION (Continued)**
December 31, 2017, 2016 and 2015
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2017 Rp	2016*) Rp	2015*) Rp	
LIABILITAS DAN EKUITAS					LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS JANGKA PENDEK					CURRENT LIABILITIES
Utang Usaha					Trade Payables
Pihak Berelasi	8,19,46	182,569,128	213,063,833	147,805,339	Related Parties
Pihak Ketiga	19,46	928,788,363	670,225,860	919,621,509	Third Parties
Utang Pajak	20c	126,440,505	118,924,652	187,094,417	Tax Payables
Utang Bank	21,46	677,400,000	671,800,000	689,750,000	Bank Loans
Uang Persekot/Panjar	24	50,042,010	48,180,532	33,236,816	Advances from Customer
Uang Titipan	25,46	131,237,654	80,309,518	92,227,491	Fund Retained
Utang Dana Pensiun	26	4,030,109	3,891,187	3,155,865	Pension Fund Payable
Pendapatan Diterima di Muka	27	60,288,736	76,663,034	72,402,677	Unearned Revenue
Beban Akrua	28,46	824,294,545	833,461,820	713,178,003	Accrued Expenses
Utang Lancar Lainnya	29,46	3,343,819	2,265,071	4,267,956	Other Current Payable
Bagian Lancar Atas					Current Maturity of Long -
Liabilitas Jangka Panjang:					Term Liabilities:
Utang Bank	22	328,516,973	325,801,155	254,042,959	Bank Loans
Imbalan Kerja	32	31,013,653	36,242,044	44,883,596	Employee Benefits
Total Liabilitas Jangka Pendek		<u>3,347,965,495</u>	<u>3,080,828,706</u>	<u>3,161,666,628</u>	Total Current Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG					NON - CURRENT LIABILITIES
Liabilitas Pajak Tangguhan	20d	116,796,889	57,019,106	120,578,897	Deferred Tax Liabilities
Liabilitas Jangka Panjang					Long - Term Liabilities
Utang Bank	22	3,565,584,964	2,177,131,455	714,356,404	Bank Loans
Surat Berharga Yang Diterbitkan	23	6,709,109,457	6,645,931,711	6,829,569,938	Securities Issued
Pendapatan Diterima di Muka					Long Term
Jangka Panjang	30	330,998,765	321,733,688	239,238,758	Unearned Revenue
Uang Jaminan	31	4,610,340	5,581,612	2,511,075	Guaranteed Deposit Received
Provisi Jangka Panjang	48	--	--	209,799	Long - Term Provisions
Liabilitas Imbalan Kerja	32	349,970,189	247,846,386	197,105,853	Employee Benefits Liabilities
Total Liabilitas Jangka Panjang		<u>11,077,070,604</u>	<u>9,455,243,958</u>	<u>8,103,570,724</u>	Total Non - Current Liabilities
TOTAL LIABILITAS		<u>14,425,036,099</u>	<u>12,536,072,664</u>	<u>11,265,237,352</u>	TOTAL LIABILITIES

*) Direklasifikasi, Catatan 52

*) As Reclassified, Note 52

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
31 Desember 2017, 2016 dan 2015
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION (Continued)**
December 31, 2017, 2016 and 2015
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2017 Rp	2016*) Rp	2015*) Rp	
EKUITAS					EQUITY
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan					Equity Attributable to
Kepada Pemilik Entitas Induk					Owners of the Parent Entity
Modal Saham - Nilai Nominal					Share Capital-Par Value Rp1,000,000
Rp1.000.000 per Saham					Value per Share
(dalam Rupiah Penuh)					(Full Rupiah Amount)
Modal Dasar - 3.200.000 lembar					Authorized Capital-
Saham Modal Ditempatkan dan					3,200,000 Shares Subscribed and
Disetor Penuh sebesar 1.018.953					Paid Up amounting to 1,018,953
saham tahun 31 Desember 2017,					shares as of December 31, 2017,
2016 dan 2015	33	1,018,953,000	1,018,953,000	1,018,953,000	2016 and 2015
Tambahan Modal Disetor	34	66,881,155	62,460,000	62,460,000	Additional Paid in Capital
Saldo Laba:					Retained Earnings:
Dicadangkan		6,021,594,418	5,297,104,815	4,819,382,155	Appropriated
Belum Dicadangkan		1,470,490,226	1,037,329,721	702,533,323	Unappropriated
Penghasilan Komprehensif Lain		1,076,483,328	1,127,907,840	(4,488,047)	Other Comprehensive Income
Total Ekuitas yang Dapat Diatribusikan					Total Equity Attributable to Owners
Kepada Pemilik Entitas Induk		9,654,402,127	8,543,755,376	6,598,840,431	of the Parent Entity
Kepentingan Nonpengendali	36a	1,329,465,447	1,101,724,224	1,106,529,654	Non - Controlling Interest
Total Ekuitas		10,983,867,574	9,645,479,600	7,705,370,085	Total Equity
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		25,408,903,673	22,181,552,264	18,970,607,437	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

*) Direklasifikasi, Catatan 52

*) As Reclassified, Note 52

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
PROFIT OR LOSS AND OTHER
COMPREHENSIVE INCOME**

For the Years Ended
December 31, 2017, 2016, and 2015
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2017 Rp	2016*) Rp	2015*) Rp	
Pendapatan Operasi	37	8,944,746,516	7,587,363,395	6,498,048,981	Operating Revenues
Reduksi Pendapatan	37	(95,339,878)	(101,895,402)	(18,605,022)	Revenue Reduction
Pendapatan Bersih		8,849,406,638	7,485,467,993	6,479,443,959	Net Revenue
Pendapatan Konstruksi	38	126,676,775	1,299,565,577	1,785,768,720	Construction Revenues
Beban Operasi	39	(5,687,053,398)	(5,401,060,891)	(4,250,116,985)	Operating Expenses
Beban Konstruksi	38	(115,899,850)	(1,299,565,577)	(1,785,768,720)	Construction Expenses
Laba Usaha		3,173,130,165	2,084,407,102	2,229,326,974	Operating Income
Laba Pelepasan Aset Tetap dan Properti Investasi	15	3,076,219	786,889	10,401,176	Gain on Disposals of Fixed Assets and Investment Properties
Penghasilan Bunga	41	101,262,769	99,448,711	100,504,696	Interest Income
Bagian Laba Entitas Asosiasi	13	97,403,931	44,602,963	18,189,505	Equity In Net Gain of Associates
Pendapatan (Beban) lainnya - Bersih	40	(12,894,640)	(184,352,117)	35,305,041	Other Income (Expenses) - Net
Beban Bunga Pinjaman	42	(600,181,782)	(476,983,708)	(398,335,367)	Interest Expenses
Keuntungan (Kerugian) Kurs Mata Uang Asing - Bersih		(57,286,261)	215,318,439	(452,555,242)	Gain (Loss) on Foreign Exchange - Net
LABA SEBELUM PAJAK		2,704,510,401	1,783,228,279	1,542,836,783	PROFIT BEFORE TAX
BEBAN PAJAK	20	(670,403,153)	(270,911,349)	(379,968,918)	TAX EXPENSES
LABA TAHUN BERJALAN		2,034,107,248	1,512,316,930	1,162,867,865	PROFIT FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN					OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:					Items that will not be reclassified to profit or loss:
Surplus Revaluasi Aset Tetap	15	--	1,189,749,498	--	Fixed Assets Revaluation Gains
Pengukuran Kembali atas Imbalan Pasti	32	(67,566,884)	(35,210,475)	1,672,326	Remeasurements of Defined Benefit Obligation
Pajak Penghasilan Terkait	20	16,891,721	(14,345,975)	(417,847)	Income Taxes Related
Total penghasilan komprehensif lain tahun berjalan - setelah pajak		(50,675,163)	1,140,193,048	1,254,479	Total other comprehensive income for the year - net of tax
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		1,983,432,085	2,652,509,978	1,164,122,344	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR
LABA YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:					PROFIT ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik Entitas Induk		1,470,490,226	1,037,329,721	702,533,323	Owners of the Parent Entity
Kepentingan Nonpengendali		563,617,022	474,987,209	460,334,542	Non - Controlling Interests
Total		2,034,107,248	1,512,316,930	1,162,867,865	Total
TOTAL LABA KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA :					TOTAL COMPREHENSIVE INCOME ATTRIBUTABLE TO :
Pemilik Entitas Induk		1,419,065,714	2,169,725,608	702,240,142	Owners of the Parent Entity
Kepentingan Nonpengendali	36b	564,366,371	482,784,370	461,882,202	Non - Controlling Interests
Total		1,983,432,085	2,652,509,978	1,164,122,344	Total
LABA PER SAHAM DASAR	45	1,443	1,018	689	BASIC EARNINGS PER SHARE

*) Direklasifikasi, Catatan 52

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

*) As Reclassified, Note 52

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY**

For the Years Ended
December 31, 2017, 2016, and 2015
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

		Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk/ Attributable to Owners of the Parent										
		Saldo Laba/Retained Earnings				Penghasilan Komprehensif Lain / Other Comprehensive Income						
		Tambahkan Modal		Belum		Surplus		Keuntungan / kerugian		Kepentingan Non		
		Modal Saham/	Disetor/ Additional	Dicadangkan/	Dicadangkan	Revaluasi Aset Tetap/	aktuarial program Pensiun/			Pengendali/ Non	Total Ekuitas/	
Catatan/ Notes	Share Capital	Paid in Capital	Appropriated	Unappropriated	Fixed Assets	Realization Gains	Employ benefit	Subtotal	Total	Controlling Interest	Total Equity	
	Rp	Rp	Rp	Rp				Rp	Rp	Rp	Rp	
Saldo Per 1 Januari 2015		1,018,953,000	62,460,000	3,890,024,012	1,192,041,611	--	(4,194,866)	(4,194,866)	6,159,283,757	977,075,255	7,136,359,013	Balance as of January 1, 2015
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan Entitas Anak baru		--	--	--	702,533,323	--	(293,181)	(293,181)	702,240,142	461,882,202	1,164,122,344	Total Comprehensive Income for the Year New Subsidiary
Penyesuaian Sehubungan dengan Penerapan PSAK No. 24 (Revisi 2013)		--	--	(1,974,156)	1,974,156	--	--	--	--	--	--	Adjustment due to Implementation of PSAK No. 24 (2013 Revised)
Pembentukan Cadangan		--	--	955,212,614	(955,212,614)	--	--	--	--	--	--	Appropriation of Retained Earnings
Dividen	35c	--	--	--	(238,803,153)	--	--	--	(238,803,153)	(337,911,303)	(576,714,457)	Dividend Partnership and Community Development Funds
Dana Kemitraan dan Bina Lingkungan	35e	--	--	(23,880,315)	--	--	--	--	(23,880,315)	--	(23,880,315)	
Saldo Per 31 Desember 2015		1,018,953,000	62,460,000	4,819,382,155	702,533,323	--	(4,488,047)	(4,488,047)	6,598,840,431	1,106,529,654	7,705,370,085	Balance as of December 31, 2015
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan Entitas Anak baru		--	--	--	1,037,329,721	1,166,601,138	(34,205,251)	1,132,395,887	2,169,725,608	482,784,370	2,652,509,978	Total Comprehensive Income for the Year New Subsidiary
Pembentukan Cadangan		--	--	505,823,993	(505,823,993)	--	--	--	--	--	--	Appropriation of Retained Earnings
Dividen	35b.1	--	--	--	(196,709,330)	--	--	--	(196,709,330)	(517,219,800)	(713,929,130)	Dividend Partnership and Community Development Funds
Dana Kemitraan dan Bina Lingkungan	35b.2	--	--	(28,101,333)	--	--	--	--	(28,101,333)	--	(28,101,333)	
Saldo Per 31 Desember 2016		1,018,953,000	62,460,000	5,297,104,815	1,037,329,721	1,166,601,138	(38,693,298)	1,127,907,840	8,543,755,376	1,101,724,224	9,645,479,600	Balance as of December 31, 2016
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan Saham Treasury PT PEL	34.43	--	(4,395,000)	--	1,470,490,226	--	(51,424,512)	(51,424,512)	1,419,065,714	564,366,371	1,983,432,085	Total Comprehensive Income for the Year Treasury Stock PT PEL
Reklasifikasi ke Tambahan Modal Disetor	34.43	--	8,816,155	--	--	--	--	--	8,816,155	(8,816,155)	--	Reclassification On Additional Paid in Capital
Peralihan Saham Nonpengendali	43	--	--	--	--	--	--	--	--	(4,368,000)	(4,368,000)	Transfer of Capital Stock Non-Controlling Interest Retained Earnings' Adjustment of Non Controlling Interest
Penyesuaian Saldo Laba Hak Minoritas	43	--	--	(1,641,202)	--	--	--	--	(1,641,202)	1,641,202	--	Adjustment for Shareholding PT BIMA
Penyesuaian Saham PT BIMA		--	--	--	--	--	--	--	--	(770,791)	(770,791)	Additional Paid In Capital of New Subsidiary
Tambahan Setoran Modal Entitas Anak baru		--	--	--	--	--	--	--	--	600,972	600,972	
Pembentukan Cadangan		--	--	726,130,805	(726,130,805)	--	--	--	--	--	--	Appropriation of Retained Earnings
Dividen	35a	--	--	--	(311,198,916)	--	--	--	(311,198,916)	(324,912,376)	(636,111,292)	Dividend
Saldo Per 31 Desember 2017		1,018,953,000	66,881,155	6,021,594,418	1,470,490,226	1,166,601,138	(90,117,810)	1,076,483,328	9,654,402,127	1,329,465,447	10,983,867,574	Balance as of December 31, 2017

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
THE CONSOLIDATED STATEMENTS
OF CASH FLOWS**

For the Years Ended
December 31, 2017, 2016, and 2015
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2017 Rp	2016*) Rp	2015*) Rp	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI					CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan Kas dari Pelanggan		10,567,474,656	7,445,328,647	8,244,543,533	Cash Received from Customers
Penerimaan Kas dari Non Pelanggan		237,103,468	88,627,718	771,790,806	Cash Received from Non Customers
Pembayaran Kas kepada Pemasok		(6,279,106,648)	(3,765,240,761)	(3,282,922,518)	Cash Paid to Suppliers
Pembayaran Kas kepada Karyawan		(906,988,395)	(578,159,842)	(606,156,910)	Cash Paid to Employees
Pembayaran Kas Lainnya		(3,794,960)	(221,483,548)	(807,156,573)	Others Cash Paid
Pembayaran Pajak Penghasilan		(1,314,703,980)	(716,095,687)	(911,862,105)	Payment For Corporate Income Tax
Penempatan (Penarikan) Kas yang dibatasi Penggunaannya		28,063,512	11,662,487	(22,374,106)	Placement (Withdrawal) of Restricted Cash
Penerimaan Bunga Deposito	41	59,691,540	83,011,977	95,065,328	Interest on Deposit Received
Penerimaan Restitusi Pajak		332,074,469	81,349,835	1,769,440	Receipts Tax Restitution
Pembayaran Bunga Pinjaman	42	(562,923,205)	(475,081,906)	(234,308,396)	Payment for Interest
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi		<u>2,156,890,457</u>	<u>1,953,918,920</u>	<u>3,248,388,500</u>	Net Cash Provided by Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI					CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Pengurangan (Penambahan) Investasi Saham	13,17, 43	91,000	(34,800,000)	(430,000,000)	Reduction (Cash Paid) for Investment in Stocks
Penempatan Investasi Jangka Pendek		(6,070,559)	(4,917,631)	--	Placement of Short Term Investment
Pemberian Pinjaman ke Pihak Berelasi		3,500,000	(120,000,000)	--	Loan to Related Parties
Hasil Penjualan Aset Tetap	15	791,501	1,300,371	13,020,309	Proceeds From Sale of Fixed Assets
Perolehan Aset Tetap Properti Investasi, dan Aset Tak Berwujud	14,15,17	(1,737,919,717)	(2,397,087,987)	(2,650,610,026)	Acquisition of Fixed Assets Investment Properties and Intangible Assets
Pembayaran Uang Muka Kontraktor		(196,727,771)	(574,374,722)	(799,051,672)	Advance Payment for Contractor
Penerimaan Dividen dari Entitas Asosiasi	13	<u>5,729,419</u>	<u>3,629,354</u>	<u>6,867,618</u>	Cash Dividend Received from Associate
Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Investasi		<u>(1,930,606,127)</u>	<u>(3,126,250,615)</u>	<u>(3,859,773,771)</u>	Net Cash Used In Investing Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN					CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Tambahan Setoran Modal dari Kepentingan non Pengendali		600,972	29,630,000	4,473,500	Proceed from Paid - up Capital by Non - Controlling Interest
Pembelian Saham Treasuri di Entitas Anak		(4,395,000)	--	--	Acquisition of Subsidiary's Treasury Stock
Penerimaan Pinjaman	22,23	2,176,350,000	2,171,000,000	683,650,000	Proceeds from Borrowings
Pembayaran Pinjaman	21,22	(833,750,578)	(907,900,738)	(678,691,182)	Payment of Loan
Pembayaran Dividen	36	(636,122,609)	(703,998,912)	(576,714,455)	Cash Dividend Paid
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan		<u>702,682,785</u>	<u>588,730,350</u>	<u>(567,282,137)</u>	Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS		928,967,115	(583,601,345)	(1,178,667,408)	NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS - AWAL TAHUN		1,815,986,830	2,618,040,351	4,247,026,898	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR
Pengaruh Selisih Kurs - Bersih		<u>5,573,526</u>	<u>(218,452,176)</u>	<u>(450,319,139)</u>	Effect of Foreign Exchange - Net
KAS DAN SETARA KAS - AKHIR TAHUN		<u>2,750,527,471</u>	<u>1,815,986,830</u>	<u>2,618,040,351</u>	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR

Tambahan Informasi Transaksi Non Kas
disajikan di Catatan 51
) Direklasifikasi, Catatan 52

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

Additional Information of Non Cash Transaction
is presented in Note 51
) As Reclassified, Note 52

The accompanying notes form an integral part of these
consolidated financial statements

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2017, 2016 and 2015
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

1. Umum

1. General

a. Pendirian

PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) "Perusahaan" didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Pelabuhan III menjadi Perusahaan (PERSERO) dengan Akta Notaris Imas Fatimah, SH., No. 5 tanggal 1 Desember 1992.

Anggaran Dasar Perusahaan diubah berdasarkan keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 14 Januari 1998 dan telah diaktakan dengan Akta Notaris Rahmat Santoso, SH., No. 128 tanggal 25 Juni 1998. Perubahan Anggaran Dasar telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.C2-15948.HT.01.04-TH 98 tanggal 29 September 1998.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No. 08 tanggal 13 Agustus 2012 oleh Stephanus Raden Agus Purwanto, SH., Notaris di Surabaya, mengenai perubahan Anggaran Dasar berdasarkan salinan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN selaku Kuasa Menteri Negara BUMN sebagai RUPS Perusahaan No.SK-226/MBU/S/2012 tanggal 16 Juli 2012, terkait dengan mencabut seluruh isi akta pernyataan keputusan rapat No. 4 tanggal 14 Desember 2011 dan menetapkan perubahan Pasal 4 ayat 2 dan 3 Anggaran Dasar Perusahaan tentang perubahan modal dasar, modal disetor dan modal ditempatkan, sehingga modal dasar Perusahaan ditetapkan menjadi sebesar 3.200.000 (Angka Penuh) lembar saham dengan nilai nominal sejumlah Rp3.200.000.000, dan modal ditempatkan dan disetor menjadi sebesar 1.018.953 (Angka Penuh) lembar saham dengan nilai sebesar Rp1.018.953.000.

Akta perubahan ini sudah mendapat Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan No.AHU-61954.AH.01.02 Tahun 2012 tanggal 5 Desember 2012.

a. Establishment

PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) "the Company" was officially established based on Government Regulation (PP) No. 58 year 1991 regarding change from State Company (PERUM) to Limited Company (PERSERO) as stated in Notarial Deed of Imas Fatimah, SH., No.5 dated December 1, 1992.

The Company's Articles of Association have been amended based on Annual General Shareholder Meeting dated January 14, 1998 and has been notarized by Notary Rahmat Santoso, SH., in notarial deed No. 128 dated June 25, 1998. The amendment was approved by Minister of Law of the Republic of Indonesia with a Decree No.C2-15948.HT.01.04-TH 98 dated September 29, 1998.

The Company's Articles of Association have been amended several times, most recently by the General Shareholder Meeting Resolution No. 08 dated August 13, 2012 of Stephanus Raden Agus Purwanto, SH., Notary in Surabaya, regarding the change in the Articles of Association based on the copy of the decision of the Secretary of Ministry of State-Owned Enterprises as authorized by the Ministry of State-Owned Enterprises during the Annual General Meeting of Shareholders of the Company No.SK-226/MBU/S/2012 dated July 16, 2012, related to the revocation of the entire contents of deed No. 4 dated December 14, 2011 and the establishment of the amendment of Article 4, paragraph 2 and 3 of the statutes regarding the change of authorized capital, issued and paid capital and the capital of the Company which was settled at 3,200,000 (Full Amount) shares with nominal value of Rp3,200,000,000 and issued and paid up capital of 1,018,953 (Full Amount) shares with value amounting to Rp1,018,953,000.

This amendment has received an approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decree No.AHU-61954.AH.01.02 Year 2012 dated December 5, 2012.

1. Umum (Lanjutan)

1. General (Continued)

Perusahaan secara resmi telah menjadi Badan Usaha Pelabuhan (BUP), berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan RI No.KP.88/2011 tanggal 14 Februari 2011 tentang pemberian ijin usaha kepada Perusahaan sebagai Badan Usaha Pelabuhan (BUP). Izin BUP tersebut memberikan kewenangan pada Perusahaan untuk mengelola pelabuhan beserta fasilitasnya.

The Company officially became a Port Business Entity (BUP) based on approval letter from the Ministry of Transportation Decree No.KP.88/2011 dated February 14, 2011 on the issuance of license to the Company as a Port Business Entity (BUP). The BUP license authorizes the Company to manage sea ports and its facilities.

b. Maksud dan Tujuan

Perusahaan dan entitas anak (secara bersama-sama disebut "Grup") menyediakan dan mengusahakan jasa kepelabuhanan baik berupa pelabuhan tradisional (barang dan penumpang) maupun petikemas untuk menunjang kelancaran angkutan laut dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan nasional, serta pemeliharaan peralatan pelabuhan dan jasa kesehatan, termasuk perusahaan:

b. The Purpose and Objective

The Company and subsidiaries (collectively referred as "the Group") provide sea port services and undertake both traditional (for goods and passengers) and container port to support sea transportation of goods for the implementation of national development and to maintain sea port equipments, and health care services including undertaking:

1. Kolam-kolam pelabuhan dan perairan untuk lalu lintas dan tempat-tempat berlabuhnya kapal.
2. Jasa-jasa yang berhubungan dengan pemanduan (*pilotage*) dan penundaan kapal.
3. Dermaga dan fasilitas lainnya untuk bertambat, bongkar muat barang termasuk hewan, dan fasilitas naik turunnya penumpang.
4. Gudang-gudang dan tempat penyimpanan barang-barang angkutan bandar alat bongkar muat, serta peralatan pelabuhan.
5. Tanah untuk berbagai bangunan dan lapangan, industri dan gedung-gedung/bangunan yang berhubungan dengan kepentingan kelancaran angkutan laut.
6. Penyediaan listrik, bahan bakar minyak, air minum dan instalasi limbah pembuangan.
7. Jasa terminal, kegiatan konsolidasian dan distribusi barang termasuk hewan.
8. Pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan kepelabuhanan.
9. Jasa pelayanan kesehatan.
10. Jasa transportasi laut.
11. Jasa persewaan fasilitas dan peralatan di bidang pelabuhan.
12. Jasa perbaikan fasilitas dan peralatan pelabuhan.

1. *Water pools and the port basin for ship's traffic and anchoring.*
2. *Services related to pilotage and delay of the ship.*
3. *Docking and other facilities for the tethering, loading and unloading of goods including animals and facilities for the flow of passengers.*
4. *Warehouse and place for hoarding transportation for goods, loading and unloading equipment as well as port equipment.*
5. *Land for various buildings and grounds, industrial and buildings associated to the sea freight streamlined.*
6. *Supply of electricity, fuel, fresh water, and waste installation.*
7. *Terminal services, bulk terminal activities, and distribution of goods including animals.*
8. *Education and training services related to port business.*
9. *Health care services.*
10. *Sea transportation services.*
11. *Rental of facilities and various port equipments.*
12. *Repair services of port's facility and equipment.*

1. Umum (Lanjutan)

1. General (Continued)

13. Properti di daerah lingkungan pelabuhan.
14. Kawasan industri di daerah lingkungan pelabuhan.
15. Kawasan wisata di daerah lingkungan pelabuhan.
16. Depo petikemas.
17. Jasa konsultan di bidang kepelabuhanan.
18. Jasa komunikasi dan informasi di bidang kepelabuhanan.
19. Jasa konstruksi di bidang kepelabuhanan.

13. Property services surrounding the port area.
14. Industrial estate in port area.
15. Tourism area in port area.
16. Container depot.
17. Consulting services in the field of port.
18. Port communication and information services.
19. Construction services in the field of port.

Untuk menjalankan kegiatan operasinya, Perusahaan memiliki 17 (tujuh belas) cabang pelabuhan dan 1 (satu) unit perusahaan yaitu Terminal Petikemas Semarang serta 1 (satu) Unit Pelaksanaan Kantor Pusat. Wilayah Kerja Cabang-cabang operasional pelabuhan adalah sebagai berikut:

In providing its services, the Company has 17 (seventeen) branches of port container and 1 (one) port service unit namely Terminal Petikemas Semarang, and 1 (one) executive head office. Work areas of operational branches of port are as follows:

1. Cabang Kelas Utama : Tanjung Perak
2. Cabang Kelas Satu A (IA) : Banjarmasin
3. Cabang Kelas Satu B (IB) : Tanjung Emas dan Terminal Petikemas Semarang (TPKS)
4. Cabang Kelas Dua A (IIA) : Gresik, Kotabaru dan Tanjung Intan
5. Cabang Kelas Dua B (II B) : Tenau / Kupang, Benoa dan Sampit
6. Cabang Kelas Tiga A (III A) : Tanjung Wangi, Lembar dan Kumai
7. Cabang Kelas Tiga B (III B) : Maumere, Celukan Bawang, Bima, Tanjung Tembaga
8. Unit Pelaksanaan Kantor Pusat di Surabaya

1. Prime Class of : Tanjung Perak Branch
2. First Class of : Banjarmasin Branch A (IA)
3. First Class of : Tanjung Emas and Terminal Petikemas Semarang (TPKS) Branch B (IB)
4. Second Class of : Gresik, Kotabaru and Tanjung Intan Branch A (IIA)
5. Second Class of : Tenau / Kupang, Benoa and Sampit Branch B (II B)
6. Third Class of : Tanjung Wangi, Lembar and Kumai Branch A (III A)
7. Third Class of : Maumere, Celukan Bawang, Bima, Tanjung Tembaga Branch B (III B)
8. Executive head office unit is in Surabaya

c. Manajemen

Susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

c. Management

The Company's Board of Commissioners and Board of Directors as of December 31, 2017, 2016 and 2015 are as follows:

	2017	2016	2015	
Dewan Komisaris :				Boards of Commissioners:
Komisaris Utama	Hari Bowo	Hari Bowo	Hari Bowo	President Commissioner
Komisaris	Soritaon Siregar	Soritaon Siregar	Soritaon Siregar	Commissioner
Komisaris	Heddy Lugito	Heddy Lugito	Machfud Sidik	Commissioner
Komisaris	Wahju Satrio Utomo	Wahju Satrio Utomo	L. Denny Siahaan	Commissioner
Komisaris	Zainal Abidin	Rr. Dewi Ariyani	Fadjar Judisiawan	Commissioner
Dewan Direksi :				Board of Directors :
Direktur Utama	I Gusti Ngurah Askhara D.	Orias Petrus Moedak	Djarwo Surjanto	President Director
Direktur	Muhammad Iqbal	Muhammad Iqbal	Rahmat Satria	Director
Direktur	Husein Latif	Husein Latief	Husein Latief	Director
Direktur	Toto Heliyanto	Toto Heliyanto	Toto Heliyanto	Director
Direktur	U. Saefudin Noer	U. Saefudin Noer	U. Saefudin Noer	Director

1. Umum (Lanjutan)

1. General (Continued)

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi pada tanggal 31 Desember 2017 di atas berdasarkan Akta Pernyataan Menteri BUMN selaku RUPS Perusahaan No.SK.89/MBU/5/2017 tanggal 8 Mei 2017 dan keputusan Menteri BUMN No.SK-198/MBU/09/2017 tanggal 14 September 2017.

The composition of the Board of Commissioners and Directors as of December 31, 2017 is based on the Deed of Statement of the Minister of SOEs as the Company's General Meeting of Shareholders No.SK.89/MBU/5/2017 dated May 8, 2017 and the decision of the Minister of SOE No.SK-198/MBU/09/2017 September 14, 2017.

Susunan Komite Audit, Komite *Good Corporate Governance* dan Manajemen Risiko Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

The composition of the Company's Audit Committee, Good Corporate Governance Committee and Risk Management as of December 31, 2017, 2016 and 2015 are as follows:

Jabatan	Nama/Name			Position
	2017	2016	2015	
Ketua Komite Audit	Soritaon Siregar	Soritaon Siregar	Machfud Sidik	Chairman of Audit Committee
Anggota	Andi Sudhana	Syukri	Syukri	Member
Anggota	Amilin	Amilin	Amilin	Member
Ketua Komite GCG dan Manajemen Resiko	Heddy Lugito	Wahju Satrio Utomo	L. Denny Siahaan	Chairman of GCG Committee and Risk Management
Anggota	Pandu Fajar Wisudha	Nono Sukarna	Nono Sukarna	Member
Anggota	Ivan Malik	Petrus Sampe	Petrus Sampe	Member

Personil manajemen kunci meliputi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Kompensasi imbalan kerja jangka pendek yang dibayarkan kepada personil manajemen kunci Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 sebesar Rp51.439.737 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp44.496.067 (31 Desember 2015: Rp31.796.575). Tidak ada kompensasi dalam bentuk imbalan pascakerja, imbalan kerja jangka panjang lainnya, pesangon pemutusan kontrak kerja dan pembayaran berbasis saham.

Key management personnel are the Company's Board of Commissioners and Directors. Short term compensation paid to the key management personnel of the Company for the year ended December 31, 2017 amounted to Rp51,439,737 and December 31, 2016 amounted to Rp44,496,067 (December 31, 2015: Rp31,796,575). There is no compensation in the form of post-employment benefits, other long-term benefits, termination benefits, and share-based payment.

Kantor pusat Perusahaan berlokasi di Surabaya. Keseluruhan karyawan Perusahaan pada 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 masing-masing berjumlah 1.991 orang, 1.850 orang, dan 2.094 orang. Total karyawan Grup tahun pada 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 masing-masing berjumlah 5.303 orang, 4.137 orang dan 5.863 orang (Tidak diaudit).

The Company's head office is located in Surabaya. The total number of employees as of December 31, 2017, 2016 and 2015 was 1,991, 1,850 and 2,094, respectively. The total number of employees of the Group as of December 31, 2017, 2016 and 2015 was 5,303, 4,137 and 5,863, respectively (Unaudited).

d. Penawaran Efek Perusahaan

Pada tanggal 24 September 2014 Perusahaan menerbitkan dan mencatatkan *Senior Note* sejumlah USD500,000,000 (angka penuh) jatuh tempo 2024 pada Bursa Efek di Singapura (Catatan 22).

d. The Company's Securities Offering

On September 24, 2014, the Company Issued and listed USD500,000,000 (full amount) Senior Note due in 2024, at the Singapore Stock Exchange (Note 22).

1. Umum (Lanjutan)

1. General (Continued)

e. Struktur Entitas Anak

Berikut ini adalah rincian entitas anak yang terkonsolidasi dalam Laporan Konsolidasian:

e. Subsidiaries' Structure

The details of subsidiaries consolidated in the Consolidated Financial Statements are as follows:

Entitas Anak / <i>Subsidiary</i>	Domisili / <i>Domicile</i>	Jenis Usaha/ <i>Nature of Business</i>	Jumlah Aset dan Persentase kepemilikan/ <i>Total Assets and Percentage of Ownership</i>					
			31 Desember/ December 31,					
			2017		2016		2015	
			%	Rp	%	Rp	%	Rp
<u>Penyertaan Langsung/</u>								
<u>Direct Investments</u>								
PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS)	Surabaya	Pelayanan pelabuhan petikemas/ <i>Container terminal services</i>	50.50	1,956,847,094	50.50	1,485,028,402	50.50	1,691,980,147
PT Primasatya Husada Citra (PHC)	Surabaya	Pelayanan kesehatan untuk karyawan Grup dan keluarganya dan umum/ <i>Health services and hospital for Group's employees and their family and as well as public</i>	98.73	293,590,391	98.73	241,076,661	98.73	238,750,892
PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (BJTI)	Surabaya	Jasa pelayanan bongkar muat barang di terminal/pelabuhan dan jasa terkait lainnya di Tanjung Perak serta jasa pengangkutan barang/ <i>Forwarding (loading and unloading) services in and around ports and terminals and other related port services at Port of Tanjung Perak as well as trucking services</i>	96.84	3,506,118,050	96.84	2,958,080,826	96.84	2,857,056,568
PT Pelindo Marine Service (PMS)	Surabaya	pelayanan jasa perkapalan terhadap para pengguna jasa kemaritiman baik nasional maupun Internasional / <i>the field of shipping services to the users of maritime services including both national and international</i>	97.89	1,325,144,432	97.89	829,037,006	97.89	559,222,669
PT Terminal Teluk Lamong (TTL)	Surabaya	Pelayanan pelabuhan petikemas/ <i>Container terminal services</i>	99.50	303,549,206	99.50	171,304,411	99.50	150,541,170
PT Pelindo Daya Sejahtera (PDS)	Surabaya	Jasa kebersihan, jasa ekspedisi, jasa pengepakan dan pergudangan, jasa keamanan, jasa rekrutng dan penyaluran tenaga kerja/ <i>Cleaning services, Freight forwarding services, packing and warehousing, Security services, Recruiting services and manpower distribution</i>	90.00	85,776,614	90.00	68,574,248	90.00	39,930,424
<u>Penyertaan Tidak</u>								
<u>Langsung/ Indirect</u>								
<u>Investments</u>								
PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (BJTI) - PT Berlian Manyar Sejahtera (BMS)	Surabaya	Jasa Terminal Bongkar Muat Barang dan Peti Kemas/ <i>Terminal Services Loading and Unloading of Goods and Container</i>	60.00	870,399,764	60.00	839,741,894	60.00	896,155,344

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) AND
SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2017, 2016 and 2015
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

1. Umum (Lanjutan)

1. General (Continued)

Entitas Anak / <i>Subsidiary</i>	Domisili / <i>Domicile</i>	Jenis Usaha/ <i>Nature of Business</i>	Jumlah Aset dan Persentase kepemilikan/ <i>Total Assets and Percentage of Ownership</i>					
			31 Desember/ December 31,		2016		2015	
			%	Rp	%	Rp	%	Rp
- PT Pelindo Properti Indonesia (PPI)	Surabaya	Jasa Properti / <i>Properties Services</i>	99.00	131,516,374	99.00	84,457,637	99.00	58,478,912
- PT Berkah Industri Mesin Angkat (BIMA)	Surabaya	Industri Alat Bongkar Muat Petikemas/ <i>Industrial Tool Loading and Unloading of Containers</i>	60.00	15,514,603	60.00	2,637,393	60.00	2,528,054
- PT Berlian Manyar Stevedore (BMST)	Gresik	Jasa Bongkar Muat Barang/ <i>Loading and Unloading Of Goods</i>	60.00	722,065	60.00	786,636	--	--
- PT Terminal Curah Semarang (TCS)	Semarang	Jasa Kepelabuhan/ <i>Port Service</i>	51.00	52,954,855	51.00	64,496,004	--	--
PT Pelindo Marine Service (PMS)								
- PT Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS)		Jasa Pengerukan, Jasa Reklamasi dan Pengelolaan Alur Pelayaran/ <i>Dredging Service, Reclamation Service and Management of Shipping Channel</i>	60.00	444,578,569	60.00	317,292,865	60.00	243,201,194
- PT Pelindo Energi Logistik (PEL)	Surabaya	Perdagangan Jasa/ <i>Trading Service</i>	90.00	485,969,348	90.00	174,878,651	90.00	42,864,310
- PT Berkah Multi Cargo (BMC)		Jasa Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal/ <i>Loading and Unloading of Goods to and from Ship Services</i>	99.00	1,015,157	99.00	1,009,724	99.00	1,000,034
PT Terminal Teluk Lamong (TTL)								
- PT Lamong Energi Indonesia (LEGI)	Surabaya	Supply Listrik dan Utilitas / <i>Supply of Electricity and Utilities</i>	51.00	13,767,177	51.00	9,264,841	51.00	10,030,298
PT Pelindo Daya Sejahtera (PDS)								
- PT Tanjung Emas Daya Sejahtera (TEDS)	Surabaya	Usaha Tally yang meliputi kegiatan usaha menghitung, mengukur, menimbang dan membuat catatan mengenai muatan, untuk kepentingan Pemilik muatan dan atau pengangkut/ <i>Tally business including counting, measuring, weighing and making notes of the charge, for the benefit of owners of cargo and or carrier</i>	99.00	9,173,970	99.00	4,925,389	99.00	2,705,085
PT Primasatya Husada Citra (PHC)								
- PT Prima Citra Nutrindo (PCN)	Surabaya	Jasa Boga/ <i>Catering Business</i>	70.00	7,227,583	70.00	5,972,803	--	--

Dalam laporan keuangan konsolidasian ini, Perusahaan dan entitas anak secara bersama-sama disebut sebagai "Grup".

In the consolidated financial statements, the Company and its subsidiaries are collectively referred to as "the Group".

PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS)

TPS didirikan dengan akta Notaris Rahmat Santoso, SH., No. 1 tanggal 1 April 1999 di Surabaya, telah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan Perundang-undangan dengan Surat Keputusan No.C-6465 HT.01.01 Th.99 tanggal 9 April 1999.

PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS)

TPS was established by Notarial deed No. 1 dated April 1, 1999 of Notary Rahmat Santoso, SH., at Surabaya. This deed was approved by Decree of Minister of Law and Regulation No. C-6465 HT.01.01 Th.99 dated April 9, 1999.

1. Umum (Lanjutan)

1. General (Continued)

TPS bergerak dalam bidang pelayanan pelabuhan petikemas dan berkedudukan di Tanjung Perak Surabaya.

TPS operates a business in container terminal services located in Port of Tanjung Perak Surabaya.

Pemegang saham TPS adalah Perusahaan (50,50%), P&O Dover (*Holdings*) Ltd. (49,00%) dan Koperasi Pegawai PT Pelindo III (KOPELINDO III) (0,50%). Modal ditempatkan dan modal disetor TPS pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 adalah Rp127.884.057.

The shareholders of TPS are the Company (50.50%), P&O Dover (Holdings) Ltd. (49.00%) and Koperasi Pegawai PT Pelindo III (KOPELINDO III) (0.50%). The issued and paid in capital of TPS as of December 31, 2017, 2016 and 2015 amounted to Rp127,884,057.

PT Pelindo Husada Citra (PHC) (Sebelumnya bernama PT Rumah Sakit Primasatya Husada Citra (RSPHC))

PT Pelindo Husada Citra (PHC) (Formely PT Rumah Sakit Primasatya Husada Citra (RSPHC))

PHC didirikan berdasarkan akta No. 1 tanggal 1 September 1999 oleh Syafran, SH., Notaris di Semarang dan memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-16306 HT.01.01-TH.1999, tanggal 13 September 1999 serta diumumkan dalam Lembaran Berita Negara No. 11 tanggal 13 September 1999.

PHC was established under Notarial deed No. 1 dated September 1, 1999 by Syafran, SH., Notary in Semarang and was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in his Decision Letter No. C-16306 HT.01.01-TH.1999, dated September 13, 1999 and was published in the State Gazette No. 11, dated September 13, 1999.

Pada tahun 2012, Perusahaan berganti nama menjadi PT Rumah Sakit Primasatya Husada Citra sesuai dengan akta No. 14 tanggal 17 April 2012, yang dibuat oleh Lutfi Afandi, SH., M.Kn., Notaris di Sidoarjo. Pemberitahuan atas perubahan nama Perusahaan tersebut telah disetujui dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Keputusan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU.59406.AH.01.02.Tahun 2012, tanggal 22 Desember 2012.

In 2012, the Company was renamed PT Rumah Sakit Primasatya Husada Citra based on notarial deed No. 14 dated April 17, 2012 by Lutfi Afandi, SH., M.Kn., Notary in Sidoarjo. Notification of changes in Company Name has been approve and recorded in Legal Administration System based on a Decision Letter from the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU.59406.AH.01.02.Year 2012, dated December 22, 2012.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 84 tanggal 27 Januari 2014 dari Notaris Kukuh Mulyo Rahardjo, SH., Notaris di Surabaya, mengenai perubahan Pasal 4 ayat 2 anggaran dasar sehubungan dengan perubahan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor. Pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar tersebut telah disetujui dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Keputusan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0032670.AH.01.09. Tahun 2014 tanggal 19 Mei 2014.

The Company's Articles of Associate have been amended several times, most recently by Deed No. 84 dated January 27, 2014 by Kukuh Mulyo Rahardjo, SH., Notary in Surabaya, regarding changes in articles 4 paragraph 2 of articles of association about changes in capital stock, and paid up capital. Notification of changes in Articles of Association has been approve and recorded in Legal Administration System based on a Decision Letter from the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-0032670.AH.01.09Year 2014 dated May 19, 2014.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) AND
SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2017, 2016 and 2015
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

1. Umum (Lanjutan)

Pada tahun 2015, Perusahaan berganti nama menjadi PT Pelindo Husada Citra sesuai dengan perubahan terakhir anggaran dasar Perusahaan dengan akta No. 8 tanggal 5 Agustus 2015, yang dibuat di hadapan Notaris Kukuh Mulyo Rahardjo, SH., Notaris di Surabaya. Pemberitahuan atas perubahan nama Perusahaan tersebut telah disetujui dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Keputusan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU.0940619.AH.01.02.Tahun 2015, tanggal 14 Agustus 2015.

PHC bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan untuk karyawan Perusahaan dan keluarganya, dan umum. PHC berkedudukan di Surabaya.

Pada 31 Desember 2017, 2016 dan 2015, pemegang saham RSPHC terdiri dari Perusahaan sejumlah 280.400.000 (angka penuh) lembar saham dengan nilai Rp140.200.000 atau (98,73%), dan Koperasi Pegawai PT Pelindo III (KOPELINDO III) sejumlah 3.600.000 (angka penuh) lembar saham dengan nilai Rp1.800.000 atau (1,27%).

PT Pelindo Citra Nutrindo

PCN didirikan berdasarkan akta No. 35 tanggal 11 Januari 2016, dari Kukuh Muljo Rahardjo, SH., Notaris di Surabaya. Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. AHU-0002328.AH.01.01 Tahun 2016 tanggal 15 Januari 2016.

Modal ditempatkan dan disetor pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp5.000.000 yang terdiri dari PT Pelindo Husada Citra sebesar Rp3.500.000 atau 70% dan PT Berlian Jasa Terminal Indonesia sebesar Rp1.500.000 atau 30%.

PCN telah mendapatkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Jasaboga yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Kota Surabaya berdasarkan sertifikat No. 503.443.51/JB-146IB/436.7.2/IV/2017 tanggal 6 April 2017. Sertifikat ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal 6 April 2017 sampai dengan 6 April 2020.

1. General (Continued)

In 2015, the Company was renamed PT Pelindo Husada Citra based on last changed by notarial deed No. 8 dated August 5, 2015 by Notary Kukuh Mulyo Rahardjo, SH., Notary in Surabaya. Notification of changes in Company Name has been approved and recorded in Legal Administration System based on a Decision Letter from the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU.0940619.AH.01.02. Year 2015, dated August 14, 2015.

PHC operates in healthcare services for Company employees and their family and public. PHC is located in Surabaya.

As of December 31, 2017, 2016 and 2015, the shareholders of RSPHC consist of the Company with 280,400,000 (full amount) shares with a value amounting to Rp140,200,000 or (98.73%), and Koperasi Pegawai PT Pelindo III (KOPELINDO III) with 3,600,000 (full amount) shares with a value amounting to Rp1,800,000 or (1.27%).

PT Pelindo Citra Nutrindo

PCN was established based on deed No. 35 dated January 11, 2016, by Kukuh Muljo Rahardjo, SH., Notary in Surabaya. The deed of establishment was approved by the Decree of Minister of Law and Human Rights of Republic of Indonesia No. AHU-0002328.AH.01.01 Year 2016 dated January 15, 2016.

The issued and paid capital as of December 31, 2017 and 2016 amounted to Rp5,000,000 consists of PT Pelindo Husada Citra amounting to Rp3,500,000 or 70% and PT Berlian Jasa Terminal Indonesia amounting to Rp1,500,000 or 30%.

PCN has obtained Certificate of Eligible Hygiene Sanitation of Catering Service provided by Health Departement of Surabaya City based on certificate No. 503.443.51/JB-146IB/436.7.2/IV/2017 dated April 6, 2017. This certificate is valid for 3 (three) years, starting from April 6, 2017 up to April 6, 2020.

1. Umum (Lanjutan)

1. General (Continued)

PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (BJTI)

BJTI didirikan dengan Akta Notaris Moendjiati Soegito, SH., No. 1 tanggal 9 Januari 2002 di Jakarta telah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. C-03606 HT.01.01 Th.2002 tanggal 5 Maret 2002.

BJTI bergerak dalam bidang jasa pelayanan bongkar muat barang di terminal/pelabuhan dan jasa terkait lainnya di Tanjung Perak serta jasa pengangkutan barang. BJTI berkedudukan di Surabaya.

BJTI telah mereklasifikasi cadangan modal sebesar Rp140.000.000 ke tambahan modal disetor yang komposisinya terdiri dari Perusahaan sebesar Rp133.000.000 dan Koperasi Pegawai Pelabuhan Indonesia III sebesar Rp7.000.000 sebagaimana yang telah diputuskan dalam Akta No. 1 tanggal 13 Januari 2014 di hadapan Notaris Stephanus R. Agus Purwanto, SH., Akta ini telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusannya No.AHU-04072.40.21.2014 tanggal 10 Juli 2014.

BJTI melakukan perubahan anggaran dasar terakhir berdasarkan akta pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.11 tanggal 23 Juli 2014 oleh Yahya Abdullah Waber, SH., Notaris di Surabaya, mengenai persetujuan penambahan modal disetor dan perubahan pasal 4 ayat 2. Penambahan modal disetor sebesar Rp270.060.000 yang terdiri dari Perusahaan sebesar Rp266.965.000 dan Koperasi Pegawai Pelabuhan Indonesia III sebesar Rp3.095.000.

Perubahan pasal 4 ayat 2 anggaran dasar Perusahaan menjadi nilai modal disetor seluruhnya sebesar Rp937.810.000 terbagi atas 937.810 (angka penuh) lembar saham dan setiap saham nominal Rp1.000, yang terdiri dari Perusahaan sebesar Rp908.215.000 dan Koperasi Pegawai Pelabuhan Indonesia III sebesar Rp29.595.000.

Akta ini telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusannya No.AHU-05306.40.21.2014 tanggal 20 Agustus 2014. Berdasarkan persetujuan tersebut, seluruh tambahan modal disetor dicatat sebagai modal saham.

PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (BJTI)

BJTI was established under the Notarial deed No. 1 dated January 9, 2002 by Moendjiati Soegito SH., Notary in Jakarta. This deed has been approved by Decree of Minister of Law and Human Rights No. C-03606 HT.01.01 Th.2002 dated March 5, 2002.

BJTI operates in forwarding (loading and unloading) services in and around ports and terminals and other related port services at Port of Tanjung Perak as well as trucking services. BJTI is located in Surabaya.

BJTI has reclassified the reserve capital of Rp140,000,000 to additional paid-in capital and the composition consist of the Company amounting to Rp133,000,000 and Koperasi Pegawai Pelabuhan Indonesia III amounting to Rp7,000,000 in which it was decided in Deed No. 1 dated January 13, 2014 by the Notary Stephanus R. Agus Purwanto, SH., The deed has been approved by the Minister of Law and Human Right of Republic of Indonesia in his decree No.AHU-04072.40.21.2014 dated July 10, 2014.

BJTI recently amended its articles of association based on Extraordinary General Shareholders' Meeting No.11 dated July 23, 2014 by Yahya Abdullah Waber, SH., Notary in Surabaya, regarding approval of additional paid in capital and changes of article 4 paragraph 2. Additional paid in capital amounted to Rp270,060,000 consists of the Company amounting to Rp266,965,000 and Koperasi Pegawai Pelabuhan Indonesia III amounting to Rp3,095,000.

The changes of article 4 paragraph 2 of articles of association of the Company is related to the authorized share capital amounting to Rp937,810,000 divided into 937,810 (full amount) share capital with nominal value of Rp1,000, which consist of the Company amounting to Rp908,215,000 and Koperasi Pegawai Pelabuhan Indonesia III amounting to Rp29,595,000.

The deed has been agreed by the Minister of Law and Human Right of Republic of Indonesia in his decision letter No.AHU-05306.40.21.2014 dated August 20, 2014. According to the approval, all additional paid-up capital would be recorded as share capital.

1. Umum (Lanjutan)

1. General (Continued)

Anggaran Dasar BJTI Telah mengalami beberapa kali Perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (Penegasan) No. 1 tanggal 1 Maret 2017 oleh Mira Irani, SH., M.Kn, Notaris di Sidoarjo, mengenai pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKAP) tahun 2017, peningkatan modal dasar menjadi Rp4.000.000.000 terbagi atas 4.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000 per lembar saham dan persetujuan reklasifikasi sebagian saldo cadangan modal menjadi modal saham sehingga nilai modal disetor seluruhnya menjadi Rp1.114.310.000 terbagi atas 1.114.310 lembar saham dengan perincian Perusahaan sebesar Rp170.923.000 dan Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia (Persero) sebesar Rp5.577.000. Perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0006656.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 18 Maret 2017.

The Articles of Association BJTI have been amended several times, most recently based on Notarial Deed of Minutes of the Annual General Shareholders Meeting of PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (Affirmation) No. 1 dated March 1, 2017 by Mira Irani, SH., M.Kn, Notary in Sidoarjo regarding the legalization of the Work Plan and budget (RKAP) of 2017, the increase in authorized capital to Rp4,000,000,000 divided into 4,000,000 shares with par value of Rp1,000 per share and the reclassification agreement of a portion of the balance of capital reserves to share capital, thus the total paid up capital becomes Rp1,114,310,000 divided into 1,114,310 shares with details of the Company amounting to Rp170,923,000 and Cooperative Employees of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) amounting to Rp5,577,000. The amendment of the articles of association was approved by the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-0006656.AH.01.02.Tahun 2017 dated March 18, 2017.

Pada 31 Desember 2017, 2016 dan 2015, komposisi pemegang saham BJTI terdiri dari Perusahaan sejumlah 1.079.138 (angka penuh) lembar saham dengan nilai Rp1.079.138.000 (96,84%) pada 31 Desember 2017, dan 908.215 (angka penuh) lembar saham dengan nilai Rp908.215.000 atau (96,84%) pada 31 Desember 2016 dan 2015, dan Koperasi Pegawai PT Pelindo III (KOPELINDO III) sejumlah 35.172 (angka penuh) lembar saham dengan nilai Rp35.172.000 atau (3,16%) pada 31 Desember 2017 dan 29.595 (angka penuh) lembar saham dengan nilai Rp29.595.000 atau (3,16%) pada 31 Desember 2016 dan 2015.

As of December 31, 2017, 2016 and 2015, the composition of the shareholders of BJTI consisted of the Company of 1,079,138 (full amount) shares of value Rp1,079,138,000 or (96,84%) as of December 31, 2017, and 908,215 (full amount) shares of a value of Rp908,215,000 or (96.84%) as of December 31, 2016, and 2015, and Koperasi Pegawai PT Pelindo III (KOPELINDO III) of 35,172 (full amount) shares with a value of Rp35,172,000 or (3.16%) as of December 31, 2017 and 29,595 (full amount) shares with a value of Rp29,595,000 or (3.16%) as of December 31, 2016 and 2015.

Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, memutuskan bahwa Para Pemegang Saham menyetujui uang muka penambahan modal yang disetor dan ditempatkan oleh PT Usaha Era Pratama Nusantara sebagai Pemegang Saham mayoritas PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (BKMS), entitas asosiasi dari BJTI, sebesar Rp226.000.000 dan BJTI tidak perlu untuk melakukan penambahan modal yang disetor dan ditempatkan pada PT BKMS.

The Circular Decision of Shareholders as a Substitute of Extraordinary Shareholders General Meeting, had decided that Shareholders approved of advance of additional paid in capital from PT Usaha Era Pratama Nusantara as the majority Shareholder of PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (BKMS), associates entity of BJTI, amounting to Rp226,000,000 and BJTI does not need to make additional of paid in capital in PT BKMS.

1. Umum (Lanjutan)

1. General (Continued)

Para pemegang saham BJTI berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. KU.04/15/P.III-2017 tanggal 4 Mei 2017, memutuskan hal-hal sebagai berikut:

The BJTI shareholders based on Minutes of Annual General Shareholder Meeting No. KU.04/15/P.III-2017 dated May 4, 2017, decided the following:

1. Menyetujui penggunaan laba tahun 2016 sebesar Rp129.665.515, dengan komposisi sebesar 20% atau Rp25.933.103 sebagai dividen, dan sebesar 80% atau Rp103.732.412 sebagai cadangan modal.
2. Menghapusbukkan aset tetap yang mempunyai umur ekonomis di atas 5 tahun dengan nilai buku (residu) sebesar Rp28.062.
3. Menyetujui pelepasan dan penjualan seluruh kepemilikan saham Perusahaan pada PT Berkah Multi Cargo (BMC) dengan nilai wajar sesuai nilai buku BMC per 31 Desember 2016 (*audited*).
4. Menyetujui pembelian saham di PT Berkah Industri Mesin Angkat (BIMA) yang dimiliki oleh Dinson Industries Corporation, pemegang saham minoritas, sesuai dengan nilai buku BIMA per 31 Desember 2016 (*audited*).

1. *Approved the use of profits for the year 2016 amounting to Rp129,665,515, with composition of 20% or Rp25,933,103 as dividend, and of 80% or Rp103,732,412 as appropriation of retained earnings.*
2. *Write-off of fixed assets that had economically used for more than 5 years with book value (residual) amounting to Rp28,062.*
3. *Approved of the disposal and sale of all capital ownership of the Company in PT Berkah Multi Cargo (BMC) at fair value based on BMC book value as of December 31, 2016 (audited).*
4. *Approved of purchase of capital stock in PT Berkah Industri Mesin Angka (BIMA) owned by Dinson Industries Corporation, minority shareholder, based on book value of BIMA as of December 31, 2016 (audited).*

PT Berlian Manyar Sejahtera (BMS)

BMS merupakan entitas anak BJTI yang didirikan berdasarkan Akta No. 12 oleh Notaris Stephanus Raden Agus Purwanto, SH., tanggal 12 Juni 2012. PT BMS secara resmi telah menjadi Badan Usaha Pelabuhan (BUP), berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan No. KP.164 Tahun 2013 tanggal 15 Februari 2013.

PT Berlian Manyar Sejahtera (BMS)

BMS, a subsidiary of BJTI, was established under Notarial Deed No. 12 by the Notary Stephanus Raden Agus Purwanto, SH., dated June 12, 2012. PT BMS had officially become Badan Usaha Pelabuhan (BUP), by the Minister of Transportation No. KP.164 Year 2013 dated February 15, 2013.

Anggaran Dasar BMS telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta No. 1 dari Notaris Andayani Risilawati SH., MH., tanggal 12 Nopember 2014, mengenai penambahan modal disetor dari Perusahaan dan PT Usaha Era Pratama Nusantara masing-masing sebesar Rp33.000.000 dan Rp22.000.000. Akta ini telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-09059.40.21.2014 tanggal 1 Desember 2014.

BMS's Articles of Association have been amended several times, recently by Deed No. 1 by Notary Andayani Risilawati., SH., MH., dated November 12, 2014, have approved the additional paid up capital from the Company and PT Usaha Era Pratama Nusantara amounting to Rp33,000,000 and Rp22,000,000, respectively. The deed has been agreed by the Minister of Law and Human Right of Republic Indonesia by its letter No.AHU-09059.40.21.2014 dated December 1, 2014

BMS bergerak di bidang pelayanan jasa terminal bongkar muat barang dan petikemas serta kegiatan yang berhubungan dengan dan distribusi barang.

BMS is engaged in terminal services of loading and unloading of goods and containers as well as activities to and distribution of goods.

1. Umum (Lanjutan)

1. General (Continued)

Modal ditempatkan dan disetor pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 adalah sebesar Rp721.000.000, yang terdiri dari Perusahaan sebesar Rp432.600.000 atau 60% dan PT Usaha Era Pratama Nusantara sebesar Rp288.400.000 atau 40%.

The issued and paid up capital as of December 31, 2017, 2016 and 2015 amounting to Rp721,000,000, consists of the Company's capital amounting to Rp432,600,000 or 60% and PT Usaha Era Pratama Nusantara's capital amounting to Rp288,400,000 or 40%.

PT Pelindo Properti Indonesia (PPI)

Anggaran dasar PPI telah mengalami perubahan melalui Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan telah diaktakan dengan akta No. 3 tanggal 7 April 2015 dari Yahya Abdullah Waber, SH., Notaris di Surabaya sehubungan dengan perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, perubahan modal dasar dan modal yang disetor, serta perubahan susunan pengurus PPI. Perubahan tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusannya No. AHU-0933556.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 17 April 2015.

PT Pelindo Properti Indonesia (PPI)

PPI, a subsidiary of BJTI, was established under Notarial Deed No.5 by the Notary Yahya Abdullah Waber, SH., dated December 5, 2014 and has been approved by Minister of Law and Human Rights No. AHU-0130014.40.80.2014 dated December 12, 2014. Articles of association has been amended most recently according to Notarial Deed by Notary Yatiningsih, SH., MH., and was declared to the minster of Law and Human Rights by its letter No. AHU-AH.01.03-0084640 dated September 29, 2016. PPI is engaged in the construction and services.

PPI merupakan entitas anak BJTI yang didirikan berdasarkan Akta No. 5 oleh Notaris Yahya Abdullah Waber, SH., tanggal 5 Desember 2014 dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0130014.40.80.2014 tanggal 12 Desember 2014. Anggaran dasar telah mengalami perubahan, terakhir berdasarkan akta dari Notaris Yatiningsih, SH., MH., No. 190 tanggal 22 Agustus 2016 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan surat keputusan No. AHU-AH.01.03-0084640 tanggal 29 September 2016. PPI bergerak di bidang pembangunan dan jasa.

PPI, a subsidiary of BJTI, was established under Notarial Deed No.5 by the Notary Yahya Abdullah Waber, SH., dated December 5, 2014 and has been approved by Minister of Law and Human Rights No. AHU-0130014.40.80.2014 dated December 12, 2014. Articles association has been amended most recently according to Notarial Deed by Notary Yatiningsih, SH., MH., and was declared to the minster of Law and Human Rights by its letter No. AHU-AH.01.03-0084640 dated September 29, 2016. PPI is engaged in the construction and services.

PPI bergerak dalam bidang usaha Pembangunan dan Jasa dan berkedudukan di Surabaya.

PPI operates in development and services, and located in Surabaya.

Modal ditempatkan dan disetor pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp85.000.000, Rp85.000.000 dan Rp55.000.000 yang terdiri dari BJTI sebesar Rp84.920.000 atau 99,91% dan Koperasi Pegawai Pelindo III senilai Rp80.000 atau 0,09% pada tahun 2017 dan BJTI sebesar Rp54.950.000 atau 99,91% dan Rp50.000 atau 0,09% pada tahun 2016 dan 2015.

The issued and paid capital as of December 31, 2017, 2016 and 2015 amounting to Rp85,000,000, Rp85,000,000 and Rp55,000,000, respectively, consists of the BJTI amounting to Rp84,920,000 or 99.91% and Koperasi Pegawai Pelindo III amounting to Rp80,000 or 0.09% in 2017 and the BJTI amounting to Rp54,950,000 or 99.91% and Koperasi Pegawai Pelindo III amounting to Rp50,000 or 0.09% in 2016 and 2015.

1. Umum (Lanjutan)

1. General (Continued)

PT Berkah Industri Mesin Angkat (BIMA)

BIMA merupakan entitas anak BJTI didirikan berdasarkan Akta No. 6 oleh Notaris Yahya Abdullah Waber, SH., tanggal 11 November 2015 dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.AHU-2468002.AH.01.01 tanggal 23 November 2015. BIMA bergerak di bidang industri, perdagangan dan jasa.

Perubahan terakhir anggaran dasar Perusahaan berdasarkan Akta No. 2 tanggal 4 Desember 2017 Tentang penambahan modal ditempatkan dan disetor oleh Kuku Muljo Rahardjo, SH., Notaris di Surabaya. Akta perubahan tersebut telah dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No.AHU-AH.01.03-0199882 tanggal 12 Desember 2017.

Modal ditempatkan dan disetor pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp7.000.000 yang terdiri dari Perusahaan sebesar Rp6.750.000 atau 90% dan Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III sebesar Rp250.000 atau 10% dan pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 sebesar Rp2.500.000, yang terdiri dari Perusahaan sebesar Rp1.500.000 atau 60% dan PT Dinson Industries sebesar Rp1.000.000 atau 40%.

PT Berkah Multi Cargo (BMC)

BMC merupakan entitas anak BJTI, yang didirikan berdasarkan Akta No. 17 oleh Notaris Yohana S. Aminah Hadijanto, SH., MKn., tanggal 16 Desember 2015 dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU.2473417.AH.01.01 tanggal 21 Desember 2015. BMC bergerak di bidang jasa bongkar muat barang dari dan ke kapal.

Berdasarkan Akta No. 340 tanggal 22 Juni 2017, saham milik Perusahaan sebanyak 990 lembar saham atau Rp990.000 dijual dengan harga jual sesuai dengan nilai nominal saham termasuk laba ditahan per tanggal 31 Desember 2016 yaitu sejumlah Rp999.627 kepada:

1. PT Pelindo Marine Service sebesar 90% atau 900 lembar saham atau senilai Rp900.000 dengan harga jual Rp908.752.

PT Berkah Industri Mesin Angkat (BIMA)

BIMA, a subsidiary of BJTI, was established according to Notarial Deed No.6 by the Notary Yahya Abdullah Waber, SH., dated November 11, 2015 and has been approved by Minister of Law and Human Rights by its letter No.AHU-2468002.AH.01.01 dated November 23, 2015. BIMA is engaged in the industry, trade and services.

The latest changes in the Company's articles of association was based on Deed No. 2 dated December 4, 2017 regarding the additional paid up capital by Kuku Muljo Rahardjo, SH., Notary in Surabaya. The change of notarial deed has been recorded by the Minister of Law and Human Rights of the Republic Indonesia in Decree No.AHU-AH.01.03-0199882 dated December 12, 2017.

The issued and paid up capital as of December 31, 2017 amounted to Rp7,000,000 which consists of Rp6,750,000 or 90% and Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III amounting to Rp250,000 or 10% and as of December 31, 2016 and 2015 amounting to Rp2,500,000, which consists of the Company's capital Rp1,500,000 or 60% and PT Dinson Industries amounting to Rp1,000,000 or 40%.

PT Berkah Multi Cargo (BMC)

BMC a subsidiary of BJTI, was established according to Notarial Deed No.17 by the Notary Yohana S. Aminah Hadijanto, SH., MKn., dated December 16, 2015 and has been approved by Minister of Law and Human Rights No.AHU.2473417.AH.01.01 dated December 21, 2015. BMC is engaged goods stevedoring services.

Based on the deed No. 340 dated June 22, 2017, shares owned by the Company as much as 990 shares or Rp990,000 were sold at the selling price corresponds the par value of the share including retained earnings as of December 31, 2016 of Rp999,627 to:

1. *PT Pelindo Marine Service for 90% or 900 shares equal to Rp900,000 with the selling price of Rp908,752.*

1. Umum (Lanjutan)

1. General (Continued)

2. Koperasi Pegawai PT Pelabuhan III sebesar 9% saham Perseroan atau sebanyak 90 lembar saham atau senilai Rp90.000 dengan nilai harga jual saham Rp90.875.

2. Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III for 9% or 90 shares of the Company share or equal to Rp90,000 with the selling price of Rp90,875 per share.

Modal ditempatkan dan disetor pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 adalah sebesar Rp1.000.000 yang terdiri dari Perusahaan sebesar Rp990.000 atau 99% dan Koperasi Berlian Jasa Terminal Indonesia sebesar Rp10.000 atau 1%.

The issued and paid up capital as of December 31, 2017, 2016 and 2015 amounting to Rp1,000,000, consists of the Company's capital amounting to Rp990,000 or 99% and Koperasi Berlian Jasa Terminal Indonesia amounting to Rp10,000 or 1%.

PT Berlian Manyar Stevedore (BMST)

BMST merupakan entitas anak BJTI, yang didirikan berdasarkan Akta No. 241 oleh Notaris Mira Irani, SH., M.K.n, tanggal 28 Januari 2016 dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0013280.AH.01.11 tanggal 30 Januari 2016. BMST bergerak dalam bidang jasa pelayanan bongkar muat barang di terminal / pelabuhan.

PT Berlian Manyar Stevedore (BMST)

BMST a subsidiary of BJTI, was established under Notarial Deed No.241 by the Notary Mira Irani, SH., M.K.n, dated January 28, 2016 and has been approved by Minister of Law and Human Rights by its letter No. AHU-0013280.AH.01.11 dated January 30, 2016. BMST operates in loading and unloading services in and around ports / terminals.

Modal ditempatkan dan disetor pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 adalah sebesar Rp500.000, yang terdiri dari Perusahaan sebesar Rp300.000 atau 60% dan PT Usaha Era Pratama Nusantara sebesar Rp200.000 atau 40%.

The issued and paid capital as of December 31, 2017, 2016 and 2015 amounted to Rp500,000, which consists of the Company's capital Rp300,000 or 60% and PT Usaha Era Pratama Nusantara amounting to Rp200,000 or 40%.

PT Terminal Curah Semarang (TCS)

TCS merupakan entitas anak BJTI yang didirikan berdasarkan Akta No.189 oleh Notaris Mira Irani, SH., M.K.n, tanggal 15 Desember 2015 dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.AHU-0003534.AH.01.01 tanggal 21 Januari 2016 serta telah mengalami perubahan terakhir dengan Notaris Mira Irani, SH.,MKn., No.2 tanggal 1 Desember 2016 mengenai penambahan modal disetor dari Perusahaan dan PT Andahesa Abadi masing-masing sebesar Rp28.050.000 dan Rp26.950.000, dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.AHU-0026062.AH.01.02 tanggal 30 Desember 2016. TCS bergerak di bidang curah cair dan gas.

PT Terminal Curah Semarang (TCS)

TCS a subsidiary of BJTI was established, based on the notarial deed by Mira Irani, SH., M.K.n, dated December 15, 2015 and has been approved by Minister of Law and Human Rights by its letter No.AHU-0003534.AH.01.01 dated January 21, 2016 and has been amended most recently according to Notarial Deed No. 2 dated December 1, 2016 by the Notary Mira Irani, SH.,MKn. have approved the additional paid up capital from the Company and PT Andahesa Abadi amounting to Rp28,050,000 and Rp26,950,000, and has been approved by Minister of Law and Human Rights by its letter No.AHU-0026062.AH.01.02 dated December 30, 2016. TCS is engaged in liquid bulk and gas.

Modal ditempatkan dan disetor pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 adalah sebesar Rp60.000.000 yang terdiri dari BJTI sebesar Rp30.600.000 atau 51% dan PT Andahesa Abadi sebesar Rp29.400.000 atau 49%.

The issued and paid capital as of December 31, 2017, 2016 and 2015 amounted to Rp60,000,000, which consists of BJTI amounting to Rp30,600,000 or 51% and PT Andahesa Abadi amounting to Rp29,400,000 or 49%.

1. Umum (Lanjutan)

1. General (Continued)

PT Pelindo Marine Service (PMS)

Berdasarkan Akta No. 1 tanggal 1 Desember 2014, telah dilakukan pergantian Direksi PMS dan perubahan modal disetor PMS dari Rp148.000.000 menjadi Rp260.500.000. Hal ini menyebabkan kepemilikan saham Perusahaan dan Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Surabaya berubah menjadi masing-masing sebesar Rp255.000.000 atau 97,89% dan Rp5.500.000 atau 2,11%. Pemberitahuan Perubahan tersebut telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-09637.40.21.2014 tanggal 12 Desember 2014.

Anggaran dasar PMS mengalami beberapa kali perubahan, antara lain berdasarkan Akta No. 8 tanggal 15 November 2016 dari Notaris Stephanus R. Agus Purwanto, SH., notaris di Surabaya, tentang pergantian Komisaris PMS. Pemberitahuan Perubahan tersebut telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0102046 tanggal 24 November 2016.

PT Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS)

APBS merupakan entitas anak PMS yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 9 tanggal 21 April 2014 dari Notaris Ivan Gelium Lantu, SH., M.Kn, notaris di Depok. Akta pendirian ini telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. AHU-06051.40.10.2014 tanggal 25 April 2014. PT APBS memperoleh surat persetujuan Penanaman Modal Asing dari Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal sesuai dengan izin prinsip No. 1219/I/IP/PMA/2014 tanggal 21 April 2014. Perubahan anggaran dasar terakhir berdasarkan Akta No 7 tanggal 23 Pebruari 2017, tentang Perubahan Dewan Komisaris dan Direktur serta Perubahan Susunan Pemegang Saham PMS. Pemberitahuan perubahan data perseroan telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat No AHU-AH.01.03-0085613 tanggal 24 Februari 2017.

PT Pelindo Marine Service (PMS)

Based on the Deed No. 1 dated December 1, 2014, there was changes on PMS board of Director and the changes of PMS paid up capital from Rp148,000,000 to Rp260,500,000. Due to the changes in ownership, the shares owned by the Company and Koperasi Pegawai PT Pelindo III (Persero) Surabaya amounted to Rp255,000,000 or 97.89% and Rp5,500,000 or 2.11%, respectively. The Deed of Amendment was received by the Minister of Justice and Human Right of Republic Indonesia in its decree No.AHU-09637.40.21.2014 dated December 12, 2014.

The articles of associates of PMS have been amended several times, among others, based on the Deed No. 8 dated November 15, 2016 by Notary Stephanus R. Agus Purwanto, SH., notary in Surabaya, there was a change on PMS board of Commissioner. The deed of amendment was received by the Minister of Justice and Human Right of Republic Indonesia in its decree No. AHU-AH.01.03-0102046 dated November 24, 2016.

PT Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS)

APBS is a subsidiary of PMS, which was established under notarial deed No. 9 dated April 21, 2014 of Notary Ivan Gelium Lantu, SH., M.Kn, notary in Depok. The deed of establishment was approved by the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decision Letter No. AHU-06051.40. 10.2014 dated April 25, 2014. PT APBS obtained an approval of a foreign investment from the chairman of Investment Coordinating Board based on Principe License No. 1219/I/IP/PMA/2014 dated April 21, 2014 The last amendment was through Deed No. 7 dated February 23, 2017, on the changes in the Board of Commissioners and Director and the Changes in the Composition of Shareholders of PMS. The amendment has been received by the Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia in accordance with the letter No. AHU-AH.01.03-008513 dated February 24, 2017.

1. Umum (Lanjutan)

1. General (Continued)

PT Pelindo Energi Logistik (PEL)

PEL merupakan entitas anak PMS yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 2 tanggal 9 September 2014 dari Notaris Stephanus Raden Agus Purwanto, SH., notaris di Surabaya. Akta pendirian ini telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. AHU-2963.40.10.2014 tanggal 14 Oktober 2014. Perubahan anggaran dasar terakhir adalah berdasarkan Akta No 11 tanggal 23 November 2016 oleh Notaris R. Agus Purwanto, SH., tentang perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi. Pemberitahuan atas perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi berdasarkan akta tersebut telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0102051 tanggal 24 November 2016.

Perubahan Anggaran Dasar terakhir adalah berdasarkan Akta No. 3 tanggal 30 November 2017 oleh Notaris Amanda Mirza Ervariana, SH., M.kn, notaris di Gresik, tentang perubahan peralihan saham, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, berdasarkan surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dicatat dalam Surat Keputusannya No. AHU-AH.01.03-0205198 tanggal 23 Desember 2017.

PT Terminal Teluk Lamong (TTL)

PT Terminal Teluk Lamong didirikan berdasarkan akta No. 309 tanggal 30 Desember 2013, dari Yatiningsih, SH., Master Hukum, Notaris di Surabaya. Akta pendirian Akta pendirian tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. AHU-10997.AH.01.01 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami perubahan dan terakhir dengan akta No. 311 tanggal 30 April 2015 dari Yatiningsih, SH., MH., Notaris di Surabaya. Perubahan tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusannya No. AHU-AH.01.03-0935117 tanggal 27 Mei 2015. Perusahaan menerima Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 749 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Usaha kepada Perusahaan sebagai Badan Usaha Pelabuhan tanggal 5 September 2014.

PT Pelindo Energi Logistik (PEL)

PEL a subsidiary of PMS, was established under Notarial Deed No. 2 dated September 9, 2014 of Notary Stephanus Raden Agus Purwanto, SH., notary in Surabaya. The Deed of establishment was approved by the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decision Letter No. AHU-2963.40.10.2014 dated October 14, 2014. The Last Amendment in the articles association is based on notarial deed No.11 dated November 23, 2016 of Notary Raden Agus Purwanto, SH., regarding the changes of Board of Commissioner and Director. The announcement regarding the changes of Board of Commissioner and Director based on the deed has been received by Ministry of Law and Human Right of Republic Indonesia based on decree No. AHU-AH.01.03-0102051 dated on Nopember 24, 2016.

The latest Amendment in the Article of Associate was based on Notarial Deed No. 3 dated November 30, 2017 by Amanda Mirza Ervariana, SH., M.kn, notary in Gresik, regarding the changes of transfer of shares, which has been received and recorded in the Legal Entity Administration System based on the letter of Ministry of Justice of the Republic of Indonesian according to Decree No. AHU-AH.01.03-0205198 dated on December 23, 2017.

PT Terminal Teluk Lamong (TTL)

PT Terminal Teluk Lamong was established under deed No. 309 dated December 30, 2013, by Yatiningsih, SH., Master of Laws, Notary in Surabaya. The deed of establishment was approved by the Decree of Minister of Law and Human Rights of Republic of Indonesia No. AHU-10997.AH.01.01 Year 2014 dated March 13, 2014.

The Company's articles of association have been amended and the latest was based on notarial deed No. 311 dated April 30, 2015 by Yatiningsih, SH., MH., Notary in Surabaya. The amendment was approved by the Decree of Minister of Law and Human Rights of Republic of Indonesia No.AHU-AH.01.03-0935117 dated May 27, 2015. The Company has received the Decree No. KP 749 Year 2014 on the Granting License for the Company as a Business Entity Port of on September 5, 2014.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) AND
SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2017, 2016 and 2015
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

1. Umum (Lanjutan)

PT Terminal Teluk Lamong bergerak dalam bidang Usaha Jasa Kepelabuhanan yang mengedepankan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dan bertempat kedudukan di Surabaya. Pemegang Saham TTL adalah Perusahaan sebesar Rp134.325.000 atau 99.5%, dan Koperasi Pegawai PT Pelindo III (KOPELINDO III) sebesar Rp675.000 atau 0,5%.

TTL menerima Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 749 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Usaha kepada Perusahaan sebagai Badan Usaha Pelabuhan tanggal 5 September 2014.

Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Terminal Teluk Lamong tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2016, No. KU.04/14/P.III-2017 tanggal 4 Mei 2017 menyatakan bahwa menyetujui penjualan saham PT Lamong Energi Indonesia kepada Koperasi Pegawai Pelabuhan Indonesia III paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen) dengan pelunasan pembelian saham paling lama 3 (tiga) tahun.

PT Lamong Energi Indonesia (LEGI)

LEGI merupakan entitas anak TTL yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Yatiningsih, SH., MH. No. 58 tanggal 8 Desember 2014, di Surabaya. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No.AHU-0005031.AH.01.01 tanggal 3 Februari 2015. Modal ditempatkan dan disetor pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp9.100.000 yang terdiri dari PT Terminal Teluk Lamong sebesar Rp4.641.000 atau 51% dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk sebesar Rp4.459.000 atau 49%.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Luar Biasa PT Lamong Energi Indonesia (LEGI) No. 116 tanggal 22 Desember 2016, oleh Yatiningsih, SH., MH., notaris di Surabaya, Para Pemegang Saham memutuskan mengenai persetujuan peralihan keseluruhan kepemilikannya saham PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) di LEGI sebesar 4.461 lembar saham atau 49% kepemilikannya kepada TTL.

TTL menerima Surat No. AHU-AH.01.03-0025782 tanggal 20 Januari 2017 dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia perihal penerimaan pemberitahuan perubahan peralihan saham LEGI tersebut.

1. General (Continued)

PT Terminal Teluk Lamong is engaged in the port services that promotes the principles of Good Corporate Governance, located in Surabaya. Shareholders amount of TTL are the Company with the total amount of Rp134,325,000 or 99.5%, and Koperasi Pegawai PT Pelindo III (KOPELINDO III) with the total amount of Rp675,000 or 0.5%.

TTL has received the Decree of Minister of Transportation No. KP 749 Year 2014 on the Granting License for the Company as a Port Business Entity of September 5, 2014.

Shareholders Meeting of PT Terminal Teluk Lamong regarding Approval of Annual Report and Ratification of Financial Statement Year 2016, No. KU.04/14/P.III-2017 dated May 4, 2017 stated the approval of sale of shares of PT Lamong Energi Indonesia to Koperasi Pegawai Pelabuhan Indonesia III at most amounting to 10% (ten percent) with the settlement of share purchase for a maximum of 3 (three) years.

PT Lamong Energi Indonesia (LEGI)

LEGI a subsidiary of TTL, was established under under under Notaria deed No. 58 dated December 8, 2014, by Yatiningsih, SH., MH., Notary in Surabaya. The deed of establishment was approved by the Decree of Minister of Law and Human Rights of Republic of Indonesia No. AHU-0005031.AH.01.01 on February 3, 2015. The issued and paid of capital as of December 31, 2015 amounted to Rp9,100,000 which consists of PT Terminal Teluk Lamong amounting to Rp4,641,000 or 51% and PT Adhi Karya (Persero) Tbk amounting to Rp4,459,000 or 49%.

Based on the Deed of Extraordinary Shareholders PT Lamong Energi Indonesia (LEGI) No. 116 dated December 22, 2016 by Yatiningsih, SH., MH., notary in Surabaya, the Shareholders decided on the approval of transfers of all shares at LEGI from PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) amounting to 4,461 shares or 49% ownership to TTL.

TTL received letter No. AHU-AH.01.03-0025782 dated January 20, 2017 from Decree of Minister of Law and Human Rights of Republic of Indonesia regarding of receipt of the notification regarding the changes of LEGI's shareholder.

1. Umum (Lanjutan)

1. General (Continued)

LEGI telah mengirimkan Surat No. E.100/LEGI/IV/2017 tanggal 26 Mei 2017 kepada Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral perihal Permohonan Ijin Usaha Sementara Usaha Kelistrikan.

LEGI had sent letter No. E.100/LEGI/IV/2017 dated May 26, 2017 to Head of Department of Energy and Mineral Resources regarding Temporary Business License Application Permit.

PT Pelindo Daya Sejahtera (PDS)

Pada tanggal 24 Februari 2014, Perusahaan telah melakukan akuisisi atas 90% kepemilikan saham pada PT Persada Jasa Utama (PJU) dari pemilik saham lama, yaitu 89% dari Koperasi Pegawai PT Pelindo III (KOPELINDO III), dan 1% dari Koperasi Pegawai Republik Indonesia Swadaya Bandar Gresik (KSBG), dengan total imbalan pembelian yang dialihkan sebesar Rp3.231.000 (Lihat Catatan 16).

PT Pelindo Daya Sejahtera (PDS)

On February 24, 2014, the Company acquired 90% shares in PT Persada Jasa Utama (PJU) from the previous owner that is 89% of the Koperasi Pegawai PT Pelindo III (KOPELINDO III), and 1% of the Koperasi Pegawai Republik Indonesia Swadaya Bandar Gresik (KSBG), with purchase consideration transferred of Rp3,231,000 (See Note 16).

Anggaran dasar PDS telah mengalami beberapa kali perubahan, antara lain berdasarkan Akta No. 151 tanggal 23 Juli 2012 oleh Inas Abdullah Thalib, SH., Notaris di Gresik, tentang peningkatan modal dasar yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU06841.AH.01 tanggal 18 Februari 2014. Perubahan anggaran dasar lain berdasarkan Akta No. 254 tanggal 30 Oktober 2013 oleh Yatiningsih, SH., MH., notaris di Surabaya, tentang penambahan modal disetor dengan penerimaan pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.10-09860 tanggal 10 Maret 2014, serta Akta No.183 tanggal 19 Maret 2014 oleh Yatiningsih, SH., MH., notaris di Surabaya tentang perubahan modal dasar PDS dari sebelumnya Rp2.000.000 menjadi Rp50.000.000. Perubahan anggaran dasar ini telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-00482.40.20.2014 tanggal 15 April 2014.

PDS's articles the Association have been amended several times, among others, based on Deed No. 151 dated July 23, 2012 by Notary Inas Abdullah Talib, SH., Notary in Gresik, regarding the increase in authorized capital which was approved by the Decree of Minister of Law and Human Rights of Republic of Indonesia No. AHU06841.AH.01 dated February 18, 2014. The other amendment in the articles of association is based on Deed No. 254 dated October 30, 2013 by Yatiningsih, SH., MH., notary in Surabaya regarding the increase in paid in capital based on acceptance on the notification of change in the articles of association by the Ministes of Law and Human Rights of Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.10-09860 dated March 10, 2014, as well as Act No. 183 dated March 19, 2014 by Yatiningsih, SH., MH., notary in Surabaya regarding amendment of the PDS's authorized capital from Rp2,000,000 to Rp50,000,000. Changes to the articles of association was approved by the Decree of Minister of Law and Human Rights of Republic of Indonesia No. AHU 00482.40.20.2014 dated April 15, 2014.

Perubahan anggaran dasar Akta No. 212 tanggal 28 Mei 2015 oleh Notaris Yatiningsih, SH., MH., notaris di Surabaya, tentang pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa mengenai penambahan maksud dan tujuan Perusahaan. Perubahan anggaran dasar ini telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0948723.AH.01.02.2015 tanggal 23 Desember 2015.

The amendment of the articles of association of the Company is based on Deed No. 212 dated May 28, 2015 by Notary Yatiningsih, SH., MH., notary in Surabaya based on the Extraordinary General Meeting of the shareholders regarding the addition of the purpose and objectives of the Company. This amendment in of the articles of association was approved by the Decree of Minister of Law and Human Rights of Republic of Indonesia No. AHU-0948723.AH.01.02.2015 dated December 23, 2015.

1. Umum (Lanjutan)

1. General (Continued)

Perubahan anggaran dasar terakhir adalah Akta No. 76 tanggal 10 Maret 2017 oleh Notaris Yatiningsih, SH., MH., notaris di Surabaya, tentang pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa mengenai perubahan Direksi dan Komisaris, yang telah diterima pemberituannya oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0121753 TAHUN 2017 tanggal 27 Maret 2017.

The last amendment in the articles of association of the Company is based on Deed No. 76 dated March 10, 2017 by Notary Yatiningsih, SH., MH., notary in Surabaya based on the Extraordinary Decision of the General Minutes of Meeting of the Shareholders regarding the change of Directors and Commissioners, which has been approved by the Ministry of Law and Human Rights of Republic of Indonesia based on decision letter No. AHU-AH.01.03-0121753 TAHUN 2017 dated March 27, 2017.

Komposisi Pemegang saham PDS, berdasarkan Anggaran Dasar adalah Perusahaan sebesar Rp15.750.000 (90%) dan Koperasi Pegawai PT Pelindo III (KOPELINDO III) sebesar Rp1.750.000 (10%).

The composition of the Shareholders of PDS based on the articles of association are the Company amounting to Rp15,750,000 (90%) and Koperasi Pegawai PT Pelindo III (KOPELINDO III) amounting to Rp1,750,000 (10%).

**PT Tanjung Emas Daya Sejahtera (TEDS)
(Sebelumnya bernama PT Pelindo Daya
Solusi)**

**PT Tanjung Emas Daya Sejahtera (TEDS)
(Formerly PT Pelindo Daya Solusi)**

TEDS merupakan entitas anak PDS yang didirikan dengan akta No. 360 tanggal 29 September 2014, dari Yatiningsih, SH., MH., Notaris di Surabaya, yang akta pendiriannya telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-306131.40.10.2014 tanggal 21 Oktober 2014.

TEDS, a subsidiary of PDS, was established under deed No. 360 dated September 29 2014, by Yatiningsih, SH., MH., Notary in Surabaya, in which the deed of establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights No. AHU-306131.40.10.2014 dated October 21, 2014.

Anggaran dasar PT Pelindo Daya Solusi mengalami perubahan sesuai Akta No. 7 tanggal 5 Januari 2015 dari notaris yang sama mengenai perubahan nama dari PT Pelindo Daya Solusi menjadi PT Tanjung Emas Daya Sejahtera, tempat kedudukan, susunan dewan komisaris dan direksi. Perubahan anggaran dasar tersebut telah diterima dan disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0000225.AH.01.02.TAHUN2015 tanggal 8 Januari 2015. PT Tanjung Emas Daya Sejahtera bergerak dibidang Usaha Tally yang meliputi kegiatan usaha menghitung, mengukur, menimbang dan membuat catatan mengenai muatan, untuk kepentingan pemilik muatan dan atau pengangkut, berkedudukan di Surabaya.

The Articles of Association of PT Pelindo Daya Solusi have been amended based on the Deed No. 7 dated January 5, 2015 from the same notary regarding the change in name from PT Pelindo Daya Solusi to PT Tanjung Emas Daya Sejahtera, domicile, board of commissioners and directors. The amendment in the articles has been accepted and approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-0000225.AH.01.02.TAHUN2015 dated January 8, 2015. PT Tanjung Emas Daya Sejahtera is engaged in Tally Business including counting, measuring, weighing and making notes of the charge, for the benefit of owners of cargo and or carrier, located in Surabaya.

Pemegang Saham PT Tanjung Emas Daya Sejahtera adalah PDS sebesar Rp1.980.000 atau 99%, dan Koperasi pegawai PT Pelindo III (KOPELINDO III) sebesar Rp20.000 atau 1%.

The Shareholders of PT Tanjung Emas Daya Sejahtera are PDS with the total amount of Rp1,980,000 or 99%, and Koperasi Pegawai (employee cooperative) of PT Pelindo III (KOPELINDO III) with the amount of Rp20,000 or 1%.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) AND
SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2017, 2016 and 2015
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

2. Ketentuan Kepelabuhan

2. Port Regulations

Perusahaan pelabuhan di Indonesia pada umumnya dan yang dikelola oleh Perusahaan pada khususnya tunduk pada Undang-undang dan peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan, beberapa peraturan penting antara lain adalah:

- a. Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, tanggal 7 Mei 2008.
- b. Peraturan Pemerintah No.61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, tanggal 20 Oktober 2009, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2015.
- c. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No.KP.88/2011 tanggal 14 Februari 2011 tentang pemberian ijin usaha kepada Perusahaan sebagai Badan Usaha Pelabuhan (BUP), lihat Catatan 1a.
- d. Surat Menteri Perhubungan No.HK.003/1/11. Phb 2011 tanggal 6 Mei 2011 perihal Pelaksanaan Ketentuan Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran terhadap PT Pelabuhan Indonesia I, II, III dan IV (Persero).
- e. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementrian Perhubungan.
- f. Peraturan menteri Perhubungan No. PM 6 Tahun 2013 tentang Jenis, Struktur, dan Golongan Tarif Jasa Kepelabuhanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. 15 Tahun 2014.
- g. Peraturan Menteri Perhubungan No. 15 Tahun 2015 tentang Konsesi dan Bentuk Kerjasama Lainnya Antara pemerintah dengan Badan Usaha Pelabuhan di Bidang Kepelabuhanan.
- h. Peraturan Menteri No. PM 51 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan Pelabuhan Laut.
- i. Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 69 Tahun 2015 Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
- j. Perjanjian Konsesi antara Kantor Otoritas pelabuhan Utama Tanjung Perak dengan Perusahaan tentang Kegiatan Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan di Pelabuhan yang Diusahakan oleh Perusahaan No. HK.107/01/12/OP.TPr-15 dan HK.0501/700/P.III-2015 tanggal 9 November 2015 (Lihat Catatan 43v).

Port businesses in Indonesia in general and those managed by the Company must comply with laws and regulations set out by the Minister of Transportation. Some of the important regulations are as follows:

- a. *Act No. 17 Year 2008 regarding Shipping Affairs, dated May 7, 2008.*
- b. *Government Regulation No. 61 Year 2009 concerning Port, dated October 20, 2009, as amended by Government Regulation No. 64 Year 2015.*
- c. *Decree of the Minister of Transportation of Republic Indonesia No.KP.88/2011 dated February 14, 2011 regarding issuance of business permit to the Company as a Port Business Entity (BUP), see Note 1a.*
- d. *Minister of Transportation's Letter No.HK.003/1/11. Phb 2011 dated May 6, 2011 regarding the application of Act No.17 Year 2008 for Shipping Affairs for PT Pelabuhan Indonesia I, II, III and IV (Persero).*
- e. *Government Regulation No. 11 Year 2015 regarding Type and Tarif on Non-Tax Revenues types that apply to the Ministry of Transportation.*
- f. *Regulation of the Minister of Transportation No. PM 6 Year 2013 on Type, Structure, and Group Rates Ports Services, as amended by Regulation of the Minister of Transportation No. 15 of 2014.*
- g. *Regulation of the Minister of Transportation No 15 Year 2015 on Concessions and Other Forms of Cooperation between the Government and Business Entity Ports Sector.*
- h. *Ministerial Regulation No. PM 51 Year 2015 on Implementation Seaport.*
- i. *Regulation of the Minister of Transportation No. PM 69 Year 2015 on Implementation Guidelines Type and Tariff for Non Tax Revenue that apply At the Directorate General of Sea Transportation.*
- j. *The Concession Agreement between the Main Port Authority Office of Tanjung Perak with the Company on the Activities in the Port Concession Ports Services that Arranged by the Company No. HK.107/01/12/OP.TPr-15 and HK.0501/700/P.III-2015 dated November 9, 2015 (See Note 43v).*

2. Ketentuan Kepelabuhan (Lanjutan)

2. Port Regulations (Continued)

- k. Perjanjian konsesi antara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dengan Perusahaan tentang Pengusahaan Terminal Multipurpose Teluk Lamong di Surabaya No. HK.107/01/06/OP.TPr-15 dan HK.0501/93/P.III-2015 tanggal 19 Mei 2015 (Lihat Catatan 43u).
- l. Berita Acara pembahasan ruang lingkup Kegiatan Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan di lingkungan Perusahaan No. UM.005/23/12/OP.TPr-15 tanggal 23 Desember 2015.
- m. Notulen Rumusan Bimbingan Teknis Terkait Konsesi oleh Kantor Otoritas pelabuhan Utama Tanjung Perak tanggal 20-22 Januari 2016.

- k. *The concession agreement between the Ministry of Transport of the Republic of Indonesia with the Company on Teluk Lamong Multipurpose Terminal Concession in Surabaya No. HK.107/01/06/OP.TPr-15 and HK.0501/93/P.III-2015 dated May 19, 2015 (See Note 43u).*
- l. *Minutes of meeting on the scope of Exploitation Services Activities in the Ports area of the Company No. UM.005/23/12/OP.TPr-15 dated December 23, 2015.*
- m. *Minutes of meeting on Formulation Related Technical Assistance Concessions by the Port Authority of Tanjung Perak on January 20-22, 2016.*

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan diatas, Direksi Perusahaan menjabarkan dan menetapkan tarif jasa kepelabuhanan yang berlaku untuk daerah perusahaan sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi.

Based on the decrees of the Minister of Transportation above, the Company's Directors defined and established port services rates on working area as stated in the Board of Directors' Resolution.

3. Kebijakan Akuntansi Signifikan

3. Significant Accounting Policies

- a. **Kepatuhan Terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK)**
Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK - IAI).
- b. **Dasar Pengukuran dan Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian**
Laporan keuangan konsolidasian disusun dan disajikan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian. Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah konsep biaya perolehan, kecuali beberapa akun tertentu yang didasarkan pengukuran lain sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Biaya perolehan umumnya didasarkan pada nilai wajar imbalan yang diserahkan dalam pemerolehan aset.

- a. **Compliance with the Financial Accounting Standards (SAK)**
The consolidated financial statements were prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards which include the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK) issued by the Financial Accounting Standard Board - Indonesian Institute of Accountant (DSAK - IAI).
- b. **The Basis of Measurement and Preparation of Consolidated Financial Statements**
The consolidated financial statements have been prepared and presented based on going concern assumption and accrual basis of accounting, except for the consolidated statements of cash flows. Basis of measurement in preparation of these consolidated financial statements is the historical costs concept, except for certain accounts which have been prepared on the basis of other measurements as described in their respective policies. Historical cost is generally based on the fair value of the consideration given in exchange for assets.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) AND
SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2017, 2016 and 2015
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

3. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

Laporan arus kas konsolidasian disajikan dengan metode langsung (*direct method*) dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah Rupiah yang merupakan mata uang fungsional Grup. Setiap entitas di dalam Grup menetapkan mata uang fungsional sendiri dan unsur-unsur dalam laporan keuangan dari setiap entitas diukur berdasarkan mata uang fungsional tersebut.

c. Pernyataan dan Interpretasi Standar Akuntansi Baru dan Revisi yang Berlaku Efektif pada Tahun Berjalan

Berikut adalah standar baru, amandemen dan penyesuaian atas standar dan interpretasi standar yang telah diterbitkan oleh DSAK-IAI dan berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2017, yaitu:

- Amandemen PSAK No. 1 (Amandemen 2015) : "Penyajian Laporan Keuangan"
- PSAK No. 3 (Penyesuaian 2016): "Laporan Keuangan Interim"
- PSAK No. 24 (Penyesuaian 2016): "Imbalan Kerja"
- PSAK No. 58 (Penyesuaian 2016): "Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan"
- PSAK No. 60 (Penyesuaian 2016): "Instrumen Keuangan: Pengungkapan"
- ISAK No. 31: "Interpretasi atas Ruang Lingkup PSAK No. 13: Properti Investasi"
- ISAK No. 32: "Definisi dan Hierarki Standar Akuntansi Keuangan"

Implementasi dari standar-standar tersebut tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan di tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

d. Prinsip - Prinsip Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian mencakup laporan keuangan Grup seperti disebutkan pada Catatan 1.b.

3. Significant Accounting Policies (Continued)

The consolidated statements of cash flows are prepared using the direct method by classifying cash flows into operating, investing and financing activities.

The presentation currency used in the preparation of the consolidated financial statements is Indonesian Rupiah which is the functional currency of the Group. Each entity in the Group determines its own functional currency and items included in the financial statements of each entity are measured using that functional currency.

c. New and Revised Statements and Interpretation of Financial Accounting Standards Effective in the Current Year

The following are new standards, amendments and improvements of standards and interpretation of standards issued by DSAK - IAI and effectively applied for the period starting on or after January 1, 2017, namely:

- Amendment PSAK No. 1 (Amendments 2015): "Presentation of Financial Statements"
- PSAK No. 3 (Improvement 2016): "Interim Financial Statements"
- PSAK No. 24 (Improvement 2016): "Employee Benefits"
- PSAK No. 58 (Improvement 2016): "Non-Current Assets Held for Sale and Discontinued Operations"
- PSAK No. 60 (Improvement 2016): "Financial Instrument: Disclosure"
- ISAK No. 31: "Interpretation of the Scope of PSAK No. 13: Investment Property"
- ISAK No. 32: "Definition and Hierarchy of Financial Accounting Standards"

The implementation of the above standards had no significant effect on the amounts reported for the current or prior financial years.

d. Principles of Consolidation

The consolidated financial statements comprise the financial statements of the Group as described in Note 1.b.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) AND
SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2017, 2016 and 2015
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

3. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

Entitas anak adalah entitas yang dikendalikan oleh Grup, yakni Grup terekspos, atau memiliki hak, atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan entitas dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan dari entitas (kekuasaan atas *investee*).

Keberadaan dan dampak dari hak suara potensial dimana Grup memiliki kemampuan praktis untuk melaksanakan (yakni hak substantif) dipertimbangkan saat menilai apakah Grup mengendalikan entitas lain.

Laporan keuangan Grup mencakup hasil usaha, arus kas, aset dan liabilitas dari Perusahaan dan seluruh entitas anak yang secara langsung dan tidak langsung, dikendalikan oleh Perusahaan. Entitas anak dikonsolidasikan sejak tanggal efektif akuisisi, yaitu tanggal dimana Grup secara efektif memperoleh pengendalian atas bisnis yang diakuisisi, sampai tanggal pengendalian berakhir.

Entitas induk menyusun laporan keuangan konsolidasian dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk transaksi dan peristiwa lain dalam keadaan yang serupa. Seluruh transaksi, saldo, laba, beban, dan arus kas dalam intra kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam grup dieliminasi secara penuh, untuk mencerminkan Posisi Keuangan sebagai satu kesatuan usaha.

Grup mengatribusikan laba rugi dan setiap komponen dari penghasilan komprehensif lain kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non-pengendali meskipun hal tersebut mengakibatkan kepentingan non-pengendali memiliki saldo defisit. Grup menyajikan kepentingan non-pengendali di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk.

3. Significant Accounting Policies (Continued)

A subsidiary is an entity controlled by the Group, ie the Group is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the entity and has the ability to affect those returns through its current ability to direct the entity's relevant activities (power over the investee).

The existence and effect of potential voting rights that the Group has the practical ability to exercise (ie substantive rights) are considered when assessing whether the Group controls another entity.

The Group's financial statements comprise the results, cash flows, assets and liabilities of the Company and all of its directly and indirectly controlled subsidiaries. Subsidiaries are consolidated since the effective date of acquisition, which is the date on which the Group effectively obtains control of the acquired business, until such control ceases.

A parent entity prepares consolidated financial statements using uniform accounting policies for like transactions and other events in similar circumstances. All intragroup transactions, balances, income, expenses and cash flows are eliminated in full on consolidation, to reflect the Financial Position as a single business entity.

The Group attributed the profit or loss and each component of other comprehensive income to the owners of the parent and non-controlling interest even though this results in the non-controlling interests having a deficit balance. The Group presents non-controlling interest in equity in the consolidated statement of financial position, separately from the equity owners of the parent.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) AND
SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2017, 2016 and 2015
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

3. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian adalah transaksi ekuitas (yaitu transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik). Ketika proporsi ekuitas yang dimiliki oleh kepentingan non-pengendali berubah, Grup menyesuaikan jumlah tercatat kepentingan pengendali dan kepentingan non-pengendali untuk mencerminkan perubahan kepemilikan relatifnya dalam entitas anak. Selisih antara jumlah dimana kepentingan non-pengendali disesuaikan dan nilai wajar dari jumlah yang diterima atau dibayarkan diakui langsung dalam ekuitas dan diatribusikan pada pemilik dari entitas induk.

Jika Grup kehilangan pengendalian, maka Grup:

- a) Menghentikan pengakuan aset (termasuk goodwill) dan liabilitas entitas anak pada jumlah tercatatnya ketika pengendalian hilang;
- b) Menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap kepentingan non-pengendali pada entitas anak terdahulu ketika pengendalian hilang (termasuk setiap komponen penghasilan komprehensif lain yang diatribusikan pada kepentingan non-pengendali);
- c) Mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima, jika ada, dari transaksi, peristiwa, atau keadaan yang mengakibatkan hilangnya pengendalian;
- d) Mengakui sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada nilai wajarnya pada tanggal hilangnya pengendalian;
- e) Mereklasifikasi ke laba rugi, atau mengalihkan secara langsung ke saldo laba jika disyaratkan oleh SAK lain, jumlah yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain dalam kaitan dengan entitas anak;
- f) Mengakui perbedaan apapun yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laba rugi yang diatribusikan kepada entitas induk.

3. Significant Accounting Policies (Continued)

Changes in the parent's ownership interest in a subsidiary that do not result in loss of control are equity transactions (ie transactions with owners in their capacity as owners). When the proportion of equity held by non-controlling interest change, the Group adjusted the carrying amounts of the controlling interest and non-controlling interest to reflect the changes in their relative interest in the subsidiaries. Any difference between the amount by which the non-controlling interests are adjusted and the fair value of the consideration paid or received is recognized directly in equity and attributed to the owners of the parent.

If the Group loses control, the Group:

- a) *Derecognizes the assets (including goodwill) and liabilities of the subsidiary at their carrying amounts at the date when control is lost;*
- b) *Derecognizes the carrying amount of any non-controlling interests in the former subsidiary at the date when control is lost (including any components of other comprehensive income attributable to them);*
- c) *Recognizes the fair value of the consideration received, if any, from the transaction, event or circumstances that resulted in the loss of control;*
- d) *Recognizes any investment retained in the former subsidiary at fair value at the date when control is lost;*
- e) *Reclassifies to profit or loss, or transfer directly to retained earnings if required by other SAKs, the amount recognized in other comprehensive income in relation to the subsidiary;*
- f) *Recognizes any resulting difference as a gain or loss attributable to the parent.*

3. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

3. Significant Accounting Policies (Continued)

e. Transaksi dan Saldo Dalam Mata Uang Asing

Dalam menyiapkan laporan keuangan, setiap entitas di dalam Grup mencatat dengan menggunakan mata uang dari lingkungan ekonomi utama di mana entitas beroperasi ("mata uang fungsional"). Mata uang fungsional Perusahaan dan seluruh entitas anak adalah Rupiah.

Transaksi-transaksi selama tahun berjalan dalam mata uang asing dicatat dengan Kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi. Pada akhir periode pelaporan pos moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke Rupiah menggunakan kurs penutup yaitu Kurs tengah Bank Indonesia, pada 31 Desember 2017, 2016 dan 2015, sebagai berikut:

	2017 Rp	2016 Rp	2015 Rp	
USD 1	13,548	13,436	13,795	USD 1

Selisih kurs yang timbul dari penyelesaian pos moneter dan dari penjabaran pos moneter dalam mata uang asing diakui dalam laba rugi.

e. Foreign Currency Transactions and Balances

In preparing the financial statements, each of the entities within the Group record by using the currency of primary economic environment in which the entity operates ("the functional currency"). The functional currency of the Company and all of the subsidiaries is Rupiah.

Transactions during the year in Foreign Currencies are recorded in Rupiah by applying to the Foreign Currencies amount the spot exchange rate between Rupiah and Foreign Currencies at the date transactions. At the end of reporting year, Foreign Currencies monetary items are translated to Rupiah using the closing rate: i.e middle rate of Bank of Indonesia, as of December 31, 2017, 2016 and 2015, are as follows:

Exchange differences arising on the settlement of monetary items or on translating monetary items in foreign currencies are recognized in profit or loss.

f. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor:

a. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:

- i. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
- ii. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
- iii. Merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.

b. Satu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:

- i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).

f. Transactions with Related Parties

A related party is a person or an entity that is related to the reporting entity:

a. *A person or a close member of that person's family is related to a reporting entity if that person:*

- i. *Has control or joint control over the reporting entity;*
- ii. *Has significant influence over the reporting entity; or*
- iii. *Is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.*

b. *An entity is related to the reporting entity if any of the following conditions applies:*

- i. *The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others);*

3. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

3. Significant Accounting Policies (Continued)

- ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
- iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
- iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
- v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor.
- vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a); atau
- vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).i memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
- viii. Entitas atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

- ii. *One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member);*
- iii. *Both entities are joint ventures of the same third party.*
- iv. *One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.*
- v. *The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity.*
- vi. *The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a); or*
- vii. *A person identified in (a).i has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity).*
- viii. *The entity or any members of a group of which it is a part, provides key management personnel service to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.*

Entitas yang berelasi dengan pemerintah adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi oleh pemerintah. Pemerintah mengacu kepada pemerintah, instansi pemerintah dan badan yang serupa baik lokal, nasional maupun internasional.

A government-related entity is an entity that is controlled, jointly controlled or significant influence by a government. Government refers to government, government agencies and similar bodies whether local, national or international.

Entitas yang berelasi dengan Pemerintah dapat berupa entitas yang dikendalikan atau dipengaruhi secara signifikan oleh Kementerian Keuangan atau Pemerintah Daerah yang merupakan Pemegang Saham entitas, atau entitas yang dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian BUMN sebagai kuasa pemegang saham.

Government related entity can be an entity which controlled or significantly influenced by the Ministry of Finance or Local Government that representing as the shareholders of the entity or an entity controlled by the Government of Republic of Indonesia, represented by the SOE's Ministry as a shareholder's representative.

3. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan yang relevan.

g. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas terdiri dari kas, kas di bank (rekening giro) serta deposito berjangka yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehan dan tidak dijaminan serta tidak dibatasi penggunaannya.

Kas dan setara kas yang ditempatkan sebagai margin deposits atas fasilitas *letter of credit*, dan jaminan utang bank disajikan sebagai "kas yang dibatasi penggunaannya".

h. Kas yang Dibatasi Penggunaannya

Deposito Berjangka yang jatuh temponya kurang dari tiga bulan namun dijaminan atas utang dan deposito berjangka yang jatuh temponya lebih dari tiga bulan tetapi terealisasi dalam satu tahun dari tanggal laporan posisi keuangan disajikan sebagai kas yang dibatasi penggunaannya dan dinyatakan sebesar nilai nominal.

i. Piutang

Pada saat pengakuan awal piutang usaha diukur sebesar nilai wajar dan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

Kerugian penurunan nilai dibentuk ketika terdapat bukti obyektif bahwa Grup tidak akan dapat menagihkan semua piutang sesuai dengan persyaratan piutang. Kesulitan keuangan yang signifikan pada debitur, probabilitas bahwa debitur akan dinyatakan pailit atau reorganisasi keuangan, dan wanprestasi atau tunggakan dalam pembayaran (lebih dari 30 hari jatuh tempo) dianggap sebagai indikator bahwa piutang usaha telah turun nilainya.

Jumlah cadangan penurunan nilai tersebut adalah selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan, yang didiskontokan pada suku bunga efektif awal.

3. Significant Accounting Policies (Continued)

All significant transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant Notes.

g. Cash and Cash Equivalents

Cash and cash equivalents are cash on hand, cash in banks (demand deposits) and time deposits with maturity period of three months or less at the time of placement that are not use as collateral or are not restricted in use.

Cash and cash equivalents which are placed as marginal deposits over letter of credit and collateral for bank loan are classified as "restricted cash".

h. Restricted Cash

Time deposits with maturities of three months or less which are pledged as loan collateral and time deposits with maturities of more than three months that are realizable within one year from statements of financial position date are presented as restricted cash and are stated at their nominal value.

i. Receivable

At the time of initial recognition, trade receivables are measured at fair value and after initial recognition are measured at amortized cost using the effective interest method, less allowance for impairment.

An allowance for impairment is established when there is objective evidence that the Group will not be able to collect all amounts due according to the original terms of receivables. Significant financial difficulties of the debtor, the probability that the debtor will enter bankruptcy or financial reorganization, and default or delinquency in payments (more than 30 days overdue) are considered indicators that the trade accounts receivable is impaired.

The amount of allowance is the difference between the assets' carrying amount and the present value of estimated future cash flows, discounted at the original effective interest rate.

3. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

3. Significant Accounting Policies (Continued)

Nilai tercatat aset tersebut dikurangi melalui penggunaan akun cadangan penurunan nilai, dan jumlah kerugian yang terjadi diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Ketika piutang usaha tidak dapat ditagih, piutang tersebut dihapuskan terhadap akun cadangan penurunan nilai. Penerimaan kemudian atas jumlah yang sebelumnya telah dihapuskan dikreditkan terhadap laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

The carrying amount of the asset is reduced through the use of an allowance for impairment account, and the amount of the loss is recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income. When a trade accounts receivables is uncollectible, such receivable is written-off against allowance for impairment account. Subsequent recoveries of amounts previously written-off are credited to the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

j. Persediaan

Persediaan dinyatakan berdasarkan jumlah terendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto. Biaya persediaan terdiri dari seluruh biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini. Biaya perolehan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang. Nilai realisasi neto merupakan taksiran harga jual dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan.

j. Inventories

Inventories are stated in the lower of cost and net realizable value. The cost of inventories comprise all costs of purchase, costs of conversion and other costs incurred in bringing the inventories to their present location and condition. Cost is determined using the weighted average method. Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business less the estimated costs of completion and the estimated costs necessary to make the sale.

Setiap penurunan nilai persediaan di bawah biaya perolehan menjadi nilai realisasi neto dan seluruh kerugian persediaan diakui sebagai beban pada periode terjadinya penurunan atau kerugian tersebut. Setiap pemulihan kembali penurunan nilai persediaan karena peningkatan kembali nilai realisasi neto, diakui sebagai pengurangan terhadap jumlah beban persediaan pada periode terjadinya pemulihan tersebut.

Every decline in the amount of any write-down of inventories to net realizable value and all losses of inventories shall be recognized as an expense in the period the write-down or loss occurs. The amount of any reversal of any write-down of inventories, arising from an increase in net realizable value, is recognized as a reduction in the amount of inventories recognized as an expense in the period in which the reversal occurs.

k. Pengaturan Bersama

Pengaturan bersama adalah pengaturan yang dua atau lebih pihak memiliki pengendalian bersama, yaitu persetujuan kontraktual untuk berbagi pengendalian atas suatu pengaturan, yang ada hanya ketika keputusan mengenai aktivitas relevan mensyaratkan persetujuan dengan suara bulat dari seluruh pihak yang berbagi pengendalian.

k. Joint Arrangement

Joint arrangement is an arrangement of which two or more parties have joint control, i.e. the contractually agreed sharing of control of an arrangement, which exist only when decisions about the relevant activities require the unanimous consent of the parties sharing control.

3. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

3. Significant Accounting Policies (Continued)

Grup mengklasifikasikan pengaturan bersama sebagai:

The Group classified joint arrangement as:

1. Operasi Bersama

Merupakan pengaturan bersama yang mengatur bahwa para pihak yang memiliki pengendalian bersama atas pengaturan memiliki hak atas aset dan kewajiban terhadap liabilitas, terkait dengan pengaturan tersebut. Para pihak tersebut disebut operator bersama.

1. Joint Operation

Represents joint arrangement whereby the parties that have joint control of the arrangement have rights to the assets, and obligations for the liabilities, relating to the arrangement. Those parties are called joint operator.

Operator bersama mengakui hal berikut terkait dengan kepentingannya dalam operasi bersama:

A joint operator recognizes in relation to its interest in a joint operation:

- a. Aset, mencakup bagiannya atas setiap aset yang dimiliki bersama;
- b. Liabilitas, mencakup bagiannya atas liabilitas yang terjadi bersama;
- c. Pendapatan dari penjualan bagiannya atas liabilitas yang terjadi bersama;
- d. Bagiannya atas pendapatan dari penjualan *output* oleh operasi bersama; dan
- e. Beban, mencakup bagiannya atas setiap beban yang terjadi secara bersama-sama.

- a. *Its assets, including its share of any assets held jointly;*
- b. *Its liabilities including its share of any liabilities incurred jointly;*
- c. *Its revenue from the sale of its share of the output arising from the joint operation;*
- d. *Its share of the revenue from the sale of the output by the joint operation; and*
- e. *Its expenses, including its share of any expenses incurred jointly.*

2. Ventura Bersama

Merupakan pengaturan bersama yang mengatur bahwa pihak yang memiliki pengendalian bersama atas pengaturan memiliki pengendalian bersama atas pengaturan memiliki hak atas aset neto pengaturan tersebut. Para pihak tersebut disebut sebagai venturer bersama.

2. Joint Venture

Represents joint arrangement whereby the parties that have joint control of the arrangement have rights to the net assets of the arrangement. Those parties are called joint venturers.

Venturer bersama mengakui kepentingannya dalam ventura bersama sebagai investasi dan mencatat investasi tersebut dengan metode ekuitas.

A joint venturer recognize its interest in a joint venture as an investment and account for that investment using the equity method.

I. Investasi pada Entitas Asosiasi

Entitas asosiasi adalah entitas dimana Grup memiliki kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional *investee*, tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut (pengaruh signifikan).

I. Investments in Associates

Associates are entities which the Group has the power to participate in the financial and operating policy decisions of the investee but is not control or joint control over those policies (significant influence).

3. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

Investasi pada entitas asosiasi dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Dalam metode ekuitas, pengakuan awal investasi diakui sebesar biaya perolehan, dan jumlah tercatat ditambah atau dikurang untuk mengakui bagian atas laba rugi *investee* setelah tanggal perolehan.

Bagian atas laba rugi *investee* diakui dalam laba rugi. Penerimaan distribusi dari *investee* mengurangi nilai tercatat investasi. Penyesuaian terhadap jumlah tercatat tersebut juga mungkin dibutuhkan untuk perubahan dalam proporsi bagian investor atas *investee* yang timbul dari penghasilan komprehensif lain, termasuk perubahan yang timbul dari revaluasi aset tetap dan selisih penjabaran valuta asing. Bagian investor atas perubahan tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

Grup menghentikan penggunaan metode ekuitas sejak tanggal ketika investasinya berhenti menjadi investasi pada entitas asosiasi sebagai berikut:

- (a) Jika investasi menjadi entitas anak.
- (b) Jika sisa kepentingan dalam entitas asosiasi merupakan aset keuangan, maka Grup mengukur sisa kepentingan tersebut pada nilai wajar.
- (c) Ketika Grup menghentikan penggunaan metode ekuitas, Grup mencatat seluruh jumlah yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan investasi tersebut menggunakan dasar perlakuan yang sama dengan yang disyaratkan jika *investee* telah melepaskan secara langsung aset dan liabilitas terkait.

m. Aset Tetap yang Dimiliki untuk Dijual

Aset tetap yang dimiliki untuk dijual diukur pada nilai yang lebih rendah antara jumlah tercatat dengan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Aset tetap yang dimiliki untuk dijual disajikan sebagai aset lancar dan terpisah dari pos lainnya.

3. Significant Accounting Policies (Continued)

Investments in entity associates are recorded for using the equity method. Under the equity method, the investment in an associate is initially recognized at cost and the carrying amount is increased or decreased to recognize the investor's share of the profit or loss of the investee after the date of acquisition.

The investor's share of the profit or loss of the investee is recognized in profit or loss. Distributions received from an investee reduce the carrying amount of the investment. Adjustments to the carrying amount may also be necessary for changes in the investor's proportionate interest in the investee arising from changes in the investee's other comprehensive income, including those arising from the revaluation of property, plant and equipment and from foreign exchange translation differences. The investor's share of those changes is recognized in other comprehensive income.

The Group discontinues the use of the equity method from the date when its investment ceases to be an associate as follows:

- (a) If the investment becomes a subsidiary.*
- (b) If the retained interest in the former associate is a financial asset, the Group measure the retained interest at fair value.*
- (c) When the Group discontinues the use of the equity method, the Group recorded all amounts previously recognized in other comprehensive income in relation to that investment on the same basis as would have been required if the investee had directly disposed of the related assets or liabilities.*

m. Fixed Assets held for Sale

Fixed assets held for sale are measured at the lower of carrying amount and fair value less costs to sale. Fixed assets held for sale are presented as current asset and separated from any other heading.

3. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

3. Significant Accounting Policies (Continued)

n. Properti Investasi

Properti investasi adalah properti (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya) yang dikuasai oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan untuk menghasilkan sewa atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya, dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari. Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis masa depan yang terkait dengan properti investasi akan mengalir ke entitas; dan biaya perolehan properti investasi dapat diukur dengan andal.

Properti investasi pada awalnya diukur sebesar biaya perolehan, meliputi harga pembelian dan setiap pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung (biaya jasa hukum, pajak pengalihan properti, dan biaya transaksi lain). Biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut.

Setelah pengakuan awal, Grup memilih menggunakan model biaya dan mengukur properti investasi sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset. Hak atas tanah tidak disusutkan dan disajikan sebesar biaya perolehan. Bangunan disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis (10-50 tahun).

Biaya pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya, sedangkan pemugaran dan penambahan dikapitalisasi.

Pengalihan ke properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan berakhirnya pemakaian oleh pemilik dan dimulainya sewa operasi kepada pihak lain.

Pengalihan dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan dimulainya penggunaan oleh pemilik dan dimulainya pengembangan untuk dijual.

n. Investment Properties

Investment properties are properties (land or a building or part of a building or both) held by the owner or the lessee under a finance lease to earn rentals or for capital appreciation or both, rather than for use in the production or supply of goods or services or for administrative purposes; or sale in the daily business activities. Investment property is recognized as an asset when, and only when it is probable that the future economic benefits that are associated with the investment property will flow to the entity; and the cost of the investment property can be measured reliably.

An investment property shall be measured initially at its cost, comprises its purchase price and any directly attributable expenditure (professional fees for legal services, property transfer taxes and other transaction costs). Transaction costs are included in the initial measurement.

After initial recognition, the Group chooses to use cost model and measure its investment property at acquisition cost less accumulated depreciation and accumulated impairment losses. Landrights are not depreciated and are carried at costs. Buildings are depreciated using the straight-line method over their estimated useful lives (10-50 years).

Maintenance and repairment costs are charged to profit or loss as incurred, while renewals and betterments are capitalized.

Transfer to investment property is made when, and only when, there is a change in use, evidenced by end of owner-occupation and commencement of an operating lease to another party.

Transfer from investment property is made when, and only when, there is a change in use, evidenced by commencement of owner-occupation and commencement of development with a view to sale.

3. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

3. Significant Accounting Policies (Continued)

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau ketika tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diperkirakan dari pelepasannya.

An investment property is derecognized on disposal or when the investment property is permanently withdrawn from use and no future economic benefits are expected from its disposal.

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan ditentukan dari selisih antara hasil neto pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya penghentian atau pelepasan.

Gains or losses arising from the retirement or disposal are determined as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset, and are recognized in profit or loss in the period of the retirement or disposal.

o. Aset Tetap

Aset tetap yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, atau untuk tujuan administratif, dicatat berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai.

o. Fixed Assets

Fixed assets held for use in the production or supply of goods or services, or for administrative purposes, are stated at cost less accumulated depreciation and any accumulated impairment losses.

Aset tetap yang berasal dari bantuan Pemerintah, swasta dan pihak lain dinyatakan sebesar nilai bantuan ditambah semua pengeluaran yang dapat diidentifikasi langsung dengan aset tetap tersebut sehingga siap untuk digunakan.

Fixed assets derived from Government assistance, private sector and other parties assistance are stated at the amount of assistance plus all expenditures that can be identified directly with the fixed assets so that it is ready for use.

Aset tetap, kecuali hak atas tanah, disusutkan, berdasarkan metode garis lurus dengan tarif penyusutan yang sesuai dengan taksiran masa manfaat ekonomis sejak tanggal aset tersebut siap digunakan, sebagai berikut:

Fixed assets, except the right for the land, are depreciated, using the straight line method in line with estimated economic useful life from the date the assets are ready for use, as follows:

Golongan	Tarif Penyusutan/ Depreciation Rate			Classification
	2017	2016	2015	
Bangunan Fasilitas Pelabuhan	2%-50%	2%-50%	2%-10%	Port Facility
Jalan dan Bangunan	3.33%-50%	3.33%-50%	2%-3.33%	Buildings and roads
Kapal	5%-10%	5%-10%	5%-10%	Ships
Alat Fasilitas Pelabuhan	5%-20%	5%-20%	10%-20%	Port Facility Equipment
Instalasi Fasilitas Pelabuhan	4%-10%	4%-10%	4%-10%	Port Facility Installing
Peralatan kantor dan rumah	12.5%-25%	12.5%-25%	12.5%-25%	Office equipment and home
Kendaraan	20%-25%	20%-25%	20%-25%	Vehicles

Sejak 1 Juli 2016, Bangunan Fasilitas Pelabuhan dan Alat Fasilitas Pelabuhan dicatat pada jumlah revaluasi. Revaluasi dilakukan dengan keteraturan yang cukup regular untuk memastikan bahwa jumlah yang tercatat tidak berbeda secara material dari jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal laporan posisi keuangan.

Since July 1, 2016, Port Facility and Port Facility Equipment are stated at their revalued amount and not depreciated. Revaluations are performed with sufficient regularity such that the carrying amount does not differ materially from that which would be determined using fair values at the statement of financial position.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) AND
SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2017, 2016 and 2015
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

3. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

Kenaikan yang berasal dari revaluasi Bangunan Fasilitas Pelabuhan dan Alat Fasilitas Pelabuhan tersebut langsung dikreditkan ke surplus revaluasi pada bagian penghasilan komprehensif lain, kecuali sebelum penurunan revaluasi atas aset yang sama pernah diakui dalam laporan laba rugi, dalam hal ini, kenaikan revaluasi tersebut, dikreditkan dalam laba rugi. Penurunan jumlah tercatat yang berasal dari revaluasi aset tetap dibebankan dalam laporan laba rugi apabila penurunannya tersebut melebihi saldo akun surplus revaluasi aset tetap yang berasal dari revaluasi sebelumnya, jika ada.

Manajemen Perusahaan menetapkan bahwa :

1. Akumulasi penyusutan pada tanggal revaluasi diperlakukan dengan cara di eliminasi terhadap jumlah tercatat bruto aset dan jumlah tercatat netto setelah eliminasi disajikan kembali sebesar jumlah revaluasi dari aset tersebut.
2. Surplus revaluasi aset tetap yang termasuk dalam ekuitas dipindahkan ke dalam saldo laba pada saat penghentian / pelepasan aset oleh entitas. Pemindahan surplus revaluasi ke saldo laba tidak dilakukan melalui laba rugi.

Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode penyusutan direview setiap akhir tahun dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi tersebut berlaku prospektif.

Perusahaan menerapkan ISAK No.25 tentang "Hak Atas Tanah", yang menyatakan bahwa hak atas tanah dinyatakan sebesar harga perolehan dan tidak disusutkan, kecuali terdapat bukti sebaliknya yang mengindikasikan bahwa perpanjangan atau pembaruan hak atas tanah kemungkinan besar atau pasti tidak diperoleh. Biaya pengurusan legal atas hak atas tanah ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari perolehan tanah. Biaya pengurusan perpanjangan atau pembaruan legal hak atas tanah diakui sebagai aset tidak berwujud dan diamortisasi sepanjang umur hukum hak atau umur ekonomis tanah, mana yang lebih pendek.

3. Significant Accounting Policies (Continued)

Any revaluation increase arising on the revaluation of such Building Port Facility and Port Facility Tool in credited to fixed asset revaluation surplus in the other comprehensive income section, except to the extent that it reverses a revaluation decrease, for the same asset which case the increase in credited to profit or loss to the extent of the decrease previously charged. A decrease in carrying amount arising on the evaluation of such fixed asset in charged to profit or loss to the extent that in exceeds the balance, if any. held in the fixed asset revaluation surplus relating to a previous revaluation of such fixed asset, if any.

The Company's management decided to :

1. Accumulated depreciation at the date of revaluation to be treated by eliminating the gross carrying amount and the carrying amount of net assets after elimination is restated as revaluation amount of assets.
2. The revaluation surplus included in equity is transferred to retained earnings upon termination / disposal of assets by the entity. Transfer of revaluation surplus to retained earning is not made through profit or loss.

The estimated useful lives, residual values and depreciation method are reviewed at each year end, with the effect of any changes in estimate accounted for on a prospective basis.

The Company adopted Interpretation of ISAK No.25 on "Land Rights", which states that land rights are stated at cost and not depreciated, unless there is contrary evidence indicating that the extension or renewal of land is likely or definitely not be obtained. The cost of legal rights to land when the land was first acquired is recognized as part of the acquisition of land. The cost of the extension or renewal of legal rights to land are recognized as intangible assets and amortized over the life of the legal rights or economic life of the land, whichever is shorter.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) AND
SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2017, 2016 and 2015
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

3. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

3. Significant Accounting Policies (Continued)

Biaya perbaikan dan pemugaran terminal pelabuhan dan lahan penumpukan yang dioperasikan oleh entitas anak dalam jangka waktu tertentu dikapitalisasi pada saat terjadinya dan diamortisasi berdasarkan metode garis lurus sampai dengan masa perbaikan berikutnya atau jangka waktu operasional entitas anak berakhir.

The costs of repairs and restoration of container yard and port terminals operated by the subsidiaries within a certain period of time are capitalized when incurred and amortized on a straight line basis until the time of the next repair or operating period of the subsidiaries ends.

Biaya pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada perhitungan laba (rugi) pada saat terjadinya. Pemugaran yang menambah masa manfaat suatu aset tetap dikapitalisasi dan disusutkan sesuai dengan tingkat penyusutan aset yang bersangkutan.

The routine repair and maintenance are expensed to profit (loss) as incurred. Repairs which add useful life of the fixed assets are capitalized and depreciated at their applicable depreciation rates.

Aset tetap yang digunakan oleh instansi pemerintah yang berkaitan dengan operasi Perusahaan diklasifikasikan sebagai "Aset Tetap Penugasan" dalam kelompok aset lain-lain.

Fixed assets used by government agencies relating to the Company's operations are classified as "Assigned Fixed Assets" in the group of other assets.

Minimum pengadaan barang dicatat sebagai aset tetap sebagai berikut:

Minimum procurement of goods recorded as fixed assets are as follows:

Instalasi fasilitas pelabuhan sebesar	Rp30,000	<i>Amount of Installing a Port Facility</i>
Peralatan sebesar	Rp20,000	<i>Amount of Equipment</i>
Kendaraan sebesar	Rp15,000	<i>Amount of Vehicles</i>
Emplasemen sebesar	Rp15,000	<i>Amount of Emplacement</i>

Kriteria berikut digunakan untuk memanfaatkan pemeliharaan dan biaya perbaikan:

The following criteria are used to capitalize maintenance and repair costs:

- i. Biaya pemeliharaan dikapitalisasi dalam aset tetap jika ini bisa menambah masa manfaat atau kapasitas fungsi.
- ii. Pengeluaran untuk pemeliharaan dikapitalisasi, jika memenuhi setidaknya salah satu dari:
 - a) Peningkatkan kapasitas;
 - b) Peningkatkan masa manfaat;
 - c) Penambahan fungsi.
- iii. Penentuan usia penambahan aset tetap sebagai hasil dari pemeliharaan dilakukan oleh Dewan Direksi Perusahaan.
- iv. Biaya pemeliharaan minimal yang dikapitalisasi sebagai aset tetap ditetapkan dalam Kebijakan Akuntansi.

- i. Maintenance cost is capitalized in fixed assets if it could increase the useful life or its capacity function.*
- ii. Maintenance cost is capitalized, if it meets at least one of the following:*
 - a) Increase in the capacity;*
 - b) Increase in the use life;*
 - c) Addition in the function.*
- iii. The determination of the increase in age of fixed assets as a result of the maintenance is performed by the Board of Directors of the Company.*
- iv. Minimum maintenance costs to be capitalized as fixed assets are set out in the Accounting Policy.*

3. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

3. Significant Accounting Policies (Continued)

Biaya Pengerukan Alur Pelayaran dan Kolam Pelabuhan

Kedalaman alur pelayaran dan kolam pelabuhan tergantung pada sedimentasi atau endapan lumpur yang terakumulasi, sehingga mengurangi kedalaman alur dan mengganggu olah gerak kapal baik dialur pelayaran maupun di dalam kolam pelabuhan. Oleh karena itu, diperlukan adanya pekerjaan pengerukan sedimentasi/endapan lumpur tersebut agar kedalaman alur pelayaran dan kolam pelabuhan tetap terjaga karena itu pengeluaran biaya tersebut dikapitalisasi dan diamortisasi setelah pekerjaan pengerukan selesai dan siap digunakan.

Masa manfaat dalam mempertahankan kedalaman alur dan kolam pelabuhan tersebut adalah 5 tahun dan sisa masa amortisasi akan dibebankan sekaligus apabila pekerjaan pengerukan tersebut perlu dilakukan kembali.

Biaya Pemeliharaan Untuk Mempertahankan Kondisi Aset Tetap

Karena kondisi lapisan tanah di sejumlah lokasi pelabuhan mengalami penurunan struktur tanah, maka untuk memelihara dan meningkatkan aksesibilitas pelabuhan, dermaga dan lapangan penumpukan disejumlah lokasi pelabuhan tersebut harus dikembalikan pada ketinggian yang tepat, pengeluaran biaya pemeliharaan dan biaya terkait lainnya untuk mengembalikan fungsi dermaga dan lapangan penumpukan sesuai struktur yang tepat dikapitalisasi dan akan diamortisasi setelah aset tersebut selesai dan siap digunakan.

Masa manfaat untuk mempertahankan aktiva tersebut adalah selama 10 sampai 15 tahun dan sisa masa amortisasi akan dibebankan sekaligus bila pekerjaan pemeliharaan tersebut akan dilakukan lagi. Sementara pemeliharaan pengeluaran yang tidak memenuhi salah satu dari kriteria tersebut dibebankan pada periode berjalan.

Dredging Costs of Shipping Channels and Port Waters

The depth of shipping channels and port waters are exposed to accumulated siltation, which reduces the depth of water and jeopardize the movement of vessels on shipping channels and port waters. Therefore, dredging works are required to maintain proper depth of the shipping channels and port waters. Dredging and its associated costs are capitalized and amortized once the dredging work is concluded and such asset is ready for use.

The useful life of depths obtained on the dredged channels and port waters is 5 years and the remaining amortization period will be expensed off at a point when the dredging works need to be done before that period.

Maintenance Costs to Maintain Assets Conditions

Since several locations of the harbor are experiencing degression of soil structure, to maintain and improve the accessibility of the port, the quayside and the container yard in those locations, maintenance works are done to restore the soil structure to a proper level. Maintenance costs and other associated costs which incurred to restore the function of the dock and container yard to meet a suitable level are capitalized and will be amortized when the assets ready for use.

The useful life of such asset is ranging from 10 to 15 years and the remaining book value will be expensed off at a point when the maintenance works need to be done before that period. While maintenance cost that does not meet one of these criteria is expensed in the current period.

3. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

3. Significant Accounting Policies (Continued)

Aset Dalam Konstruksi

Aset tetap yang di konstruksi sendiri disajikan sebagai bagian aset tetap sebagai "Aset dalam Konstruksi" dan dinyatakan sebesar biaya perolehannya. Semua biaya, termasuk biaya pinjaman dan biaya-biaya lain yang terjadi sehubungan dengan konstruksi aset tersebut dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tetap dalam konstruksi. Biaya perolehan aset tetap dalam konstruksi tidak termasuk setiap laba internal, jumlah tidak normal dari biaya pemborosan yang terjadi dalam pemakaian bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain.

Asset In Construction

Fixed assets constructed itself is presented as part of the assets as "Asset in Construction" and are stated at its cost. All costs, including borrowing costs, incurred in relation with the construction of these assets are capitalized as part of the cost of assets in construction. Cost of assets in construction shall exclude any internal profits, cost of abnormal amounts of wasted material, labour, or other resources incurred.

Akumulasi biaya perolehan yang akan dipindahkan ke masing-masing pos aset tetap yang sesuai pada saat aset tersebut selesai dikerjakan atau siap digunakan dan disusutkan sejak beroperasi.

The accumulated cost will be transferred to the respective fixed assets items at the time the asset is completed or ready for use and are depreciated since the operation.

Nilai tercatat dari suatu aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.

The carrying amount of an item of fixed assets is derecognized on disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal.

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan tersebut (yang ditentukan sebesar selisih antara jumlah hasil pelepasan neto, jika ada, dan jumlah tercatatnya) dimasukkan dalam laba rugi pada saat penghentian pengakuan tersebut dilakukan.

Any gain or loss arising from derecognition (that determined as the difference between the net disposal proceeds, if any, and the carrying amount of the item) is included in profit or loss when item is derecognized.

Aset tetap yang telah habis disusutkan tetapi masih dioperasikan dinilai Rp1 (satu Rupiah).

Fixed assets that are fully depreciated but still operated are valued at Rp1 (one Rupiah)

p. Kapitalisasi Biaya Pinjaman

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan langsung dengan perolehan, pembangunan atau pembuatan aset kualifikasian yang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk persiapan digunakan sesuai tujuannya atau dijual dikapitalisasi sebagai bagian biaya, perolehan aset tersebut. Biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban pada saat terjadi. Biaya pinjaman terdiri dari biaya bunga dan biaya lain yang ditanggung oleh Grup sehubungan dengan peminjaman dana.

p. Capitalization of Borrowing Costs

Borrowing costs that are directly attributable to the acquisition, construction and production of a qualifying asset that necessarily takes a substantial period of time to get ready for its intended use or sale are capitalized as part of the cost of the related assets. Otherwise, borrowing costs are recognized as expenses when incurred. Borrowing costs consist of interests and other financing charges that the Group incurs in connection with the borrowing of funds.

3. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

Kapitalisasi biaya pinjaman dimulai pada saat aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset agar dapat digunakan sesuai dengan maksudnya, dan pengeluaran untuk aset kualifikasian dan biaya pinjamannya telah terjadi. Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan pada saat selesainya secara substansi seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset kualifikasian agar dapat digunakan sesuai dengan maksudnya.

q. Aset Takberwujud
Perpanjangan Hak atas Tanah

Grup menerapkan ISAK No. 25, "Hak atas Tanah". Biaya pengurusan perpanjangan atau pembaharuan legal hak atas tanah diakui sebagai aset takberwujud dan diamortisasi sepanjang umur hukum hak atau umur ekonomis tanah, mana yang lebih pendek.

Piranti Lunak Komputer

Biaya yang terkait dengan pemeliharaan program piranti lunak komputer diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Biaya pengembangan yang dapat secara langsung diatribusikan kepada desain dan pengujian produk piranti lunak yang dapat diidentifikasi dan unik yang dikendalikan oleh Grup diakui sebagai aset takberwujud.

Biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dikapitalisasi sebagai bagian produk piranti lunak mencakup beban pekerjaan pengembangan piranti lunak dan bagian overhead yang relevan.

Pengeluaran pengembangan yang lain yang sudah memenuhi kriteria ini diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Biaya pengembangan yang sebelumnya diakui sebagai beban tidak dapat diakui sebagai aset pada periode berikutnya.

Biaya pengembangan piranti lunak komputer diakui sebagai aset diamortisasi selama masa manfaat, yang tidak lebih dari lima tahun.

Goodwill

Goodwill merupakan selisih lebih biaya perolehan atas kepemilikan the Grup terhadap nilai wajar aset neto teridentifikasi entitas yang diakuisisi. Kepentingan non-pengendali diukur pada proporsi kepemilikan kepentingan non-pengendali atas aset neto teridentifikasi pada tanggal akuisisi.

3. Significant Accounting Policies (Continued)

Capitalization of borrowing costs commences when the activities to prepare the qualifying asset for its intended use are in progress and the expenditures for the qualifying asset and the borrowing costs have been incurred. Capitalization of borrowing costs ceases when all the activities necessary to prepare the qualifying assets is substantially complete.

q. Intangible Assets
Renewal of Land Rights

The Group adopted ISAK No. 25, "Land Rights". The cost of the extension or renewal of legal land rights are recognized as an intangible asset and amortized over the period of legal rights or economic life of the land, whichever is shorter.

Computer Software

Costs associated with the maintenance of computer software program are recognized as an expense when incurred. Development costs that are directly attributable to the design and testing of identifiable and unique software products controlled by the Group are recognized as intangible assets.

Directly attributable costs that are capitalized as part of the software product include the software development costs and an appropriate portion of relevant overheads.

Other development expenditures that do not meet these criteria are recognized as an expense when incurred. Development costs previously recognized as expenses are not allowed recognized as an asset in a subsequent period.

Computer software development costs recognized as assets are amortized over their estimated useful lives, which does not exceed five years.

Goodwill

Goodwill represents the excess of acquisition cost of the Group ownership over the fair value of the acquiree's net asset. Non-controlling interest is measured at proportional of non-controlling interest ownership over net asset which identified on the acquisition date.

3. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

Goodwill tidak diamortisasi namun penurunan nilainya dievaluasi setidaknya secara tahunan atau lebih, bila terdapat indikasi penurunan nilai. Untuk keperluan pengujian penurunan nilai, *goodwill* dialokasikan pada setiap unit penghasil kas yang diharapkan dapat memanfaatkan sinergi dari kombinasi bisnis.

Jika jumlah tercatat dari unit penghasil kas tersebut kurang dari nilai tercatatnya, rugi penurunan nilai dialokasikan terlebih dahulu untuk mengurangi nilai tercatat *goodwill* pada unit penghasil kas tersebut dan kemudian pada aset lainnya dari unit penghasil kas tersebut atas dasar proporsional. Kerugian penurunan nilai *goodwill* tidak dipulihkan pada tahun berikutnya.

Goodwill dievaluasi dengan mempertimbangkan hasil usaha tahun berjalan dan prospek di masa yang akan datang dari Entitas Anak secara berkala. Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat penurunan nilai *goodwill* pada tanggal 31 Desember 2017.

Perjanjian Konsesi Jasa

Grup telah menerapkan ISAK No. 16, "Perjanjian Konsesi Jasa" (ISAK No. 16) dan ISAK No. 22, "Perjanjian Konsesi Jasa: Pengungkapan" (ISAK No. 22) sehubungan dengan Hak Konsesi.

ISAK No. 16 mengatur prinsip umum dalam pengakuan dan pengukuran hak dan kewajiban terkait dengan perjanjian konsesi jasa. ISAK No. 16 mengatur bahwa infrastruktur tidak diakui sebagai aset tetap operator (pihak penerima konsesi jasa) karena perjanjian jasa kontraktual tidak memberikan hak kepada operator untuk mengendalikan penggunaan infrastruktur jasa publik. Operator memiliki akses untuk mengoperasikan infrastruktur dalam menyediakan jasa publik untuk kepentingan pemberi konsesi sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam kontrak.

ISAK No. 22 memberikan panduan spesifik mengenai pengungkapan yang diperlukan atas perjanjian konsesi jasa.

3. Significant Accounting Policies (Continued)

Goodwill is not amortized but the impairment value is reviewed at least annually or more frequently when there is an indication of impairment value. For the purpose of impairment testing, *goodwill* is allocated to each of the cash-generating units expected to benefit from the synergies of the business combination.

If the recorded amount of the cash generating unit is less than its carrying amount, the impairment losses is allocated first to reduce the carrying amount of any *goodwill* allocated to the unit and then to the other assets using prorated basis. An impairment loss of *goodwill* is not reversed in the subsequent period.

Goodwill is evaluated periodically by considering the current year operating results and future prospects of the Subsidiary. Management believes there was no impairment of *goodwill* as of December 31, 2017.

Service Concession Arrangement

The Group has adopted ISAK No. 16, "Service Concession Arrangement" (ISAK No. 16) and ISAK No. 22, "Service Concession Arrangement: Disclosure" (ISAK No. 22) related to the concession rights

ISAK No. 16 determines the general principles in the recognition and measurement of liabilities and rights related to service concession arrangement. ISAK No. 16 regulates that an operator (concession right beneficiary) does not recognize any infrastructure assets because the contractual service arrangement does not convey the right to control the use of the public service infrastructure to the operator. The operator has access to operate the infrastructure to provide the public service on behalf of the grantor in accordance with the terms specified in the contract.

ISAK No. 22 provides specific guidance for the required disclosures regarding the service concession arrangement.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) AND
SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2017, 2016 and 2015
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

3. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

Grup membukukan perjanjian konsesi jasa sebagai model aset takberwujud karena memiliki hak (lisensi) untuk membebankan pengguna jasa publik. Pada saat pengakuan awal, aset konsesi dicatat pada nilai wajar dari imbalan yang diterima atau akan diterima. Aset konsesi ini adalah aset hak pengelolaan jasa kepelabuhanan yang akan diamortisasi selama sisa masa hak konsesi sejak tanggal pengoperasian Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS) dan Terminal Multi Purpose Teluk Lamong. Selama masa konstruksi, akumulasi biaya perolehan dan konstruksi Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS) dan Terminal Multi Purpose Teluk Lamong diakui sebagai aset konsesi dalam penyelesaian. Amortisasi mulai dibebankan pada saat aset konsesi tersebut siap digunakan.

Aset konsesi akan dihentikan pengakuannya pada saat berakhirnya masa konsesi. Tidak akan ada keuntungan atau kerugian saat penghentian pengakuan karena aset konsesi diharapkan telah diamortisasi secara penuh, akan diserahkan kepada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia tanpa syarat.

Grup mengakui dan mengukur pendapatan konstruksi sesuai dengan PSAK No. 34 (Revisi 2010), "Kontrak Konstruksi" dan PSAK No. 23, "Pendapatan", untuk jasa yang dilakukannya. Ketika Grup menyediakan jasa konstruksi atau peningkatan kemampuan, imbalan yang diterima atau akan diterima oleh Grup diakui pada nilai wajar.

Grup menetapkan margin konstruksi untuk konsesi sebesar 1,8%.

Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS).

Kontrak konstruksi APBS merupakan seluruh biaya konstruksi pembangunan yang dikeluarkan sehubungan dengan proses persiapan pembangunan dan seluruh biaya konstruksi pembangunan pengerukan alur (*Capital Dredging*) dan biaya-biaya lain yang berhubungan langsung serta biaya pinjaman yang secara langsung digunakan untuk mendanai proses pembangunan aset tersebut dikapitalisasi sampai dengan saat proses pembangunan tersebut selesai dan dioperasikan.

3. Significant Accounting Policies (Continued)

The Group accounts for its service concession arrangement under the intangible asset model as it receives the right (license) to charge users of public service. At initial recognition, concession assets are recorded at the fair value of the benefit received or to be received. These concession assets are sea port services concession rights which are amortized over the remaining concession period from the date of operation of Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS) and Terminal Multi Purpose Teluk Lamong. During the construction period, the accumulated Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS) and Terminal Multi Purpose Teluk Lamong construction cost is recognized as concession assets in progress. The amortization of the cost starts when the concession assets are ready to be operated.

The concession assets are derecognized at the end of the concession period. There will be no gain or loss upon derecognition as the concession assets which are expected to be fully amortized by then, will be handed over to the Kementerian Perhubungan Republik Indonesia for no consideration.

The Group recognizes and measures construction revenue in accordance with PSAK No. 34 (Revised 2010), "Construction Contracts" and PSAK No. 23, "Revenue", for the services it performs. When the Group provides construction services or upgrades services, the consideration received or to be received by the Group is recognized at its fair value.

The Group set a construction margin for concessions of 1.8%.

Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS).

*Construction contract APBS is the cost directly attributable to the construction of incurred in relation to the preparation process for construction, the entire cost of dredging construction (*Capital Dredging*), other costs related directly, and costs of borrowing related directly used to fund these asset construction are capitalized until the construction is completed and operational.*

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) AND
SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2017, 2016 and 2015
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

3. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

3. Significant Accounting Policies (Continued)

Terminal Multi Purpose Teluk Lamong

Kontrak konstruksi merupakan seluruh biaya konstruksi pembangunan aset konsesi - Terminal Multi Purpose Teluk Lamong yang meliputi biaya pengadaan tanah, proses studi kelayakan dan biaya-biaya lain yang berhubungan langsung dengan pembangunan tersebut, termasuk biaya pembangunan jalan akses dan fasilitas lainnya yang disyaratkan, ditambah biaya pinjaman yang secara langsung digunakan untuk mendanai proses pembangunan aset tersebut. Biaya pinjaman dikapitalisasi sampai dengan saat proses pembangunan tersebut selesai dan dioperasikan.

Aset hak konsesi dicatat sebesar nilai wajar, yaitu sebesar biaya konstruksi pembangunan aset konsesi ditambah dengan margin konstruksi yang ditentukan manajemen.

Aset hak konsesi APBS dan Terminal Multipurpose Teluk Lamong akan diamortisasi selama masa konsesi dengan menggunakan metode garis lurus.

Terminal Pelabuhan Manyar Gresik

Aset hak konsesi merupakan seluruh biaya konstruksi pembangunan aset konsesi - Terminal Pelabuhan Manyar Gresik yang meliputi biaya pembangunan fasilitas pelabuhan dan biaya-biaya lain yang berhubungan langsung dengan pembangunan tersebut, termasuk biaya pembangunan jalan akses dan fasilitas lainnya yang disyaratkan.

Biaya perolehan aset hak konsesi disusutkan pada saat aset tersebut telah selesai dibangun dan dioperasikan. Aset hak konsesi diamortisasi selama masa hak konsesi dengan menggunakan metode garis lurus sebagai berikut:

	Masa Manfaat/ Useful Lives Tahun / Years	
Jalan dan Bangunan	5 - 76	Roads and Buildings
Perlengkapan Kantor	5	Office Equipment
Peralatan Fasilitas Pelabuhan	5 - 25	Port Facility Equipments

Terminal Multi Purpose Teluk Lamong

Construction contract is the cost directly attributable to the construction of concession assets - Multi Purpose Terminal Lamong Bay which includes land acquisition, feasibility studies and other costs directly related to the development, including the cost of construction of access roads and other facilities required, plus costs of borrowing directly used for financing the construction of concession asset. Borrowing costs are capitalized until the construction is completed and operated.

Concession assets are recorded at fair value, i.e construction cost of concession assets plus a profit margin determined by the management.

Concession asset will APBS and Terminal Multipurpose Teluk Lamong amortized over the concession period using the straight - line method.

Terminal Pelabuhan Manyar Gresik

Concession asset is the cost directly attributable to the construction of concession assets - Manyar Port Terminal Gresik which includes cost of port development and other costs directly related to the development, including the cost of construction of access roads and other facilities required.

The acquisition cost of concession assets is depreciated when the assets are completed and put into operation. These concession assets are intangible assets which are amortized over the concession period using the straight-line method as follows:

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) AND
SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2017, 2016 and 2015
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

3. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

Grup mengakui biaya jasa konstruksi dan peningkatan kemampuan aset konsesi sebagai aset tak berwujud dimana Grup menerima hak (lisensi) untuk membebankan pengguna jasa publik. Suatu hak untuk membebankan pengguna jasa publik bukan merupakan hak tanpa syarat untuk menerima kas karena jumlahnya bergantung pada sejauh mana publik menggunakan jasa. Selama periode konstruksi, Grup mencatat aset tak berwujud dan mengakui pendapatan dan biaya konstruksi sesuai dengan kontraknya.

Biaya konstruksi merupakan nilai dari jumlah perolehan kontrak konstruksi.

Biaya bunga dan biaya pinjaman lainnya, seperti diskonto baik yang secara langsung ataupun tidak langsung digunakan untuk mendanai proses pembangunan aset kualifikasian (*qualifying assets*), dikapitalisasi sampai saat proses pembangunannya selesai. Untuk pinjaman yang dapat dihubungkan secara langsung dengan suatu aset tertentu, jumlah yang dapat dikapitalisasi adalah sebesar biaya pinjaman yang terjadi dalam tahun berjalan, dikurangi dengan penghasilan investasi sementara dari pinjaman tersebut.

Aset takberwujud yang melekat pada suatu komponen fisik dan bukan merupakan bagian yang signifikan dari suatu aset fisik, diakui sebagai bagian dari aset berwujud dan diperlakukan sebagai aset tetap.

Umur manfaat suatu aset takberwujud yang timbul dari hak kontraktual atau hak hukum lainnya tidak boleh melebihi periode hak kontraktual atau hak hukum lainnya tersebut. Akan tetapi, jika hak kontraktual atau hak hukum lainnya tersebut dapat diperbarui, maka umur manfaat mencakup periode yang diperbarui, hanya jika terdapat bukti yang mendukung pembaruan yang dilakukan oleh estimasi tanpa biaya yang signifikan.

3. Significant Accounting Policies (Continued)

The Group recognizes construction services and increased capacity of concession asset as intangible assets which the Group receives the rights (license) to charge users of public services. A right to charge users of public services is not an unconditional right to receive cash because the amounts depend on the extent of public using the service. During the construction period, the Group records intangible assets, and recognizes revenues and costs of construction in accordance with the contract.

Construction cost is the value of the construction contract.

Interest and other borrowing costs, such as discount fees on loans either directly or indirectly used in financing the construction of a qualifying asset, are capitalized up to the date when the construction is completed. For borrowings directly attributable to a qualifying asset, the amount allowed to be capitalized is determined as the actual borrowing costs incurred during the year, less any investment income earned from the temporary investment of such borrowings.

Intangible assets that are attached to a physical component and are not a significant part of a physical assets, is recognized as part of the tangible assets and treated as fixed assets.

Useful life of an intangible asset that arises from contractual or other legal rights shall not exceed the period of the contractual or other legal rights. However, if the contractual or other legal rights can be renewed, the useful life shall include renewal period, only if there is an evidence to support that renewal is performed without significant cost.

3. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

3. Significant Accounting Policies (Continued)

Merek Dagang

Merek dagang digolongkan dalam kelompok aset takberwujud dengan umur manfaat tidak terbatas. Aset takberwujud dengan umur manfaat tidak terbatas tidak diamortisasi. Masa manfaat aset takberwujud dengan umur tak terbatas ditelaah setiap tahun untuk menentukan apakah peristiwa dan keadaan dapat terus mendukung penilaian bahwa umur manfaat tetap tidak terbatas. Jika tidak, perubahan masa manfaat dari tidak terbatas menjadi terbatas diterapkan secara prospektif.

r. Penurunan Nilai Aset Nonkeuangan

Pada tanggal laporan posisi keuangan, Grup menelaah nilai tercatat aset non-keuangan untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa aset tersebut telah mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset diestimasi untuk menentukan tingkat kerugian penurunan nilai (jika ada).

Bila tidak memungkinkan untuk mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali atas suatu aset individu, Grup mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali dari unit penghasil kas atas aset.

Perkiraan jumlah terpulihkan adalah nilai tertinggi antara harga jual neto atau nilai pakai. Jika jumlah yang dapat diperoleh kembali dari aset non-keuangan (unit penghasil kas) kurang dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aset (unit penghasil kas) dikurangi menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali dan rugi penurunan nilai diakui langsung ke laba rugi. Tinjauan penurunan dilakukan ketika indikator penurunan yang hadir.

Menentukan nilai pakai aset memerlukan estimasi arus kas yang diharapkan akan dihasilkan dari penggunaan lanjutan dan disposisi akhir dari aset tersebut.

s. Utang Usaha

Utang usaha adalah utang yang ditimbulkan dari pengadaan barang/jasa yang dinyatakan sebesar nilai barang/jasa yang harus dibayar kepada rekanan. Utang usaha yang berhubungan dengan pemborong pekerjaan diakui dan dicatat berdasarkan persentase fisik pekerjaan yang telah diselesaikan dan dinyatakan dengan Berita Acara.

Trademark

Trademark is classified in Intangible asset with indefinite life. Intangible asset with indefinite life is not amortized. The useful life of an intangible asset with an indefinite that is not being amortized is reviewed annually to determine whether events and circumstances continue to support an indefinite useful life assessment for that asset. If they do not, the change in the useful life assessment from indefinite to finite is accounted for on a prospective basis.

r. Impairment of Non-financial Assets

At the statements of the financial position dates, the Group reviews the carrying amount of non-financial assets to determine whether there is any indication that those assets have suffered an impairment loss. If any such indication exists, the recoverable amount of the asset is estimated in order to determine the extent of the impairment loss (if any).

Where it is not possible to estimate the recoverable amount of an individual asset, the Group estimates the recoverable amount of the cash generating unit to which asset belongs.

Estimated recoverable amount is the higher of net selling price or value in use. If the recoverable amount of a non-financial asset (cash generating unit) is less than its carrying amount, the carrying amount of the asset (cash generating unit) is reduced to its recoverable amount and an impairment loss is recognized immediately in profit or loss. Impairment review is conducted when indicators of impairment are present.

Determining the value in use of assets requires the estimation of cash flows expected to be generated from the continued use and final disposition of such assets.

s. Trade Payables

Trade payables are liabilities arising from purchasing of goods/services. Accounts payable are stated at the value of goods/services to be paid to vendors. Trade payables related to the work of a contractor is recognized and recorded based on physical percentage of work completed and stated in the Minutes of Meeting.

3. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

t. Instrumen Keuangan

Pengakuan dan Pengukuran Awal

Grup mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika dan hanya jika, Grup menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut. Pada saat pengakuan awal aset keuangan atau liabilitas keuangan, Grup mengukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah atau dikurang dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara keuangan atau liabilitas keuangan tersebut. Biaya transaksi yang dikeluarkan dan menerbitkan liabilitas keuangan yang diklasifikasikan pada nilai wajar melalui laba rugi dibebankan segera.

Pengukuran Selanjutnya Aset Keuangan

Pengukuran selanjutnya aset keuangan tergantung pada klasifikasinya pada saat pengakuan awal. Grup mengklasifikasikan aset keuangan dalam salah satu dari empat kategori berikut:

- (i) Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi (FVTPL)
Aset keuangan yang diukur pada FVTPL adalah aset keuangan untuk diperdagangkan atau yang ada saat pengakuan awal telah ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Aset keuangan diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, atau bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek aktual saat ini, atau merupakan derivatif, kecuali derivatif yang ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada FVTPL diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan diakui dalam laba rugi.

3. Significant Accounting Policies (Continued)

t. Financial Instruments

Initial Recognition and Measurement

The Group recognizes a financial asset or a financial liability in the consolidated statement of financial position when and only when, it becomes a party to the contractual provisions of the instrument. At initial recognition, the Group measures financial assets and financial liabilities, at its fair value. In the case of a financial asset or financial liability not at fair value through profit or loss, fair value plus or minus with the transaction costs that are directly attributable to the acquisition or issue of the financial asset or financial liability. Transaction costs incurred on acquisition of a financial asset and issue of a financial liability classified at fair value through profit or loss are expensed immediately.

Subsequent Measurement of Financial Assets

Subsequent measurement of financial assets depends on their classification on initial recognition. The Group classifies financial assets in one of the following four categories:

- (i) Financial Assets at Fair Value Through Profit or Loss (FVTPL)
Financial assets at FVTPL are financial assets held for trading or upon initial recognition it is designated as at fair value through profit or loss.

Financial asset classified as held for trading if it is acquired or incurred principally for the purpose of selling and repurchasing it in the near term, or it is a part of a portfolio of identified financial instrument that are managed together and for which there is evidence of a recent actual pattern of short-term profit taking, or it is a derivative, except for a derivative that is a designated and affective hedging instrument.

After initial recognition, financial assets at FVTPL are measured at its fair value. Gains or losses arising from a change in the fair value of financial assets are recognized in profit or loss.

3. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

3. Significant Accounting Policies (Continued)

- (ii) Pinjaman yang Diberikan dan Piutang
Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan nonderivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif, kecuali:
- a. Pinjaman yang diberikan dan piutang yang dimaksudkan untuk dijual dalam waktu dekat dan yang ada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
 - b. Pinjaman yang diberikan dan piutang yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual; atau
 - c. Pinjaman yang diberikan dan piutang dalam hal pemilik mungkin tidak akan memperoleh kembali yang disebabkan oleh penurunan kualitas pinjaman.

Setelah pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

- (iii) Investasi Dimiliki Hingga Jatuh Tempo (HTM)
Investasi HTM adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, serta Grup mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo.

Setelah pengakuan awal, investasi dimiliki hingga jatuh tempo diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

- (iv) Aset Keuangan Tersedian Untuk Dijual (AFS)
Aset keuangan AFS adalah aset keuangan non-derivatif yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau yang tidak diklasifikasikan sebagai (a) pinjaman yang diberikan dan piutang, (b) investasi yang diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo, atau (c) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

- (ii) *Loans and Receivables*
Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market other than:
- a. *Those that intends to sell immediately or in the near term and upon initial recognition designated as at fair value through profit or loss;*
 - b. *Those that upon initial recognition designated as available for sale; or*
 - c. *Those for which the holder may recover substantially all of its initial investment, other than because of credit deterioration.*

After initial recognition, loans and receivable are measured at amortized cost using the effective interest method.

- (iii) *Held-to-Maturity (HTM) investments*
HTM investments are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments and fixed maturity that the Group has the positive intention and ability to hold to maturity.

After initial recognition, HTM investments are measured at amortized cost using the effective interest method.

- (iv) *Available-for-Sale (AFS) Financial Assets*
AFS financial assets are non-derivative financial assets that are designated as classified as (a) loans and receivable, (b) held-to-maturity investment, or (c) financial assets at fair value through profit or loss.

3. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

Setelah pengakuan awal, aset keuangan AFS diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui dalam penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk kerugian penurunan nilai dan keuntungan atau kerugian akibat perubahan kurs, sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya. Pada saat itu, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

Investasi dalam instrument ekuitas yang tidak memiliki harga kuotasi di pasar aktif dan nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal diukur pada biaya perolehan.

Pengakuan Selanjutnya Liabilitas Keuangan

Pengukuran selanjutnya liabilitas keuangan tergantung pada klasifikasinya pada saat pengakuan awal. Grup mengklasifikasikan liabilitas keuangan dalam salah satu dari kategori berikut:

- (i) **Liabilitas Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi (FVTPL)**
Liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL adalah liabilitas keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan atau yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Liabilitas keuangan diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, atau bagian dari portofolio instrument keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untuk dalam jangka pendek *actual* saat ini, atau merupakan derivatif, kecuali derivatif yang ditetapkan dan efektif sebagai instrument lindung nilai.

Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui dalam laba rugi.

3. Significant Accounting Policies (Continued)

After initial recognition, AFS financial assets are measured at its fair value. Gains or losses arising from a change in the fair value in recognized on other comprehensive income, except for impairment losses and foreign exchange gains and losses, until the financial assets in derecognized. At that time, the cumulative gains losses previously recognized in other comprehensive income shall be reclassified equity to profit or loss as a reclassification adjustment.

Investment in equity instruments that do not have a quoted market price in an active market and whose fair value cannot be reliably measured are measured at cost.

Subsequent Measurement of Financial Liabilities

Subsequent measurement of financial liabilities depends on their classification on initial recognition. The Group classifies financial liabilities into one of the following categories:

- (i) **Financial Liabilities at Fair Value Through Profit or Loss (FVTPL)**
Financial liabilities at FVTPL are financial liabilities held for trading or upon initial recognition it is designated as at fair value through profit or loss. Financial liabilities classified as held for trading if it acquired or incurred principally for the purpose of selling and repurchasing it in the near term, or it is part of a managed together and for which there is evidence of a recent actual pattern of short-term profit taking, or it is a derivative, except for a derivative that is a designated and effective hedging instrument.

After initial recognition, financial liabilities at FVTPL are measured at its fair value. Gains or losses arising from a change in the value are recognized in profit or loss.

3. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

- (ii) Liabilitas Keuangan Lainnya
Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL dikelompokkan dalam kategori ini dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan

Grup menghentikan pengakuan aset keuangan, jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir atau Grup mengalihkan hak kontraktual untuk menerima kas yang berasal dari aset keuangan atau tetap memiliki hak kontraktual untuk menerima kas tetapi juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar arus kas yang diterima tersebut kepada satu atau lebih pihak penerima melalui suatu kesepakatan. Jika Grup secara substansial mengalihkan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, maka Grup menghentikan pengakuan aset keuangan dan mengakui secara terpisah sebagai aset atau liabilitas untuk setiap hak dan kewajiban yang timbul atau yang masih dimiliki dalam pengalihan tersebut. Jika Grup secara substansial tidak mengalihkan dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut dan masih memiliki pengendalian, maka Grup mengakui aset keuangan sebesar keterlibatan berkelanjutan dengan aset keuangan tersebut. Jika Grup secara substansial masih memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, maka Grup tetap mengakui aset keuangan tersebut.

Grup menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas keuangan tersebut berakhir, yaitu ketika kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup mengevaluasi apakah terdapat bukti objek bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih

3. Significant Accounting Policies (Continued)

- (ii) *Other Financial Liabilities*
Financial liabilities that are not classified as financial liabilities at FVTPL are grouped in this category and are measured at amortized cost using the effective interest method.

Derecognition of Financial Assets and Liabilities

The Group derecognized a financial asset when, and only when the contractual rights to the cash flows from the financial asset expire or the Group transfers the contractual rights to receive the cash flows of the financial asset or retains the contractual rights to receive the cash flows but assumes a contractual obligation to pay the cash flows to one or more recipients in an arrangement. If the Group transfers substantially all the risks and rewards of ownership of the financial asset, the Group derecognize the financial asset and recognize separately as asset or liabilities any rights and obligation created or retained in the transfer. If the Group neither transfers nor retains substantially all risks and rewards of ownership of the financial asset and has retained control, the Group continue to recognize the financial asset to the extent of its continuing involvement in the financial asset. If the Group retains substantially all the risks and rewards of ownership of the financial asset, the Group continues to recognize the financial asset.

The Group removes a financial liability, and only when, it is extinguished, ie when the obligation specified in the contract is discharged or cancelled or expires.

Impairment of Financial Assets

At the end of each reporting period, the Group assesses whether there is any objective evidence that a financial asset or group of financial assets is impaired. A financial asset or group of financial assets is impaired and impairment losses are incurred, if and only if, there is objective evidence of impairment as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the asset (loss event),

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) AND
SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2017, 2016 and 2015
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

3. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

peristiwa yang terjadi sebagai pengakuan awal aset tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat distimasi secara andal.

Berikut adalah bukti objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai:

- (a) Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
- (b) Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya gagal bayar atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga;
- (c) Terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;
- (d) Terdapat data yang dapat diobservasi yang mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa depan dari aset, seperti memburuknya status pembayaran pihak peminjam atau kondisi ekonomi yang berkorelasi dengan gagal bayar.

Untuk investasi pada instrumen ekuitas, penurunan yang signifikan atau penurunan jangka panjang dalam nilai wajar instrumen ekuitas di bawah biaya perolehannya merupakan bukti objektif terjadinya penurunan nilai.

Jika terdapat bukti objektif bahwa kerugian yang diberikan dan piutang atau investasi dimiliki hingga jatuh tempo yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, maka jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara jumlah tercatat aset dan nilai kini estimasi arus kas masa dengan yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset tersebut dan diakui pada laba rugi.

Jika penurunan dalam nilai wajar atas aset keuangan tersedia untuk dijual telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terdapat bukti objektif bahwa aset tersebut mengalami penurunan nilai, maka kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lainnya direklasifikasi meskipun aset keuangan tersebut belum dihentikan pengakuannya.

3. Significant Accounting Policies (Continued)

and that loss event has an impact on the estimated future cash flows of the financial asset or group of financial assets that can be reliably estimated.

The following are objective evidence that a financial asset or group of financial assets is impaired:

- (a) Significant financial difficulty of the issuer or obligor;
- (b) A breach of contract, such as default or delinquency in interest or principal payments;
- (c) It becoming probable that the borrower will enter bankruptcy or other financial reorganization;
- (d) Observable data indicating that there is a measurable decrease in the estimated future cash flows from a group of financial assets since the initial recognition, such as adverse changes in the payment status of borrowers or economic condition that correlate with defaults.

For investment in equity instrument a significant and prolonged decline in the fair value of the equity instrument below its cost is an objective evidence of impairment.

If there is objective evidence that an impairment loss has been incurred on loans and receivable or held-to-maturity investments carried at amortized cost, the amount of impairment loss is measured as the difference between the carrying amount of the financial asset and the present value of estimated future cash flows discounted at the financial asset's original effective interest rate and recognized in profit or loss.

When a decline in the fair value of an available-for-sale financial asset has been recognized in other comprehensive income and there is objective evidence that the asset is impaired, the cumulative loss that had been recognized in other comprehensive income shall be reclassified from equity to profit or loss as a reclassification adjustment even though the financial assets has not been derecognized.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) AND
SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2017, 2016 and 2015
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

3. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

Jumlah kerugian kumulatif yang direklasifikasi adalah selisih antara biaya perolehan (setelah dikurangi pelunasan pokok dan amortisasi) dan nilai wajar kini dikurangi penurunan nilai aset keuangan yang sebelumnya telah diakui dalam laba rugi.

Metode Suku Bunga Efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset atau liabilitas keuangan (atau kelompok aset atau liabilitas keuangan) dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau beban bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas masa depan selama perkiraan umur dari instrument keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh jumlah tercatat neto dari aset keuangan atau liabilitas keuangan. Pada saat menghitung suku bunga efektif, Grup mengestimasi arus kas dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrument keuangan tersebut, seperti pelunasan dipercepat, opsi beli dan opsi serupa lain, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian kredit masa depan. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan atau diterima oleh pihak - pihak dalam kontrak yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi, dan seluruh premium atau diskonto lain.

Reklasifikasi

Grup tidak mereklasifikasi derivatif dari diukur pada nilai wajar melalui laba rugi selama derivatif tersebut dimiliki atau diterbitkan dan tidak mereklasifikasi setiap instrument keuangan dari diukur pada nilai wajar laba rugi jika pada pengakuan awal instrumen keuangan tersebut ditetapkan oleh Grup sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Grup dapat mereklasifikasi aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, jika aset keuangan tidak lagi dimiliki untuk tujuan penjualan atau pembelian kembali aset tersebut dalam waktu dekat. Grup tidak mereklasifikasi setiap instrumen keuangan ke diukur pada nilai wajar melalui laba rugi setelah pengakuan awal.

3. Significant Accounting Policies (Continued)

The amount of the cumulative loss that is reclassified are the difference between the acquisition cost (net of any principal repayment and amortisation) and current fair value less any impairment loss on that financial asset previously recognized in profit or loss.

The Effective Interest Method

The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a financial asset or a financial liability (or group of financial assets or financial liabilities) and of allocating the interest income or interest expense over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discount estimated life of the financial instrument or, when appropriate, a shorter period to the net carrying amount of the financial asset or financial liability. When calculating the effective interest rate, the Group estimates cash flows considering all contractual terms of the financial instrument, for example, prepayment, call and similar option, but shall not consider future credit losses. The calculation includes all fees and points paid or received between parties to the contract that are an integral part of the effective interest rate, transaction costs, and all other premiums or discounts.

Reclassification

The Group shall not reclassify a derivative out of the fair value through profit or loss category while it is held or issued and not reclassify any financial instrument out of the fair value through profit or loss category if upon initial recognition it was designated by the Group as at fair value through profit or loss. The Group may reclassify its financial assets at fair value through profit or loss, if the financial asset is no longer held for the purpose of selling or repurchasing the asset in the near term. The Group shall not reclassify any financial instrument into the fair value through profit or loss category after initial recognition.

3. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

Jika, karena perubahan intensi atau keuangan Grup, instrumen tersebut tidak tepat lagi diklasifikasikan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo, maka investasi tersebut direklasifikasi menjadi tersedia untuk dijual dan diukur kembali pada nilai wajar. Jika terjadi penjualan atau reklasifikasi atas investasi dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan, maka sisa investasi dimiliki hingga jatuh tempo direklasifikasi menjadi tersedia untuk dijual, kecuali penjualan atau reklasifikasi tersebut dilakukan ketika aset keuangan sudah mendekati jatuh tempo atau tanggal pembelian kembali setelah seluruh jumlah pokok diperoleh secara substansial sesuai jadwal pembayaran atau diperoleh pelunasan dipercepat; atau terkait dengan kejadian tertentu yang berada di luar kendali, tidak berulang, dan tidak dapat diantisipasi secara wajar.

Saling Hapus Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan, jika dan hanya jika, Grup saat ini memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan berintensi untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan penyelesaian liabilitasnya secara simultan.

Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan dan pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan.

Nilai wajar dikategorikan dalam level yang berbeda dalam suatu hirarki nilai wajar berdasarkan pada apakah input suatu pengakuan dapat diobservasi dan signifikan input terhadap keseluruhan pengukuran nilai wajar:

- (i) Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran (Level 1);

3. Significant Accounting Policies (Continued)

If, as a result of a change in Group's intention or ability, it is no longer appropriate to classify an investment as held to maturity, it shall be reclassified as available for sale and remeasured at fair value. Whenever sales or reclassification of more than an insignificant amount of held-to-maturity investment, any remaining held-to-maturity investments shall be reclassified as available for sale, other than sales or reclassification that are so close to maturity or the financial asset's call date, occur after all the financial asset's original principal has been collected substantially through scheduled payments or prepayments, or are attributable to an isolated event that is beyond control, non-recurring, and could not have been reasonably anticipated.

Offsetting a Financial Asset and a Financial Liability

A financial asset and financial liability shall be offset when and only when, the Group currently has a legally enforceable right to sell off the recognized amount; and intends either to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

Fair Value Measurement

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.

The fair value of financial assets and financial liabilities must be estimated for recognition and measurement or for disclosure purposes.

Fair values are categorized into different levels in a fair value hierarchy based on the degree to which the inputs to the measurement are observable and the significance of the inputs to the fair value measurement in its entirety:

- (i) *Quotation price (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities that can be accessed at the measurement date (Level 1);*

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) AND
SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2017, 2016 and 2015
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

3. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

- (ii) Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung maupun tidak langsung (Level 2);
- (iii) Input yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas (Level 3).

Dalam mengukur nilai wajar aset atau liabilitas, Grup sebisa mungkin menggunakan data pasar yang dapat diobservasi. Apabila nilai wajar aset atau liabilitas tidak dapat diobservasi secara langsung, Grup menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaannya dan memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Perpindahan antara level hirarki nilai wajar diakui oleh Grup pada akhir periode pelaporan dimana perpindahan terjadi.

u. Surat berharga yang Diterbitkan

Surat berharga yang diterbitkan Perusahaan adalah *Senior Notes*. Surat berharga yang diterbitkan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi (lihat Catatan 23).

Surat berharga yang diterbitkan dicatat sebesar nilai nominal dikurangi dengan biaya emisi yang belum diamortisasi. Biaya emisi yang dapat diatributkan secara langsung dengan penerbitan surat berharga adalah biaya yang terjadi sehubungan dengan surat berharga yang diterbitkan, diakui sebagai diskonto dan dikurangkan langsung dari hasil emisi dan diamortisasi selama jangka waktu surat berharga yang diterbitkan tersebut dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

v. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan mengalir ke Grup dan pendapatan dapat diukur dengan andal. Kriteria khusus berikut ini harus dipenuhi juga sebelum pendapatan diakui :

1. Penjualan Barang

Pendapatan atau penjualan barang diakui pada saat resiko dan hak atas kepemilikan barang secara signifikan telah berpindah kepada pembeli.

3. Significant Accounting Policies (Continued)

- (ii) *Inputs other than quotation prices included in Level 1 that are observable for the assets or liabilities, either directly or indirectly (Level 2);*
- (iii) *Unobservable inputs for the assets or liabilities (Level 3).*

When measuring the fair value of an asset or a liability, the Group uses market observable data to the extent possible. If the fair value of an asset or a liability is not directly observable, Group uses valuation techniques that appropriate in the circumstances and maximizes the use of relevant observable inputs and minimizes the use of unobservable inputs.

Transfers between levels of the fair value hierarchy are recognized by the Group at the end of the reporting period during which the change occurred.

u. Securities Issued

Securities issued by the Company are Senior Notes. Securities issued are classified as financial liabilities at amortized cost (see Note 23).

Securities issued are presented at nominal value net of unamortized securities issuance cost. Costs incurred that are directly attributable to the securities issuance are recognized as a discount and offset directly from the proceeds derived from such offerings and amortized over the period of the securities issued using effective interest rate method.

v. Recognition of Revenue and Expenses

Revenue is recognized to the extent that it is probable that the economic benefits will flow to the Group and the revenue can be reliably measured. The following specific recognition criteria must also be met before revenue is recognized :

1. Sales of Goods

Income or sales of goods are recognized when the risks and rights of ownership of goods have passed significantly to the buyer.

3. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

3. Significant Accounting Policies (Continued)

2. **Penjualan Jasa**
Pendapatan dari penjualan jasa diakui pada saat jasa telah diberikan kepada pelanggan.
3. **Pendapatan Kerjasama Mitra**
Perusahaan bekerja sama dengan mitra bisnis untuk melakukan pekerjaan tertentu atau operasi tanah dan wadah kegiatan bongkar muat. Kerjasama dengan mitra usaha berdasarkan perjanjian kontrak dengan periode waktu yang disepakati bersama.

Pendapatan dari mitra usaha patungan diakui berdasarkan faktur bruto (*invoice*) yang diterbitkan oleh perusahaan kepada pihak ketiga.

Biaya yang berkaitan dengan pendapatan usaha bersama mitra disajikan dalam "biaya operasional".
4. **Pendapatan Bunga**
Penghasilan bunga diakui berdasarkan waktu terjadinya dengan acuan jumlah pokok terhutang dan tingkat bunga yang sesuai.
5. **Beban**
Beban diakui pada saat terjadinya berdasarkan metode akrual.

2. **Sales of Services**
Revenue from sales of services is recognized when the services are rendered to customers.
3. **Revenue of Partner Cooperation**
The Company is cooperating with business partners to carry out a particular job or operation of land and container loading and unloading activities. Cooperation with business partners is based on contractual agreements with mutually agreed time period.

Revenue from joint venture partners are recognized based on gross invoices (invoices) issued by the Company to third parties.

Expenses which relate to the revenue of the joint venture partners are presented as "operating expenses".
4. **Interest Income**
Interest income is accrued on time basis, with reference to the outstanding principal and the applicable interest rate.
5. **Expenses**
Expenses are recognized when incurred on accrual basis.

w. Liabilitas Imbalan Kerja

Imbalan Kerja Jangka Pendek
Imbalan kerja jangka pendek diakui ketika pekerja telah memberikan jasanya dalam suatu periode akuntansi, sebesar jumlah tidak terdiskonto dari imbalan kerja jangka pendek yang diharapkan akan dibayar sebagai imbalan atas jasa tersebut.

Imbalan kerja jangka pendek mencakup antara lain upah, gaji, bonus dan insentif.

Imbalan Pensiun dan Imbalan Pascakerja Lainnya

Imbalan kerja sehubungan dengan imbalan pasca kerja karyawan yang bersangkutan sesuai dengan imbalan yang lebih tinggi antara Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 atau Peraturan Grup.

Grup memiliki program imbalan pascakerja yang terdiri atas program pensiun imbalan pasti dan iuran pasti.

w. Employee Benefits Liabilities

Short-term Employee Benefits
Short-term employee benefits are recognized when an employee has rendered service during accounting period, at the undiscounted amount of short-term employee benefits expected to be paid in exchange for that service.

Short term employee benefits include wages, salaries, bonus and incentive.

Pension and Others Post-Employment Benefits

Employee benefits related to post retirement benefits of employees is in accordance with Labor Law No. 13/2003 or the Group regulations, whichever benefit is higher.

The Group has post-employment benefit programs which consist of defined benefit and defined contribution pension plans.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) AND
SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2017, 2016 and 2015
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

3. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

Program pensiun imbalan pasti adalah program pensiun yang menetapkan jumlah imbalan pensiun yang akan diterima oleh karyawan pada saat pensiun, yang biasanya tergantung pada faktor-faktor, seperti umur, masa kerja dan jumlah kompensasi.

Program pensiun iuran pasti adalah program pensiun dimana Grup akan membayar iuran tetap kepada sebuah entitas yang terpisah dan tidak memiliki kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif untuk membayar iuran lebih lanjut bila dana tersebut tidak memiliki aset yang cukup untuk membayar imbalan kerja terkait dengan jasa yang diberikan oleh karyawan pada periode berjalan dan sebelumnya.

1. Imbalan Pasca kerja

a. Program Imbalan Pasti

Grup memberikan imbalan pascakerja manfaat pasti dalam bentuk:

i) Program Pensiun Imbalan Pasti - Perusahaan dan TPS (entitas anak) menyelenggarakan program pensiun imbalan pasti yang dikelola oleh Dana Pensiun untuk seluruh karyawan tetapnya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Perusahaan. Jumlah kontribusi terdiri dari kontribusi karyawan yang dihitung sebesar 5% dari penghasilan dasar pensiun dan kontribusi Grup yang dihitung secara aktuaria.

ii) Program imbalan pasti lainnya dalam bentuk manfaat pascakerja sesuai dengan UU Ketenagakerjaan No. 13/2003 dan lain-lain.

iii) Grup telah melakukan pendanaan imbalan pascakerja karyawan melalui Program Imbalan Pasti (PIP) pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).

Grup mengakui jumlah liabilitas imbalan pasti neto sebesar nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar aset program yang dihitung oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*.

3. Significant Accounting Policies (Continued)

A defined benefit pension plan is a pension plan that defines an amount of pension benefit that will be received by the employee upon retirement, which generally depends on certain factors such as age, years of service and compensation.

Defined contribution plans are pension plans under which the Group pays fixed contributions into a separate entity and have no legal obligation or constructive obligation to pay further contributions if the fund does not have sufficient assets to pay all employee benefits related to the services rendered by the employees in the current and prior periods.

1. Post-employment Benefits

a. Defined Benefits Plans

The Group provides post-employment defined benefits in the form of:

i) Defined Benefit Pension Plans - the Company and TPS (a subsidiary) have defined benefit pension plans covering all of their permanent employees which are managed by a Pension Fund as stipulated in the Company's regulations. Total contributions consist of employee contributions of 5% of employees' basic pensionable salaries and the Company's and subsidiaries' contributions calculated by an actuary.

ii) Other defined benefit plans in the form of post-employment benefits in accordance with Labor Law No. 13/2003 and others.

iii) The Group has funding post-employment benefits to employees through a Defined Benefit Plan (PIP) to the Financial Institution Pension Fund (DPLK).

The Group recognizes the amount of the net defined benefit liability at the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting period less the fair value of plan assets which is calculated by independent actuaries using the Projected Unit Credit method.

3. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

3. Significant Accounting Policies (Continued)

Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan imbalan tersebut.

Present value benefit obligation determine by discounting the benefit.

Grup mencatat tidak hanya kewajiban hukum berdasarkan persyaratan formal program imbalan pasti, tetapi juga kewajiban konstruktif yang timbul dari praktik informal entitas.

The Group records not only for its legal obligation under the formal terms of a defined benefit plan, but also for any constructive obligation that arises from the entity's informal practices.

Biaya jasa kini, biaya jasa lalu dan keuntungan atau kerugian atas penyelesaian, serta bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto diakui dalam laba rugi.

Current service cost, past service cost and gain or loss on settlement, and net interests on the net defined benefit liability (asset) are recognized in profit and loss.

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto yang terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, imbal hasil atas aset program dan setiap perubahan dampak batas atas aset diakui sebagai penghasilan komprehensif lain.

The remeasurement of the net defined benefit liability (assets) comprises actuarial gains and losses, the return on plan assets, and any change in effect of the asset ceiling are recognized in other comprehensive income.

- b. Program iuran pasti
Beban sehubungan dengan program iuran pasti dihitung berdasarkan persentase tertentu dari gaji dasar pensiun atau gaji dasar asuransi dari setiap peserta program yang menjadi tanggungan Grup. Grup mengakui utang iuran atau utang premi asuransi dalam periode dimana karyawan memberikan jasanya.

- b. *Defined Contribution Plans*
The expenses related to defined contribution plans are determined based on certain percentages of the basic pensionable salaries or insurable salaries of respective participants which are borne by the Group. The Group recognizes contributions payable or insurance premiums payable when an employee has rendered service during the period.

- c. Penghargaan Purna Bakti

- c. *Full Devotion Awards*

2. Imbalan kerja jangka panjang lainnya

Grup memberikan imbalan kerja jangka panjang lainnya dalam bentuk uang duka, tunjangan cacat cuti panjang, dan penghargaan masa kerja. Prakiraan biaya imbalan ini diakui sepanjang masa kerja karyawan, dengan menggunakan metodologi akuntansi yang hampir sama dengan metodologi yang digunakan dalam program imbalan pasca kerja manfaat pasti. Liabilitas ini dinilai oleh aktuaria independen.

2. Other long-term employee benefits

The Group provides other long-term employee benefits in the form of compassionate allowance, long service leave, disability allowance and loyalty awards. The expected costs of these benefits are accrued over the period of employment, using accounting methodology similar to post-employment defined benefit plans. These obligations are assessed by an independent actuary.

3. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

x. Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan Final

Beban pajak penghasilan final diakui secara proporsional dengan jumlah pendapatan menurut akuntansi yang diakui selama tahun berjalan. Selisih antara jumlah pajak penghasilan final yang dibayar dengan jumlah yang dibebankan pada penghitungan laba atau rugi tahun berjalan, diakui sebagai pajak dibayar di muka atau utang pajak.

Jika penghasilan telah dikenakan pajak penghasilan final, perbedaan antara nilai tercatat aset dan liabilitas dengan dasar pengenaan pajaknya tidak diakui sebagai aset atau liabilitas pajak tangguhan.

Pajak final yang berkaitan dengan usaha utama Perusahaan dibebankan dalam akun beban pajak final.

Pajak Penghasilan Non-Final

Beban pajak adalah jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi pada suatu periode.

Pajak kini dan pajak tangguhan diakui dalam laba rugi, kecuali pajak penghasilan yang timbul dari transaksi atau peristiwa yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau secara langsung di ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau ekuitas.

Jumlah pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar diakui sebagai liabilitas. Jika jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode-periode sebelumnya melebihi jumlah pajak yang terutang untuk periode tersebut, maka kelebihanannya diakui sebagai aset. Liabilitas (aset) pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya diukur sebesar jumlah yang diperkirakan akan dibayar kepada (direstitusi dari) otoritas perpajakan, yang dihitung menggunakan tarif pajak (dan undang-undang pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

3. Significant Accounting Policies (Continued)

x. Income Tax

Final Income Tax

Final income tax expense is recognized proportionately with the accounting income recognized during the year. The difference between the final income tax paid and the final tax expense in the profit or loss for the period is recognized as prepaid tax or tax payable.

If the income is already subjected to final income tax, the differences between the consolidated financial statements carrying value of existing assets and liabilities and their tax bases are not recognized as deferred tax assets or liabilities.

Final tax relating to the Company's main business is charged to the tax final expense account.

Non-Final Income tax

Tax expense is the aggregate amount included in the determination of profit or loss for the period in respect of current tax and deferred tax.

Current tax and deferred tax is recognized in profit or loss, except for income tax arising from transactions or events that are recognized in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is recognized in other comprehensive income or equity, respectively.

The amount of current tax for current and prior periods shall, to the extent unpaid, be recognized as a liability. If the amount already paid in respect of current and prior periods exceeds the amount due for those periods, the excess shall be recognized as an asset. Current tax liabilities (assets) for the current and prior periods shall be measured at the amount expected to be paid to (recovered from) the taxation authorities, using the tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) AND
SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2017, 2016 and 2015
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

3. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

Manfaat terkait dengan rugi pajak yang dapat ditarik untuk memulihkan pajak kini dari periode sebelumnya diakui sebagai aset. Aset pajak tangguhan diakui untuk akumulasi rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak masa depan akan tersedia untuk dimanfaatkan dengan rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan.

Seluruh perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan, kecuali perbedaan temporer kena pajak yang berasal dari:

1. Pengakuan awal *goodwill*; atau
2. Pengakuan awal aset atau liabilitas dari transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak).

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba dimaksud, kecuali jika aset pajak tangguhan timbul dari pengakuan awal aset atau pengakuan awal liabilitas dalam transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak).

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Grup memperkirakan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

3. Significant Accounting Policies (Continued)

Tax benefits related to tax loss that can be carried back to recover current tax of a previous periods is recognized as an asset. Deferred tax asset is recognized for the carryforward of unused tax losses and unused tax credit to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the unused tax losses and unused tax credits can be utilized.

A deferred tax liability shall be recognized for all taxable temporary differences, except to the extent that the deferred tax liability arises from:

1. *The initial recognition of goodwill; or*
2. *The initial recognition of an asset or liability in a transaction which is not a business combination and at the time of the transaction, affects neither accounting profit nor taxable profit (tax loss).*

A deferred tax asset shall be recognized for all deductible temporary differences to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the deductible temporary difference can be utilized, unless the deferred tax asset arises from the initial recognition of an asset or liability in a transaction that is not a business combination and at the time of the transaction affects neither accounting profit nor taxable profit (tax loss).

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the period when the asset is realized or the liability is settled, based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.

The measurement of deferred tax liabilities and deferred tax assets shall reflect the tax consequences that would follow from the manner in which the Group expects, at the end of the reporting period, to recover or settle the carrying amount of its assets and liabilities.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) AND
SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2017, 2016 and 2015
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

3. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir periode pelaporan. Grup mengurangi jumlah tercatat aset pajak tangguhan jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut. Setiap pengurangan tersebut dilakukan pembalikan atas aset pajak tangguhan hingga kemungkinan besar laba kena pajak yang tersedia jumlahnya memadai.

Saling hapus aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan, jika dan hanya jika:

1. Grup memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini; dan
2. Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas:
 - i. Entitas kena pajak yang sama; atau
 - ii. Entitas kena pajak yang berbeda yang bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan dimana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diperkirakan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

Grup melakukan saling hapus atas aset pajak kini dan liabilitas pajak kini, jika dan hanya jika, Grup:

1. Memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang diakui; dan
2. Bermaksud untuk menyelesaikan dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

3. Significant Accounting Policies (Continued)

The carrying amount of a deferred tax asset reviewed at the end of each reporting period. The Group shall reduce the carrying amount of a deferred tax asset to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow the benefit of part or all of that deferred tax asset to be utilized. Any such reduction shall be reversed to the extent that it becomes probable that sufficient taxable profit will be available.

The Group offsets deferred tax assets and deferred tax liabilities, if and only if:

1. *The Group has a legally enforceable right to set off current tax assets against current tax liabilities; and*
2. *The deferred tax assets and the deferred tax liabilities relate to income taxes levied by the same taxation authority on either:*
 - i. *The same taxable entity; or*
 - ii. *Different taxable entities which intend either to settle current tax liabilities and assets on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously, in each future period in which significant amounts of deferred tax liabilities or assets are expected to be settled or recovered.*

The Group offsets current tax assets and current tax liabilities if, and only, if the Group:

1. *Has legally enforceable right to set off the recognized amounts, and*
2. *Intends either to settle on a net basis, or to realize the assets and settle liabilities simultaneously.*

3. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

y. Provisi

Provisi diakui bila Grup memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu dan kemungkinan besar penyelesaian kewajiban menyebabkan arus keluar sumber daya serta jumlah kewajiban tersebut dapat diestimasi secara andal.

Jumlah yang diakui sebagai provisi merupakan estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan, dengan mempertimbangkan berbagai risiko dan ketidakpastian yang selalu mempengaruhi berbagai peristiwa dan keadaan. Apabila suatu provisi diukur menggunakan arus kas yang diperkirakan untuk menyelesaikan kewajiban kini, maka nilai tercatatnya adalah nilai kini dari arus kas.

Jika sebagian atau seluruh pengeluaran untuk menyelesaikan provisi diganti oleh pihak ketiga, maka penggantian itu diakui hanya pada saat timbul keyakinan bahwa penggantian pasti akan diterima jika Grup menyelesaikan kewajiban. Penggantian tersebut diakui sebagai aset yang terpisah. Jumlah yang diakui sebagai penggantian tidak boleh melebihi provisi.

Provisi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi dibatalkan.

z. Kontinjensi

Liabilitas kontinjensi diungkapkan, kecuali jika kemungkinan kecil (*remote*) terjadi arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi. Aset kontinjensi tidak diakui di dalam laporan keuangan, tetapi diungkapkan jika terdapat kemungkinan besar (*probable*) arus masuk manfaat ekonomi.

3. Significant Accounting Policies (Continued)

y. Provisions

A provision is recognized when Group has a present obligation (legal or constructive) as a result of past event and it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation and the amount of the obligation can be estimated reliably.

The amount recognized as a provision shall be the best estimate of the expenditure required to settle the present obligation at the end of the reporting period, by taking into account the risks and uncertainties that inevitably surround many events and circumstances. Where a provision is measured using the estimated cash flows to settle the present obligation, its carrying amount is the present value of those cash flows.

If some or all of the expenditure to settle a provision is expected to be reimbursed by another party, the reimbursement shall be recognized when, it is virtually certain that reimbursement will be received when the Group settles the obligation. The reimbursement shall be treated as a separate asset. The amount recognized for the reimbursement shall not exceed the amount of the provisions.

Provisions are reviewed at each reporting date and adjusted to reflect the most current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation, the provision is reversed.

z. Contingencies

Unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefits is unlikely to take place, contingent liabilities are disclosed. Contingent assets are not recognized in the financial statements but are disclosed when an inflow of economic benefits is probable.

3. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

aa. Peristiwa setelah periode pelaporan

Peristiwa setelah periode pelaporan yang memberikan informasi tambahan tentang posisi keuangan Perusahaan pada tanggal pelaporan (peristiwa penyesuaian), jika ada, dicatat di dalam laporan keuangan. Peristiwa setelah periode pelaporan yang merupakan peristiwa non-penyesuaian diungkapkan di dalam catatan atas laporan keuangan.

bb. Laba per Saham

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba atau rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar dalam suatu periode.

Untuk tujuan penghitungan laba per saham dilusian, Grup menyesuaikan laba atau rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk dan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar, atas dampak dari seluruh saham biasa berpotensi yang bersifat dilutif.

3. Significant Accounting Policies (Continued)

aa. Events after the reporting period

Events after reporting period that provide additional information about the Company's financial position at the reporting date (adjusting events), if any, are reflected in the financial statements. Post year-end events that are not adjusting events are disclosed in the notes to financial statements.

bb. Earnings per Share

Basic earnings per share is computed by dividing the profit or loss attributable to ordinary equity holders of the parent entity by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the period.

For the purpose of computing the diluted earnings per share, the Group shall adjust profit or loss attributable to ordinary equity holders of the parent entity, and the weighted average number of shares outstanding, for the effect of all dilutive potential ordinary shares.

4. Kas dan Setara Kas

4. Cash and Cash Equivalents

	2017 Rp	2016 Rp	2015 Rp
Kas/Cash on Hand	2,815,391	5,427,189	6,985,695
Bank/Cash in Banks			
<u>Pihak-pihak Berelasi/ Related Parties</u>			
Rupiah:			
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	211,178,824	168,521,255	113,937,420
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	177,755,429	174,052,743	183,005,263
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	82,142,228	86,231,805	60,275,261
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	48,141,286	64,351,335	34,664,673
PT Bank Tabungan Negara Tbk	15,451,654	--	--
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	--	--	463
Dolar Amerika Serikat/ US Dollars :			
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	42,724,603	15,091,380	8,396,644
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	5,095,065	153,943	3,192,513
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	790,964	2,842,785	5,332,413
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	137,470	75,042	1,921,284
Sub Total (Dipindahkan/ To Transfer)	583,417,523	511,320,288	410,725,934

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) AND
SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2017, 2016 and 2015
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

4. Kas dan Setara Kas (Lanjutan)

4. Cash and Cash Equivalents (Continued)

	2017 Rp	2016 Rp	2015 Rp
Sub Total (Pindahan/ <i>Transferred</i>)	583,417,523	511,320,288	410,725,934
Euro:			
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	--	23,550	25,512
Dolar Singapura/ <i>Singapore Dollars</i> :			
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	--	92,989	--
<u>Pihak Ketiga/ <i>Third Parties</i></u>			
Rupiah :			
PT Bank CIMB Niaga Tbk	87,515,235	86,497,878	31,300,474
PT Bank DBS Indonesia	7,924,015	5,919,941	13,394,382
PT Bank Permata Tbk	5,675,641	41,038,787	26,039,513
PT Bank Bukopin Tbk	4,901,320	1,546,607	137,162
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	3,528,131	--	--
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	2,235,776	3,550,941	8,806,688
Standard Chartered Bank	1,820,998	1,794,164	5,842,349
PT Bank OCBC NISP Tbk	1,033,095	--	--
PT Bank Central Asia Tbk	731,137	926,399	553,235
PT Bank QNB Indonesia Tbk	712,754	992,836	16,326
PT Bank OUB Indonesia	547,210	81,489	79,600
PT Bank ANZ Indonesia	58,347	52,589	57,406
PT Bank Mega Tbk	--	1,791,025	--
Dolar Amerika Serikat/ <i>US Dollars</i> :			
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	6,184,840	14,837,199	29,518,417
Standard Chartered Bank	5,185,695	7,817,219	87,445,756
PT Bank QNB Indonesia Tbk	1,814,799	1,764,603	5,857,415
Deutsche Bank	708,395	699,872	718,812
PT Bank ANZ Indonesia	669,440	1,030,207	1,919,219
PT Bank Permata Tbk	351,373	347,170	3,463,012
PT Bank CIMB Niaga Tbk	178,315	169,040	2,654,844
PT Bank OCBC NISP Tbk	162,605	--	--
PT Bank Syariah Mandiri	--	161,239	--
Total Bank/ <i>Banks</i>	<u>715,356,644</u>	<u>682,456,032</u>	<u>628,556,056</u>
Deposito Berjangka/ <i>Time Deposit</i>			
<u>Pihak-pihak Berelasi/ <i>Related Parties</i></u>			
Rupiah :			
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	128,250,000	131,250,000	266,330,600
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	161,000,000	86,000,000	149,000,000
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	169,020,000	33,000,000	109,000,000
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	89,000,000	22,000,000	80,000,000
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	39,000,000	40,000,000	--
PT Bank DKI	18,193,836	--	--
PT Bank Pembangunan Daerah Bali	15,000,000	5,000,000	--
PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur	13,000,000	5,000,000	--
PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat	8,000,000	3,000,000	--
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	8,000,000	3,000,000	--
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan	8,000,000	3,000,000	--
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah	8,000,000	3,000,000	--
Sub Total (Dipindahkan/ <i>To Transfer</i>)	<u>664,463,836</u>	<u>334,250,000</u>	<u>604,330,600</u>

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) AND
SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2017, 2016 and 2015
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

4. Kas dan Setara Kas (Lanjutan)

4. Cash and Cash Equivalents (Continued)

	2017 Rp	2016 Rp	2015 Rp
Sub Total (Pindahan/ <i>Transferred</i>)	664,463,836	334,250,000	604,330,600
Dolar Amerika Serikat/ <i>US Dollars</i> :			
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	440,310,000	134,360,000	--
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	158,511,600	67,180,000	--
PT Bank Syariah Mandiri	--	--	68,975,000
<u>Pihak Ketiga/ <i>Third Parties</i></u>			
Rupiah :			
PT Bank CIMB Niaga Tbk	136,000,000	53,671,800	182,000,000
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	82,500,000	61,000,000	101,000,000
PT Bank Bukopin Tbk	77,000,000	122,369,409	5,000,000
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	57,000,000	122,000,000	--
PT Bank OUB Indonesia	12,500,000	--	--
PT Bank Mandiri Taspen Pos	10,500,000	--	--
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	8,000,000	--	--
PT Bank Mega Syariah	5,000,000	--	--
PT Bank Permata Tbk	5,000,000	10,000,000	119,000,000
PT Bank Pan Indonesia Tbk	3,000,000	--	--
PT Bank QNB Indonesia Tbk	--	120,000,000	--
PT Bank Mayapada Internasional Tbk	--	13,000,000	--
PT Bank ICBC Indonesia	--	3,000,000	--
Dolar Amerika Serikat/ <i>US Dollars</i> :			
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	203,220,000	--	206,925,000
PT Bank CIMB Niaga Tbk	169,350,000	--	--
PT Bank Bukopin Tbk	--	47,026,000	413,850,000
Standard Chartered Bank	--	32,246,400	33,108,000
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk	--	8,000,000	--
PT Bank Permata Tbk	--	--	193,130,000
PT Bank QNB Indonesia Tbk	--	--	55,180,000
Total Deposito/ <i>Time Deposits</i>	<u>2,032,355,436</u>	<u>1,128,103,609</u>	<u>1,982,498,600</u>
Total	<u>2,750,527,471</u>	<u>1,815,986,830</u>	<u>2,618,040,351</u>
Deposito berjangka merupakan deposito berjangka waktu 1 - 3 bulan/ <i>Time Deposits represent time deposits of 1 - 3 months</i>			
Tingkat Bunga Kontraktual Deposito Berjangka Per Tahun/ <i>Contractual Interest Rates of Time Deposits Per Annum</i>			
Rupiah	5.75% - 9.25%	3% - 10.75%	3% - 7%
Dolar Amerika Serikat/ <i>US Dollar</i>	1.75% - 2.50%	0.60% - 3.5%	2% - 3.5%
Shariah Deposit Revenue Sharing Rate			
Tingkat Bagi Hasil Deposito Syariah	50%-70.45%	50%-51%	50%-51%

5. Kas yang Dibatasi Penggunaannya

5. Restricted Cash

	2017 Rp	2016 Rp	2015 Rp
Rupiah			
<u>Pihak-pihak Berelasi/Related Parties</u>			
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	--	--	20,000,000
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	5,149,595	10,969,001	--
<u>Pihak Ketiga/Third Parties</u>			
Dolar Amerika Serikat/ US Dollars:			
PT Bank ANZ Indonesia	--	22,244,106	22,244,106
Total	5,149,595	33,213,107	42,244,106
Tingkat Bunga Kontraktual Deposito Berjangka Per Tahun/ <i>Contractual Interest Rates of Time Deposits Per Annum</i>			
Rupiah	5.7% - 6%	5.7% - 6%	3.5% - 8.5%
Dolar Amerika Serikat/ US Dollar	0.25% - 2%	0.25% - 2%	2.60% - 2.65%
Jangka Waktu/ Time period	4-12 bulan/ months	4-12 bulan/ months	4-12 bulan/ months

Perusahaan telah menjaminkan deposito dengan jangka waktu 1 bulan dengan perpanjang otomatis sebesar Rp20.000.000 dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk yang digunakan sebagai jaminan Pengadaan Badan Usaha Pembangunan dan Pengelolaan Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS) Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dan deposito sebesar USD1,670,856 (angka penuh) pada PT Bank ANZ Indonesia sebagai jaminan pembukaan LC untuk pekerjaan tambahan pengadaan 10 unit STS PT Teluk Lamong tahap II pada periode 2015.

The Company pledged deposits with maturities of 1 month with automatic roll over amounting to Rp20,000,000 from PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk which are used as collateral for Procurement Enterprise Development and Management of West Surabaya Access Channel (APBS) Port of Tanjung Perak Surabaya and deposits of USD1,670,856 (full amount) at PT Bank ANZ Indonesia as collateral for opening LC for additional work procurement of 10 units of STS PT Teluk Lamong phase II in the period in 2015.

BJTI telah menjaminkan deposito dengan jangka waktu 6 dan 3 bulan dengan *automatic roll over* dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk yang digunakan sebagai jaminan pekerjaan relokasi 2 unit CC dari Perusahaan Cabang Banjarmasin ke Perusahaan Cabang Sampit, pekerjaan relokasi 8 unit RTG dari PT Terminal Petikemas Surabaya ke Perusahaan Cabang Banjarmasin, pemeliharaan 3 unit CC dan 8 unit RTG dan pemeliharaan 2 unit grab di PT Terminal Teluk Lamong, 4 unit CC di Perusahaan Cabang Banjarmasin dan pemeliharaan 2 unit CC di Terminal Petikemas Semarang dengan nominal masing-masing sebesar Nihil, Rp4.072.580, Rp944.000, Rp1.103.002 dan Rp621.234 pada 31 Desember 2017, Rp4.849.419, Rp4.072.580, Rp944.000, dan Rp1.103.002 pada 31 Desember 2016 dan nihil pada 31 Desember 2015.

BJTI pledged deposits with maturities of 6 and 3 months with automatic roll over from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk which are used as collateral for a job relocation CC 2 units from the Banjarmasin Branch to the Sampit Branch, job relocation 8 RTG units from PT Terminal Petikemas Surabaya to the Banjarmasin Branch, maintenance of 3 CC units and 8 RTG and maintenance Grab 2 units in PT Terminal Teluk Lamong and 4 CC units the Banjarmasin Branch and maintenance of 2 units of CC at Terminal Petikemas Semarang with nominal amount of Nil, Rp4,072,580, Rp944,000, Rp1,103,002, and Rp621,234 as of December 31, 2017, Rp4,849,419, Rp4,072,580, Rp944,000 and Rp1,103,002 as of December 31, 2016 and nil as of December 31, 2015.

6. Investasi Jangka Pendek

6. Short Term Investments

	2017 Rp	2016 Rp	2015 Rp
Rupiah			
PT Bank BNI Syariah	10,310,790	4,917,631	--
Dolar Amerika Serikat/US Dollars:			
PT Bank CIMB NiagaTbk	677,400	--	--
Total	10,988,190	4,917,631	--

Investasi pada PT Bank BNI Syariah merupakan investasi dalam bentuk deposito berjangka waktu 12 bulan dalam Rupiah dengan mekanisme bagi hasil.

Investment in PT Bank BNI Syariah represents investment in the form of time deposit 12 months in Rupiah with profit sharing mechanism.

Investasi pada PT Bank CIMB Niaga Tbk merupakan investasi dalam bentuk *market linked deposit* sebesar USD50,000 dengan tingkat kupon maksimum sebesar 1,80% per tahun dan minimum sebesar 0,55% per tahun.

Investment in PT Bank CIMB Niaga Tbk represents investment in the form of market linked deposit amounting to USD50,000 with maximum coupon of 1.80% per annum and minimum coupon of 0.55% per annum.

7. Piutang Usaha

7. Trade Receivables

	2017 Rp	2016 Rp	2015 Rp	
a. Berdasarkan Pelanggan :				a. By Customer
Pihak Berelasi:				Related Parties:
Sudah Difakturkan	234,262,255	39,178,696	66,918,922	Billed
Belum Difakturkan	49,717,282	18,615,453	33,212,391	Unbilled
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(15,100,071)	(14,507,695)	(19,173,686)	Allowance for Impairment Loss
Sub Total	268,879,466	43,286,454	80,957,627	Sub Total
Pihak Ketiga :				Third Parties:
Sudah Difakturkan	473,163,367	465,303,112	399,411,560	Billed
Belum Difakturkan	160,693,968	72,482,209	40,022,763	Unbilled
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(76,232,875)	(53,762,241)	(57,602,682)	Allowance for Impairment Loss
Sub Total	557,624,460	484,023,080	381,831,641	Sub Total
Total	826,503,926	527,309,534	462,789,268	Total
b. Berdasarkan Umur (Hari)				b. By Age (Days)
Belum Jatuh Tempo	423,585,560	258,268,497	299,522,317	Current
Jatuh Tempo :				Overdue :
1 - 30 Hari	147,115,642	162,042,525	106,825,545	1 - 30 Days
31 - 90 Hari	74,873,024	77,202,629	38,786,143	31 - 90 Days
91 - 180 Hari	205,523,335	9,287,548	9,870,012	91 - 180 Days
181 - 270 Hari	12,568,371	14,285,077	5,026,609	181 - 270 Days
271 - 365 Hari	16,404,673	4,336,389	6,168,325	271 - 365 Days
> 365 Hari	37,766,267	70,156,805	73,366,685	> 365 Days
Sub Total	917,836,872	595,579,470	539,565,636	Sub Total
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(91,332,946)	(68,269,936)	(76,776,368)	Allowance for Impairment Loss
Total	826,503,926	527,309,534	462,789,268	Total

7. Piutang Usaha (Lanjutan)

7. Trade Receivables (Continued)

	2017 Rp	2016 Rp	2015 Rp	
c. Berdasarkan Mata Uang				c. By Original Currency
USD	15,590,740	17,617,515	24,942,138	USD
Rupiah	902,246,132	577,961,955	514,623,498	Rupiah
Sub Total	917,836,872	595,579,470	539,565,636	Sub Total
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(91,332,946)	(68,269,936)	(76,776,368)	Allowance for Impairment Loss
Total	826,503,926	527,309,534	462,789,268	Total

Perubahan saldo cadangan kerugian penurunan nilai piutang adalah sebagai berikut:

Movements in the balance of allowance for impairment loss are as follows:

	2017 Rp	2016 Rp	2015 Rp	
Saldo Awal	(68,269,936)	(76,776,368)	(88,764,852)	Beginning Balance
Penambahan	(29,452,493)	(27,059,801)	(13,276,589)	Addition
Pemulihan	--	25,988,813	23,915,736	Recovery
Penghapusan	6,389,483	9,577,420	1,349,337	Write Off
Saldo Akhir	(91,332,946)	(68,269,936)	(76,776,368)	Ending Balance

Cadangan kerugian penurunan nilai ditentukan secara individual dan kolektif berdasarkan umur piutang dan historis pembayaran dari pelanggan.

Allowance for impairment loss is determined individually and collectively by age of receivables and historical payment of customers.

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang usaha adalah cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya piutang tersebut.

The Management believes that the allowance for impairment loss of trade receivable is adequate to cover possible losses on uncollectible accounts.

Lihat Catatan 46 mengenai risiko kredit piutang usaha untuk memahami bagaimana Grup mengelola dan mengukur kualitas kredit piutang usaha yang lancar dan tidak mengalami penurunan nilai.

See Note 46 regarding credit risk of trade receivables to understand how the Group manages and measures credit quality of trade receivables that are neither past due nor impaired.

8. Sifat dan Transaksi Pihak Berelasi

8. Nature of Relationship and Transactions With Related Parties

Dalam kegiatan usahanya, Grup melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi yang dilakukan dengan syarat-syarat dan kondisi normal. Transaksi ini termasuk pembayaran oleh Grup atas beban-beban pihak-pihak berelasi atau sebaliknya. Saldo transaksi dengan pihak berelasi, transaksi-transaksi pihak berelasi dan saldo dengan pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut

In the normal course of business, the Group entered into certain transactions with the related parties conducted by normal terms and conditions. These transactions include payments made by the Group to the related parties or vice versa. Nature of relationship and transactions, transactions accounts balances with related parties accounts as of and for the years ended December 31, 2017, 2016 and 2015 are as follows:

8. Sifat dan Transaksi Pihak Berelasi (Lanjutan)

**8. Nature of Relationship and Transactions
With Related Parties (Continued)**

a. Sifat Hubungan dan Transaksi

a. Nature of Relationship and Transactions

Sifat Hubungan/ Nature of Relationship	Pihak-Pihak Berelasi/Related Parties	Transaksi/Transactions
- Pemegang Saham/Shareholder	- Pemerintah Republik Indonesia/ Government of Republic of Indonesia	Hak Konsesi atas TTL, APBS dan BMS / <i>Concession rights on TTL, APBS, and BMS</i>
- Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ Control through the Government of the Republic of Indonesia	- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Biaya Penyingkiran Kerangka Kapal KMP. Wihan Sejahtera/ <i>The Cost of the Removal of the ship KMP. Frimwork Wihan Sejahtera</i>
	- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Penempatan Giro, deposito Berjangka, fasilitas kredit sindikasi, biaya keuangan dan Pendapatan bunga / <i>Placement of current accounts, Time deposits, Syndicated loans Facility, Finance charges and Interest income</i>
	- PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	Penempatan Giro, deposito Berjangka, fasilitas kredit sindikasi, biaya keuangan dan Pendapatan bunga / <i>Placement of current accounts, Time deposits, Syndicated loans Facility, Finance charges and Interest income</i>
	- PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	Penempatan Giro, deposito Berjangka, biaya keuangan dan Pendapatan bunga / <i>Placement of current accounts, Time deposits, Finance charges and Interest income</i>
	- PT Bank Pembangunan Daerah Bali	Penempatan Giro, deposito Berjangka, biaya keuangan dan Pendapatan bunga / <i>Placement of current accounts, Time deposits, Finance charges and Interest income</i>
	- PT Bank DKI	Penempatan Giro, deposito Berjangka, biaya keuangan dan Pendapatan bunga / <i>Placement of current accounts, Time deposits, Finance charges and Interest income</i>
	- PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur	Penempatan Giro, deposito Berjangka, biaya keuangan dan Pendapatan bunga / <i>Placement of current accounts, Time deposits, Finance charges and Interest income</i>
	- PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat	Penempatan Giro, deposito Berjangka, biaya keuangan dan Pendapatan bunga / <i>Placement of current accounts, Time deposits, Finance charges and Interest income</i>
	- PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	Penempatan Giro, deposito Berjangka, biaya keuangan dan Pendapatan bunga / <i>Placement of current accounts, Time deposits, Finance charges and Interest income</i>
	- PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan	Penempatan Giro, deposito Berjangka, biaya keuangan dan Pendapatan bunga / <i>Placement of current accounts, Time deposits, Finance charges and Interest income</i>
	- PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah	Penempatan Giro, deposito Berjangka, biaya keuangan dan Pendapatan bunga / <i>Placement of current accounts, Time deposits, Finance charges and Interest income</i>
	- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Penempatan Giro, deposito Berjangka, fasilitas kredit sindikasi, biaya keuangan dan Pendapatan bunga / <i>Placement of current accounts, Time deposits, Syndicated loans Facility, Finance charges and Interest income</i>
	- PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Penempatan Giro, deposito Berjangka, biaya keuangan dan Pendapatan bunga / <i>Placement of current accounts, Time deposits, Finance charges and Interest income</i>
	- PT Bank Syariah Mandiri	Penempatan Giro, deposito Berjangka, biaya keuangan dan Pendapatan bunga / <i>Placement of current accounts, Time deposits, Finance charges and Interest income</i>
	- PT Pertamina (Persero)	Penjualan Jasa Kepelabuhan , Sewa lahan dan Suplay bahan bakar / <i>Sales of harbor service, rental of land and fuel supply</i>

8. Sifat dan Transaksi Pihak Berelasi (Lanjutan)

**8. Nature of Relationship and Transactions
With Related Parties (Continued)**

Sifat Hubungan/ Nature of Relationship	Pihak-Pihak Berelasi/Related Parties	Transaksi/Transactions
	- PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.	Kontraktor dalam pembangunan dan pemeliharaan aset tetap dan aset tak berwujud fasilitas pelabuhan/ <i>Contractors in the construction and maintenance of fixed assets and intangible assets of port facilities</i>
	- PT Adhi Karya (Persero) Tbk	Kontraktor dalam pembangunan dan pemeliharaan aset tetap dan aset tak berwujud fasilitas pelabuhan/ <i>Contractors in the construction and maintenance of fixed assets and intangible assets of port facilities</i>
	- PT Virama Karya (Persero)	Kontraktor dalam pembangunan dan pemeliharaan aset tetap dan aset tak berwujud fasilitas pelabuhan/ <i>Contractors in the construction and maintenance of fixed assets and intangible assets of port facilities</i>
	- PT Utama Karya (Persero)	Kontraktor dalam pembangunan dan pemeliharaan aset tetap dan aset tak berwujud fasilitas pelabuhan/ <i>Contractors in the construction and maintenance of fixed assets and intangible assets of port facilities</i>
	- PT Pengerukan Indonesia (Persero)	Pinjaman dana dan Biaya Pengerukan / <i>Loan funds and Dredging Costs</i>
	- PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	Kontraktor dalam pembangunan dan pemeliharaan aset tetap dan aset tak berwujud fasilitas pelabuhan/ <i>Contractors in the construction and maintenance of fixed assets and intangible assets of port facilities</i>
	- PT Nindya Karya (Persero)	Kontraktor dalam pembangunan dan pemeliharaan aset tetap dan aset tak berwujud fasilitas pelabuhan/ <i>Contractors in the construction and maintenance of fixed assets and intangible assets of port facilities</i>
	- PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	Penjualan jasa pelayanan Kepelabuhanan/ <i>Sales of services Ports</i>
	- PT Djakarta Lloyd (Persero)	Penjualan Jasa Kepelabuhan dan Sewa lahan/ <i>Sales of harbor service and rental of land</i>
	- PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)	Penjualan Jasa Kepelabuhan dan Sewa lahan/ <i>Sales of harbor service and rental of land</i>
	- PT Bahtera Adhiguna	Penjualan Jasa Kepelabuhan/ <i>Sales of harbor service</i>
	- PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	Penjualan Sewa Lahan dan Alat / <i>Sales rental of land and Tools</i>
	- PT Dharma Lautan Nusantara (Persero)	Penjualan Jasa Kepelabuhan/ <i>Sales of harbor service</i>
	- PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Pembelian Energi Listrik, Penjualan Sewa Lahan dan Kerjasama Operasi/ <i>Electrical Energy Supply, Land Rental Sales and Joint Operations</i>
	- PT Perusahaan Daerah Air Minum	Pembelian Air/ <i>Purchase of Water</i>
	- TNI/ABRI	Penjualan jasa pelayanan Kepelabuhanan dan Biaya Penyapuan ranjau/ <i>Sales of services Ports and Clearance Costs of mines</i>
	- PT Petro Kimia Gresik	Penjualan Sewa Lahan / <i>Sales rental of land</i>
	- PT Perikanan Nusantara (Persero)	Penjualan Sewa Lahan / <i>Sales rental of land</i>
	- PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)	Penjualan Sewa Lahan / <i>Sales rental of land</i>
	- PT Semen Tonasa	Penjualan Jasa Kepelabuhan/ <i>Sales of harbor service</i>
- Entitas Asosiasi / <i>Associates</i>	- PT Portek Indonesia	Biaya Pemeliharaan Alat fasilitas Pelabuhan / <i>Port facilities Equipment Maintenance Costs</i>
	- PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera	Investasi saham dan Pemberian Pinjaman dana / <i>Investment in Stock and lending Funds</i>
	- PT Ambang Barito Nusapersada	Pemberian Pinjaman Dana/ <i>Lending Fund</i>
	- PT Jasa Marga Bali Tol	Investasi saham/ <i>Investment in Stock</i>
	- PT Lamin Aspalindo tiga	Investasi saham/ <i>Investment in Stock</i>
	- Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4)	Penempatan Dana Imbalan kerja Karyawan/ <i>Placement of employee Benefit Funds</i>
- Mempunyai anggota manajemen kunci yang sama dengan entitas anak dan memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas anak/ <i>Entities which have the same key management personnel as the subsidiaries and have significant influence over consolidated subsidiaries</i>	- Koperasi Karyawan Pelindo III	Jasa Keamanan/ <i>Security Services</i>

8. Sifat dan Transaksi Pihak Berelasi (Lanjutan)

**8. Nature of Relationship and Transactions
With Related Parties (Continued)**

b. Transaksi-Transaksi Pihak Berelasi

Rincian penjualan dan pembelian kepada pihak berelasi adalah sebagai berikut:

b. Transactions with Related Parties

The details of sales to and purchases from related parties are as follows:

1. Pendapatan Operasi/Operating Revenues

	2017 Rp	2016 Rp	2015 Rp
<u>Entitas Sepengendali Pemerintah/ Entity Controlled by the Government :</u>			
PT Pertamina (Persero)	120,887,392	174,592,368	65,835,564
Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS)	120,701,753	93,788,215	71,276,863
PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)	71,870,531	7,525,767	6,644,948
PT Pembangunan Jawa Bali	68,086,390	--	--
PT Dharma Lautan Nusantara (Persero)	38,712,790	--	13,557,389
PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	36,219,026	36,795,218	33,145,390
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	28,814,326	--	--
PT Petro Kimia Gresik	27,430,699	--	--
PT Djakarta Lloyd (Persero)	10,999,269	11,471,009	16,729,571
PT Perikanan Nusantara (Persero)	6,704,115	--	--
PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)	6,330,194	--	--
PT Semen Tonasa	6,121,624	9,232,949	3,905,555
PT Bahtera Adhiguna	5,550,746	272,145	6,662,189
Lain-lain di bawah Rp5 Miliar/ Other below Rp5 Billion	26,368,168	25,374,667	18,846,106
Total	574,797,023	359,052,338	236,603,575
Sebagai persentase terhadap total pendapatan/ As a percentage of total revenue	6.50%	4.80%	3.65%

2. Pembelian/Purchases

	2017 Rp	2016 Rp	2015 Rp
<u>Entitas Sepengendali Pemerintah/ Entity Controlled by the Government :</u>			
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	102,294,818	261,133,534	158,545,943
PT Nindya Karya (Persero)	102,325,312	74,146,210	32,177,181
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	76,742,273	73,874,976	--
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	56,422,730	75,523,853	103,960,024
PT Perusahaan Daerah Air Minum	13,302,699	4,467,660	4,729,126
PT Pertamina (Persero)	10,158,861	1,971,951	4,969,531
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	9,584,674	128,157,392	37,486,488
PT Utama Karya (Persero)	--	17,850,158	154,116,209
<u>Entitas Asosiasi/Associate:</u>			
PT Portek Indonesia	43,032,319	43,310,514	22,001,508
Lain-lain di bawah Rp5 Miliar/ Other below Rp5 Billion	5,695,658	7,726,339	13,149,179
Total	419,559,344	688,162,587	531,135,189

8. Sifat dan Transaksi Pihak Berelasi (Lanjutan)

8. Nature of Relationship and Transactions
With Related Parties (Continued)

3. Kompensasi manajemen kunci/Compensation of key management

	2017	2016	2015
	Rp	Rp	Rp
Imbalan Jangka Pendek/Short-term Employee Benefits	45,427,731	41,137,643	30,311,759
Imbalan Kerja Jangka Panjang/Long-term Employee Benefits	6,012,006	3,358,424	1,484,816
Total beban/Total expenses	51,439,737	44,496,067	31,796,575
Sebagai persentase terhadap total beban pegawai/ As a percentage of total Employees Cost	3.83%	4.90%	4.47%

4. Beban keuangan/Finance costs

	2017	2016	2015
	Rp	Rp	Rp
<u>Entitas Sepengendali Pemerintah/</u> <u>Entity Controlled by the Government :</u>			
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	86,027,135	22,682,757	--
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	86,027,135	22,682,757	--
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	34,408,101	9,068,748	--
Total	206,462,371	54,434,262	--
Total beban keuangan/Total finance costs	600,181,782	476,983,708	398,335,367
Sebagai persentase terhadap total beban keuangan/ As a percentage of total finance costs	34.40%	11.41%	0.00%

5. Pendapatan Bunga/ Interest Income

Pendapatan Bunga

Pendapatan bunga pihak berelasi merupakan kompensasi yang diterima oleh BJTI dari pinjaman yang diberikan kepada PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 masing - masing sebesar Rp12.914.833, Rp12.810.707 dan Rp4.140.222.

Interest Income

Interest income from related parties is the compensation received by the BJTI of loans granted to PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera for the period of three months ended December 31, 2017, 2016 and 2015 amounted to Rp12,914,833, Rp12,810,707 and Rp4,140,222, respectively.

Transaksi Perusahaan dengan pihak berelasi

Perusahaan

a. Sesuai Keputusan Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya No. HK.207/01/15/SYB. TOR-16 tanggal 4 Februari 2016 tentang penugasan penyingkiran kerangka Kapal KMP Wihan Sejahtera dan Muatannya kepada Perusahaan, untuk melaksanakan pengangkatan / penyingkiran kerangka kapal.

The Company transactions with the related parties

The Company

a. According to the Decision of the head of Harbourmaster Office Tanjung Perak Surabaya No. HK.207/01/15/SYB. TOR-16 dated 4 February 2016 regarding the assignment of removal of ship frame and the cargo of KMP Wihan Sejahtera to the Company, to carry out the exclusion / removal of ship frame.

b. Berdasarkan Berita Acara Rapat Direksi Perusahaan tentang pemindahan / penyingkiran Kerangka kapal KMP Wihan Sejahtera No. BA.3241/TR.0202/PIII-2016 tanggal 5 Februari 2016, Dewan Direksi memutuskan sebagai berikut:

b. Based on the Minutes of Meeting of the Board of Directors of the Company on the removal/exclusion of ship frame of KMP Wihan Sejahtera No. BA.3241/TR.0202/ PIII-2016 dated February 5, 2016, the Board of Directors decided the following:

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

8. Sifat dan Transaksi Pihak Berelasi (Lanjutan)

- Direksi Perusahaan secara prinsip menyetujui pengangkatan kapal atau penyingkiran kerangka kapal KMP Wihan Sejahtera dan muatannya dari posisi koordinat 070- 11"- 06"S/1120-41"-21E menuju posisi dumping area pada koordinat 070-10'-32"S/1120-41'-53E dan dalam pelaksanaannya ditugaskan kepada PT Pelindo Marine Service (Entitas anak).
 - Dalam pelaksanaan pengangkatan atau penyingkiran kerangka KMP Wihan Sejahtera dimaksud agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - Biaya yang timbul atas pengangkatan atau penyingkiran kapal tersebut (*Cost Recovery*) akan dibiayai terlebih dahulu oleh Perusahaan dan akan dikomunikasikan dengan berbagai pihak dan akan berkonsultasi dengan kepala kantor Otoritas pelabuhan Tanjung Perak mengenai kemungkinan penambahan konsesi pada terminal teluk Lamong atau APBS untuk penyingkiran kerangka kapal tersebut.
 - Surat direksi Perusahaan No. PJ.01/12/P.III-2016 tanggal 31 Maret 2016 Perihal Permohonan Ijin Kegiatan Penyingkiran Kapal KMP Wihan Sejahtera.
 - Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. KL.303/3/3/DN-16 tanggal 12 Mei 2016, tentang Pemberian ijin kegiatan penyingkiran kerangka kapal KMP Wihan Sejahtera.
- c. Melalui Surat No. PJ.01/07/P.III-2016 tanggal 5 Februari 2016 perihal Penugasan Penyingkiran Kerangka Kapal KMP Wihan Sejahtera dan muatannya, Direksi Perusahaan menugaskan kepada PT Pelindo Marine Service (entitas anak) untuk melaksanakan pengangkatan atau penyingkiran kerangka kapal KMP Wihan Sejahtera dan muatannya.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) AND
SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2017, 2016 and 2015
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

**8. Nature of Relationship and Transactions
With Related Parties (Continued)**

- *Directors of the Company in principle approved the removal of the ship or exclusion of the ship frame of KMP Wihan Sejahtera and its cargo of position coordinates 070-11 "-06" S/1120-41 "-21E into the position of dumping area in coordinates 070-10 '-32 "S/1120-41'-53E and implementation was assigned to PT Pelindo Marine Service (a Subsidiary).*
 - *In the implementation of the removal or exclusion of ship frame KMP Wihan Sejahtera has to pay attention to the following matters:*
 - *Costs incurred arising from the removal or exclusion of the vessel (Cost Recovery) will be financed in advance by the Company and will be communicated to the parties and will consult with the head office of the Port Authority of Tanjung Perak regarding the possibility of adding a concession on terminal bay of Lamong or APB for the removal of the ship frame.*
 - *Letter of the Company's Board of Directors No. PJ.01/12/P.III-2016 dated March 31, 2016, regarding Application for Permit on the removal of ship of KMP Wihan Sejahtera.*
 - *The decision of the Director General of Sea Transportation No. KL.303/3/3DN-16 dated May 12, 2016, regarding the granting of permit on the removal activities ship frame of KMP Wihan Sejahtera.*
- c. *Through Letter No. PJ.01/07/P.III 2016 dated February 5, 2016, regarding the Assignment Removal of Ship Frame of KMP Wihan Sejahtera and its cargo, the Board of Directors of the Company assigned to PT Pelindo Marine Service (a subsidiary) to carry out the removal of or exclusion ship frame of KMP Wihan Sejahtera and its cargo.*

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

8. Sifat dan Transaksi Pihak Berelasi (Lanjutan)

Pekerjaan tersebut telah dilakukan dengan dasar Perjanjian Penugasan Pekerjaan Penyingkiran Kerangka Kapal KMP Wihan Sejahtera dan muatannya kontrak No. HK.0501/366.1/P.III-2016 tanggal 1 Juni 2016 yang telah diubah sesuai perjanjian perubahan No. HK.0502/626.1/P.III-2016 tanggal 19 Desember 2016 dan Penyelesaian pekerjaan tertuang dalam Berita Acara *Final Under water Survey* Pekerjaan Penyingkiran Kerangka Kapal KMP Wihan Sejahtera beserta muatannya No. UM.003/37/01/DNG.SBY-2016 tanggal 15 September 2016 dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Distrik Navigasi kelas I Surabaya.

- Berita acara pembersihan lokasi kerangka kapal KMP Wihan Sejahtera tanggal 29 September 2016.
- Berita acara No. BA.54/PJ.01/DIRPMS-2016 tentang pembayaran penerimaan negara bukan pajak (PNBP) atas kegiatan penyingkiran kerangka kapal KMP Wihan Sejahtera beserta muatannya.

d. Melalui Surat No.PJ.01/01/P.III.2017 tanggal 24 Januari 2017 Direktur Komersial dan Operasional telah menyampaikan surat kepada Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak perihal penyampaian Biaya penugasan penyingkiran kerangka kapal KMP Wihan Sejahtera, dan disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- a) Perusahaan telah melaksanakan mandat penugasan penyingkiran kerangka KMP Wihan Sejahtera dari Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya;
- b) Penugasan pada butir a tersebut diatas menimbulkan konsekuensi timbulnya biaya untuk pekerjaan tersebut sebesar Rp58.678.059 sudah termasuk pajak yang dibayarkan sehingga sebagai sebuah entitas BUMN Perusahaan wajib mempertanggung jawabkan atas biaya yang telah dikeluarkan;

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) AND
SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2017, 2016 and 2015
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

**8. Nature of Relationship and Transactions
With Related Parties (Continued)**

The work has been done on the basis of the Assignment Agreement Ship Frame Removal Job of KMP Wihan Sejahtera and its cargo contract No.HK.0501/366.1/P.III-2016 dated June 1, 2016 and has been renewed by contract No. HK.0502/ 626.1/P.III-2016, dated December 19, 2016, the completion of work is stated in the Minutes of Final Work Under water Survey Ship Frame Removal of KMP Wihan Sejahtera along with its cargo No. UM.003/37/01/DNG.SBY 2016 dated September 15, 2016 from the Ministry of Transportation Directorate General of Sea Navigation District grade I Surabaya.

- *The Minutes of Cleanup of the location of ship frame of KMP Wihan Sejahtera dated September 29, 2016.*
- *The Minutes No. BA.54/PJ.01/DIRPMS 2016 on the non-tax state revenue payments (PNBP) on the removal activities of ship frame of KMP Wihan Sejahtera and its cargo.*

d. *Through Letter No.PJ.01/01/P.III.2017 dated January 24, 2017 Director of Commercial and Operations has sent a letter to the Harbourmaster Main Office Tanjung Perak regarding the delivery of the assignment fee on the removal of ship frame of KMP Wihan Sejahtera ship, and delivered the following :*

- a) *The Company has been carrying out the mandate of the assignment on the removal of KMP Wihan Sejahtera ship frame from the Harbourmaster Main Office Tanjung Perak Surabaya;*
- b) *Assignment in the item a above has consequences to accrue costs for such work amounting to Rp58,678,059 including tax paid so that as a SOE, the Company shall be responsible for the expenses incurred;*

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

8. Sifat dan Transaksi Pihak Berelasi (Lanjutan)

- c) Berkaitan dengan biaya yang timbul sebagaimana butir b di atas kiranya dapat dikompensasikan dengan konsesi yang diterima oleh Perusahaan sehingga biaya pelaksanaan pekerjaan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada negara dan tidak menimbulkan implikasi hukum dimasa mendatang;
- d) Terhadap pelaksanaan kompensasi atas konsesi sebagaimana butir c di atas akan dilaksanakan dengan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak.
- e. Sesuai dengan Nota Dinas No. ND.13/DITKEU/II-2017 tanggal 2 Februari 2017 dari Direktur Keuangan yang ditujukan kepada Direktur Komersial dan Operasional perihal biaya penyingkiran kerangka kapal KMP Wihan Sejahtera dan muatannya serta hasil penjualan sisa kerangka kapal termasuk biaya yang terjadi atas penjualan.
- f. Melalui Surat Tagihan No.PJ.01/03/P.III-2017 tanggal 23 Februari 2017, Perusahaan telah menyampaikan tagihan biaya penugasan penyingkiran kerangka Kapal KMP Wihan Sejahtera dan Muatannya kepada Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak sebesar Rp52.267.802 termasuk pajak yang dibayarkan.
- g. Perusahaan telah memperoleh Surat Konfirmasi Biaya Penugasan Penyingkiran Kerangka kapal KMP Wihan Sejahtera dan muatannya dari Kementerian Perhubungan Direktorat Perhubungan Laut Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya sesuai Surat No. KL.303/01/02/SYB.Tpr.17 Tanggal 27 Februari 2017 dimana disampaikan hal-hal sebagai berikut :

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) AND
SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2017, 2016 and 2015
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

**8. Nature of Relationship and Transactions
With Related Parties (Continued)**

- c) *Related to the costs incurred as stated in item d above would be compensated with concessions received by the Company so that the cost of implementation of the work can be accounted to the state and does not give rise to legal implications in the future;*
- d) *On the implementation of compensation for concessions as stated in item c above will be implemented by the Authority of Main Port Tanjung Perak.*
- e. *In accordance with the Official Memo No. ND.13/DITKEU/II-2017 dated February 2, 2017 from the Finance Director addressed to the Commercial and Operations Director regarding removal cost of ship frame of KMP Wihan Sejahtera and its cargo as well as proceeds from the sale of remaining ship frame includes cost incurred over sales.*
- f. *Through a Collection Letter No. PJ.01/03/P.III-2017 February 23, 2017, the Company has submitted a bill for the assignment on the removal of ship frame of KMP Wihan Sejahtera and cargo to the Harbourmaster Main Office Tanjung Perak amounting to Rp52,267,802 including taxes paid.*
- g. *The Company has obtained the Confirmation Letter on the Assignment for the Removal Cost of the Ship Frame of KMP Wihan Sejahtera and cargo from the Ministry of Transportation Directorate of Sea Transportation Harbourmaster Main Office Tanjung Perak Surabaya according to letter No. KL.303/01/02/SYB.Tpr.17 dated February 27, 2017 which submitted the following matters:*

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) AND
SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2017, 2016 and 2015
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

8. Sifat dan Transaksi Pihak Berelasi (Lanjutan)

**8. Nature of Relationship and Transactions
With Related Parties (Continued)**

1. Tagihan atas biaya yang telah dikeluarkan Perusahaan terkait dengan penyingkiran kerangka kapal (Salvage) KMP Wihan Sejahtera, yang ditagihkan kepada pemerintah akan menjadi utang pemerintah dan akan dikoordinasikan dengan Direktorat Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan;
 2. Terhadap usulan Perusahaan terkait dengan biaya penyingkiran kerangka kapal (Salvage) KMP Wihan Sejahtera agar dapat dikompensasikan dengan konsesi yang diterima oleh Perusahaan, akan disampaikan usulannya kepada Kementerian Perhubungan.
- h. Berdasarkan resume notisi revidi atas biaya pekerjaan penyingkiran kerangka kapal KMP Wihan Sejahtera pada Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS) Perusahaan tanggal 16 Juni 2017 antara Perusahaan dan Tim Revidi Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur, dengan hasil revidi adalah biaya pekerjaan penyingkiran kerangka kapal KMP Wihan Sejahtera pada Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS) Perusahaan, menunjukkan adanya koreksi terhadap biaya - biaya sebelum PPN sebesar Rp2.571.781 (jika diperhitungkan setelah PPN, maka koreksi sebesar Rp2.822.599).
- i. Perusahaan telah Menyampaikan Surat Permohonan Konfirmasi terkait Penggantian Biaya/permohonan Kompensasi Biaya Pekerjaan Penyingkiran Kerangka KMP Wihan Sejahtera dengan Perpanjangan Masa Konsesi Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS) kepada Kepala Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak melalui Surat tertanggal 24 September 2017 No KU.0203/101.1/P.III-2017.
- j. Berdasarkan Berita Acara Rapat Tentang Pembahasan Penyingkiran Kerangka kapal KMP Wihan Sejahtera tanggal 23 Januari 2018, dengan Pembahasan dan Keputusan Rapat sebagai berikut :
1. *The bill for costs already incurred by the Company associated with the removal of the ship frame (Salvage) of KMP Wihan Sejahtera, which will be billed to the government and the government debt will be coordinated by the Directorate of Sea Transportation Ministry of Transportation;*
 2. *On the proposal of the Company related to the removal cost of ship frame (Salvage) of KMP Wihan Sejahtera it was suggested to be compensated by concessions received by the Company, will be submitted proposal to the Ministry of Transportation.*
- h. *Based on the resume of the notification review on the cost of removal work of the ship framework of KMP Wihan Sejahtera on Alur Pelayaran Surabaya Pelayaran (APBS), the Company dated June 16, 2017 between the Company and BPKP Representative Team of East Java Province, with the result of review on the cost of removal work of the ship frame of KMP Wihan Sejahtera on Alur Pelayaran Surabaya Pelayaran (APBS) the Company, indicates a correction on fees before VAT amounting to Rp2,571,781 (if calculated after VAT, the correction is Rp2,822,599).*
- i. *The Company has submitted a Confirmation Request related to Reimbursement Cost / Work Cost Compensation on the Removal of Frame of KMP Wihan Sejahtera Ship Frame with Extension of Concession Period of Surabaya's West Shipping Channel (APBS) to Harbourmaster Office Utama Tanjung Perak through Letter dated 24 September 2017 No. KU.0203 / 101.1 / P.III-2017.*
- j. *Based on the Minutes of Meeting on Discussion of Removal of ship Frame of KMP Wihan Sejahtera dated January 23, 2018, with Discussion and Meeting Decision as follows:*

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

8. Sifat dan Transaksi Pihak Berelasi (Lanjutan)

- i. Bahwa terkait dengan Penyingkiran kapal KMP Wihan Sejahtera yang telah dilakukan oleh Perusahaan, Kementerian Perhubungan berpedoman kepada PP55 tahun 2010 tentang Kenavigasian dan PM 71 tahun 2013 tentang Salvage dan/atau Pekerjaan Bawah Tanah.
- ii. Selanjutnya terhadap permohonan Perusahaan mengenai penggantian biaya penyingkiran kapal KMP Wihan Sejahtera, Kementerian Perhubungan terlebih dahulu berkoordinasi dan meminta persetujuan kepada BPKP.
- iii. Mengenai bentuk kompensasi yang disampaikan oleh Perusahaan akan ditentukan kemudian dengan meminta pertimbangan BPKP.

Transaksi entitas anak dengan pihak berelasi

PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS)

- a. TPS menandatangani perjanjian jasa teknik dengan DP World Australia Ltd. dan Perusahaan pada tanggal 22 Juni 1999 yang berlaku untuk periode lima tahun. Sesuai dengan perjanjian, TPS akan membayar jasa yang diterima dengan tarif harian sebesar USD600 (angka penuh) sampai USD1,000 (angka penuh) per orang (dengan biaya retainer per bulan sebesar USD36,786 (angka penuh) efektif 1 Juni 2014 dan sebesar USD31,200 (angka penuh) pada tahun 2013 sampai dengan 31 Mei 2014) kepada DP World dan USD470 (angka penuh) sampai USD750 (angka penuh) per orang (dengan biaya retainer per bulan sebesar USD24,524 (angka penuh) efektif 1 Juni 2014 dan sebesar USD20,800 (angka penuh) pada tahun 2013 sampai dengan 31 Mei 2014) kepada Perusahaan. Mulai 1 Januari 2009, perjanjian jasa teknik dengan DP World Australia Ltd. dialihkan ke DP World Asia Holdings Ltd. Perjanjian jasa teknik tersebut telah diperpanjang beberapa kali dan terakhir pada bulan April 2010, dengan Resolusi Tertulis Pemegang Saham; perjanjian ini diperpanjang sampai dengan pemberitahuan selanjutnya.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) AND
SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2017, 2016 and 2015
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

**8. Nature of Relationship and Transactions
With Related Parties (Continued)**

- i. Whereas related to the removal of ship of KMP Wihan Sejahtera Disposal which has been done by the Company, the Ministry of Transportation is guided by PP 55 of 2010 on Navigation and PM 71 of 2013 regarding Salvage and/or Underground Work.
- ii. Subsequent to the application of the Company for the reimbursement of ship removal cost of KMP Wihan Sejahtera, the Ministry of Communications initially coordinate and requested approval from BPKP.
- iii. Regarding the compensation form submitted by the Company will be determined later by requesting BPKP consideration.

Subsidiaries' transactions with the related parties

PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS)

- a. TPS signed technical assistance agreement with DP World Australia Ltd. and the Company on June 22, 1999, for an initial period of five years. In accordance with the agreement, TPS shall pay fees for services received at a daily rate of USD600 (full amount) to USD1,000 (full amount) per person (with monthly retainer fee of USD36,786 (full amount) effective on June 1, 2014 and USD31,200 (full amount) in 2013 up to May 31, 2014) to DP World and USD470 to USD750 (full amount) per person (with monthly retainer fee of USD24,524 (full amount) effective on June 1, 2014 and USD20,800 (full amount) in 2013 up to May 31, 2014) to the Company. Starting January 1, 2009, the technical assistance agreement with DP World Australia Ltd was amended to become technical assistance agreement with DP World Asia Holdings Ltd. The technical assistance agreement has been extended several times, the latest of which was on April, 2010 with Written Resolution from Shareholders and this agreement has been extended until further notice.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) AND
SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2017, 2016 and 2015
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

8. Sifat dan Transaksi Pihak Berelasi (Lanjutan)

**8. Nature of Relationship and Transactions
With Related Parties (Continued)**

Pada tanggal 5 Mei 2014, Perjanjian antara TPS dengan DP World dan Perusahaan telah diubah dimana efektif tanggal 1 Juni 2014, biaya retainer per bulan yang harus dibayar kepada DP World dan Perusahaan masing-masing menjadi sebesar USD36,786 (angka penuh) dan USD24,524 (angka penuh). Biaya jasa ini akan dinaikkan 4% setiap tanggal 1 Januari mulai tahun 2015.

On May 5, 2014, the agreement between TPS with DP World and the Company has been amended, whereby effective June 1, 2014, the monthly retainer fee payable to DP World and the Company would be USD36,786 (full amount) and USD24,524 (full amount), respectively. This service fee shall increased by 4% on the first day of January every year starting 2015.

Jumlah biaya jasa teknik dari DP World Asia Holdings Ltd., sebesar Rp6.619.687 pada tahun 2017, Rp6.368.187 pada tahun 2016 dan Rp6.180.260 pada tahun 2015, sedangkan jumlah biaya jasa teknik dari Perusahaan sebesar Rp4.385.361 pada tahun 2017, Rp4.290.843 pada tahun 2016 dan Rp4.107.115 pada tahun 2015. Tidak terdapat saldo liabilitas atas jasa teknik tersebut pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015.

Total technical service fees incurred from DP World Asia Holdings Ltd. was Rp6,619,687 in 2017, Rp6,368,187 in 2016 and Rp6,180,260 in 2015 while total technical service fees incurred from the Company was Rp4,385,361 in 2017, Rp4,290,843 in 2016 and Rp4,107,115 in 2015. There was no outstanding liability for these technical service fees as of December 31, 2017, 2016 and 2015.

- b. Pada tanggal 30 November 2007, TPS menandatangani surat perjanjian baru dengan PT Portek Indonesia (PI) mengenai pemeliharaan 11 unit *container crane*. Perjanjian pemeliharaan mencakup biaya personel sebesar Rp4.449.994 per tahun dan suku cadang sebesar Rp3.418.100 per tahun. Biaya suku cadang tersebut tidak termasuk dalam *consumable part* dan akan dibebankan oleh PI secara terpisah berdasarkan harga pasar ditambah 9% dari nilai tagihan. Perpanjangan atas Perjanjian ini mencakup biaya personel sebesar Rp5.850.000 per tahun dan biaya suku cadang ditetapkan sesuai dengan perjanjian. Perjanjian ini berlaku efektif hingga 30 November 2013. Perjanjian dengan PI telah diperpanjang untuk periode dari tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017. Perjanjian ini kemudian tidak diperpanjang, dan digantikan dengan perjanjian dengan PT Pelindo Daya Sejahtera dan World Crane Services FZE.

- b. On November 30, 2007, TPS signed a new agreement with PT Portek Indonesia (PI) for the maintenance of 11 units of container cranes. The maintenance agreement covered annual personnel cost amounting to Rp4,449,994 and annual spare parts cost amounting to Rp3,418,100. The cost of spare parts is excluded from the consumable parts and would be charged by PI separately based on market price plus a premium of 9% from invoice value. The renewal for agreement above included personnel cost amounting to Rp5,850,000 per year and the cost of spare parts was determined as stated on the agreement. This agreement was effective until November 30, 2013. The agreement with PI has been extended for the period from January 1, 2014 to December 31, 2017. This agreement was not extended, and was replaced by the agreement with PT Pelindo Daya Sejahtera and World Crane Services FZE.*

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) AND
SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2017, 2016 and 2015
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

8. Sifat dan Transaksi Pihak Berelasi (Lanjutan)

**8. Nature of Relationship and Transactions
With Related Parties (Continued)**

Jumlah biaya pemeliharaan dan biaya suku cadang termasuk *consumable part* dari PT Portek Indonesia sebesar Rp11.869.122 pada tahun 2017, Rp24.073.025 pada tahun 2016 dan Rp16.131.344 dan USD337,830 pada tahun 2015. Sedangkan biaya personel sebesar Rp12.315.559 pada tahun 2017, Rp11.590.594 pada tahun 2016 dan Rp9.453.537 dan USD7,876 pada tahun 2015. Saldo liabilitas atas pemeliharaan sebesar Rp850.000 pada tahun 2017, Rp1.567.281 pada tahun 2016, USD22,340 pada tahun 2015, disajikan sebagai bagian dari Pemeliharaan pada "Beban Akrual" (Catatan 28).

Total maintenance cost and spare parts, cost including consumables parts, from PT Portek Indonesia amounted to Rp11,869,122 in 2017, Rp24,703,025 in 2016 and Rp16,131,344 and USD337,830 in 2015. Personnel cost amounted to Rp12,315,559 in 2017, Rp11,590,594 in 2016 and USD7,876 in 2015. The outstanding maintenance payable amounted to Rp850,000 in 2017, Rp1,567,281 in 2016 and USD22,340 in 2015, were presented as part of Maintenance under "Accrued Expenses" (Note 28).

- c. TPS memiliki perjanjian dengan Koperasi Pegawai Pelindo III terkait dengan jasa *outsourcing* dan rumah tangga. Jumlah biaya jasa *outsourcing* dan rumah tangga sebesar Rp2.351.469 pada tahun 2017, Rp1.914.964 pada tahun 2016 dan Nihil pada tahun 2015. Perusahaan juga memiliki perjanjian terkait dengan jasa pemeliharaan dengan Koperasi Pegawai Pelindo III. Jumlah biaya pemeliharaan sebesar Rp1.313.063 pada tahun 2017, Rp1.580.830 pada tahun 2016 dan Nihil pada tahun 2015. Saldo liabilitas atas jasa *outsourcing*, rumah tangga dan pemeliharaan ini masing-masing sebesar Rp268.545, Rp329.959 dan Nihil pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015, disajikan sebagai bagian dari lain-lain pada "Beban Akrual" (Catatan 28).

- c. TPS entered in to an annual outsourcing and housekeeping service agreement with Koperasi Pegawai Pelindo III. The total outsourcing and housekeeping service fee amounting to Rp2,351,469 in 2017, Rp1,914,964 in 2016 and Nil in 2015. The Company also signed an annual maintenance service agreement with Koperasi Pegawai Pelindo III. The total maintenance service fee amounted to Rp1,313,063 in 2017, Rp1,580,830 in 2016 and Nil in 2015. The outstanding liabilities on outsourcing, housekeeping and maintenance services amounted to Rp268,545, Rp329,959 and Nil as of December 31, 2017, 2016 and 2015, respectively, were presented as part of others under "Accrued Expenses" (Note 28).

PT Ambang Barito Nusapersada
(Ambapers)

Ambapers merupakan perusahaan yang menjalankan usaha dalam bidang pembangunan yang meliputi pengerukan sungai, muara sungai dan muara laut serta pembuatan bendungan sungai berikut pemeliharaan dan perawatan serta pengelolaan alur pelayaran. Piutang Ambapers merupakan hasil kesepakatan antara Perusahaan dengan Ambapers sesuai dengan Risalah Rapat tanggal 7 Januari 2010 antara Gubernur Propinsi Kalimantan Selatan (Kalsel),

PT Ambang Barito Nusapersada
(Ambapers)

Ambapers is a company which carries on business in the area of development which includes dredging of rivers, estuaries, marine estuaries and dams as well as the management and maintenance of the shipping line. Long term receivables from Ambapers is the result of agreement between the Company and Ambapers in accordance with the Minutes of Meetings dated January 7, 2010 between the Governor of South Kalimantan,

8. Sifat dan Transaksi Pihak Berelasi (Lanjutan)

**8. Nature of Relationship and Transactions
With Related Parties (Continued)**

Perusahaan, PD Bangun Banua dan Ambapers, yang isinya bahwa terhadap pinjaman Ambapers kepada Perusahaan akan diselesaikan melalui pola *bussiness to bussiness*.

the Company, PD Bangun Banua and Ambapers, which contains that the loan receivables from Ambapers will be resolved through business to business scheme.

Selanjutnya Perusahaan menindaklanjuti dengan Risalah Rapat Direksi Perusahaan tentang Penyelesaian Hukum dengan Pemerintah Propinsi Kalsel dengan Keputusan Rapat bahwa penyelesaian masalah hukum adalah upaya perdamaian melalui cara "*Dading*".

The Company follow up with Minutes of Meeting of the Board of Directors of the Company regarding Legal Settlement with the Provincial Government of South Kalimantan that the resolution during the meeting is to settle legal matters peacefully through way of "Dading".

c. Saldo dengan pihak berelasi

c. Balances with related parties

	2017 Rp	2016 Rp	2015 Rp
<u>Aset/Assets</u>			
Kas dan setara kas/Cash and cash equivalents			
<u>Entitas Sepengendali Pemerintah/</u>			
<i>Entity Controlled by the Government :</i>			
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	789,040,032	454,777,673	457,758,019
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	372,969,788	257,457,029	268,269,833
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	334,748,893	175,565,748	143,467,774
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	217,298,756	97,426,377	145,585,957
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	54,451,654	40,000,000	--
PT Bank DKI	18,193,836	--	--
PT Bank Pembangunan Daerah Bali	15,000,000	5,000,000	--
PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur	13,000,000	5,000,000	--
PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat	8,000,000	3,000,000	--
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	8,000,000	3,000,000	--
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan	8,000,000	3,000,000	--
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah	8,000,000	3,000,000	--
PT Bank Syariah Mandiri	--	--	68,975,000
Lain-lain di bawah Rp5 Miliar/ Other below Rp5 Billion	--	--	463
Total	1,846,702,959	1,047,226,827	1,084,057,046
Sebagai persentase terhadap total aset / As a percentage of total assets	7.27%	4.72%	5.71%
Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya/			
<i>Restricted cash and cash equivalents</i>			
<u>Entitas Sepengendali Pemerintah/</u>			
<i>Entity Controlled by the Government :</i>			
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	5,149,595	10,969,001	--
Total	5,149,595	10,969,001	--
Sebagai persentase terhadap total aset / As a percentage of total assets	0.02%	0.05%	0.00%

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) AND
SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2017, 2016 and 2015
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

8. Sifat dan Transaksi Pihak Berelasi (Lanjutan)

**8. Nature of Relationship and Transactions
With Related Parties (Continued)**

	2017 Rp	2016 Rp	2015 Rp
Piutang usaha - bruto/ Trade receivables - gross			
<u>Entitas Sepengendali Pemerintah/</u>			
<u>Entity Controlled by the Government :</u>			
PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)	70,640,405	--	--
PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB)	68,086,390	--	--
Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS)	36,991,132	17,064,617	7,439,132
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	28,816,042	54,643	--
PT Petrokimia Gresik	27,430,705	--	--
PT Pertamina (Persero)	22,268,378	6,828,752	29,940,948
PT Perikanan Nusantara (Persero)	6,330,274	--	--
PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)	5,754,424	--	--
PT Bahtera Adhiguna	5,001,635	5,001,635	5,003,001
Lain-lain di bawah Rp5 Miliar/ Other below Rp5 Billion	12,660,152	28,844,502	57,748,232
Sub Total	283,979,537	57,794,149	100,131,313
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ Allowance for Impairment Loss	(15,100,071)	(14,507,695)	(19,173,686)
Total	268,879,466	43,286,454	80,957,627
Sebagai persentase terhadap total aset / As a percentage of total assets	1.06%	0.20%	0.43%
Piutang lain-lain/ Other receivables			
<u>Entitas Sepengendali Pemerintah/</u>			
<u>Entity Controlled by the Government :</u>			
Kementerian Perhubungan Direktorat Perhubungan Laut/ Ministry of Transportation Directorate of Sea Transportation	52,267,802	52,267,802	--
PT Pengerukan Indonesia (Persero)	30,267,150	30,267,150	30,267,150
BUMN Lainnya/ Other SOE (di bawah Rp5 Miliar/ below Rp5 Billion)	6,204,505	8,722,423	7,102,760
<u>Entitas Asosiasi/ Associate:</u>			
PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera	137,931,727	123,789,729	--
PT Ambang Barito Nusapersada (Catatan/Notes 9 dan/and 16)	7,000,000	10,500,000	14,000,000
Lain-lain di bawah Rp5 Miliar/ Other below Rp5 Billion	69,944	144,184	--
Sub Total	233,741,128	225,691,288	51,369,910
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ Allowance for Impairment Loss	(35,504,794)	(26,723,004)	(21,137,824)
Total	198,236,334	198,968,284	30,232,086
Sebagai persentase terhadap total aset / As a percentage of total assets	0.78%	0.90%	0.16%

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) AND
SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2017, 2016 and 2015
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

8. Sifat dan Transaksi Pihak Berelasi (Lanjutan)

**8. Nature of Relationship and Transactions
With Related Parties (Continued)**

	2017 Rp	2016 Rp	2015 Rp
<u>Liabilitas/Liabilities</u>			
Utang usaha / Trade payables			
<u>Entitas Sepengendali Pemerintah/ Entity Controlled by the Government :</u>			
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	60,590,234	95,386,260	36,907,680
PT Nindya Karya (Persero)	52,789,807	18,194,585	5,491,134
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	18,566,730	16,069,864	35,985,080
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	12,437,522	52,244,974	13,352,144
PT Utama Karya (Persero)	--	11,631,326	35,233,741
Lain-lain di bawah Rp5 Miliar/ Other below Rp5 Billion	32,882,224	7,763,568	9,863,074
<u>Entitas Asosiasi/Associate:</u>			
PT Portek Indonesia	5,302,611	11,773,256	8,791,497
Lain-lain di bawah Rp5 Miliar/ Other below Rp5 Billion	--	--	2,180,989
Total	182,569,128	213,063,833	147,805,339
Uang Persekot/Panjar/ Advances from Customer	5,519,703	3,515,744	1,827,564
Uang Titipan/ Fund Retained	113,654,290	8,363,500	12,396,303
Total	301,743,121	224,943,077	162,029,206
Sebagai persentase terhadap total liabilitas/ As a percentage of total liabilities	2.09%	1.79%	1.44%

9. Piutang Lain-lain

9. Other Receivables

	2017 Rp	2016 Rp	2015 Rp
a. Berdasarkan Pelanggan/ By Customer			
<u>Pihak Berelasi/Related Parties :</u>			
<u>Jangka Pendek/ Current Maturities :</u>			
PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (Catatan/ Note 8)	137,931,727	123,789,729	--
PT Pengerukan Indonesia (Persero) (Catatan/ Note 8)	6,267,150	6,267,150	6,267,150
PT Portek Indonesia (Catatan/ Note 8)	69,944	144,184	--
<u>Bagian Jatuh Tempo dalam Satu Tahun/ Current Maturities:</u>			
PT Pengerukan Indonesia (Persero) (Catatan/Notes 8 dan/and 16)	24,000,000	24,000,000	24,000,000
PT Ambang Barito Nusapersada (Catatan/Notes 8 dan/and 16)	3,500,000	3,500,000	3,500,000
Sub Total	171,768,821	157,701,063	33,767,150
<u>Entitas sepengendali pemerintah:/ Entity Controlled by the Government :</u>			
Instansi Pemerintah/ Government Institutions (Catatan/ Note 8)	55,307,132	55,477,868	2,984,162
BUMN Lainnya/ Other SOE	3,165,175	5,512,357	4,118,598
Sub Total	58,472,307	60,990,225	7,102,760
Total	230,241,128	218,691,288	40,869,910
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai / Allowance for Impairment Loss	(35,504,794)	(26,723,004)	(21,137,824)
Total	194,736,334	191,968,284	19,732,086

9. Piutang Lain-lain (Lanjutan)

9. Other Receivables (Continued)

	2017 Rp	2016 Rp	2015 Rp
<i>Pihak Ketiga / Third Parties:</i>			
Swasta/Private Companies	29,635,963	33,544,501	18,638,347
Pegawai Aktif/Active Employees	1,724,454	1,723,749	1,688,023
Pegawai Pensiunan/Retired Employees	--	47,086	45,845
Lainnya/Other	827,338	92,688	--
Sub Total	32,187,755	35,408,024	20,372,215
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai / Allowance for Impairment Loss	(4,803,008)	(1,011,530)	(1,011,530)
Total	27,384,747	34,396,494	19,360,685
Total	222,121,081	226,364,778	39,092,771

Jumlah piutang lain-lain berdasarkan umur (hari) adalah sebagai berikut:

Total other receivables based on age (days) of receivables are as follows:

	2017 Rp	2016 Rp	2015 Rp	
b. Berdasarkan Umur (Hari)				b. By Age (Days)
Belum Jatuh Tempo	175,697,463	182,952,416	30,974,975	Current
Jatuh Tempo :				Overdue :
1 - 30 Hari	676,563	285,518	--	1 - 30 Days
31 - 90 Hari	480,575	--	--	31 - 90 Days
181 - 270 Hari	--	3,460,441	--	181 - 270 Days
271 - 365 Hari	55,307,132	37,133,787	--	271 - 365 Days
> 365 Hari	30,267,150	30,267,150	30,267,150	> 365 Days
Total	262,428,883	254,099,312	61,242,125	Total
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(40,307,802)	(27,734,534)	(22,149,354)	Allowance for Impairment Loss
Total	222,121,081	226,364,778	39,092,771	Total

Perubahan saldo cadangan kerugian penurunan nilai piutang adalah sebagai berikut:

Movements in the balance of allowance for impairment loss are as follows:

	2017 Rp	2016 Rp	2015 Rp	
Saldo Awal	(27,734,534)	(22,149,354)	(16,782,976)	Beginning Balance
Penurunan Nilai Selama Tahun Berjalan	(12,573,268)	(5,585,180)	(5,366,378)	Impairment During the Year
Saldo Akhir	(40,307,802)	(27,734,534)	(22,149,354)	Ending Balance

Piutang lain-lain pada BUMN lainnya antara lain atas piutang dari PT Asuransi Jasa Indonesia atas klaim asuransi.

Other receivables in the Other SOE, among others consist of receivables from PT Asuransi Jasa Indonesia on insurance claim.

Cadangan kerugian penurunan nilai ditentukan secara individual dan kolektif berdasarkan umur piutang dan historis pembayaran dari debitur.

Allowance for impairment loss is determined individually and collectively by age of receivables and historical payment of debtors.

9. Piutang Lain-lain (Lanjutan)

9. Other Receivables (Continued)

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang lain-lain adalah cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya piutang tersebut.

The Management believes that the allowance for impairment loss of other receivables is adequate to cover possible losses on uncollectible accounts.

Lihat Catatan 46 mengenai risiko kredit piutang usaha untuk memahami bagaimana Grup mengelola dan mengukur kualitas kredit piutang lain – lain yang lancar dan tidak mengalami penurunan nilai.

Refer to Note 46 regarding credit risks of accounts receivables to understand how the Group manages and measures the credit quality of other receivables that are neither past due not impaired.

PT Pengerukan Indonesia (Persero) (PI)
Berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman Modal Kerja dan Keperluan Lainnya Kepada PI No 22 tanggal 13 Agustus 2007, dari Kartono, SH., Notaris di Jakarta, PT Pelindo I - IV (Persero) sepakat untuk mengadakan perjanjian pembayaran pemberian pinjaman kepada PI (Persero) ("Perjanjian Pinjaman") dengan ketentuan sebagai berikut:

PT Pengerukan Indonesia (Persero) (PI)
Based on the Deed of Working Capital and Other Purposes Loan Agreement to PI No. 22 dated August 13, 2007, from Kartono, SH., a Notary in Jakarta, PT Pelindo I - IV (Persero) agreed to provide a loan based on the loan agreement to PI (Persero) ("Loan Agreement") with the following terms:

- a) Maksud perjanjian pinjaman ini adalah untuk memberikan Pinjaman kepada PI sehubungan dengan pelaksanaan program restrukturisasi untuk modal kerja, biaya operasional, pembayaran DP-4, perbaikan kapal dan pembayaran utang kepada supplier.
- b) Pinjaman yang diberikan sebesar Rp80.000.000 yang sumber dananya berasal dari :
 - a. PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) sebesar 20% atau Rp16.000.000.
 - b. PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) sebesar 40% atau Rp32.000.000.
 - c. PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) sebesar 30% atau Rp24.000.000.
 - d. PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) sebesar 10% atau Rp8.000.000.
- c) Pinjaman dari PT Pelabuhan Indonesia I-IV (Persero) akan ditampung dalam rekening khusus pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan No. 120-00-0555949-2.
- d) Pinjaman tersebut dijamin dengan:
 - a. Setiap pekerjaan pengerukan yang dilakukan oleh PI dan yang diperoleh dari PT Pelindo I - IV (Persero), maka pembayaran atas pekerjaan pengerukan tersebut akan diperhitungkan dengan angsuran pembayaran pinjaman PI.

- a) *The purpose of this loan agreement is to provide a loan to PI for implementing restructured program for working capital, operating expenses, payment of DP-4, repairs of ship and debt payments to the supplier.*
- b) *Loan funds provided amounting to Rp80,000,000 are contributed by:*
 - a. *PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) by 20% or Rp16,000,000.*
 - b. *PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) by 40% or Rp32,000,000.*
 - c. *PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) by 30% or Rp24,000,000.*
 - d. *PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) by 10% or Rp8,000,000.*
- c) *Loan funds from PT Pelabuhan Indonesia I-IV (Persero) will be collected in a special account No. 120-00-0555949-2 on PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.*
- d) *The loan was guaranteed by:*
 - a. *Any dredging work carried out by PI and works obtained from PT Pelindo I - IV (Persero), then the payment for the dredging work will be taken into account by PI installment loan payouts.*

9. Piutang Lain-lain (Lanjutan)

9. Other Receivables (Continued)

- b. Tambahan jaminan berupa 3 (tiga) unit kapal keruk milik pihak pertama.

- b. *Additional collateral in the form of 3 (three) units of dredgers owned by the first party of this agreement.*

PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (BJTI)

Berdasarkan Perjanjian BJTI dengan PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (Pihak Berelasi), BJTI memberikan pinjaman dana kepada PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (BKMS) sebesar Rp230.000.000 sehubungan dengan pembangunan dan pengembangan fasilitas kawasan industri dengan kompensasi bulanan dari pinjaman tersebut sebesar JIBOR +4,5% per tahun. Pembayaran kompensasi sekaligus dilakukan bersamaan dengan pelunasan pinjaman.

PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (BJTI)

According to Loans Facility Agreement BJTI with PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (related parties), BJTI granted loans to PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (BKMS) amounting to Rp230,000,000 in relation to the construction and development of the infrastructures of the industrial zones with monthly loans compensation of JIBOR +4.5% per year. Payment of compensation once performed in conjunction with the settlement of loans.

Piutang tersebut dikonversi menjadi tambahan setoran modal kepada PT BKMS sebesar Rp230.000.000 sedangkan bunga pinjaman diterima secara tunai sesuai dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham PT BKMS No. RUPS.03.01/II/BJTI-2015 pada tanggal 23 Februari 2015.

Those receivable converted into additional paid in capital to PT BKMS amounting to Rp230,000,000 while loan interest received in cash in accordance with PT BKMS General Meeting of Shareholders with letter No. RUPS.03.01/II/BJTI-2015 dated February 23, 2015.

BJTI menyetujui untuk memberikan fasilitas pinjaman kepada PT BKMS (pihak berelasi) Berdasarkan Perjanjian Fasilitas Pinjaman No. KKS.602-00/XII/BJTI-2015 tanggal 30 Desember 2015 sebesar Rp80.000.000 dengan jangka waktu 12 bulan dan tidak dapat diperpanjang dengan kompensasi bulanan sebesar JIBOR + 4,5% per tahun terhitung sejak tanggal penarikan pinjaman. Pemberian pinjaman tersebut telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 033/KPIII/ RUPSLB_BJTI/XII-2015 tanggal 14 Desember 2015. Perjanjian fasilitas pinjaman tersebut diperpanjang dengan addendum perjanjian No. KKS.01-02/I/BJTI-2017 tanggal 3 Januari 2017 yang mengubah jatuh tempo menjadi tanggal 30 Desember 2017. Sampai dengan periode pelaporan, perjanjian masih dalam proses persetujuan perpanjangan.

BJTI agreed to provide a loan facility to PT BKMS (related parties) in accordance with the Credit Facility agreement No. KKS.602-00/XII/ BJTI-2015 dated December 30, 2015 amounted to Rp80,000,000 with a period of 12 months and can not be extended with monthly compensation amounting to JIBOR + 4.5% per year commencing from the date of drawdown. The loan was approved in the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 033/KPIII/RUPSLB_BJTI/XII-2015 dated December 14, 2015. The loan facility agreement has been extended by addendum of agreement No. KKS.01-02/I/BJTI-2017 dated January 3, 2017 which changed the maturity date to December 30, 2017. Up to the reporting period, the agreement is still in the process of approval for renewal.

BJTI menyetujui untuk menambah fasilitas pinjaman kepada PT BKMS berdasarkan tersebut sesuai dengan Perjanjian Fasilitas Pinjaman No. KKS.012-01/III/BJTI-2016 tanggal 30 Maret 2016 sebesar Rp40.000.000 dengan jangka waktu satu tahun dan dapat diperpanjang. Perjanjian fasilitas pinjaman tersebut diperpanjang dengan addendum perjanjian tanggal 15 Desember 2017 No. KKS.025-00/XII/BJTI-2017 yang mengubah jatuh tempo menjadi tanggal 31 Desember 2017. Sampai dengan periode pelaporan, perjanjian masih dalam proses persetujuan perpanjangan.

BJTI agreed to increase the loan facility in accordance with the Credit Facility Agreement No. KKS.012-01/III/BJTI-2016 dated March 30, 2016 amounted to Rp40,000,000 with a period of one year and can be extended. The loan facility agreement was extended by an addendum of agreement dated December 15, 2017. KKS.025-00/XII/ BJTI-2017 which changed the maturity date to December 31, 2017. Up to the reporting period, the agreement is still in the process of approval for renewal.

10. Persediaan

10. Inventories

	2017 Rp	2016 Rp	2015 Rp	
Suku Cadang	14,594,117	7,200,547	4,254,409	Spare Parts
Tiang Pancang	10,267,540	9,020,160	12,277,522	Piles
Obat Medis	5,648,086	5,985,538	4,650,246	Medical Medicine
Bahan Bakar	4,748,083	39,038	86,566	Fuel
Bahan Pelumas	547,663	972,747	926,078	Lubricating Oil
Perlengkapan	140,797	100,733	102,227	Supplies
Lain-lain	641,576	2,844,075	3,706,022	Others
Sub Total	36,587,862	26,162,838	26,003,070	Sub Total
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(936,796)	(1,010,382)	(1,068,583)	Allowance for Decline in Value
Total	35,651,066	25,152,456	24,934,487	Total

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai persediaan adalah sebagai berikut : *Movements in the allowance for decline in value of inventories are as follows :*

	2017 Rp	2016 Rp	2015 Rp	
Saldo Awal Tahun	1,010,382	1,068,583	888,212	Balance at Beginning of Year
Penambahan (Pemulihan) pada Tahun Berjalan	(73,586)	(58,201)	180,371	Addition (Reversal) During the Year
Saldo Akhir Tahun	936,796	1,010,382	1,068,583	Balance at End of Year

Berdasarkan penelaahan atas kondisi dan tingkat perputaran persediaan, manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai persediaan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian dari penurunan nilai.

Based on the review of the condition and turnover of the inventory items, the Company's management believes that the allowance for decline in value of inventories is adequate to cover any possible losses from decrease in value.

Beban atas pemakaian persediaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 masing - masing sebesar Rp93.190.277, Rp82.843.499 dan Rp74.525.942, dialokasikan sepenuhnya ke beban operasi (Catatan 39).

Expenses on inventory usage for the years ended December 31, 2017, 2016 and 2015 amounted to Rp93,190,277, Rp82,843,499 and Rp74,525,942, respectively, are allocated to operating expenses (Note 39).

Pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015, persediaan obat dan alat medis telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran, bencana alam dan risiko lainnya dengan nilai pertanggungan masing - masing senilai Rp4.700.000, Rp5.000.000 dan Rp3.000.000 kepada pihak ketiga yaitu PT Zurich Insurance yang menurut pendapat manajemen cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang terjadi.

As of December 31, 2017, 2016 and 2015, the medical supplies and devices had been insured against fire, natural disasters and other risks insured with coverable amount of Rp4,700,000, Rp5,000,000 and Rp3,000,000 each to a third party, namely PT Zurich Insurance, on which management believed was adequate to cover possible losses that might arise.

11. Uang Muka

11. Advances

	2017 Rp	2016 Rp	2015 Rp	
<u>Uang Muka Kontraktor</u>				<u>Contractor Advances</u>
Pihak Ketiga	168,175,980	1,119,933,198	1,061,977,669	Third Parties
Pihak Berelasi	39,449,987	45,986,829	88,294,000	Related Parties
<u>Uang Muka Lainnya</u>				<u>Other Advances</u>
Pihak Ketiga	10,441,720	10,441,720	10,441,720	Third Parties
Total	<u>218,067,687</u>	<u>1,176,361,747</u>	<u>1,160,713,389</u>	Total

Uang muka kontraktor merupakan uang muka yang diberikan/dibayar kepada pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan Grup atas pekerjaan kontraktor yang secara berkala akan diperhitungkan dengan tagihan termin.

Contractor advances represent advances provided / paid to a third party to carry out its activities for the Group as contractors, which will periodically be taken into account by term bill.

Informasi penting lainnya yang berkaitan dengan uang muka kontraktor Perusahaan sampai dengan 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 lihat Catatan 49.

Other important information relating to the contractor advances of the Company as of December 31, 2017, 2016 and 2015 is disclosed in Note 49.

Uang muka lainnya merupakan pembayaran uang muka atas pembelian tanah oleh PPI di Labuan Bajo pada tahun 2015. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 belum terdapat realisasi atas pembelian tanah tersebut karena terdapat permasalahan hukum (Catatan 49).

Advances for purchase of land is the down payment for the purchase of land by PPI in Labuan Bajo in 2015. Until December 31, 2017 there was no realization on the purchase of the land because there was a legal issue (Note 49).

12. Biaya Dibayar di Muka

12. Prepaid Expenses

	2017 Rp	2016 Rp	2015 Rp	
Pegawai	33,359,162	16,751,297	19,532,730	Employees
Asuransi	27,086,515	23,372,959	21,036,547	Insurance
Sewa	4,620,622	17,099,859	26,275,073	Rent
Umum	861,970	11,728,137	971,933	General
Pemeliharaan	129,000	241,292	39,455	Maintenance
Lainnya (di bawah Rp50.000)	1,732,936	2,343,198	942,121	Others (below Rp50,000)
Total	<u>67,790,205</u>	<u>71,536,742</u>	<u>68,797,859</u>	Total

Biaya dibayar di muka merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan kegiatan usaha seperti biaya pegawai, biaya umum, dan biaya usaha lainnya serta biaya sewa dan asuransi.

Prepaid expenses are expenses to be incurred in connection with business activities such as personel costs, general expenses, and other business expenses and rent and insurance expenses.

**13. Investasi pada Entitas Asosiasi dan Operasi
Bersama**

**13. Investments in Associates and Joint
Operation**

Investasi pada Entitas Asosiasi

Penyertaan saham pada entitas asosiasi sebagai berikut:

Investments in Associates

Investments in shares in associated companies are as follows:

	Kepemilikan Saham/Share Ownership					
	2017 %	2016 %	2015 %	2017 Rp	2016 Rp	2015 Rp
<i>Metode Ekuitas/Equity Method</i>						
PT Portek Indonesia	49.00%	49.00%	49.00%	19,442,358	20,816,856	18,173,984
PT Ambang Barito Nusapersada	40.00%	40.00%	40.00%	14,391,024	12,193,125	8,691,397
PT Terminal Petikemas Indonesia	25.00%	25.00%	25.00%	33,778,663	34,757,624	35,393,703
PT Jasamarga Bali Tol (JBT)	17.58%	17.58%	17.58%	84,004,768	95,588,714	108,974,660
PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera	40.00%	40.00%	40.00%	972,184,723	868,012,550	819,763,191
PT Terminal Nilam Utara	40.00%	40.00%	40.00%	69,288,860	70,054,330	34,958,633
PT Energi Manyar Sejahtera	30.00%	30.00%	0.00%	313,293	305,978	--
Total				1,193,403,689	1,101,729,177	1,025,955,568

Ringkasan mutasi penyertaan adalah sebagai berikut :

Summary of movements in Investments is as follows:

31 Desember 2017/December 31, 2017						
1 Januari 2017 January 1, 2017	Tambahan Setoran/ Additional Share	Bagian Laba (Rugi) Periode Berjalan/ Share of Profit (Loss) Current Period	Pemulihan Akumulasi Rugi/ Accumulated Loss Recovery	Dividen dan Penyesuaian Penyertaan Lainnya/ Dividend and Other Adjustment	31 Desember 2017 December 31, 2017	
<i>Metode Ekuitas/Equity Method</i>						
PT Portek Indonesia	20,816,856	--	(1,374,498)	--	--	19,442,358
PT Jasamarga Bali Tol	95,588,714	--	(11,583,946)	--	--	84,004,768
PT Terminal Petikemas Indonesia	34,757,624	--	(978,961)	--	--	33,778,663
PT Ambang Barito Nusapersada	12,193,125	--	7,927,318	--	(5,729,419)	14,391,024
PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera	868,012,550	--	104,172,173	--	--	972,184,723
PT Terminal Nilam Utara	70,054,330	--	(765,470)	--	--	69,288,860
PT Energi Manyar Sejahtera	305,978	--	7,315	--	--	313,293
Total	1,101,729,177	--	97,403,931	--	(5,729,419)	1,193,403,689

31 Desember 2016/December 31, 2016						
1 Januari 2016 January 1, 2016	Tambahan Setoran/ Additional Share	Bagian Laba (Rugi) Tahun Berjalan/ Share of Profit (Loss) Current Year	Pemulihan Akumulasi Rugi/ Accumulated Loss Recovery	Dividen dan Penyesuaian Penyertaan Lainnya/ Dividend and Other Adjustment	31 Desember 2016 December 31, 2016	
<i>Metode Ekuitas/Equity Method</i>						
PT Portek Indonesia	18,173,984	--	2,642,872	--	--	20,816,856
PT Jasamarga Bali Tol	108,974,660	--	(13,385,946)	--	--	95,588,714
PT Terminal Petikemas Indonesia	35,393,703	--	(636,079)	--	--	34,757,624
PT Ambang Barito Nusapersada	8,691,397	--	7,131,082	--	(3,629,354)	12,193,125
PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera	819,763,191	--	48,249,359	--	--	868,012,550
PT Terminal Nilam Utara	34,958,633	34,500,000	595,697	--	--	70,054,330
PT Energi Manyar Sejahtera	--	300,000	5,978	--	--	305,978
Total	1,025,955,568	34,800,000	44,602,963	--	(3,629,354)	1,101,729,177

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) AND
SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2017, 2016 and 2015
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

**13. Investasi pada Entitas Asosiasi dan Operasi
Bersama (Lanjutan)**

**13. Investments in Associates and Joint
Operation (Continued)**

		31 Desember 2015 / December 31, 2015				
1 Januari 2015 January 1, 2015	Tambahan Setoran/ Additional Share	Bagian Laba (Rugi) Tahun Berjalan/ Share of Profit (Loss) Current Year	Pemulihan Akumulasi Rugi/ Accumulated Loss Recovery	Dividen dan Penyesuaian Penyertaan Lainnya/ Dividend and Other Adjustment		31 Desember 2015 December 31, 2015
<i>Metode Ekuitas/Equity Method</i>						
PT Portek Indonesia	14,838,481	--	4,589,095	--	(1,253,592)	18,173,984
PT Jasmarga Bali Tol	125,155,798	--	(16,181,138)	--	--	108,974,660
PT Terminal Petikemas Indonesia	35,767,699	--	(373,996)	--	--	35,393,703
PT Ambang Barito Nusapersada	10,272,808	--	4,032,615	--	(5,614,026)	8,691,397
PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera	394,806,088	400,000,000	24,957,103	--	--	819,763,191
PT Terminal Nilam Utara	3,792,807	30,000,000	1,165,826	--	--	34,958,633
Total	584,633,681	430,000,000	18,189,505	--	(6,867,618)	1,025,955,568

Ringkasan informasi keuangan entitas asosiasi termasuk jumlah agregat Aset, Liabilitas dan pendapatan.

Summary of financial information of the associated entity includes the aggregate amount of Assets, Liabilities and revenue.

	Aset/Asset			Liabilitas/Liabilities			Pendapatan/Revenue		
	2017 Rp	2016 Rp	2015 Rp	2017 Rp	2016 Rp	2015 Rp	2017 Rp	2016 Rp	2015 Rp
<i>Metode Ekuitas/Equity Method</i>									
PT Portek Indonesia	134,506,827	131,513,270	99,971,655	84,982,252	86,123,455	60,722,685	38,906,368	155,154,025	119,351,543
PT Ambang Barito Nusapersada	96,667,852	98,301,640	91,682,158	76,280,167	69,826,148	71,960,970	89,561,960	381,232,700	354,739,595
PT Terminal Petikemas Indonesia	138,461,886	140,075,492	142,518,899	693,341	1,044,996	944,088	--	--	--
PT Jasmarga Bali Tol (JBT)	1,928,348,235	1,938,330,436	1,984,827,709	1,371,912,578	1,364,713,443	1,335,067,678	36,540,208	147,109,042	128,693,251
PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera	4,264,983,519	3,994,123,252	3,247,243,217	1,822,539,639	1,830,466,962	1,204,210,324	115,013,398	271,079,771	128,608,524
PT Terminal Nilam Utara	175,878,811	200,542,377	87,471,515	1,040,733	25,406,553,332	74,932,552	--	--	--
PT Energi Manyar Sejahtera	1,026,951	1,019,926	--	--	--	--	--	--	--

Tidak ada pembatasan signifikan atas kemampuan entitas asosiasi dan operasi bersama untuk mentransfer dana kepada Grup.

There is no significant restrictions on the ability of associates and joint operation entities to transfer fund to the Group.

Entitas asosiasi adalah perusahaan swasta yang tidak terdaftar di bursa dan tidak terdapat harga pasar kuotasi yang tersedia atas saham perusahaan tersebut.

Associates are unlisted private companies and there is no quoted market price available for their shares.

PT Portek Indonesia (PORTEK)

PORTEK didirikan dengan Akta Notaris Rahmat Santoso, SH., No. 175 tanggal 21 September 1999 di Surabaya dan telah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Perundang - undangan dengan Surat Keputusan No. C-2242 HT.01.01 TH2000 tanggal 14 Februari 2000.

PT Portek Indonesia (PORTEK)

PORTEK was established by Notarial deed No. 175 dated September 21, 1999 by Notary Rahmat Santoso, SH., at Surabaya. This deed has been approved by Decree of Minister of Law and Regulation No. C-2242 HT.01.01 TH2000 dated February 14, 2000.

PORTEK didirikan dalam rangka Penanaman Modal Asing sesuai dengan Undang-undang No. 1 tahun 1967 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 11 tahun 1970. PORTEK Bergerak dalam bidang jasa pemeliharaan peralatan pelabuhan. PORTEK berkedudukan di Jakarta.

PORTEK was established based on Foreign Investment Act No. 1 year 1967 as amended by Act No. 11 year 1970. PORTEK is engaged in maintenance services of port equipments. PORTEK is domiciled in Jakarta.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) AND
SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2017, 2016 and 2015
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

**13. Investasi pada Entitas Asosiasi dan Operasi
Bersama (Lanjutan)**

**13. Investments in Associates and Joint
Operation (Continued)**

Pemegang saham PORTEK adalah Perusahaan (49,00%) dan Mitsui Co and Ltd, sebuah perusahaan berbadan hukum Jepang, (51,00%). Modal dasar PORTEK adalah USD2,000,000 (angka penuh). Modal ditempatkan dan disetor PORTEK pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 adalah USD500,000 (angka penuh) atau setara dengan Rp5.450.000.

Shareholders of PORTEK are the Company (49.00%) and Mitsui Co and Ltd, a company established based on Japan law (51.00%). The authorized share capital of PORTEK amounted to USD2,000,000 (full amount). Issued and paid share capital as of December 31, 2017, 2016 and 2015 amounted to USD500,000 (full amount) or equivalent to Rp5,450,000.

Perusahaan mempunyai pengaruh signifikan pada PORTEK yaitu dengan menempatkan dewan komisaris dan direksi.

The Company has a significant influence on PORTEK by placing board of commissioners and directors.

PT Lamin Aspalindotiga ("LAMIN")

LAMIN didirikan dengan Akta Notaris Nyoman Gede Yudara, SH., No. 14 tanggal 31 Januari 2001 di Surabaya dan telah diubah Akta Notaris Haji Zamri, SH., No. 36 tanggal 31 Oktober 2001. Akta tersebut telah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Perundang-undangan dengan Surat Keputusan No. C-13390 HT.01.01 TH 2001 tanggal 16 November 2001. LAMIN bergerak dalam bidang perdagangan, perindustrian dan jasa. LAMIN berkedudukan di Semarang.

PT Lamin Aspalindotiga ("LAMIN")

LAMIN was established by Notarial deed No. 14 dated January 31, 2001 by Notary Nyoman Gede Yudara, SH., at Surabaya. This deed has been amended by notary deed No. 36 dated October 31, 2001 of Notary Haji Zamri, SH. This deed and its amendment have been approved by Decree of Minister of Law and Regulation No. C-13390 HT.01.01 TH2001 dated November 16, 2001. LAMIN is engaged in the business of trading, industry, and services. LAMIN is domiciled at Semarang.

Pemegang saham LAMIN adalah Perusahaan (40%) dan PT Lamindo Sakti (60%). Modal dasar LAMIN adalah Rp10.000.000. Modal ditempatkan dan disetor LAMIN pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 adalah RpNihil.

Shareholders of LAMIN are the Company (40%) and PT Lamindo Sakti (60%). Authorized share capital of LAMIN amounted to Rp10,000,000. The issued and paid up share capital of LAMIN as of December 31, 2017, 2016 and 2015 amounted to RpNil.

LAMIN sudah tidak beroperasi secara komersial sejak tahun 2004.

LAMIN is not operating commercially since 2004.

PT Ambang Barito Nusapersada ("Ambapers")

Ambapers didirikan berdasarkan akta Notaris Grace Senda Sardjito, SH., Jakarta No. 9 tanggal 26 Maret 2004 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C-14469 HT.01.TH.2004 11 Juni 2004. Ambapers bergerak dalam bidang penyediaan layanan jalur pelayaran di aliran Sungai Barito. Ambapers berkedudukan di Banjarmasin.

PT Ambang Barito Nusapersada ("Ambapers")

Ambapers was established by Notarial deed No. 9 dated March 26, 2004 by Notary Grace Senda Sardjito, SH., at Jakarta. This deed and its amendment have been approved by Decree of Minister of Law and Human Rights No. C-14469 HT.01.TH.2004 dated June 11, 2004. Ambapers is engaged in the business of providing river channel services in Barito River. Ambapers is domiciled at Banjarmasin.

Pemegang saham Ambapers adalah Perusahaan dan Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Selatan melalui Perusahaan Daerah Bangun Banua Propinsi Kalimantan Selatan (60%).

Shareholders Ambapers are the Company (40%) and South of Borneo Provincial Government through Local Company Bangun Banua Province South of Borneo (60%).

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) AND
SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2017, 2016 and 2015
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

**13. Investasi pada Entitas Asosiasi dan Operasi
Bersama (Lanjutan)**

**13. Investments in Associates and Joint
Operation (Continued)**

Modal dasar Ambapers adalah Rp2.000.000. Modal ditempatkan dan disetor Ambapers pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 adalah Rp600.000.

Authorized share capital of Ambapers amounted to Rp2,000,000. The issued and paid share capital of Ambapers as of December 31, 2017, 2016 and 2015 amounted to Rp600,000.

Disamping penyertaan modal saham, Ambapers juga diberikan pinjaman untuk pendanaan pengerukan alur dengan saldo pinjaman masing masing Rp3.500.000, Rp7.000.000 dan Rp10.500.000 pada 31 Desember 2017, 2016 dan 2015.

In addition to the share capital contributions, Ambapers also provided loan to finance the river channel dredging with the balance of Rp3,500,000, Rp7,000,000 and Rp10,500,000 respectively as of December 31, 2017, 2016 and 2015.

Perusahaan mempunyai pengaruh signifikan pada Ambapers yaitu dengan menempatkan dewan komisaris dan direksi.

The Company has significant influence on Ambapers by placing board of commissioners and directors.

PT Terminal Petikemas Indonesia (TPI)

TPI didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 36 tanggal 10 April 2013, oleh N.M. Dipo Nusantara Pua Upa, SH., Mkn., notaris di Jakarta. Akta ini telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No.AHU-21873-AHA-0101 Tahun 2013 tanggal 24 April 2013.

PT Terminal Petikemas Indonesia (TPI)

TPI was established by Notarial deed No. 36 dated April 10, 2013 by Notary N.M. Dipo Nusantara Pua Upa, SH., Mkn., in Jakarta. This deed has been approved by Decree of Minister of Law and Human Rights No.AHU-21873-AHA-0101 Year 2013 dated April 24, 2013.

TPI bergerak dalam bidang usaha penyediaan dan pengembangan fasilitas pelabuhan, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan mutu tinggi dan berdaya saing kuat dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas (PT).

TPI is engaged in the provision and development of port facilities, as well as the optimization of the utilization of its resources to have high quality and strong competitiveness by applying the principles of a Limited Liability Company (PT).

Perusahaan mempunyai pengaruh signifikan pada TPI yaitu dengan menempatkan dewan komisaris dan direksi.

The Company has significant influence on TPI by placing board of commissioners and directors.

PT Jasamarga Bali Tol (JBT)

JBT didirikan berdasarkan akta Notaris No. 2 tanggal 22 Agustus 2011 oleh Paulina Siti Suprimulyanti Endah Putri, SH. Akta ini telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-57740.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 25 November 2011. Anggaran Dasar JBT tersebut telah mengalami perubahan, dengan akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 1 tanggal 17 Oktober 2012 oleh Notaris Paulina Siti Suprimulyanti Endah Putri, SH., notaris di Depok, mengenai peningkatan Modal dasar, Modal ditempatkan dan disetor serta mengubah Pasal 4 ayat 1 dan 2.

PT Jasamarga Bali Tol (JBT)

JBT was established by Notarial deed No. 2 dated August 22, 2011 by Notary Paulina Siti Suprimulyanti Endah Putri, SH. This deed has been approved by Decree of Minister of Law and Human Rights No. AHU-57740.AH.01.01. year 2011 dated November 25, 2011. JBT's Articles of Association have been amended, most recently by the Resolution of Extraordinary Shareholder General Meeting No. 1 dated October 17, 2012 by Paulina Siti Suprimulyanti Endah Putri, SH., Notary in Depok, regarding the increase in authorized capital, issued capital and paid up capital as well as the change in Article 4 paragraphs 1 and 2.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) AND
SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2017, 2016 and 2015
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

**13. Investasi pada Entitas Asosiasi dan Operasi
Bersama (Lanjutan)**

**13. Investments in Associates and Joint
Operation (Continued)**

Akta Perubahan tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. AHU-62682.AH.01.02-Tahun 2012 tanggal 6 Desember 2012. Anggaran Dasar tersebut mengalami Perubahan, dengan perubahan terakhir berdasarkan akta notaris Liolin Jayayanti SH., No.83 tanggal 29 September 2017 mengenai perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi JBT. Akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0176338 tanggal 2 Oktober 2017.

The amendment obtained an approval from Minister of Justice of Republic Indonesia No. AHU-62682.AH.01.02-Year 2012 dated December 6, 2012. The Articles of Associate are amended, with the latest amendment based on notarial deed of Liolin Jayayanti SH., No. 83 dated September 29, 2017 regarding the change of Composition of Board of Commissioners and Board of Directors of JBT. The deed was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.03-0176338 dated October 2, 2017.

JBT berusaha dalam bidang pengusahaan jalan tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa, yang meliputi pendanaan, perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol, serta usaha-usaha lainnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

JBT is engaged in toll road concession in the area of Nusa Dua, Benoa, Bali's Ngurah Rai, which includes the financing, planning, engineering, construction, operation and maintenance of highways, as well as other efforts in accordance with the provisions and applicable laws.

Persentase kepemilikan Perusahaan pada JBT 17,58%, namun kepemilikan tersebut diklasifikasikan sebagai investasi pada entitas asosiasi dengan metode ekuitas karena Perusahaan mempunyai pengaruh signifikan pada JBT yaitu dengan menempatkan dewan komisaris dan direksi.

The Company's ownership interest in JBT is 17.58%, but the ownership is classified as an investment in an associate with an equity method because the Company has a significant influence on JBT by placing board of commissioners and directors.

Entitas Asosiasi PT BJTI

PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (BKMS)

BKMS didirikan dengan akta Notaris Ardi Kristiar, No. 56 tanggal 18 Mei 2012 berkedudukan di Jakarta dan telah mengalami perubahan terakhir dengan Notaris Andayani Risilawati SH., MH.,CN No.01 tanggal 19 Maret 2014 berkedudukan di Gresik dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM No. AHU-AH.01.03-0019775 tanggal 27 Maret 2015. BKMS bergerak dibidang Perdagangan Umum, Pembangunan dan Jasa. Pemegang saham BKMS adalah PT Usaha Era Pratama Nusantara (60%) dan BJTI (40%). Modal dasar BKMS sebesar Rp4.000.000.000 dari modal dasar telah ditempatkan dan disetor saham sejumlah 2.000.000 lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.

An Associates of PT BJTI

PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (BKMS)

BKMS was established based on notarial deed Ardi Kristiar, No. 56 dated May 18, 2012 domiciled in Jakarta and has recently been amended by Notary Andayani Risilawati, SH., MH., CN No.01 dated March 19, 2014 domiciled in Gresik and approved by the Ministry of Law and human rights No. AHU-AH.01.03-0019775 dated March 27, 2015. BKMS is engaged in General Trading, Development and Services. Shareholders of BKMS are PT Usaha Era Pratama Nusantara (60%) and BJTI (40%). The authorized capital of BKMS amounted to Rp4,000,000,000, of the authorized capital stock issued and paid up amounted to 2,000,000 shares, each share has a nominal value of Rp1,000.

Modal ditempatkan dan disetor saat ini adalah senilai Rp2.000.000.000 untuk BJTI sebesar Rp800.000.000 atau 40% dan PT Usaha Era Pratama Nusantara senilai Rp1.200.000.000 atau 60%.

The issued and paid up capital currently worth Rp2,000,000,000 is for BJTI amounting to Rp800,000,000 or 40% and PT Usaha Era Pratama Nusantara amounting to Rp1,200,000,000 or 60%.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) AND
SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2017, 2016 and 2015
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

**13. Investasi pada Entitas Asosiasi dan Operasi
Bersama (Lanjutan)**

**13. Investments in Associates and Joint
Operation (Continued)**

Perusahaan mempunyai pengaruh signifikan pada BKMS yaitu dengan menempatkan dewan komisaris dan direksi.

The Company has significant influence on BKMS by placing board of commissioners and directors.

PT Terminal Nilam Utara (TNU)

TNU didirikan berdasarkan akta No. 89 tanggal 23 Agustus 2013 dari Yulia, SH., Notaris di Jakarta. Akta pendirian telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-13479.AH.01.01 tahun 2014. TNU bergerak dibidang Jasa Kepelabuhanan terminal curah yang direncanakan beroperasi di Pelabuhan Tanjung Perak. Pemegang Saham TNU adalah PT Andahanesa Abadi (60%) dan BJT (40%). Berdasarkan RUPSLB.0010-01/IV/BJTI-2015 modal dasar perseroan berjumlah Rp340.000.000 dan modal Dasar telah ditempatkan dan disetor saham sejumlah 85.000 lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000. Modal ditempatkan dan disetor adalah senilai Rp85.000.000 untuk BJTI sebesar Rp34.000.000 atau 40% dan PT Usaha Era Pratama Nusantara senilai Rp51.000.000 atau 60%.

PT Terminal Nilam Utara (TNU)

TNU was established based on the Deed No. 89 dated August 23, 2013 of Yulia, SH., Notary in Jakarta. The deed of establishment was approved by Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No.AHU-13479.AH.01.01 2014. TNU is engaged in services Ports bulk terminals are planned to operate in the Port of Tanjung Perak. Shareholders of TNU are PT Andahanesa Abadi (60%) and BJTI (40%). Based on RUPSLB.0010-01/IV/BJTI-2015 authorized capital amounted to Rp340,000,000 and authorized capital that has been issued and paid-up amounted to 85,000 shares, each share has a nominal value of 1,000. The current paid-up amounted to Rp85,000,000, consisting of Rp34,000,000 or 40% for BJTI and Rp51,000,000 or 60% for PT Usaha Era Pratama Nusantara .

Anggaran Dasar PT TNU telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta No. 3 dari notaris Mira Irani SH., M.Kn., tanggal 1 Desember 2016, mengenai penambahan modal disetor dari PT Berlian Jasa Terminal Indonesia dan PT Usaha Era Pratama Nusantara masing-masing sebesar Rp34.500.000 dan Rp51.750.000 dan telah medapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0159039.AH.01.11 Tahun 2016 tanggal 31 Desember 2016.

PT TNU's Articles of Associates have been amended several times, and the latest one was based on Deed No. 3 by Mira Irani., SH., M.Kn., dated December 01, 2016, regarding the additional paid up capital from PT Berlian Jasa Terminal Indonesia and PT Usaha Era Pratama Nusantara amounting to Rp34,500,000 and Rp51,750,000, and has received an approval from the Minister of Law and Human Right of Republic Indonesia No. AHU-0159039. AH.01.11 Year 2016 dated December 31, 2016.

Perusahaan mempunyai pengaruh signifikan pada TNU yaitu dengan menempatkan dewan komisaris dan direksi.

The Company has significant influence on TNU by placing board of commissioners and directors.

PT Energi Manyar Sejahtera (EMS)

Sesuai dengan surat penawaran kepada BJTI tanggal 19 Mei 2015, PT AKR Corporindo Tbk melakukan penawaran saham EMS sebesar Rp300.000 atau 300 lembar saham yang semula merupakan milik PT Andahana Abadi (ADH). Berdasarkan Surat Keputusan pemegang saham EMS, perusahaan setuju untuk melakukan pembelian saham milik ADH dengan setoran modal Rp300.000 untuk kepemilikan 30%. Perusahaan telah melakukan penyetoran modal pada tanggal 28 Juni 2016. Akta Perubahan

PT Energi Manyar Sejahtera (EMS)

In accordance with the offering letter/quotation to BJTI dated May 19, 2015, PT AKR Corporindo Tbk offered EMS shares amounting to Rp300,000 or 300 shares which was originally owned by PT Andahana Abadi (ADH). Based on the Decree circular of EMS shareholders, the Company agreed to purchase the shares owned by ADH with capital injection amounting to Rp300,000 for 30% ownership. The Company has paid the capital on June 28, 2016. The Deed of Amendment of Shareholders was approved by the

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) AND
SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2017, 2016 and 2015
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

**13. Investasi pada Entitas Asosiasi dan Operasi
Bersama (Lanjutan)**

**13. Investments in Associates and Joint
Operation (Continued)**

Pemegang Saham telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusannya No.AHU-AH.01.03.0065061 Tahun 2016 tanggal 19 Juli 2016.

Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his decree No. AHU-AH.01.03.0065061 Year 2016 dated July 19, 2016.

Modal dasar EMS berjumlah 4.000 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp4.000.000.000. Modal Dasar telah ditempatkan dan disetor sejumlah 1.000 lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.000 dengan nilai nominal seluruhnya Rp1.000.000.000 untuk BJTI sebesar Rp300.000.000 atau 30%, PT Liema Era Pratama Nusantara senilai Rp450.000.000 atau 45%, PT Santiniluwansa Lestari senilai Rp150.000.000 atau 15%, PT Amanah Invest senilai Rp100.000.000 atau 10%.

The authorized capital of EMS amounted to 4,000 shares with a total nominal value of Rp4,000,000,000. Issued and fully paid capital a total of 1,000 shares, each share having a nominal value of Rp1,000,000 with a total nominal value of Rp1,000,000,000 consisting of: Rp300,000,000 or 30% for BJTI, Rp450,000,000 or 45% for PT Liema Era Pratama Nusantra, amounting to Rp150,000,000 or 15%, for PT Santiniluwansa Lestari and Rp100,000,000 or 10% for PT Amanah Invest.

**Operasi Bersama
BJTI Port-Gama**

Perusahaan melakukan Perjanjian Kerjasama Operasi dengan PT Gama Intisamudera tentang Transportasi dan Penanganan Barang-barang Proyek, berdasarkan Akta No. 1 tanggal 6 Juni 2016 oleh Yahya Abdullar Waber, SH., Notaris di Surabaya.

**Joint Operation
BJTI Port-Gama**

The Company carries out Joint Operation Agreement with PT Gama Intisamudera regarding Transportation and Handling of Goods Project, based on Deed No. 1 dated June 6, 2016 by Yahya Abdullar Waber, SH., Notary in Surabaya.

Para Pihak setuju dan sepakat bahwa BJTI PORT-GAMA *Joint Operation* dibuat khusus dan terbatas untuk pelaksanaan pekerjaan transportasi dan penanganan barang-barang proyek, yaitu relokasi alat-alat bongkar muat kepelabuhanan di antaranya adalah *harbor mobile crane (HMC), reach tyred gantry (RTG), reach stacker (RS) dan container crane (CC)*.

The Parties agreed that BJTI PORT-GAMA Joint Operation is custom made and limited to the execution of transportation work and handling of goods projects, namely relocation of unloading port equipment of which is the harbor mobile crane (HMC), reach tyred gantry (RTG), reach stacker (RS) and the container crane (CC).

Jangka waktu kerjasama operasi berlaku sejak ditandatanganinya perjanjian dan berakhir setelah selesainya pekerjaan.

The term of the joint operations is valid since the signing of the agreement and ends after the completion of the work.

Setoran modal kerja awal sebesar Rp1.000.000, terdiri atas BJTI sebesar Rp550.000 atau 55% dan PT Gama Intisamudera sebesar Rp450.000 atau 45%.

The initial working capital amounted to Rp1,000,000, consisting of BJTI amounting to Rp550,000 or 55% and PT Gama Intisamudera amounting to Rp450,000 or 45%.

Perubahan pertama perjanjian kerjasama operasi tersebut berdasarkan Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) No.041-04/XII/BJTI-2016 tanggal 6 Juni 2016 yang menyatakan atas perubahan beberapa pasal tertentu.

The first amendment of the operating agreement is based on Supplementary Agreement (Amendment) No.041-04/XII/BJTI-2016 dated June 6, 2016 which states some changes in certain articles.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) AND
SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2017, 2016 and 2015
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

**13. Investasi pada Entitas Asosiasi dan Operasi
Bersama (Lanjutan)**

**13. Investments in Associates and Joint
Operation (Continued)**

BJTI PORT –MSW JO

BJTI melakukan Perjanjian Kerjasama Operasi dengan PT MSW Teknologi Baru tentang Pemeliharaan Maintenance/ Pemeliharaan *Container Crane* dan *Grab Ship Unloader*, berdasarkan Akta No. 437 tanggal 30 September 2016 oleh Mira Irani, SH., M.Kn., Notaris di Sidoarjo.

Para Pihak setuju dan sepakat bahwa BJTIPT-MSW Teknologi Baru *Joint Operation* dibuat khusus dan terbatas untuk pelaksanaan pekerjaan *maintenance* /pemeliharaan *container crane* (CC) dan *grab ship unloader* (GSU).

Jangka waktu kerjasama operasi berlaku sejak ditandatanganinya perjanjian dan berakhir setelah selesainya pekerjaan.

Setoran modal kerja awal sebesar Rp3.000.000, terdiri atas BJTI sebesar Rp1.800.000 atau 60% dan PT MSW Teknologi Baru sebesar Rp1.200.000 atau 40%.

Perubahan pertama perjanjian kerjasama operasi tersebut berdasarkan Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) No. KKS.041-05/XII/BJTI-2016 tanggal 30 September 2016 yang menyatakan atas perubahan beberapa pasal tertentu.

BJTIPT-MSW Teknologi Baru *Joint Operation* telah dibubarkan sesuai dengan Akta No. 5 tanggal 14 Desember 2017 dari Mei Angilia Ang, SH., Notaris di Surabaya, tentang pembubaran kerjasama. Pembagian hak dan kewajiban berdasarkan laporan keuangan penutup tanggal 31 Juli 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Supoyo, Sutjahjo, Subyantara dan Rekan dengan hasil aset bersih sebesar Rp7.354.478 yang akan dibagikan secara proporsional setelah dikurangi kewajiban dan pendapatan setelah tanggal laporan keuangan audit.

Pencatatan atas aset, kewajiban, pendapatan dan biaya pada kerjasama operasi disepakati sesuai dengan komposisi penyertaan modal Para Pihak, sesuai dengan perjanjian kerjasama operasi. Bagian dari BJTI atas kerjasama operasi tersebut dicatat pada masing-masing akun yang bersangkutan. Pencatatan aset, kewajiban dan ekuitas atas kerjasama operasi pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

BJTI PORT –MSW JO

BJTI entered in to a Joint Operation Agreement with PT MSW Teknologi Baru regarding Maintenance Work/Maintenance of Container Crane and Grab Ship Unloader Maintenance, based on Deed No. 437 dated September 30, 2016 by Mira Irani, SH., M.Kn., Notary in Sidoarjo.

The Parties agreed that BJTIPT-MSW Teknologi Baru Joint Operation is custom made and is limited to the implementation of maintenance work/ maintenance of container crane (CC) and grab ship unloader (GSU).

The term of the joint operations is effective since the signing of the agreement and ended after the completion of the work.

The initial working capital amounted to Rp3,000,000, consisting of BJTI amounting to Rp1,800,000 or 60% and PT MSW Teknologi Baru amounting to Rp1,200,000 or 40%.

The first amendment of the operating agreement is based on Supplementary Agreement (Amendment) No. KKS.041-05/XII/BJTI-2016 dated September 30, 2016 which states some changes in certain articles.

BJTIPT-MSW Teknologi Baru Joint Operation was dissolved in accordance with Deed No. 5 dated December 14, 2017 by Mei Angilia Ang, SH., Notary in Surabaya, regarding the dissolution of cooperation. The distribution of rights and obligations is based on the closing financial statements of July 31, 2017 which have been audited by the Public Accounting Firm Supoyo, Sutjahjo, Subyantara and Partners. With net asset value amounting to Rp7,354,478 to be distributed proportionally after deducting liabilities and revenues after the date of the audited financial statements.

Records of it assets, liabilities, revenues and expenses in joint operation are agreed in accordance with the composition of the equity of the Parties, based on the operating agreement. Part of BJTI on joint operations is recorded on each respective account. Recording of assets, liabilities and equity of joint operation as of December 31, 2017 and 2016 are as follows:

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) AND
SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2017, 2016 and 2015
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

**13. Investasi pada Entitas Asosiasi dan Operasi
Bersama (Lanjutan)**

**13. Investments in Associates and Joint
Operation (Continued)**

	31 Desember/December 31, 2017			31 Desember/December 31, 2016			
	Aset (Liabilitas)/	Bagian Perusahaan/ The Company's	%	Aset (Liabilitas)/	Bagian Perusahaan/ The Company's	%	
	Assets (Liabilities)	Company's Portion		Assets (Liabilities)	Company's Portion		
- BJTI Port - GAMA Joint Operation							
Kas dan Setara Kas	5,635,762	55	3,099,669	5,732,457	55	3,152,851	Cash and Cash Equivalent
Pajak Dibayar di Muka	176,519	55	97,086	176,519	55	97,086	Prepaid Taxes
Total Aset	5,812,281		3,196,755	5,908,976		3,249,937	Total Assets
Utang Pajak	--	55	--	(227)	55	(125)	Tax Payables
Beban Akruwal	--	55	--	(12,273)	55	(6,750)	Accrued Expenses
Total Liabilitas	--		--	(12,500)		(6,875)	Total Liabilities and Equity
Modal Saham	(1,000,000)	55	(550,000)	(1,000,000)	55	(550,000)	Share Capital
Saldo Laba	(4,896,476)	55	(2,693,062)	--	55	--	Retained Earnings
Laba Tahun Berjalan	84,195	55	46,307	(4,896,476)	55	11,112,681	Profit For The Year
Total Ekuitas	(5,812,281)		(3,196,755)	(5,896,476)		10,562,681	Total Equity
Total Liabilitas dan Ekuitas	(5,812,281)		(3,196,755)	(5,908,976)		10,555,806	Total Liabilities and Equity
Pendapatan Operasi	--	55	--	25,101,350	55	13,805,743	Operating Revenues
Beban Operasi	--	55	--	20,263,262	55	11,144,794	Operating Expenses
Laba (Rugi) Operasi	--	55	--	4,838,088	55	2,660,949	Operating Income (Loss)
Pendapatan (Beban) Lain - Bersih	--	55	--	58,388	55	32,113	Other Income (Expenses) - Net
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	--	55	--	4,896,476	55	2,693,062	Comprehensive Income For The Year
- BJTI Port - MSW Joint Operation							
Kas dan Setara Kas	2,435,394	60	1,461,236	1,892,576	60	1,135,546	Cash and Cash Equivalent
Piutang Usaha	5,932,339	60	3,559,403	2,945,259	60	--	Trade Account Receivables
Piutang Lain-lain	1,207	60	724	1,117	60	670	Other Receivables
Persediaan	30,942	60	18,565	64,680	60	38,808	Inventory
Pajak Dibayar di Muka	31,593	60	18,956	--	60	--	Prepaid Taxes
Biaya dibayar di Muka	10,000	60	6,000	27,500	60	16,500	Prepaid Expenses
Total Aset	8,441,475		5,064,885	4,931,133		1,191,524	Total Assets
Utang Usaha	(520,994)	60	(312,596)	(64,680)	60	(38,808)	Trade Account Payable
Utang Lain-lain	--	60	--	(1,500)	60	(900)	Other Payable
Utang Pajak	(464,884)	60	(278,931)	(250)	60	(150)	Tax Payable
Beban Akruwal	(17,182)	60	(10,309)	(62,250)	60	(37,350)	Accrued Expenses
Total Liabilitas	(1,003,060)		(601,836)	(128,680)		(77,208)	Total Liabilities
Modal Saham	(3,000,000)	60	(1,800,000)	(3,000,000)	60	--	Share Capital
Laba Tahun Berjalan	(4,438,415)	60	(2,663,049)	(1,802,453)	60	685,684	Profit For The Year
Total Ekuitas	(7,438,415)		(4,463,049)	(4,802,453)		685,684	Total Equity
Total Liabilitas dan Ekuitas	(8,441,475)		(5,064,885)	(4,931,133)		608,476	Total Liabilities and Equity
Pendapatan Operasi	--	60	--	2,945,259	60	1,767,156	Operating Revenues
Beban Operasi	--	60	--	1,145,719	60	687,431	Operating Expenses
Laba (Rugi) Operasi	--	55	--	1,799,540	55	1,079,724	Operating Income (Loss)
Pendapatan (Beban) Lain - Bersih	--	55	--	2,912	55	1,747	Other Income (Expenses) - Net
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	--	55	--	1,802,453	55	1,081,472	Comprehensive Income For The Year

*) Tanggal laporan keuangan penutup

*) The dated of closing financial statements

14. Properti Investasi

14. Investment Properties

31 Desember 2017/ December 31, 2017						
1 Januari 2017/ January 1, 2017	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deduction	Reklasifikasi/ Reclassification	31 Desember 2017/ December 31, 2017		
Harga Perolehan :						Cost :
Tanah	31,484,764	--	--	31,484,764		Land
Bangunan	30,419,922	--	5,850,904	76,075	24,645,093	Building
Sub Total	61,904,686	--	5,850,904	76,075	56,129,857	Sub Total
Akumulasi Penyusutan :						Accumulated Depreciation :
Bangunan	6,726,496	1,509,819	1,624,601	74,188	6,685,902	Building
Sub Total	6,726,496	1,509,819	1,624,601	74,188	6,685,902	Sub Total
Nilai Buku	55,178,190			49,443,955		Net Book Value
31 Desember 2016/ December 31, 2016						
1 Januari 2016/ January 1, 2016	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deduction	Reklasifikasi/ Reclassification	31 Desember 2016/ December 31, 2016		
Harga Perolehan :						Cost :
Tanah	31,495,357	--	--	(10,593)	31,484,764	Land
Bangunan	32,907,728	84,085	--	(2,571,891)	30,419,922	Building
Sub Total	64,403,085	84,085	--	(2,582,484)	61,904,686	Sub Total
Akumulasi Penyusutan :						Accumulated Depreciation :
Bangunan	5,435,699	1,755,315	--	(464,519)	6,726,496	Building
Sub Total	5,435,699	1,755,315	--	(464,519)	6,726,496	Sub Total
Nilai Buku	58,967,386			55,178,190		Net Book Value
31 Desember 2015/ December 31, 2015						
1 Januari 2015/ January 1, 2015	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deduction	Reklasifikasi/ Reclassification	31 Desember 2015/ December 31, 2015		
Harga Perolehan :						Cost :
Tanah	32,253,404	--	--	(758,047)	31,495,357	Land
Bangunan	25,644,485	2,143,383	--	5,119,860	32,907,728	Building
Sub Total	57,897,889	2,143,383	--	4,361,813	64,403,085	Sub Total
Akumulasi Penyusutan :						Accumulated Depreciation :
Bangunan	2,847,281	1,979,992	--	608,426	5,435,699	Building
Sub Total	2,847,281	1,979,992	--	608,426	5,435,699	Sub Total
Nilai Buku	55,050,608			58,967,386		Net Book Value

Properti investasi terdiri dari tanah dan bangunan yang ada di wilayah pelabuhan milik Perusahaan seluas 12.952.168 m² pada tahun 2017 dan 2016 dan seluas 14.784.464 m² pada tahun 2015, yang disewakan kepada pihak ketiga berdasarkan perjanjian sewa. Properti investasi tersebut direklasifikasi dari akun aset tetap ke akun properti investasi oleh Manajemen Perusahaan.

Investment properties consist of land and building in the port area which belongs to the Company covering 12,952,168 sqm in 2017 and 2016 and 14,784,464 sqm in 2015, which are leased to a third party under the lease agreements. The investment property is reclassified from fixed assets account to investment property account by the Management of the Company.

Pada tahun 2016, Grup melakukan reklasifikasi properti investasi sebesar Rp2,585,446 atas lapangan penumpukan yang tidak disewakan lagi ke aset takberwujud (Catatan 17).

In 2016, the Group has reclassified the investment properties amounting to Rp2,585,446 which consist of container yard that is not rented again to intangible assets (Note 17).

Perhitungan keuntungan penjualan properti investasi dilakukan antara Grup adalah sebagai berikut:

The calculation of gain on sale of investment property conducted by the Group is as follows:

	2017 Rp	2016 Rp	2015 Rp	
Harga Perolehan	5,850,904	--	--	Cost
Akumulasi penyusutan	(1,624,601)	--	--	Accumulated depreciation
Nilai buku bersih	4,226,303	--	--	Net book value
Hasil Penjualan	7,723,000	--	--	Proceeds from Sales
Labu Penjualan Properti Investasi	3,496,697	--	--	Gain on Sale of Investment Property

14. Properti Investasi (Lanjutan)

14. Investment Properties (Continued)

Nilai wajar properti investasi tanah pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 sebesar Rp46.720.510 berdasarkan penilaian oleh KJPP Immanuel, Jonny dan Rekan (Penilai Independen) dalam laporannya bertanggal 10 Desember 2015, metode penilaian menggunakan Pendekatan Pasar (*Market approach*), didasarkan pada perbandingan secara langsung objek yang dinilai dengan data transaksi maupun data penawaran pembanding yang telah dianalisa.

The fair value of land investment properties as of December 31, 2017, 2016 and 2015 amounted to Rp46,720,510 based on the appraisal by KJPP Immanuel, Jonny and Partners (Independent Appraiser) in its report dated December 10, 2015, the appraisal method used the Market Approach, which was based on the direct comparison of the assessed object with the transaction data and the comparison data supply that had been analyzed.

Perusahaan mencatat dan mengakui properti investasi tersebut berdasarkan nilai tercatat pada saat sebelum dipindahkan ke properti investasi. Perusahaan belum melakukan penilaian properti investasi.

The Company records and recognizes investment property based on the value recorded at the time before being transferred to investment property. The Company has not made an assessment on its investment property.

Asumsi yang digunakan oleh KJPP dalam menghitung nilai wajar tahun 2015 adalah:

The assumptions used by KJPP in calculating the fair values of 2015 are:

1. Nilai dicantumkan dalam mata uang rupiah, dan atau ekuivalennya atas permintaan Perusahaan;
2. Penilaian didasarkan pada kondisi pada saat dilakukan penilaian berdasarkan data dan informasi yang diberikan oleh pemilik properti serta pengalaman dan pengamatan kami;
3. Penilaian ini hanya ditujukan untuk tujuan laporan keuangan sebagaimana disebutkan dalam tujuan penilaian dalam laporan ini serta menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, dan kami tidak bertanggung jawab terhadap penggunaan untuk tujuan lainnya.

1. *The value shall be denominated in rupiah currency, and / or its equivalent at the request of the Company;*
2. *The assessment is based on the conditions at which the assessment is based on the data and information provided by the property owner as well as our experience and observations;*
3. *This assessment is only intended for the purposes of the financial statements referred to in the purposes of the assessment in this report and shall constitute an indivisible entity, and we shall not be liable for use for any other purpose.*

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap nilai yang dapat diperoleh kembali dari properti investasi, manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa tidak terdapat kejadian-kejadian atau perubahan - perubahan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset pada tanggal 31 Desember 2017.

Based on the review of the recoverable value of investment property, the Company's management believes that there are no events or changes that indicate a decline in value of assets as of December 31, 2017.

Penghasilan sewa dan beban operasi langsung dari properti investasi untuk tahun 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 masing - masing sebagai berikut:

Rental income and direct operating expenses of investment properties for the years ended December 31, 2017, 2016 and 2015 are as follows:

	2017 Rp	2016 Rp	2015 Rp	
Pendapatan Sewa	499,899,297	176,849,317	149,498,141	<i>Rental Revenue</i>
Beban Operasi atas Sewa	1,743,013	14,465,755	7,433,602	<i>Operating Expenses on Rent</i>

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) AND
SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2017, 2016 and 2015
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

15. Aset Tetap

15. Fixed Assets

	31 Desember 2017/December 31, 2017				31 Desember 2017/ December 31, 2017	
	1 Januari 2017/ January 1, 2017	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deduction	Reklasifikasi/ Reclassification		
Biaya Perolehan:						At Cost:
Aset Tetap Pokok :						Principal Fixed Assets:
Bangunan Fasilitas Pelabuhan	3,284,648,733	4,087,255	7,982,334	309,208,973	3,589,962,627	Port Facilities
Kapal	576,646,650	8,906,098	--	243,342,283	828,895,031	Ships
Alat-alat Fasilitas Pelabuhan	3,272,262,048	177,917,205	544,052	628,250,223	4,077,885,424	Port Facility Equipments
Instalasi Fasilitas Pelabuhan	676,865,384	31,130,271	1,798,476	53,211,848	759,409,027	Port Facility Installations
Biaya Pengerukan dan Pemeliharaan Signifikan	78,170,513	32,173,050	19,822,189	--	90,521,374	Dredging and Significant Maintenance Costs
Aset Tetap Penunjang :						Supporting Fixed Assets:
Tanah	176,080,333	--	--	390,615	176,470,948	Land
Jalan dan Bangunan	1,068,517,227	8,206,095	4,589,942	81,818,183	1,153,951,563	Roads and Buildings
Peralatan	462,113,771	30,863,016	1,090,887	54,347,219	546,233,119	Equipments
Aset Tetap Pelengkap :						Supplementary Fixed Assets:
Kendaraan	55,955,999	14,996,049	2,455,068	(877,355)	67,619,625	Vehicles
Emplacement	204,754,501	5,809,560	--	8,481,832	219,045,893	Emplacement
Aset Sewa Pembiayaan :						Leased Assets:
Kapal	--	227,754,900	--	--	227,754,900	Ships
Aset dalam Proses Pembangunan :						Construction in Progress:
Bangunan Fasilitas Pelabuhan	288,811,371	459,386,506	--	(309,515,984)	438,681,893	Port Facility Buildings
Kapal	407,204,857	693,423,333	--	(243,342,283)	857,285,907	Ships
Alat-alat Fasilitas Pelabuhan dan Peralatan Lainnya	305,077,358	809,680,227	--	(591,209,860)	523,547,725	Port Facility Equipment and Other Equipments
Jalan dan Bangunan	24,006,769	91,961,200	--	(49,162,534)	66,805,435	Roads and Buildings
Tanah	83,034,642	7,767,890	--	(86,461,632)	4,340,900	Lands
Instalasi Fasilitas Pelabuhan	50,832,363	23,640,945	--	(37,107,876)	37,365,432	Port Facility Installations
Peralatan	2,088,603	53,849,144	--	(30,374,316)	25,563,431	Equipments
Emplasemen	13,330,681	40,479,659	--	(7,112,653)	46,697,687	Emplacement
Total	11,030,401,803	2,722,032,403	38,282,948	23,886,683	13,738,037,941	Total
Akumulasi Penyusutan:						Accumulated Depreciation:
Aset Tetap Pokok :						Principal Fixed Assets:
Bangunan Fasilitas Pelabuhan	69,177,403	141,738,295	788,102	45,392	210,172,988	Port Facilities
Kapal	180,312,686	30,850,766	--	--	211,163,452	Ships
Alat-alat Fasilitas Pelabuhan	161,761,414	312,800,606	129,498	(205,299)	474,227,223	Port Facility Equipments
Instalasi Fasilitas Pelabuhan	146,956,099	46,608,827	388,945	--	193,175,981	Port Facility Installations
Biaya Pengerukan dan Pemeliharaan Signifikan	30,207,905	6,635,003	5,850,735	--	30,992,173	Dredging and Significant Maintenance Costs
Aset Tetap Penunjang :						Supporting Fixed Assets:
Jalan dan Bangunan	310,555,434	56,203,152	980,578	1,167,868	366,945,876	Roads and Buildings
Peralatan	266,488,488	58,532,182	1,083,213	6,778	323,944,235	Equipments
Aset Tetap Pelengkap :						Supplementary Fixed Assets:
Kendaraan	32,215,083	7,341,573	1,878,902	(652,603)	37,025,151	Vehicles
Emplacement	53,919,948	10,087,783	--	--	64,007,731	Emplacement
Aset Sewa Pembiayaan :						Leased Assets:
Kapal	--	6,509,994	--	--	6,509,994	Ships
Total	1,251,594,460	677,308,181	11,099,973	362,136	1,918,164,804	Total
Penurunan Nilai Aset						Impairment of Assets:
Bangunan Fasilitas Pelabuhan	8,047,825	--	7,892	--	8,039,933	Port Facilities
Alat-alat Fasilitas Pelabuhan	--	--	--	--	--	Port Facility Equipments
Total	8,047,825	--	7,892	--	8,039,933	Total
Nilai Buku	9,770,759,518				11,811,833,204	Net Book value

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) AND
SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2017, 2016 and 2015
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

15. Aset Tetap (Lanjutan)

15. Fixed Assets (Continued)

	2016					31 Desember 2016/	
	1 Januari 2016/ January 1, 2016	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deduction	Peningkatan (Penurunan) Atas Revaluasi Aset/ Increase (Decrease) on Revaluation of Fixed Assets	Reklasifikasi/ Reclassification		
Biaya Perolehan:							At Cost:
Aset Tetap Pokok :							Principal Fixed Assets:
Bangunan Fasilitas Pelabuhan	2,773,454,890	4,847,832	1,466,666	(29,222,312)	537,034,989	3,284,648,733	Port Facilities
Kapal	546,184,737	3,822,285	--	--	26,639,628	576,646,650	Ships
Alat-alat Fasilitas Pelabuhan	3,205,156,372	100,359,169	4,879,439	(785,171,732)	756,797,678	3,272,262,048	Port Facility Equipments
Instalasi Fasilitas Pelabuhan	383,031,758	23,692,239	--	--	270,141,387	676,865,384	Port Facility Installations
Biaya Pengerukan dan Pemeliharaan Signifikan	209,125,705	13,610,004	--	--	(144,565,196)	78,170,513	Dredging and Significant Maintenance Costs
Aset Tetap Penunjang :							Supporting Fixed Assets:
Tanah	176,069,741	--	--	--	10,592	176,080,333	Land
Jalan dan Bangunan	757,431,090	11,734,479	--	--	299,351,658	1,068,517,227	Roads and Buildings
Peralatan	352,118,446	17,268,839	33,135	--	92,759,621	462,113,771	Equipments
		--	--	--	--	--	
Aset Tetap Pelengkap :							Supplementary Fixed Assets:
Kendaraan	51,736,216	5,216,515	1,108,199	--	111,467	55,955,999	Vehicles
Emplasement	178,351,511	5,416,547	--	--	20,986,443	204,754,501	Emplacement
Aset dalam Proses Pembangunan :							Construction in Progress:
Bangunan Fasilitas Pelabuhan	426,533,294	378,742,704	522,000	--	(515,942,627)	288,811,371	Port Facility Buildings
Kapal	8,805,264	425,039,221	--	--	(26,639,628)	407,204,857	Ships
Alat-alat Fasilitas Pelabuhan dan Peralatan Lainnya	210,431,936	920,584,757	--	--	(825,939,335)	305,077,358	Port Facility Equipment and Other Equipments
Jalan dan Bangunan	117,244,990	113,661,240	--	--	(206,899,461)	24,006,769	Roads and Buildings
Tanah	561,313,171	32,834,502	690,422	--	(510,422,609)	83,034,642	Lands
Instalasi Fasilitas Pelabuhan	66,151,901	197,164,846	--	--	(212,484,384)	50,832,363	Port Facility Installations
Peralatan	27,092,564	66,778,739	--	--	(91,782,700)	2,088,603	Equipments
Emplasemen	6,865,300	33,054,155	--	--	(26,588,774)	13,330,681	Emplacement
Total	10,057,098,886	2,353,828,073	8,699,861	(814,394,044)	(557,431,251)	11,030,401,803	Total
Akumulasi Penyusutan:							Accumulated Depreciation:
Aset Tetap Pokok :							Principal Fixed Assets:
Bangunan Fasilitas Pelabuhan	639,820,219	125,992,766	1,466,666	(731,742,593)	36,573,677	69,177,403	Port Facilities
Kapal	154,928,989	25,383,697	--	--	--	180,312,686	Ships
Alat-alat Fasilitas Pelabuhan	1,082,918,699	236,058,388	4,879,439	(1,152,336,234)	--	161,761,414	Port Facility Equipments
Instalasi Fasilitas Pelabuhan	113,434,593	33,521,506	--	--	--	146,956,099	Port Facility Installations
Biaya Pengerukan dan Pemeliharaan Signifikan	76,701,085	6,998,955	--	--	(53,492,135)	30,207,905	Dredging and Significant Maintenance Costs
Aset Tetap Penunjang :							Supporting Fixed Assets:
Jalan dan Bangunan	243,687,624	49,484,832	--	--	17,382,978	310,555,434	Roads and Buildings
Peralatan	223,326,573	43,189,695	27,780	--	--	266,488,488	Equipments
Aset Tetap Pelengkap :							Supplementary Fixed Assets:
Kendaraan	27,840,397	5,290,543	1,005,030	--	89,173	32,215,083	Vehicles
Emplasement	46,363,837	7,556,111	--	--	--	53,919,948	Emplacement
Total	2,609,022,016	533,476,493	7,378,915	(1,884,078,827)	553,693	1,251,594,460	Total
Penurunan Nilai Aset							Impairment of Assets:
Bangunan Fasilitas Pelabuhan	11,923,110	937,153	4,812,438	--	--	8,047,825	Port Facilities
Alat-alat Fasilitas Pelabuhan	--	--	--	--	--	--	Port Facility Equipments
Total	11,923,110	937,153	4,812,438	--	--	8,047,825	Total
Nilai Buku	7,436,153,760					9,770,759,518	Net Book value

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) AND
SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2017, 2016 and 2015
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

15. Aset Tetap (Lanjutan)

15. Fixed Assets (Continued)

	2015				31 Desember 2015/ December 31, 2015	
	1 Januari 2015/ January 1, 2015	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deduction	Reklasifikasi/ Reclassification		
Biaya Perolehan:						At Cost:
Aset Tetap Pokok :						Principal Fixed Assets:
Bangunan Fasilitas Pelabuhan	2,508,780,898	2,132,833	5,265,113	267,806,272	2,773,454,890	Port Facilities
Kapal	496,880,128	49,304,609	--	--	546,184,737	Ships
Alat-alat Fasilitas Pelabuhan	2,188,493,239	2,309,509	13,370,917	1,027,724,541	3,205,156,372	Port Facility Equipments
Instalasi Fasilitas Pelabuhan	301,892,024	7,670,883	329,150	73,798,001	383,031,758	Port Facility Installations
Biaya Pengerukan dan Pemeliharaan Signifikan	161,422,432	75,455	--	47,627,818	209,125,705	Dredging and Significant Maintenance Costs
Aset Tetap Penunjang :						Supporting Fixed Assets:
Tanah	158,036,986	--	--	18,032,755	176,069,741	Land
Jalan dan Bangunan	639,296,310	5,901,084	1,258,794	113,492,490	757,431,090	Roads and Buildings
Peralatan	329,796,840	14,667,760	9,223,563	16,877,409	352,118,446	Equipments
Aset Tetap Pelengkap :						Supplementary Fixed Assets:
Kendaraan	53,802,392	745,542	1,873,622	(938,096)	51,736,216	Vehicles
Emplasement	165,295,847	33,600	--	13,022,064	178,351,511	Emplacement
Aset dalam Proses Pembangunan :						Construction in Progress:
Bangunan Fasilitas Pelabuhan	363,275,397	378,489,338	8,961,283	(306,270,158)	426,533,294	Port Facility Buildings
Kapal	36,154	8,805,265	36,155	--	8,805,264	Ships
Alat-alat Fasilitas Pelabuhan dan Peralatan Lainnya	28,123,094	1,290,160,383	4,814,013	(1,103,037,528)	210,431,936	Port Facility Equipment and Other Equipments
Jalan dan Bangunan	73,920,588	143,725,191	1,569,697	(98,831,092)	117,244,990	Roads and Buildings
Tanah	404,612,952	154,892,545	--	1,807,674	561,313,171	Lands
Instalasi Fasilitas Pelabuhan	23,142,801	112,358,846	--	(69,349,746)	66,151,901	Port Facility Installations
Peralatan	5,722,289	32,575,628	1,040,842	(10,164,511)	27,092,564	Equipments
Emplasemen	2,432,672	17,454,692	--	(13,022,064)	6,865,300	Emplacement
Total	7,904,963,043	2,221,303,163	47,743,149	(21,424,171)	10,057,098,886	Total
Akumulasi Penyusutan:						Accumulated Depreciation:
Aset Tetap Pokok :						Principal Fixed Assets:
Bangunan Fasilitas Pelabuhan	564,914,010	79,927,534	2,149,729	(2,871,596)	639,820,219	Port Facilities
Kapal	132,047,865	22,881,124	--	--	154,928,989	Ships
Alat-alat Fasilitas Pelabuhan	957,280,295	156,520,857	13,046,120	(17,836,333)	1,082,918,699	Port Facility Equipments
Instalasi Fasilitas Pelabuhan	93,274,102	20,581,191	325,622	(95,078)	113,434,593	Port Facility Installations
Biaya Pengerukan dan Pemeliharaan Signifikan	41,242,152	35,458,933	--	--	76,701,085	Dredging and Significant Maintenance Costs
Aset Tetap Penunjang :						Supporting Fixed Assets:
Jalan dan Bangunan	212,161,397	33,243,748	941,297	(776,224)	243,687,624	Roads and Buildings
Peralatan	199,719,941	29,691,154	3,910,835	(2,173,687)	223,326,573	Equipments
Aset Tetap Pelengkap :						Supplementary Fixed Assets:
Kendaraan	28,214,520	4,949,908	1,499,455	(3,824,576)	27,840,397	Vehicles
Emplasement	39,591,074	6,772,763	--	--	46,363,837	Emplacement
Total	2,268,445,356	390,027,212	21,873,058	(27,577,494)	2,609,022,016	Total
Penurunan Nilai Aset						Impairment of Assets:
Bangunan Fasilitas Pelabuhan	5,550,921	6,372,189	--	--	11,923,110	Port Facilities
Alat-alat Fasilitas Pelabuhan	146,042	--	146,042	--	--	Port Facility Equipments
Total	5,696,963	6,372,189	146,042	--	11,923,110	Total
Nilai Buku	5,630,820,724				7,436,153,760	Net Book value

15. Aset Tetap (Lanjutan)

15. Fixed Assets (Continued)

Beban penyusutan dialokasikan sebagai berikut: *Depreciation expense was allocated to the following:*

	2017 Rp	2016 Rp	2015 Rp	
Beban Operasi	677,308,181	533,476,493	390,027,212	Operating Expenses
Total	677,308,181	533,476,493	390,027,212	Total

Rincian Aset Tetap Dalam Proses Pembangunan pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut: *Details of Fixed Assets Under Construction as of December 31, 2017, 2016 and 2015 are as follows:*

Aset Tetap Dalam Proses Pembangunan/ <i>Fixed Assets Under Construction</i>	Persentase Penyelesaian/ <i>Percentage of Completion</i>	Estimasi Tahun Penyelesaian/ <i>Estimated Year of Completion</i>	Biaya Perolehan/ <i>At Cost</i>
2017			
Bangunan dan Fasilitas Pelabuhan/ <i>Building and Port Facilities</i>	0.1% - 98%	Februari 2018 - November 2018/ <i>February 2018 - November 2018</i>	438,681,893
Kapal/Ships	0% - 98%	Februari 2018 - April 2019/ <i>February 2018 - April 2019</i>	857,285,907
Alat-alat Fasilitas Pelabuhan dan Peralatan Lainnya/ <i>Equipments and Other Equipments</i>	0% - 91%	Januari 2018 - Desember 2018/ <i>January 2018 - December 2018</i>	523,547,725
Jalan dan Bangunan/ <i>Roads and Buildings</i>	0% - 90%	Januari 2018 - Juni 2018/ <i>January 2018 - June 2018</i>	66,805,435
Tanah/Lands	62% - 77%	Maret 2018 -Desember 2018 <i>March 2018 - December 2018</i>	4,340,900
Instalasi fasilitas Pelabuhan/ <i>Port Facility Installations</i>	0% - 97%	Februari 2018 - November 2018/ <i>February 2018 - November 2018</i>	37,365,432
Peralatan/Equipments	13% - 99%	Februari 2018 - April 2018/ <i>February 2018 - April 2018</i>	25,563,431
Emplasemen/Emplacement	0% - 40%	April 2018 - Agustus 2018 <i>April 2018 - August 2018</i>	46,697,687
Total			2,000,288,410

Aset Tetap Dalam Proses Pembangunan/ <i>Fixed Assets Under Construction</i>	Persentase Penyelesaian/ <i>Percentage of Completion</i>	Estimasi Tahun Penyelesaian/ <i>Estimated Year of Completion</i>	Biaya Perolehan/ <i>At Cost</i>
2016			
Bangunan dan Fasilitas Pelabuhan/ <i>Building and Port Facilities</i>	0% - 99,3%	February 2017 - December 2018/ <i>February 2017 - December 2018</i>	288,811,371
Kapal/Ships	55% - 99,48 %	April - Oktober/April - Oktober 2017	407,204,857
Alat-alat Fasilitas Pelabuhan dan Peralatan Lainnya/ <i>Equipments and Other Equipments</i>	15 - 90,73 %	June/Juni 2018	305,077,358
Jalan dan Bangunan/ <i>Roads and Buildings</i>	6,2 - 93,26 %	December/Desember 2017	24,006,769
Tanah/Lands	0%	December/Desember 2017	83,034,642
Instalasi Fasilitas Pelabuhan/ <i>Port Facility Installations</i>	10% - 75 %	June/Juni 2017	50,832,363
Peralatan/Equipments	9% - 95%	June/Juni 2017	2,088,603
Emplasemen/Emplacement	4% - 55,2%	June/Juni 2017	13,330,681
Total			1,174,386,644

15. Aset Tetap (Lanjutan)

15. Fixed Assets (Continued)

Aset Tetap Dalam Proses Pembangunan/ <i>Fixed Assets Under Construction</i>	Persentase Penyelesaian/ <i>Completion Percentage</i>	Estimasi Tahun Penyelesaian/ <i>Estimated Year of Completion</i>	Biaya Perolehan/ <i>At Cost</i>
2015			
Bangunan dan Fasilitas Pelabuhan/ <i>Building and Port Facilities</i>	2.27%-97.78%	Januari - Mei 2016/ <i>January - May 2016</i>	426,533,294
Kapal/Ships	4%-26.8%	2017	8,805,264
Alat-alat Fasilitas Pelabuhan dan Peralatan Lainnya/ <i>Port Facility Equipments and Other Equipments</i>	13.96%-88.57%	Januari - Februari 2016/ <i>January - February 2016</i>	210,431,936
Jalan dan Bangunan/ <i>Roads and Buildings</i>	3.47%-95%	Januari - Februari 2016/ <i>January - February 2016</i>	117,244,990
Tanah/Lands	100%	Januari 2016/ <i>January 2016</i>	561,313,171
Instalasi Fasilitas Pelabuhan/ <i>Port Facility Installations</i>	36.53%	Februari 2016/ <i>February 2016</i>	66,151,901
Peralatan/ <i>Equipments</i>	84.84%-91.61%	Januari 2016/ <i>January 2016</i>	27,092,564
Emplasemen/ <i>Emplacement</i>	20.386%-30%	Juli 2016/ <i>July 2016</i>	6,865,300
Total			1,424,438,420

Hak atas tanah Grup berupa Sertifikat Hak Pengelolaan ("HPL") dan Sertifikat Hak Guna Bangunan ("SHGB"). SHGB memiliki masa berlaku antara tahun 2020 hingga 2045. Manajemen berpendapat bahwa SHGB tersebut dapat diperpanjang.

The Group's land rights such as Rights Management Certificate ("HPL") freehold land ("SHM") and land-use rights ("SHGB"). The SHGB will expire between 2020 and 2045. Management believes that the SHGB are extendable.

Hak atas tanah seluas 578.503 m² masih atas nama pemilik lama dan saat ini masih dalam proses balik nama menjadi nama Perusahaan dan hak atas tanah seluas 1.142.991 m² saat ini masih dalam proses perpanjangan hak.

Land rights measuring 578,503 sqm is still in the name of the former owner and is currently still in the process of being transferred to the Company's name and rights to the land area of 1,142,991 sqm are still in the process of renewal of property rights as of to date.

Berdasarkan Laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur No. LR-860/ PW13/2/2017 tanggal 2 November 2017 tentang Laporan Hasil Reviu Perhitungan Konsesi Terminal Gilimas Pelabuhan Lembar yang dikelola oleh Perusahaan, maka perusahaan melakukan reklasifikasi aset dalam penyelesaian aset tetap sebesar Rp86.461.632 atas aset konsesi Terminal Gilimas Pelabuhan Lembar ke aset takberwujud (Catatan 17). Pada tahun 2017 laporan tersebut juga digunakan sebagai dasar untuk penetapan jangka waktu konsesi sebagaimana termuat dalam Surat Direksi kepada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Lembar pada tanggal 21 Desember 2017.

Based on the Report of Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Representatives of East Java Province No. LR-860/PW13/2/2017 dated November 2, 2017 on the Report of the Review and Evaluation of the Final Report of the Study of Gilimas Terminal Lembar Port managed by the Company, the Company has reclassified construction in progress of the fixed assets amounting to Rp86,461,632 on assets concession of Port Terminal Gilimas Lembar to intangible assets (Note 17). In 2017 The report is also used as a basis for establishing term concession as set forth in the Director Letter to Harbourmaster Office and Port Authority Lembar on December 21, 2017.

15. Aset Tetap (Lanjutan)

15. Fixed Assets (Continued)

Perusahaan melakukan revaluasi aset tetap untuk kelompok aset tetap tertentu yaitu Bangunan Fasilitas Pelabuhan dan Alat-alat Fasilitas Pelabuhan (sesuai Surat Direksi Perusahaan No.00036C/PA/JMM-XII/2016 tanggal 6 Desember 2016) dengan menggunakan nilai buku per 30 Juni 2016. Perusahaan menggunakan Jasa Penilai Independen yaitu KJPP Immanuel, Johnny dan Rekan Dasar Penilai Independen untuk mengestimasi nilai wajar aset tetap adalah dengan Pendekatan Biaya dan Pendekatan Pasar dan Pendekatan Penilaian sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia (SPI).

The Company revalued its fixed assets for the group of certain fixed assets namely port facility Buildings and port facility Equipments (According Letter of Directors of the Company No.00036C/PA/JMM-XII/2016 dated December 6, 2016 by using the book value per June 30, 2016. The Company used independent Appraisal Service, KJPP Immanuel, Johnny and Rekan Independent assessors where in basis for estimating the fair value of fixed assets is the cost approach and market approach and Appraisal Approach in accordance with Indonesian Appraisal Standard (SPI).

Asumsi yang digunakan untuk melakukan revaluasi antara lain:

Assumptions that are required to perform revaluation include:

1. Nilai dinyatakan dalam mata uang rupiah.
2. Nilai yang dicantumkan dalam laporan ini serta setiap nilai lain dalam Laporan yang merupakan bagian dari properti yang dinilai hanya berlaku sesuai dengan maksud tujuan penilaian. Nilai yang digunakan dalam laporan penilaian ini tidak boleh digunakan untuk tujuan penilaian lain yang dapat mengakibatkan terjadinya kesalahan.
3. Penilaian didasarkan pada kondisi pada saat dilakukan penilaian berdasarkan data dan informasi yang diberikan oleh pemilik properti serta pengalaman dan pengamatan penilai.

1. Values are denominated in rupiah.
2. The amounts included in this report and any other value in the Reportst are part of the property assessed and valid only for the purpose of the assessment. The value used in this assessment report should not be used for other valuation purposes which may result to errors.
3. Assessment is based on conditions at the time of assessment based on data and information provided by the property owner and the experience and observation of the appraiser.

Berikut hasil penilaian estimasi nilai wajar yang berpengaruh dalam laporan keuangan.

The following are the results of the fair value estimation in the financial statements.

	31 Desember 2016 / December 31, 2016						
	Harga Perolehan/ At Cost	Akumulasi Penyusutan/ Accumulated Depreciation	Nilai Buku 30 Juni 2016/ June 30, 2016 Book Value	Nilai Wajar/ Fair value	Selisih Lebih (Kurang)/Excess (Less)	Keuntungan Revaluasi (Penghasilan Komprehensif Lain)/Revaluation Gains (Other Comprehensive Income)	Kerugian Revaluasi (Laba Rugi)/ Revaluation (profit/loss)
Perusahaan/The Company							
Bangunan Fasilitas Pelabuhan/ Port Facilities	2,806,231,227	731,016,090	2,075,215,137	2,761,759,656	686,544,519	791,963,629	(105,419,110)
Alat-Alat Fasilitas Pelabuhan/ Port Facility Equipment	1,648,836,855	499,782,030	1,149,054,825	1,442,202,899	293,148,074	305,192,431	(12,044,357)
Entitas Anak/Subsidiaries							
PT Terminal Petikemas Surabaya	1,076,545,497	515,519,853	561,025,644	572,574,258	11,548,614	11,548,614	--
PT Pelindo Marine Service	13,776,537	1,466,666	12,309,871	28,269,000	15,959,129	15,959,129	--
PT Berlian Jasa Terminal Indonesia	560,847,647	142,415,928	418,431,719	480,820,956	62,389,237	64,929,286	(2,540,049)
PT Terminal Teluk Lamong	2,117,000	448,867	1,668,133	1,763,344	95,211	156,409	(61,198)
Total	6,108,354,763	1,890,649,434	4,217,705,329	5,287,390,113	1,069,684,784	1,189,749,498	(120,064,714)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) AND
SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2017, 2016 and 2015
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

15. Aset Tetap (Lanjutan)

Jumlah tercatat aset tetap revaluasi pada tahun 2016 jika dicatat dengan model biaya adalah sebesar Rp2.499.583 untuk bangunan fasilitas pelabuhan dan sebesar Rp2.746.332 untuk alat - alat fasilitas pelabuhan.

Pada tahun 31 Desember 2017, 2016 dan 2015, Grup telah mengasuransikan aset tetap dan Aset Takberwujud (Catatan 17) yang dimiliki, kecuali tanah, terhadap, risiko kebakaran, property all risk, industrial all risk dan risiko lainnya dengan jumlah pertanggungan masing - masing sebesar Rp9.194.407.437 dan USD1,257,277,430 (angka penuh) untuk tahun 31 Desember 2017, Rp6.432.038.851 dan USD450,000,000 (angka penuh) untuk tahun 2016 dan Rp6.614.259.187 dan USD350,000,000 (angka penuh) untuk tahun 2015, kepada pihak ketiga yaitu PT Asuransi Ramayana Tbk, PT Asuransi Jasa Indonesia, PT Jasa Raharja Putera Muda, PT Zurich Insurance Indonesia, PT Sarana Janesia Utama, PT Chubb General Insurance Indonesia dan PT Wahana Tata, yang menurut pendapat manajemen cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang terjadi.

Berdasarkan Laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur No. LR-118/PW13/2/2016 tanggal 17 Maret 2016 tentang Laporan Hasil Tinjauan dan Evaluasi atas Laporan Akhir Studi Konsesi Terminal Multipurpose Kalimireng Pelabuhan Gresik yang dikelola oleh PT Berlian Manyar Sejahtera, maka Grup melakukan reklasifikasi aset dalam penyelesaian aset tetap sebesar Rp566.472.413 atas aset konsesi Terminal Pelabuhan Manyar Gresik ke aset takberwujud. Laporan tersebut juga digunakan sebagai dasar untuk penetapan jangka waktu konsesi dan fee konsesi sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pembahasan Perjanjian Konsesi dengan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Gresik pada tanggal 30 Desember 2016 (Catatan 43).

Berdasarkan pada Penilaian dari penilai independen KJPP Immanuel, Jonny dan Rekan dalam laporannya bertanggal 10 Desember 2015, nilai wajar aset tetap tanah Perusahaan pada tanggal 7 Desember 2015 adalah sebesar Rp37.722.710.

15. Fixed Assets (Continued)

The carrying amount of revalued fixed assets in 2016 if recorded under the cost model was Rp2,499,583 for building port facilities and Rp2,746,332 for equipment - Port facility tools.

As of December 31, 2017, 2016 and 2015, the Group insured its fixed assets and Intangible Assets (Note 17), except land, against the risk of fire, all property risk, all industrial risks and any other risks with sum insured amount of Rp9,194,407,437 and USD1,257,277,430 (full amount) for the year December 31, 2017 and Rp6,432,038,851 and USD450,000,000 (full amount) for the year 2016, Rp6,614,259,187 and USD350,000,000 (full amount) for the year 2015, to third parties, namely PT Asuransi Ramayana Tbk, PT Asuransi Jasa Indonesia, PT Jasa Raharja Putera Muda, PT Zurich Insurance Indonesia, PT Sarana Janesia Utama, PT Chubb General Insurance Indonesia and PT Wahana Tata, which, according of the management, is adequate to cover possible losses.

Based on the Report of Badan Pengawasan Keuangan and Pembangunan (BPKP) Representatives of East Java Province No.LR-118/PW13/2/2016 dated March 17, 2016 on the Report of the Review and Evaluation of the Final Report of the Study of Multipurpose Terminal Kalimireng Gresik Port managed by PT Berlian Manyar Sejahtera, the Group has reclassified construction in progress in the fixed assets amounting to Rp566,472,413 on assets concession Port Terminal Manyar Gresik to intangible assets. The report is also used as a basis for establishing term concession and concession fees as set forth in the Minutes of Discussion on Concession Agreement with Harbourmaster Office and Port Authority Class II Gresik on December 30, 2016 (Note 43).

Based on the appraisal of KJPP Immanuel, Jonny and Rekan in its report dated December 10, 2015, the fair value of fixed assets land of the Company as of December 7, 2015 amounted to Rp37,722,710.

15. Aset Tetap (Lanjutan)

15. Fixed Assets (Continued)

Berdasarkan pada Penilaian dari penilai Independen KJPP Immanuel, Jonny dan Rekan dalam laporannya bertanggal 6 Desember 2016, nilai wajar aset tetap Kapal dan Jalan dan Bangunan perusahaan pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp210.655.800 dan Rp550.396.800.

Based on the appraisal of KJPP Immanuel, Jonny and Rekan in their report dated December 6, 2016, the fair value of fixed assets ships and roads and buildings of the Company as of June 30, 2016 amounted to Rp210,655,800 and Rp550,396,800.

Berdasarkan pada Penilaian dari penilai Independen, nilai wajar aset tetap Kapal dan Jalan dan Bangunan entitas anak pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp149.433.000 dan Rp157.675.400.

Based on the appraisal, the fair value of fixed assets ships and roads and buildings of the subsidiaries as of June 30, 2016 amounted to Rp149,433,000 and Rp157,675,400.

Manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa nilai wajar tersebut masih relevan karena tidak terdapat Perubahan kondisi fisik aset tetap tersebut secara signifikan pada tanggal 31 Desember 2017.

The Company's management believes that the fair value is still relevant because there is no change in the physical conditions of fixed assets significantly in December 31, 2017.

Perhitungan (keuntungan)/kerugian penjualan aset tetap dan aset tersedia untuk dijual adalah sebagai berikut:

The calculation of the (gain)/loss on disposal of fixed assets and fixed assets held for sale are as follow:

	<u>2017</u> Rp	<u>2016</u> Rp	<u>2015</u> Rp	
Harga Perolehan	38,282,948	24,824,515	23,151,520	Cost
Akumulasi penyusutan	<u>(11,099,973)</u>	<u>(24,311,033)</u>	<u>(20,532,388)</u>	Accumulated depreciation
Nilai buku bersih	27,182,975	513,482	2,619,132	Net book value
Hasil Penjualan	<u>26,762,497</u>	<u>1,300,371</u>	<u>13,020,309</u>	Proceeds from Sales
Laba (rugi) Penjualan aset tetap	<u>(420,478)</u>	<u>786,889</u>	<u>10,401,176</u>	Gain (loss) on sale of fixed assets

Penghapusbukuan aset tetap dikarenakan aset dalam kondisi fisik rusak, tidak ditemukan dan atau aset sudah tidak digunakan. Penghapusbukuan aset tetap berupa penghapusan secara administratif dan atau pemindah tangan karena dijual (Aset tersedia untuk dijual).

Write - off of a fixed asset is due to the asset is physically damaged, was not found or asset is no longer used. Write - off of fixed assets in the form of administrative removal and / or transfer due for sale (Assets available for sale).

Nilai buku atas aset tetap yang dihapus untuk tahun 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp27.182.975, Rp1.320.946 dan Rp25.870.091.

The book value of fixed assets written - off as of December 31, 2017, 2016 and 2015 amounted to Rp27,182,975 Rp1,320,946 and Rp25,870,091, respectively.

Pada tahun 2017, 2016 dan 2015, penurunan atas akumulasi penurunan nilai aset dikarenakan sehubungan dengan pemulihan penurunan nilai (pemulihan) sebesar Rp7,892, Rp4.812.438 dan Rp146,042.

In 2017, 2016 and 2015, deduction in the accumulated impairment is related to the reversal of impairment (recovery) amounting to Rp7,892, Rp4,812,438 and Rp146,042, respectively.

Jumlah harga perolehan aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp587.213.218 dan Rp186.666.358 dan Rp354.899.818.

The Acquisition Cost of fixed assets that are fully depreciated and still in use for production as of December 31, 2017, 2016 and 2015, amounted to Rp587,213,218, Rp186,666,358 and Rp354,899,818, respectively.

Pada tahun 2017, Grup melakukan reklasifikasi uang muka kontraktor sebesar Rp109.320.206 atas alat-alat fasilitas pelabuhan ke aset tetap.

In 2017, the Group has reclassified the advanced payment to contractor amounted to Rp109,320,206 consist of port facility equipment to fixed assets.

15. Aset Tetap (Lanjutan)

15. Fixed Assets (Continued)

Penurunan nilai Bangunan Fasilitas Pelabuhan dan Alat-Alat Fasilitas Pelabuhan akibat kerusakan Dermaga di Pelabuhan Tanjung Intan, Banjarmasin dan Maumere dikarenakan masih menunggu proses perbaikan dan klaim asuransi.

Impairment of Building Facilities Port Facility and Port Facility Equipment is due to damage of Dock at Tanjung Intan, Banjarmasin and Maumere Port due to still waiting for repair process and insurance claim.

Kapitalisasi biaya pinjaman pada aset dalam proses pembangunan adalah sebagai berikut:

Capitalized borrowing costs in the construction in progress are as follows:

	2017 Rp	2016 Rp	2015 Rp	
PT Bank ANZ Indonesia				PT Bank ANZ Indonesia
Saldo Awal	9,167,261	9,167,261	9,017,736	Beginning Balance
Penambahan	--	--	149,525	Additions
Saldo Akhir	9,167,261	9,167,261	9,167,261	Ending Balance

Berdasarkan penelaahan manajemen Perusahaan, tidak terdapat kejadian-kejadian atau perubahan-perubahan keadaan yang mengidentifikasi adanya penurunan nilai aset tetap pada 31 Desember 2017.

Based on review of management of the Company, there were no circumstances or changes in circumstances which indicated impairment in the value of fixed assets as of December 31, 2017.

16. Piutang Lain-lain

16. Other Receivables

	2017 Rp	2016 Rp	2015 Rp
Berdasarkan Pelanggan/By Customer			
<i>Pihak Berelasi/Related Parties:</i>			
PT Ambang Barito Nusapersada (Lihat Catatan/ See Notes 8, 9)	7,000,000	10,500,000	14,000,000
Sub Total	7,000,000	10,500,000	14,000,000
Bagian Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun/ <i>Current Maturities:</i>			
PT Ambang Barito Nusapersada	(3,500,000)	(3,500,000)	(3,500,000)
Sub Total	(3,500,000)	(3,500,000)	(3,500,000)
Piutang Lain-lain - Belum Jatuh Tempo <i>Other Receivable - Non Current</i>	3,500,000	7,000,000	10,500,000

Berdasarkan Surat Perjanjian Tentang Pembayaran Hutang HK.0501/38/P.III-2010 dan Addendumnya HK.0502/131.1/P.III-2014, Jumlah hutang pokok sebesar Rp37.000.000 akan dibayar dengan cara angsuran dalam jangka waktu selama 10 tahun dihitung mulai tanggal 1 Januari 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, dengan tingkat bunga 8% per tahun dari saldo pokok hutang menurun.

Based on Letter of Agreement regarding Debt Payment HK.0501/38/P.III-2010 and Addendum HK.0502/131.1/P.III-2014, total principal payable amounting to Rp37,000,000 shall be paid by installment within 10 Years commencing from January 1, 2010 up to December 31, 2019, at an annual interest rate of 8% from the principal amount of the debt decreased.

Pinjaman dana tersebut tidak mensyaratkan jaminan suatu aset tertentu.

The loan does not requires the colleteral of a particular asset.

17. Aset Takberwujud

17. Intangible Assets

a. Aset Takberwujud Hak Konsesi dan Lainnya

a. Intangible Assets – Consession right and Other

		31 Desember 2017/December 31, 2017					
		1 Januari 2017/ January 1, 2017	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Disposals	Reklasifikasi/ Reclassification	31 Desember 2017/ December 31, 2017	
Biaya Perolehan:							At Cost:
<u>Aset Takberwujud - Hak Konsesi</u>							<u>Intangible Assets - Consession right</u>
							Consession right -
Hak Konsesi - Terminal Teluk Lamong	4,471,161,403	--	--	1,441,164,277	5,912,325,680	Terminal Teluk Lamong	
Hak Konsesi - APBS	952,594,783	--	--	--	952,594,783	Consession rights - APBS	
Hak Konsesi - BMS	729,586,557	21,770,350	--	6,814,041	758,170,948	Consession rights - BMS	
<u>Aset Takberwujud Dalam Penyelesaian</u>							<u>Intangible Assets - Under Contructions</u>
							Construction - Terminal Teluk Lamong
Konstruksi - Terminal Teluk Lamong	605,936,404	41,336,991	--	(550,872,250)	96,401,145	Construction - BMS	
Konstruksi - BMS	6,182,483	3,947,015	--	(6,814,041)	3,315,457	Construction - Gilimas	
Konstruksi - Gilimas	--	58,622,762	--	86,461,632	145,084,394		
<u>Aset Takberwujud Lainnya :</u>							<u>Other Intangible Assets</u>
Merk Dagang	500,000	--	--	--	500,000	Trademark	
Lisensi	2,777,052	26,147	--	--	2,803,199	Licenses - Net	
Piranti Lunak	25,471,547	86,202,869	--	--	111,674,416	Computer Software	
Sub Total	6,794,210,229	211,906,134	--	976,753,659	7,982,870,022	Sub Total	
Akumulasi Amortisasi							Accumulated Amortization
<u>Aset Takberwujud - Hak Konsesi</u>							<u>Intangible Assets - Consession rights</u>
							Consession right -
Hak Konsesi - Terminal Teluk Lamong	219,648,817	158,927,157	--	--	378,575,974	Terminal Teluk Lamong	
Hak Konsesi - APBS	70,870,994	52,831,999	--	--	123,702,993	Consession rights - APBS	
Hak Konsesi - BMS	10,146,807	11,210,295	--	--	21,357,102	Consession rights -BMS	
<u>Aset Takberwujud Lainnya :</u>							<u>Other Intangible Assets</u>
Lisensi	881,923	419,936	--	--	1,301,859	Licenses - Net	
Piranti Lunak	5,551,572	12,650,445	--	--	18,202,017	Computer Software	
Sub Total	307,100,113	236,039,832	--	--	543,139,945	Sub Total	
Total	6,487,110,116				7,439,730,077	Total	
		31 Desember 2016/December 31, 2016					
		1 Januari 2016/ January 1, 2016	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Disposals	Reklasifikasi/ Reclassification	31 Desember 2016/ December 31, 2016	
Biaya Perolehan:							At Cost:
<u>Aset Takberwujud - Hak Konsesi</u>							<u>Intangible Assets - Consession right</u>
							Consession right -
Hak Konsesi - Terminal Teluk Lamong	3,916,252,053	--	--	554,909,350	4,471,161,403	Terminal Teluk Lamong	
Hak Konsesi - APBS	952,594,783	--	--	--	952,594,783	Consession rights - APBS	
Hak Konsesi - BMS	--	4,576,695	--	725,009,862	729,586,557	Consession rights - BMS	
<u>Aset Takberwujud Dalam Penyelesaian</u>							<u>Intangible Assets - Under Contructions</u>
							Construction - Terminal Teluk Lamong
Konstruksi - Terminal Teluk Lamong	435,215,980	725,629,774	--	(554,909,350)	605,936,404	Construction - BMS	
Konstruksi - BMS	162,699,937	2,019,995	--	(158,537,449)	6,182,483	Computer Software	
Piranti Lunak	25,328,847	--	--	(25,328,847)	--		
<u>Aset Takberwujud Lainnya :</u>							<u>Other Intangible Assets</u>
Merk Dagang	500,000	--	--	--	500,000	Trademark	
Lisensi	1,572,052	1,205,000	--	--	2,777,052	Licenses - Net	
Piranti Lunak	5,337,355	1,125,448	--	19,008,744	25,471,547	Computer Software	
Sub Total	5,499,501,007	734,556,912	--	560,152,310	6,794,210,229	Sub Total	
Akumulasi Amortisasi							Accumulated Amortization
<u>Aset Takberwujud - Hak Konsesi</u>							<u>Intangible Assets - Consession rights</u>
							Consession right -
Hak Konsesi - Terminal Teluk Lamong	93,426,159	126,222,658	--	--	219,648,817	Terminal Teluk Lamong	
Hak Konsesi - APBS	23,262,170	47,608,824	--	--	70,870,994	Consession rights - APBS	
Hak Konsesi - BMS	--	10,146,807	--	--	10,146,807	Consession rights -BMS	
<u>Aset Takberwujud Lainnya :</u>							<u>Other Intangible Assets</u>
Lisensi	593,741	288,182	--	--	881,923	Licenses - Net	
Piranti Lunak	3,277,665	2,273,907	--	--	5,551,572	Computer Software	
Sub Total	120,559,735	186,540,378	--	--	307,100,113	Sub Total	
Total	5,378,941,272				6,487,110,116	Total	

17. Aset Takberwujud (Lanjutan)

17. Intangible Assets (Continued)

	31 Desember 2015/December 31, 2015					
	1 Januari 2015/ January 1, 2015	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Disposals	Reklasifikasi/ Reclassification	31 Desember 2015/ December 31, 2015	
Biaya Perolehan:						At Cost:
<u>Aset Takberwujud - Hak Konsesi</u>						<u>Intangible Assets - Concession right</u>
Hak Konsesi - Terminal Teluk Lamong	--	--	--	3,916,252,053	3,916,252,053	Concession right - Terminal Teluk Lamong
Hak Konsesi - APBS	--	--	--	952,594,783	952,594,783	Concession right - APBS
<u>Aset Takberwujud Dalam Penyelesaian</u>						<u>Intangible Assets Under Contructions</u>
Konstruksi - Terminal Teluk Lamong	2,978,035,197	1,373,432,836	--	(3,916,252,053)	435,215,980	Construction - Terminal Teluk Lamong
Konstruksi - APBS	558,259,327	394,335,457	--	(952,594,783)	--	Construction - APBS
Konstruksi - BMS	144,699,509	18,000,428	--	--	162,699,937	Construction - BMS
Piranti Lunak	--	25,328,847	--	--	25,328,847	Computer Software
<u>Aset Takberwujud Lainnya :</u>						<u>Other Intangible Assets</u>
Merk Dagang	--	500,000	--	--	500,000	Trademark
Lisensi	680,095	891,957	--	--	1,572,052	Licenses - Net
Piranti Lunak	3,051,038	2,286,317	--	--	5,337,355	Computer Software
Sub Total	3,684,725,165	1,814,775,842	--	--	5,499,501,007	Sub Total
Akumulasi Amortisasi						Accumulated Amortization
<u>Aset Takberwujud - Hak Konsesi</u>						<u>Intangible Assets - Concession rights</u>
Hak Konsesi - Terminal Teluk Lamong	--	93,426,159	--	--	93,426,159	Concession right - Terminal Teluk Lamong
Hak Konsesi - APBS	--	23,262,170	--	--	23,262,170	Construction - APBS
<u>Aset Takberwujud Lainnya :</u>						<u>Other Intangible Assets</u>
Lisensi	460,512	133,229	--	--	593,741	Licenses - Net
Piranti Lunak	1,610,016	1,667,649	--	--	3,277,665	Computer Software
Sub Total	2,070,528	118,489,207	--	--	120,559,735	Sub Total
Total	3,682,654,638				5,378,941,272	Total

Pada tahun 2017, Grup melakukan reklasifikasi uang muka kontraktor sebesar Rp890.292.028 atas alat-alat fasilitas pelabuhan untuk konsesi Terminal Teluk Lamong ke aset takberwujud.

In 2017, the Group has reclassified advanced payment to contractor amounted to Rp890,292,028 consist of port facility equipment of Teluk Lamong Terminal to intangible assets.

Kapitalisasi biaya pinjaman pada aset takberwujud dalam proses pembangunan (konstruksi) adalah sebagai berikut :

Capitalized borrowing costs in the intangible assets (construction) in progress are as follows:

	2017 Rp	2016 Rp	2015 Rp	
Saldo Awal	275,503,124	275,503,124	205,266,669	Beginning Balance
Penambahan	1,874,675	--	70,236,455	Additions
Saldo Akhir	277,377,799	275,503,124	275,503,124	Ending Balance
PT Bank ANZ Indonesia	168,384,367	168,384,367	168,384,367	PT Bank ANZ Indonesia
Deutsche Bank	22,618,183	22,618,183	22,618,183	Deutsche Bank
Obligasi	84,500,574	84,500,574	84,500,574	Bonds
Bank Sindikasi	1,874,675	--	--	Syndicated Bank
Total	277,377,799	275,503,124	275,503,124	Total

17. Aset Takberwujud (Lanjutan)

17. Intangible Assets (Continued)

Aset hak konsesi merupakan aset yang dibangun berdasarkan hak yang diberikan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Kantor Kesyahbandaran dan Otorisasi Pelabuhan (KSOP) kepada Perusahaan untuk membangun dan mengoperasikan Terminal Pelabuhan Terminal Teluk Lamong, Manyar Gresik Gilimas dan APBS.

Assets of concession rights are assets built on the rights granted by the Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia Harbourmaster Office and Port Authority (KSOP) to the Company to build and operate Terminal port in Teluk Lamong, Manyar Gresik and APBS.

BMS telah memperoleh hak konsesi No.02.00/SPKS/BMS-KSOP/XII/2017 tanggal 15 Desember 2017 dengan jangka waktu 76 tahun.

BMS had obtained a concession agreement No.02.00/SPKS/BMS-KSOP/XII/2017 dated December 15, 2017 with a term of 76 years.

Pada tahun 31 Desember 2017, 2016 dan 2015, Grup telah mengasuransikan Aset Tak Berwujud bersama-sama dengan Aset Tetap, terhadap, risiko kebakaran, *property all risk, industrial all risk* dan risiko lainnya. (Lihat Catatan 15)

As of December 31, 2017, 2016 and 2015, the Group has insured Intangible Assets together with fixed assets, against, fire risk, property all risk, industrial all risk and other risks (See Note 15).

Bangunan Fasilitas Pelabuhan BMS telah diasuransikan kepada PT Jasa Asuransi Indonesia terhadap seluruh risiko kerugian dengan nilai pertanggungan pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 sebesar Rp217.000.000.

Port Facilities Buildings of BMS were insured to PT Jasa Asuransi Indonesia against all risks that might incur with coverage as of December 31, 2017, 2016 and 2015 amounting to Rp217,000,000.

b. Goodwill

b. Goodwill

Goodwill ini merupakan selisih lebih biaya perolehan atas kepemilikan Perusahaan terhadap nilai wajar aset netto teridentifikasi PDS yang diakuisisi pada tanggal 24 Februari 2014 yaitu sebesar Rp1.143.301.

This goodwill represents the excess of acquisition cost of the Company's ownership over the fair value of the PDS's net asset which was acquired on February 24, 2014 amounting to Rp1,143,301.

Pengujian penurunan nilai atas *goodwill* dilakukan secara tahunan dan Perusahaan membentuk penyisihan ketika terdapat suatu indikasi bahwa nilai tercatatnya mengalami penurunan.

Impairment of goodwill is assessed annually and a provision should be made when there is an indication where the carrying value may be impaired.

18. Aset Tidak Lancar Lainnya

18. Other Non Current Assets

	2017 Rp	2016 Rp	2015 Rp	
Uang Jaminan	15,599,021	7,995,430	6,520,505	Security Deposits
Piutang dalam Kepengurusan Negara	17,636,751	19,560,896	20,751,629	Receivables from the State Management Allowance of Long-Term Other Receivable from State Management
Penyisihan Piutang dalam Kepengurusan Negara	(17,636,751)	(19,560,896)	(20,751,629)	Assigned Fixed Assets
Aset Tetap Penugasan	--	2,418,438	2,418,438	Accumulated Depreciation of Assigned Fixed Assets
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Penugasan	--	(1,294,226)	(1,243,523)	Obsolete Fixed Assets
Aset Tetap Tidak Berfungsi	--	--	1	
Total	15,599,021	9,119,642	7,695,421	Total

18. Aset Tidak Lancar Lainnya (Lanjutan)

18. Other Non Current Assets (Continued)

Aset tetap penugasan merupakan aset tetap milik pemerintah yang dialihkan ke Perseroan pada saat perubahan bentuk Perseroan pada tahun 1992 dari perum pelabuhan menjadi Perusahaan.

The assigned fixed asset is a government-owned fixed asset transferred to the Company at the time of change in the form of the Company in 1992 from general port company to the Company.

- Uang jaminan merupakan uang jaminan listrik kepada PLN, telepon dan PDAM.
- Piutang jangka panjang lainnya merupakan piutang macet dan telah didaftarkan pada PUPN untuk ditindaklanjuti.

- *Security deposits are deposits for electricity, telephone line and clean water line.*
- *Long-term receivables are doubtful accounts which have already been registered to Government Collector Agency for Collection or for follow up.*

19. Utang Usaha

19. Trade Payables

	2017 Rp	2016 Rp	2015 Rp	
a. Berdasarkan Pemasok :				a. By Supplier
Pihak Berelasi (Catatan 8)				Related parties (Note 8)
Sudah Difakturkan	80,623,280	213,063,833	147,805,339	Billed
Belum Difakturkan	101,945,848	--	--	Unbilled
Sub Total	<u>182,569,128</u>	<u>213,063,833</u>	<u>147,805,339</u>	Sub Total
Pihak Ketiga				Third parties
Sudah Difakturkan	580,035,401	670,225,860	919,621,509	Billed
Belum Difakturkan	348,752,962	--	--	Unbilled
Sub Total	<u>928,788,363</u>	<u>670,225,860</u>	<u>919,621,509</u>	Sub Total
Total	<u>1,111,357,491</u>	<u>883,289,693</u>	<u>1,067,426,848</u>	Total
b. Berdasarkan Mata Uang				b. By Original Currency
USD	128,912,895	12,151,993	422,420,014	USD
EUR	51,261,815	26,428,949	--	EUR
Rupiah	931,182,780	844,708,751	645,006,834	Rupiah
Total	<u>1,111,357,491</u>	<u>883,289,693</u>	<u>1,067,426,848</u>	Total

Saldo utang usaha termasuk utang retensi. Penjelasan lebih terinci atas beberapa pemasok lihat Catatan 43.

The balance of trade payables includes retention payables. For more detailed explanation of some suppliers see Note 43.

Atas utang usaha Grup tidak terdapat jaminan yang akan diberikan oleh Perusahaan.

The Group's debts are not guaranteed by the Company.

20. Perpajakan

20. Taxation

a. Pajak Dibayar di Muka

a. Prepaid Taxes

	2017 Rp	2016 Rp	2015 Rp	
<u>Perusahaan :</u>				<u>The Company:</u>
Pajak Pertambahan Nilai - Masukan	29,081,021	3,839,243	36,895,071	Value Added Tax (VAT) In
PPh Final	9,340,945	6,968,387	--	Final Income Tax
<u>Entitas Anak</u>				<u>Subsidiaries:</u>
Pajak Pertambahan Nilai Masukan	253,024,231	119,661,493	66,000,893	Value Added Tax (VAT) In
Total	<u>291,446,197</u>	<u>130,469,123</u>	<u>102,895,964</u>	Total

20. Perpajakan (Lanjutan)

20. Taxation (Continued)

b. Estimasi Tagihan Pajak

b. Estimated Claims for Tax Refund

	2017 Rp	2016 Rp	2015 Rp	
<u>Perusahaan</u>				<u>The Company</u>
Pajak Penghasilan Badan				Corporate Income Tax
Tahun 2010	--	2,638,491	5,258,541	Year 2010
Tahun 2014	23,251,155	23,251,155	23,251,155	Year 2014
Tahun 2015	--	219,595,859	219,595,859	Year 2015
Tahun 2016	137,862,610	137,862,610	--	Year 2016
Tahun 2017	146,357,543	--	--	Year 2017
Pajak Pertambahan Nilai				Value Added Tax
Tahun 2010	250,056	8,681,587	8,681,587	Year 2010
Tahun 2014	--	--	80,805,362	Year 2014
Tahun 2015	--	117,136,338	108,919,649	Year 2015
Tahun 2016	48,192,674	48,192,674	--	Year 2016
Tahun 2017	24,721,061	--	--	Year 2017
<u>Entitas Anak</u>				<u>Subsidiaries:</u>
Pajak Bumi dan Bangunan				Land and Building Tax
PT Terminal Petikemas Surabaya	--	1,314,961	1,314,961	PT Terminal Petikemas Surabaya
Pajak Penghasilan Badan				Corporate Income Tax
PT Berlian Jasa Terminal Indonesia dan Entitas Anak	57,966,752	57,297,606	22,856,126	PT Berlian Jasa Terminal Indonesia and Subsidiaries
PT Pelindo Husada Citra	1,477,906	1,184,650	--	PT Pelindo Husada Citra
PT Pelindo Marine Service	113,128	192,407	--	PT Pelindo Marine Service
PT Terminal Teluk Lamong	4,044,346	4,798,123	766,259	PT Terminal Teluk Lamong
Total	444,237,232	622,146,461	471,449,499	Total

- Pajak Penghasilan Badan 2010
Atas kelebihan pajak badan tahun 2010 sebesar Rp7.554.656, Perusahaan telah memperoleh putusan hasil pemeriksaan pajak berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan (SKPLB) No. 00003/406/10/093/13 tanggal 18 Desember 2013 dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Empat, Perusahaan dinyatakan lebih bayar pajak penghasilan badan untuk tahun 2010 tersebut sebesar Rp2.627.479 dengan penghasilan neto sebesar Rp89.710.150. Atas lebih bayar tersebut, Perusahaan telah mengajukan permintaan pengembalian kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan kepada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Empat melalui Surat No KU.05/02/P.III-2014 tanggal 7 Februari 2014 dan lebih bayar tersebut telah dikompensasikan dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak dan Surat Tagihan Pajak, atas Pajak Pertambahan Nilai masa Januari-Desember 2010 sebesar Rp2.627.479.
- Corporate Income Tax 2010
Due to overpayment of corporate income tax in 2010 amounting to Rp7,554,656, the Company has received results of tax audits based on Tax Overpayment Assessment Letter of Corporate Income Tax (SKPLB) No. 00003/406/10/093/13 dated December 18, 2013 from the Head of the Tax Office for Large Four Taxpayers, the Company declared an overpayment of corporate income tax for the year 2010 amounting to Rp2,627,479 with a net income of Rp89,710,150. On the overpayment, the Company has filed a request for the refund of the excess income tax payments to the Tax Office for Large Four Taxpayers No. KU.05/02/P.III-2014 through letter dated February 7, 2014 and overpayment has been compensated with Tax Underpayment Assessment Letter and Tax Collection Notice of Value Added Tax period January-December 2010 amounted Rp2,627,479.

20. Perpajakan (Lanjutan)

20. Taxation (Continued)

Perusahaan mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) tersebut melalui suratnya No. KU.05/20/P.III-2014 tanggal 5 Maret 2014 dan dengan Keputusan No.KEP-241/WPJ.19/2015 tanggal 16 Februari 2015 permohonan tersebut dikabulkan sebagian dan menambah jumlah PPh yang lebih dibayar menjadi sebesar Rp2.667.995. Perusahaan masih keberatan sehingga mengajukan banding dengan surat No. KU.05/50/P.III.2015 tanggal 27 Maret 2015

The Company filed an objection to the Tax Overpayment Assessment Letter (SKPLB) through letter No. KU.05 / 20 / P.III-2014 dated March 5, 2014 and by Decree No. KEP-241 / WPJ.19 / 2015 dated 16 February 2015 chose petition was granted partially and increase the amount of overpaid income tax become amounted to Rp2,667,995. The Company still had reservations so appealed by letter No. KU.05/50/P.III.2015 dated March 27, 2015.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak No.Put.77827/PP/M.XIIIA/15/2016 tanggal 24 November 2016, Pengadilan Pajak menyatakan mengabulkan seluruh permohonan banding Perusahaan terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-241/WPJ.19/2015 tanggal 16 Februari 2015 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2010 No. 00003/406/10/093/13 tanggal 18 Desember 2013 dengan perhitungan total pajak lebih bayar sebesar Rp5.258.541.

Based on the Tax Court Decision No.Put.77827/PP/M.XIIIA/15/2016 dated November 24, 2016, the Tax Court declared to fully grant the Company's appeal against the decision of the Director General of Tax No. KEP-241/WPJ.19/2015 dated February 16, 2015 on the Objections to Tax Overpayment Assessment Letter of Corporate Income Taxes Year 2010 No. 00003/406/10/093/13 dated December 18, 2013 with the calculation total overpayment tax amounting to Rp5.258.541.

Perusahaan telah menerima pengembalian lebih bayar pajak penghasilan tahun 2010 tersebut sebesar Rp2.590.546 pada tanggal 12 Januari 2017 melalui Bank Negara Indonesia.

The Company received the refund on overpayment of income tax in 2010 amounting to Rp2,590,546 on January 12, 2017 via Bank Negara Indonesia.

- Pajak Penghasilan Badan 2014
Berdasarkan SKPKB Pajak Penghasilan Badan No. 00001/206/14/093/16 tanggal 17 Februari 2016 dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Empat, Perusahaan dinyatakan kurang bayar pajak penghasilan badan untuk tahun 2014 sebesar Rp8.959.588 ditambah sanksi administrasi sebesar Rp2.508.685, dengan penghasilan kena Pajak sebesar Rp785.944.424. Perusahaan telah mengajukan keberatan atas SKPKB tersebut melalui Surat No. KU.05/47/P.III-2016 tanggal 31 Maret 2016.

- Corporate Income Tax 2014
Based on the SKPKB of Corporate Income Tax No. 00001/206/14/093/16 dated February 17, 2016 from the Head of Tax Office of the Large Four Taxpayer, the Company stated underpayment of corporate income tax for 2014 amounting to Rp8,959,588 plus administrative sanction amounting to Rp2,508,685, with taxable income amounting to Rp785,944,424. The Company has filed an objection on the SKPKB through Letter No. KU.05 / 47 / P.III-2016 dated March 31, 2016.

Berdasarkan Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Keputusan Direktur Jenderal Pajak Kepala Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar No.KEP-00330/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 16 Maret 2017, Dirjen Pajak memutuskan menolak keberatan Wajib Pajak dalam suratnya No KU.05/47/P.III.2016 tanggal 31 Maret 2016 dan mempertahankan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

Based on the Letter of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia Decision of Director General of Taxation Head of Regional Office of DGT Taxpayer No.KEP-00330/KEB/WPJ.19/2017 dated March 16, 2017, Dirjen of Taxation rejected the objection of the Tax Payer in his letter number KU.05/47/P.III.2016 dated March 31, 2016 and maintain the amount of tax payable.

20. Perpajakan (Lanjutan)

20. Taxation (Continued)

Perusahaan telah membayar pajak terutang atas keputusan tersebut pada tanggal 17 Mei 2017. Perusahaan mengajukan banding atas surat keputusan tersebut.

The Company has paid the indebted tax on such decision on May 17, 2017. The Company appealed against the decision.

Pada tanggal 14 Juni 2017, Perusahaan melalui Surat No.KU.05/44/P.III-2017 mengajukan Banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.KEP-00330/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 16 Maret 2017 kepada Pengadilan Pajak tentang Keberatan atas SKPKB PPh Badan Tahun 2014.

On June 14, 2017, the Company through Letter No.KU.05/44/P.III-2017 filed an Appeal on Decision of the Director General of Tax No.KEP-00330/KEB/WPJ.19/2017 dated March 16, 2017 to the Tax Court Objection of SKPKB PPh Badan Year 2014.

- **Pajak Penghasilan Badan 2015**
Berdasarkan Surat Ketetapan Pajak lebih Bayar Pajak Penghasilan No.00024/406/15/093/17 tanggal 22 Mei 2017 dari Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak wajib Pajak Besar Empat, Perusahaan dinyatakan lebih bayar Pajak Penghasilan tahun pajak 2015 sebesar Rp219.518.424 dan telah dikompensasikan dengan Surat ketetapan Pajak Kurang bayar sebesar Rp4.668.213. Lebih bayar Pajak sebesar Rp214.850.210 telah diterima Perusahaan pada tanggal 21 Juni 2017 melalui Bank Negara Indonesia.
- **Pajak Penghasilan Badan 2016**
Atas lebih bayar PPh badan tahun 2016, Perusahaan masih dalam proses diperiksa oleh Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Empat
- **Pajak Pertambahan Nilai 2010**
Pada tanggal 10 Agustus 2017 dan 20 Desember 2017, perusahaan telah memperoleh Putusan Pengadilan Pajak tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari - Desember 2010, dimana Pengadilan Pajak menyatakan mengabulkan sebagian Permohonan Banding Perusahaan terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebesar Rp6.134.145

- **Corporate Income Tax 2015**
Based on Tax Assessment Letter on the excess of payment of Income Tax No. 00024/406/15/093/17 dated May 22, 2017 from the Directorate General of Tax Office Tax Service for Large Four Taxpayers, the Company is declared to overpay Tax for fiscal year 2015 amounting to Rp219,518,424 and has compensated with the assessment letters on tax underpayment amounting to Rp4,668,213. The overpayment of Taxes amounting to Rp214,850,210 was received by the Company on June 21, 2017 through Bank Negara Indonesia.
- **Corporate Income Tax 2016**
For the overpayment of corporate income tax in 2016, the Company still in the process examined by the Tax Office for Large Taxpayers Four.
- **Value Added Tax 2010**
On August 10, 2017 and December 20, 2017, the Company has obtained a Tax Court Decision on Taxpayer Objection of Tax Assessment Letter for Underpayment of Value Added Tax on Goods and Services of the Tax Period from January - December 2010, whereby the Tax Court declared grant part of the Company's Appeal against to the Decision of the Director General of Taxation amounting to Rp6,134,145

Pengembalian atas Keputusan Pengadilan Pajak untuk PPN masa Pajak Januari s/d Desember 2010 tersebut sebesar Rp6.134.145 telah dikompensasikan dengan Utang Pajak Pertambahan Nilai masa pajak Oktober 2017, melalui pemotongan Surat Perintah Membayar

The refund on the Tax Court Decision for VAT for the tax period of January to December 2010 amounting to Rp6,134,145 has been offset against the October 2017 VAT tax payable Withholding Tax Exemption Letter (SPMKP). while, for the Refund of Tax Court's decision on

20. Perpajakan (Lanjutan)

20. Taxation (Continued)

kelebihan Pajak (SPMKP). Sementara untuk Pengembalian atas keputusan Pengadilan Pajak atas Pajak Pertambahan Nilai masa November 2010 sejumlah Rp250.056, sampai tanggal laporan ini belum diterima Perusahaan. Jumlah yang tidak dikabulkan oleh Keputusan pengadilan Pajak sebesar Rp2.266.145 dibebankan pada Laba Rugi tahun berjalan.

Value Added Tax for November 2010 amounting to Rp250,056, until the date of this report, has not been received by the Company. The amount not granted by Tax Court Decision amounting to Rp2,266,145 was charged to current year's Profit or Loss.

- Pajak Pertambahan Nilai 2014
Berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa No.00019/407/14/093/16 tanggal 17 Februari 2016 dari Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak wajib Pajak Besar Empat, Perusahaan dinyatakan lebih bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa masa pajak Desember 2014 sebesar Rp81.349.835 dan telah diterima Perusahaan pada tanggal 17 Maret 2016 melalui Bank Negara Indonesia.

- Value Added Tax 2014
Based on Tax Overpayment Assessment Letter of Value Added Tax on Goods and Services No.00019/407/14/093/16 dated February 17, 2016 from the Directorate General of Taxation Tax Office for Large Four Taxpayers, the Company declared overpayment of Value Added Tax on Goods and Services for the tax period December 2014 amounting to Rp81,349,835 and was received by the Company on March 17, 2016 via Bank Negara Indonesia.

Perusahaan juga menerima SKPKB dari Direktorat Jenderal Pajak Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Empat, untuk Pajak Pertambahan Nilai masa pajak tahun 2014 yang terdiri sebagai berikut :

Company also received an SKPKB from the Directorate General of Taxes Head of Tax Office for Large Four Taxpayer, for Value Added Tax for the year 2014 consists of the following:

Bulan/ Month	Jenis Surat/ Types of Letter	Nomor Surat/ Number Of Letter	Tanggal Surat/ The Date of the Letter	Tanggal Jatuh Tempo/ Due Date	Pokok Pajak/ Principal of Tax	Bunga/ Interest	Total
						Pasal/ Article 13 (3) and 13(5)	Yg Hrs dibayar/ To be Paid
JANUARY	SKPKB PPN	00007/207/14/093/16	17-Feb-16	16-Mar-16	1,151,247	786,964	1,938,211
FEBRUARY	SKPKB PPN	00008/207/14/093/16	17-Feb-16	16-Mar-16	1,146,744	762,430	1,909,174
MARCH	SKPKB PPN	00009/207/14/093/16	17-Feb-16	16-Mar-16	1,436,537	843,706	2,280,243
APRIL	SKPKB PPN	00010/207/14/093/16	17-Feb-16	16-Mar-16	1,120,973	988,440	2,109,413
MAY	SKPKB PPN	00011/207/14/093/16	17-Feb-16	16-Mar-16	1,143,219	1,143,219	2,286,438
JUNE	SKPKB PPN	00012/207/14/093/16	17-Feb-16	16-Mar-16	1,138,587	1,138,587	2,277,174
JULY	SKPKB PPN	00013/207/14/093/16	17-Feb-16	16-Mar-16	1,328,453	1,328,453	2,656,906
AUGUST	SKPKB PPN	00014/207/14/093/16	17-Feb-16	16-Mar-16	1,268,814	1,268,814	2,537,628
SEPTEMBER	SKPKB PPN	00015/207/14/093/16	17-Feb-16	16-Mar-16	1,161,180	1,161,180	2,322,360
OCTOBER	SKPKB PPN	00016/207/14/093/16	17-Feb-16	16-Mar-16	1,235,712	1,235,712	2,471,424
NOVEMBER	SKPKB PPN	00017/207/14/093/16	17-Feb-16	16-Mar-16	990,111	990,111	1,980,222
TOTAL					13,121,577	11,647,616	24,769,193

Perusahaan telah mengajukan keberatan dalam suratnya tertanggal 31 Maret 2016 atas SKPLB masa Pajak Januari sampai November Tahun 2014 dan SKPLB masa Desember Tahun 2014 tersebut kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Empat. Pembayaran terhadap SKPLB

The Company filed an objection letter dated March 31, 2016, over the SKPKB for the Tax Period January to November 2014 and SKPLB for December 2014 to the Head of Tax Office of the Large Four Taxpayer. Payment of the SKPLB .

20. Perpajakan (Lanjutan)

20. Taxation (Continued)

Pengajuan Surat Keberatan Perusahaan tertanggal 31 Maret 2016 atas SKPKB masa Pajak Januari Sampai November Tahun 2014, pada tanggal 16 dan 17 Maret 2017, Perusahaan telah menerima Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Kepala Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar tentang keberatan Wajib Pajak atas SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa masa Januari Sampai November Tahun 2014 dengan mengabulkan sebagian keberatan tersebut dan mengurangi jumlah Pajak yang masih harus dibayar dalam SKPKB Pertambahan Nilai Barang dan Jasa yang terinci sebagai berikut :

Submission of Corporate Objection Letter dated March 31, 2016 on SKPKB for the Tax Period January to November 2014, on March 16 and 17, 2017, the Company has received the Director General of of Taxation Letter from the Head of Regional Office of DGT Taxpayer regarding the objection Taxpayer for SKPKB of Value Added Tax on Goods and Services for January to November 2014 by granting part of the objection and deducting the amount of tax due to be paid in the SKPKB of Value Added Tax of Goods and Services as eith details a follows:

No	Masa Pajak/ Tax Period	Nomor/ Number SKPKB	Tanggal Penerbitan / Date of Issuance	SKPKB		Total yang Masih Harus Dibayar/ Total Still Paid	No. Keputusan Keberatan/No. Decision of Objection	Tanggal Keputusan Keberatan/ Date of the Objection Decision	Total yang dikabulkan/ Total granted	SKPKB menjadi / SKPKB becomes
				Pokok Pajak/ Principal of Tax	Sanksi Bunga/					
1	Januari	00007/207/14/093	17-Feb-16	1,151,247	786,964	1,938,211	KEP-00335/KEB/WPJ.19/2017	17/03/2017	80,603	1,857,608
2	Februari	00008/207/14/093	17-Feb-16	1,146,744	762,430	1,909,174	KEP-00337/KEB/WPJ.19/2017	17/03/2017	105,847	1,803,327
3	Maret	00009/207/14/093	17-Feb-16	1,436,537	843,706	2,280,243	KEP-00338/KEB/WPJ.19/2017	17/03/2017	98,581	2,181,662
4	April	00010/207/14/093	17-Feb-16	1,120,973	988,440	2,109,413	KEP-00325/KEB/WPJ.19/2017	16/03/2017	92,453	2,016,960
5	Mei	00011/207/14/093	17-Feb-16	1,143,219	1,143,219	2,286,438	KEP-00326/KEB/WPJ.19/2017	16/03/2017	137,614	2,148,824
6	Juni	00012/207/14/093	17-Feb-16	1,138,587	1,138,587	2,277,174	KEP-00327/KEB/WPJ.19/2017	16/03/2017	122,805	2,154,369
7	Juli	00013/207/14/093	17-Feb-16	1,328,453	1,328,453	2,656,906	KEP-00336/KEB/WPJ.19/2017	17/03/2017	50,076	2,606,830
8	Agustus	00014/207/14/093	17-Feb-16	1,268,814	1,268,814	2,537,628	KEP-00339/KEB/WPJ.19/2017	17/03/2017	236,887	2,300,741
9	September	00015/207/14/093	17-Feb-16	1,161,180	1,161,180	2,322,360	KEP-00340/KEB/WPJ.19/2017	17/03/2017	31,200	2,291,160
10	Oktober	00016/207/14/093	17-Feb-16	1,235,712	1,235,712	2,471,424	KEP-00324/KEB/WPJ.19/2017	16/03/2017	56,803	2,414,621
11	November	00017/207/14/093	17-Feb-16	990,111	990,111	1,980,222	KEP-00328/KEB/WPJ.19/2017	16/03/2017	23,897	1,956,325
				13,121,577	11,647,616	24,769,193			1,036,766	23,732,427

Penerimaan dari sebagian Keberatan Pajak Tersebut telah diterima Perusahaan pada tanggal 17 Mei 2017.

The receipt of part of the Tax Objections has been received by the Company on May 17, 2017.

- **Pajak Pertambahan Nilai 2015**
Berdasarkan Surat Ketetapan Pajak lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa No.00012/407/15/093/17 tanggal 21 Februari 2017 dari Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak wajib Pajak Besar Empat, Perusahaan dinyatakan lebih bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa masa pajak Desember 2015 sebesar Rp107.184.605 dan telah diterima Perusahaan pada tanggal 14 Maret 2017 sebesar Rp105.795.003 setelah dikompensasikan dengan terutang Pajak sebesar Rp1.389.802 melalui Bank Negara Indonesia.
- **Value Added Tax 2015**
Based on Tax Overpayment Assessment Letter of Value Added Tax on Goods and Services No.00012/407/15/093/17 dated February 21, 2017 from the Directorate General of Taxation Tax Office for Large Four Taxpayers, the Company declared overpayment of Value Added Tax on Goods and Services for the tax period December 2015 amounting to Rp107,184,605 and was received by the Company on March 14, 2017 amounting to Rp105,795,003 after compensating with Tax payable amounting to Rp1,389,802 via Bank Negara Indonesia.
- **Pajak Pertambahan Nilai 2016 dan 2017**
Atas Pajak Pertambahan Nilai 2016 dan 2017, Perusahaan belum diperiksa oleh Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Empat
- **Value Added Tax 2016 and 2017**
For the Value Added Tax in 2016 and 2017, the Company not yet examined by the Tax Office of the Large Taxpayer Four.

20. Perpajakan (Lanjutan)

20. Taxation (Continued)

PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (BJTI)

BJTI telah menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) No. 00005/406/15/093/17 pada 6 April 2017 atas lebih bayar pajak penghasilan badan tahun 2015. Dalam SKPLB tersebut, BJTI dinyatakan lebih bayar sebesar Rp13.855.171, lebih kecil dari yang dicatat BJTI yakni sebesar Rp21.777.420. BJTI telah menerima restitusi sebesar Rp10.377.508 yang telah dikompensasi dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai masa Mei dan Desember 2015 sebesar Rp3.477.663. BJTI telah mengajukan keberatan atas SKP tersebut dengan mengirimkan surat No. SK.296-00/VI/BJTI-2017 tanggal 30 Juni 2017. Sampai dengan tanggal laporan keuangan, banding tersebut masih dalam proses.

BJTI juga menerima Surat Ketetapan Pajak (SKP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masa Januari sampai dengan Desember 2015 senilai Rp13.349.053, BJTI telah mengirimkan surat banding atas SKP tersebut dengan rincian sebagai berikut:

PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (BJTI)

BJTI received Notice of Tax Overpayment Assessment (SKPLB) No. 00005/406/15/093/17 dated April 6, 2017 of overpayment of corporate income tax for the overpayment amounting to Rp13,855,171, less year 2015. In the SKPLB, BJTI is stated that than amount recorded by BJTI amounting to Rp21,777,420. BJTI has received restitution amounting to Rp10,377,508 which has been compensated with Notice of Tax Underpayment Assessment for Value Added Tax for May and December 2015 amounting to Rp3,477,663. BJTI has filed an objection to the SKP by submitting a letter No. SK.29600/VI/BJTI-2017 dated June 30, 2017. As of the date of the financial statements, the appeal is still in process.

BJTI also received Notice of Tax Assessment (SKP) of Value Added Tax (VAT) for January to December 2015 amounting to Rp13,349,053, BJTI has submitted an appeal letter for that SKP with details as follows:

No	Jenis SKP/ Type of SKP	No SKP/ SKP Number	Masa Pajak/ Tax Period	Jenis Pajak/ Type of Tax	SKPKB	Keterangan/ Information	Surat Banding/ Letter of Appeal
1	Surat Keterangan Pajak Nihil/ Nil Tax Assessment	00027/507/15/093/17	Januari/ January, 2015	PPN/ VAT	--		
2	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar/ Tax Underpayment Assessment	00042/207/15/093/17	Februari/ February, 2015	PPN/ VAT	2,075,391	Proses Banding/ Appeals Proseses	SK.296-02/VI/BJTI-2017
3	Surat Keterangan Pajak Nihil/ Nil Tax Assessment	00028/507/15/093/17	Maret/ March, 2015	PPN/ VAT	--		
4	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar/ Tax Underpayment Assessment	00043/207/15/093/17	April/ April, 2015	PPN/ VAT	2,539,162	Proses Banding/ Appeals Proseses	SK.296-03/VI/BJTI-2017
5	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar/ Tax Underpayment Assessment	00044/207/15/093/17	Mei/ May, 2015	PPN/ VAT	1,298,392	Proses Banding/ Appeals Proseses	SK.296-04/VI/BJTI-2017
6	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar/ Tax Underpayment Assessment	00027/107/15/093/17	Mei/ May, 2015	PPN/ VAT	1,084,848		
7	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar/ Tax Underpayment Assessment	00045/207/15/093/17	Juni/ June, 2015	PPN/ VAT	224,968	Proses Banding/ Appeals Proseses	SK.296-05/VI/BJTI-2017
8	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar/ Tax Underpayment Assessment	00046/207/15/093/17	Juli/ July, 2015	PPN/ VAT	47,856	Proses Banding/ Appeals Proseses	SK.296-06/VI/BJTI-2017
9	Surat Keterangan Pajak Nihil/ Nil Tax Assessment	00029/507/15/093/17	Agustus/ August, 2015	PPN/ VAT	--		
10	Surat Keterangan Pajak Nihil/ Nil Tax Assessment	00030/507/15/093/17	September/ September, 2015	PPN/ VAT	--		
11	Surat Keterangan Pajak Nihil/ Nil Tax Assessment	00031/507/15/093/17	Oktober/ October, 2015	PPN/ VAT	--		
12	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar/ Tax Underpayment Assessment	00047/207/15/093/17	Nopember/ November, 2015	PPN/ VAT	8,355		
13	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar/ Tax Underpayment Assessment	00048/207/15/093/17	Desember/ December, 2015	PPN/ VAT	6,070,080	Proses Banding/ Appeals Proseses	SK.296-07/VI/BJTI-2017
Total					13,349,052		

Kurang bayar sebesar Rp3.477.663 dikompensasikan ke penerimaan restitusi Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) pajak penghasilan badan tahun 2015 sehingga Perusahaan membayar sisa dari kurang bayar tersebut sebesar Rp9.871.390. Sampai dengan tanggal laporan keuangan, proses banding masih dalam proses.

The underpayment amounting to Rp3,477,663,017 is compensated to the receipt of tax refund (SKPLB) for corporate income tax in 2015 so that the Company paid the remaining of the underpayments amounting to Rp9,871,390. As of the date of the financial statements, the appeals process is still in process.

20. Perpajakan (Lanjutan)

20. Taxation (Continued)

c. Utang Pajak

c. Tax Payables

	2017 Rp	2016 Rp	2015 Rp	
<u>Perusahaan :</u>				<u>The Company:</u>
PPH Pasal 23/26	974,928	2,476,352	3,423,671	Income Tax Art 23/26
PPH Pasal 21	8,877,504	9,035,912	8,906,950	Income Tax Article 21
PPH Pasal 15	435,274	790,166	248,513	Income Tax Article 15
PPH Pasal 4 (2)	22,361,868	7,571,375	11,300,641	Income Tax Article 4 (2)
PPN	--	1,310,039	35,330,770	VAT
PPN Wajib Pungut	30,783,897	24,282,032	28,668,582	VAT Required to Pay
Pajak Lainnya/Utang SKPKB	181,021	--	78,011	Others Tax/ Underpayment
Sub Total	<u>63,614,492</u>	<u>45,465,876</u>	<u>87,957,138</u>	Sub Total
<u>Entitas Anak :</u>				<u>Subsidiaries:</u>
PPH Pasal 29	39,573,795	41,644,064	54,910,231	Income Tax Article 29
PPH Pasal 25	3,102,274	5,162	21,643,980	Income Tax Article 25
PPH Pasal 23/26	13,585,016	14,708,640	12,005,572	Income Tax Article 23/26
PPH Pasal 21	4,910,631	4,049,834	3,877,375	Income Tax Article 21
PPH Pasal 15	477,244	958,292	109,124	Income Tax Article 15
PPN (Bersih)	949,773	9,095,028	6,073,986	VAT (net)
PPH Pasal 4 ayat 2	227,280	2,743,535	517,011	Income Tax Article 4 (2)
Pajak Bumi dan Bangunan	--	227,681	--	Land and Building Tax
Utang Pajak Lainnya	--	26,540	--	Others tax
Sub Total	<u>62,826,013</u>	<u>73,458,776</u>	<u>99,137,279</u>	Sub Total
Total	<u>126,440,505</u>	<u>118,924,652</u>	<u>187,094,417</u>	Total

d. Beban Pajak

d. Tax Expenses

	2017 Rp	2016 Rp	2015 Rp	
Pajak Final	45,806,243	33,603,296	32,907,581	Current Tax - Final
Pajak Penghasilan :				Income Tax:
Pajak Kini dan				Current Tax and
Koreksi Pajak Tahun Lalu	453,185,371	371,401,946	373,391,518	Prior Years Tax Adjustment
Pajak Tangguhan	171,411,539	(134,093,893)	(26,330,181)	Deferred Tax
Total Pajak Penghasilan	<u>624,596,910</u>	<u>237,308,053</u>	<u>347,061,337</u>	Total Income Tax
Total	<u>670,403,153</u>	<u>270,911,349</u>	<u>379,968,918</u>	Total
<u>Perusahaan</u>				<u>The Company</u>
Pajak Final	40,488,717	30,066,270	29,966,639	Current Tax - Final
Pajak Penghasilan :				Income Tax :
Pajak Kini	--	--	--	Current Tax
Pajak Tangguhan	134,896,914	(124,914,991)	6,042,501	Deferred Tax
Total Pajak Penghasilan	<u>134,896,914</u>	<u>(124,914,991)</u>	<u>6,042,501</u>	Total Income Tax
Sub Total	<u>175,385,631</u>	<u>(94,848,721)</u>	<u>36,009,140</u>	Sub Total
<u>Entitas Anak</u>				<u>Subsidiaries</u>
Pajak - Final	5,317,526	3,537,026	2,940,942	Current Tax - Final
Pajak Penghasilan :				Income Tax :
Pajak Kini	451,483,017	371,401,946	373,391,518	Current Tax
Koreksi Pajak Tahun Lalu	1,702,354	--	--	Prior Years Tax Adjustment
Pajak Tangguhan	36,514,625	(9,178,902)	(32,372,682)	Deferred Tax
Total Pajak Penghasilan	<u>489,699,996</u>	<u>362,223,044</u>	<u>341,018,836</u>	Total Income Tax
Sub Total	<u>495,017,522</u>	<u>365,760,070</u>	<u>343,959,778</u>	Sub Total
Total	<u>670,403,153</u>	<u>270,911,349</u>	<u>379,968,918</u>	Total

20. Perpajakan (Lanjutan)

20. Taxation (Continued)

Pajak Kini

Berikut adalah rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan laba (rugi) komprehensif dengan laba kena pajak adalah sebagai berikut :

Current Tax

A reconciliation between income before tax and taxable income, referred to the Statements of Comprehensive of Income, is as follows :

	2017 Rp	2016 Rp	2015 Rp	
Laba konsolidasian sebelum beban pajak penghasilan	2,704,510,401	1,783,228,279	1,542,836,783	Consolidated income before income tax
Laba entitas anak sebelum beban pajak penghasilan	(960,189,065)	(671,189,041)	(576,190,265)	Subsidiaries' income before income tax
Bagian laba bersih entitas asosiasi	(97,403,931)	(44,602,963)	(18,189,505)	Equity in net income of associated
Disesuaikan dengan jurnal eliminasi konsolidasi	(415,992,636)	(222,695,508)	(386,261,224)	Adjusted for consolidated eliminations
Total	1,230,924,769	844,740,767	562,195,789	Total
Perbedaan Permanen :				Permanent Differences :
Biaya Bahan	64,602,291	1,046,825	2,125,530	Raw Expense
Biaya Pemeliharaan	3,710,172	722,249	2,891,680	Maintenance Expense
Biaya Asuransi	52,251	188,482	3,510,763	Insurance Expense
Pendapatan konstruksi	(100,959,411)	--	--	Construction revenue
Biaya Administrasi Kantor	82,811,638	81,714,101	80,478,968	Office Administration Expenses
Biaya Konstruksi	90,182,485			Construction Expense
Biaya Diluar Usaha	110,396,367	112,263,745	14,998,681	Other Expense
Biaya Tunjangan Komunikasi	11,637	13,586	1,256,227	Communication Allowance
Biaya Penyusutan Aset				Assets Depreciation Cost
Penugasan	(1,874,469)	50,703	50,703	Assignment Expense Related to Interest
Biaya Berkaitan				Income Subjected to Final Tax
Pendapatan Final	7,102,206	13,726,520	7,521,639	Revenue Not Subjected to Tax
Pendapatan yang Bukan Merupakan Obyek Pajak	(539,220,634)	(569,199,859)	(391,919,630)	Interest Income Subjected to Final Tax
Pendapatan yang Telah Dikenakan PPh Final	(707,900,768)	(279,000,755)	(258,940,344)	
Sub Total	(991,086,235)	(638,474,403)	(538,025,783)	Sub Total
Perbedaan Waktu :				Timing Differences :
Cadangan imbalan kerja	16,860,163	483,937	(28,520,612)	Employment Benefits
Cadangan penurunan nilai piutang	25,974,512	(18,462,669)	(7,313,230)	Allowance for Impairment Loss
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	5,268,702	(3,239,086)	404,780	Accrued Deposits Interest
Bonus dan tantiem	(53,413,399)	33,042,927	(13,106,900)	Bonus and Tantiem
Penyusutan Aset Tetap	(466,838,407)	(497,202,622)	(52,821,982)	Fixed Assets Depreciation
Bunga Obligasi	9,839,480	1,387,643	31,325,911	Bonds Interest
Tunjangan	(2,418,895)	(20,089,342)	22,327,386	Allowance
Sub Total	(464,727,843)	(504,079,212)	(47,704,646)	Sub Total
Total Laba (Rugi) Penghasilan Kena Pajak	(224,889,309)	(297,812,848)	(23,534,640)	Total Current (Loss) Income Tax Expense
Kompensasi Kerugian :				Loss Compensation:
Rugi Fiskal tahun sebelumnya setelah pembetulan	(533,319,012)	(235,506,164)	(211,971,524)	Fiscal Loss the previous year after correction
Koreksi SKP	74,859,811	--	--	Tax assessment letter correction
Sisa Rugi Fiskal	(683,348,510)	(533,319,012)	(235,506,164)	Fiscal Loss

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) AND
SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2017, 2016 and 2015
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

20. Perpajakan (Lanjutan)

20. Taxation (Continued)

	2017 Rp	2016 Rp	2015 Rp	
Rincian Beban dan Utang				<i>The Details of the Income</i>
Pajak Kini adalah				<i>Tax Expenses and</i>
sebagai berikut :				<i>Taxes Payable are as follows:</i>
Beban Pajak Kini				<i>Current Tax Expense</i>
Perusahaan	--	--	--	<i>The Company</i>
Entitas anak				<i>Subsidiaries:</i>
PT Terminal Petikemas				<i>PT Terminal Petikemas</i>
Surabaya	357,568,135	321,621,457	311,334,084	<i>Surabaya</i>
PT Pelindo Husada Citra	6,033,307	1,719,443	2,762,671	<i>PT Pelindo Husada Citra</i>
PT Berlian Jasa Terminal				<i>PT Berlian Jasa Terminal</i>
Indonesia	41,953,154	34,105,437	57,480,707	<i>Indonesia</i>
PT Pelindo Marine Service	30,977,195	10,068,381	157,265	<i>PT Pelindo Marine Service</i>
PT Terminal Teluk Lamong	8,190,342	--	--	<i>PT Terminal Teluk Lamong</i>
PT Pelindo Daya Sejahtera	6,760,884	3,887,228	1,656,791	<i>PT Pelindo Daya Sejahtera</i>
Sub Total	451,483,017	371,401,946	373,391,518	<i>Sub Total</i>
Koreksi Pajak Tahun Lalu				<i>Prior Years Tax Adjustment</i>
Perusahaan	--	--	--	<i>The Company</i>
Entitas anak				<i>Subsidiaries:</i>
PT Terminal Petikemas				<i>PT Terminal Petikemas</i>
Surabaya	1,702,354	--	--	<i>Surabaya</i>
Sub Total	453,185,371	371,401,946	373,391,518	<i>Sub Total</i>
Dikurangi Pembayaran				<i>Less Prepaid Taxes :</i>
Pajak Dibayar di Muka :				<i>The Company</i>
Perusahaan				<i>Income Tax</i>
Pajak Penghasilan				<i>Article 22</i>
Pasal 22	16,724,451	31,221,267	36,427,543	<i>Article 23</i>
Pasal 23	127,460,601	104,470,569	69,144,645	<i>Article 25</i>
Pasal 25	2,172,491	2,170,774	114,023,671	<i>Subsidiaries:</i>
Entitas Anak				<i>PT Terminal Petikemas</i>
PT Terminal Petikemas				<i>Surabaya</i>
Surabaya	344,882,851	294,762,842	264,230,199	<i>PT Pelindo Husada Citra</i>
PT Pelindo Husada Citra	1,891,948	2,681,730	2,472,439	<i>PT Berlian Jasa Terminal</i>
PT Berlian Jasa Terminal				<i>Indonesia</i>
Indonesia	41,516,432	68,075,334	79,258,127	<i>PT Berlian Manyar Sejahtera</i>
PT Berlian Manyar Sejahtera				<i>(Subsidiaries)</i>
(Entitas Anak BJTI)	986,294	394,104	--	<i>PT Berkah Industri</i>
PT Berkah Industri				<i>Mesin Angkat</i>
Mesin Angkat				<i>(Subsidiaries)</i>
(Entitas Anak BJTI)	120,407	79,669	--	<i>PT Berlian Manyar Stevedore</i>
PT Berlian Manyar Stevedore	35,499	--	--	<i>(Subsidiaries)</i>
(Entitas Anak BJTI)				<i>PT Pelindo Marine Service</i>
PT Pelindo Marine Service	14,849,663	1,091,993	95,326	<i>PT Pelindo Daya Sejahtera</i>
PT Pelindo Daya Sejahtera	3,088,065	966,382	427,240	<i>PT Terminal Teluk Lamong</i>
PT Terminal Teluk Lamong	5,572,231	4,031,864	766,259	
Total Pembayaran				<i>Total Prepaid Tax</i>
Pajak Dibayar di Muka	559,300,933	509,946,528	566,845,449	<i>Current Tax Payable</i>
Utang (Piutang)				<i>(Receivables) - Net</i>
Pajak - Bersih	(107,817,916)	(138,544,583)	(193,453,932)	

20. Perpajakan (Lanjutan)

20. Taxation (Continued)

	2017 Rp	2016 Rp	2015 Rp	
Terinci sebagai berikut :				The details :
Utang/(Piutang) pajak				Tax payable (Receivable)
Perusahaan	(146,357,543)	(137,862,610)	(219,595,859)	The Company
Entitas anak				Subsidiaries
PT Terminal Petikemas				PT Terminal Petikemas
Surabaya	12,685,284	26,858,615	47,103,884	Surabaya
PT Pelindo Husada Citra	4,141,359	(962,287)	290,232	PT Pelindo Husada Citra
PT Berlian Jasa Terminal				PT Berlian Jasa Terminal
Indonesia	316,315	(34,049,566)	(20,862,590)	Indonesia
PT Pelindo Marine Service	16,136,856	8,976,388	61,939	PT Pelindo Marine Service
PT Pelindo Daya Sejahtera	3,672,819	2,920,846	1,229,551	PT Pelindo Daya Sejahtera
PT Terminal Teluk Lamong	2,618,111	(4,031,865)	(766,259)	PT Terminal Teluk Lamong
Total Utang Pajak Kini				Total Current Taxes Payables
Entitas Anak	39,570,744	(287,869)	27,056,757	of Subsidiaries
Piutang pajak				Tax Receivable
Entitas Anak PMS:				PMS Subsidiaries:
PT Berkah Multi Cargo	(9,324)	--	--	PT Berkah Multi Cargo
Entitas Anak BJTI:				BJTI Subsidiaries:
PT Berlian Manyar				PT Berlian Manyar
Sejahtera	(986,294)	--	--	Sejahtera
PT Berlian Manyar Stevedore	(35,499)	(394,104)	(914,830)	PT Berlian Manyar Stevedore
Utang (Piutang) Pajak				Total of Current Tax
Tahun Berjalan	(107,817,916)	(138,544,583)	(193,453,932)	Payable (Receivables)

Pajak Tangguhan

Aset (Liabilitas) Pajak Tangguhan

Aset pajak tanggungan merupakan jumlah bersih setelah diperhitungkan dengan liabilitas pajak tanggungan dari entitas anak dengan rincian sebagai berikut:

Deferred Tax

Deferred Tax Assets (Liabilities)

Deferred tax assets represent the net amount after the deduction of deferred tax liabilities of subsidiaries as follows:

	1 Januari 2017/ January 1, 2017	Koreksi DPP/ Adjustment for The Change of tax base	Dikreditkan (Dibebankan) ke		31 Desember 2017/ December 31, 2017	
			Dikreditkan (Dibebankan) ke laporan laba rugi / Credited (Charged) to profit or loss for the year	Dikreditkan (Dibebankan) ke Penghasilan Komprehensif Lain/ Credited (Charged) to Others Comprehensive Income for the year		
Liabilitas Pajak tanggungan						Deferred Tax Liability
Perusahaan						The Company
Cadangan penurunan nilai piutang	22,538,480	--	6,493,628	--	29,032,108	Allowance for impairment of receivables
Cadangan Tunjangan Pegawai	1,382,725	--	(604,724)	--	778,001	Employee Benefit Reserve
Cadangan Bonus dan Tantiem	54,984,008	--	(13,353,350)	--	41,630,658	Bonus reserve and tantiem
Liabilitas Imbalan Kerja	47,868,551	--	4,215,041	--	52,083,592	Post-employment benefit liability
Pendapatan bunga deposito	(1,317,175)	--	1,317,175	--	--	Interest income on deposit
Biaya Penerbitan Obligasi	22,155,128	--	2,459,870	--	24,614,998	Issuance Cost of Bond
Rugi Fiskal	127,446,093	--	(18,714,953)	--	108,731,140	Tax loss
Penyusutan	(217,676,078)	--	(116,709,602)	--	(334,385,680)	Depreciation
Cadangan Penurunan						Allowance for impairment
Nilai Aset tetap	(1,774,862)	--	--	--	(1,774,862)	of Fixed Assets
Sub Total	55,606,870	--	(134,896,915)	--	(79,290,045)	Sub Total
Kuntungan (Kerugian) Aktuarial dari						Current Year Actuarial
Imbalan Kerja Manfaat Pasti	9,267,048	--	--	16,268,589	25,535,637	(Gain) Losses
Total	64,873,918	--	(134,896,915)	16,268,589	(53,754,408)	Total

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) AND
SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2017, 2016 and 2015
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

20. Perpajakan (Lanjutan)

20. Taxation (Continued)

	1 Januari 2017/ January 1, 2017	Koreksi DPP/ Adjustment for The Change of tax base	Dikreditkan (Dibebankan) ke laporan laba rugi / Credited (Charged) to profit or loss for the year	Dikreditkan (Dibebankan) ke Penghasilan Komprehensif Lain/ Credited (Charged) to Others Comprehensive Income for the year	31 Desember 2017/ December 31, 2017	
PT Terminal Petikemas Surabaya	(50,927,111)	--	(3,969,761)	(572,804)	(55,469,676)	PT Terminal Petikemas Surabaya
PT Pelindo Husada Citra	(3,652,449)	--	370,475	577,823	(2,704,151)	PT Pelindo Husada Citra
PT Pelindo Marine Service	(1,232,633)	--	679,092	99,256	(454,285)	PT Pelindo Marine Service
<u>Entitas anak PT Berlian Jasa Terminal Indonesia:</u>						<u>Subsidiaries PT Berlian Jasa Terminal Indonesia:</u>
PT Berlian Manyar Sejahtera	2,191,618	--	(6,604,693)	(1,294)	(4,414,369)	PT Berlian Manyar Sejahtera
Total liabilitas pajak tangguhan	11,253,343	--	(144,421,802)	16,371,570	(116,796,889)	Total Deferred Tax Liability
Aset Pajak Tangguhan :						Deferred Tax Assets :
<u>Entitas anak: PT Pelindo Husada Citra</u>						<u>Subsidiaries PT Pelindo Husada Citra:</u>
PT Prima Citra Nutrindo	39,978	--	(24,625)	--	15,353	Total
<u>PT Berlian Jasa Terminal Indonesia dan Entitas anak:</u>						<u>PT Berlian Jasa Terminal Indonesia and Subsidiaries:</u>
PT Berlian Jasa Terminal Indonesia	(1,206,913)	--	6,857,002	389,878	6,039,967	PT Berlian Jasa Terminal Indonesia
PT Pelindo Property Indonesia	--	--	--	722	722	PT Pelindo Property Indonesia
PT Berkah Industri Mesin Angkat	114,970	--	27,786	--	142,756	PT Berkah Industri Mesin Angkat
PT Berkah Multi cargo	--	(453)	453	--	--	PT Berkah Multi cargo
PT Terminal Curah Semarang	767,216	--	(767,216)	--	--	PT Terminal Curah Semarang
Total	(324,726)	(453)	6,118,025	390,600	6,183,445	Total
<u>Entitas anak PT Pelindo Marine Service</u>						<u>Subsidiaries PT Pelindo Marine Service:</u>
PT Alur Pelayaran Barat Surabaya	10,606,774	--	(10,147,236)	6,124	465,662	PT Alur Pelayaran Barat Surabaya
PT Pelindo Energi Logistik	473,891	--	522,692	449	997,032	PT Pelindo Energi Logistik
PT Berkah Multi cargo	--	--	196,208	--	196,208	PT Berkah Multi cargo
Total	11,080,665	--	(9,428,336)	6,573	1,658,902	Total
<u>PT Terminal Teluk Lamong dan Entitas anak:</u>						<u>PT Terminal Teluk Lamong and Subsidiaries:</u>
PT Terminal Teluk Lamong	31,933,127	--	(26,175,639)	29,777	5,787,265	PT Terminal Teluk Lamong
PT Lamong Energi Indonesia	1,351,629	--	1,662,727	--	3,014,356	PT Lamong Energi Indonesia
Total	33,284,756	--	(24,512,912)	29,777	8,801,621	Total
<u>PT Pelindo Daya Sejahtera dan Entitas anak:</u>						<u>PT Pelindo Daya Sejahtera and Subsidiaries:</u>
PT Pelindo Daya Sejahtera	2,583,425	--	653,780	93,201	3,330,406	PT Pelindo Daya Sejahtera
PT Tanjung Emas Daya Sejahtera	161,782	--	204,331	--	366,113	PT Tanjung Emas Daya Sejahtera
Total	2,745,207	--	858,111	93,201	3,696,519	Total
Total aset pajak tangguhan	46,825,880	(454)	(26,989,737)	520,151	20,355,840	Total Deferred Tax asset
Total Liabilitas Pajak Tangguhan - Bersih	58,079,223	(454)	(171,411,539)	16,891,721	(96,441,049)	Total Deferred Tax Liability - Net

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) AND
SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2017, 2016 and 2015
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

20. Perpajakan (Lanjutan)

20. Taxation (Continued)

	1 Januari 2016/ January 1, 2016	Koreksi DPP *)/ Adjustment for The Change of tax base *)	Dikreditkan (Dibebankan) ke laporan laba rugi / Credited (Charged) to profit or loss for the year	Dikreditkan (Dibebankan) ke Penghasilan Komprehensif Lain/ Credited (Charged) to Others Comprehensive Income for the year	31 Desember 2016/ December 31, 2016	
Liabilitas Pajak tangguhan						Deferred Tax Liability
<u>Entitas anak</u>						<u>Subsidiaries</u>
PT Terminal Petikemas Surabaya	(48,217,857)	--	1,370,646	(4,079,899)	(50,927,111)	PT Terminal Petikemas Surabaya
PT Pelindo Husada Citra	(3,265,553)	--	(1,047,945)	661,049	(3,652,449)	PT Pelindo Husada Citra
PT Berlian Jasa Terminal Indonesia	12,236,597	--	2,534,811	(15,978,321)	(1,206,913)	PT Berlian Jasa Terminal Indonesia
PT Pelindo Marine Service	703,439	116,667	1,889,026	(3,941,764)	(1,232,633)	PT Pelindo Marine Service
Total liabilitas pajak tangguhan	(38,543,374)	116,667	4,746,537	(23,338,936)	(57,019,106)	Total Deferred Tax Liability
Aset Pajak Tangguhan :						Deferred Tax Assets :
<u>Perusahaan</u>						<u>The Company</u>
Cadangan penurunan nilai piutang	27,154,147	--	(4,615,667)	--	22,538,480	Allowance for impairment of receivables
Cadangan Tunjangan Pegawai	6,405,061	--	(5,022,336)	--	1,382,725	Employee Benefit Reserve
Cadangan Bonus dan Tantiem	46,723,276	--	8,260,732	--	54,984,008	Bonus reserve and tantiem
Liabilitas Imbalan Kerja	47,747,567	--	120,984	--	47,868,551	Post-employment benefit liability
Pendapatan bunga deposito	(507,404)	--	(809,771)	--	(1,317,175)	Interest income on deposit
Biaya Penerbitan Obligasi	21,808,217	--	346,911	--	22,155,128	Issuance Cost of Bond
Rugi Fiskal	5,883,660	47,109,221	74,453,212	--	127,446,093	Tax loss
Penyusutan	(222,747,783)	129,372,361	(124,300,655)	--	(217,676,078)	Depreciation
Cadangan Penurunan Nilai Aset tetap	(1,774,862)	--	--	--	(1,774,862)	Allowance for impairment of Fixed Assets
Sub Total	(69,308,121)	176,481,582	(51,566,591)	--	55,606,869	Sub Total
Kuntungan (Kerugian) Aktuarial dari Imbalan Kerja Manfaat Pasti	212,634	--	--	9,054,414	9,267,048	Current Year Actuarial (Gain) Losses
Total	(69,095,487)	176,481,582	(51,566,591)	9,054,414	64,873,917	Total
<u>PT Pelindo Husada Citra dan Entitas anak:</u>						<u>PT Pelindo Husada Citra and Subsidiaries:</u>
PT Prima Citra Nutrindo	--	--	39,978	--	39,978	PT Prima Citra Nutrindo
Total	--	--	39,978	--	39,978	Total
<u>PT Berlian Jasa Terminal Indonesia dan Entitas anak:</u>						<u>PT Berlian Jasa Terminal Indonesia and Subsidiaries:</u>
PT Berlian Manyar Sejahtera	974,959	--	1,215,727	931	2,191,618	PT Berlian Manyar Sejahtera
PT Pelindo Property Indonesia	665,968	--	(665,968)	--	--	PT Pelindo Property Indonesia
PT Berkah Industri Mesin Angkat	--	--	114,970	--	114,970	PT Berkah Industri Mesin Angkat
PT Terminal Curah Semarang	--	--	767,216	--	767,216	PT Terminal Curah Semarang
Total	1,640,927	--	1,431,946	931	3,073,804	Total
<u>PT Pelindo Marine Service dan Entitas anak:</u>						<u>PT Pelindo Marine Service and Subsidiaries:</u>
PT Alur Pelayaran Barat Surabaya	4,214,659	--	6,387,087	5,028	10,606,774	PT Alur Pelayaran Barat Surabaya
PT Pelindo Energi Logistik	1,020,337	--	(546,446)	--	473,891	PT Pelindo Energi Logistik
Total	5,234,996	--	5,840,641	5,028	11,080,665	Total
<u>PT Terminal Teluk Lamong dan Entitas anak:</u>						<u>PT Terminal Teluk Lamong and Subsidiaries:</u>
PT Terminal Teluk Lamong	38,602,109	--	(6,629,880)	(39,102)	31,933,126	PT Terminal Teluk Lamong
PT Lamong Energi Indonesia	77,013	--	1,274,616	--	1,351,628	PT Lamong Energi Indonesia
Total	38,679,122	--	(5,355,265)	(39,102)	33,284,755	Total
<u>PT Pelindo Daya Sejahtera dan Entitas anak:</u>						<u>PT Pelindo Daya Sejahtera and Subsidiaries:</u>
PT Pelindo Daya Sejahtera	415,120	1,360,886	835,730	(28,310)	2,583,425	PT Pelindo Daya Sejahtera
PT Tanjung Emas Daya Sejahtera	--	--	161,782	--	161,782	PT Tanjung Emas Daya Sejahtera
Total	415,120	1,360,886	997,511	(28,310)	2,745,207	Total
Total aset pajak tangguhan	(23,125,322)	177,842,468	(48,611,779)	8,992,961	115,098,327	Total Deferred Tax asset
Total Liabilitas Pajak Tangguhan - Bersih	(61,668,696)	177,959,135	(43,865,242)	(14,345,975)	58,079,220	Total Deferred Tax Liability - Net

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) AND
SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2017, 2016 and 2015
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

20. Perpajakan (Lanjutan)

20. Taxation (Continued)

	1 Januari 2015/ January 1, 2015	Koreksi DPP Adjustment for The Change of tax base	Dikreditkan (Dibebankan) ke laporan laba rugi / Credited (Charged) to profit or loss for the year	Dikreditkan (Dibebankan) ke Penghasilan Komprehensif Lain/ Credited (Charged) to Others Comprehensive Income for the year	31 Desember 2015/ December 31, 2015	
Liabilitas Pajak tangguhan						Deferred Tax Liability
<u>Perusahaan</u>						<u>The Company</u>
Cadangan penurunan nilai piutang	28,982,454	--	(1,828,307)	--	27,154,147	Allowance for impairment of receivables
Cadangan Tunjangan Pegawai	823,215	--	5,581,846	--	6,405,061	Employee Benefit Reserve
Cadangan Bonus dan Tantiem	50,000,000	--	(3,276,724)	--	46,723,276	Bonus reserve and tantiem
Liabilitas Imbalan Kerja	54,877,720	--	(7,130,153)	--	47,747,567	Post-employment benefit liability
Pendapatan bunga deposito	(608,599)	--	101,195	--	(507,404)	Interest income on deposit
Biaya Penerbitan Obligasi	13,976,739	--	7,831,478	--	21,808,217	Issuance Cost of Bond
Rugi Fiskal	--	--	5,883,660	--	5,883,660	Tax loss
Penyusutan	(211,337,498)	--	(11,410,285)	--	(222,747,783)	Depreciation
Cadangan Penurunan Nilai Aset tetap	20,349	--	(1,795,211)	--	(1,774,862)	Allowance for impairment of Fixed Assets
Sub Total	(63,265,620)	--	(6,042,501)	--	(69,308,121)	Sub Total
<u>Kuntungan (Kerugian) Aktuarial dari Imbalan Kerja Manfaat Pasti</u>	(131,510)	--	--	344,144	212,634	Current Year Actuarial (Gain) Losses
Total	(63,397,130)	--	(6,042,501)	344,144	(69,095,487)	Total
PT Terminal Petikemas Surabaya	(41,636,191)	--	(5,532,450)	(1,049,216)	(48,217,857)	PT Terminal Petikemas Surabaya
PT Pelindo Husada Citra	(3,106,533)	--	(461,263)	302,243	(3,265,553)	PT Pelindo Husada Citra
Total liabilitas pajak tangguhan	(108,139,854)	--	(12,036,214)	(402,829)	(120,578,897)	Total Deferred Tax Liability
Aset Pajak Tangguhan :						Deferred Tax Assets :
<u>PT Berlian Jasa Terminal Indonesia dan Entitas anak:</u>						<u>PT Berlian Jasa Terminal Indonesia and Subsidiaries:</u>
PT Berlian Jasa Terminal Indonesia	9,862,874	--	2,356,325	17,398	12,236,597	PT Berlian Jasa Terminal Indonesia
PT Berlian Manyar Sejahtera	(268,821)	--	1,243,780	--	974,959	PT Berlian Manyar Sejahtera
PT Pelindo Property Indonesia	--	--	665,968	--	665,968	PT Pelindo Property Indonesia
Total	9,594,053	--	4,266,073	17,398	13,877,524	Total
<u>PT Pelindo Marine Service dan Entitas anak:</u>						<u>PT Pelindo Marine Service and Subsidiaries:</u>
PT Pelindo Marine Service	664,208	--	71,413	(32,182)	703,439	PT Pelindo Marine Service
PT Alur Pelayaran Barat Surabaya	169,081	--	4,045,813	(234)	4,214,659	PT Alur Pelayaran Barat Surabaya
PT Pelindo Energi Logistik	127,736	--	892,601	--	1,020,337	PT Pelindo Energi Logistik
Total	961,025	--	5,009,827	(32,416)	5,938,435	Total
<u>PT Terminal Teluk Lamong dan Entitas anak:</u>						<u>PT Terminal Teluk Lamong and Subsidiaries:</u>
PT Terminal Teluk Lamong	9,874,035	861,942	27,866,131	--	38,602,109	PT Terminal Teluk Lamong
PT Lamong Energi Indonesia	--	--	77,013	--	77,013	PT Lamong Energi Indonesia
Total	9,874,035	861,942	27,943,144	--	38,679,122	Total
<u>PT Pelindo Daya Sejahtera dan Entitas anak:</u>						<u>PT Pelindo Daya Sejahtera and Subsidiaries:</u>
PT Pelindo Daya Sejahtera	129,655	--	285,465	--	415,120	PT Pelindo Daya Sejahtera
PT Pelindo Daya Solusi	56	--	(56)	--	--	PT Pelindo Daya Solusi
Total	129,711	--	285,409	--	415,120	Total
Total aset pajak tangguhan	20,558,824	861,942	37,504,453	(15,018)	58,910,201	Total Deferred Tax asset
Total Liabilitas Pajak Tangguhan - Bersih	(87,581,030)	861,942	25,468,239	(417,847)	(61,668,696)	Total Deferred Tax Liability - Net

20. Perpajakan (Lanjutan)

20. Taxation (Continued)

*) Koreksi Dasar Pengenaan Pajak tersebut karena adanya pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Badan tahun pajak 2015 sehubungan dengan diterimanya Surat dari kementerian keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor wilayah DJP Wajib Pajak Besar No: S-1179/WPJ.19/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Jawaban Surat Direktur Keuangan Perusahaan No.KU.0302/08.1/P.III-2016 tanggal 19 Februari 2016 perihal permohonan Ijin Penetapan Umur Aktiva Tidak Berwujud sesuai masa perjanjian Konsesi. Dalam Surat Jawaban tersebut disampaikan bahwa untuk harta tidak berwujud yang masa manfaatnya tidak tercantum pada kelompok masa manfaat yang ada, maka wajib pajak menggunakan masa manfaat yang terdekat sebagaimana dicontohkan dalam penjelasan pasal 11.A ayat (2) Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat atas Undang-undang No.7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

*) The Correction Tax Base is a result of the rectification of the Annual Tax Return (SPT) Corporate Income Tax fiscal year 2015 in connection with the receipt of the letter from the finance ministry of the Republic of Indonesia, Directorate General of Taxation Regional Office DJP Large Taxpayer No: S-1179/WPJ.19/2016 dated April 29, 2016 on the Answer Letter Finance Director of the Company No.KU.0302/08.1/P.III-2016 dated February 19, 2016, regarding the request to Permit Age Determination of Intangible Assets on corresponding period of concession agreement. In the Response Letter submitted stated that the intangible asset useful life are not listed on the useful life of existing groups, then the taxpayer uses the nearest future benefits as exemplified in the explanation of Article 11.a paragraph (2) of Law No. 36 Year 2008 regarding to the fourth amendment on Law No. 7 of 1983 on Income Tax.

Laba kena pajak hasil rekonsiliasi menjadi dasar dalam pengisian SPT Tahunan Badan Tahun 2017, 2016 dan 2015.

The reconciled taxable income became the basis for the annual tax return of the Agency for the years 2017, 2016 and 2015.

Rekonsiliasi antara beban pajak dan hasil perkalian laba akuntansi sebelum pajak dengan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut :

A reconciliation between the total tax expense and the amount computed by applying the effective tax rates to income before tax is as follows:

	2017 Rp	2016 Rp	2015 Rp	
Laba konsolidasian sebelum beban pajak penghasilan	2,704,510,401	1,783,228,279	1,542,836,783	Consolidated income before income tax
Laba entitas anak sebelum beban pajak penghasilan	(960,189,065)	(671,189,041)	(576,190,265)	Subsidiaries' income before income tax
Bagian laba bersih entitas asosiasi	(97,403,931)	(44,602,963)	(18,189,505)	Equity in net income of associated
Disesuaikan dengan jurnal eliminasi konsolidasi	(415,992,636)	(222,695,508)	(386,261,224)	Adjustment for consolidated eliminations
Laba Kena Pajak	1,230,924,769	844,740,767	562,195,789	Total Taxable Income
Tarif Pajak yang Berlaku				Effective Tax Rate
25% x Rp 1.230.924.769	(307,731,192)	--	--	25% x Rp 1.230.924.769
25% x Rp 844.740.767	--	(211,185,192)	--	25% x Rp 844,740,767
25% x Rp 562.195.789	--	--	(140,548,947)	25% x Rp 562,195,789
Total	(307,731,192)	(211,185,192)	(140,548,947)	Total

20. Perpajakan (Lanjutan)

20. Taxation (Continued)

	2017 Rp	2016 Rp	2015 Rp	
Pengaruh Pajak atas (Beban)				
Penghasilan Tidak Dapat Diperhitungkan Menurut Fiskal :				<i>Tax Effect of Nondeductible Expenses (Nontaxable Income):</i>
Biaya Bahan	(16,150,573)	(261,706)	(531,383)	<i>Raw Expense</i>
Biaya Pemeliharaan	(927,543)	(180,562)	(722,920)	<i>Maintenance Expense</i>
Biaya Asuransi	(13,063)	(47,120)	(877,691)	<i>Insurance Expense</i>
Pendapatan diluar usaha	25,239,853			
Biaya Administrasi				<i>Office Administrative Expenses</i>
Kantor	(20,702,910)	(20,428,525)	(20,119,742)	
Biaya Konstruksi	(22,545,621)	--	--	<i>Construction Expense</i>
Biaya Diluar Usaha	(27,599,092)	(28,065,936)	(3,749,670)	<i>Other Expense</i>
Biaya Tunjangan				
Komunikasi	(2,909)	(3,397)	(314,057)	<i>Communication Allowance</i>
Biaya Penyusutan				<i>Assets Depreciation</i>
Aset Penugasan	468,617	(12,676)	(12,676)	<i>Cost Assignment Expense related to</i>
Biaya Berkaitan				<i>Interest Income Subjected to Final Tax</i>
Pendapatan Final	(1,775,552)	(3,431,630)	(1,880,410)	
Pendapatan yang Bukan Merupakan Obyek Pajak	134,805,159	142,299,965	97,979,907	<i>Interest not Subjected to Tax</i>
Pendapatan yang Telah Dikenakan PPh Final	176,975,192	69,750,189	64,735,086	<i>Interest Income Subjected to Final Tax</i>
Sub Total	<u>247,771,558</u>	<u>159,618,602</u>	<u>134,506,446</u>	<i>Sub Total</i>
Total Beban Pajak Perusahaan:				<i>Total Tax Expenses of the Company:</i>
Non - Final	(134,896,914)	124,914,991	(6,042,501)	<i>Non-Final</i>
Final	(40,488,717)	(30,066,270)	(29,966,639)	<i>Final</i>
Entitas anak:				<i>Subsidiaries:</i>
Beban Pajak Entitas Anak	<u>(495,017,522)</u>	<u>(365,760,070)</u>	<u>(343,959,778)</u>	<i>Subsidiaries Tax Expense</i>
Total Beban Pajak	<u>(670,403,153)</u>	<u>(270,911,349)</u>	<u>(379,968,918)</u>	<i>Total of Tax Expense</i>

21. Utang Bank

21. Bank Loans

	2017 Rp	2016 Rp	2015 Rp
Kredit Modal Kerja/ Working Capital Loans			
Dolar Amerika Serikat/ US Dollars:			
PT Bank ANZ Indonesia	677,400,000	--	689,750,000
The Bank Of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd., Jakarta Branch	--	671,800,000	--
Total	<u>677,400,000</u>	<u>671,800,000</u>	<u>689,750,000</u>

21. Utang Bank (Lanjutan)

21. Bank Loans (Continued)

Perusahaan

The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd., Jakarta Branch

Perusahaan menandatangani Perjanjian Fasilitas Pinjaman No.15-0603LN tanggal 14 Januari 2016, dimana Perusahaan memperoleh fasilitas kredit Modal Kerja tanpa komitmen dari The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. (BTMU) dalam mata uang Dolar AS dengan maksimum kredit sebesar USD100,000,000 (angka penuh) dengan jangka waktu ketersediaan 1 (satu) tahun sejak tanggal penandatanganan perjanjian. Fasilitas Pinjaman tersebut memiliki suku bunga LIBOR ditambah dengan margin yang berlaku untuk suatu pinjaman dalam Dolar AS. *Applicable Margin*, yakni 1,35% per tahun.

Sesuai perjanjian mengenai transaksi-transaksi dalam mata uang asing tanggal 14 Januari 2016, Perusahaan juga memperoleh fasilitas transaksi-transaksi *Letter of Credit* (Surat Kredit berdokumen) yaitu :

1. Pembukaan *Letter of Credit* dan Pembayaran kewajiban Penggantian dan transaksi-transaksi yang berkaitan dengannya, dan;
2. Transaksi-transaksi lain sejenis serta transaksi yang berhubungan dengan transaksi-transaksi *letter of Credit* (Surat Kredit Berdokumen) diantaranya adalah: Jaminan, Klaim Asuransi, Keaslian dari *Import Documentary Bill* dan Dokumen, dan lain sebagainya, Alokasi Risiko, Pembayaran Bunga, Biaya-Biaya Diskon, Ongkos-Ongkos dan Biaya-biaya, Pengurusan *Import Documentary Bill*, Kewajiban Penggantian, Nilai Tukar, Pembatalan atau Perubahan atas *Letter of Credit*, dan lain sebagainya.

Sesuai dengan perjanjian tanggal 14 Januari 2016, Perusahaan juga memperoleh Fasilitas kontrak-kontrak berjangka mata Uang Asing (*Forward Foreign Exchange Contracts*) dengan atas maksimum Fasilitas sebesar USD10,000,000 (angka penuh) untuk keperluan Lindung nilai dengan periode fasilitas 1 (satu) Tahun sejak tanggal berakhirnya jangka waktu ketersediaan sampai dengan Tanggal Laporan fasilitas ini belum digunakan Perusahaan.

Perusahaan telah melakukan pembayaran terhadap pinjaman pada BTMU pada tanggal 18 Januari 2017 sebesar USD50,000,000.

The Company

The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd., Jakarta Branch

The Company signed a Loan Facility Agreement No. 15-0603LN dated January 14, 2016, whereby the Company obtained working capital credit facility without commitment from The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. (BTMU) denominated in Dollar with maximum credit amounting to USD100,000,000 (full amount) for availability period of 1 (one) year from the date of the agreement. The loan facility has a LIBOR interest rate plus the applicable margin for a loan in Dollars AS. *Applicable Margin*, which is 1.35% per annum.

In accordance with to the agreement regarding transactions in foreign currencies dated January 14, 2016, the Company also obtained the transactions *Letter of Credit* (*Letter of Credit*), namely:

1. The opening of *Letter of Credit* and Payment Replacement liabilities and transactions is related thereto, and;
2. Other similar transactions as well as transactions relating to transactions *Letter of Credit* (*Letter of Credit*) are: Assurance, Insurance claim, Authenticity of *Import Documentary Bill* and documents, and so forth, Allocation Risk, Interest Payments, Discount Fees, costs and fees, Handling *Import Documentary Bill*, Replacement Obligations, Exchange Rates, Cancellation or Amendment to *Letter of Credit*, etc.

In accordance with the agreement dated January 14, 2016, the Company also obtained contract facility on futures Foreign Currency (*Forward Foreign Exchange Contracts*) with a maximum Facility amounting to USD10,000,000 (full amount) for the purpose of hedging the facility for a period of 1 (one) year since the date of expiration of the availability period up to date of the report the facility has not been used by the Company.

The Company has made payment to the Loans from BTMU on January 18, 2017 amounting to USD50,000,000.

21. Utang Bank (Lanjutan)

21. Bank Loans (Continued)

PT Bank ANZ Indonesia

Pada tahun 2015, Perusahaan telah melakukan pembaharuan atas fasilitas pinjaman kepada PT Bank ANZ Indonesia dengan Perubahan Ketiga atas Perjanjian Fasilitas No. 799/FA/ANZ/AMN-3/IV 2015 tanggal 22 April 2015, dimana para pihak dengan ini saling sepakat untuk merubah Perjanjian fasilitas dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :

- Fasilitas yang ditawarkan kepada Peminjam atas dasar tanpa komitmen, dengan jumlah fasilitas ditetapkan pada setiap saat keseluruhan penarikan berdasarkan fasilitas tidak akan melebihi USD100,000,000 (angka penuh).
- Fasilitas Kredit Bergulir Jangka Pendek yang akan digunakan untuk tujuan umum Perusahaan.
- Fasilitas dapat ditinjau kembali setiap saat, dan akan ditinjau kembali dalam setiap hal pada tanggal 31 Januari 2016.

Sejauh tidak diubah dalam perubahan ketiga atas perjanjian Fasilitas ini, semua syarat dan ketentuan lainnya yang ditetapkan dalam Perjanjian Fasilitas akan tetap tidak berubah dan berlaku secara penuh dan Perubahan Ketiga atas Perjanjian Fasilitas ini menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Fasilitas.

Perusahaan telah melakukan pembayaran terhadap pokok pinjaman pada PT Bank ANZ Indonesia, pada 22 Juli 2016 sebesar USD50,000,000 (angka Penuh), tanggal 31 Maret 2015 sebesar USD40,000,000 (angka penuh) dan 28 Februari 2017 sebesar USD50,000,000 (angka Penuh).

Fasilitas tersebut telah diperbaharui dengan perubahan Perjanjian Fasilitas No. 53/FA/ANZ/AMD/IX/2017 tanggal September 2017, untuk mengubah klausul perjanjian sebagai berikut:

- Fasilitas yang ditawarkan kepada Peminjam atas dasar tanpa komitmen, dengan jumlah fasilitas ditetapkan pada setiap saat keseluruhan penarikan berdasarkan fasilitas tidak akan melebihi USD50,000,000 (angka penuh).
- Fasilitas tersebut dibebani suku bunga:
 - i. USD : London Interbank Offered Rate (LIBOR) + 1,2% per tahun.
 - ii. Rp : Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR) rata-rata 3 bulan + 1,5% per tahun.

PT Bank ANZ Indonesia

In 2015, the Company made renewal on the loan facility to PT Bank ANZ Indonesia with the Third Amendment Facility Agreement No: 799 / FA / ANZ / AMN-3 / IV 2015 dated 22 April 2015, wherein the parties hereby mutually agree to amend the facility Agreement with the terms and conditions as follows:

- *The facilities offered to the Borrower on the basis of non-commitment, with total set at any time based on the total withdrawal of the facility will not exceed USD100,000,000 (full amount).*
- *Short-term Revolving Credit Facility, that will be used for general corporate purposes.*
- *Facilities may be reviewed at any time, and would be reviewed in each case on January 31, 2016.*

To the extent that it is not amended in the Third Amendment, all the other terms and conditions set forth in the Facility Agreement shall remain unchanged and in full force and the Third Amendment to Facility Agreement shall be and an integral and inseparable part to the Facility Agreement.

The Company made payments to the loan principal at PT Bank ANZ Indonesia on July 22, 2016 amounting to USD50,000,000 (full amount) and dated March 31, 2015 amounting to USD40,000,000 (full amount) and February 28, 2017 amounting to USD50,000,000 (full amount).

The facility was amended by Facility Agreement No. 53/FA/ANZ/AMD/IX/2017 dated September, 2016, to amend the following clauses in the agreement:

- *The facilities offered to the Borrower on the basis of non-commitment, with total set at any time based on the total withdrawal of the facility not exceeding USD50,000,000 (full amount).*
- *The facility bears interest rate of :*
 - i. *USD : London Interbank Offered Rate (LIBOR) + 1.2% per annum.*
 - ii. *Rp : Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR) 3 month average + 1.5% per annum.*

21. Utang Bank (Lanjutan)

21. Bank Loans (Continued)

- Tersedia dalam USD dan Rp.
- Jangka waktu maksimum 9 bulan.
- Fasilitas pinjaman ini tidak dijamin dengan aset tertentu.

- Available in USD and Rp.
- Maximum period of 9 month.
- This loan facility is not secured by certain assets.

Saldo pinjaman pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar USD50,000,000 (angka penuh) dan 31 Desember 2016 sebesar USD50,000,000 (angka penuh).

The loan balance as of December 31, 2017 amounted to USD50,000,000 (full amount) and December 31, 2016 amounted to USD50,000,000 (full amount).

22. Utang Bank Jangka Panjang

22. Long Terms Bank Loans

	2017 Rp	2016 Rp	2015 Rp	
Kredit Investasi				Investment Credit Facility
<u>Pihak-pihak Berelasi</u>				<u>Related Parties</u>
Rupiah :				Rupiah :
Pinjaman Bank Sindikasi	3,000,000,000	1,500,000,000	--	Syndicated Bank Loans
<u>Pihak Ketiga</u>				<u>Third Parties</u>
Dolar Amerika Serikat				US Dollars:
Deutsche Bank AG, London Branch	894,101,937	1,002,932,610	968,399,363	Deutsche Bank AG, London Branch
Sub Total	3,894,101,937	2,502,932,610	968,399,363	Sub Total
Dikurangi Bagian yang Jatuh Tempo satu Tahun	328,516,973	325,801,155	254,042,959	Less Current Maturity Within one year
Bagian Jangka Panjang	3,565,584,964	2,177,131,455	714,356,404	The Long - Term

Perusahaan

Pinjaman Sindikasi:

Perusahaan telah memperoleh Fasilitas Kredit dari Bank Sindikasi yang terdiri dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. sebagai Agen Fasilitas, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Kredit Sindikasi No.27 tanggal 23 Juni 2016 dari Emi Susilowati, SH., Notaris di Jakarta, dengan jumlah pokok Fasilitas Kredit yang tersedia adalah dalam mata uang Rupiah dengan jumlah maksimum sebesar Rp4.500.000.000 yang dibagi menjadi 2 (dua) trans, sebagai berikut:

1. Trance A maksimum sebesar Rp3.000.000.000
2. Trance B maksimum sebesar Rp1.500.000.000

Masing-masing kreditur sindikasi akan berpartisipasi dalam setiap penarikan kredit dalam jumlah yang sesuai dengan proporsi terhadap total komitmen dari seluruh Kreditur Sindikasi yaitu :

The Company

Syndicated Loan:

The Company has obtained credit facilities from Bank Syndicate consisting of PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. as Facility Agent, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk and PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, as stated in the Deed of Loan Syndication Agreement No.27 dated June 23, 2016 of Emi Susilowati, SH., Notary in Jakarta, with a principal amount of available credit facilities are denominated in Rupiah with a maximum amount of Rp4,500,000,000 divided into 2 (two) trances, as follows:

1. Trance A maximum credit of Rp3,000,000,000
2. Trance B maximum credit of Rp1,500,000,000

Each syndicate of lenders will participate in any withdrawal of credit in an amount in proportion to the total commitment of all creditors Syndication namely:

22. Utang Bank Jangka Panjang (Lanjutan)

22. Long Terms Bank Loans (Continued)

No	Kreditur /Creditor	Jumlah Komitmen Maksimum/ Maximum Commitment Amount	
		Trance A	Trance B
1	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	1,250,000,000	750,000,000
2	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1,250,000,000	750,000,000
3	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk.	500,000,000	--
Total Komitmen / Total Commitment		3,000,000,000	1,500,000,000

Jangka waktu kredit maksimal 8 (delapan) tahun termasuk masa tenggang 2 tahun. Jadwal pembayaran bunga dilakukan setiap bulan dan pembayaran angsuran pokok dilakukan secara.

The maximum credit term is for 8 (eight) years including a grace period of 2 years. Schedule of interest payment is made each month and the payment of principal installment is made on a quarterly basis.

Pinjaman ini dibebani suku bunga sebesar rata-rata JIBOR IDR 3 bulan + margin = 8,95% pertahun dan *Fee agen* fasilitas sebesar Rp250.000 per tahun termasuk PPN, *commitment fee* sebesar 0,25% dari jumlah kredit yang tidak ditarik diakhir masa penarikan serta biaya provisi sebesar 0,50% dari limit kredit.

The loan bears an average interest rate of JIBOR IDR 3 months + margin = 8.95% per annum and the facility agent fee of Rp250,000 per annum including VAT, commitment fee of 0.25% of the amount of non-drawdown at the end of drawdown as well as a provision fee of 0.50% of the credit limit.

Fasilitas kredit ini hanya dapat dipakai untuk:

This credit facility can only be used for:

- a. Pembiayaan kebutuhan investasi baik yang telah lalu maupun dimasa datang, yang sumber pelunasannya berasal dari arus kas Perusahaan yaitu: Pembiayaan kembali (*Refinancing*) *Capital Expenditure* tahun 2015 dan pembiayaan *Capital Expenditure* tahun 2016 - 2017.
- b. Penerbitan *Letter Of Credit (LC)*/ Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - i. Penerbitan LC/SKBDN digunakan untuk pembelian barang modal sesuai RKAP tahun 2016 dan 2017.
 - ii. Biaya atau fee yang terkait dengan penerbitan LC/SKBDN.
 - iii. Penarikan LC/SKBDN hanya dapat dilunasi dengan menggunakan kredit yang diberikan berdasarkan perjanjian ini.
 - iv. Dalam hal LC/SKBDN diterbitkan dalam mata uang selain Rupiah maka kurs yang akan digunakan adalah kurs tengah Bank Indonesia pada saat :
 - Tanggal penerbitan LC/SKBDN untuk keperluan perhitungan Limit Kredit yang tersisa dan;
 - Tanggal pembayaran LC/SKBDN untuk keperluan pelunasan oleh Perusahaan kepada Kreditur.

- a. *Financing investment needs both the past and the future, which is the source of repayment is derived from the Company's cash flows are: Refinancing Capital Expenditure 2015 Capital Expenditure and financing of 2016 - 2017.*
- b. *Issuing Letter of Credit (LC) / Letter of Credit Home Affairs (SKBDN) with the following conditions:*
 - i. *Issued LC / SKBDN was used for the purchase of capital goods in accordance RKAP 2016 and 2017.*
 - ii. *Costs or fees associated with the issuance of LC / SKBDN.*
 - iii. *Withdrawal LC / SKBDN only be settled using a credit granted under this agreement.*
 - iv. *In the case of LC / SKBDN issued in currencies other than Rupiah the exchange rate to be used is a middle rate of Bank Indonesia at the time:*
 - *The date the LC/SKBDN for calculation purposes and the remaining Credit Limit;*
 - *The payment date LC / SKBDN for purposes of repayment by the Company to the creditors.*

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) AND
SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2017, 2016 and 2015
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

22. Utang Bank Jangka Panjang (Lanjutan)

22. Long Terms Bank Loans (Continued)

Selama Perusahaan belum membayar lunas utang Perusahaan tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal berikut dibawah ini, tanpa mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditor Sindikasi.

While the Company has not paid the debt the Company is not allowed to do any of the following, without obtaining prior written approval from the Syndicated Creditors.

- a. Mengubah secara substansial status kelembagaan, bentuk badan hukum, maksud, tujuan dan bidang usaha perusahaan;
- b. Melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan dan pembubaran;
- c. Mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain sebagian atau seluruhnya atas hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit;
- d. Memberikan jaminan perusahaan (*Corporate Guarantee*) kepada pihak lain, kecuali :
 - i. Dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya sehari-hari;
 - ii. Jaminan Perusahaan yang telah berjalan; dan
 - iii. Jaminan Perusahaan yang diberikan untuk pembiayaan dengan skema project Financing;
- e. Melakukan permohonan pailit atau permohonan penundaan pembayaran kepada instansi yang berwenang (pengadilan); atau
- f. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari bank atau kreditor lain kecuali: (i) Pinjam meminjam dalam rangka transaksi usaha yang wajar atau pelaksanaan kegiatan usaha debitur, atau (ii) perjanjian kredit yang telah ada sebelum tanggal perjanjian ini atau yang telah diungkapkan dalam laporan keuangan perusahaan.

- a. *Substantially change the a status of the institution, legal forms, goals, objectives and corporate business sectors;*
- b. *Conduct consolidation merging, take over and dissolution;*
- c. *Divert / hand over to another party whole or partial of rights and obligations relating to the credit facility;*
- d. *Provide Corporate Guarantee to other party, except:*
 - i. *In order to carry out their business activities daily;*
 - ii. *Corporate Guarantee that has been running; and*
 - iii. *Corporate Guarantee given to finance the project financing scheme; -*
- e. *Conduct a bankruptcy petition or request for postponement of payments to the relevant authorities (the court); or*
- f. *Obtain a credit facility or loans from banks or other lenders unless: (i) Lending and borrowing in the context of the transaction reasonable business or business activities of the debtor, or (ii) credit agreements existing prior to the date hereof or disclosed in the financial statements of the Company.*

Perusahaan wajib mempertahankan/meningkatkan kinerja keuangan dengan indikator rasio keuangan sebagai berikut :

The Company is required to maintain / improve the financial performance indicators of the following financial ratios:

- a. *Current Ratio (CR) \geq 1 (satu) kali*
- b. *Debt Service Coverage Ratio (DSCR) \geq 125%*
- c. *Debt to Equity Ratio (DER) \leq 3 (tiga) kali*

- a. *Current Ratio (CR) \geq 1 (one) time*
- b. *Debt Service Coverage Ratio (DSCR) \geq 125%*
- c. *Debt to Equity Ratio (DER) \leq 3 (three) times*

Perusahaan telah memenuhi rasio - rasio yang dipersyaratkan dalam perjanjian kredit.

The Company has complied with the ratios required in the credit agreement.

Kredit ini tidak dijamin dengan agunan khusus. Seluruh harta kekayaan perusahaan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari

This credit is not secured by specific collateral. The entire assets of both companies as to moving goods or not moving goods, either existing or that will exist in the future will be guaranteed in

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) AND
SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2017, 2016 and 2015
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

22. Utang Bank Jangka Panjang (Lanjutan)

akan menjadi jaminan sesuai dengan ketentuan pasal 1131 dan pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum perdata Indonesia. Hak kreditur Sindikasi adalah paripasu tanpa preferen dengan hak-hak kreditur lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jadwal Pembayaran angsuran Pinjaman Sindikasi dari jumlah pokok kredit dilakukan setiap triwulan selama 24 kali angsuran dimulai sejak tanggal 23 September 2018 sampai dengan 23 Juni 2024. Jumlah angsuran per triwulan sebesar 4,17% dari pokok kredit kecuali angsuran terakhir sebesar 4,09%.

Deutsche Bank AG, London Branch

Berdasarkan Perjanjian Fasilitas kredit tanggal 30 Agustus 2013, perihal fasilitas pinjaman berjangka untuk Perusahaan yang dikoordinasi oleh Credit Suisse AG dan Deutsche Bank AG, London Branch (secara bersama-sama disebut "Original Lenders" dan masing-masing disebut "Lender") dengan Deutsche Bank AG, London Branch bertindak sebagai Agen Fasilitas, Perusahaan diberikan fasilitas pinjaman untuk tujuan membiayai pembelian dan pengiriman peralatan tertentu kepada Perusahaan. Fasilitas pinjaman tersebut terdiri dari Facility A Commitments dan Facility B Commitments, masing-masingnya sejumlah USD62,913,952.88 (angka penuh) dan USD58,327,918.03 (angka penuh), sehingga total fasilitas pinjaman tersebut adalah USD121,241,870.91 (angka penuh).

Jumlah komitmen Pemberi pinjaman atas Fasilitas A dari waktu ke waktu, menjadi USD62,913,952.88 (angka penuh) pada tanggal *Facility Agreement*. Fasilitas A jatuh tempo lima puluh empat (54) bulan sejak tanggal pembayaran pertama yang terjadi sehubungan dengan Fasilitas A.

Jumlah komitmen Pemberi pinjaman atas Fasilitas B dari waktu ke waktu, menjadi USD58,327,918.03 (angka penuh) pada tanggal *Facility Agreement*. Fasilitas B jatuh tempo lima puluh empat (54) bulan sejak tanggal pembayaran pertama yang terjadi sehubungan dengan Fasilitas B.

Waktu mulainya pinjaman yaitu :

- Fasilitas A, 29 Desember 2014, dan
- Fasilitas B, yang lebih dulu antara:

22. Long Terms Bank Loans (Continued)

accordance with the provisions of article 1131 and article 1132 Book of Civil Law Code Indonesia. Syndication creditors rights are pari pasu without preferred with the rights of other creditors in accordance with the legislation in force.

Schedule of Repayment of Syndicated Loan installments of the principal amount of the loan is made quarterly for 24 installments commencing on September 23, 2018 until June 23, 2024. The quarterly installment amounted to 4.17% of the principal amount except for the last installment of which amounted to 4.09%.

Deutsche Bank AG, London Branch

Based on Credit Facility Agreement dated August 30, 2013, regarding the term loan facility to the Company which is coordinated by Credit Suisse AG Deutsche Bank AG, London Branch (collectively referred to as "Original Lenders" and individually referred to as "Lender") with Deutsche Bank AG, London Branch acting as Facility Agent, the Company is granted loan facilities for the purpose of financing the purchase and delivery of eligible equipment to the Company. The loan facilities consist of Facility A Commitments and Facility B Commitments amounting to USD62,913,952.88 (full amount) and USD58,327,918.03 (full amount), respectively which makes up total amount of the loan facility of USD121,241,870.91 (full amount).

Total amount of the Facility A Commitments derived from time to time amounted to USD62,913,952.88 (full amount) as of the date of the Agreement. Facility A is due within fifty-four (54) months from the date of the first payment made in respect to Facility A.

Total amount of the Facility B Commitments derived from time to time amounted to USD58,327,918.03 (full amount) as of the date of the Agreement. Facility B is due within fifty-four (54) months from the date of the first payment made in respect to Facility B.

Specified Time Starting Point of Credit are:

- *Facility A, December 29, 2014; and*
- *Facility B, whichever is earlier:*

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) AND
SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2017, 2016 and 2015
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

22. Utang Bank Jangka Panjang (Lanjutan)

- i. Tanggal jatuh 20 bulan dan 14 hari setelah tanggal: (a) tanggal pengiriman Pemberitahuan untuk penerimaan berdasarkan Kontrak Ekspor STS dan (b) tanggal pengiriman Pemberitahuan untuk penerimaan berdasarkan Kontrak Ekspor ASC; dan
- ii. 12 Oktober 2016.

Fasilitas pinjaman ini dibebani biaya-biaya sebagai berikut:

Biaya Komitmen

Perusahaan wajib membayar kepada Agen Fasilitas (untuk kepentingan masing-masing kreditur) biaya komitmen sebesar :

- i. 0,40% per tahun untuk rekening *Finnvera Residual Risk Guarantee* pada Fasilitas yang Tersedia (dihitung seolah-olah *Finnvera Residual Risk Guarantor* memiliki Komitmen Tersedia sama dengan Komitmen Tersedia FEC diterapkan secara pro rata berdasarkan masing-masing komitmen semula dari *Finnvera Residual Risk Guarantor* pada tanggal Perjanjian Fasilitas (dalam kapasitasnya sebagai Kreditur semula);
- ii. 1,39% per tahun yang merupakan Tarif Acuan Bunga Komersil untuk rekening pada Finish Export Credit Ltd (FEC),

Biaya Arrangement

Perusahaan wajib membayar kepada setiap Arranger biaya arrangement berdasarkan perjanjian sebesar USD1,515,523.39 (angka penuh) yakni 1,25% dari total komitmen.

Biaya Agen Fasilitas

Perusahaan wajib membayar kepada Agen Fasilitas biaya agen berdasarkan perjanjian sebesar USD20,000 (angka penuh) per tahun dan harus dibayar per tahun dimuka.

Jadwal Pembayaran angsuran kredit dilakukan setiap semester selama 10 kali angsuran dimulai sejak tanggal 29 Juni 2015 sampai dengan 29 Desember 2019 untuk fasilitas A dan tanggal 30 November 2016 sampai dengan 30 Mei 2021. Jumlah angsuran per semester sebesar USD6,291,395 untuk fasilitas A dan USD5,832,791 untuk fasilitas B.

Larangan Penjaminan

- a. Perusahaan tidak boleh (dan Perusahaan harus memastikan bahwa tidak ada anggota lain dari Grup akan) membuat atau mengizinkan untuk mengadakan *Security Interest* apapun atas asetnya.

22. Long Terms Bank Loans (Continued)

- i. The due date is within 20 months and 14 days after the date of (a) the notification letter issued for any revenues raised on the basis of STS Export Contract and (b) the notification letter issued for any revenues raised on the basis of the ASC Export Contract; and
- ii. October 12, 2016.

This loan facility bears the following fees:

Commitment fee

The Company shall pay to the Facility Agent (for the account of each Lender) a commitment fee of:

- i. 0.40% per annum for the account of the *Finnvera Residual Risk Guarantee* on the Available Facility (calculated as if the *Finnvera Residual Risk Guarantors* had Available Commitments equal to FEC's Available Commitments) applied on a pro rata basis based upon each *Finnvera Residual Risk Guarantor's* original Commitments at the date of this Agreement (in its capacity as an Original Lender);
- ii. 1.39% per annum which is the Commercial Interest Rate for the accounts at Finish Export Credit Ltd (FEC).

Arrangement fee

The Company is obliged to pay to every Arranger an arrangement fee based on the amount stated in the agreement, USD1,515,523.39 (full amount), which is 1.25% of the total amount of commitments.

Facility Agent's fee

The Company is obliged to pay to the Cost Facility Agent based on the agreement, USD20,000 (full amount) per annum and payable annually in advance.

Schedule of the credit installment payments are made semi-annually for 10 installments starting from June 29, 2015 until December 29, 2019 for facility A and November 30, 2016 until May 30, 2021. Installment per semester amounted to USD6,291,395 for facility A and USD5, 832,791 for facility B.

Negative Pledge

- a. The Company shall not (and the Company shall ensure that no other member of the Group will) create or permit to subsist any *Security Interest* over any of its assets.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) AND
SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2017, 2016 and 2015
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

22. Utang Bank Jangka Panjang (Lanjutan)

- b. Perusahaan tidak boleh (dan Perusahaan harus memastikan bahwa tidak ada anggota lain dari Grup akan):
- Menjual, mengalihkan atau melepas asetnya dengan ketentuan aset tersebut akan atau dapat disewakan atau dibeli kembali oleh Perusahaan atau anggota lain dari Grup;
 - Menjual, mengalihkan atau melepaskan salah satu piutang secara *recourse*;
 - Masuk ke dalam atau mengizinkan untuk hidup setiap judul pengaturan retensi;
 - Masuk ke dalam atau mengizinkan untuk hidup suatu perjanjian dimana uang atau manfaat dari bank atau rekening lainnya dapat diterapkan, Gugatan atau dibuat tunduk kombinasi rekening, atau
 - Masuk ke dalam atau mengizinkan untuk hidup setiap pengaturan preferensial lain yang memiliki efek yang sama, dalam keadaan dimana pengaturan atau transaksi yang dimasukkan ke dalam terutama sebagai metode meningkatkan Hutang Keuangan atau pembiayaan akuisisi aset.

Pada tanggal 4 September 2014, Deutsche Bank AG, London Branch telah mengabulkan seluruh permohonan yang tertuang di dalam Surat Permohonan Pelepasan Tuntutan tersebut serta menyepakati amandemen yang diajukan oleh Perusahaan, sebagaimana tertuang dalam Surat Perubahan Fasilitas Kredit tanggal 29 Agustus 2014.

Berdasarkan Surat Perubahan Fasilitas Kredit dari Deutsche Bank AG London Branch tanggal 29 Agustus 2014 sehubungan dengan fasilitas pinjaman sebesar USD121,241,890.91 (angka penuh) telah disetujui perubahan perjanjian diantaranya sebagai berikut :

- Klausula 19.1(a) dihapus dan persyaratan keuangan *leverage ratio* diubah menjadi tidak lebih dari 3.0:1.
- Klausula 20.7(a) dihapus dan diganti dengan klausula baru dimana anggota Grup diperbolehkan untuk memiliki liabilitas keuangan sepanjang: (i) nilai agregat liabilitas keuangan Grup tidak melebihi rasio keuangan yang diatur dalam Klausula 19.1 atau menyebabkan pelanggaran terhadap persyaratan keuangan dalam Klausula 19.1

22. Long Terms Bank Loans (Continued)

- b. *The Company shall not (and the Company shall ensure that no other member of the Group will):*
- Sell, transfer or otherwise dispose of any of its assets on terms whereby they are or may be leased to or re-acquired by the Company or any other member of the Group;*
 - Sell, transfer or otherwise dispose of any of its receivables on recourse terms;*
 - Enter into or permit to subsist any title retention arrangement;*
 - Enter into or permit to subsist any arrangement under which money or the benefit of a bank or other account may be applied, set-off or made subject to a combination of accounts; or*
 - Enter into or permit to subsist any other preferential arrangement having a similar effect, in circumstances where the arrangement or transaction is entered into primarily as a method of raising Financial Indebtedness or of financing the acquisition of an asset.*

As of the September 4, 2014, Deutsche Bank AG, London has consented to all matters stated in the Waiver Request Letter and agreed the amendments to Facility Agreement CS-DB proposed by the Company as stated in the Amendment to Facility Letter dated August 29, 2014.

Based on the Amendment Letter of Facility Agreement from Deutsche Bank AG London Branch dated August 29, 2014 regarding the loan facility amounting to USD121,241,890.91 (full amount) the following amendments were made and agreed among others :

- Clause 19.1(a) is deleted and the financial condition of leverage ratio is amended to not exceeding 3.0:1.*
- Clause 20.7(a) is deleted and replaced by a new clause whereby any member of the Group may incur or permit to be outstanding any financial indebtedness as long as: (i) the aggregate financial indebtedness of the Group does not exceed the financial ratios as provided in Clause 19.1 or result in a breach of Clause 19.1 in general; (ii) including prohibiton*

22. Utang Bank Jangka Panjang (Lanjutan)

22. Long Terms Bank Loans (Continued)

secara umum; (ii) ketentuan larangan yang terdapat dalam perjanjian pinjaman lainnya (termasuk rasio keuangan dan ketentuan larangan lainnya) secara substansial sama dengan ketentuan larangan yang terdapat dalam perjanjian pinjaman tersebut.

covenants and other restrictive covenants stated the other facility agreements (including financial ratio and other prohibition covenants) are substantially similar to the prohibition or negative covenants provisions of the loan facility agreement.

- Klausula 20.5(c) tentang Larangan Penjaminan ditambahkan untuk mengizinkan penjaminan yang terjadi sebelum Perusahaan memasuki perjanjian pinjaman ini.

- *Clause 20.5(c) regarding Negative Pledge is inserted to allow securities which existed prior to the Company entered into the facility agreement.*

Perubahan atas perjanjian fasilitas pinjaman tersebut adalah sehubungan dengan permohonan pelepasan tuntutan yang diajukan Perusahaan kepada Deutsche Bank AG London Branch.

The amendments to the loan facility agreement were made with respect to the waiver request proposed by the Company to Deutsche Bank AG London Branch.

Perusahaan telah memenuhi rasio - rasio yang dipersyaratkan dalam perjanjian kredit dan tidak ada jaminan yang diberikan atas fasilitas kredit tersebut.

The Company has complied with the ratios required in the credit agreement and no collateral is provided for the credit facility.

23. Surat Berharga Yang Diterbitkan

23. Securities Issued

	2017 Rp	2016 Rp	2015 Rp	
Senior Notes Penerbitan tahun 2014 USD500,000,000 (Angka Penuh)	6,774,000,000	6,718,000,000	6,897,500,000	Senior Notes Issued In 2014 USD500,000,000 (Full Amount)
Diskonto dan Biaya Penerbitan	(88,259,988)	(87,530,351)	(77,634,356)	Discount and Issuance Cost
Sub Total	6,685,740,012	6,630,469,649	6,819,865,644	Sub-Total
Amortisasi diskonto dan biaya penerbitan	23,369,445	15,462,062	9,704,294	Amortization of discount and Issuance cost
Total Utang Notes - Bersih	6,709,109,457	6,645,931,711	6,829,569,938	Notes Payable - Net

Berdasarkan *Purchase Agreement* tanggal 24 September 2014 dan addendum atas perjanjian tanggal 30 September 2014, Perusahaan menerbitkan USD500,000,000 (angka penuh) *Senior Notes*, yang akan jatuh Tempo pada tanggal 1 Oktober 2024, dengan harga penerbitan sebesar 99,314%.

Based on Purchase Agreement dated September 24, 2014 and addendum to this agreement dated September 30, 2014, the Company issued USD500,000,000 (full amount) Senior Notes, which will be due on October 1, 2024 with issue price of 99.314%.

Bookrunners atas obligasi ini adalah Australia and New Zealand Banking Group Limited, Credit Suisse (Singapore) Limited dan Standard Chartered Bank. *Senior Notes* ini dikenakan bunga sebesar 4,875% per tahun yang dibayarkan setengah tahunan in arrear setiap tanggal 1 April dan 1 Oktober, dimulai pada tanggal 1 Oktober 2015 dengan bunga terakumulasi sejak 1 Oktober 2014. *Senior Notes* ini dicatatkan pada Bursa Efek Singapura, tidak dapat dibatalkan dan dijamin tanpa syarat oleh Perusahaan.

Bookrunners for these bonds are Australia and New Zealand Banking Group Limited, Credit Suisse (Singapore) Limited and Standard Chartered Bank. It bears interest at 4.875% per annum payable semi-annually in arrears on April 1 and October 1, Starting October 1, 2015 with interests accumulated from October 1, 2014. These Notes, which were listed at the Singapore Exchange Securities Trading Limited, are irrevocably and unconditionally guaranteed by the Company.

23. Surat Berharga Yang Diterbitkan (Lanjutan)

23. Securities Issued (Continued)

Dana bersih yang diperoleh sebesar USD494,570,000 (angka penuh) diterima pada tanggal 1 Oktober 2014 dan digunakan untuk pelunasan *outstanding* utang, keperluan pendanaan ekspansi Perusahaan dan keperluan umum korporasi lainnya. Berdasarkan *Moody's Investor Service, Standard & Poor (S&P) dan Fitch Rating*, peringkat dari obligasi tersebut masing-masing adalah Baa3, BB+, BBB-.

The net proceeds, which amounted to USD494,570,000 (full amount) were received by the Company on October 1, 2014 and were used to refinance existing loan facilities, fund expansion plans and for other general corporate purposes. Based on Moody's Investor Service, Standard & Poor (S&P) and Fitch Rating, the bonds are rated at Baa3, BB+, BBB-, respectively.

Pada tahun 2017, Perusahaan telah memperoleh penilaian dari tiga Lembaga Pemeringkat Internasional yaitu *Fitch Rating* dengan *Standard and Poors (S&P)* dan oleh *Moody's Investor Service* peringkat dari obligasi tersebut masing-masing BBB-, BBB- dan Baa3.

In 2017, the Company has obtained ratings from three International Rating Agencies, namely Fitch Rating, Standard and Poors (S & P) and Moody's Investors Service, the bonds are rated at BBB-, BBB- and Baa3 respectively.

Perusahaan tidak diharuskan melakukan pembentukan dana (*sinking fund*) untuk pelunasan utang *Senior Notes* ini.

The Company is not required to make sinking fund payment with respect to these Senior Notes.

Dalam rangka penerbitan *Senior Notes* Perusahaan di Bursa Efek Singapura, Perusahaan telah memperoleh persetujuan prinsip dari Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan tentang pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2014 No. KU.04/23.1/P.III-2013 tanggal 19 Desember 2013. Perusahaan Juga telah memperoleh Persetujuan Pendanaan eksternal melalui Penerbitan Surat Utang atau Obligasi Internasional dari Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia dalam Surat No. S-507/MBU/09/2014 tanggal 2 September 2014 dengan besaran nilai sampai dengan USD500,000,000 (angka penuh) yang dananya akan digunakan untuk membiayai investasi peningkatan kapasitas produksi pelabuhan dan pengembangan terminal baru.

In order to issue the Company's Senior Notes in the Singapore Stock Exchange, the Company has obtained approval in-principle from the Shareholders during the General Meeting of Shareholders regarding the ratification of the Work Plan and Budget (CBP) 2014 No.KU.04/23.1/P.III-2013 dated December 19, 2013. The Company also has obtained the approval for external funding by issuing an international bonds or notes from the Minister of State-Owned Enterprise in his letter No. S.507/MBU/09/2014 dated September 2, 2014 with total amount up to USD500,000,000 (full amount) which will be used to finance the investment for increasing the seaport production capacity and development of the new terminal.

24. Uang Persekot/Panjar

24. Advances from Customer

Uang persekot/uang panjar merupakan utang yang timbul dari penerimaan uang muka pemakaian jasa pelabuhan yang akan diperhitungkan dengan nota tagihannya sebagai berikut :

Advances from customer are liabilities arising from receipts of cash advances from customers for the use of service ports which will be accounted with billing invoice to be released as follows:

	2017 Rp	2016 Rp	2015 Rp	
Pihak Ketiga	44,522,307	44,664,788	31,409,252	Third Parties
Pihak Berelasi	5,519,703	3,515,744	1,827,564	Related Parties
Total	50,042,010	48,180,532	33,236,816	Total

24. Uang Persekot/Panjar (Lanjutan)

24. Advances from Customer (Continued)

Rincian menurut valutenya adalah sebagai berikut:

Details according to original currencies are as follows:

	2017 Rp	2016 Rp	2015 Rp	
Rupiah	50,042,010	47,672,378	31,436,910	Rupiah
Dolar AS	--	508,154	1,799,906	US Dollars
Total	50,042,010	48,180,532	33,236,816	Total

25. Uang Titipan

25. Fund Retained

Uang titipan merupakan dana titipan yang diterima dari pihak lain yang akan diperhitungkan sesuai tujuan, terdiri dari :

Fund retained is a deposit of funds from other parties to be accounted in accordance with its purpose as follows:

	2017 Rp	2016 Rp	2015 Rp	
Pihak Ketiga	17,583,364	19,818,888	24,089,824	Third Parties
Pihak Berelasi	113,654,290	60,490,630	68,137,667	Related Parties
Total	131,237,654	80,309,518	92,227,491	Total

Uang Titipan merupakan sisa uang panjar (Uper) yang diterima dari pengguna jasa atas kegiatan yang akan dilaksanakan untuk kegiatan jasa pelayanan kapal dan bongkar muat tiga bulan kedepan (dari PT Pertamina (Persero) dan PT Meratus) dan telah dikompensasi dengan Piutang Usaha, dan sisa tersebut belum dikembalikan kepada Pengguna Jasa dan juga merupakan uang titipan yang diterima atas sewa lahan, penerimaan klaim asuransi, purna bhakti dan lainnya.

Fund retained is the residual advance from customer (Uper) which received from the service user for the activities to be carried out for ship service activities and loading and unloading for the next three months (from PT Pertamina (Persero) and PT Meratus) and has been compensated with Accounts Receivable, and the remaining has not been refund to User of Service and also deposit money received on land lease, acceptance of insurance claim, purna bhakti and others.

Uang titipan purna bhakti merupakan uang titipan pegawai dan calon pegawai yang berasal dari iuran wajib yang dipotong dari penghasilan pegawai setiap bulan sebesar 5% dari penghasilan terakhir untuk keperluan iuran pemberian penghargaan purna bhakti yang disetorkan ke kas kantor pusat perusahaan sebagaimana diatur dalam Keputusan Direksi Perusahaan No. KEP.45/KP.0.01/P.III-2000 Tentang Peraturan Penghasilan Pegawai.

Purna bhakti deposit funds are deposited money of employees and prospective employees from mandatory dues deducted from employee income every month at 5% of last earnings for full-tuition award devotional service of cash deposited into the corporate headquarters as stipulated in Decree of the Board of Directors of the Company No. KEP.45/KP.0.01/P.III-2000 About Employee's Income Regulations.

26. Utang Dana Pensiun

26. Pension Fund Payables

Utang dana pensiun merupakan saldo dana pensiun yang diperoleh dari pemotongan gaji pegawai setiap bulan dan kontribusi iuran pensiun pegawai perusahaan dengan rincian sebagai berikut :

Pension fund payable is a pension fund balance derived from monthly employee salary deduction and other contributions by the employee to the pension hold by the Company with the following details:

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) AND
SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2017, 2016 and 2015
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

26. Utang Dana Pensiun (Lanjutan)

26. Pension Fund Payables (Continued)

	2017 Rp	2016 Rp	2015 Rp	
Saldo Awal Tahun	3,891,187	3,155,865	2,710,584	Balance at Beginning of the Year
Potongan Gaji dan Kontribusi	138,922	735,322	445,281	Salary Deduction and Contributions
Dana Tersedia	4,030,109	3,891,187	3,155,865	Available Fund
Total yang dibayarkan ke DP4	--	--	--	Paid to Pension Fund (DP4)
Sub Total	4,030,109	3,891,187	3,155,865	Sub Total
Kekurangan Biaya Jasa Lalu	--	--	--	Past Service Liability
Total	4,030,109	3,891,187	3,155,865	Total

27. Pendapatan Diterima di Muka

27. Unearned Revenue

	2017 Rp	2016 Rp	2015 Rp	
Pendapatan Penguasaan Tanah, Bangunan, Air dan Listrik	59,044,634	70,251,383	65,983,626	Revenue from Lands, Buildings, Waters and Electricity
Petikemas Konvensional	1,039,541	2,208,452	395,750	Services Revenue
Pelayanan Medis	204,561	645,806	704,347	Medical Services
Pendapatan Pelayanan Barang	--	1,693,600	1,693,600	Services Goods Revenue
Pendapatan Rupa-Rupa Usaha	--	1,156,604	152,182	Equipment Rentals
Pelayanan Barang	--	585,141	3,352,321	Goods Services
Pendapatan Pelayanan Bongkar Muat	--	--	--	Conventional Container Loading and Unloading
Pendapatan Diluar Usaha	--	122,048	120,851	Other Income
Total	60,288,736	76,663,034	72,402,677	Total

28. Beban Akruai

28. Accrued Expenses

	2017 Rp	2016 Rp	2015 Rp	
Bonus	245,024,770	260,506,950	226,643,781	Bonuses
Sumber Daya Pihak Ketiga	166,121,216	134,231,133	81,713,900	Third Parties Recources
Pemeliharaan	117,323,014	114,112,076	82,037,187	Maintenance
Pegawai	67,399,407	87,750,270	95,024,299	Employees
Bunga Pinjaman	98,459,988	88,620,508	87,232,866	Interest Loan
Umum	62,867,760	76,603,611	81,750,010	General
Bahan	27,722,344	32,604,698	32,435,265	Material
Administrasi Kantor	7,650,790	6,487,535	2,974,280	Office Administration
Asuransi	4,365,369	797,989	9,000	Insurance
Lain-lain	27,359,887	31,747,050	23,357,415	Others
Total	824,294,545	833,461,820	713,178,003	Total
Berdasarkan Mata Uang				By Original Currency
USD	92,829,221	86,796,700	87,573,257	USD
Rupiah	731,465,324	746,665,120	625,604,746	Rupiah
Total	824,294,545	833,461,820	713,178,003	Total

29. Utang Lancar Lain-lain

29. Other Current Payables

	2017 Rp	2016 Rp	2015 Rp	
Utang Dividen	214,800	--	--	Dividend Payables
Cadangan Program Pensiun				Defined Contribution Pension
Iuran Pasti	3,129,019	2,142,487	4,209,369	Plan Reserve
Utang Lancar Lainnya	--	122,584	58,587	Other Current Payables
Total	3,343,819	2,265,071	4,267,956	Total

Cadangan program pensiun iuran pasti merupakan cadangan dana program pensiun iuran pasti yang belum dilakukan pendanaan.

Defined contribution pension plan reserve represents unfunded defined contribution pension plans.

30. Pendapatan Diterima di Muka Jangka Panjang

30. Long-Term Unearned Revenue

Pendapatan diterima dimuka jangka panjang merupakan sewa tanah HGB dan sewa bangunan di lingkungan pelabuhan yang jatuh tempo lebih dari setahun. Saldo pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 masing - masing sebesar Rp330.998.765, Rp321.733.688 dan Rp239.238.758.

Long term unearned revenue represents revenue in advance from rental of areas and buildings around the port which will be due in more than a year. Balance as of December 31, 2017, 2016 and 2015 amounting to Rp330,998,765, Rp321,733,688, and Rp239,238,758, respectively.

31. Uang Jaminan

31. Guaranteed Deposit Received

Utang jaminan per 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 merupakan uang jaminan yang diterima pihak ketiga atas pemakaian jasa listrik, jasa telepon dan jaminan lainnya senilai Rp4.610.340, Rp5.581.612 dan Rp2.511.075.

Guaranteed Deposit Received as of December 31, 2017, 2016 and 2015 are money assurances received from the third party over the usage of electricity, telephone services, and any other assurances amounting to Rp4,610,340, Rp5,581,612 and Rp2,511,075, respectively.

32. Liabilitas Imbalan Kerja

32. Employee Benefits Liabilities

Estimasi liabilitas aktuarial per tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

The estimated actuarial liabilities as of December 31, 2017, 2016 and 2015 are as follows:

	2017 Rp	2016 Rp	2015 Rp	
<u>Perusahaan</u>				<u>The Company</u>
Liabilitas Imbalan Pensiun	297,244,103	218,768,918	185,011,249	Pension Benefits Obligation
Liabilitas Imbalan Kerja Lainnya	13,232,813	8,232,651	6,829,557	Other Employee Benefits Obligations
Liabilitas Imbalan Pensiun Entitas Anak yang Diperhitungkan di Induk	--	1,540,830	--	Pension Benefits Obligation Subsidiaries Taken Into Account in Parent
Sub Total	310,476,916	228,542,399	191,840,806	Sub Total
<u>Entitas Anak</u>	<u>70,506,926</u>	<u>55,546,030</u>	<u>50,148,643</u>	<u>Subsidiaries</u>
Total	380,983,842	284,088,429	241,989,449	Total
Dikurangi Bagian yang Jatuh Tempo Dalam Waktu Satu Tahun	(31,013,653)	(36,242,044)	(44,883,596)	Less Current Maturity
Total Imbalan Kerja Jangka Panjang	349,970,189	247,846,386	197,105,853	Total Long Term Employee Benefits

32. Liabilitas Imbalan Kerja (Lanjutan)

32. Employee Benefits Liabilities (Continued)

Pengelompokan manfaat untuk laporan valuasi aktuarial untuk tahun - tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 sebagai berikut :

Grouping on actuarial valuation report for the years ended December 31, 2017, 2016 and 2015 are as follows:

Pengelompokan Manfaat / <i>Benefits grouping</i>	31 Desember 2017, 2016 dan 2015 / <i>December 31, 2017, 2016 and 2015</i>
Imbalan Pasca Kerja yang didanai / <i>Funded Post Retirement Benefits</i>	: UUK No.13/2003, Program Manfaat Pasti (PMP), Program Iuran Pasti (PIP) dan Purnabakti/ <i>Labor Law No.13/2003, Defined Benefit Program (PMP), Defined Contribution Program (PIP) and Retirement</i>
Imbalan Pasca Kerja yang tidak didanai / <i>Unfunded Post Retirement Benefits</i>	: Uang Duka dan Tunjangan cacat / <i>Money Grief and disability benefits</i>
Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya / <i>Other Long-Term Employee Benefits</i>	: Cuti Besar / <i>Long Service Leave</i>

Program Imbalan Pasti :

Perusahaan menyelenggarakan program pensiun imbalan pasti untuk semua karyawan tetapnya yang masuk sebelum tanggal 1 Januari 2014 yang dikelola oleh Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan ('DP-4') yang akta pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan surat keputusannya No. KEP- 248/KM.6/2002 tanggal 12 November 2002. Pendiri Dana Pensiun ('DP-4') adalah PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II dengan Mitra pendiri terdiri PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I, III, IV dan PT (Persero) Pengerukan Indonesia. Pensiun yang dibayar dihitung berdasarkan penghasilan dasar pensiun (Penghasilan Merit (Merit) + Tunjangan Prestasi Pegawai (TPP)) dan masa kerja karyawan.

Defined Benefits Plans:

The Company maintains defined benefit pension plan program for all permanent employees as of January 1, 2014 which is managed by Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan and Pengerukan ('DP-4') on which the deed of establishment was approved by the Minister of Finance of the Republic of Indonesia in its decision letter No. KEP-248/KM.6/2002 November 12, 2002. Pension Fund ('DP-4') founder was PT (Persero) Pelabuhan of Indonesia II with founding partners PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I, III, IV and PT (Persero) Pengerukan Indonesia. Paid pensions are calculated based on basic pension income (Merit Income (Merit) + Employee Achievement Allowance (TPP)) and employee service period.

Pendanaan Dana Pensiun berasal dari kontribusi pemberi kerja dan karyawan sebesar 5% dari penghasilan dasar pensiun.

Funding of Pension Fund contributions from employers and employees is 5% of the pensionable earnings.

**Program Iuran Pasti :
Perusahaan**

Perusahaan juga melakukan Pendanaan melalui program pensiun iuran pasti ("PIP") untuk semua karyawan tetapnya. Program ini dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk (DPLK BNI) yang akta pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan masing-masing No. KEP-1100/KM.17/1998 tanggal 23 November 1998. Imbalan pensiun akan diberikan apabila karyawan tersebut pensiun, cacat atau meninggal dunia.

**Defined Contribution Plans :
The Company**

The Company also maintain a defined contribution pension plan ("PIP") for all permanent employees. This program is managed by Dana Pensiun lembaga Keuangan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (DPLK BNI) which deed of establishment was approved by the Minister of Finance of the Republic of Indonesia in its Decree No. KEP-1100/KM.17/1998 dated November 23, 1998. Employees, after serving a qualifying period, are entitled to benefits on retirement, disability or death.

Iuran porsi pemberi kerja sebesar 10% dari Merit dan TPP. Berdasarkan Surat Direktur SDM dan Umum No. KP.0604/53/P.III-2015 tanggal 3 Juni 2015 menyetujui pengalihan penyelenggaraan program pensiun dan pengalihan seluruh dana dari DPLK BNI Simponi kepada Dana Pensiun Pelindo Purnakarya.

The portion of the employer contribution was 10% of the Merit and TPP. The letter of the Director of Human Resources and General No.KP.0604 / 53 / P.III-2015 dated June 3, 2015 approved the Transfer of Program Implementation and transfer of entire pension fund DPLK BNI Simponi to Dana Pensiun Pelindo Purnakarya.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) AND
SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2017, 2016 and 2015
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

32. Liabilitas Imbalan Kerja (Lanjutan)

Perusahaan mendirikan Dana Pensiun Pelindo Purnakarya yang akta pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.KEP-141/D.05/2014 tanggal 20 Oktober 2014 yang merupakan dana pensiun manfaat pasti yang dikelola oleh pengurus yang terpisah, yang memberikan manfaat pasti bagi seluruh karyawan yang telah memenuhi persyaratan tertentu apabila karyawan tersebut pensiun, cacat atau meninggal dunia. Iuran untuk program pensiun tersebut adalah sebesar 10% dari Penghasilan Dasar Pensiun karyawan dan menjadi beban Perseroan.

Jumlah beban sehubungan dengan kontribusi Perusahaan atas program ini untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp33.799.326, Rp18.746.957 dan Rp17.464.390.

Liabilitas imbalan pasca kerja Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 dihitung oleh PT RAS Actuarial Consulting, aktuaris independen sebagaimana tertuang dalam Laporan aktuarial masing - masing No.117/RAC/PL3-UUK/I/2018 tanggal 2 Januari 2018, No.219/RAC/PL3-UUK/I/2017 tanggal 3 Januari 2017 dan No.179/RAC/PL3-UUK/I/2016 tanggal 11 Januari 2016.

Berdasarkan Peraturan Direksi Perusahaan No. PER.05/KP.0202/P.III-2016 tanggal 1 Februari 2016 tentang Pola Pengaturan Kerjasama Penyerahan Sebagian Pekerjaan kepada Perusahaan dan Individu, disebutkan bahwa selisih kurang pembayaran cadangan uang pesangon pegawai PDS yang bertugas di Perusahaan ditanggung oleh Perusahaan.

Perhitungan imbalan jangka panjang atas imbalan pasca kerja karyawan dilakukan oleh PT Binaputera Jaga Hikmah tahun 2016 dengan menggunakan *Projected Unit Credit Method*. Jumlah karyawan per tanggal 31 Desember 2016 yang dilakukan perhitungan adalah sebanyak 1.257 orang.

Entitas Anak :

PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (BJTI)

BJTI menghitung dan membukukan cadangan untuk hak karyawan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tanggal 25 Maret 2003. Berdasarkan Undang-undang tersebut Perseroan

32. Employee Benefits Liabilities (Continued)

The Company established the Dana Pensiun Purnakarya (Pension Fund of Purnakarya) and its deed of establishment was approved by the Minister of Finance of the Republic of Indonesia with Decree No.KEP-141/D.05/2014 dated October 20, 2014 which is a defined benefit pension fund managed by a separate board, which provides defined benefits for all employees who have met certain requirements on retirement, disability or death. Contribution to the pension plan is 10% of pension basic income of employees and it becomes the burden on the Company.

The total expense regarding Company's contribution over the program for the periods ended December 31, 2017, 2016 and 2015 was Rp33,799,326, Rp18,746,957 and Rp17,464,390, respectively.

The Company post-employment benefit liabilities as of December 31, 2017, 2016 and 2015 were calculated by PT RAS Actuarial Consulting, an independent actuary as stated in the actuarial reports No.117/RAC/PL3-UUK/I/2018 dated January 2, 2018, No.219/RAC/PL3-UUK/I/2017 dated January 3, 2017 and No.179/RAC/PL3-UUK/I/2016 dated January 11, 2016.

Based on the Regulation of Directors of the Company No.PER.05/KP.0202/P.III 2016 dated February 1, 2016 on the Cooperation Agreement on the partial submission of work between the Company and individual, stated that shortage of the payment of employee benefit of PDS employees assigned to the Company will be covered by the Company.

The calculation of long-term benefits for post-retirement benefits of employees is conducted by PT Binaputera Jaga Hikmah on 2016 using the *Projected Unit Credit Method*. The number of employees on December 31, 2016 include in the calculation is 1,257 employees.

Subsidiaries :

PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (BJTI)

BJTI calculates and records an allowance for the rights of employees in accordance with the Employment Act of the Republic of Indonesia No.13 Year 2003 dated March 25, 2003. Under the Act, the Company is required to pay severance

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) AND
SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2017, 2016 and 2015
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

32. Liabilitas Imbalan Kerja (Lanjutan)

diharuskan untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang pengganti hak kepada karyawan apabila persyaratan yang ditentukan pada undang-undang tersebut terpenuhi. BJTI melakukan pendanaan imbalan pasca kerja dengan mengikutsertakan karyawan pada Asuransi Dana Pesangon di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) program pensiun iuran pasti sejak tanggal 1 Oktober 2007 dan BJTI juga mengikuti program Dana Pensiun Pelindo Purnakarya ("DP3") sejak 1 Januari 2015. Jumlah karyawan pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 masing-masing sebanyak 587, 313 dan 279 orang.

PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS)

TPS menyelenggarakan program pensiun iuran pasti untuk semua karyawan tetapnya, termasuk karyawan Perusahaan yang diperbantukan ke TPS. Dana pensiun ini dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk yang akta pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. KEP-1100/KM/17,1998 tanggal 23 November 1998.

Iuran pensiun yang ditanggung karyawan adalah 3% dari penghasilan, sedangkan yang ditanggung TPS adalah 10% dari penghasilan. Kontribusi Perusahaan adalah sebesar Rp3.576.232 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, Rp3.694.420 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan Rp3.908.883 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

TPS mengakui penyisihan imbalan kerja yang tidak didanai untuk karyawan yang mencapai usia pensiun sesuai dengan UU No. 13/2003 tanggal 25 Maret 2003.

Perhitungan imbalan pasca kerja untuk karyawan Perusahaan yang diperbantukan ke TPS, berdasarkan perjanjian kerja sama, termasuk sebagai berikut :

- Pensiun normal - Uang Penghargaan Purna Bhakti (UPPB) dan Bantuan Biaya Pindah Pensiun (BBPP).
- Manfaat kematian dan cacat - UPPB.
- Pengunduran diri suka rela - nihil.

Masa kerja karyawan Perusahaan yang diperbantukan di TPS dihitung sejak karyawan tersebut diperbantukan di TPS.

32. Employee Benefits Liabilities (Continued)

pay, gratuity and compensation rights to employees when the requirements specified in the law are met. BJTI carries funding of post-retirement benefits by involving employees at Severance Funds Insurance in PT Asuransi Jiwasraya (Persero) defined contribution pension plan since October 1, 2007 and BJTI also follow the Dana Pensiun Pelindo Purnakarya ("DP3") program since January 1, 2015. Number of employees as of December 31, 2017, 2016 and 2015, amounting to 587, 313 and 279 employees, respectively.

PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS)

TPS provides defined contribution for pension scheme to all of its permanent employees including those seconded staff from the Company. The pension fund is managed by Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk, which was legalized by the Minister of Finance of the Republic of Indonesia through its Decree No. KEP-1100/KM/17,1998 dated November 23, 1998.

Employees' contribution is computed at 3% of the basic income, while the contribution of the Company is at 10% of the basic income of the employees. TPS contributed Rp3,576,232 for the year ended December 31, 2017 and Rp3,694,420 for the period ended December 31, 2016 and Rp3,908,883 for the year ended December 31, 2015.

TPS provides benefits to its employees, who achieved the retirement age based on the provisions of Labor Law No. 13/2003 dated March 25, 2003.

The calculation of post employment benefits for the TPS seconded staff from the Company, which is based on the Collective Labor Agreement, includes the following :

- Retirement - Severance Pay and Gratuity (Uang Penghargaan Purna Bhakti - UPPB and Bantuan Biaya Pindah Pensiun - BBPP).
- Death and disable benefit - UPPB.
- Voluntary resignation - nil.

The employment period of the Company staff to TPS is determined based on the start of the assignment to TPS.

32. Liabilitas Imbalan Kerja (Lanjutan)

32. Employee Benefits Liabilities (Continued)

Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan pasca kerja adalah 428 orang pada 31 Desember 2017 serta 444 orang pada 31 Desember 2016 dan 465 orang pada 31 Desember 2015.

The number of employees entitled to the post-employment compensation was 428 employees as of December 31, 2017 and 444 employees as of December 31, 2016 and 465 employees as of December 31, 2015.

PT Pelindo Husada Citra (PHC)

PHC melakukan Pendanaan melalui program Pensiun Iuran Pasti ("PIP") untuk semua karyawan tetapnya. Program ini dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk (DPLK BNI) yang akta pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan masing - masing No.KEP-1100/KM.17/1998 tanggal 23 November 1998. Imbalan pensiun akan diberikan apabila karyawan tersebut pensiun, cacat atau meninggal dunia. Iuran untuk program pensiun tersebut adalah sebesar 20% dari gaji pokok karyawan, dimana sebesar 12,5% ditanggung oleh karyawan sedangkan yang ditanggung oleh PHC sebesar 87,5%.

PT Pelindo Husada Citra (PHC)

PHC made funding to Pensiun Iuran Pasti ("PIP") for all permanent employees. The program is administered by the Pension Fund of PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk (BNI Pension Fund) the deed of establishment was approved by the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia in Decree No.KEP-1100/KM.17/1998 dated November 23, 1998. Pension benefits will be given on retirement, disability or death. Contributions to the pension plan is 20% of the employee's basic salary on which 12.5% is deferred by the employee while 87.5% is suspended by the PHC.

PHC, PMS, PDS dan TTL

Group melakukan pendanaan imbalan pasca kerja dengan mengikutsertakan karyawan organik pada program iuran pasti pada Dana Pensiun Pelindo Purna Karya ("DP-III") sejak tanggal 7 Januari 2015. Jika saldo DP-III kurang dari imbalan pasca kerja sesuai dengan UUK No. 13/2003 dan peraturan PHC, PMS, PDS dan TTL, maka PHC, PMS, PDS dan TTL membayarkan kekurangannya.

PHC, PMS, PDS dan TTL

The Group made funding on post-employment benefits by including organic employees in a defined contribution plan in Dana Pensiun Pelindo Purna Karya ("DP-III") since January 7, 2015. If the balance of DP-III post-retirement benefits is less than the UUK No. 13/2003 and regulations of PHC, PMS, PDS and TTL, then PHC, PMS, PDS and TTL will pay its shortcomings.

Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) – PT PDS

PDS juga mengikuti program pensiun untuk kompensasi pesangon (PPUKP). Perusahaan melakukan kerjasama atas program tersebut dengan DPLK PT Bank Mandiri (Persero) Tbk berdasarkan perjanjian No.HK.0501/152/PDS-2017 tanggal 29 Desember 2017 dan DPLK PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan perjanjian No.HK.0501/151/PDS-2017 tanggal 29 Desember 2017.

Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) – PT PDS

PDS also has other pension plan program called a pension plan for severance compensation program (PPUKP). The Company cooperate with DPLK PT Bank Mandiri (Persero) Tbk based on agreement No.HK.0501/152/PDS-2017 dated December 29, 2017 and DPLK PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk based on agreement No.HK.0501/151/PDS-2017 dated December 29, 2017.

Jumlah yang dibayarkan sehubungan dengan program ini untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp3.000.000.

Total payment in relation to the program for the year ended December 31, 2017 amounted to Rp3.000.000.

Imbalan Pensiun

Beban imbalan kerja yang dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasian merupakan jumlah bersih dari:

Pension Benefits

Employment benefits expense recognized in the consolidated statements of profit or loss consists of the net total amounts of the following:

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) AND
SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2017, 2016 and 2015
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

32. Liabilitas Imbalan Kerja (Lanjutan)

32. Employee Benefits Liabilities (Continued)

	2017 Rp	2016 Rp	2015 Rp	
<u>Perusahaan</u>				<u>The Company</u>
Biaya Jasa Kini	28,853,052	24,007,793	18,895,445	Current Service Cost
Bunga Neto	16,464,339	15,588,651	15,424,930	Net - Interest
Biaya Jasa Lalu yang Harus Segera Diakui	18,225,077	--	--	Past Service Costs that Must be Immediately Recognized
Sub Total	63,542,468	39,596,444	34,320,375	Sub Total
<u>Entitas Anak</u>	18,501,412	11,118,984	9,580,978	<u>Subsidiaries</u>
Beban yang Diakui Dalam Laporan Laba Rugi	82,043,880	50,715,428	43,901,353	Expenses are Recognized in profit or loss

Liabilitas bersih imbalan kerja yang diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

The net liability for employee benefits recognized in the consolidated statement of financial position is as follows:

	2017 Rp	2016 Rp	2015 Rp	
<u>Perusahaan</u>				<u>The Company</u>
Nilai Kini dari Liabilitas	369,596,786	295,138,329	270,262,602	Present Value of Obligations
Nilai Wajar Aset Program	(72,352,683)	(76,369,411)	(85,251,353)	Fair Value of Plan Assets Program
Status Pendanaan	297,244,103	218,768,918	185,011,249	Funding Status
<u>Entitas Anak</u>	70,506,926	55,546,030	50,148,643	<u>Subsidiaries</u>
Liabilitas Bersih	367,751,029	274,314,948	235,159,892	Net Liability

Rekonsiliasi perubahan liabilitas bersih selama tahun berjalan yang diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

Reconciliation of the movement of the net liability recognized in the consolidated statements of financial position is as follows:

	2017 Rp	2016 Rp	2015 Rp	
<u>Perusahaan</u>				<u>The Company</u>
Liabilitas Bersih				Net Liability at the
Pada Awal Tahun	218,768,918	185,011,249	213,625,242	Beginning of the Year
Beban (Pendapatan)	63,542,468	39,596,444	34,320,375	Expense (Income) Payment Realization
Realisasi Pembayaran Manfaat	(38,405,886)	(38,965,100)	(58,245,092)	of Benefits
Pengukuran Kembali dalam OCI	65,074,354	36,217,656	1,376,577	Remeasurement in OCI
Efek atas Akuisisi, Divestasi atau Transfer	--	--	--	Effects on Acquisition, Divestment or Transfer
Iuran Perusahaan	(11,735,751)	(3,091,331)	(6,065,853)	Company's Contributions
Sub Total	297,244,103	218,768,918	185,011,249	Sub Total
<u>Entitas Anak</u>	70,506,926	55,546,030	50,148,643	<u>Subsidiaries</u>
Liabilitas Bersih				Net Liabilities at the End of
Pada Akhir Tahun	367,751,029	274,314,948	235,159,892	the Year

32. Liabilitas Imbalan Kerja (Lanjutan)

32. Employee Benefits Liabilities (Continued)

Pengukuran kembali liabilitas (aset) imbalan pasti
neto dalam penghasilan komprehensif lain:

*Remeasurement of net defined benefit liabilities
(assets) in other comprehensive income:*

	<u>2017</u> Rp	<u>2016</u> Rp	<u>2015</u> Rp	
<u>Perusahaan</u>				<u>The Company</u>
Keuntungan atau Kerugian Aktuarial karena Perubahan Asumsi Keuangan	55,480,507	15,174,672	(12,573,545)	Gain or Loss on Financial Actuarial Assumptions for Changes
Keuntungan atau Kerugian Aktuarial karena Perubahan Asumsi Demografi	(19,180,127)	--	--	Gain or Loss on Financial Actuarial Demographic for Changes
Penyesuaian Pengalaman atas Liabilitas	15,545,429	12,291,597	2,972,487	Experience Adjustment on Liabilities
Imbal Hasil atas Aset Program, Tidak Termasuk Bunga Neto	13,228,545	8,751,387	10,977,635	Yield on Assets Program, Excluding Net Interest
Sub Total	<u>65,074,354</u>	<u>36,217,656</u>	<u>1,376,577</u>	Sub Total
<u>Entitas Anak</u>	<u>2,492,530</u>	<u>(1,007,181)</u>	<u>(3,048,903)</u>	<u>Subsidiaries</u>
Pengukuran Kembali dalam Penghasilan Komprehensif Lain	<u>67,566,884</u>	<u>35,210,475</u>	<u>(1,672,326)</u>	Remeasurement in Other Comprehensive Income

Jumlah kumulatif dalam penghasilan komprehensif
lain:

*Cumulative amount in other comprehensive
income:*

	<u>2017</u> Rp	<u>2016</u> Rp	<u>2015</u> Rp	
Total Kumulatif di OCI pada Awal Tahun	37,068,195	850,539	(526,038)	Cumulative number of OCI at the Beginning of the Year
Pengukuran kembali di OCI	65,074,354	36,217,656	1,376,577	Remeasurement in OCI
Sub Total	102,142,549	37,068,195	850,539	Sub Total
<u>Entitas Anak</u>	<u>(1,400,468)</u>	<u>19,361,860</u>	<u>10,827,076</u>	<u>Subsidiaries</u>
Total Kumulatif di OCI pada Akhir Tahun	<u>100,742,081</u>	<u>56,430,055</u>	<u>11,677,615</u>	Cumulative amount in OCI at the End of the Year
Pajak Penghasilan Penghasilan (rugi) komprehensif lain setelah pajak	<u>(25,185,520)</u>	<u>(14,107,514)</u>	<u>(2,919,404)</u>	Income tax Other comprehensive income (loss) after tax
	<u>75,556,561</u>	<u>42,322,542</u>	<u>8,758,211</u>	

Imbalan kerja lainnya

Beban imbalan kerja yang dibebankan pada
laporan laba rugi komprehensif konsolidasian
merupakan jumlah bersih dari:

Other employment benefits

*Employment benefits expense recognized in the
consolidated statements of comprehensive income
consists of the net total amount of the following:*

	<u>2017</u> Rp	<u>2016</u> Rp	<u>2015</u> Rp	
<u>Perusahaan</u>				<u>The Company</u>
Biaya Jasa Kini	3,838,082	2,392,062	2,158,336	Current Service Cost
Bunga Neto	(241,638)	487,397	401,309	Net - Interest
Keuntungan/ Kerugian Aktuarial yang Diakui	23,554,628	1,351,710	186,947	Recognized Actuarial Gains/Losses
Beban yang Diakui Dalam Laba Rugi	<u>27,151,072</u>	<u>4,231,169</u>	<u>2,746,592</u>	Expenses Recognized in Profit or Loss

32. Liabilitas Imbalan Kerja (Lanjutan)

32. Employee Benefits Liabilities (Continued)

Liabilitas bersih imbalan kerja yang diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

The net liability for employee benefits recognized in the consolidated statements of financial position is as follows:

	2017 Rp	2016 Rp	2015 Rp	
Nilai Kini dari Liabilitas	13,232,813	8,232,651	6,829,557	Present Value of the Obligations
Nilai Wajar Aset Program	--	--	--	Fair Value of Plan Assets Program
Status Pendanaan	13,232,813	8,232,651	6,829,557	Funding Status
Efek atas Pembatasan Aset	--	--	--	Restrictions On Asset Securities
Liabilitas Bersih	13,232,813	8,232,651	6,829,557	Net Liability

Rekonsiliasi perubahan liabilitas bersih selama tahun berjalan yang diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

Reconciliation of the movement of the net liability recognized in the consolidated statements of financial position is as follows:

	2017 Rp	2016 Rp	2015 Rp	
Liabilitas Bersih Pada Awal Tahun	8,232,651	6,829,557	5,359,599	Net Liability at the Beginning of the Years
Beban (Pendapatan)	27,151,072	4,231,169	2,746,592	Expense (Income)
Realisasi Pembayaran Manfaat	(22,150,910)	(2,828,075)	(1,276,634)	Payment Realization of Benefits
Liabilitas Bersih Pada Akhir Tahun	13,232,813	8,232,651	6,829,557	Net Liabilities at the End of the Year

Imbalan Pensiun Entitas Anak yang diperhitungkan di induk

The Subsidiary's Employee Benefits is calculated at the parent

Liabilitas Imbalan Pensiun Entitas Anak yang menjadi tanggungan di Induk Perusahaan sesuai Peraturan Direksi No.PER.05/KP.0202/P.III-2016 sebagai berikut :

Pension Benefits Obligation of Subsidiaries Taken Into Account in Parent based on directors regulation No.PER.05/KP.0202/P.III-2016 are as follows :

	2017 Rp	2016 Rp	2015 Rp	
<u>Perusahaan</u>				<u>The Company</u>
Biaya Jasa Kini	--	1,540,830	--	Current Service Cost
Beban yang Diakui Dalam Laba Rugi	--	1,540,830	--	Expenses are Recognized in Profit or Loss
Liabilitas Bersih Pada Awal Tahun	1,540,830	--	--	Net Liability at the Beginning of the Years
Beban (Pendapatan)				Expense (Income)
Tahun Berjalan	--	1,540,830	--	For the Year
Realisasi Pembayaran Manfaat	(1,540,830)	--	--	Payment Realization
Liabilitas Bersih Pada Akhir Tahun	--	1,540,830	--	Net Liabilities at the End of the Year

Dengan berlakunya Peraturan Direksi No.PER.87/KP.0202/P.III-2017 tanggal 7 Desember 2017 maka ketentuan sebagai mana terdapat dalam Peraturan Direksi No.PER.05/KP.0202/P.III-2016 Liabilitas Imbalan Pensiun karyawan PT PDS (Entitas Anak) tidak lagi menjadi tanggungan Induk Perusahaan.

With the enactment of Regulation of the Board of Directors No. PER.87/KP.0202/P.III-2017 dated December 7, 2017, the provisions as contained in Regulation of Board of Directors No. PER.05/KP.0202/P.III-2016 Employee Retirement Liabilities PT PDS (Subsidiary) is no longer the responsibility of the Parent Company.

32. Liabilitas Imbalan Kerja (Lanjutan)

32. Employee Benefits Liabilities (Continued)

Asumsi aktuarial utama yang digunakan untuk menentukan estimasi liabilitas imbalan kerja karyawan dalam program imbalan pasti pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

The principal actuarial assumptions used to estimate liabilities for employee benefits under defined benefits plans as of December 31, 2017, 2016 and 2015 are as follows:

	Program imbalan pasca kerja yang tidak didanai/ Unfunded post retirement benefit obligation			
	2017	2016	2015	
Tingkat diskonto	7.25% /tahun/annum	8.5% /tahun/annum	9% /tahun/annum	Actuarial interest rate
Tingkat kenaikan gaji	6.50%/tahun/annum	6.50%/tahun/annum	6.50%/tahun/annum	Salary increase rate
Tingkat mortalita	TMI III 2011	TMI III 2011	TMI III 2011	Mortality rate
Tingkat cacat	10% TMI III 2011	10% TMI III 2011	10% TMI III 2011	Disability rate
Usia pensiun normal	56 tahun/years	56 tahun/years	56 tahun/years	Normal pension age
Metode perhitungan	Projected Unit Credit	Projected Unit Credit	Projected Unit Credit	Calculation method
Tingkat pengunduran diri	1% untuk umur di bawah 30 tahun dan menurun secara linear sampai 0% pada umur 52 tahun / 1% at less than 30 years of age and reducing linearly to 0% at 52 years of age	1% untuk umur di bawah 30 tahun dan menurun secara linear sampai 0% pada umur 52 tahun / 1% at less than 30 years of age and reducing linearly to 0% at 52 years of age	1% untuk umur di bawah 30 tahun dan menurun secara linear sampai 0% pada umur 52 tahun / 1% at less than 30 years of age and reducing linearly to 0% at 52 years of age	Voluntary resignation rate

Program liabilitas imbalan pasti memberikan eksposur Grup terhadap risiko aktuarial seperti risiko tingkat bunga, dan risiko gaji.

Defined benefit liability program provides the Group's exposure to the actuarial risk as the risk of interest rate risk and the risk of salary.

Risiko Tingkat Bunga

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan menggunakan tingkat diskonto yang ditetapkan dengan mengacu pada imbalan pasti hasil obligasi korporasi berkualitas tinggi. Penurunan suku bunga obligasi akan meningkatkan liabilitas program.

Interest Rate Risk

The present value of the defined benefit obligation is calculated using a discount rate determined by reference to the yield definite results of high-quality corporate bonds. Lower interest rates would increase the liability bond program.

Risiko Gaji

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan peserta program. Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan liabilitas program itu.

Salary Risk

The present value of the defined benefit obligation is calculated by reference to the salary of the future program participants. Thus, the salary increase program participants will increase the liabilities of the program.

Asumsi aktuarial yang signifikan untuk penentuan liabilitas imbalan pasti adalah tingkat diskonto dan kenaikan gaji yang diharapkan. Sensitivitas analisis dibawah ini ditentukan berdasarkan masing-masing perubahan asumsi yang mungkin terjadi pada akhir periode pelaporan, dengan semua asumsi yang lain konstan.

Significant actuarial assumptions to determine the defined benefit obligation is a discount rate and expected salary increases. Sensitivity analysis below is determined based on the respective changes in the assumptions which may occur at the end of the reporting period, with all other assumptions constant.

32. Liabilitas Imbalan Kerja (Lanjutan)

32. Employee Benefits Liabilities (Continued)

	2017 Rp	2016 Rp	2015 Rp	
a. Tingkat Diskonto				a. Discount Rate
Kenaikan sebesar 1%	384,241,425	344,568,270	303,420,342	An increase of 1%
Penurunan sebesar 1%	502,114,438	420,458,595	354,920,376	An decrease of 1%
b. Tingkat Kenaikan Gaji ke Depan				b. Increase of Future Salary Rate
Kenaikan sebesar 1%	521,563,279	419,943,430	354,447,134	An increase of 1%
Penurunan sebesar 1%	385,561,137	343,867,157	303,492,686	An decrease of 1%

Analisa jatuh tempo liabilitas imbalan pasca kerja adalah sebagai berikut:

Expected maturity analysis of employee benefit liabilities are as follows:

	2017 Rp	2016 Rp	2015 Rp	
<u>Perusahaan</u>				<u>The Company</u>
Jatuh Tempo Manfaat :				Maturity Benefit :
Kurang dari 1 tahun	28,753,200	35,805,358	40,058,339	Less than a year
1 - 5 tahun	31,073,044	58,835,154	78,261,675	1 - 5 years
5 - 10 tahun	86,589,619	71,942,983	58,301,372	5 - 10 years
Lebih dari 10 tahun	223,180,923	133,234,710	98,069,667	Over 10 years
Total	369,596,786	299,818,205	274,691,053	Total
<u>Entitas Anak</u>				<u>Subsidiaries</u>
Jatuh Tempo Manfaat :				Maturity Benefit :
Kurang dari 1 tahun	2,260,453	436,686	4,825,258	Less than a year
1 - 5 tahun	9,364,656	2,105,122	2,035,727	1 - 5 years
5 - 10 tahun	920,051,623	3,097,919	4,209,067	5 - 10 years
Lebih dari 10 tahun	79,564,267	49,906,302	49,552,258	Over 10 years
Total	1,011,240,999	55,546,029	60,622,309	Total

Manajemen berkeyakinan bahwa jumlah tersebut di atas cukup untuk memenuhi ketentuan yang berlaku pada tanggal-tanggal pelaporan.

Management believes that the above amounts are adequate to cover the requirements at reporting dates.

33. Modal Saham

33. Capital Stock

	31 Desember/December 31, 2017, 31 Desember/December 31, 2016, dan/and 2015			
Saham/Shares	Nilai Nominal Par Value per Share	Nilai Total Amount		
Modal dasar	3,200,000	1,000	3,200,000,000	Authorized
Belum ditempatkan	(2,181,047)	1,000	(2,181,047,000)	Unissued
Ditempatkan dan disetor penuh	1,018,953		1,018,953,000	Issued and fully paid

33. Modal Saham (Lanjutan)

33. Capital Stock (Continued)

Dari modal saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh, seluruhnya atau 100% dimiliki Negara Republik Indonesia.

The above issued and fully paid share capital is (100%) owned by the Government of the Republic of Indonesia.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No. 08 tanggal 13 Agustus 2012 oleh Stephanus Raden Agus Purwanto, SH., notaris di Surabaya, mengenai perubahan Anggaran Dasar berdasarkan salinan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN selaku Kuasa Menteri Negara BUMN sebagai RUPS Perusahaan No.SK-226/MBU/S/2012 tanggal 16 Juli 2012, tentang perubahan Modal dasar, Modal disetor dan Modal ditempatkan. Modal dasar Perusahaan ditetapkan sebesar Rp3.200.000.000 terbagi atas 3.200.000 lembar saham, telah ditempatkan dan diambil bagian oleh Negara Republik Indonesia sebanyak 1.018.953 lembar saham atau seluruhnya sebesar Rp1.018.953.000, dengan cara sebagai berikut :

Based on the Deed of Resolution of General Meeting of Shareholders No. 08 dated August 13, 2012 by Stephanus Raden Agus Purwanto, SH., Notary public in Surabaya, regarding the amendment of the Articles of Association based on a copy of the Decree of the Secretary of the Ministry of SOEs as the State Minister of State Owned Enterprises as the Company's General Meeting No.SK-226/MBU/S/2012 dated July 16 2012, regarding changes in Authorized Capital, Paid up Capital and Issued Capital. The Company's authorized capital stock amounting to Rp3,200,000,000 divided into 3,200,000 shares, has been placed and taken part by the Republic of Indonesia for as much as 1,018,953 shares or total amount of Rp1,018,953,000, through the following manners:

<p>Setoran Modal lama sesuai dengan Akta No 3 tanggal 15 Agustus 2008 dibuat oleh Notaris Agus Sudiono Kuntjoro, SH. 809,222,000</p> <p>Peningkatan modal disetor tahun 2012 berasal dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyertaan Modal Pemerintah (PMN) yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 08 Tahun 2012 209,730,528 • Kapitalisasi sebagian cadangan sampai dengan tahun buku 2011 472 <p>Total Peningkatan modal disetor tahun 2012 209,731,000</p> <p>Total Modal ditempatkan dan disetor per 31 Desember 2013 dan 2012 1,018,953,000</p>	<p><i>Issued and paid up capital in accordance with notary deed of Notaris No. 3 dated August 15, 2008 of Notary Agus Sudiono Kuntjoro, SH.</i></p> <p><i>Inchease in paid up capital in 2012 came from :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Conversion from Government Contribution (PMN) as decreed in Government Regulation (PP) No. 08 Year 2012</i> • <i>Capitalization of unappropriated retained earnings up to year 2011</i> <p><i>Total Increase in paid up capital in 2012</i></p> <p>Total issued and paid up capital as of December 31,2013 and 2012</p>
--	--

34. Tambahan Modal Disetor

34. Additional Paid - In Capital

Akun ini merupakan selisih transaksi ekuitas yang berasal dari penyetoran modal entitas anak di atas nilai nominal dan perolehan saham treasury.

This account represent the difference of equity transactions arise from the excess of paid in capital above its par value and treasury stock acquisition.

	2017 Rp	2016 Rp	2015 Rp
PT APBS	22,500,000	22,500,000	22,500,000
PT BMS	39,960,000	39,960,000	39,960,000
PT PEL	4,421,155	--	--
Total	66,881,155	62,460,000	62,460,000

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) AND
SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2017, 2016 and 2015
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

34. Tambahan Modal Disetor (Lanjutan)

34. Additional Paid - In Capital (Continued)

PT APBS

Tambahan modal disetor sejumlah Rp22.500.000 merupakan selisih setoran modal saham yang diterima dari Van Oord Dredging and Marine Contractor, BV (Pemegang Saham PT Alur Pelayaran Barat Surabaya, entitas anak PT PMS) diatas nilai nominal saham.

PT APBS

Additional Paid-in Capital amounting to Rp22,500,000 is the difference between capital contribution received from Van Oord Dredging and Marine Contractor, BV (shareholders of PT Alur Pelayaran Barat Surabaya, a subsidiary of PT PMS) and the par value of the issued share capital above.

PT BMS

Akun ini merupakan selisih antara nilai nominal saham di PT Berlian Manyar Sejahtera, entitas anak, sebesar Rp1.000.000 per lembar saham dengan jumlah setoran sebesar Rp1.500.000 per lembar saham atas jumlah modal ditempatkan dan disetor sebanyak 133.200 lembar saham oleh PT Usaha Era Pratama Nusantara, pemegang saham minoritas, sebesar Rp66.600.000 dan BJTI mencatat porsi kepemilikan agio saham tersebut sebesar Rp39.960.000 atau 60%.

PT BMS

This account represents the difference between the par value of PT Berlian Manyar Sejahtera, a subsidiary, amounting to Rp1,000,000 per shares to the amount of the payment amounting to Rp1,500,000 per shares of the issued and paid-up capital as much as 133,200 shares by PT Usaha Era Pratama Nusantara, minority shareholders, amounting to Rp66,600,000 and BJTI recorded its portion of premium shares amounting to Rp39,960,000 or 60%.

PT PEL

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham PMS, No. KU.04/13/P.III-2017 tanggal 2 Mei 2017, pemegang saham menyetujui rencana pembelian saham PT PEL milik PT Jaya Samudra Karunia Gas.

PT PEL

Based on the General Meeting of Shareholders of PMS, No. KU.04/13/P.III-2017 dated May 2, 2017, RUPS approved the plan for the purchase of PT PEL share owned by PT Jaya Samudra Karunia Gas.

Berdasarkan surat No. KU.0201/02/PEL-2017 tanggal 20 November 2017, PT PEL menyampaikan surat permohonan persetujuan pembelian saham kembali kepada Direktur PMS dan disetujui melalui Rapat Umum Pemegang Saham PT PEL No. KU.0205/17/PMS-2017 tanggal 23 November 2017.

Based on the letter No. KU. 0201/02/PEL-2017 Dated November 20, 2017, PT PEL sent a letter for approval of PT PEL's buy back share transaction to the Director of PMS and it has been approved through PT PEL's General Meeting of Shareholders No. KU.0205/17/PMS-2017 dated November 23, 2017.

Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan No. KU.0201/02/PEL-2017 tanggal 23 November 2017 antara PT Jaya Samudra Karunia Gas, PMS dan PT PEL, menyebutkan bahwa para pihak telah sepakat harga pembelian saham kembali milik PT PEL sebesar Rp4.395.000, dan berdasarkan Akta Notaris No. 2 tanggal 29 November 2017, PT PEL telah melakukan transaksi pembelian kembali atas saham sebesar Rp4.395.000 yang telah dibayarkan PT PEL kepada PT Jaya Samudra Karunia Gas pada tanggal 27 November 2017.

Based on Agreement Letter No. KU. 0201/02/PEL-2017 dated November 23, 2017, among PT Jaya Samudra Karunia Gas, PMS and PT PEL, stated that the Parties have agreed that the price of the buy back shares transaction amounting to Rp4,395,000 and based on Notarial Deed No. 2 dated November 29, 2017, PT PEL has settled the transaction amounting to Rp4,395,000. which has been paid by PT Pel to PT Jaya Samudra Karunia Gas dated November 27, 2017.

34. Tambahan Modal Disetor (Lanjutan)

34. Additional Paid - In Capital (Continued)

	2017 Rp
Saldo Awal/Beginning Balance	
Pembelian Kembali/Buyback on Subsidiary's Saham Pada Entitas Anak/Share of Capital	(4,395,000)
Sub Total	<u>(4,395,000)</u>
Reklasifikasi Dari Bagian Non Pengendali/ Reclassification Of Non-Controlling Section	
Bagian Non Pengendali/ Non Controlling Interest Portion	
Nilai Tercatat Awal/ Carrying Ammount	3,452,497
Pembagian Dividen/ Dividend	(1,000,000)
Bagian Laba Tahun Berjalan/ Net Profit of Current Year Portion	6,363,782
Bagian Rugi Komprehensif Lainnya Tahun Berjalan/ Other Comprehensive Loss of Current Year Portion	(124)
Sub Total	<u>8,816,155</u>
Saldo Akhir/Ending Balance	<u><u>4,421,155</u></u>

35. Dividen

35. Dividend

- | | |
|---|---|
| <p>a. Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2016 Perusahaan No. 5 tanggal 8 Mei 2017 dari Notaris Emy Susilowati, SH., dengan agenda :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan mengesahkan Laporan keuangan Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan mengesahkan Laporan keuangan Pelaksanaan program kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2016 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>Volledig acquit et de charge</i>) kepada Segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris. 2. Menetapkan penggunaan laba bersih konsolidasian tahun buku 2016 sebesar Rp1.037.329.721 sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a) Sebesar 30% dari laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk atau Rp311.198.916 ditetapkan sebagai dividen. b) Sebesar 70% dari laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk atau sebesar Rp726.130.805 ditetapkan sebagai cadangan. | <p>a. Based on our Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) on the approval of the Annual Report 2016 of the Company Annual Report. 5 dated May 8, 2017 of Notary Emy Susilowati, SH., with the agenda:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Approved the Company's Annual Report including the Supervisory Tasks Report that has been implemented by the Board of Commissioners for the financial year ended December 31, 2016 and ratified the Consolidated Financial Statements for the financial year ended December 31, 2016 and ratified the Financial Report for the Implementation of the Partnership and Community Development Program for the Financial Year 2016 and granted full <i>Volledig acquit et de charge</i> to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners. 2. Determine the use of the consolidated net profit of fiscal year 2016 amounting to Rp1,037,329,721 as follows: <ol style="list-style-type: none"> a) As much as 30% of the net income attributable to owners of the parent or Rp311,198,916 is designated as dividends. b) As much as 70% of the net income attributable to owners of the parent or amounting to Rp726,130,805 is designated as reserve. |
|---|---|

35. Dividen (Lanjutan)

35. Dividend (Continued)

	<u>Jumlah/Amount</u> <u>Rp</u>	
Dividen	311,198,916	<i>Dividend</i>
Cadangan	726,130,805	<i>Reserve</i>
Total	<u>1,037,329,721</u>	Total

- c) Penetapan Tantiem tahun Buku 2016, Gaji, Honorarium dan Tunjangan serta Fasilitas lainnya bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun 2017 ditetapkan dalam keputusan tersendiri.
- c) *The determination of Tantiem for the fiscal year 2016, Salary, Honorarium and Allowances and other Facilities for Board of Directors and Board of Commissioners for 2017 is stipulated in a separate decision.*
- b. Berdasarkan salinan akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perusahaan No. 14- tanggal 17 Mei 2016 dari Notaris Emy Susilowati dengan agenda :
- b. *Based on the Minutes of the General Meeting of Shareholders (AGM) of the Company No. 14- dated May 17, 2016 by Notary Emy Susilowati with the agenda:*
1. Menetapkan penggunaan laba bersih konsolidasian tahun buku 2015 sebesar Rp702.533.323 sebagai berikut:
1. *Determine the use of the consolidated the net profit of the fiscal year 2015 amounting to Rp702,533,323 as follows:*
- a) Sebesar 28% dari laba bersih konsolidasi tahun buku 2015 atau sebesar Rp196.709.330 ditetapkan sebagai dividen.
- a) *28% of consolidated net profit in 2015 year, or Rp196,709,330 allocated as dividends.*
- b) Sebesar 72% dari laba bersih konsolidasian tahun buku 2015 atau sebesar Rp505.823.993 ditetapkan sebagai cadangan.
- b) *72% of consolidated net profit in 2015 year, or Rp505,823,993 designated as reserves.*

	<u>Jumlah/Amount</u> <u>Rp</u>	
Dividen	196,709,330	<i>Dividend</i>
Cadangan	505,823,993	<i>Reserve</i>
Total	<u>702,533,323</u>	Total

2. Menetapkan alokasi sumber dana program Bina Lingkungan tahun 2016 sebesar 4% dari laba bersih konsolidasi tahun buku 2015, yang sumber dananya dari beban perseroan serta sisa saldo dana Program Bina Lingkungan dari rangkaian tahun sebelumnya sedangkan Program kemitraan menggunakan sisa saldo dana dari rangkaian tahun sebelumnya.
2. *Determine the allocation of resources within the Community Development Program in 2016 at 4% of the consolidated net profit in 2015 year, on which source of funds is from the company and the remaining balance of the Community Development Program fund of the previous years while the partnership program use the remaining fund balance from the previous years.*

Berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No.PER-03/MBU/12/2016 tanggal 19 Desember 2016 tentang perubahan atas Peraturan

Based on Minister of State-Owned Enterprises No. PER-03/MBU/12/2016 dated December 19, 2016 on the amendments to the Regulation of the

35. Dividen (Lanjutan)

35. Dividend (Continued)

Menteri Badan Usaha Milik Negara No. per-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, diantaranya ketentuan pasal 8 ayat 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- a) Penyisihan sebagian laba bersih BUMN dan / atau.
- b) Anggaran yang diperhitungkan sebagai biaya pada BUMN

Selanjutnya menindaklanjuti Peraturan No. PER-03/MBU/12/2016 tanggal 19 Desember 2016 tersebut diatas, Direktur Keuangan menerbitkan Nota Dinas melalui surat No: ND.14/DITKEU/II-2017 tanggal 9 Februari 2017, diantaranya perihal melakukan koreksi atas Keputusan RUPS Laporan Tahunan Perusahaan Tahun 2015, yang sebelumnya menetapkan alokasi sumber dana program Bina Lingkungan tahun 2016 sebesar 4% dari laba bersih konsolidasi tahun 2015, yang sumber dananya dari beban perseroan serta sisa saldo dana Program Bina Lingkungan dari rangkaian tahun sebelumnya, menjadi sumber dananya dari penyisihan laba ditahan dalam laporan perubahan ekuitas.

- c. Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perusahaan No. KU.04/24.1/P.III-2015 tanggal 12 Mei 2015 tentang Persetujuan Laporan Tahunan Tahun 2014, Rapat Umum pemegang Saham (RUPS) memutuskan hal-hal sebagai berikut:
 1. Persetujuan Laporan Tahunan Tahun 2014 termasuk laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan keuangan untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 serta pengesahan Laporan Program kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun 2014, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Dewan Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun 2014. Sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana atau tidak melanggar ketentuan dan prosedur Hukum yang berlaku.

Minister for State Owned Enterprises No.per-09/MBU/07/2015 regarding the Partnership and Community Development Program for State Owned Enterprises, including in the provisions of article 8, paragraph 1 are amended to read as follows:

- a) Provision for part of income of (SOEs) and/or.*
- b) Budgets are calculated as cost in SOEs*

Further follow up on Regulation No. PER-03/MBU/12/2016 dated December 19, 2016 on the above, the Director of the Department of Finance issued Memorandum by letter No.ND.14/DITKEU/II-2017 dated February 9, 2017, among others, subject to the corrections on the decisions of Shareholders on the Annual Report of the Company for year 2015, which previously set the allocation of resources within the Community Development program in 2016 for 4% of net consolidated income for the year 2015, for which the funds from the burden of the company and the remaining funds of the Community Development program of the previous years, became the source of fund for the allowance for retained earnings in the statement of changes in equity.

- c. *Based on the Minutes of the General Meeting of Shareholders (AGM) of the Company No. KU.04 / 24.1 / P.III-2015 dated May 12, 2015 regarding the approval of the Annual Report for Year 2014, the General Meeting of Shareholders (AGM) resolved the following:*
 - 1. Approval of the Annual Report 2014 including the Implementation report of the Supervisory Board of Commissioners and Ratification of the financial statements for the year ended December 31, 2014 as well as the endorsement of the Partnership and Community Development Program for the year 2014, at once provide a release and discharge of full responsibility (*volledig acquit et de charge*) to the Board of Directors and the Board of Commissioners on management and supervision during the year 2014. All such action is not a criminal offense or violation to the terms and procedures of the applicable law.*

35. Dividen (Lanjutan)

35. Dividend (Continued)

2. Menetapkan penggunaan laba bersih untuk tahun 2014 sebesar Rp1.194.015.767 terinci sebagai berikut :

2. Determine the use of the 2014 net profit amounting to Rp1,194,015,767 with details as follows:

	Jumlah/Amount Rp	
Dividen	238,803,153	Dividend
Cadangan	955,212,614	Reserve
Total	1,194,015,767	Total

d. Berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No.PER-08/MBU/2014, pada tahun 2014, pembukuan Dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang dananya bersumber dari anggaran Perusahaan diperhitungkan sebagai biaya tahun berjalan.

d. Based on Ministry of State Owned Enterprises Regulation No.PER-08/MBU/2013, on year 2014, the recording of Partnership and Community Development Fund Program where the allocation of the fund comes from the Company budget is considered as current year expense.

Berdasarkan surat no: S-09/D4.MBU/07/2015 tanggal 24 Juli 2015, perihal: Perubahan Keputusan RUPS Laporan Tahunan Perusahaan Tahun 2014, menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan yang dialokasikan antara lain untuk Dana Program Kemitraan sebesar 1% dari laba bersih atau Rp11.940.157 dan untuk Dana Program Bina Lingkungan sebesar 1% dari laba bersih atau Rp11.940.157. Perusahaan mencatat sebagai mutasi laba ditahan dalam laporan perubahan ekuitas.

Based on the letter no: S-09/D4.MBU/07/2015 dated July 24, 2015, subject: Amendment of General Meeting Annual Report the Company for the Year 2014, the appropriation of net income is allocated among others for Partnership Program Fund amounted to 1% or of the net income of Rp11,940,157 and Community Development Fund Program amounted to 1% of the net income or Rp11,940,157. The Company recorded the movements in retained earnings in the statement of changes in equity.

36. Kepentingan Nonpengendali

36. Non-controlling Interest

a. Kepentingan nonpengendali atas ekuitas entitas anak

Penyertaan pemegang saham minoritas pada entitas anak adalah sebagai berikut:

a. Non-controlling interests in equity of subsidiaries

The interests of the minority shareholders in subsidiaries are as follows:

	2017 Rp	2016 Rp	2015 Rp	
<u>PT Berlian Jasa Termial Indonesia</u>				<u>PT Berlian Jasa Termial Indonesia</u>
Nilai tercatat - awal	12,778,028	8,315,885	3,987,510	Carrying amount - beginning
Bagian laba bersih periode berjalan	6,670,741	4,091,928	5,674,653	Net income for current period
Penghasilan Komprehensif Lain	(36,906)	1,512,658	(1,647)	Other Comprehensive Income
Modal	5,577,000	--	--	Paid up Capital
Saldo Laba Dicadangkan	(5,577,000)	--	--	Appropriated Retain Earnings
Dividen	(818,386)	(1,142,443)	(1,344,631)	Dividends
Sub Total	18,593,478	12,778,028	8,315,885	Sub Total

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) AND
SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2017, 2016 and 2015
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

36. Kepentingan Nonpengendali (Lanjutan)

36. Non-Controlling Interest (Continued)

	2017 Rp	2016 Rp	2015 Rp	
<u>Entitas Anak BJTI :</u>				<u>Subsidiary of BJTI :</u>
PT Berlian Manyar Sejahtera				PT Berlian Manyar Sejahtera
PT Pelindo Properti Indonesia				PT Pelindo Properti Indonesia
PT Berkah Industri				PT Berkah Industri
Mesin Angkat				Mesin Angkat
PT Berkah Multi Cargo				PT Berkah Multi Cargo
PT Berlian Manyar Stevedore				PT Berlian Manyar Stevedore
PT Terminal Curah Semarang				PT Terminal Curah Semarang
Nilai tercatat - awal	404,260,682	376,124,141	372,055,558	Carrying amount - beginning
Bagian laba bersih				
periode berjalan	6,273,018	(1,493,459)	3,058,583	Net income for current period
Penyesuaian Saldo Laba	(20,791)	--	--	Profit Balance Adjustment
Penyesuaian Kepemilikan				
Saham BIMA	(750,000)	--	--	BIMA Share Ownership Adjustment
Tambahan Modal Disetor				Additional Paid In-Capital
Modal	500,000	29,630,000	1,010,000	Paid up Capital
Sub Total	<u>410,262,909</u>	<u>404,260,682</u>	<u>376,124,141</u>	Sub Total
<u>PT Terminal Petikemas</u>				<u>PT Terminal Petikemas</u>
<u>Surabaya</u>				<u>Surabaya</u>
Nilai tercatat - awal	583,529,004	623,673,917	495,523,467	Carrying amount - beginning
Bagian laba bersih				
periode berjalan	525,676,278	469,639,570	463,159,036	Net income for current period
Penghasilan				
Komprehensif Lain	850,614	6,058,650	1,558,086	Other Comprehensive Income
Dividen	(322,935,583)	(416,843,133)	(336,566,672)	Dividends
Dividen Interim	--	(99,000,000)	--	Interim Dividends
Sub Total	<u>787,120,313</u>	<u>583,529,004</u>	<u>623,673,917</u>	Sub Total
<u>PT Pelindo Husada Citra</u>				<u>PT Pelindo Husada Citra</u>
Nilai tercatat - awal	3,412,432	3,401,107	3,311,502	Carrying amount - beginning
Bagian laba bersih				
periode berjalan	179,945	70,954	101,099	Net income for current period
Penghasilan				
Komprehensif Lain	(21,974)	(25,138)	(11,494)	Other Comprehensive Income
Dividen	(7,080)	(20,285)	--	Dividends
Dividen Interim	--	(14,206)	--	Interim Dividends
Sub Total	<u>3,563,323</u>	<u>3,412,432</u>	<u>3,401,107</u>	Sub Total
<u>PT Pelindo Marine Service</u>				<u>PT Pelindo Marine Service</u>
Nilai tercatat - awal	8,015,262	6,963,487	6,984,945	Carrying amount - beginning
Bagian laba bersih				
periode berjalan	2,087,285	802,730	(23,517)	Net income for current period
Penghasilan				
Komprehensif Lain	(6,709)	249,045	2,059	Other Comprehensive Income
Dividen	(160,546)	--	--	Dividends
Sub Total	<u>9,935,292</u>	<u>8,015,262</u>	<u>6,963,487</u>	Sub Total

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) AND
SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2017, 2016 and 2015
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

36. Kepentingan Nonpengendali (Lanjutan)

36. Non-Controlling Interest (Continued)

	2017 Rp	2016 Rp	2015 Rp	
<u>Entitas Anak PMS :</u>				<u>Subsidiary of PMS :</u>
PT Alur Pelabuhan Barat Surabaya				PT Alur Pelabuhan Barat Surabaya
PT Pelindo Energi Logistik				PT Pelindo Energi Logistik
PT Berkah Multi Cargo				PT Berkah Multi Cargo
Nilai tercatat - awal	83,527,742	81,088,046	92,770,349	Carrying amount - beginning
Bagian laba bersih periode berjalan	20,541,817	2,446,104	(11,682,959)	Net income for current period
Penghasilan Komprehensif Lain	7,473	(6,408)	656	Other Comprehensive Income
Pembelian Kembali Saham pada Entitas Anak	(8,816,155)	--	--	Repurchase of Shares in a Subsidiary
Dividen	(1,000,000)	--	--	Dividends
Tambahan Modal Disetor	100,972	--	--	Additional Paid In-Capital
Sub Total	<u>94,361,849</u>	<u>83,527,742</u>	<u>81,088,046</u>	Sub Total
<u>PT Terminal Teluk Lamong</u>				<u>PT Terminal Teluk Lamong</u>
Nilai tercatat - awal	203,755	128,486	536,989	Carrying amount - beginning
Bagian laba bersih periode berjalan	473,310	74,682	(408,503)	Net income for current period
Penghasilan Komprehensif Lain	(447)	587	--	Other Comprehensive Income
Sub Total	<u>676,618</u>	<u>203,755</u>	<u>128,486</u>	Sub Total
<u>Entitas Anak TTL:</u>				<u>Subsidiary of TTL:</u>
PT Lamong Energi Indonesia				PT Lamong Energi Indonesia
Nilai tercatat - awal	2,817,798	4,461,148	--	Carrying amount - beginning
Bagian laba bersih periode berjalan	94,347	(1,643,350)	2,148	Net income for current period
Penyesuaian Saldo Laba	1,641,202	--	--	Retained Earnings' Adjustment
Peralihan Saham Non Pengendali	(4,368,000)	--	--	Transfer of Capital Stock Non Controlling Interest
Tambahan Modal Disetor	--	--	4,459,000	Additional Paid In-Capital
Sub Total	<u>185,347</u>	<u>2,817,798</u>	<u>4,461,148</u>	Sub Total
<u>PT Pelindo Daya Sejahtera</u>				<u>PT Pelindo Daya Sejahtera</u>
Nilai tercatat - awal	3,143,700	2,348,103	1,899,432	Carrying amount - beginning
Bagian laba bersih periode berjalan	1,578,004	986,839	448,671	Net income for current period
Penghasilan Komprehensif Lain	(27,960)	8,493	--	Other Comprehensive Income
Dividen	--	(89,734)	--	Dividends
Dividen Interim	11,316	(110,000)	--	Interim Dividends
Sub Total	<u>4,705,060</u>	<u>3,143,700</u>	<u>2,348,103</u>	Sub Total
<u>Entitas Anak PDS :</u>				<u>Subsidiary of PDS :</u>
PT Tanjung Emas Daya Sejahtera				PT Tanjung Emas Daya Sejahtera
Nilai tercatat - awal	35,820	25,334	5,503	Carrying amount - beginning
Bagian laba bersih periode berjalan	27,535	10,486	5,331	Net income for current period
Dividen	(2,097)	--	--	Dividends
Tambahan Modal Disetor	--	--	14,500	Additional Paid In-Capital
Sub Total	<u>61,258</u>	<u>35,820</u>	<u>25,334</u>	Sub Total
Total	<u>1,329,465,447</u>	<u>1,101,724,224</u>	<u>1,106,529,654</u>	Total

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) AND
SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2017, 2016 and 2015
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

36. Kepentingan Nonpengendali (Lanjutan)

36. Non-controlling Interest (Continued)

**b. Kepentingan nonpengendali atas
entitas anak**

	2017 Rp	2016 Rp	2015 Rp
PT Berlian Jasa Terminal Indonesia dan Entitas Anak	12,906,848	4,111,127	8,731,589
PT Terminal Petikemas Surabaya	526,526,891	475,698,220	464,717,122
PT Primasatya Husada Citra dan Entitas Anak	157,972	45,816	89,605
PT Pelindo Marine Service dan Entitas Anak	22,629,872	3,491,471	(11,703,761)
PT Terminal Teluk Lamong dan Entitas Anak	567,210	(1,568,081)	(406,355)
PT Pelindo Daya Sejahtera dan Entitas Anak	1,577,578	1,005,817	454,002
Total	564,366,371	482,784,370	461,882,202

**b. Non-controlling interests in the total
comprehensive income of subsidiaries**

*PT Berlian Jasa Terminal
Indonesia and Subsidiary
PT Terminal Petikemas
Surabaya
PT Primasatya Husada Citra
and Subsidiary
PT Pelindo Marine Service
and Subsidiary
PT Terminal Teluk Lamong
and Subsidiary
PT Pelindo Daya Sejahtera
and Subsidiary*

Total

PT Terminal Teluk Lamong

Peralihan saham non-pengendali berasal dari peralihan kepemilikan saham di entitas anak oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk sebanyak 4.459 lembar saham kepada Perusahaan pada 20 Januari 2017 (Catatan 43).

PT Terminal Teluk Lamong

The transfer of capital stock of non-controlling interest came from ownership in subsidiary by PT Adhi Karya (Persero) Tbk amounting to 4,459 shares to the Company on January 20, 2017 (Note 43).

TTL mengalihkan kepemilikan saham di entitas anak kepada Koperasi Pegawai Pelabuhan Indonesia III sebanyak 91 lembar saham pada 11 Juli 2017 (Catatan 43).

TTL transfer capital stock in its subsidiary to Koperasi Pegawai Pelabuhan Indonesia III amounting to 91 shares on July 11, 2017 (Note 43).

37. Pendapatan Operasi

37. Operating Revenues

	2017 Rp	2016 Rp	2015 Rp	
Pendapatan Usaha Bruto:				Gross Revenues:
Terminal Peti Kemas	3,488,212,365	3,415,951,337	3,095,980,044	Container Terminal Services
Petikemas Konvensional	1,742,342,143	997,479,277	910,858,289	and Unloading Services
Pelayanan Kapal	955,900,305	759,932,710	709,023,400	Ship Services
Pengusahaan Tanah, Bangunan, Listrik dan Air	584,259,267	207,745,203	162,674,582	Land, Building, Water, and Electricity
Pelayanan Usaha Bongkar Muat	376,931,786	286,025,971	305,635,362	Loading and Unloading Services
Terminal Curah Kering	408,265,094	145,436,335	119,613,050	Dry Bulk Terminal Services
Pelayanan Kesehatan	277,454,127	223,932,131	226,159,681	Medical Services
Pelayanan Barang	215,654,959	306,050,214	351,918,128	Goods Services
Terminal Curah Air	147,455,952	52,041,635	23,108,069	Liquid Bulk Terminal Services
Dermaga/tambatan Khusus	151,363,630	88,797,175	129,956,942	Private Ports Services
Pengusahaan Alat-alat	132,160,166	196,634,388	163,531,669	Equipment Rental Services
Pelayanan Konsolidasi Muatan	83,571,884	91,181,748	96,840,179	Cargo Consolidation Services
Kerjasama Usaha	52,716,588	73,843,412	67,393,059	Joint Operation
<i>Forwarding</i>	26,245,328	4,908,325	16,971,726	<i>Forwarding</i>
Pendapatan Usaha Lainnya	302,212,922	737,403,534	118,384,801	Miscellaneous
Sub Total (Dipindahkan)	8,944,746,516	7,587,363,395	6,498,048,981	Sub Total (To Transfer)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) AND
SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2017, 2016 and 2015
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

37. Pendapatan Operasi (Lanjutan)

37. Operating Revenues (Continued)

	2017 Rp	2016 Rp	2015 Rp	
Sub Total (Pindahan)	8,944,746,516	7,587,363,395	6,498,048,981	Sub Total (Transferred)
Reduksi Pendapatan :				Revenues Reduction:
Pelayanan Kapal	91,657,953	74,775,194	101,279	Ship Services
Pelayanan Usaha Bongkar Muat	1,095,107	20,560,146	16,159,892	Loading and Unloading Services
Roll On - Roll Off (RORO)	1,775,794	1,557,638	1,291,281	Roll On - Roll Off (RORO)
Pelayanan Barang	606,647	326,797	18,617	Goods Service
Pelayanan Rumah Sakit	201,398	519,832	149,081	Medical Services
Reduksi Pendapatan Stevedoring	2,979	4,155,795	884,872	Revenue Reduction Stevedoring
Total Reduksi Pendapatan	95,339,878	101,895,402	18,605,022	Total Revenues Reduction
Pendapatan Usaha Bersih	8,849,406,638	7,485,467,993	6,479,443,959	Net Operating Revenues

Sebesar 5,13%, 3,54% dan 2,55% dari pendapatan masing-masing pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 dilakukan dengan pihak yang berelasi (Catatan 8).

Approxiation 5.13%, 3.54% and 2.55% of revenue in December 31, 2017, 2016 and 2015 respectively carried out with related parties (Note 8).

Tidak terdapat pendapatan kepada pihak berelasi dan pihak ketiga yang melebihi 10% dari total pendapatan.

There is no revenue to a related party and third parties that exceeds 10% of total revenue.

38. Pendapatan Dan Beban Konstruksi

38. Construction Revenues And Expenses

Pendapatan konstruksi merupakan jasa kompensasi yang diakui oleh Perusahaan dalam pembangunan terminal Multipurpose Teluk Lamong dan APBS. Pendapatan konstruksi dinilai dengan menggunakan metode biaya, yang mana seluruh biaya dapat diatribusikan langsung sebagai nilai perolehan aset.

Construction revenue is the compensation of the service recognized by the Company for constructing Multipurpose Teluk Lamong Terminal and APBS. Construction revenue is measured using cost method, which is all cost directly attributable to the acquiring cost of the assets.

	2017 Rp	2016 Rp	2015 Rp	
Pendapatan Konstruksi	126,676,775	1,299,565,577	1,785,768,720	Construction Revenues
Beban Konstruksi	(115,899,850)	(1,299,565,577)	(1,785,768,720)	Construction Expenses

39. Beban Operasi

39. Operating Expenses

	2017 Rp	2016 Rp	2015 Rp	
Beban Sumber Daya Pihak Ketiga	1,564,118,813	1,644,462,553	1,131,315,174	Third Parties Recources Expenses
Beban Pegawai	1,343,212,377	908,552,034	711,235,878	Employees Expenses
Beban Umum	705,495,135	1,011,814,168	745,338,702	General Expenses
Beban Penyusutan (Catatan 14 dan 15)	678,817,999	535,231,808	392,007,206	Depreciation Expenses (Notes 14 and 15)
Beban Pemeliharaan dan Amortisasi	656,029,984	626,651,221	559,393,847	Maintenance Expenses and Amotisation
Beban Bahan	505,000,328	500,474,954	501,287,696	Expenses of Materials
Beban Asuransi	169,948,355	101,475,037	151,182,546	Insurance Expenses
Sub Total (Dipindahkan)	5,622,622,991	5,328,661,775	4,191,761,049	Sub Total (To Transfer)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) AND
SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2017, 2016 and 2015
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

39. Beban Operasi (Lanjutan)

39. Operating Expenses (Continued)

	2017 Rp	2016 Rp	2015 Rp	
Sub Total (Pindahan)	5,622,622,991	5,328,661,775	4,191,761,049	Sub Total (Transferred)
Beban Administrasi Kantor	24,157,945	71,105,398	58,355,936	Office Administrative Expenses
Beban Kerugian Penurunan Nilai Piutang	40,272,462	1,293,718	--	Loss on Impairment of Receivables
Total	5,687,053,398	5,401,060,891	4,250,116,985	Total

40. Pendapatan (Beban) Lainnya

40. Other Income (Expenses)

	2017 Rp	2016 Rp	2015 Rp	
Pendapatan Lainnya				Other Income
Pendapatan Denda dan Klaim	37,352,283	18,434,383	43,036,275	Fines and Claims
Meterai	2,252,366	1,692,162	1,452,214	Seal
Blanko Pelayanan	21,514	768,804	750,642	Service Form
Laba Penurunan Penyisihan Piutang	--	--	3,964,725	Decrease in Receivable Allowance
Pendapatan Diluar Usaha Lainnya	57,492,259	80,684,847	39,964,694	Other income
Sub Total	97,118,422	101,580,196	89,168,550	Sub Total
Beban Lainnya				Other Expenses
Biaya Denda Pajak	71,185,161	91,317,238	3,720,292	Tax Penalty Cost
Beban Denda dan Klaim	8,220,846	3,328,021	1,296,264	Fines and Claims
Beban Jasa dan Provisi Bank	4,838,838	22,174,467	13,110,839	Bank and Provision Charges
Beban Penjualan Aset Tetap	--	2,250	2,964,367	Fixed Assets Disposal
Kerugian Penurunan Nilai Bangunan dan Alat - Alat				Loss on Revaluation of Building and tools
Fasilitas Pelabuhan (Catatan 15)	--	120,064,714	--	Port Facilities (Note 15)
Cadangan Penurunan Nilai Bangunan dan Alat - Alat				Impairment on Building and tools
Fasilitas Pelabuhan (Catatan 15)	--	937,153	6,372,189	Port Facilities (Note 15)
Beban Diluar Usaha Lainnya	25,768,217	48,108,470	26,399,558	Other Non-Operating Expenses
Sub Total	110,013,062	285,932,313	53,863,509	Sub Total
Total	(12,894,640)	(184,352,117)	35,305,041	Total

41. Penghasilan Bunga

41. Interest Income

	2017	2016	2015	
	Rp	Rp	Rp	
Bunga Deposito	76,811,608	72,809,318	80,485,551	<i>Interest on Time Deposits</i>
Bunga Pinjaman	14,587,230	16,101,317	5,928,989	<i>Interest on Loans</i>
Jasa Giro	9,863,931	10,538,076	14,090,156	<i>Interest on Current Accounts</i>
Total	101,262,769	99,448,711	100,504,696	Total

42. Beban Bunga Pinjaman

42. Interest Expenses

	2017	2016	2015
	Rp	Rp	Rp
<i>Perusahaan/ The Company:</i>			
<i>Bunga Pinjaman/ Interest:</i>			
Bunga Obligasi/ <i>Bonds</i>	391,707,722	407,016,516	395,115,542
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	86,027,135	22,682,757	--
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	86,027,135	22,682,757	--
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	34,408,101	9,068,748	--
PT Bank ANZ Indonesia	942,917	7,488,978	2,831,058
PT Bank of Tokyo Mitsubishi	183,293	7,645,828	--
<i>Keuangan Lainnya/ Other Financial Institution</i>	885,479	398,124	388,767
Total	600,181,782	476,983,708	398,335,367

43. Perjanjian-Perjanjian dan Ikatan Penting

43. Agreements and Commitments

Perusahaan:

- a. Perjanjian Pengusahaan (Hak Konsesi) Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS)
Berdasarkan Perjanjian kerjasama Penyediaan dan Pelayanan Jasa Penggunaan APBS antara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (Pihak Pertama) dengan Perusahaan (Pihak Kedua), tanggal 8 Mei 2014 No: HK.107/01/05/OP.TPr-14 dan No: HK.0501/75/P.III-2014, Perusahaan telah memperoleh penetapan Hak Pengusahaan (Hak Konsesi) Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS) dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, dengan ketentuan sebagai berikut:

The Company:

- a. *Surabaya West Access Channel (APBS) Concession Rights*
According to the agreement on Preparation and Services Provision of APBS between the Ministry of Transportation of Republic Indonesia (First Party) with the Company (Second Party), dated May 8, 2014 No. HK.107/01/05/OP.TPr-14 and No: HK.0501/75/P.III-2014, the Company has obtained the Concession Rights for Surabaya West Access Channel (APBS) from the Ministry of Transportation of Republic of Indonesia, with the following conditions:

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) AND
SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2017, 2016 and 2015
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

**43. Perjanjian-Perjanjian dan Ikatan Penting
(Lanjutan)**

43. Agreements and Commitments (Continued)

1. Pemberian Hak Konsesi :

- Pihak Pertama dengan ini memberikan hak kepada Pihak Kedua untuk melakukan kegiatan penyediaan dan pelayanan jasa penggunaan APBS dan Pihak Kedua dengan ini menerima pemberian hak tersebut disertai kewajiban dan tanggung jawab untuk membiayai, merencanakan/merancang, membangun, mengoperasikan, dan memelihara APBS termasuk pemasangan sarana bantu navigasi serta melaksanakan pemungutan jasa alur APBS sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian dan peraturan perundang-undangan.
- Hak Konsesi tersebut tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

2. Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama

Kegiatan penyediaan dan pelayanan jasa penggunaan APBS untuk membiayai, merencanakan / merancang, membangun, mengoperasikan dan memelihara APBS termasuk pemasangan sarana bantu navigasi pelayaran serta melaksanakan pemungutan jasa alur APBS, dengan hasil keluaran diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Panjang alur Pengerukan (*Capital Dredging*) dan pemeliharaan Alur (*maintenance Dredging*) 18,87 nautical miles atau 34.947,24 meter.
- b. Lebar minimal alur 150 meter untuk 5 tahun pertama dan selanjutnya akan dilakukan pelebaran sesuai kebutuhan maksimal sampai dengan 200 meter.
- c. Kedalaman alur minimal -13 meter LWS untuk 3 tahun pertama dan selanjutnya akan dilakukan pendalaman sesuai kebutuhan maksimal sampai dengan -14 meter LWS.
- d. Pengadaan dan pemasangan peralatan Sarana Bantu Navigasi pelayaran (SBNP) sebanyak 20 unit, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1. *Grants of Concession Rights:*

- *The First Party hereby grants the Second Party the right to engage in the provision and service of the use of the APBS and the Second Party hereby accepts the grant of the right accompanied by obligations and responsibilities to finance, plan / design, build, operates, and maintain the APBS including the installation of navigation aids as well as carry out the collection of APBS flow services in accordance with the provisions of the agreement and the laws and regulations.*
- *The concession rights cannot be transferred to another party.*

2. *Scope of Agreement*

The activities of providing and servicing the use of APBS to finance, plan / design, build, operate and maintain the APBS including the installation of navigation navigation aids and carry out the collection of APBS flow services, with the output of which are as follows:

- a. *Capital Dredging and maintenance Dredging are 18.87 nautical miles or 34,947.24 meters.*
- b. *Minimum width of 150 meters groove for the first 5 years and then will be widened as needed maximum up to 200 meters.*
- c. *The depth of the minimum path are -13 meters LWS for the first 3 years and then will be done deepening as needed maximum up to -14 meters LWS.*
- d. *Procurement and installation of equipment for Navigation Supporting Facilities (SBNP) are 20 units, in accordance with applicable regulations.*

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) AND
SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2017, 2016 and 2015
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

**43. Perjanjian-Perjanjian dan Ikatan Penting
(Lanjutan)**

43. Agreements and Commitments (Continued)

3. Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama
Periode Perjanjian Kerjasama untuk
jangka waktu selama 25 tahun dengan
rincian sebagai berikut:
 - a. Masa Pra-Konstruksi selambat-
lambatnya selama 12 bulan kalender.
 - b. Masa Konstruksi selambat-lambatnya
selama 12 (dua belas) bulan kalender.
 - c. Masa Operasi selama 23 tahun
terhitung dimulai sejak masa
pemungutan pertama jasa
penggunaan alur pelayaran sampai
dengan berakhirnya Perjanjian
Kerjasama.
 4. Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama
Pihak kedua wajib menyerahkan Jaminan
pelaksanaan proyek Pengerukan APBS
(*Capital Dredging APBS*) dalam bentuk
Asuransi Jaminan Bank yang dikeluarkan
oleh Bank Umum yang diakui oleh
Kementerian Keuangan sebesar
Rp20.000.000 yang diserahkan selambat-
lambatnya 30 hari setelah
penandatanganan Perjanjian Kerjasama
ini. Dengan masa berlaku minimal 744 hari
dan dapat diperpanjang sampai selesainya
masa konstruksi.
 5. Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama
APBS merupakan bagian dari Daerah
Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah
Lingkungan Kepentingan (DLKp) di
wilayah perairan Pelabuhan Tanjung
Perak dan Pelabuhan Gresik yang berada
di daerah kekuasaan/kewenangan pihak
kedua, sedangkan pengoperasian APBS
selama Periode Kerjasama dilaksanakan
oleh pihak kedua.
 6. Status APBS
Pihak Kedua berkewajiban untuk
mengembalikan aset pengoperasian APBS
kepada Pihak Pertama setelah
berakhirnya Perjanjian Kerjasama yang
dituangkan dalam Berita Acara
Pengembalian Aset pengoperasian APBS
dalam kondisi sesuai ruang lingkup
pekerjaan.
3. *Scope of Agreement*
The term for this Cooperation Agreement
is 25 years with the following details:
 - a. *Pre-Construction period no later than*
12 calendar months.
 - b. *Construction period no later than*
12 (twelve) calendar months.
 - c. *The Operation Period for 23 years*
commences from the date of first
collection of the services of the use of
the shipping line until the end of the
Cooperation Agreement.
 4. *Scope of Agreement*
The second party shall be obligated to
submit the guarantee of the implementation
of the Capital Dredging APBS project in the
form of Bank Guarantee Insurance issued
by a Commercial Bank acknowledged by
the Ministry of Finance amounting to
Rp20,000,000 submitted no later than 30
days after the signing of this Cooperation
Agreement. With a validity period of at
least 744 days and can be extended until
the completion of the construction period.
 5. *Scope of Agreement*
APBS is a part of the Working Area (DLKr)
and Regional Environment Interest (DLKp)
in the waters of Tanjung Perak Port and
Gresik Port located in the second party
authority area, while the operation of APBS
during the Cooperation Period is carried
out by a second party.
 6. *APBS Status*
The Second Party is obliged to return the
APBS operational assets to First Party after
the agreement is terminated and stated in
the minutes of APBS operational asset
recovery in proper condition in accordance
with the scope of work.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) AND
SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2017, 2016 and 2015
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

**43. Perjanjian-Perjanjian dan Ikatan Penting
(Lanjutan)**

43. Agreements and Commitments (Continued)

7. Pelaksanaan Pekerjaan
Pelaksanaan Pekerjaan : Pihak Kedua akan melaksanakan pengerukan Alur (*Capital Dredging*) sesuai dengan jadwal pengerukan alur selama 12 bulan sejak *Detail Engineering Design* (DED) disetujui serta diterbitkan Surat Izin Kerja Keruk (SIKK) dan Izin Penggunaan Kapal Asing (IPKA).
8. Pernyataan Siap Operasi
Setelah pelaksanaan pembangunan APBS dinyatakan selesai, maka dilakukan uji coba Sispro Pelayanan Penggunaan APBS terlebih dahulu. Setelah dilakukan uji coba, pelaksanaan pembangunan APBS dinyatakan selesai, maka Pihak Pertama mengeluarkan Pernyataan Siap Operasi.
9. Hasil Konsesi dan Tata Cara Pembayaran
- Hasil konsesi (*concession fee*) yang diperoleh Pihak Pertama merupakan kompensasi yang diterima dari Pihak Kedua sehubungan dengan pemberian konsesi penyediaan dan pelayanan jasa penggunaan APBS.
 - Hasil konsesi adalah sebesar 3,5% dari pendapatan kotor pengoperasian APBS.
 - Hasil konsesi tersebut disetorkan ke Kas Negara sebagai penerimaan Negara Bukan Pajak atas nama Pihak Pertama setiap bulan selambat-lambatnya 15 hari pada bulan berikutnya.

7. *Work Implementation*
Work Implementation : The Second Party will carry out the Capital Dredging according to the dredging schedule for 12 months commenced since the approval of Detail Engineering Design (DED) and the publication of Dredging Work Permit (SIKK) and Foreign Ship Usage Permit (IPKA).
8. *Statement of Ready for Operation*
After the construction of APBS is declared completed, a trial on APBS Services Usage system and procedure will be tested first. After testing, the construction of APBS is declared completed, then the First Party will issue the Statement of Ready for Operations.
9. *Concession Rights and Payment Procedures*
- *Concession fees acquired by the First Party are compensation from the Second Party, in relation to the grant of concession for preparation and APBS services usage.*
 - *Concession fees are 3.5% from the gross income of APBS operational.*
 - *Concession fees are then remitted to the State Treasury as a non-tax revenue on behalf of First Party every month, not later than 15 (fifteen) days on the following months.*

Berdasarkan Surat dari Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak Surabaya No. PP.204/01/17/OP.TPr-15 tanggal 5 November 2015, tentang Pernyataan Siap Operasi APBS, dengan memperhatikan Berita Acara Pembahasan Lanjutan Hasil Survey Pemeriksaan dan Pengujian Pekerjaan Pengerukan APBS tanggal 15 Mei 2015 dan hasil uji coba Sispro Pelayaran Penggunaan APBS yang telah dilakukan mulai tanggal 1 Juni - 31 Agustus 2015, maka alur baru APBS dinyatakan siap operasi. Pemungutan tarif jasa pengguna APBS dapat dilakukan 2 (dua) hari setelah pelaksanaan sosialisasi kepada para pengguna APBS.

Based on the letter from the Main Port Authority Office of Tanjung Perak Surabaya No. PP.204/01/17/OP.TPr-15 dated November 5, 2015, regarding the Statement of Operations Prepared by APBS, having regarded the Minutes of Discussion Continued Examination Survey Results and Testing Works Dredging of APBS dated May 15, 2015 and the results of trials Sispro Shipping Use APBS which was conducted from June 1 - August 31, 2015, the new access to APBS declared ready for operations. Collection of tariffs on APBS service users can be done in two (2) days after the implementation of socialization to the APBS.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) AND
SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2017, 2016 and 2015
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

**43. Perjanjian-Perjanjian dan Ikatan Penting
(Lanjutan)**

43. Agreements and Commitments (Continued)

- b. Sesuai Kontrak No. HK.0502/67/P.III-2013 tanggal 1 Maret 2013 yang telah diperbarui dengan kontrak Addendum V No.HK.0502/497.1/P.III-2016 tanggal 18 Agustus 2016 Perusahaan (Pihak Kesatu) melakukan Kontrak Pekerjaan Pengadaan 10 (Sepuluh) unit *Ship To Shore (STS) Crane* Baru untuk Terminal Teluk Lamong Surabaya, dengan *Konecranes Finland Corporation* (Pihak Kedua).

- b. According to the contract No. HK.0502/67/P.III-2013 dated on March 1, 2013, which has been updated with Addendum V No.HK.0502/497.1/P.III-2016, dated August 18, 2016, the Company (First Party) entered into a purchase contract of 10 (ten) units of *Ship To Shore (STS) New Cranes for Terminal Teluk Lamong Surabaya, with Konecranes Finland Corporation (Second Party).*

Perusahaan di Negara Republik Finlandia dengan ruang lingkup pengadaan alat, pekerjaan perakitan dan pendirian *STS Crane*, Pengetesan dan pengujian Peralatan. Harga untuk ruang lingkup (Phase 1,2 dan suku cadang) adalah sebesar USD77,476,499 (angka penuh) tidak termasuk PPN Impor, PPh Impor dan Bea Impor. Harga untuk phase I merupakan harga tetap (*fixed price*). Pihak kedua harus menyediakan perlindungan asuransi untuk kerusakan yang timbul terhadap barang - barang milik Perusahaan dan pihak lain selama berlangsungnya pelaksanaan Pengadaan sampai dengan tanggal Berita Acara Penyelesaian. Masa garansi untuk setiap unit *STS Crane* adalah 365 hari kalender sejak PHO dari masing-masing *STS Crane*.

The Company in the Republic of Finland with the scope of equipment procurement, assembly work and the establishment of STS Crane, Testing and testing of Equipment. The price for the scope (Phase 1,2 and spare parts) amounted to USD77,476,499 (full amount) excluding Import VAT, Import Tax and Import Duty. The price for phase I is fixed price. The second party must provide insurance coverage for damage caused to the goods of the Company and other parties during the implementation of the procurement until the date of the Minutes of Settlement. The warranty period for each unit of STS Crane extends within working calendar of 365 days from the PHO for each STS Crane.

Pekerjaan tersebut telah mencapai tingkat penyelesaian 100% pada tanggal 3 Maret 2017.

The Work has reached stage of 100% completion March 3, 2017.

- c. Sesuai Kontrak No. HK.0502/68/P.III-2013 tanggal 1 Maret 2013 yang telah diperbarui dengan kontrak Addendum IV No. SP2.113.1/HK.0502/P.III-2017 tanggal 10 Mei 2017, Perusahaan (Pihak kesatu) melakukan Kontrak Pekerjaan Pengadaan 20 Automated Stacking Crane (ASC) Baru dan 5 (lima) Straddle Carries (SC) baru untuk Terminal Teluk Lamong Surabaya, dengan *Konecranes Finland Corporation* (Pihak Kedua) Perusahaan di Negara Republik Finlandia dengan ruang lingkup pengadaan alat, pemasangan dan Instalasi, Pengetesan dan pengujian peralatan dan masa garansi dengan harga ruang lingkup (Phase 1 dan 2) sebesar USD71,578,892 (angka penuh) tidak termasuk PPN Impor, PPh Impor dan bea masuk impor.

- c. According to the contract of work No. HK.0502/68/P.III-2013 dated March 1, 2013, which has been updated with Addendum IV No.SP2.113.1/HK.0502/P.III-2017 dated May 10, 2017, the Company (First party) signed a Procurement Contracts of 20 New Automated Stacking Cranes (ASC) and five (5) new Straddle Carries (SC) for Terminal Teluk Lamong Bay Surabaya, with *Konecranes Finland Corporation (Second Party), a company in Republic of Finlandia with business scope of procurement of tools, mounting and Installation, Testing and equipment test and warranty period at a price scope (Phase 1 and 2) amounting to USD71,578,892 (full amount) exclusive of import VAT, income tax and import duties.*

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) AND
SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2017, 2016 and 2015
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

**43. Perjanjian-Perjanjian dan Ikatan Penting
(Lanjutan)**

43. Agreements and Commitments (Continued)

Untuk menjamin dilaksanakannya perjanjian ini maka pihak kedua wajib menyerahkan jaminan pelaksanaan kepada Perusahaan senilai USD3,299,905 (angka penuh). Selain itu pihak kedua harus menyediakan perlindungan asuransi untuk kerusakan yang timbul terhadap barang-barang milik Perusahaan dan pihak lain selama berlangsungnya pelaksanaan pengadaan sampai dengan tanggal Berita Acara Penyelesaian.

In order to guarantee the execution of this agreement, the second party was required to deliver the implementation guarantee to the Company amounting to USD3,299,905 (full amount). In addition, the second party has to provide insurance coverage for any damages arising from the goods of the Company and other parties during the implementation of procurement until the date of the Minutes of Completion.

Pekerjaan tersebut telah mencapai tingkat penyelesaian 100% pada tanggal 22 November 2017.

The Work has reached 100% stage of completion on March 3, 2017.

- d. Sesuai Kontrak No.HK.0502/405/P.III-2015 tanggal 11 September 2015, Perusahaan (pihak kesatu) melakukan kontrak pekerjaan Pengadaan Kapal Tunda 2 x 1500 HP Dan 2 x 2400 HP Milik Perusahaan Paket 1 dengan PT Daya Radar Utama (Pihak kedua) dengan ruang lingkup pengadaan 6 (enam) unit Kapal Tunda dengan daya 2 x 1500 HP dan 2 (dua) unit Kapal Tunda dengan daya 2 x 2400 HP.

- d. *According to the contract No. HK.0502/405/P.III-2015 dated on September 11, 2015, the Company (First party) entered into contract work for Procurement of Tug Boat 2 x 1500 HP and Tug Boat 2 x 2400 HP the Company Package 1 with PT Daya Radar Utama (Second party). With scope of property for the procurement of 6 (six) Tug Boat 2 x 1500 HP and 2 (two) Tug Boat 2 x 2400 HP.*

Harga pekerjaan tersebut sebesar Rp350.670.392 belum termasuk PPN 10% dengan kontrak harga satuan yang tetap. Perjanjian ini telah di perbaharui terakhir dengan Berita Acara Rapat addendum IV No. BA.184.2/LG.0302/PMO.KT-2017 tanggal 20 Oktober 2017 dengan memperpanjang jangka waktu pekerjaan sampai dengan 29 Maret 2018.

The cost for scope of work amounted to Rp350,670,392 excluding VAT 10% at the contract unit price. This contract has been updated with minutes meeting Addendum IV No. BA.184.2/LG.0302/PMO.KT-2017 dated October 20, 2017 by extending the working period untill March 29, 2018.

Pihak kedua harus menyediakan perlindungan asuransi untuk kerusakan yang timbul terhadap barang-barang milik Perusahaan dan pihak lain selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan sampai dengan tanggal Berita Acara Penyelesaian. Masa pemeliharaan ditetapkan selama 12 (dua belas) bulan kalender sejak berita acara serah terima pertama.

The second party would provide insurance coverage for the possible damages of the goods during the implementation of the acquisition date of the minutes of settlement. Maintenance period is 12 (twelve) months from the minutes of hand over.

Pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 kemajuan pekerjaan tersebut telah mencapai tingkat penyelesaian sebesar 92.25% dan 60,87%.

As of December 31, 2017 and December 31, 2016 the Work in Progress has reached 92.25% and 60.87% level of completion, respectively.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) AND
SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2017, 2016 and 2015
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

**43. Perjanjian-Perjanjian dan Ikatan Penting
(Lanjutan)**

43. Agreements and Commitments (Continued)

- e. Sesuai kontrak No. HK.0502/221/P.III-2015 tanggal 27 Mei 2015, yang telah diperbaharui dengan Addendum IV HK.0502/428.1/P.III-2016 tanggal 13 September 2016, perusahaan (pihak kesatu) melakukan kontrak pekerjaan pengadaan 4 (empat) unit Harbour Portal Crane dan 1 (satu) unit Harbour Mobile Crane dengan Italgro S.r.l (pihak kedua) dengan nilai kontrak sebesar EUR16,886,000 (angka penuh) dengan metode CIF. Pihak Kedua harus menyediakan perlindungan asuransi all risk dengan nilai pertanggungan sebesar 110% dari harga kontrak secara PRO RATA selama berlangsungnya pelaksanaan pengadaan sampai dengan tanggal Berita Acara Penyelesaian. Masa garansi untuk setiap unit alat adalah selama 2 tahun sejak PHO dari masing-masing alat.

Pekerjaan tersebut telah mencapai tingkat penyelesaian 100% pada tanggal 19 Desember 2016.

- f. Sesuai Kontrak No.HK.0502/268/P.III-2015 tanggal 30 Juni 2015, yang telah diperbarui dengan kontrak Addendum II No.SP2.227/HK.0502/P.III-2017 tanggal 20 November 2017, Perusahaan (pihak kesatu) melakukan kontrak pekerjaan pengadaan 9 (sembilan) Unit New Automated Rubber Tyred Gantry Crane (A-RTG) untuk TPKS dengan Konecranes Finland (pihak kedua) dengan nilai kontrak sebesar USD20,450,244.50 (angka penuh) dengan metode DDU (*Delivery Duty Unpaid*) dan jatuh tempo pada tanggal 30 Desember 2018.

Pihak kedua harus menyediakan perlindungan asuransi *all risk* dengan nilai pertanggungan sebesar 110% dari harga kontrak selama berlangsungnya pelaksanaan pengadaan sampai dengan tanggal Berita Acara Penyelesaian. Masa garansi untuk setiap unit alat adalah selama 365 hari kalender sejak PHO dari masing-masing alat.

Pada 31 Desember 2017, kemajuan pekerjaan tersebut masih mencapai tingkat penyelesaian sebesar 57%.

- e. According to the contract No. HK.0502/221/P.III-2015 on May 27, 2015, which was amended by Addendum IV HK.0502/ 428.1/ P.III-2016 dated September 13, 2016, the Company (First Party) signed a procurement contract of 4 (four) units of Harbour Portal Crane and 1 (one) unit of Harbour Mobile Crane with Italgro S.r.l (Second Party) with the contract value amounting to EUR16,886,000 (full amount) adopting method of CIF (Cost, Insurance and Freight). The Second Party shall provide an all risk insurance protection with coverage value of 110% of contract price with PRO RATA basis during the procurement until the date of Provisional Hand Over. Warranty period for each crane is 2 (two) years since PHO of each crane.

The Work has reached 100% stage of completion on December 19, 2016.

- f. According to contract No.HK.0502/268/P.III-2015 dated June 30, 2015, which has been amended with addendum II No. SP2.227/HK.0502/P.III-2017 dated November 22, 2017, the Company (first party) signed a procurement contract of 9 (Nine) Units of Rubber Tyred Gantry (Automated) Crane for TPKS with Konecranes Finland (second party) with contract value amounting to USD20,450,244.50 (full amount) adopting method of DDU (*Delivery Duty Unpaid*) and due date on December 30, 2018.

The Second Party shall provide an all risk insurance protection with coverage value of 110% of the contract price until the date of Provisional Hand Over. Warranty period for each crane is 365 calendar days since PHO of each crane.

As of December 31, 2017, the procurement progress has reached 57% stage completion.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) AND
SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2017, 2016 and 2015
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

**43. Perjanjian-Perjanjian dan Ikatan Penting
(Lanjutan)**

43. Agreements and Commitments (Continued)

g. Sesuai Kontrak No.HK.0502/445/P.III-2015 tanggal 5 Oktober 2015, Perusahaan (pihak kesatu) melakukan kontrak Pekerjaan Pengadaan Kapal Tunda 2 x 1000 HP Dan 2 x 1800 HP Milik Perusahaan Paket 2 dengan PT Dumas Tanjung Perak Shipyards (pihak kedua) dengan ruang lingkup pengadaan 3 (tiga) unit Kapal Tunda dengan daya 2 x 1000 HP dan 4 (empat) unit Kapal Tunda dengan daya 2 x 1800 HP. Harga pekerjaan tersebut sebesar Rp306.573.748 belum termasuk PPN 10% dengan kontrak harga lumpsum. Pihak kedua harus menyediakan perlindungan asuransi untuk kerusakan yang timbul terhadap barang-barang milik Perusahaan dan pihak lain selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan sampai dengan tanggal Berita Acara Penyelesaian. Masa pemeliharaan ditetapkan selama 12 (dua belas) bulan kalender sejak berita acara serah terima pertama. Perjanjian ini telah di perbaharui terakhir dengan berita acara rapat addendum IV No. BA.184.3/LG.0302/PMO.KT-2017 tanggal 20 Oktober 2017 dengan merubah jangka waktu pekerjaan sampai dengan Bulan April 2018.

g. According to the contract No. HK.0502/445/P.III2015 dated on October 5, 2015, the Company (first party) entered into contract Work for Procurement of Tug Boat 2 x 1000 HP and Tug Boat 2 x 1800 HP property for the Company Package 2 with PT Dumas Tanjung Perak Shipyards (second party) with scope of the work is procurement of 3 three) Tug Boat 2 x 1000 HP and 4 (four) Tug Boat 2 x 1800 HP. The cost for scope of work amounted to Rp306,573,748 excluding VAT 10% at the contract lumpsum price. The second party would provide insurance coverage for the possible damages of the goods during the implementation of the acquisition date of the minutes of settlement. Maintenance period is 12 (twelve) months from minutes of hand over. This contract has been updated with minutes meeting of Addendum IV No. BA.184.3/LG.0302/PMO.KT-2017 dated October 20, 2017 by extending working period until April, 2018.

Pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 kemajuan pekerjaan tersebut telah mencapai tingkat penyelesaian sebesar 96% dan 62,06%.

As of December 31, 2017 and December 31, 2016 the work progress has reached a completion rate of 96% and 62.06%, respectively .

h. Sesuai Kontrak No.HK.0502/19/P.III-2015 tanggal 15 Januari 2015, dan telah diperharui dengan Addendum I No.SP2.11/HK.0502/P.III-2017 tanggal 15 Januari 2017, Perusahaan (pihak kesatu) melakukan kontrak pekerjaan Pengadaan Konsep Desain, Preliminary Desain & Kontrak Desain (Gambar Klas Approval) untuk 15 unit Kapal Tunda Type SRP dengan Robert Allan Ltd. (pihak kedua) Perusahaan di Kanada dengan ruang lingkup Konsep Desain, Preliminary Desain & Kontrak Desain serta Class Approval.

h. According to the contract No.HK.0502/19/P.III-2015 dated on January 15, 2015, and has been updated with addendum II No. SP2.11/HK.0502/P.III-2017 dated January 15, 2017, the Company (first party) entered into contract work for Procurement of Concept Design, Preliminary Design And Contract Design (Class Approval Drawing) For 15 Units of Harbour Tug Type SRP with Robert Allan Ltd (second party) the scope of the work is Concept Design, Preliminary Design And Contract Design.

Harga pekerjaan tersebut sebesar USD1,323,002 (angka penuh) termasuk pajak-pajak yang berlaku di negara Kanada dengan kontrak harga lumpsum dan untuk Class Approval akan ditagihkan secara at cost. Pihak kedua harus menyediakan tenaga engineer dalam rangka memberikan konsultasi dan kunjungan ke Indonesia selama masa pembangunan kapal.

The cost for scope of work amounted to USD1,323,002 (full amount) including tax that is applicable in Canada at the contract lumpsum price and for the Class Approval would be at cost. The second party is obliged to provide engineer to give consultation and visit Indonesia during vessel construction.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) AND
SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2017, 2016 and 2015
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

**43. Perjanjian-Perjanjian dan Ikatan Penting
(Lanjutan)**

43. Agreements and Commitments (Continued)

Pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 kemajuan pekerjaan tersebut telah mencapai tingkat penyelesaian sebesar 99,48% dan 99,48%.

As of December 31, 2017 and December 31, 2016 the work progress has reached a completion rate of 99.48% and 99.48%.

- i. Sesuai Kontrak No.HK.0502/211/P.III-2015 tanggal 22 Mei 2015, Perusahaan (pihak kesatu) melakukan kontrak pekerjaan Pengadaan Mesin Induk dan Sistem Propulsi Kapal Tunda dengan PT Tesco Indomaritim (pihak kedua) dengan ruang lingkup pengadaan mesin induk dan sistem propulsi dan perlengkapannya, pengadaan suku cadang utama dan suku cadang standar pemakaian 2000 jam, pengujian, supervisi pemasangan dan sertifikasi *Class Lloyd Register*. Harga pekerjaan tersebut sebesar USD27,570,000 (angka penuh) tidak termasuk PPN 10% Import, PPh Import, Bea Masuk Import serta pajak-pajak lainnya terkait dengan kondisi *Delivery at Place* dengan kontrak harga satuan. Pihak kedua harus menyediakan perlindungan asuransi *all risk* untuk pengangkutan / pengapalan Mesin Induk dan Sistem Propulsi sampai ke lokasi tujuan.

- i. According to the contract No. HK.0502/211/P.III2015 dated on May 22, 2015, the Company (first party) entered into contract work Supply Main Engine and Propulsion System for Tug Boat with PT Tesco Indomaritim (second party) the scope of the work is procurement of main engines and propulsion systems and equipment, procurement of major spare parts and spare parts 2000 hours of usage standards, testing, installation supervision and certification of Class Lloyds Register. The cost for scope of work amounted to USD27,570,000 (full amount) excluding VAT 10% Import, Import Tax, Import Duties and taxes - other taxes associated with the condition *Delivery at Place* at the contract unit price. The second party would provide insurance coverage for the possible damages of the goods during the implementation of the acquisition date of the minutes of settlement.

Masa pemeliharaan ditetapkan selama 6 (enam) bulan kalender untuk pemasangan dan 12 (dua belas) bulan untuk masa garansi sejak berita acara serah terima pertama. Perjanjian ini telah diperbaharui terakhir sesuai dengan berita acara rapat addendum II No BA.196.1/TR.0101/PMO.KT-2017 tanggal 4 April 2017 dengan memperpanjang waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan *sea trial* dari galangan.

Maintenance period is for 6 (six) months and warranty period is 12 (twelve) months from the minutes of hand over. This contract has been updated with minutes of meeting of addendum II No. BA.196.1/TR.0101/PMO.KT-2017 dated April 4, 2017 by extending the working periods untill sea trial from shipyards.

Pada 31 Desember 2017 dan 2016 kemajuan pekerjaan tersebut telah mencapai tingkat penyelesaian sebesar 87% dan 85%.

As of December 31, 2017 and 2016 the work in progress has reached a completion rate of 87% and 85%.

- j. Sesuai Perjanjian Pemborongan No. HK.0502/64/P.III-2015 tanggal 10 Februari 2015, yang telah diperbaharui dengan addendum III No. HK.0502/574.1/P.III-2016 tanggal 6 Desember 2016 antara Perusahaan dengan PT Adhi Karya (Persero) Tbk untuk Pekerjaan Pembangunan Dermaga Curah Cair di Pelabuhan Celukan Bawang, dengan harga borongan seluruh pekerjaan tersebut adalah sebesar Rp103.188.348 (termasuk PPN 10%)

- j. According to Chartering Agreement No. HK.0502/64/P.III-2015 dated February 10, 2015 and has been renewed by addendum III No.HK.0502/574.1/P.III-2016 dated December 6, 2016, between the Company and PT Adhi Karya (Persero) Tbk for the Development Works Bulk Liquid Jetty at Port Celukan Bawang, at wholesale price throughout the work amounted to Rp108,188,348 (including VAT 10%) with a term of execution of work 300

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) AND
SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2017, 2016 and 2015
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

**43. Perjanjian-Perjanjian dan Ikatan Penting
(Lanjutan)**

43. Agreements and Commitments (Continued)

dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 300 hari kalender terhitung sejak tanggal Berita Acara Mulai Pekerjaan. Masa Pemeliharaan 180 hari kalender terhitung sejak Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (BAST-I).

calendar days from the date of the Minutes of Commencement of Works. Maintenance period is for 180 calendar days from the Handover of Work (BAST-I).

Tambahan Jaminan pelaksanaan atas pekerjaan ini telah diserahkan pada tanggal 19 Desember 2016 No.MBG666055884116N dengan nilai sebesar Rp5.159.417 dengan masa berlaku sampai tanggal 14 Februari 2017.

Additional Guarantee for the implementation of this work has been submitted on December 19, 2016 with No.MBG666055884116N for a value amounting to Rp5,159,417 with a validity period until the date of February 14, 2017.

Pekerjaan tersebut telah mencapai tingkat penyelesaian 100% pada tanggal 31 Maret 2017 sesuai Berita Acara No. BA.20.3/15.03/CBW-2017.

The work has reached 100% stage of completion on March 31, 2017 based on the minutes of hand over No.BA.20.3/15.03/CBW-2017.

- k. Sesuai Perjanjian Pemborongan No. HK.0502/352/P.III-2015 tanggal 13 Agustus 2015, antara Perusahaan dengan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk pekerjaan pembangunan *Container Yard (CY)* Tahap 2 di Terminal Teluk Lamong, dengan harga borongan seluruh pekerjaan tersebut adalah sebesar Rp358.027.658 (termasuk PPN 10%) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ditetapkan selama 18 bulan kalender terhitung sejak Berita Acara Mulai Pekerjaan. Masa pemeliharaan ditetapkan selama 12 bulan kalender terhitung sejak Berita Acara Serah Terima Pekerjaan I (BAST I). Perjanjian ini telah diperbarui dengan Addendum II No.SP2.21/HK.0502/P.III-2017 tanggal 17 Februari 2017 dengan merubah harga kontrak menjadi sebesar Rp379.863.259 (termasuk PPN 10%).

- k. *According with Chartering Agreement No. HK.0502/ 352/P.III-2015 dated August 13, 2015, between the Company and PT Wijaya Karya (Persero) Tbk for construction work Container Yard (CY) Phase 2 in Terminal Teluk Lamong, at wholesale price throughout the work amounted to Rp358,027,658 (including VAT 10%) with a term of execution of work specified for 18 calendar months commencing from the Minutes of Commencement of Works. Maintenance period was set for 12 calendar months starting from the handover of Works I (BAST I). This contract has been renewed by addendum II No.SP2.21/HK.0502/P.III-2017 dated February 17, 2017 with amount of contract transformed to Rp379,863,259 (including VAT 10%).*

Pekerjaan tersebut telah mencapai tingkat penyelesaian 100% pada tanggal 5 April 2017 sesuai berita acara No.BA.05/PTL/IV-2017.

The work has reached 100% stage of completion on April 5, 2017 based on the minutes of hand over No.BA.05/PTL/IV-2017.

- i. Sesuai Perjanjian Pemborongan No. HK.0502/548.1/ P.III-2015 tanggal 2 Desember 2015, yang diperbarui dengan addendum II No.SP2.248.1/HK.0502/P.III-2017 tanggal 20 November 2017 antara Perusahaan dengan Gaussin SA untuk pekerjaan Pengadaan 11 Unit Automatic Docking Station pada Lapangan Penumpukan ASC di Terminal Teluk Lamong Surabaya, dengan harga borongan seluruh pekerjaan tersebut adalah sebesar

- i. *According to the contract No.HK.0502/548.1/P.III-2015 dated on December 2, 2015, has been updated with addendum II No. SP2.248.1HK.0502/P.III-2017, dated November 20, 2017, the Company (First party) entered into a purchase contract of 11 unit Automatic Docking Station at the ASC Depository Ground at Lamong Bay Terminal Surabaya, with the all-inclusive price of the work amounting to USD7,840,550 (full amount)*

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) AND
SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2017, 2016 and 2015
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

**43. Perjanjian-Perjanjian dan Ikatan Penting
(Lanjutan)**

43. Agreements and Commitments (Continued)

USD7,840,550 (nilai penuh) belum termasuk biaya kepabeanan, pajak-pajak dan biaya lain dengan kondisi pengangkutan *Delivery Duty Unpaid (DDU)* dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ditetapkan selama 24 bulan kalender terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian sampai PHO. Masa pemeliharaan ditetapkan selama 1 tahun kalender terhitung sejak Berita Acara Serah Terima Pekerjaan I (BAST I) untuk setiap Automatic Docking Station.

excluding customs fees, taxes and other charges under Delivery Duty Unpaid (DDU) transportation conditions with a working period is set for 24 calendar months commencing from the date of signing the agreement until PHO. The maintenance period is set for 1 calendar year as of the Minutes of the Handover of Work I (BAST I) for each Automatic Docking Station.

Pada tanggal 31 Desember 2017 progres pekerjaan tersebut telah mencapai tingkat penyelesaian sebesar 90%.

As of December 31, 2017 the works progress had reached a completion rate of 90%.

- m. Sesuai Perjanjian Pemborongan No. HK.0502/329/P.III-2016 tanggal 31 Agustus 2016 yang telah diperharui dengan addendum II No. SP2.238.1/HK.0502/P.III-2017 tanggal 6 November 2017 antara Perusahaan dengan PT Nindya Karya (Persero) untuk pekerjaan pembangunan perpanjangan dermaga multipurpose dan revitalisasi dermaga IV di Pelabuhan Tanjung Intan, dengan harga borongan seluruh pekerjaan adalah sebesar Rp51.470.000 (termasuk PPN) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 365 hari kalender sejak ditandatanganinya Berita Acara Mulai Pekerjaan. Masa pemeliharaan ditetapkan 365 hari kalender sejak Berita Acara Serah Terima Pekerjaan I (BAST I).

- m. *According with Chartering Agreement No. HK.0502/329/P.III-2016 dated August 31, 2016 and has been update with addendum II No.SP2.238.1/HK.0502/P.III-2017 dated November 6,2017, between the Company and PT Nindya Karya (Persero) Tbk for construction work of the extension and revitalization of Pier IV at Tanjung Intan Port, at wholesale price of all work amounted to Rp51,470,000 (incl. VAT) for a period of 365 calendar days from the signing of the Minutes of Work Beginning. The maintenance period is set 365 calendar days since the Official Report on the Submission of Works I (BAST I).*

Pekerjaan tersebut telah mencapai tingkat penyelesaian 100% pada tanggal 14 November 2017 sesuai Berita Acara No.BA.10/TEK/RVD.IV/X/2017.

The work has reached 100% stage of completion on April 5, 2017 based on the minutes of hand over No. BA.10/TEK/RVD.IV/X/2017.

- n. Sesuai Perjanjian Pemborongan No. HK.0502/372/P.III-2016 tanggal 23 September 2016 yang telah diperbaharui dengan addendum II No.SP2.210.1/HK.0502/P.III-2017 tanggal 6 Oktober 2017 antara Perusahaan dengan PT SAC Nusantara - PT Bentang Alam Nusantara Jo untuk pekerjaan pembuatan *retaining wall* di Marina Boom Banyuwangi, dengan harga borongan seluruh pekerjaan Rp31.267.910 (termasuk PPN) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 342 hari kalender terhitung sejak Berita Acara Mulai Pekerjaan. Masa Pemeliharaan ditetapkan 9 bulan kalender sejak Berita Acara Serah Terima I (BAST I).

- n. *According with Chartering Agreement No. HK.0502/372/P.III-2016 dated September 23, 2016 and has been updated with addendum II No.SP2.210.1/HK.0502/P.III-2017 dated October 6,2017, between the Company and PT SAC Nusantara - PT Bentang Alam Nusantara Jo for construction work retaining wall at Marina Boom Banyuwangi, at wholesale prices throughout the work amounted to Rp31,267,910 (including VAT 10%) with a term of execution of work specified for 342 days calendar commencing from the Minutes Start Works. Maintenance period was set for 9 calendar months starting from the handover of Work I (BAST I).*

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) AND
SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2017, 2016 and 2015
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

**43. Perjanjian-Perjanjian dan Ikatan Penting
(Lanjutan)**

43. Agreements and Commitments (Continued)

Pekerjaan tersebut telah mencapai tingkat penyelesaian 100% pada tanggal 20 Oktober 2017 sesuai Berita Acara No.BAST.01/PMO-I/X/TWI-2017.

The work has reached 100% stage of completion on October 20, 2017 based on the minutes of hand over No. BAST.01/PMO-I/X/TWI-2017.

- o. Sesuai Perjanjian Pemborongan No. HK.0502/66.1/P.III-2016 tanggal 2 Maret 2016 yang telah diperbaharui dengan addendum I No. 0502/403/P.III-2016 tanggal 3 Oktober 2016 antara Perusahaan dengan PT Konsulindo Informatika Perdana untuk pekerjaan pengadaan Implementor *Enterprise Resource Planning (ERP)* dan *Hardware* Pendukung, dengan harga borongan awal seluruh pekerjaan Rp74.341.586 (termasuk PPN) berubah menjadi Rp81.695.144 (termasuk PPN) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 10 bulan kalender terhitung sejak *Kickoff meeting* yang dilakukan oleh para pihak. Masa Pemeliharaan ditetapkan 12 bulan kalender sejak *Go live* sistem ER PSAP.

- o. *According with Chartering Agreement No. HK.0502/ 66.1/P.III-2016 dated March 2, 2016, has been update with addendum I No. 0502/403/P.III-2016 dated October 3, 2016 between the Company and PT Kondulindo Informatika Perdana for implementor work of ERP and Supportinghardware, at wholesale price throughout the work amounted to Rp74,341,568 (including VAT) and then transformed to Rp81,695,144 (Including VAT) with a term of execution of work specified for 10 calendar months commencing from Kickoff meeting. Maintenance period was set for 10 calendar months starting from Go live of ER PSAP System.*

Perjanjian ini telah diperbarui dengan addendum III No. SP2.103.1/HK.0502/P.III-2017 tanggal 12 Juni 2017 antara perusahaan dengan PT Konsulindo Informatika Perdana untuk pekerjaan pengadaan implementor *Enterprise Resource Planning (ERP)* dan *hardware* pendukung, dengan harga kontrak Rp80.570.944 dan jangka waktu pekerjaan 10 bulan kalender terhitung sejak *kickoff meeting* dan dilakukan penambahan 270 hari kalender berubah menjadi pekerjaan ditetapkan selama 270 hari terhitung sejak berakhirnya perjanjian induk. Jaminan pelaksanaan berlaku selama 330 hari kalender terhitung sejak tanggal jangka waktu jaminan pelaksanaan yang lama, jaminan paling lambat dibayar pada tanggal 20 Januari 2017.

This agreement has been update with addendum II No. SP2.103.1/HK.0502/P.III-2017 dated June 12, 2017 between the Company and PT Konsulindo Informatika Perdana for the work of procurement Enterprise Resource Planning (ERP) implementor and supporting hardware, with contract value amounting to Rp80.570.944 and 10 month work period starting from kick off meeting and an additional 270 calendar days shall be changed to a work established for 270 days from the date of the expiry of the master agreement. The execution guarantee is valid for 330 calendar days as from the date of the term of the old execution period, the guarantee is no later than paid on January 20, 2017.

Pekerjaan tersebut telah mencapai tingkat penyelesaian 100% pada tanggal 16 Juni 2017 sesuai Berita Acara No.BA.19/ERP/VI-2017.

The work has reached 100% stage of completion on June 16, 2017 based on the minutes of hand over No. BA.19/ERP/VI-2017.

- p. Sesuai Perjanjian Pemborongan No. HK.0502/35/P.III-2016 tanggal 19 Februari 2016 yang telah diperbarui dengan berita acara rapat addendum III No. BA.1941/TR.0101/PMO.KT-2017 tanggal 3 Maret 2017 antara Perusahaan dengan PT Tesco Indomaritim untuk pekerjaan

- p. *According with Chartering Agreement No. HK.0502/35/P.III-2016 dated February 19, 2016 which has been updated by minutes meeting of addendum III No. BA.1941/TR.0101/PMO.KT-2017 dated March 3, 2017 between the Company and PT Tesco Indomaritim for procurement of generator and*

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) AND
SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2017, 2016 and 2015
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

**43. Perjanjian-Perjanjian dan Ikatan Penting
(Lanjutan)**

43. Agreements and Commitments (Continued)

pengadaan mesin bantu generator dan eksternal *fire fighting system* kapal tunda, dengan harga borongan seluruh pekerjaan Rp94.886.000 (termasuk PPN) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan *sea trial* dari galangan. Masa Pemeliharaan ditetapkan 1 tahun kalender sejak Berita Acara Serah Terima I (BAST I).

external fire fighting system tugboat machines, at wholesale price of all work amounting to Rp94,886,000 (including VAT) for a working period until sea trial from shipyard. Maintenance period is set 1 calendar year since the Official Report of Handover I (BAST I).

Pada tanggal 31 Desember 2017 progres pekerjaan tersebut telah mencapai tingkat penyelesaian sebesar 87%.

As of December 31, 2017 the work in progress has reached a completion rate of 87%.

- q. Perjanjian Konsesi Antara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dengan Perusahaan tentang Pengusahaan Terminal Multipurpose Teluk Lamong di Surabaya.

- q. *The Concession Agreement Between the Ministry of Transport of the Republic of Indonesia with the Company regarding the Terminal Multipurpose Teluk Lamong Concession in Surabaya.*

Berdasarkan Perjanjian Konsesi antara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (pihak pertama) dengan Perusahaan (pihak kedua), tentang Pengusahaan Terminal Multipurpose Teluk Lamong tanggal 19 Mei 2015 No. HK.107/01/06/OP.TPr-15 dan No. HK.0501/95/P.III-2015, Perusahaan telah memperoleh Hak Konsesi dari Pihak Pertama untuk melakukan kegiatan penyediaan dan/atau pelayaran Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan di Terminal Multipurpose Teluk Lamong sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian ini, sebagai berikut:

Based on the Concession Agreement between the Ministry of Transport of the Republic of Indonesia (first party) with the Company (second party), on the Concession Terminal Multipurpose Teluk Lamong dated May 19, 2015 No. HK.107/01/06/OP.TPr-15 and No: HK.0501/95/P.III-2015, the Company obtained the concession right from the First Party to carry out activities in the provision and/or shipping Concession Ports Services in Terminal Multipurpose Teluk Lamong accordance with the provisions of this agreement, as follows:

1. Hak Konsesi tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.
2. Ruang Lingkup Perjanjian meliputi :
 - a. Pemberian konsesi untuk melakukan kegiatan Pengusahaan di Area Konsesi Terminal Multipurpose Teluk Lamong dengan luas sebesar 386,12 Ha, terdiri dari :
 - Lini I seluas 140 Ha sebagai Zona Operasi langsung terminal; dan
 - Lini II seluas 246,12 Ha sebagai Zona pendukung operasi terminal Lini I yang terbagi menjadi :
 - Zona Logistik (depo dan sentra distribusi dan konsolidasi barang) seluas ± 145,2 Ha;
 - Zona Industri (*Processing curah kering*) seluas ± 50,23 Ha; dan

1. *The Concession Rights are not transferable to another party.*
2. *The Scope of the Agreement included:*
 - a. *Concessions to conduct activities in the Area Exploitation The Concession Terminal Multipurpose Teluk Lamong with an area of 386.12 hectares, consists of:*
 - *Line I of 140 hectares as Operation Zone directly terminal; and*
 - *Line II Zone covering an area of 246.12 hectares as operations support terminal Lini I, which is divided into:*
 - *Logistic Zone (depots and distribution centers and consolidation items) covering an area of ± 145.2 Ha;*
 - *Industrial Zone (Processing dry bulk) covering an area of ± 50.23 Ha; and*

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) AND
SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2017, 2016 and 2015
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

**43. Perjanjian-Perjanjian dan Ikatan Penting
(Lanjutan)**

43. Agreements and Commitments (Continued)

-
- | | |
|--|--|
| <p>- Zona Industri (<i>Packaging dan supporting facilities</i> terminal petikemas) seluas \pm 50,69 Ha.</p> <p>b. Penggunaan tarif Jasa Kepelabuhanan pada Terminal Multipurpose Teluk Lamong dilakukan oleh Perusahaan selaku Pihak Kedua.</p> <p>c. Pembayaran pendapatan konsesi dari Perusahaan kepada Pihak Pertama atas pemberian konsesi yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak.</p> <p>d. Penyerahan Aset di Akhir Jangka Waktu Konsesi dari Perusahaan kepada Pihak Pertama berdasarkan Perjanjian ini.</p> <p>3. Jangka waktu konsesi adalah selama 72 (tujuh puluh dua) tahun, terhitung sejak tanggal diterbitkannya Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. PP.001/3/20/DPPL-14 perihal Uji Coba Operasional di Terminal Teluk Lamong yaitu pada tanggal 11 November 2014.</p> <p>4. Pelaksanaan konsesi, Kegiatan Pengusahaan di Area Konsesi pada Terminal Multipurpose Teluk Lamong oleh Perusahaan meliputi :</p> <p>a. Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Fasilitas pelabuhan di Area Konsesi;</p> <p>b. Kegiatan pemeliharaan meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none">• Pengaturan dan Penataan Wilayah pada Area Konsesi ; dan• Pelaksanaan Kegiatan pemeliharaan Aset di Area Konsesi. <p>c. Kegiatan pengoperasian meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none">• Penyediaan jasa kepelabuhanan di Area Konsesi yang merupakan area pelaksanaan kegiatan kepelabuhanan di Terminal Multipurpose Teluk Lamong; | <p>- <i>Industrial Zone (Packaging container terminal and supporting facilities)</i> covering an area of \pm 50.69 Ha.</p> <p>b. <i>Usage rates of Multipurpose Terminal Services Ports in the Gulf Lamong conducted by the Company as the second party.</i></p> <p>c. <i>The concession revenue payments from the Company to the First Party on the granting of concessions which are Non Tax Revenue.</i></p> <p>d. <i>Submission of Assets at the End of the Period of the Concession of the Company to the First Party under this Agreement.</i></p> <p>3. <i>Period of the concession was for 72 (seventy-two) years, commencing from the date of issuance of the Director General of Sea Transportation No. PP.001/3/20/DPPL-14 concerning Trial Operations at Terminal Lamong Bay was on November 11, 2014.</i></p> <p>4. <i>Implementation of concessions, Exploitation Activities in the concession area in the Terminal Multipurpose Teluk Lamong by the Company included:</i></p> <p>a. <i>Building Activities and Development of port Facilities in the The Concession Area;</i></p> <p>b. <i>Maintenance activities include:</i></p> <ul style="list-style-type: none">• <i>Settings and Regional Planning at the Concession Area; and</i>• <i>Implementation of maintenance activities Assets Concession Area.</i> <p>c. <i>Operating activities include:</i></p> <ul style="list-style-type: none">• <i>The provision of port services in the Concession Area which is the area of implementation of the port Terminal Multipurpose Teluk Lamong;</i> |
|--|--|

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) AND
SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2017, 2016 and 2015
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

**43. Perjanjian-Perjanjian dan Ikatan Penting
(Lanjutan)**

43. Agreements and Commitments (Continued)

-
- Penyediaan jasa pendukung pelaksanaan kegiatan kepelabuhanan di Terminal Multipurpose Teluk Lamong, termasuk tetapi tidak terbatas pada kegiatan pelayanan konsolidasi dan distribusi;
 - Memberikan masukan terhadap penyusunan standar kinerja dan sistem pelayanan kepelabuhanan di area Konsesi yang merupakan area pelaksanaan kegiatan kepelabuhanan di Terminal Multipurpose Teluk Lamong yang ditetapkan oleh pihak pertama;
 - Penyusunan, penetapan dan pemungutan tarif pelayanan jasa kepelabuhanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Pemanfaatan wilayah perairan di sekitar Area Konsesi untuk keperluan operasional Terminal Multipurpose Teluk Lamong;
 - Penyediaan dan pengusahaan tanah di Area Konsesi.
5. Pendapatan Konsesi;
Pihak Kedua membayar kepada pihak pertama pendapatan konsesi yang diperoleh dari kegiatan Pengusahaan Terminal Multipurpose Teluk lamong sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang disetor ke Kas Negara.
- Besaran Pendapatan Konsesi Pengoperasian Terminal Multipurpose Teluk Lamong sebesar 2,5% per tahun dari presentase pendapatan kotor/bruto dari pelaksanaan kegiatan konsesi pengusahaan Terminal Multipurpose Teluk Lamong sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian ini.
- Pendapatan konsesi akan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan selambat-lambatnya pada tanggal 15 pada bulan pertama per triwulannya.
- *Provision of services to support the implementation of port activities in the Terminal Multipurpose Teluk Lamong, including but not limited to activities service consolidation and distribution;*
 - *Provide input to the development of performance standards and service systems in the area of port Concession which is the area of implementation of the port Terminal Multipurpose Teluk Lamong set by the first party;*
 - *Preparation, determination and collection services rates of port services in accordance with the provisions of legislation;*
 - *The utilization of the waters around the Concession Area for operational purposes Terminal Teluk Lamong Multipurpose;*
 - *Provision and exploitation of land in the Concession Area.*
5. *The Concessions Revenue;*
Second parties pay to the first party concession revenues derived from activities Concession Terminal Multipurpose Teluk Lamong as Non Tax Revenue (non-tax) paid to the State Treasury.
- Revenue Amount of Concession The Operation of Lamong Lamong Multipurpose Terminal is 2.5% per annum from the gross /gross revenue percentage of the concession operation of Lamong Bay Multipurpose Terminal in accordance with the provisions of this agreement.*
- Concession revenues will be paid every 3 (three) months at the latest by the 15th of the first month per quarterly.*

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) AND
SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2017, 2016 and 2015
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

**43. Perjanjian-Perjanjian dan Ikatan Penting
(Lanjutan)**

43. Agreements and Commitments (Continued)

6. Kerjasama Dengan Pihak Lain
Perusahaan diberikan hak untuk melakukan kerjasama dengan Pihak lain dan/atau bermitra atau menugaskan Badan Usaha atau Anak Perusahaan yang mempunyai kemampuan dan kompetensi untuk melaksanakan suatu bagian atau bagian-bagian kegiatan perusahaan Terminal Multipurpose Teluk Lamong dengan pemberitahuan tertulis kepada pihak pertama, tanpa mengurangi tanggung jawab dan kewajiban pihak kedua atas pelaksanaan dari Perjanjian ini.

6. *Partnership With Other Parties*
The company is given the right to carry out cooperation with other Parties and / or partnering or assigning business entities or subsidiaries that have the ability and competence to carry out a part or parts of the activities of commercially managing Terminal Multipurpose Teluk Lamong with notice written to the first party, without prejudice to the responsibility and obligation of second party for the implementation of this Agreement.

7. Pelaporan
a. Perusahaan memiliki kewajiban untuk melaporkan kepada Pihak Pertama meliputi laporan kinerja operasional dan laporan pendapatan atas pelaksanaan kegiatan perusahaan Terminal Multipurpose Teluk Lamong pada Area Konsesi yang digunakan untuk melakukan perhitungan pendapatan konsesi/ *consession fee*.

7. *Reporting*
a. The company has the obligation to report to First Party includes operational performance report and income report on the execution of Lamir Bay Multipurpose Terminal business activity in the Concession Area used to calculate the concession / consession fee income.

b. Laporan penerimaan sebagaimana ayat 1 diberikan oleh Perusahaan kepada pihak pertama setiap bulan selambat-lambatnya pada tanggal 10 pada bulan berikutnya dan Laporan Tahunan harus telah diaudit oleh Auditor Independen dan disampaikan selambat-lambatnya triwulan pertama ditahun berikutnya.

b. The revenue report referred to in paragraph 1 reception given by the Company to the first party every month no later than the 10th day of the following month and the annual report must have been audited by an Independent Auditor and submitted no later than the first quarter of next year.

8. Berakhirnya Perjanjian Kerjasama
Dalam jangka waktu 360 hari sebelum berakhirnya jangka waktu Konsesi para pihak harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama dan menyelesaikan proses pengalihan aset dan proses perusahaan terminal dari pihak kedua kepada pihak pertama.

8. *The termination of Cooperation Agreement*
In a period of 360 days before the expiration of Concession The parties shall take all necessary measures to put an end to the Partnership Agreement and complete the process of transfer of assets and processes terminal concession of second party to the first party.

Pengalihan aset dan pengalihan perusahaan Terminal pada saat berakhirnya Perjanjian Konsesi dibuat dalam Berita Acara pengakhiran Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani oleh Para Pihak.

The transfer of assets and the diversion concession upon expiry Terminal Concession Arrangements were made in the Minutes of the termination of the Cooperation Agreement signed by the Parties.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) AND
SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2017, 2016 and 2015
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

**43. Perjanjian-Perjanjian dan Ikatan Penting
(Lanjutan)**

43. Agreements and Commitments (Continued)

9. Kerjasama pemanfaatan di Akhir Konsesi
Pada akhir jangka waktu konsesi
pengusahaan Terminal Multipurpose Teluk
Lamong akan dilakukan Kerjasama
Pemanfaatan selama 30 tahun dengan
besaran nilai kerjasama yang disepakati
oleh para pihak sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
- r. Perjanjian Konsesi antara Kantor Otoritas
Pelabuhan Utama Tanjung Perak dengan
Perusahaan tentang Kegiatan Pengusahaan
Jasa Kepelabuhanan di Pelabuhan yang
Diusahakan oleh Perusahaan.

9. *Joint use of them in Final Concession
At the end of term of concession Terminal
Multipurpose of Lamong Bay will be carried
out Cooperation of Utilization for 30 years
with the amount of cooperation value
agreed by the parties in accordance with
the provisions of legislation.*
- r. *The Concession Agreement Between Main
Port Authority Office of Tanjung Perak with
the Company on the activities in the Port
Exploitation Services Ports managed by the
Company.*

Berdasarkan Perjanjian Konsesi antara Kantor
Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak
(Pihak Pertama) dengan Perusahaan (Pihak
Kedua), tentang Kegiatan Pengusahaan Jasa
Kepelabuhanan di Pelabuhan yang
diusahakan oleh Perusahaan tanggal
9 November 2015 No: HK.107/01/12/OP.TPr-
15 dan No: HK.0501/700/P.III-2015, Pihak
Pertama memberikan hak konsesi kepada
Perusahaan untuk melakukan kegiatan
pengusahaan jasa kepelabuhanan di wilayah
atau lokasi dimana terdapat terminal dan
fasilitas pelabuhan eksisting milik Perusahaan
yang telah diusahakan oleh Perusahaan untuk
kegiatan pengusahaan Jasa Kepelabuhanan,
dengan ketentuan sebagai berikut :

*Based on the Concession Agreement between
the Port Authority Office Main Tanjung Perak
(First Party) with the Company (Second Party),
on the activities of Exploitation Services Ports
in the port managed by the Company dated
November 9, 2015 No.HK.107/ 01/12/OP.TPr-
15 and No: HK.0501/700/P.III-2015, the First
Party grants concession rights to the Company
to conduct utilization of port services in the
region or places where there is existing
terminal and port facilities owned by
the Company which has been cultivated by the
Company for the exploitation activity ports
Services, with the following conditions:*

1. Jangka Waktu Perjanjian adalah selama
30 (tiga puluh) tahun, terhitung sejak
tanggal ditandatangani perjanjian ini dan
diperpanjang selama Area Konsesi
digunakan sebagai Fasilitas Pelabuhan
dan Perusahaan masih menyelenggarakan
kegiatan usaha sebagaimana dimaksud
dalam peraturan pemerintah tentang
Pendirian Perusahaan dan peraturan
perundang-undangan lain yang berlaku.
2. Pendapatan Konsesi;
 - a. Pihak Kedua membayar kepada Pihak
Pertama atas Pendapatan konsesi
yang diperoleh dari kegiatan
Pengusahaan di Area Konsesi pada
masing-masing pelabuhan sebagai
Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP) yang disetor ke Kas Negara
melalui Bendahara Penerimaan Pihak
Pertama.

1. *Term of the Agreement was for 30 (thirty)
years, commencing from the date of
signature of this agreement and extended
for Concession Areas used as the Port
Facility and the Company was still
conducting business activities referred to in
the regulation on the establishment of the
Company and other laws and regulations.*
2. *The concessions revenue;*
 - a. *The Second Party pays to the First
Party the Revenue concessions
derived from the activities of the
Concession Area Operations in each
port as Non-Tax State Revenue
(PNBP) deposited to the State
Treasury through the Treasurer of the
First Party Acceptance.*

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) AND
SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2017, 2016 and 2015
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

**43. Perjanjian-Perjanjian dan Ikatan Penting
(Lanjutan)**

43. Agreements and Commitments (Continued)

- b. Besaran Pendapatan Konsesi pada Area Konsesi sebagaimana dimaksud ayat (1) sebesar 2,5% per tahun dari pendapatan kotor/bruto dari pelaksanaan Kegiatan Pengusahaan di Area Konsesi sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini.
 - c. Terhadap pembayaran pendapatan konsesi yang dilakukan oleh Pihak kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak kedua tidak dikenakan lagi pungutan-pungutan lainnya terkait kegiatan pengusahaan di area konsesi.
 - d. Pendapatan Konsesi akan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan selambat-lambatnya pada tanggal 15 pada bulan pertama per triwulannya.
 - e. Melaksanakan kegiatan Audit Laporan Keuangan Tahunan secara menyeluruh selambat-lambatnya tanggal 14 April tahun berikutnya dengan Auditor Independen yang ditunjuk oleh Pihak Kedua.
 - f. Para pihak akan melaksanakan rekonsiliasi atas pendapatan konsesi setiap 3 bulan, dan apabila terjadi kelebihan atau kekurangan pembayaran pendapatan konsesi maka akan diperhitungkan pada pembayaran pendapatan konsesi 3 bulan berikutnya.
3. Kegiatan Pengembangan Terminal
Pelaksanaan Kegiatan pengembangan pada Perjanjian Konsesi ini dalam rangka pengembangan terminal dan fasilitas pelabuhan di Area Konsesi, dapat dilaksanakan oleh Pihak Kedua sesuai dengan rencana Induk Pelabuhan setelah mendapat rekomendasi dari Pihak Pertama.
4. Pelaporan
 - a. Perusahaan memiliki kewajiban untuk melaporkan kepada pihak pertama meliputi laporan kinerja operasional dan laporan pendapatan atas pelaksanaan kegiatan pengusahaan Terminal *Multipurpose* Teluk Lamong pada Area Konsesi yang digunakan untuk melakukan perhitungan pendapatan konsesi / *consession fee*.
- b. The amount of the Concession Revenue in the Concession Area as referred to in paragraph (1) is 2.5% per annum of gross / gross income from the execution of Operating Activities in the Concession Area in accordance with the provisions of this Agreement.
 - c. Toward payment of revenue concessions by second parties as referred to in paragraph (1), the second party no longer subject to other levies related to activities performed in the concession area.
 - d. Concession revenues will be paid every 3 (three) months at the latest by the 15th of the first month per quarterly.
 - e. Performing the Audit of the Annual Financial Statements by no later than 14 April of the following year with the Independent Auditor appointed by the Second Party.
 - f. The parties shall undertake the reconciliation of revenue concession every 3 months, and in case of excess or shortage of concession revenue payments will be calculated on the payment of concession revenues next 3 months.
3. Terminal Development Activities
Implementation of development activities in this Concession Agreement for the development of terminals and port facilities in the Concession Area, can be conducted by the Second Party in accordance with the Port Master plan and the recommendation of the First Party.
4. Reporting
 - a. The company has an obligation to report to the first party report covers operational performance and earnings reports on the implementation of the *Multipurpose Terminal Teluk Lamong* exploitation activities in the Concession Area is used to perform calculations concession revenue / *consession fee*.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) AND
SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2017, 2016 and 2015
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

**43. Perjanjian-Perjanjian dan Ikatan Penting
(Lanjutan)**

43. Agreements and Commitments (Continued)

- b. Laporan pendapatan sebagaimana ayat 1 diberikan oleh Perusahaan kepada Pihak Pertama setiap bulan selambat-lambatnya pada tanggal 10 pada bulan berikutnya dan Laporan Tahunan harus telah diaudit oleh Auditor Independen dan disampaikan selambat-lambatnya triwulan pertama di tahun berikutnya.
- b. *The revenue report referred to in clause 1 given by the Company to the First Party every month no later than the 10th day of the following month and the annual report must have been audited by an independent auditor and submitted no later than the first quarter of next year.*
5. Sanksi
5. *Sanctions*
- a. Dalam hal Pihak Kedua tidak dapat memenuhi standar kinerja operasional yang ditetapkan oleh Pihak Pertama pada tahun berjalan, maka Pihak Kedua tidak dapat menyesuaikan tarif pada pelabuhan setempat dan/atau mengembangkan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya, sampai adanya perbaikan kinerja sesuai dengan standar operasional yang ditetapkan sekurang-kurangnya 2 tahun.
- a. *In the event that the Second Party can not meet the standard of operational performance established by the First Party in the current year, then the second party can not adjust rates on the local port and/or develop terminals and other port facilities, to the improvement of performance in accordance with the operational standards set at lack of 2 years.*
- b. Dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran Pendapatan Konsesi, maka Pihak Pertama melakukan Pengenaan denda keterlambatan kepada Pihak kedua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- b. *In the event of late payment of Concession revenues, then the First Party did Imposition of penalty for delay to the second party in accordance with the provisions of the legislation in the field of Non-Tax Revenues.*
- c. Dalam terjadi penyimpangan pengembangan terminal dan fasilitas pelabuhan di Area Konsesi tanpa sepengetahuan dan persetujuan Pihak Pertama, maka Pihak Pertama berhak untuk melarang melakukan kegiatan di area pengembangan.
- c. *In case of deviation development of terminal and port facilities in the Concession Area without the knowledge and consent of the First Party, the first party is entitled to prohibit activities in development area.*
6. Berakhirnya Perjanjian Kerjasama
Dalam Jangka waktu 360 hari sebelum berakhirnya jangka waktu Konsesi Para Pihak harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama dan menyelesaikan proses pengalihan Aset dan proses perusahaan Terminal dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama.
6. *The termination of Cooperation Agreement In a period of 360 days before the expiration of Concession The Parties shall take all necessary measures to put an end to the Partnership Agreement and complete the process of transfer of assets and processes Terminal concession from the Second Party to the First Party.*

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) AND
SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2017, 2016 and 2015
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

**43. Perjanjian-Perjanjian dan Ikatan Penting
(Lanjutan)**

43. Agreements and Commitments (Continued)

- s. Sesuai Perjanjian Pemborongan No. HK.0502/178/P.III-2016 tanggal 31 Mei 2016, antara Perusahaan dengan PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero), untuk Pekerjaan pengadaan asuransi asset dan operasional dilingkungan Perusahaan untuk tahun 2016-2017, dengan harga borongan (premi asuransi) pada Perjanjian Pemborongan ini adalah sebesar Rp19.340.521 belum termasuk PPN 10%. Jangka waktu penutupan Asuransi dan periode perjanjian Tahap I dimulai dari tanggal 31 Mei 2016 sampai dengan 31 Mei 2017, Tahap II yang dihitung prorata hari sesuai dengan tanggal beroperasinya dan/atau serah terima asset dilaporkan kepada pihak kedua dalam kurun waktu pelaksanaan pekerjaan. Nilai Pertanggungjawaban atas obyek yang dipertanggungjawabkan adalah sebagai berikut:
1. Nilai Pertanggungjawaban tahap I : Rp17.062.931.
 2. Nilai Pertanggungjawaban tahap II : Rp2.277.590.
- t. Sesuai Perjanjian Pemborongan No. SP2/36/HK.0502/P.III-2017 / 9.2/AJ II/I/CORSEC/KTR/0317 tanggal 24 Maret 2017 tentang Pekerjaan Pelayanan Kesehatan Pegawai dan Pensiunan di Lingkungan Perusahaan tahun 2016, Perusahaan telah memberikan pekerjaan kepada PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia untuk memberikan pelayanan Kesehatan Pegawai dan pensiunan di lingkungan Perusahaan tahun 2017, dengan total biaya pelayanan kesehatan sebesar Rp91.499.731 dengan jumlah peserta sebanyak 8.775 orang dengan sistem kontrak harga satuan. Pembayaran biaya dilakukan secara bertahap yaitu dengan rincian sebagai berikut:
1. Termin I adalah 40% dari Total Premi atau sebesar Rp36.599.892 dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 31 April 2017.
 2. Termin II adalah 40% dari Total premi atau sebesar Rp36.599.892 dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 30 September 2017.
 3. Termin III adalah 20% dari Total premi atau sebesar Rp 18.299.946 dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 30 Desember 2017.
- s. According to Chartering Agreement No. HK.0502 /178/ P.III-2016 dated May 31, 2016, between the Company and PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero), for Procurement of Insurance in the Environment the Company for the year 2016-2017, with contract value (insurance premiums) amounted to Rp19,340,521 excluding VAT 10%. The period of closure, insurance and Phase I agreement period starting from the date of May 31, 2016 until May 31, 2017, Phase II is prorated in accordance with the date of the operation and/or handover of assets reported to the second party in the period of implementation of the work. The value of coverage on the insured object are as follows:
1. The Insurance Coverage phase I was Rp17,062,931.
 2. The Insurance Coverage phase II was Rp2,277,590.
- t. According to Chartering Agreement No.SP2/36/HK.0502/P.III-2017 / 9.2/AJ II/I/CORSEC/KTR/0317 dated March 24, 2017 on Health Services for Employees and Pensioners in the Company in 2016, the Company has provided jobs to PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia to provide health services for Employees and retirees of the Company in 2017, with a total cost of health care amounting to Rp91,499,731 with the number of participants as many as 8,775 people with a unit price contract system. Payment of fees is done in stages, with details as follows:
1. Term I is 40% of Total Premium or amounting to Rp36,599,892 is paid not later than 31 April 2017.
 2. Term II is 40% of the total premium or amounting to Rp36,599,892 payable by September 30, 2017.
 3. Term III is 20% of Total premium or amounting to Rp 18,299,946 payable by December 30, 2017.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) AND
SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2017, 2016 and 2015
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

**43. Perjanjian-Perjanjian dan Ikatan Penting
(Lanjutan)**

43. Agreements and Commitments (Continued)

Jangka waktu Perjanjian selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 1 April 2017 sampai dengan 31 Maret 2018. Manajemen Perusahaan berkeyakinan PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia akan dapat memenuhi kewajiban sehubungan dengan hal tersebut pada saat jatuh tempo.

The term of the Agreement was for the twelve (12) months from the date of April 1, 2017 to March 31, 2018. The Company's management believed that PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia would be able to meet the obligations on maturity date.

- u. Sesuai Perjanjian Pemborongan No. HK.0502/68/TPKS-2016 tanggal 29 Desember 2016 yang telah diperbaharui dengan addendum II No.HK.0502/01/TPKS-2018 tanggal 18 Januari 2018 antara Perusahaan dengan PT Nindya Karya untuk pekerjaan pembangunan *Deck on Pile* di Area CY Baru TPKS, dengan harga borongan seluruh pekerjaan Rp94.691.212 (termasuk PPN) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 365 hari kalender terhitung sejak Berita Acara Mulai Pekerjaan. Masa Pemeliharaan ditetapkan 365 hari kalender sejak Berita Acara Serah Terima I (BAST I).

- u. According to the Chartering Agreement No. HK.0502/68/TPKS-2016 dated December 29, 2016 which has been updated with addendum II No.HK.0502/01/TPKS-2018 dated January 18, 2018, the Company and PT Nindya Karya made an agreement for the construction Deck on Pile of New Container Yard in TPKS, at wholesale price throughout the work amounted to Rp94,691,212 (including VAT 10%) with a term of execution of work specified for 365 days calendar commencing from the Minutes of Commencement of Work. Maintenance period was set for 365 days calendar starting from the handover of Work I (BAST I).*

Pada tanggal 31 Desember 2017 progres pekerjaan tersebut telah mencapai tingkat penyelesaian sebesar 85,31%.

As of December 31, 2017 the work in progress has reached a completion rate of 85.31%.

- v. Sesuai Perjanjian Pemborongan No. HK.0502/62/TPKS-2016 tanggal 19 Desember 2016 yang telah diperbaharui dengan addendum II No.HK.0502/03/TPKS-2018 tanggal 26 Januari 2018 antara Perusahaan dengan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk pekerjaan pembangunan Peninggian *CY 01 di TPKS*, dengan harga borongan seluruh pekerjaan Rp142.306.994 (termasuk PPN) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 391 hari kalender terhitung sejak Berita Acara Mulai Pekerjaan. Masa Pemeliharaan ditetapkan 365 hari kalender sejak Berita Acara Serah Terima I (BAST I).

- v. According to Chartering Agreement No. HK.0502/62/TPKS-2016 dated December 19, 2016 which had been updated with addendum II No.HK.0502/03/TPKS-2018 dated January, 26, 2018 between the Company and PT Wijaya Karya (Persero) Tbk for construction CY 01 in TPKS, at wholesale prices throughout the work amounted to Rp142,306,994 (including VAT 10%) with a term of execution of work specified for 391 days calendar commencing from the Minutes of Commencement of Work. Maintenance period was set for 365 days calendar starting from the handover of Work I (BAST I).*

Pada tanggal 31 Desember 2017 progres pekerjaan tersebut telah mencapai tingkat penyelesaian sebesar 64.8%.

As of December 31, 2017 the work in progress has reached a completion rate of 64.8%.

- w. Sesuai Perjanjian Pemborongan No. HK.0502/573/P.III-2016 tanggal 28 Desember 2016 yang telah diperharui dengan addendum I No.SP2.288.1/HK.0502/P.III tanggal 28 Agustus 2017 antara Perusahaan dengan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk untuk pekerjaan pekerjaan pematangan lahan terminal gilimas, dengan harga borongan

- w. According to Chartering Agreement No. HK.0502/573/P.III-2016 dated December 28, 2016 and has been updated with addendum II No.SP2.288.1/HK.0502/P.III dated 28 Agustus 2017, between the Company and PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk for construction land reclamation in gilimas terminal, at wholesale price throughout the*

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) AND
SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2017, 2016 and 2015
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

**43. Perjanjian-Perjanjian dan Ikatan Penting
(Lanjutan)**

43. Agreements and Commitments (Continued)

seluruh pekerjaan Rp100.100.000 (termasuk PPN) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 365 hari kalender terhitung sejak Berita Acara Mulai Pekerjaan. Masa Pemeliharaan ditetapkan 365 hari kalender sejak Berita Acara Serah Terima I (BAST I).

work amounted to Rp100,100,00 (including VAT 10%) with a term of execution of work specified for 365 days calendar commencing from the Minutes of Commencement of Work. Maintenance period was set for 365 days calendar starting from the handover of Work I (BAST I).

Pada tanggal 31 Desember 2017 progres pekerjaan tersebut telah mencapai tingkat penyelesaian sebesar 62%.

On December 31, 2017 the work in progress has reached a completion rate of 62%.

- x. Sesuai Perjanjian Pemborongan No. SP2.203/HK.0502/P.III-2017 tanggal 29 September 2017 antara Perusahaan dengan PT Bangun Karya Perkasa Jasa untuk pekerjaan pekerjaan pembangunan Gudang dan Open storage di Terminal Kalimas Zona 2 dan 3, dengan harga borongan seluruh pekerjaan Rp46.728.000 (termasuk PPN) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 300 hari kalender terhitung sejak Berita Acara Mulai Pekerjaan. Masa Pemeliharaan ditetapkan 180 hari kalender sejak Berita Acara Serah Terima I (BAST I).

- x. *According to the Chartering Agreement No. SP2.203/HK.0502/P.III-2017 dated September 29, 2017, the Company and PT Bangun Karya Perkasa Jasa made an agreement for construction warehouse building and open storage in Kalimas Terminal Zone 2 and 3, at wholesale price throughout the work amounted to Rp46,728,000 (including VAT 10%) with a term of execution of work specified for 300 days calendar commencing from the Minutes of Commencement of Work. Maintenance period was set for 180 days calendar starting from the handover of Work I (BAST I).*

Pada tanggal 31 Desember 2017 progres pekerjaan tersebut telah mencapai tingkat penyelesaian sebesar 2.5%.

As of December 31, 2017 the work in progress has reached a completion rate of 2.5%.

- y. Sesuai Perjanjian Pemborongan No. SP2.171/HK.0502/P.III-2017 tanggal 31 Agustus 2017, antara Perusahaan dengan PT Tugu Pratama Indonesia, untuk Pekerjaan pengadaan asuransi aset dan operasional dilingkungan Perusahaan untuk tahun 2017, dengan harga borongan (premi asuransi) pada Perjanjian Pemborongan ini adalah sebesar Rp3.683.039 belum termasuk PPN 10% dengan nilai pertanggungan sebesar Rp5.582.319.819. Jangka waktu penutupan asuransi dan periode perjanjian dimulai dari tanggal 31 Agustus 2017 sampai dengan 31 Desember 2017.

- y. *According to Chartering Agreement No. SP2.171/HK.0502 /P.III-2017 dated August 31, 2017, the Company and PT Tugu Pratama Indonesia, signed an agreement for Procurement of Insurance in the Environment PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) for the year 2017, with contract value (insurance premiums) amounted to Rp3,683,039 excluding VAT 10% with coverage amount of Rp5,582,319,819. The period of closure insurance and agreement period started from the date of August 31, 2017 until December 31, 2017.*

- z. Sesuai Perjanjian Pemborongan No. SP2.149/HK.0502/P.III-2017 tanggal 14 Agustus 2017, antara Perusahaan dengan Terex MHPS GmbH, untuk pekerjaan pengadaan 5 Unit Harbour Mobile Crane (HMC) untuk Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, dengan harga borongan sebesar EUR.13.507.500 (angka

- z. *According to Chartering Agreement No. SP2.149/HK.0502 /P.III-2017 dated August 14, 2017, the Company and Terex MHPS GmbH, signed an agreement for the Procurement of 5 Units Harbour Mobile Crane (HMC), with contract value amounting to EUR13,507,500 excluding taxes and other*

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) AND
SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2017, 2016 and 2015
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

**43. Perjanjian-Perjanjian dan Ikatan Penting
(Lanjutan)**

43. Agreements and Commitments (Continued)

penuh) belum termasuk PPN Impor, PPh dan bea masuk Impor. Jangka waktu pengiriman dan penyelesaian untuk 5 unit HMC adalah 10 bulan kalender untuk 3 Unit HMC dan 12 bulan kalender untuk 2 unit HMC sejak tanggal efektif sampai dengan PHO.

charge. The term and completion time for 5 Units HMC is 10 calendar months for 3 units HMC and 12 calendar months for 2 units HMC from effective date until PHO.

**PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS),
Entitas Anak**

a. Pada tanggal 29 April 1999, TPS dan para pemegang saham menandatangani perjanjian pemegang saham mengenai pengelolaan manajemen dan pengoperasian TPS. Dalam perjanjian ini, TPS setuju untuk menyumbang sampai dengan 1% dari laba tahun sebelumnya untuk proyek-proyek pengembangan masyarakat dalam aktivitas pengembangan di bidang sosial, pendidikan dan lingkungan yang akan dilakukan oleh TPS. Pada tahun 2017 dan 2016, proyek sumbangan pengembangan masyarakat masing-masing sebesar Rp4.879.464 dan Rp9.356.748.

**PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS),
Subsidiary**

a. *On April 29, 1999, TPS and its shareholders signed a Shareholders' Agreement regarding the management and operation of TPS. Under this agreement, TPS may contribute an amount of up to 1% of net income prior year to develop community projects relating to social, educational and environmental development activities to be established by TPS. In 2017 and 2016, the community development contribution projects amounted to Rp4,879,464 and Rp9,356,748, respectively.*

Saldo cadangan proyek pengembangan masyarakat sebesar Rp18.739.310 pada tahun 2017 dan sebesar Rp18.739.310 pada tahun 2016. Realisasi pada tahun 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp4.879.464 dan Rp5.612.431.

The balances of community development liability amounted to Rp18.739.310 in 2017 and Rp18,739,310 in 2016. Realization of community development for 2017 and 2016 was Rp4,879,464 and Rp5,612,431 respectively.

Pada tanggal 29 April 1999, PT Terminal Petikemas Surabaya, menandatangani Perjanjian Otorisasi dengan Perusahaan untuk pengoperasian dan pemeliharaan terminal petikemas di Pelabuhan Tanjung Perak. Berdasarkan perjanjian ini, PT Terminal Petikemas Surabaya mempunyai hak untuk mengoperasikan dan memelihara terminal petikemas, peralatan dan fasilitas lainnya yang berkaitan dengan pengembangan, perluasan atau penambahan yang dilakukan untuk 20 tahun yang berakhir pada 29 April 2019, setelah tanggal perjanjian ("periode otorisasi"), termasuk, tidak terbatas, pada aset yang diperoleh PT Terminal Petikemas Surabaya, selama periode otorisasi. Berdasarkan perjanjian ini, Perusahaan berhak atas kontribusi dari PT TPS sebesar sepuluh persen (10%) dari pendapatan operasi kotor per tahun PT Terminal Petikemas Surabaya selama periode otorisasi, yang dibayar setengah tahunan berdasarkan pendapatan kotor selama periode enam bulan sebelumnya.

On April 29, 1999, PT Terminal Petikemas Surabaya, signed an Authorization Agreement with the Company for the operation and maintenance of container terminals at Tanjung Perak Seaport. This agreement provided PT Terminal Petikemas Surabaya, with the rights to operate and maintain the container terminals, equipment and other facilities together with any improvements, extensions or additions made thereto for a 20-year period (referred which would end on April 29, 2019 after the "authorization period"), including, but not limited to assets acquired by PT Terminal Petikemas Surabaya, during the Authorization Period. Under this agreement, the Company was entitled to a contribution from the Company equal to ten percent (10%) of PT Terminal Petikemas Surabaya annual gross revenues during the Authorization Period, which was payable in semi-annual installments based on gross revenues for the preceding six month period

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) AND
SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2017, 2016 and 2015
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

**43. Perjanjian-Perjanjian dan Ikatan Penting
(Lanjutan)**

43. Agreements and Commitments (Continued)

Sehubungan dengan Perjanjian Otorisasi di atas, PT Terminal Petikemas Surabaya, juga menandatangani Perjanjian Perbantuan Karyawan ("PPK") dengan Perusahaan. PPK berisi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan atas perbantuan karyawan Perusahaan yang sebelumnya telah bekerja di Unit Terminal Petikemas Tanjung Perak. Berdasarkan PPK, PT Terminal Petikemas Surabaya, diharuskan membayar gaji, upah dan tunjangan lain kepada karyawan yang diperbantukan selama PPK berlaku.

In connection with the Authorization Agreement referred to above, PT Terminal Petikemas Suarabaya, also signed a Staff Secondment Agreement ("SSA") with the Company. The SSA covered the terms and conditions for the secondment to PT Terminal Petikemas Suarabaya, of the Company's staff that had previously worked at the Tanjung Perak Container Terminal Unit. Under the SSA, PT Terminal Petikemas Suarabaya, was obliged to pay the seconded staff salaries, wages and other benefits for as long as the SSA was in force.

Syarat pada PPK konsisten dengan Perjanjian Otorisasi dan mencakup periode otoritas. PPK juga mencakup ketentuan mengenai hak dan liabilitas Perusahaan sehubungan dengan pengembalian karyawan Perusahaan.

The term and condition of the SSA was consistent with the Authorization Agreement and covered the Authorization Period. The SSA included provisions covering the Company's rights and obligations in relation to the return of seconded staff of the Company.

Pada tanggal 29 April 1999, PT Terminal Petikemas Surabaya juga menandatangani perjanjian sewa dengan Perusahaan untuk periode yang sama dengan periode dalam Perjanjian Otorisasi tersebut diatas. Dalam perjanjian ini, Perusahaan setuju untuk menyewakan kepada Perusahaan sebidang tanah seluas 837.520 m² yang terletak di Desa Perak Barat, Surabaya, Jawa Timur, dimana operasi Perusahaan berada, dengan semua fasilitas penunjang yang ada. Perusahaan diwajibkan membayar sewa kepada Perusahaan sejumlah USD2,800,000 per tahun, yang terutang setiap enam bulan.

On April 29, 1999, PT Terminal Petikemas Surabaya signed a lease agreement with the Company for the same period with that of the Authorization Agreement. Under this agreement, the Company agreed to lease out to the Company plots of land with a total area of 837,520 square meters located at Desa Perak Barat, Surabaya, East Java, where the Company's operations are situated including all facilities located thereon. The Company shall pay the Company annual rent amounting to USD2,800,000, payable in semi-annual installments.

Sehubungan dengan perjanjian sewa yang disebutkan di atas, Perusahaan bersedia untuk membeli keperluan atas listrik dan air dari Perusahaan.

In connection with the lease agreement referred to above, the Company agreed to purchase the electricity and water utilities from the Company.

- b. Pada tanggal 3 Februari 2004, Perusahaan, Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dan perwakilan peserta program pensiun iuran pasti menandatangani perjanjian yang berkaitan dengan program pensiun iuran pasti.

- b. *On February 3, 2004, the Company, Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk, and representatives of the participants to the defined contribution pension program signed an agreement relating to the defined contribution pension program.*

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) AND
SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2017, 2016 and 2015
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

**43. Perjanjian-Perjanjian dan Ikatan Penting
(Lanjutan)**

43. Agreements and Commitments (Continued)

Jasa program pensiun yang dikelola oleh DPLK PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk meliputi pengumpulan iuran peserta, pengelolaan dana dan penyelenggaraan administrasi kepesertaan. Sesuai dengan perjanjian, Perusahaan akan mengkoordinasikan dan melaksanakan kewajibannya untuk membayar/menyerahkan seluruh iuran untuk dan atas nama peserta baik secara tunai atau dengan cara pembayaran yang lazim lainnya kepada dana pensiun. DPLK PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk akan mengelola dana berdasarkan jenis investasi yang dipilih oleh peserta. Perjanjian ini diperpanjang otomatis setiap tahun.

The pension program services to be administered by DPLK PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk include collection of contribution, management of fund and administration of participatory coordination. With respect to the agreement, the Company will coordinate and perform its obligation to pay/deliver all contribution for and on behalf of participants either in cash or any other generally accepted manner of payment to the pension fund. DPLK PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk will manage the fund based on the investment types determined by the participants. The agreement shall be extended automatically every year.

- c. TPS memiliki perjanjian dengan *Konecranes Finland Corporation* mengenai pekerjaan pengadaan 3 (tiga) unit *container crane*. Berdasarkan perjanjian pada tanggal 26 September 2016, nilai perjanjian pengadaan 3 (tiga) unit *container crane* ini sebesar USD29,850,000 (angka penuh). Perjanjian ini akan berakhir selambatnya pada tanggal 9 Mei 2017.
- d. Pada tanggal 30 November 2007, TPS menandatangani surat perjanjian dengan PT AKR Corporindo Tbk mengenai pasokan bahan bakar solar sampai dengan 30 November 2013. Pada tanggal 31 Desember 2013, perjanjian ini telah diperpanjang sampai dengan tanggal 31 Desember 2018. Saldo liabilitas dengan PT AKR Corporindo Tbk pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp1.133.927 dan Rp2.670.467 dicatat sebagai utang usaha.
- e. Pada 31 Maret 2017, Perusahaan menandatangani perjanjian dengan World Crane Services FZE mengenai jasa manajemen pemeliharaan peralatan yang mencakup pelatihan *engineer* Perusahaan, bantuan *troubleshoot* dan perbaikan kerusakan peralatan, dan peningkatan desain kelistrikan. Perjanjian ini berlaku dari 1 April 2017 hingga 31 Maret 2019. Harga tetap untuk perjanjian ini adalah USD389,000 (angka penuh) per tahun, yang dibayarkan setiap sebulan sekali setelah bulan berjalan sebesar USD32,416.67 (angka penuh).

- c. *TPS has an agreement with Konecrans Finland Corporation regarding the procurement of 3 (three) units container cranes. Based on the agreement dated September 26, 2016, the procurement agreement of 3 (three) container crane units amounting to USD29,850,000 (full amount). This agreement will be effective until May 9, 2017.*
- d. *On November 30, 2007, TPS signed an agreement with PT AKR Corporindo Tbk, regarding diesel fuel supply until November 30, 2013. On December 31, 2013, this agreement was extended up to December 31, 2018. The outstanding liabilities with PT AKR Corporindo Tbk as at December 31, 2017 and 2016 amounted to Rp1,133,927 and Rp2,670,467 respectively, and was recorded as trade payables.*
- e. *On March 31, 2017, the Company signed an agreement with World Crane Services FZE regarding maintenance management service for the Company's equipments including training for the company's engineer, helping the equipments' troubleshoot and reparation, and improving the electrical design. This agreement was valid from April 1, 2017 until March 31, 2019. The fixed price for this agreement amounting to USD389,000 (full amount) per annum, which was payable at the end of every month for USD32,416.67 (full amount).*

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) AND
SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2017, 2016 and 2015
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

**43. Perjanjian-Perjanjian dan Ikatan Penting
(Lanjutan)**

43. Agreements and Commitments (Continued)

PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (BJTI)

a. JTI menyetujui untuk memberikan fasilitas pinjaman kepada PT BKMS Berdasarkan Perjanjian Fasilitas Pinjaman No. KKS.602-00/XII/BJTI-2015 tanggal 30 Desember 2015 sebesar Rp80.000.000 dengan jangka waktu 12 bulan dan tidak dapat diperpanjang dengan kompensasi bulanan sebesar JIBOR +4,5% per tahun dihitung sejak tanggal penarikan pinjaman. Pemberian pinjaman tersebut telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 033/KPIII/RUPSLB_BJTI/XII-2015 tanggal 14 Desember 2015. Perjanjian fasilitas pinjaman tersebut diperpanjang dengan addendum perjanjian No. KKS.01-02/I/BJTI-2017 tanggal 3 Januari 2017 yang mengubah jatuh tempo menjadi tanggal 30 Desember 2017. Sampai dengan periode pelaporan, perjanjian masih dalam proses persetujuan perpanjangan.

BJTI menyetujui untuk menambah fasilitas pinjaman kepada PT BKMS sesuai dengan Perjanjian Fasilitas Pinjaman No. KKS.012-01/III/BJTI-2016 tanggal 30 Maret 2016 sebesar Rp40.000.000 dengan jangka waktu satu tahun dan dapat diperpanjang. Perjanjian fasilitas pinjaman tersebut diperpanjang dengan addendum perjanjian tanggal 15 Desember 2017 No. KKS.025-00/XII/BJTI-2017 yang mengubah jatuh tempo menjadi tanggal 31 Desember 2017. Sampai dengan periode pelaporan, perjanjian masih dalam proses persetujuan perpanjangan.

b. Pada tanggal 18 Mei 2011, Perusahaan menandatangani Perjanjian Kerjasama Pelayanan Jasa Terminal Curah Kering di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dengan PT Usaha Era Pratama Nusantara No. KKS.15-01/V/BJTI-2011 yang berlaku sampai tanggal 31 Desember 2021.

PT Berlian Manyar Sejahtera (BMS)

a. Sehubungan dengan rencana pembangunan pelabuhan di kecamatan Manyar kabupaten Gresik oleh Perusahaan, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Gresik (KSOP) mengajukan ijin pembangunan sesuai dengan surat No.PP.008/10/05.Ksop.Gsk-2013 kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut tanggal 2 September 2013 mengenai permohonan ijin pembangunan pelabuhan di wilayah Pelabuhan Gresik.

PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (BJTI)

a. BJTI agreed to provide a loan facility to PT BKMS in accordance with the Credit Facility agreement No. KKS.602-00/XII/ BJTI-2015 dated December 30, 2015 amounting to Rp80,000,000 with a period of 12 months and cannot be extended with monthly compensation amounting to JIBOR +4.5% per year commencing from the date of drawdown. The loan was approved by in the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 033/KPIII/RUPSLB_BJTI/XII-2015 dated December 14, 2015. The loan facility agreement has been extended by addendum of agreement No. KKS.01-02/I/BJTI-2017 dated January 3, 2017 which changed the maturity date to December 30, 2017. Up to the reporting period, the agreement is still under addendum approval process.

BJTI agreed to increase the loan facility in accordance with the Credit Facility Agreement No. KKS.012-01/III/BJTI-2016 dated March 30, 2016 amounted to Rp40,000,000 with a period of one year and can be extended. The loan facility agreement was extended by an addendum of agreement dated December 15, 2017 No. KKS.025-00/XII/ BJTI-2017 which changed the maturity date to December 31, 2017. Up to the reporting period, the agreement is still in the process of approval of renewal.

b. On May 18, 2011, the Company signed an Agreement on Cooperation Services Dry Bulk Terminal in the Port of Tanjung Perak Surabaya with PT Usaha Era Pratama Nusantara by No. KKS.15-01/V/BJTI-2011 which was valid until December 31, 2021.

PT Berlian Manyar Sejahtera (BMS)

a. In relation with the port construction plan in Manyar district, Gresik by the Company, Harbourmaster Office and Port Authority Class II Gresik (KSOP) submitted a construction permit in accordance with the letter No.PP.008/10/05.Ksop.Gsk-2013 to General Director of Marine Transportation dated September 2, 2013 regarding to the port construction permit in Gresik Port area.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) AND
SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2017, 2016 and 2015
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

**43. Perjanjian-Perjanjian dan Ikatan Penting
(Lanjutan)**

43. Agreements and Commitments (Continued)

Pada tanggal 8 November 2013, Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut memberikan izin pengembangan dermaga Pelabuhan Gresik kepada penyelenggara Pelabuhan Gresik sesuai dengan surat No.B.XI-675/PP.08.

On November 8, 2013, the Ministry of Transportation Directorate General of Marine Transportation granted the permission of Port management to develop docks at Gresik Port in accordance with the letter No.B.XI-675/PP.08.

Berdasarkan surat dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tersebut, KSOP mengirimkan surat No.PP.107/3/09.Ksop.Gsk-2013 kepada Direktur Utama Perusahaan tanggal 12 Desember 2013 tentang pengembangan Pelabuhan Gresik Kali Mireng, untuk diminta mengambil langkah-langkah persiapan guna pelaksanaan pengembangan pelabuhan tersebut.

Based on the letter from the Ministry of Transportation Directorate General of Marine Transportation, KSOP sent a letter No.PP.107/3/09.Ksop.Gsk-2013 to the President Director of the Company dated December 12, 2013 regarding to the development of Kali Mireng Gresik Port, which was asked to make preparations for the implementation of the port development.

Pada tanggal 29 April 2014, KSOP mengirimkan surat No. PP.008/04/10/Ksop.Gsk-2014 kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut perihal permohonan penunjukan Perusahaan sebagai pelaksana pembangunan pengembangan Pelabuhan Gresik.

On April 29, 2014, KSOP sent a letter No.PP.008/04/10/Ksop.Gsk-2014 to the General Director of Marine Transportation regarding to the appointment request of the Company as executive development of Gresik Port.

Pada tanggal 30 April 2014, Perusahaan menerima surat pemberitahuan No.PP.008/04/11/KSOP.GSK-2014 dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Gresik (KSOP) bahwa KSOP telah berkirim surat ke Direktur Jenderal Perhubungan Laut untuk dapat melimpahkan pembangunan Pelabuhan Kali Mireng kepada Perusahaan.

On April 30, 2014, the Company received a notification letter No.PP.008/04/11/KSOP.GSK-2014 from Harbourmaster Office and Otoritas Pelabuhan Kelas II Gresik (KSOP) that KSOP has sent the letter to the General Director of Marine Transportation to delegate the development of Kali Mireng Port to the Company.

Pada tanggal 31 Maret 2015, Direktur Jenderal Perhubungan Laut mengirimkan surat No.PP.001/2/12/DJPL_15 kepada Perusahaan cq PT Berlian Manyar Sejahtera perihal penyusunan perjanjian konsesi dalam rangka pembangunan dan pengusahaan Terminal Manyar di Pelabuhan Gresik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

On March 31, 2015, the General Director of Marine Transportation sent letter No.PP.001/2/12/DJPL_15 to the Company cq PT Berlian Manyar Sejahtera regarding drafting consession agreement in relation to the development Manyar Terminal at Gresik Port in accordance with constitution.

Pada tanggal 31 Desember 2015, KSOP Gresik mengirimkan surat kepada Perusahaan No.PP.009/22/09/Ksop.Gsk-2015 perihal pengoperasian Terminal Manyar Pelabuhan Gresik untuk sementara sambil menunggu terbitnya surat penunjukan/penugasan konsesi dari Kementerian Perhubungan Laut.

On December 31, 2015, KSOP Gresik sent letter to the Company with No.PP.009/22/09/Ksop.Gsk-2015 regarding temporary operation of Manyar Terminal Gresik Port while waiting for issuance of a concession assignment from Ministry of Marine Transportation.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) AND
SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2017, 2016 and 2015
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

**43. Perjanjian-Perjanjian dan Ikatan Penting
(Lanjutan)**

43. Agreements and Commitments (Continued)

Pada tanggal 31 Maret 2015, Direktur Jenderal Perhubungan Laut mengirimkan surat No.PP.001/2/12/DJPL_15 kepada Perusahaan cq PT Berlian Manyar Sejahtera perihal penyusunan perjanjian konsesi dalam rangka pembangunan dan pengusahaan Terminal Manyar di Pelabuhan Gresik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

On March 31, 2015, the General Director of Marine Transportation sent letter No.PP.001/2/12/DJPL_15 to the Company cq PT Berlian Manyar Sejahtera regarding drafting concession agreement in relation to the development Manyar Terminal at Gresik Port in accordance with constitution.

Pada tanggal 30 Desember 2016, Perusahaan melakukan Pembahasan Perjanjian Konsesi dengan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Gresik yang dituangkan dalam Berita Acara. Berdasarkan Berita Acara, diperoleh kesepakatan jangka waktu konsesi selama 76 tahun dan fee konsesi sebesar 2,75% per tahun dari pendapatan kotor atas kegiatan pengusahaan jasa kepelabuhanan di area konsesi.

On December 30, 2016, the Company had Discussion Regarding Concession Agreement with Harbourmaster Office and Port Authority Class II Gresik as outlined in Minutes. Based on Minutes, there was an agreement term concession for 76 years and a concession fee of 2.75% per year of income gross exploitation of port services for the activities in the concession area.

Berdasarkan Perjanjian Konsesi No.02.00/SPKS/BMS-KSOP/XII/2017 tanggal 15 Desember 2017, BMS dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Gresik mengikatkan diri dalam perjanjian konsesi tentang kegiatan pengusahaan jasa kepelabuhan terminal manyar di pelabuhan Gresik dengan jangka waktu selama 76 tahun terhitung dari sejak tanggal ditandatangani perjanjian dan fee konsesi sebesar 2,75% dari pendapatan kotor.

Based on the Concession Agreement No.02.00/SPKS/BMS-KSOP/XII /2017 dated December 15, 2017, BMS and the Gresik Class Port Authority and Authority Office bound themselves in a concession agreement concerning the activities of Manyar port terminal services in the port of Gresik for a period of 76 years from the date of the signing of the agreement and the concession fee of 2.75% of gross revenue.

PT Pelindo Husada Citra (PHC)

a. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS)

PHC telah menyepakati perjanjian kerjasama pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan bagi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) No.382/KTR/VII-01/0315 atau No. HH.3.06.Yankes/1/5d/RSPS-2014 pada tanggal 31 Maret 2015.

PT Pelindo Husada Citra (PHC)

a. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS)

PHC has agreed to a cooperation agreement advanced level referral health services for participants of Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) No.382/KTR/VII-01/0315 or No.HH.3.06.Yankes/1/5d/RSPS-2014 on March 31, 2015.

Sesuai dengan perjanjian, PHC memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta BPJS sesuai dengan lingkup pelayanan kesehatan yang telah disepakati yaitu meliputi:

In accordance with the agreement, PHC provided health care services to participants in accordance with the scope BPJS agreed health services which include:

1. Pelayanan rawat jalan tingkat lanjut (RTJL).
2. Pelayanan rawat inap lanjutan (RITL).
3. Pelayanan persalinan.
4. Pelayanan gawat darurat.
5. Pelayanan obat.
6. Pelayanan alat kesehatan.

1. *Outpatient treatment of advanced (RTJL).*
2. *Continued inpatient services (RITL).*
3. *Service delivery.*
4. *Emergency services.*
5. *Drug services.*
6. *Services medical devices.*

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) AND
SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2017, 2016 and 2015
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

**43. Perjanjian-Perjanjian dan Ikatan Penting
(Lanjutan)**

43. Agreements and Commitments (Continued)

7. Pelayanan alat kesehatan lain sesuai dengan kebutuhan dan indikasi medis.
8. Pelayanan rujukan parsial.
9. Pelayanan ambulans.
10. Pelayanan rujuk balik.
11. Pelayanan kesehatan yang tidak dijamin.

7. Services other medical devices in accordance with the needs and medical indications.
8. Partial referral service.
9. Ambulance services.
10. Services refer turning.
11. A health service is not guaranteed.

Tarif pelayanan yang diberikan bagi peserta sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan yaitu sesuai dengan pola pembayaran BPJS Kesehatan untuk Rumah Sakit (DRG/INA CBG's) berdasarkan kesepakatan pihak BPJS dengan Asosiasi Fasilitas Kesehatan dengan mengacu pada standar tarif yang telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Rates of services provided to participants are in accordance with the rates established using the payment pattern of BPJS Health Hospital (DRG / INA CBG's) based on the agreement with the Association of Health Care Facilities BPJS with reference to a standard rate set by the Minister of Health.

Perjanjian ini telah beberapa kali diperbaharui, terakhir berdasarkan perjanjian No. HH.3.06.Yankes/1/14/PT.PHC-2017 pada tanggal 3 Juli 2017. Perjanjian ini berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 15 Juli 2017 hingga 14 Juli 2018.

This Agreement has been amended several times, most recently under the agreement No. HH.3.06.Yankes/1/14/PT.PHC-2017 on July 3, 2017. This agreement was valid for 1 (one) year from July 15, 2017 until July 14, 2018.

- b. PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia
PHC telah menyepakati perjanjian kerjasama pelayanan kesehatan bagi peserta PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia No. HH.3.06.Yankes/1/5e/RSPS-2017 pada tanggal 1 Maret 2017.

- b. PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia
PHC has agreed to provides health care services for participants with PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia No. HH.3.06.Yankes/1/5e/RSPS-2017 dated March 1, 2017.

Sesuai dengan perjanjian, PHC memberikan layanan kesehatan kepada Peserta Inhealth yang meliputi konsultasi medis, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan layanan kesehatan lainnya.

In accordance with the agreement, PHC provided health care services to Participants Inhealth which includes medical consultation, examination, treatment, and other health-care measures.

Biaya atas pelayanan kesehatan diterima oleh PHC dengan system *Fee for Sevice* dengan tarif yang telah disepakati. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 1 April 2017 sampai dengan 31 Maret 2019.

The cost of health services was received by PHC with the Fee for Sevice system with the agreed rates. This agreement is valid from April 1, 2017 until March 31, 2019.

- c. PT Administrasi Medika
PHC telah menyepakati perjanjian kerjasama pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dengan peserta PT Administrasi Medika No. HH.3.06.Yankes/1/5/RSPS-2015 pada tanggal 1 Maret 2015.

- c. PT Administrasi Medika
PHC has agreed to provide health care services in hospitals with participants of PT Administrasi Medika No. HH.3.06.Yankes/1/5/RSPS-2015 dated March 1, 2015.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) AND
SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2017, 2016 and 2015
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

**43. Perjanjian-Perjanjian dan Ikatan Penting
(Lanjutan)**

43. Agreements and Commitments (Continued)

Sesuai dengan perjanjian, PHC memberikan layanan kesehatan kepada Peserta Ad Medika yang meliputi konsultasi medis, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan layanan kesehatan lainnya.

In accordance with the agreement, PHC provided health care services to Participants Ad Medika which includes medical consultation, examination, treatment, and other health-care measures.

Biaya atas pelayanan kesehatan diterima oleh PHC dengan system *Fee For Service* dengan tarif yang telah disepakati. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 28 Februari 2018.

The cost of health services was received by PHC with the Fee For Service system with the agreed rates. This agreement is valid from January 1, 2015 until February 28, 2018.

PT Pelindo Marine Service (PT PMS)

PT Pelindo Marine Service (PT PMS)

1. Berdasarkan Berita Acara Rapat No. BA.23/KP.0201/PEL-2016 tanggal 18 Oktober 2016 tentang Berita Acara Rapat Koordinasi antara PMS dengan PT PEL dalam rangka pemenuhan kebutuhan kontrak PT PEL dengan PT Humpuss Transportasi Kimia menyatakan bahwa:

1. Based on minutes of meeting No. BA.23/KP.0201/PEL-2016 dated October 18, 2016 on minutes of meeting coordination between PMS and PT PEL in accordance with fulfillment of the contract between PT PEL and PT Humpuss Transportasi Kimia, it was stated that:

1. PMS dan PT PEL menyetujui pembukaan *standby letter of credit* untuk pemenuhan kebutuhan kontrak PT PEL dengan PT Humpuss Transportasi Kimia, dimana PT PEL setuju untuk mengakui seluruh biaya bank yang dikeluarkan oleh PMS dalam rangka pembukaan *standby letter of credit* + margin 5% dari keseluruhan biaya bank yang dikeluarkan PMS.
2. PMS akan meminta mitra perbankan PMS untuk mengajukan penawaran resmi terkait pembukaan *standby letter of credit* dengan menggunakan plafon milik Perusahaan.
3. PT PEL akan menerima hasil keputusan PMS terkait pihak bank yang dipilih untuk pembukaan *standby letter of credit*.

1. PMS and PT PEL agreed on the opening of a standby letter of credit for the fulfillment of the contract between PT PEL and PT Humpuss Transportasi Kimia, whereby PT PEL: agreed to admit the entire bank fees incurred by PMS in connection with the opening of the standby letter of credit + margin of 5% of the overall cost of the bank that issued PMS.
2. PMS will ask the banking partner of PMS for bid related official opening of standby letter of credit by using ceiling property the Company.
3. PT PEL will receive the results of the decisions PMS related parties of the bank chosen for the opening of a standby letter of credit.

Pada tanggal 31 Maret 2017 jumlah fasilitas *standby letter of credit* yang digunakan oleh PMS adalah USD4,858,165.

On March 31, 2017 the amount of the standby letter of credit facility used by PMS was USD4,858,165.

2. Pada tanggal 4 Mei 2017, PMS melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang tercantum pada Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. KU.04/13/P.III-2017 dengan keputusan antara lain menyetujui pembelian saham 10% *Van Oord Dredging and Marine Contractors*.

2. On May 4, 2017, PMS held the Annual General Meeting of Shareholders as stated in the Annual General Meeting of Shareholders No. KU.04/13/P.III-2017 with the decision to approve the purchase 10% shares of Van Oord Dredging and Marine Contractors.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) AND
SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2017, 2016 and 2015
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

**43. Perjanjian-Perjanjian dan Ikatan Penting
(Lanjutan)**

43. Agreements and Commitments (Continued)

3. Berdasarkan Berita Acara Rapat No. BA.23/KP.0201/PEL-2016 tanggal 18 Oktober 2016 tentang Berita Acara Rapat Koordinasi antara Perusahaan dengan PT PEL dalam rangka pemenuhan kebutuhan kontrak PT PEL dengan PT Humpuss Transportasi Kimia menyatakan bahwa:
- PMS dan PT PEL menyepakati pembukaan *standby letter of credit* untuk pemenuhan kebutuhan kontrak PT PEL dengan PT Humpuss Transportasi Kimia, dimana PT PEL setuju untuk mengakui seluruh biaya bank yang dikeluarkan oleh Perusahaan dalam rangka pembukaan *standby letter of credit* + margin 5% dari keseluruhan biaya bank yang dikeluarkan Perusahaan.
 - PMS akan meminta mitra perbankan Perusahaan untuk mengajukan penawaran resmi terkait pembukaan *standby letter of credit* dengan menggunakan plafon milik Perusahaan.
 - PT PEL akan menerima hasil keputusan PMS terkait pihak bank yang dipilih untuk pembukaan *standby letter of credit*.

Pada tanggal 31 Maret 2017 jumlah fasilitas *standby letter of credit* yang digunakan oleh Perusahaan adalah USD4,858,165.

PT Pelindo Energi Logistik (PEL)

- Berdasarkan perjanjian No.HK.0501/14/PEL-2015 tanggal 8 Desember 2015, Perusahaan mengadakan perjanjian kerjasama tentang Jasa Pengurusan Pengapalan dengan PT Indonesia Power dengan jangka waktu 7 tahun dan diperbarui dengan addendum pertama tanggal 31 Mei 2016. Perubahan dalam perjanjian tersebut mencakup definisi, ruang lingkup, tarif, menghapus ketentuan mata uang dan jaminan pembayaran.
- Berdasarkan perjanjian No.HK.0501/15/PEL-2015 tanggal 8 Desember 2015, Perusahaan mengadakan perjanjian kerjasama tentang Jasa Penyediaan Fasilitas Penyimpanan LNG dengan PT Indonesia Power dengan jangka waktu 7 tahun dan diperbarui dengan addendum pertama tanggal 31 Mei 2016. Perubahan dalam perjanjian tersebut mencakup definisi, ruang lingkup, tarif, menghapus ketentuan mata uang dan jaminan pembayaran.

3. Based on minutes of meeting No. BA.23/KP.0201/PEL-2016 dated October 18, 2017 on minutes of meeting coordination between the Company with PT PEL in accordance with fulfillment of the contract between PT PEL with PT Humpuss Transportasi Kimia, stated that:

- PMS and PT PEL agreed on the opening of a *standby letter of credit* for the fulfillment of the contract between PT PEL and PT Humpuss Transportasi Kimia, whereby PT PEL: agreed to admit the entire bank fees incurred by the company in connection with the opening of the *standby letter of credit* + margin of 5% of the overall cost of the bank that issued the Company.
- PMS will ask the banking partner of the Company to bid related official opening of *standby letter of credit* by using ceiling property the Company.
- PT PEL will receive the results of the decisions of PMS related parties of the bank chosen for the opening of a *standby letter of credit*.

On March 31, 2017 the amount of the *standby letter of credit* facility used by the Company was USD4,858,165.

PT Pelindo Energi Logistik (PEL)

- Based on the agreement No.HK.0501/14/PEL-2015 dated December 8, 2015, the Company agreed to sign a cooperation agreement of Shipment Handling Services with PT Indonesia Power for 7 years period and the agreement has been renewed by the first addendum dated May 31, 2016. The change in the agreement covered definitions, scope, rate, and deleted the provision of currency and guarantee of payment.
- Based on the agreement No.HK.0501/15/PEL-2015 dated December 8, 2015, the Company agreed to sign a cooperation agreement on LNG Storage Facility Services Provision with PT Indonesia Power for 7 years and the agreement has been renewed by the first addendum dated May 31, 2016. The changes on the agreement includes the definition, scope, rate, delete the provision of currency and a guarantee of payment.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) AND
SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2017, 2016 and 2015
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

**43. Perjanjian-Perjanjian dan Ikatan Penting
(Lanjutan)**

43. Agreements and Commitments (Continued)

- c. Berdasarkan perjanjian No.HK.0501/16/PEL-2015 tanggal 8 Desember 2015, Perusahaan mengadakan perjanjian kerjasama tentang Jasa Terminal LNG dengan PT Indonesia Power dengan jangka waktu 5 tahun. Salah satu klausul perjanjian menyebutkan bahwa pada akhir masa pelaksanaan Jasa Terminal LNG, Perusahaan wajib menyerahkan kepada PT Indonesia Power fasilitas regasifikasi (Floating Regasification Unit - FRU, tidak termasuk pipa gas di darat dan dermaga) dalam keadaan layak, baik, dan siap beroperasi dengan kemampuan dan kapasitas regasifikasi tidak kurang dari 50Bbtu per hari, dan PT Indonesia Power tidak memiliki kewajiban untuk memberikan pembayaran apapun kepada Perusahaan terkait penyerahan peralatan fasilitas tersebut. Perjanjian ini diperbarui dengan addendum pertama tanggal 31 Mei 2016. Perubahan dalam perjanjian tersebut mencakup tarif dan menghapus ketentuan mata uang.
- d. Berdasarkan perjanjian sewa berjangka waktu tanggal 31 Maret 2016, Perusahaan mengadakan perjanjian kerjasama tentang sewa menyewa kapal Untuk Pengangkutan LNG dengan PT Humpuss Transportasi Kimia dengan jangka waktu 7 tahun.
- e. Berdasarkan perjanjian tanggal 22 Januari 2016, Perusahaan mengadakan perjanjian kerjasama tentang Perjanjian Bangun, Guna, Serah Satu Unit Regasifikasi Apung dengan PT Benoa Gas Terminal. Jangka waktu perjanjian sewa selama 5 tahun. Salah satu klausul menyebutkan bahwa pada akhir masa perjanjian Perusahaan akan mendapatkan hak atas kepemilikan Unit Regasifikasi Apung dengan kompensasi sebesar USD1.
- f. Berdasarkan perjanjian jual beli saham bersyarat No. KU.0201/03/PEL-2017 dengan PT Jaya Samudra Karunia Gas tanggal 27 November 2017, Perusahaan melakukan transaksi pembelian kembali atas saham yang dimiliki oleh PT Jaya Samudra Karunia Gas sejumlah 1.000.000 lembar saham dengan harga beli sebesar Rp4.395.000.
- c. *Based the agreement No.HK.0501/16/PEL-2015 dated December 8, 2015, the Company signed a cooperation agreement on LNG Terminal Services with PT Indonesia Power for a period of 5 years. One of clause of the agreement stated that at the end of the implementation of the Services LNG Terminal, the Company shall submit to PT Indonesia Power regasification facilities (Floating Regasification Unit - FRU, excluding gas pipeline on land and dock) in a decent state, good, and ready to operate with the ability and a regasification capacity of not less than 50Bbtu per day and PT Indonesia Power had no obligation to provide any payment to the Company related to the delivery of equipment to the facility. This agreement was updated with the first addendum dated May 31, 2016. The change in the agreement included a provision removing fare and currency.*
- d. *Based on the lease term dated March 31, 2016, the Company agreed to sign a lease agreement on boats for Transporting LNG by PT Humpuss Transportasi Kimia for a period of 7 years.*
- e. *Based on the agreement dated January 22, 2016, the Company agreed to sign a cooperation agreement on Build, in Order, Handover Agreement Floating Regasification Unit with PT Benoa Gas Terminal. The term of the rental agreement was for 5 years. One of the clauses stated that at the end of the agreement the Company would obtain ownership rights of the Floating Regasification Unit with compensation amounting to USD1.*
- f. *Under the share purchase agreement No. KU.0201.03/PEL-2017 with PT Jaya Samudra Karunia Gas dated November 27, 2017, the Company signed a repurchase transaction of shares owned by PT Jaya Samudra Karunia Gas amounting to 1,000,000 shares at a purchase price of Rp4,395,000.*

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) AND
SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2017, 2016 and 2015
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

**43. Perjanjian-Perjanjian dan Ikatan Penting
(Lanjutan)**

43. Agreements and Commitments (Continued)

g. Berdasarkan perjanjian No. HK.0501/22/PEL-2017 tanggal 27 Desember 2017 Perusahaan mengadakan perjanjian dengan PT Indonesia Power tentang jasa fasilitas midstream LNG di Benoa. Dalam perjanjian tersebut dikatakan, PT Indonesia Power tidak memiliki hak maupun klaim berkaitan kepemilikan *floating regasification unit (FRU)* dengan dasar apapun.

g. Based on the agreement No. HK. 0501/22/MOP-2017 dated December 27, 2017 Corporations held agreements with PT Indonesia Power regarding the service facilities of midstream LNG in Benoa. In the agreement it was stated that PT Indonesia Power had no right or claim ownership of related to the floating regasification units (FRU) with any reasons.

PT Lamong Energi Indonesia (LEGI)

1. Berdasarkan Perjanjian No. 020/GFA/LGL/MPI/V/2015 tanggal 22 Mei 2015 antara LEGI dengan PT Maxpower Indonesia tentang penyediaan pembangkit listrik berbahan bakar gas sebesar 13,39 MW.

PT Lamong Energi Indonesia (LEGI)

1. Based on an agreement No. 020/GFA/LGL/MPI/V/2015 dated May 22, 2015 between LEGI and PT Maxpower Indonesia regarding provision of gas fired power plant of 13.39 MW.

Berdasarkan perjanjian tersebut, PT Maxpower Indonesia harus membangun, memiliki, mengoperasikan dan mengalihkan sebuah pembangkit dengan kapasitas terpasang sebesar 13,39 MW untuk tujuan membangkitkan listrik yang akan dipasok untuk LEGI dan untuk mengalihkan kepemilikan kepada LEGI setelah seluruh Unit Pembangkit (Jangka Waktu BOT) telah menyelesaikan 59.999 jam operasi per Unit Pembangkit dan untuk melaksanakan pengoperasian dan pemeliharaan besar atas Pembangkit, yang akan dimulai pada jam operasi 60.000 dan berakhir pada saat jam operasi mencapai 119.999 (Jangka Waktu O&M).

Based on this agreement, PT Maxpower Indonesia shall build, own, operate and transfer the Plant with an installed capacity of 13.39 MW for the purpose of generating electricity to be supplied by LEGI and to transfer ownership to LEGI after all Generating Units (the BOT Period) have been completed for 59,999 operating hours per Generating Units and to perform operation and maintenance and major overhaul of the Plant, which shall commence from 60,000 operating hours and end when reaching 119,999 operating hours (the O&M Period).

PT Maxpower Indonesia akan memasok dengan jumlah minimum 3,349 Kw x 4 x 24 jam x jumlah hari dalam 1 bulan x 80% per bulan sebagai minimum Ambil atau Bayar (TOP) sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian. LEGI akan membayar kepada PT Maxpower Indonesia dengan jumlah yang setara atau melebihi jumlah.

PT Maxpower Indonesia shall supply a minimum amount of 3.349 Kw x 4 x 24 hours x number of days in 1 month x 80% per month as a minimum Take or Pay (TOP) in accordance with the terms of this agreement. LEGI shall pay to the PT Maxpower Indonesia an amount equal to or exceeding the TOP volume.

TOP dikalikan tarif pada "ambil atau bayar" atau "take or pay", terlepas apakah LEGI menerima atau meminta seluruh jumlah atau sebagian dari jumlah TOP.

TOP is multiplied by the tariff on a "take or pay" basis, regardless of whether LEGI accepts or requests all or a portion of the TOP volumes.

Setelah berakhirnya jangka waktu BOT, dengan ketentuan pembayaran sebelumnya dari seluruh jumlah yang belum dibayar oleh LEGI kepada PT Maxpower Indonesia secara penuh, seluruh kepemilikan Pembangkit akan dialihkan kepada LEGI tanpa biaya pembelian apapun, kecuali jika menurut ketentuan pemerintah yang

Upon expiration of the BOT period, subject to prior payment in full of all understanding amounts owed by the LEGI to the PT Maxpower Indonesia, all ownership of the Plant shall be transferred free of any further purchase cost to LEGI, except if based on prevailing government regulation, there are taxes applicable for such

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**43. Perjanjian-Perjanjian dan Ikatan Penting
(Lanjutan)**

berlaku ada beban pajak yang dikenakan untuk pengalihan tersebut, maka LEGI akan membayar setiap dan seluruh pajak terhutang sehubungan dengan pengalihan tersebut kepada LEGI.

Perubahan atas perjanjian tersebut berdasarkan Addendum No. 038/GFA/LGL/MPI/IX/2015 tanggal 31 Agustus 2015. Perubahan tersebut terkait dengan penambahan pasal terkait perubahan merugikan yang material dan perubahan tersebut berlaku efektif sejak tanggal 22 Mei 2015.

Perubahan kedua atas perjanjian tersebut berdasarkan Addendum tanggal 9 Mei 2016. Perubahan tersebut berlaku efektif sejak tanggal 1 Juni 2016.

Beberapa perubahan sebagai berikut:

1. "Tanggal Operasi Komersial Terjadwal" berarti sehubungan dengan Kapasitas Pertama adalah tanggal 1 Februari 2017 dan sehubungan dengan Kapasitas Kedua adalah tanggal 1 Desember 2017.
2. Perubahan ketentuan yang berkaitan dengan definisi yang berlaku pada periode BOT dan O&M.
3. BOT akan berlaku pada saat Jangka Waktu BOT (yaitu sejak Tanggal Siap Untuk Komisioning Unit Pembangkit pertama dan berakhir pada tanggal dimana masing-masing Unit Pembangkit sudah mencapai Tanggal Pengalihan dan sebelum Jangka Waktu O&M).
4. Jangka Waktu O&M setelah berakhirnya Jangka Waktu BOT dan Jasa O&M akan berlaku pada saat Jangka Waktu O&M yaitu setelah Unit Pembangkit pertama melewati Tanggal Pengalihan dan akan berakhir pada saat Unit Pembangkit mencapai 119.999 jam operasi, untuk masing-masing Unit Pembangkit.
5. Mengubah ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Tarif O&M dan Jaminan Pembayaran.
6. Mengubah jadwal tanggal operasi komersial, untuk *Engine* No.1 dan No. 2 pada 1 Februari 2017, *Engine* No.3 dan No. 4 pada 1 Desember 2017.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) AND
SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2017, 2016 and 2015
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

43. Agreements and Commitments (Continued)

transfer, then LEGI shall pay any and all taxes payable in connection with such transfer to LEGI.

Amendment of this agreement was based on Amendment No. 038.GFA/LGL/MPI/IX/2015 dated August 15, 2015. Those changes regarded as the addition of article about material adverse changes which was effective as of May 22, 2015.

Second amendment of this agreement was based on Amendment dated May 9, 2016. Those changes were effective on June 1, 2016.

Several changes are as follows:

1. "*Scheduled Commercial Operation Date*" means with respect to the *First Capacity* was *February 1, 2017* and with respect to the *Second Capacity* was *December 1, 2017*.
2. *Amend provisions related to the applicable definitions for the BOT and O&M period.*
3. *BOT shall be valid during the BOT Period (which is the period commencing from the Ready for Commissioning Date of the first Generating Unit and concluding on the date when each Generating Unit has reached Transfer Date and prior to the O&M Period).*
4. *The O&M Period upon the expiry of BOT Period and the O&M Service shall commence on the O&M Period, which is when the first Generating Unit passed the Transfer Date and shall end when 119,999 operating hours is reached, for each of the Generating Unit.*
5. *Amend all provisions related to O&M Tariff and Security of Payment.*
6. *Change the scheduled commercial date, of Engine No.1 and No.2 on February 1, 2017, and Engine No.3 and No.4 on December 1, 2017.*

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) AND
SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2017, 2016 and 2015
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

**43. Perjanjian-Perjanjian dan Ikatan Penting
(Lanjutan)**

43. Agreements and Commitments (Continued)

Perusahaan dan PT MPI menandatangani *subject to contract amendment* pada tanggal 31 Oktober 2017, yang menyetujui beberapa perubahan yang efektif berlaku sejak tanggal 1 April 2017 sebagai berikut:

The Company and PT MPI signed subject to contract amendment on October 31, 2017, that agreed on several changes effective on April 1, 2017 which consist of:

1. Kapasitas total unit untuk proyek adalah sebanyak 2 unit x 3.349 kW.
 2. Periode BOT selama 36 bulan sejak pembayaran pertama setelah tanggal persiapan operasional komersil.
 3. BOT tariff per kWh Rp410/kWh, tidak termasuk PPN 10%, dengan rincian untuk komponen A Rp275/kWh, komponen B Rp20/kWh, dan komponen D Rp115/kWh. Sehingga biaya tetap BOT bulanan yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp729.412.200 dan biaya variable BOT bulanan yang harus dibayar sesuai dengan kWh bulanan actual dan dikalikan tarif komponen B&D.
 4. Tarif B&D dikenakan eskalasi tahunan sebesar 3% yang berlaku 1 tahun setelah tanggal operasional komersil 1 Januari 2019 (yang mana yang lebih dulu).
 5. Biaya BOT Final harus dibayarkan saat periode BOT akhir (36 bulan setelah pembayaran pertama) yaitu sebesar Rp63.896.306. Kedua belah pihak harus menunjuk pihak ketiga untuk melakukan appraisal terhadap aset sebelum penyelesaian dan penandatanganan perjanjian.
 6. Tanggal transfer dilakukan setelah aset berumur 36 bulan sejak pembayaran pertama setelah tanggal persiapan operasional komersil dan pembeli telah memenuhi seluruh kewajiban pembayaran selama periode BOT.
 7. Periode O&M setelah transfer setelah akhir periode BOT maksimum selama 2 tahun sejak tanggal transfer.
 8. Tarif O&M selama perpanjangan operasi yaitu sebesar Rp135/kWh, tidak termasuk PPN 10%, terdiri dari komponen B Rp20/kWh dan komponen D Rp115/kWh.
2. LEGI telah menyepakati perjanjian jual beli gas industri manufaktur dan pembangkit listrik No. 015500.PK/HK.02/COD/2015 tanggal 15 Oktober 2015 dengan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN).
1. Total unit capacity for the project are 2 units x 3,349 kW.
 2. The BOT period is 36 months since the first payment after the commercial operation readiness date.
 3. BOT tariff per kWh was Rp410/kWh, excluding 10% VAT, consisting of component A Rp275/kWh, component B Rp20/kWh and component D Rp115/kWh. Fixed BOT monthly payment to be paid amounting to Rp729,412,200 and variable BOT monthly payment to be paid based on actual monthly kWh and multiplied by tariff component B&D.
 4. B&D tariff shall be subject to an annual escalation of 3% which shall apply 1 year after the commercial operation date or January 1, 2019 (whichever faster).
 5. The final BOT payment which shall be paid in the last BOT period (36 months after the first payment) amounting to Rp63,896,306. Both parties shall appoint a third party to appraise the plant prior to the amendment finalization and signing of agreement.
 6. Transfer date is the date when the plant has reached 36 months since the first payment after the commissioning operation readiness date, and the buyer has fulfilled all the payment obligations during the BOT period.
 7. The period of O&M after the end of BOT period covers maximum of 2 years from the transfer date.
 8. O&M tariff during the extended operation of maximum 2 years was Rp135/kWh, excluding 10% VAT, consisting of component B Rp20/kWh and component D Rp115/kWh.
2. LEGI entered into an agreement on trading industrial gas manufacturing and power plants No. 015500.PK/HL.02/COD/2015 dated October 15, 2015 with PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN).

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) AND
SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2017, 2016 and 2015
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

**43. Perjanjian-Perjanjian dan Ikatan Penting
(Lanjutan)**

LEGI setuju menggunakan gas yang diserahkan oleh PGN dan PGN bersedia menyerahkan dan memenuhi kebutuhan Gas bagi LEGI, sebagai bahan bakar untuk produksi utama pembangkit listrik dengan jumlah jam operasi adalah 24 (dua puluh empat) jam per hari kerja dan hari kerja 7 (tujuh) hari per minggu, dengan pemakaian minimum gas per bulan sebesar 1.000.000 m³ pada saat awal pengoperasian dan akan bertambah pada periode berikutnya.

Harga gas yang berlaku adalah harga sesuai dengan keputusan Direksi PGN yang berlaku. Nilai jaminan pembayaran adalah sebesar minimal 2 bulan dikalikan jumlah pemakaian maksimum per bulan kontrak dikalikan harga gas yang berlaku.

Berdasarkan Berita Acara Rapat yang dilakukan antara LEGI dengan PGN pada bulan Januari 2017, memutuskan untuk melakukan pengalihan kerjasama pengadaan gas kepada PT Widar Mandripa Nusantara, grup dari PGN.

3. LEGI melakukan Nota Kesepahaman dengan PT Widar Mandripa Nusantara (WMN) No. 06/MOU/LEGI/II/2017 tanggal 9 Februari 2017 tentang Kerjasama Penyediaan Tenaga Listrik di Kawasan Terminal Teluk Lamong Provinsi Jawa Timur. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama 1 tahun.

43. Agreements and Commitments (Continued)

LEGI agreed to use gas that was delivered by PGN and PGN willing to give up and meet the needs of gas for LEGI, as fuel for main production power plants by the number of operation hours is 24 (twenty four) hours per working day and working day was 7 (seven) days per week, with minimum usage of gas amounting to 1,000,000 meter cubic in the beginning of operation and will increase in the next period.

Prevailing gas prices is the price in accordance with the decision of the PGN's Board of Directors. The guarantee value of payment is at least 2 months multiplied by the maximum usage amount per contract month multiplied by the prevailing gas price.

Based on Minutes of Meeting between LEGI and PGN on January 2017, agreed to transfer agreement trading industrial gas manufacturing to PT Widar Mandripa Nusantara (WPN), same group with PGN.

3. LEGI entered into a Memorandum of Understanding with PT Widar Mandripa Nusantara (WMN) No. 06/ MOU/LEGI/II/2017 dated February 9, 2017 regarding Electricity Supply Cooperation in Terminal Teluk Lamong Area, East Java Province. This Memorandum of Understanding is valid for 1 year.

44. Kontinjensi

Perusahaan

1. Sengketa Penguasaan Tanah dan Bangunan oleh PT Timur Nusantara Secara Melawan Hukum
Bahwa pada tanggal 18 Desember 2002, Perusahaan dan PT Timur Nusantara bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama pengelolaan fasilitas terminal petikemas di Pelabuhan Tanjung Wangi Banyuwangi, untuk jangka waktu yang berakhir pada tanggal 18 Januari 2004 ("Perjanjian Kerjasama"). Objek yang dikerjasamakan dalam perjanjian tersebut adalah kerjasama lapangan penumpukan seluas 10.000 m², gudang A seluas 1.000 m² dan Ruang Kantor seluas 60 m² yang kesemuanya itu merupakan aset milik Perusahaan.

44. Contingencies

The Company

1. A Dispute on Land and Building Occupied by PT Timur Nusantara is against the Law

On December 18, 2002, the Company and PT Timur Nusantara agreed to hold an agreement for managing the container terminal facilities at the Port of Tanjung Wangi Banyuwangi, the agreement was due on January 18, 2004 ("Cooperation Agreement"). The objects cooperated in the agreement include the spaces for stacking the stuffs or goods which are 10,000 sqm, Warehouse A which is 1,000 sqm, and office area which is 60 sqm which all of these assets are owned by the Company.

44. Kontinjensi (Lanjutan)

44. Contingencies (Continued)

Berdasarkan perjanjian, PT Timur Nusantara diberikan hak untuk menguasai dan mengelola objek yang dikerjakasikan tersebut sampai dengan tanggal berakhirnya perjanjian yakni tanggal 18 Januari 2004.

According to the agreement, PT Timur Nusantara is given the right to control and manage the cooperating objects until the expiration date of the agreement which is on January 18, 2004.

Ditentukan pula dalam perjanjian, bahwa apabila perjanjian kerjasama telah berakhir, maka PT Timur Nusantara berkewajiban untuk mengembalikan objek perjanjian dimaksud kepada Perusahaan.

It is also specified in the agreement, that if the agreement expired, PT Timur Nusantara will be obligated to return the objects as mentioned in the agreement referred to the Company.

Akan tetapi setelah berakhirnya perjanjian kerjasama, PT Timur Nusantara tidak mengembalikan dan tetap menguasai objek ex perjanjian kerjasama. Perusahaan pun telah menyampaikan 3 kali surat peringatan secara sah untuk meninggalkan dan mengembalikan objek ex perjanjian kerjasama.

However, after the expiration of the agreement, PT Timur Nusantara does not have any intention to return and still retain all the objects mentioned in the ex cooperation agreement. The Company sent legal warning letters to remind the Company 3 times to leave and return the objects of the ex cooperation agreement.

PT Timur Nusantara beranggapan, bahwa perjanjian kerjasama telah diperpanjang berdasarkan side letter (surat sepihak) yang diterbitkan oleh Direktur Utama Perusahaan. Sementara Perusahaan beranggapan surat sepihak tersebut tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak pernah disampaikan sama sekali kepada PT Timur Nusantara.

PT Timur Nusantara assumed that the agreement was extended under the side letter (one-sided letters) issued by the President Director of the Company. While the Company assumed that the side letter has no legal force because it was never delivered to PT Timur Nusantara.

Pada akhirnya pada tanggal 20 Maret 2009, Perusahaan mengajukan gugatan kepada PT Timur Nusantara melalui Pengadilan Negeri Surabaya. Dengan tuntutan antara lain pengembalian objek ex perjanjian kerjasama dan membayar ganti rugi sebesar Rp1.855.287.

On March 20, 2009, the Company filed a lawsuit against PT Timur Nusantara through Surabaya District Court. The lawsuit states that PT Timur Nusantara should return the object of the ex agreement and pay compensation amounting to Rp1,855,287.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya kemudian menjatuhkan putusan yang pada intinya mengabulkan dan memenangkan gugatan Perusahaan.

Surabaya District Court Judge ruled on the lawsuit which was granted and won by the Company.

Putusan serupa juga dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur dan Mahkamah Agung RI sesuai relas putusan Mahkamah Agung RI No. 716K/Pdt/2011, Jo No. 196/Pdt.G/2009/PN.Sby tanggal 24 Oktober 2012, yang pada intinya memenangkan Perusahaan dan menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi (PT Timur Nusantara).

A similar verdict was handed down by High Court Judge in East Java and the Indonesian Supreme Court through its decision letter No. 716K/Pdt/2011, Jo No. 196/Pdt.G/2009/PN.Sby dated October 24, 2012, which sentenced that the Company won and rejected the request for a cassation from PT Timur Nusantara.

44. Kontinjensi (Lanjutan)

44. Contingencies (Continued)

Atas putusan Mahkamah Agung tersebut Perusahaan telah melakukan pemberitahuan kepada PT Timur Nusantara dan Perusahaan berpotensi memperoleh keuntungan berupa pengembalian aset dan potensi memperoleh pendapatan serta pembayaran ganti rugi sebesar Rp1.855.286 dari PT Timur Nusantara (berdasarkan putusan pengadilan). Dengan adanya putusan dari Mahkamah Agung RI, maka terhadap perkara ini telah berkekuatan hukum tetap.

With regards to the Supreme Court's decision, the Company made a notification to PT Timur Nusantara and the Company had a potential gain in the form of return on assets and compensation amounting to Rp1,855,286 from PT Timur Nusantara (based on court decision). Through the decision of the Indonesia Supreme Court, then the case has been legally binding.

Perusahaan telah mengirim surat ke Pengadilan Negeri Surabaya untuk meminta penjelasan bahwa Putusan Kasasi Mahkamah Agung tersebut telah dikirimkan kepada PT Timur Nusantara atau Kuasa Hukumnya sesuai surat Direksi No.HK.10/01/P.III-2014 tanggal 13 Januari 2014 dan surat No. HK.01/06/P.III-2014 tanggal 18 Februari 2014.

The Company had sent a letter to the Surabaya District Court to seek clarification on the verdict of Cassation by the Supreme Court sent to PT Timur Nusantara or the corresponding legal counsel in accordance with letter of Directors No.HK.10/01/P.III-2014 dated January 13, 2014 as well as letter No.HK.01/06/P.III-2014 dated February 18, 2014.

Perusahaan telah melakukan upaya-upaya sesuai dengan ketentuan hukum diatas. Namun dengan tidak adanya aset PT Timur Nusantara yang dapat dieksekusi, maka proses berdasarkan ketentuan hukum diatas tidak dapat lagi dilaksanakan, sehingga sesuai dengan hasil Rapat Direksi Perusahaan, diputuskan untuk mengakui piutang kepada PT Timur Nusantara sebagai pendapatan dan sekaligus dicatat sebagai penurunan nilai piutang lain-lain.

The Company has made efforts in accordance with the above legal provisions. However, in the absence of any executable assets of PT Timur Nusantara, the process under the above legal provisions can no longer be implemented, thus in accordance with the results of the Board of Directors Meeting of the Company, it was decided to recognize receivables from PT Timur Nusantara as revenue and recognized allowance for impairment other account receivables.

Pada tanggal 22 September 2017, Perusahaan melalui kuasa hukumnya dari Pramono & Partners Lawfirm menyampaikan Permohonan eksekusi riil atas aset milik PT Timur Nusantara sebagaimana ternyata dalam surat Pramono & Partners Lawfirm No.041/PP-LF/P.Eksekusi/IX/2017 tanggal 20 September 2017 perihal Permohonan Eksekusi Riil Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.196/Pdt.G/2009/PN. Sby Jo. No.359/PDT/2010/PT.Sby Jo. No.716K/Pdt/2011 tanggal 14 Desember 2011.

On September 22, 2017, the Company through its legal counsel from Pramono & Partners Lawfirm submitted an application for real execution of assets owned by PT East Nusantara's assets as evident in the letter of Pramono & Partners Lawfirm No.041/PP-LF/P.Execution/IX/2017 dated September 20, 2017 regarding the Real Execution Request for the Decision of the Surabaya District Court No.196/Pdt.G/2009/PN.Sby Jo. No.359/PDT/2010/PT.Sby Jo. No.716K/Pdt/2011 dated December 14, 2011.

2. Sengketa Sewa Tanah HPL Dengan PT Wahana Artha Luhur
Pada tanggal 29 April 1997, Perusahaan dan PT Wahana Artha Luhur ("PT WAL") membuat perjanjian sewa HPL Cabang tanjung Perak seluas 27.393 m² untuk kepentingan PT WAL membangun pabrik minyak nabati cair

2. *HPL Land Rental in Dispute With PT Wahana Artha Luhur*
On April 29, 1997, the Company and PT Wahana Artha Luhur ("PT WAL") made HPL Tanjung Perak Branch lease agreement covering 27,393 sqm for the benefit of PT WAL to build liquid vegetable oil plant

44. Kontinjensi (Lanjutan)

44. Contingencies (Continued)

(refinery) dan gudang penimbunan dengan jangka waktu 20 tahun. Berdasarkan perjanjian, pembangunan tersebut adalah kewajiban PT WAL. Akan tetapi di dalam pelaksanaannya, atau selama 14 tahun (sejak ditandatanganinya perjanjian pada tahun 1997 sampai dengan tahun 2012), PT WAL tidak melakukan pembangunan pabrik minyak nabati cair (refinery) dan gudang penimbunan yang dibangun hanya tembok pembatas saja.

(refinery) and stockpiling warehouses for 20 years. Based on the agreement, such development is the obligation of PT WAL. However, in the implementation or during the 14 years (since the signing of the agreement in 1997 until the 2012), PT WAL did not build liquid vegetable oil plant (refinery) and warehouses stockpiling, it only built the barrier.

Setelah disampaikan 3 kali somasi dan ternyata pembangunan tidak juga dilaksanakan, Perusahaan pada tanggal 24 Juli 2009 pada akhirnya memutuskan perjanjian dengan PT WAL. Merasa tidak terima, PT WAL kemudian mengajukan gugatan kepada Perusahaan melalui Pengadilan Negeri Surabaya, dengan tuntutan perpanjangan masa sewa HPL hingga 20 tahun kedepan.

After the subpoena was delivered 3 times and turns out that the construction was not implemented, on July 24, 2009 the Company decided to discontinue the agreement with PT WAL. PT WAL did not agree with the subpoena, then it filed a lawsuit against the Company through Surabaya District Court, with the demands of the HPL lease extension up to 20 years.

Terhadap kasus tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan putusan yang pada intinya gugatan PT WAL tidak terbukti dan ditolak seluruhnya. Atas putusan tersebut maka Perusahaan adalah pihak yang dimenangkan. Namun ditingkat banding, Pengadilan Tinggi Jawa Timur membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut (Perusahaan kalah).

Surabaya District Court Judge decided that PT WAL lawsuit was unproven and was wholly rejected. Based on the decision, the Company won. But at the appeal level, the East Java High Court cancelled the decision of the District Court of Surabaya (the Company lost).

Selanjutnya pada tingkat Kasasi sesuai surat putusan Mahkamah Agung RI No. 2455K/Pdt/2010, Jo No. 183/Pdt/2010/PT.Sby, Jo No. 662/Pdt.G/ 2009/PN.Sby tanggal 28 April 2011 menjatuhkan putusan yang pada intinya memenangkan Perusahaan. Namun terhadap putusan tersebut PT WAL telah mengajukan Memori Peninjauan Kembali.

Furthermore on the next level of cassation according to the decision letter of Indonesian Supreme Court No.2455K/Pdt/2010, Jo No. 183/Pdt/2010/ PT.Sby, Jo No. 662/Pdt.G/2009/PN.Sby dated April 28, 2011 passed a decision that the Company won. However, PT WAL filed a Motion for Reconsideration on the case.

Perusahaan telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 13 Februari 2012. Sebagaimana informasi perkara dalam website Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan PK dengan register No.470/PK/PDT/2012 tanggal 23 Oktober 2013 mengabulkan PK yang diajukan oleh PT WAL.

The Company filed a counter motion for reconsideration on February 13, 2012. As the information matter in the website of the Supreme Court of the Republic of Indonesia PK Verdict with register No.470/PK/PDT/2012 dated October 23, 2013 which granted the PK proposed by PT WAL.

44. Kontinjensi (Lanjutan)

44. Contingencies (Continued)

Atas laporan hasil Peninjauan Kembali dalam Nota Dinas Nomor: 382/ROKUM/X-2015 tanggal 16 Oktober 2015, dilaksanakan pertemuan dengan konsultan hukum, Suhar Adi untuk membahas kemungkinan adanya Peninjauan Kembali yang kedua. Namun, sesuai dengan ketentuan hukum yang ada, Peninjauan Kembali tidak dapat dilakukan untuk yang kedua kalinya.

On the report of the results of Review in the Official Note No. 382 / ROKUM / X-2015 dated October 16, 2015, a meeting was held with a legal consultant, Suhar Adi to discuss the possibility of a second Review. However, in accordance with existing legal provisions, Review cannot be performed for the second time.

Guna pelaksanaan kewajiban Perusahaan atas putusan Peninjauan Kembali tersebut, Perusahaan mengundang PT Wahana Artha Luhur untuk secara *business to business* membahas kerjasama penggunaan bagian lahan HPL di Pelabuhan Tanjung Perak berdasarkan Surat Undangan No.TR.0101/902/P.III-2016 tanggal 8 Juni 2016 dan No.TR.0101/993/P.III-2016 tanggal 21 Juni 2016. Pada tanggal 24 Juni 2016 justru bukan PT Wahana Artha Luhur yang menghadiri undangan pembahasan tersebut, namun PT Smart, Tbk. Dikarenakan PT Smart, Tbk merupakan entitas yang berbeda dengan PT Wahana Artha Luhur, maka Perusahaan tidak memiliki kewajiban untuk membahas kerjasama penggunaan bagian lahan HPL tersebut, sebagaimana diperintahkan oleh Putusan Peninjauan Kembali.

To perform the obligations of the Company on such a Judicial Review, the Company invited PT Wahana Artha Luhur to conduct business to business discussing the cooperation of land use of HPL at Tanjung Perak Port based on Invitation Letter No. TR.0101 / 902 / P.III-2016 dated June 8, 2016 and No. TR.0101 / 993 / P.III-2016 dated June 21, 2016. On June 24, 2016 it was not PT Wahana Artha Luhur who attended the invitation for discussion, but PT Smart, Tbk. Since PT Smart, Tbk was a different entity from PT Wahana Artha Luhur, the Company had no obligation to discuss cooperation on the use of such HPL land portion, as ordered by the Review Judgment.

Perusahaan telah melakukan penelusuran legalitas PT Wahana Artha Luhur melalui Portal Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan hasil tidak ditemukan informasi yang identik sebagaimana perjanjian kerjasama dengan PT Wahana Artha Luhur dan telah pula mengundang PT Wahana Artha Luhur melalui iklan surat kabar nasional. Namun PT Wahana Artha Luhur tidak menanggapi undangan melalui surat kabar tersebut. Dengan demikian, proses hukum yang dapat dilakukan telah selesai. Guna pelaksanaan atas putusan Peninjauan Kembali tersebut, diperlukan proses pelaksanaan kerjasama sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

The Company has conducted a legality search of PT Wahana Artha Luhur through the Portal Directorate General of General Law Administration of the Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia with the result that no identical information was found as a cooperation agreement with PT Wahana Artha Luhur and has also invited PT Wahana Artha Luhur through advertisement national newspapers. However PT Wahana Artha Luhur did not respond to the invitation through the newspaper. Thus, the legal process that can be done has been completed. In order to implement the decision of the Review, it is necessary to implement the cooperation process in accordance with the applicable provisions.

3. Terdapat beberapa tanah milik Perusahaan masih dalam proses pengadilan:
Perkara perdata No.99/Pdt.G/2008/PN.Sby dengan Warga Perak Barat atas perbuatan melawan hukum mengalihkan hak atas tanah eks HPL Perusahaan kepada Pemkot Surabaya.

3. *There are some lands owned by the Company which are still in civil court process:
A civil case No.99/Pdt.G/2008/PN. against the resident of Perak Barat for committing to break the law yielded from the action made for converting the rights of the land utility owned by ex HPL to Surabaya City Government.*

44. Kontinjensi (Lanjutan)

44. Contingencies (Continued)

Saat ini dalam proses banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur telah ada putusan banding No. 664/PDT/2010/PT.Sby yang amarnya menguatkan putusan Pengadilan Negeri No. 99/Pdt.G/2008/PN.Sby. Atas putusan tersebut Warga Perak Barat mengajukan kasasi dan telah menyampaikan memori kasasi ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Surabaya.

Currently, the case is under the process of appeal in the High Court of East Java. There was a verdict, No. 664/PDT/2010/PT.Sby. Which enforced the verdict by District Court No. 99/Pdt.G/2008/PN.Sby. Of that verdict, the residents of Perak Barat had made an appeal and submitted the cassation to the Supreme Court of Surabaya, through the District Court.

Perusahaan telah mengajukan kontra memori kasasi sebagaimana surat tanda terima kontra memori kasasi No. 99/Pdt.G/2008/PN.Sby tanggal 27 Oktober 2011. Sampai saat ini belum ada putusan Kasasi dari Mahkamah Agung.

The Company has also filed a counter cassation as per counter cassation appeal No. 99/Pdt.G/2008/PN.Sby dated October 27, 2011. Until now there has been no decision of Cassation from the Supreme Court.

4. Sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dalam risalah rapat No.HM.0705/11/P.III-2002, 027.A/LAT.01.KOM/XII-2002 tanggal 2 Desember 2002 yang menyatakan Perusahaan mengundurkan diri dari keikutsertaan dalam pemilikan PT Lamin Aspalindotiga (LAMIN). Aspek legal dari keputusan tersebut belum dilaksanakan dan Perusahaan masih dalam proses menentukan nilai kompensasi atas penyertaan tersebut.
5. Saudara Yusuf Efendi sebagai Penggugat melawan Saudari Widji sebagai Tergugat dan Perusahaan sebagai Turut Tergugat, gugatan Saudara Yusuf Efendi terhadap Saudari Widji dan Perusahaan sebagai turut tergugat dengan No. perkara 13/Pdt.G/2013/PN.Sby tanggal 22 Januari 2013.

4. *Based on decision of extra ordinary shareholders' meeting as mentioned in minute of meeting No.HM.0705/11/P.III-2002, 027.A/LAT.01.KOM/XII-2002 dated December 2, 2002 it was stated that the Company withdrew from the ownership of PT Lamin Aspalindotiga (LAMIN). Legal aspects of the decision have not been executed and the Company is currently in the process of determining the value of compensation on this withdrawal.*
5. *Yusuf Efendi, a Plaintiff against Mrs. Widji, a Defendant and the Company as Co-defendant, Mr.Yusuf Efendi filed lawsuit against Mrs. Widji and the Company as a co-defendant with case No.13/Pdt.G/2013/PN.Sby dated January 22, 2013.*

Penggugat mengaku sebagai ahli waris yang sah atas bangunan Jl. Teluk Nibung Timur 8/25A Surabaya yang berdiri di atas HPL Pelabuhan, penggugat menyatakan bahwa tergugat telah menempati obyek sengketa tanpa ijin penggugat, selanjutnya penggugat meminta kepada turut tergugat untuk mengubah ijin penggunaan tanah yang sebelumnya atas nama tergugat menjadi atas nama penggugat dan telah ada putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. Pdt.G 13/PN.Sby tanggal 28 Agustus 2013 yang menerima sebagian tuntutan penggugat. Saat ini Perusahaan selaku turut tergugat telah mengajukan banding atas putusan PN tersebut. Hingga saat ini belum ada putusan banding.

Plaintiff claimed to be the legitimate heir of the building in Jl. Teluk Nibung East 8/25A Surabaya port standing on HPL, the plaintiff claimed that the defendant had occupied the disputed without permission of the plaintiff, then the plaintiff requested the defendant helped to change the land use permit previously on behalf of the defendant to be on behalf of the Plaintiff and no decision has been made by Surabaya District Court No. Pdt.G 13/PN.Sby dated August 28, 2013 the plaintiff received a partial claim. Currently the Company as co-defendant appealed to the decision of the District Court. As of to date, there has been no appeal decision.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) AND
SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2017, 2016 and 2015
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

44. Kontinjensi (Lanjutan)

44. Contingencies (Continued)

6. Permasalahan dengan Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK). Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) selaku Penggugat melawan Perusahaan selaku Tergugat dalam Perkara Perdata No.807/Pdt.G/2014/ PN.Sby. Penggugat mendalilkan Perusahaan selaku Tergugat telah melakukan kebohongan dengan mencantumkan lingkup bisnis sebagai penyedia jasa air kapal pada Annual Report Tahun 2011 padahal secara nyata Tergugat tidak bergerak di bidang bisnis tersebut, sedemikian menurut Penggugat, Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena melanggar Pasal 7 huruf b, jis. Pasal 8-10 UU Perlindungan Konsumen.

Perkara ini telah diputus oleh Majelis Hakim PN Surabaya dengan putusan No.807/Pdt.G/2014/PN.Sby tanggal 3 Maret 2015 dengan amar putusan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp426.000.

Atas putusan tersebut, YLPK mengajukan memori banding yang diterima Perusahaan pada tanggal 26 Mei 2015 dan Perusahaan telah menyampaikan kontra memori banding pada tanggal 26 Juni 2015.

Atas permohonan banding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya telah menjatuhkan putusan sebagaimana surat Pengadilan Tinggi Surabaya No.W14-U/5301/HK.02/7/2016 tanggal 28 Juli 2016 perihal Pengiriman Kembali Berkas Perkara No.807/Pdt.G/2014/PN.Sby.

7. Permasalahan Penggusuran yang dilakukan oleh PT KAI (Persero) Daops VIII Surabaya di sekitar Stasiun Kalimas, Surabaya, terdiri atas:
- a) Abdullah/ Dewi Nasiroh, dkk selaku Penggugat melawan PT KAI (Persero) Daops VIII Surabaya selaku Tergugat I dan Perusahaan selaku Tergugat II dalam perkara perdata No.901/Pdt.G/2014/PN.Sby;
- b) Kadarwati alias Ibu Baginda selaku Penggugat melawan PT KAI (Persero) Daops VIII Surabaya selaku Tergugat I dan Perusahaan selaku Tergugat II dalam perkara perdata No.902/Pdt.G/2014/PN.Sby;

6. *Issues with the Consumer protection Foundation (YLPK). Consumer Protection Foundation (YLPK) as plaintiff against the Company as Defendant in Civil Case No. 807/Pdt.G/2014/PN.Sby. Plaintiff argued that the Company as Defendant has lied by stating the scope of the business as a provider of water vessels on the Annual Report of 2011 when real Defendant is not engaged in the business, thus according to the Plaintiff, the Defendant has done Torts (PMH) for violating Article 7 letter b, jis. Article 8-10 Consumer Protection Act.*

This of was decided by the judges of PN Surabaya with decision No. 807/Pdt.G/2014/PN.Sby dated March 3, 2015 with the ruling rejecting the claim in its entirety and punish the Plaintiff to pay court costs amounting to Rp426,000.

Upon the verdict, YLPK filed motion to appeal received by the Company dated May 26, 2015 and the Company has submitted a counter memorandum on motion to appeal on June 26, 2015.

Upon the assembly of appeal, the Surabaya High Court Judge has ruled as stated in the letter of Surabaya High Court No. W14-U/5301/HK.02/7/2016 dated July 28, 2016 regarding Shipping Back Case file No.807/Pdt.G/2014/PN.Sby.

7. *Issues on evictions carried out by PT KAI (Persero) Daops VIII around the Station Kalimas Surabaya, Surabaya, consisting of:*
- a) *Abdullah/ Dewi Nasiroh, et al as the Plaintiff against PT KAI (Persero) Daops VIII Surabaya as Defendant I and the Company as the second defendant in the civil case No. 901/Pdt.G/2014/PN.Sby;*
- b) *Kadarwati aka Mrs. King as plaintiff against PT KAI (Persero) Daops VIII Surabaya as Defendant I and the Company as the second defendant in the civil case No. 902/Pdt.G/2014/PN.Sby;*

44. Kontinjensi (Lanjutan)

44. Contingencies (Continued)

c) Maslichah dan Soeselo, dkk selaku Penggugat melawan PT KAI Daops VIII Surabaya selaku Tergugat I dan Perusahaan selaku Tergugat II dalam perkara perdata No. 903/Pdt.G/2014/PN.Sby.

c) *Maslichah and Soeselo, et al as the Plaintiff against PT KAI Daops VIII Surabaya as Defendant I and the Company as the second defendant in the civil case No. 903/Pdt.G/2014/PN.Sby.*

Para Penggugat dalam register perkara No. 901-903/Pdt.G/2014/PN.Sby merupakan korban pengusuran yang dilakukan oleh PT KAI (Persero) Daops VIII Surabaya di sekitar Stasiun Kalimas, Surabaya. Lokasi pengusuran tersebut rencananya akan digunakan dalam rangka kerjasama usaha pengangkutan petikemas melalui sarana kereta api antara PT KAI (Persero) dengan Perusahaan.

The plaintiff in the case register number 901-903/Pdt.G/2014/PN.Sby is evictees conducted by PT KAI (Persero) Daops VIII around Station Kalimas Surabaya, Surabaya. Location eviction is planned to be used in the framework of cooperation by means of hauling container trains between PT KAI (Persero) and the Company.

Para Penggugat menuntut Tergugat I dan Tergugat II membayar uang ganti rugi yang jumlahnya bervariasi.

The plaintiffs are suing Defendant I and Defendant II to pay compensation of varying amounts.

Perkara saat ini telah diputus oleh Pengadilan Negeri Surabaya No.901-903/Pdt.G/2014/PN.Sby pada tanggal 17 Juni 2015 dengan amar putusan pada pokoknya memenangkan Perusahaan.

The case has been decided by the District Court of Surabaya No. 901-903/Pdt.G/2014/PN.Sby on June 17, 2015 with the ruling basically won the Company.

Penggugat telah menyampaikan pernyataan banding pada tanggal 25 Juni 2015, namun belum ada memori banding yang diberikan Peggugat.

Plaintiff has submitted a statement of appeal on June 25, 2015, however, no motion to appeal has been granted to the plaintiff.

Bahwa atas permohonan banding dari Para Penggugat register perkara No. 902/Pdt.G/2014/PN.Sby, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya telah menjatuhkan putusan dengan amar putusan pada pokoknya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 902/Pdt.G/2014/PN.Sby sebagaimana relaas No.62/Pdt/2016/PT.Sby tanggal 13 Juli 2016.

On the request for appeal from Plaintiffs with register case No.902/Pdt.G/2014/PN.Sby, Surabaya High Court Judge has ruled with the verdict substantially strengthen the Surabaya District Court decision No.902/Pdt.G/2014/PN.Sby as relaas No.62/Pdt/2016/PT.Sby dated July 13, 2016.

8. Sengketa rumah dinas operasional (RDO) Alm. Hamonangan Ritonga di Cabang Benoa

8. *Dispute on the operational service domicile (RDO) alm. Hamonangan Ritonga in Benoa Branch*

Perusahaan selaku Penggugat melawan Delila Harahap (janda/ ahli waris Alm. Hamonangan Ritonga, pensiunan pegawai) selaku Tergugat, dalam perkara perdata dengan register No.69/Pdt.G/2014/PN.Dps.

The Company as plaintiff against Delila Harahap (widow/ heirs Alm. Hamonangan Ritonga, Retired Employee) as Defendant in a civil case with register No.69/Pdt.G/2014/PN.Dps.

44. Kontinjensi (Lanjutan)

44. Contingencies (Continued)

Pada awalnya Alm. Hamonangan Ritonga menempati rumah dinas operasional (RDO) yang terletak di Jalan Pulau Ambon No.13, Denpasar saat bertugas sebagai Kepala Dinas Kepanduan Cabang Benoa. Akan tetapi hingga Almarhum mutasi ke cabang Tanjung Wangi hingga pensiun dan meninggal, Almarhum beserta ahli warisnya tidak mengosongkan rumah dinas dimaksud walaupun telah berulang kali diperingatkan.

Initially Alm. Hamonangan Ritonga in operational service domicile (RDO) located in Ambon Island Road No. 13, Denpasar is currently serving as Head Scout Branch Benoa. But until He moved to the branch Tanjung Wangi until retirement and died, their heirs and their late vacate official residence in question despite repeated warnings.

Perkara telah diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 23 Oktober 2014, yang amar putusannya pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah obyek sengketa.

The case has been decided by the Denpasar District Court on October 23, 2014, the verdict in principle in favor of the Plaintiff partially and stated that the Plaintiff is the rightful owner of the disputed object.

Atas putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut, Tergugat mengajukan banding, dimana Pengadilan Tinggi Denpasar pada tanggal 21 April 2015 mengeluarkan putusan yang pada pokoknya menguatkan putusan PN Denpasar dan atas putusan banding tersebut Pembanding/ Tergugat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Perusahaan telah menyampaikan kontra memori kasasi.

On the decision of the Denpasar District Court, the Defendant filed an appeal, which the Denpasar High Court on 21 April 2015 issued a ruling that essentially corroborates the ruling of Denpasar District Court and on appeal the decision of the Appeal / Defendant appealed to the Supreme Court. The Company has submitted a counter appeal against the cassation.

Telah dikeluarkan putusan Kasasi No.3266 K/PDT/2015 tanggal 15 Maret 2016, yang amar putusannya menolak kasasi Pemohonan (Delila Harahap). Salinan putusan atas perkara tersebut telah diterima Perusahaan pada tanggal 9 Desember 2016 dan dinyatakan bekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), yang amar putusannya pada pokoknya memenangkan Perusahaan.

*Cassation decision No. 3266K/PDT/2015 dated March 15, 2016, has been issued, whose ruling rejected the appeal Petition (Delila Harahap). A copy of the ruling on the case has been accepted by the Company on December 9, 2016 and declared as permanent legal force (*inkracht van gewijsde*), whose verdict in essence stated the Company as the winner.*

Pada 30 Juni 2017 tindak lanjutnya adalah dengan dilaksanakan proses eksekusi sesuai dengan putusan kasasi. Perkara Selesai.

On June 30, 2017 the follow-up is to carry out the execution process in accordance with the decision of the cassation. The Case was completed and final.

9. Sengketa terkait tanah HPL di Cabang Banjarmasin
H. Hartani Bin Achmad, dkk., selaku Penggugat melawan Perusahaan selaku Tergugat dalam perkara perdata No.32/Pdt.G/2015/PN.Bjm.

9. *HPL Land Disputes in Banjarmasin Branch*

H. Hartani Bin Ahmad et., al., As the Plaintiff against the Company as Defendant in a civil case No.32/Pdt.G/2015/PN.Bjm.

Penggugat mengaku sebagai pemilik sah atas tanah seluas ± 1.890 m² sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 89 tahun 1965 yang terletak di Jalan Barito Hilir/ Pangeran H.M. Noor, Kelurahan Telaga Biru, Kecamatan

Plaintiffs claimed to be the rightful owner of the land area of ± 1,890 sqm as Certificate Properties No. 89 of 1965 which is located at Jalan Barito Hilir / Prince H.M. Noor, Village of Blue Lake, District of West Banjarmasin,

44. Kontinjensi (Lanjutan)

44. Contingencies (Continued)

Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin. Penggugat mendalilkan bahwa Perusahaan telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) dengan secara diam-diam memasukkan tanah sengketa ke dalam sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 5 Tahun 2001 tanggal 27 Februari 2001 atas nama Perusahaan.

Banjarmasin. Plaintiff argued that the Company had committed an unlawful act (PMH) by secretly entering into the disputed land management right certificate No. 5 of 2001 dated February 27, 2001 in the name the Company.

Atas hal tersebut, Penggugat menuntut Perusahaan membayar ganti rugi sebesar Rp15.225.000.

On that matter, the plaintiffs are suing the Company to pay compensation amounting to Rp15,225,000.

Perkara ini telah diputus oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin melalui putusan No.32/Pdt.G/2015/PN.Bjm dengan amar putusan pada pokoknya memenangkan Perusahaan.

This case was decided by the District Court of Banjarmasin by decision No. 32/Pdt.G/2015/PN.Bjm with the ruling basically won the Company.

Atas putusan tersebut, Penggugat menyatakan banding dan Pengadilan Tinggi Banjarmasin telah mengeluarkan putusan banding No.22/PDT/2016/PT.BJM tanggal 21 Maret 2016, dengan putusan pada pokoknya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin.

On that decision, the Plaintiff appealed and the High Court has issued a ruling Banjarmasin appeal No.22/PDT/2016/PT.BJM dated March 21, 2016, with the decision in principle Banjarmasin District Court strengthen the verdict.

Para Pemohon Kasasi kemudian mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung dan telah menyerahkan Memori Kasasi pada tanggal 16 Mei 2016. Atas hal ini, Tergugat I kemudian mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 30 Mei 2016. Saat ini masih menunggu Putusan Mahkamah Agung atas perkara ini.

The Cassation Appellant subsequently applied for a cassation to the Supreme Court and has submitted a Motion of Cassation on May 16, 2016. On this matter, Defendant I subsequently filed the Cassation Contra Memorandum on May 30, 2016. Currently, the Company is waiting for the Supreme Court Judgment on the case.

10. Sengketa terkait revitalisasi Kalimas PT Upaya Export, dkk. Suanthie John, Sugihan Suliandjo, dll, selaku Penggugat melawan Perusahaan selaku Tergugat dalam perkara Tata Usaha Negara No.49-57/G/2015/PTUN.SBY.

10. *Disputes relating to the revitalization of Kalimas PT Upaya Export, et al. Suanthie John, Sugihan Suliandjo, etc., as the Plaintiff against the Company as Defendant in the case of the State Administration No.49-57/G/2015/PTUN.SBY.*

Para Penggugat merupakan pelaku usaha, pengguna tanah HPL Pelabuhan, yang melakukan usaha di Kalimas, Surabaya yang akan dilakukan revitalisasi. Cabang Tanjung Perak meminta para Penggugat untuk mengosongkan gudang-gudang dan tanah HPL Pelabuhan sehubungan dengan akan dilakukannya revitalisasi Kalimas.

The Plaintiff is a business, HPL Port land users, who conduct business in Kalimas, Surabaya, which will conduct revitalization. Tanjung Perak branch asked the plaintiff to empty warehouses and land in connection with the Port HPL will conduct Kalimas revitalization.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) AND
SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2017, 2016 and 2015
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

44. Kontinjensi (Lanjutan)

44. Contingencies (Continued)

Perkara tersebut saat ini telah diputus Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 29 Juli 2015, dengan amar putusan pada pokoknya memenangkan Perusahaan dan atas putusan tersebut Penggugat mengajukan banding ke PT TUN Surabaya.

The case was now decided by Surabaya State Administrative Court on July 29, 2015, with the ruling basically won the Company and the verdict Plaintiff appealed to PT TUN Surabaya.

Atas perkara ini, Penggugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dan telah dikeluarkan putusan banding No.221-226/B/2015/PT.TUN.SBY tanggal 12 Januari 2016, yang pada pokoknya menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.

On this case, the Plaintiff filed an appeal to the High Administrative Court of Surabaya and has issued an appeal decision No. 221-226/B/2015/PT.TUN.SBY dated January 12, 2016, which essentially corroborate the ruling of Surabaya State Administrative Court.

Kemudian Penggugat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung RI dengan memori kasasi tanggal 23 Februari 2016. Atas memori kasasi ini telah diberikan kontra memori kasasi dari Perusahaan tanggal 17 Maret 2016.

Then the claimant appealed to the Supreme Court through motion for cassation dated February 23, 2016. The motion for cassation has given counter motion for cassation of the Company dated March 17, 2016.

Atas pengajuan Kasasi tersebut, Ketua Pengadilan Tata Usaha Surabaya menerbitkan penetapan yang pada pokoknya menerangkan bahwa perkara ini merupakan perkara Tata Usaha Negara dalam lingkup local dan hanya berlaku di antara para pihak yang berperkara sehingga menurut ketentuan Hukum Acara Tata Usaha Negara yang berlaku terhadap perkara ini tidak dapat diajukan Kasasi sehingga perkara dinyatakan berkekuatan hukum tetap.

On the submission of Cassation, the Chairman of the Administrative Court of Surabaya issued a determination which principally states that this case is State Administration case within the scope of local and only apply between the litigants thus according to the provisions of the Criminal-Law Procedure of the State Administration applicable against the said case cannot file a Cassation, thus the case is strengthen by permanent law.

Atas penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut Penggugat mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana tertuang dalam memori Peninjauan Kembali No.49-57/G/2015/PTUN.Sby.

On the determination of the Chairman of the State Administrative Court of Surabaya, the Plaintiffs filed a judicial review to the Supreme Court through the State Administrative Court as contained in the motion for Reconsideration No. 49-57/G/2015/PTUN.Sby.

Atas adanya gugatan tersebut Perusahaan menunjuk konsultan hukum eksternal dari Pramono & Partners Lawfirm guna menangani dan mewakili perusahaan. Saat ini perkara telah diputus oleh Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan amar putusan menolak Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali. Perusahaan saat ini sedang menunggu Salinan putusan resmi dari Mahkamah Agung. Saat ini sedang menunggu Pelaksanaan eksekusi putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung dan Perkara Selesai.

For the lawsuit, the Company appointed an external legal consultant of Pramono & Partners Lawfirm to address and represent the Company. Currently the case has been decided by the judges of the Supreme Court of the Republic of Indonesia to the ruling by rejecting a judicial review of the Petitioners Reconsideration. The Company is currently waiting for an official copy of the decision of the Supreme Court. Currently the Company is waiting for the Execution of the Review from the Supreme Court and Complete Court Decisions.

44. Kontinjensi (Lanjutan)

44. Contingencies (Continued)

11. Sengketa perdata terkait revitalisasi Kalimas Perusahaan dalam kedudukannya selaku Tergugat telah digugat dalam lingkup perdata oleh PT Upaya Export dan Ang Suanthie John selaku Penggugat di Pengadilan Negeri Surabaya dengan register No.507/Pdt.G/2016/PN.Sby.

11. *HPL land disputes in Kalimas revitalization*
The Company in its capacity as Defendant has been sued in the civil sphere by PT Upaya Export and Ang Suanthie John as the plaintiff in Surabaya District Court with register No.507/Pdt.G/2016/ PN.Sby.

Dalam gugatannya para Penggugat mendalihkan bahwa Perusahaan telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) dengan secara sewenangwenang melakukan perencanaan pengosongan gudang miliknya di Jalan Kalimas Baru No.128 dan 140, Surabaya.

In the lawsuits the plaintiffs argued that the Company has committed an unlawful act (PMH) with arbitrary conduct discharge planning its warehouse in Jalan Baru Kalimas No. 128 and 140, Surabaya.

Dalam gugatannya para Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Surabaya mengakui bahwa gudang tersebut adalah miliknya dan menyatakan bahwa Perusahaan telah melakukan perbuatan melawan hukum.

In the lawsuit the Plaintiff pleaded to Surabaya District Court acknowledged that the charter is his warehouse and declared that the Company has committed an unlawful act.

Atas gugatan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan putusan yang amar putusannya pada pokoknya mengabulkan gugatan PT Upaya Export dan Ang Suanthie John untuk seluruhnya.

The lawsuit over the Surabaya District Court Judge ruled that verdict in principle in favor of PT Upaya Export and Ang Suanthie John entirety.

Atas putusan tersebut, Perusahaan melalui kuasa hukumnya dari Pramono & Partners mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya berdasarkan Akta Permohonan Banding No.507/Pdt.G/2016/PN.Sby tanggal 6 Desember 2016. Posisi perkara saat ini pada tahap pengajuan memori kasasi ke Pengadilan Tinggi Surabaya.

On that decision, the Company through its attorney of Pramono & Partners filed an appeal to the High Court of Appeal Surabaya based on the Deed No. 507/Pdt.G/2016/PN.Sby position on 6 December 2016. The case is currently at the stage of filing a motion to appeal to Surabaya High court.

Telah terbit putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.112/PDT/2017/PT.Sby Jo. No.507/Pdt.G/2016/PN.Sby yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menghukum Penggugat untuk menyerahkan dalam keadaan kosong tanah HPL Perusahaan yang dikuasai Penggugat kepada Perusahaan.

The decision of the Surabaya High Court No. 112/PDT/2017/PT.Sby Jo was issued. No. 507/Pdt.G/2016/PN.Sby which substantially grants the Plaintiff's claim in part and punished the Plaintiff to hand over the vacant Land of the Company HPL land controlled by the Plaintiff to the Company.

Atas putusan banding tersebut, PT Upaya Export dan Ang Suanthie John mengajukan kasasi ke MA.

On the appeal, PT Upaya Export and Ang Suanthie John appealed to the Supreme Court.

44. Kontinjensi (Lanjutan)

44. Contingencies (Continued)

12. Sengketa terkait tanah HPL di Cabang Kupang.

Penggugat dalam gugatannya tertanggal 6 Mei 2015 mengaku sebagai ahli waris dari seseorang bernama Sui Besi yang memiliki tanah seluas ±57.800 m² yang terletak di Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang. Dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan Perusahaan telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) dengan secara diam-diam dan tanpa izin telah memasukkan tanah sengketa tersebut ke dalam Sertifikat Hak Penguasaan No.1 tanggal 1 Agustus 1975 seluas 36,25 Ha. Atas hal tersebut, Penggugat menuntut agar Perusahaan membayar ganti rugi material sebesar Rp390.000 dan ganti rugi immaterial sebesar Rp1.000.000.

Terkait gugatan *a quo*, Pengadilan Negeri Kupang (PN Kupang) telah mengeluarkan Putusan pada tanggal 26 November 2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat ditolak seluruhnya. Penggugat kemudian mengajukan permohonan banding. Atas permohonan banding tersebut Pengadilan Tinggi Kupang kemudian mengeluarkan Putusan pada tanggal 1 Juni 2016 yang pada pokoknya memperkuat Putusan Pengadilan Negeri No.92/Pdt.G.PMH/2015/PN.Kpg.

Atas putusan tersebut, Penggugat mengajukan permohonan kasasi dan Perusahaan telah mengirimkan kontra memori kasasi.

Hingga saat ini masih dalam proses kasasi dan menunggu Putusan dari Mahkamah Agung atas Perkara ini.

PT Pelindo Properti Indonesia (PPI)

Consultant Dodik & Partners, bertindak dan atas nama Tergugat, yaitu penjual tanah kepada PT PPI, terkait sengketa tanah Labuan Bajo. Berdasarkan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo No. 14/PDT.G/2016/PN.LBJ tanggal 27 Desember 2016, menyatakan bahwa memenangkan gugatan dari pihak ketiga atas objek tanah tersebut.

Berdasarkan keputusan tersebut, dilakukan upaya banding berdasarkan Akta Permohonan Banding No. 14/PDT.G/2016/PN.LBJ tanggal 9 Januari 2017.

12. HPL land-related disputes at Kupang Branch.

Plaintiff in his lawsuit dated May 6, 2015 claimed to be the heir of a man named Sui Besi who owned a land area of ± 57,800 sqm located in Kelurahan Alak, Alak Sub-district, Kupang City. In its lawsuit, the Plaintiff argued that the Company had committed unlawful acts (PMH) secretly and without permission had entered the disputed land into Certificate of Tenure Number 1 dated August 1, 1975 covering 36.25 Ha. The Plaintiff demands that the Company pay material compensation amounting to Rp390,000 and immaterial damages amounting to Rp1,000,000.

Related to the quo lawsuit, the Kupang District Court (PN Kupang) issued a Decision on November 26, 2015 which essentially stated that the Plaintiff's claim is entirely denied. The Plaintiff then submitted a request for an appeal. Upon the appeal the High Court of Kupang subsequently issued a Decision on June 1, 2016 which substantially strengthened the Decision of the District Court No.92/Pdt.G.PMH/2015/PN.Kpg.

On the verdict, the Plaintiffs filed an appeal and the Company has sent counter motion for cassation.

Until now it is still in the process of appeal and waiting Judgment from the Supreme Court on the Case.

PT Pelindo Properti Indonesia (PPI)

Dodik & Partners Consultant, who act on behalf of the Defendant, who are land sellers to PT PPI, related to land disputes in Labuan Bajo. Based on Copy Decision of Labuan Bajo's District Court No. 14/PDT.G/2016/PN.LBJ dated December 27, 2016, stated that it won a lawsuit from a third party on the object of the land.

Based on those decision, an appeal is made based on to Appeal Act No. 14/PDT.G/2016/PN.LBJ dated January 9, 2017.

44. Kontinjensi (Lanjutan)

44. Contingencies (Continued)

Dalam surat Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara No.14/PDT.G/2016/PN.LBJ tanggal 24 Januari 2017, terbanding (Ir. Hugeng Syatriadi) diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam waktu 14 hari. Sampai dengan tanggal laporan keuangan diotorisasi, proses banding masih dalam proses.

In a letter Relas Checking Case Files Notification No. 14 /PDT.G/2016/PN.LBJ dated January 24, 2017, (Ir. Hugeng Syatriadi) was given the opportunity to study the case files within 14 days. As of the date of the financial statements is authorized, the appeal process is still in progress.

45. Laba Per Saham

45. Earnings Per Share

Laba usaha dan laba bersih untuk tujuan penghitungan laba per saham dasar adalah sebagai berikut:

Income from operations and net income for the calculation of basic earning per share is as follows:

	2017 Rp	2016 Rp	2015 Rp	
Laba Bersih	1,470,490,226	1,037,329,721	702,533,323	<i>Net Income</i>
Total	1,470,490,226	1,037,329,721	702,533,323	Total

Jumlah saham berdasarkan rata-rata tertimbang saham beredar untuk tujuan penghitungan laba per saham dasar adalah saham per 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 sebanyak 1.018.953 saham.

The number of shares based on weighted average of outstanding shares was published for the purpose of calculation of basic earning per share as of December 31, 2017, 2016 and 2015 amounted to 1,018,953 shares.

	2017 Rp	2016 Rp	2015 Rp	
Laba Bersih				
Per Saham Dasar	1,443	1,018	689	<i>Basic Earning per Share</i>

Pada tanggal laporan posisi keuangan, Perusahaan tidak memiliki efek yang berpotensi saham biasa yang dilutif.

At statement of financial position date, the Company has no dilutive potential ordinary shares.

46. Instrumen Keuangan dan Manajemen Risiko Keuangan

46. Financial Instrument and Financial Risks Management

a. Kebijakan Manajemen Risiko

Dalam transaksi normal Grup, secara umum terekspos risiko keuangan sebagai berikut:

1. Risiko Kredit
2. Risiko Nilai Tukar Mata Uang
3. Risiko Tingkat Suku Bunga
4. Risiko Likuiditas
5. Risiko Harga
6. Risiko Investasi

a. Risk Management Policy

In normal transaction, the Group is generally exposed to financial risks as follows:

1. *Credit Risk*
2. *Foreign Exchange Rate Risk*
3. *Interest Rate Risk*
4. *Liquidity Risk*
5. *Price Risk*
6. *Investment Risk*

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**46. Instrumen Keuangan dan Manajemen Risiko
Keuangan (Lanjutan)**

Catatan ini menjelaskan mengenai eksposur Grup terhadap masing-masing risiko di atas dan pengungkapan secara kuantitatif termasuk seluruh eksposur risiko serta merangkum kebijakan dan proses-proses yang dilakukan untuk mengukur dan mengelola risiko yang timbul.

Direksi Grup bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan manajemen risiko keuangan Grup dan secara keseluruhan program manajemen risiko keuangan Perusahaan difokuskan pada ketidakpastian pasar keuangan dan meminimalisasi potensi kerugian yang berdampak pada kinerja keuangan Grup.

Kebijakan manajemen Grup mengenai risiko keuangan adalah sebagai berikut:

1. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko dimana Grup akan mengalami kerugian yang timbul dari pelanggan, klien atau pihak rekanan yang gagal memenuhi liabilitas kontraktual mereka. Instrumen keuangan Grup yang mempunyai potensi atas risiko kredit terdiri dari kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain dan investasi. Jumlah eksposur risiko kredit maksimum sama dengan nilai tercatat atas akun-akun tersebut.

Untuk meringankan risiko ini, Grup menetapkan kebijakan untuk transaksi Penjualan jasa kepada pelanggan dengan mengharuskan pemakai jasa /pelanggan untuk memberikan uang muka sebelum bertransaksi, sehingga Perusahaan lebih mudah memantau pendapatannya. Selain itu saldo piutang dipantau secara terus menerus untuk mengurangi kemungkinan piutang yang tidak tertagih. Ketika pelanggan tidak mampu melakukan pembayaran dalam jangka waktu yang telah diberikan, Grup akan menghubungi pelanggan untuk menindaklanjuti piutang yang telah lewat jatuh tempo. Jika pelanggan tidak melunasi piutang yang telah jatuh tempo dalam jangka waktu yang telah ditentukan, Perusahaan akan menghentikan pelayanan jasa kepada pelanggan sebagai akibat gagal bayar.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) AND
SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2017, 2016 and 2015
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

**46. Financial Instrument and Financial Risks
Management (Continued)**

This Note describes the exposure of the Group to each of the above risks and quantitative disclosures including risk exposures and summarizes the policies and processes for measuring and managing the risks that arised.

The Group's directors are responsible for implementing risk management policies and overall financial risk management program which focuses on uncertainty of financial market and minimize potential losses that will have an impact to the Group's financial performance.

The Group's policy on financial risk management are as follows:

1. Credit Risk

Credit risk is the risk that the Group will incur loss arising from their customers, clients or counterparties that fail to discharge their contractual obligations. The Group's financial instruments that have potential credit risk are cash and cash equivalent, trade accounts receivable, other accounts receivable and investments. Maximum total credit risks exposure are equal to the carrying amount of the respective accounts.

To minimize this risk, the Group established a policy to deal with the sale of services to customers by requiring service users / customers to pay deposit's before entering transaction and hence allow the Company to monitor their income easier. In addition, receivable balances are monitored on a continuous basis to reduce the possibility of uncollectible receivables. When a customer is unable to make payments within the specified time, the Group will contact the customer to follow up on receivables that are past due. If the customer does not pay the receivables within a specified time period, the Company will discontinue services to customers as a result of the default.

**46. Instrumen Keuangan dan Manajemen Risiko
Keuangan (Lanjutan)**

**46. Financial Instrument and Financial Risks
Management (Continued)**

Tergantung pada penilaian Perusahaan, penyisihan khusus dibuat jika terdapat bukti objektif tidak tertagih.

Depending on the assessment of the Company, specific allowance is made when there is an objective evidence that it will not be collected.

Nilai tercatat dari aset keuangan mencerminkan nilai eksposur kredit maksimum. Nilai eksposur kredit maksimum pada tanggal laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

The carrying amount of the financial asset reflects the value of the maximum credit exposure. The maximum credit exposure value on the statements of financial position are as follows:

31 Desember 2017	Belum jatuh tempo/Neither past due	Telah jatuh tempo/Past due	Penurunan nilai/Impairment	Total	December 31, 2017
<u>Pinjaman yang diberikan dan piutang:</u>					<u>Loans and Receivables:</u>
Kas dan Setara Kas	2,750,527,471	--	--	2,750,527,471	Cash and Cash Equivalents
Kas yang Dibatasi Penggunaannya	5,149,595	--	--	5,149,595	Restricted Cash
Investasi Jangka Pendek	10,988,190	--	--	10,988,190	Short Term Investment
Piutang Usaha	423,585,560	494,251,312	(91,332,946)	826,503,926	Trade Receivables
Piutang Lain-Lain	179,197,463	86,731,420	(40,307,802)	225,621,081	Other Receivables
Aset Tidak Lancar Lainnya - Uang Jaminan	15,599,021	--	--	15,599,021	Other Non - Current Assets - Security Deposits
Total	3,385,047,300	580,982,732	(131,640,748)	3,834,389,284	Total
31 Desember 2016	Belum jatuh tempo/Neither past due	Telah jatuh tempo/Past due	Penurunan nilai/Impairment	Total	December 31, 2016
<u>Pinjaman yang diberikan dan piutang:</u>					<u>Loans and Receivables:</u>
Kas dan Setara Kas	1,815,986,830	--	--	1,815,986,830	Cash and Cash Equivalents
Kas yang Dibatasi Penggunaannya	33,213,107	--	--	33,213,107	Restricted Cash
Investasi Jangka Pendek	4,917,631	--	--	4,917,631	Short Term Investment
Piutang Usaha	258,268,497	337,310,973	(68,269,936)	527,309,534	Trade Receivables
Piutang Lain-Lain	189,952,416	71,146,896	(27,734,534)	233,364,778	Other Receivables
Aset Tidak Lancar Lainnya - Uang Jaminan	7,995,430	--	--	7,995,430	Other Non - Current Assets - Security Deposits
Total	2,310,333,911	408,457,869	(96,004,470)	2,622,787,310	Total
31 Desember 2015	Belum jatuh tempo/Neither past due	Telah jatuh tempo/Past due	Penurunan nilai/Impairment	Total	December 31, 2015
<u>Pinjaman yang diberikan dan piutang:</u>					<u>Loans and Receivables:</u>
Kas dan Setara Kas	2,618,040,351	--	--	2,618,040,351	Cash and Cash Equivalents
Kas yang Dibatasi Penggunaannya	42,244,106	--	--	42,244,106	Restricted Cash
Piutang Usaha	299,522,317	240,043,319	(76,776,368)	462,789,268	Trade Receivables
Piutang Lain-Lain	41,474,975	30,267,150	(22,149,354)	49,592,771	Other Receivables
Aset Tidak Lancar Lainnya - Uang Jaminan	6,520,505	--	--	6,520,505	Other Non - Current Assets - Security Deposits
Total	3,007,802,254	270,310,469	(98,925,722)	3,179,187,001	Total

**46. Instrumen Keuangan dan Manajemen Risiko
Keuangan (Lanjutan)**

**46. Financial Instrument and Financial Risks
Management (Continued)**

2. Risiko Nilai Tukar Mata Uang
Risiko nilai tukar mata uang adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa mendatang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan nilai tukar mata uang asing. Instrumen keuangan Grup yang mempunyai potensi atas risiko nilai tukar mata uang terutama terdiri dari kas dan setara kas, investasi dan pinjaman.

2. *Foreign Exchange Rate Risk*
Foreign exchange rate risk is the risk that the fair value of future cash flow of a financial instrument will fluctuate because of changes in foreign exchange rates. The Group's financial instruments that potentially containing foreign exchange rate risk are cash and cash equivalent, investments and loans.

Grup tidak mempunyai kebijakan lindung nilai yang formal untuk laju pertukaran mata uang asing. Bagaimanapun, terkait dengan hal-hal yang telah didiskusikan pada paragraf di atas, fluktuasi dalam nilai tukar Rupiah dan Dolar AS menghasilkan lindung nilai natural untuk laju nilai tukar Grup.

The Group does not have any formal hedging policy for foreign exchange exposure. However, in relation to the matters discussed in the preceding paragraph, the fluctuations in the exchange rates between the Rupiah and US Dollar provide some degree of natural hedge for the Group foreign exchange exposure.

Eksposur risiko nilai tukar mata uang Grup terutama disebabkan oleh kas dan setara kas, investasi sementara, piutang usaha, pinjaman bank dan surat berharga yang diterbitkan.

Exposure of currency exchange risk of the Group is mainly from cash and cash equivalents, temporary deposits, trade accounts receivables, bank loans and security issued.

Pinjaman dikompensasi dengan kenaikan nilai Kas dan Setara Kas yang sebagian besar didenominasikan dalam mata uang asing yang sama. Perubahan nilai tukar telah, dan akan diperkirakan terus, memberikan pengaruh terhadap hasil usaha dan arus kas Grup. Beberapa liabilitas dan belanja modal Grup diperkirakan akan terus didenominasi dengan mata uang Dolar Amerika Serikat.

Bank loans is offset by increasing of Cash and Cash Equivalents denominated in the same foreign currencies. Foreign exchange had been, and would be expected give influence towards operation result and cash flow of the Group. Several liabilities and capital expenditures are expected to continue denominated in United States Dollar.

Dalam mengelola risiko mata uang, Grup tidak melakukan *hedging*, karena transaksi dalam valuta asing tersebut dilakukan dalam jangka pendek. Grup berkeyakinan bahwa tidak terdapat risiko signifikan atas fluktuasi mata uang asing dalam transaksi tersebut.

The Group manages the foreign exchange rate risk without hedging, because transactions have short term period. The Group believes that there are no significant risk of foreign exchange fluctuations on its transactions.

Dalam mengatasi risiko fluktuasi mata uang asing, pihak Manajemen melakukan hal sebagai berikut:

In addressing the risk of fluctuations in foreign currency the Management considers the following:

- a) Memperoleh sebagian modal kerja dalam mata uang asing.
- b) Melakukan pembelian valas secara spot atau terhadap yang kemudian ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka USD.

- a) *Obtains part of working capital in foreign currency.*
- b) *Purchases foreign currency at spot or gradually to be placed in the form of time deposito in USD.*

**46. Instrumen Keuangan dan Manajemen Risiko
Keuangan (Lanjutan)**

**46. Financial Instrument and Financial Risks
Management (Continued)**

c) Memperoleh pendapatan dalam mata uang asing yang diharapkan dapat mengkompensasi liabilitas dalam mata uang asing.

c) Obtains revenues in foreign currency which are expected to compensate liabilities on foreign currency.

Tabel berikut menyajikan aset dan liabilitas keuangan Grup yang terutama berdenominasi dalam mata uang Dolar Amerika Serikat:

The following table presents the Group financial assets and liabilities denominated in foreign currency, mainly in United States Dollar:

	31 Desember 2017/ December 31, 2017		31 Desember 2016/ December 31, 2016		31 Desember 2015/ December 31, 2015				
	Mata Uang Asing (Angka Penuh) / Foreign Currency (Full Amount)	Ekuivalen Rupiah / Equivalent Rupiah	Mata Uang Asing (Angka Penuh) / Foreign Currency (Full Amount)	Ekuivalen Rupiah / Equivalent Rupiah	Mata Uang Asing (Angka Penuh) / Foreign Currency (Full Amount)	Ekuivalen Rupiah / Equivalent Rupiah			
		Rp		Rp		Rp			
Aset							Assets		
Kas dan Setara Kas	USD	76,424,208	1,035,395,164	17,405,585	233,861,442	81,311,889	1,121,699,633	USD	Cash and Cash Equivalent
	EUR	--	--	1,663	23,550	1,693	25,512	EUR	
	SGD	--	--	10,000	92,989	--	--	USD	
Investasi Jangka Pendek	USD	50,000	677,400	--	--	--	--	USD	Short Term Investment
Kas yang Dibatasi Penggunaannya	USD	--	--	1,655,560	22,244,106	1,824,933	22,244,106		Restricted Cash
Piutang Usaha	USD	1,150,778	15,590,740	1,305,932	17,617,515	1,808,048	24,942,138	USD	Trade Receivables
Total Aset			1,051,663,304		273,839,602		1,168,911,389		Total Assets
Liabilitas									Liabilities
Utang Usaha	USD	9,515,271	128,912,895	878,055	12,151,993	30,629,568	422,420,014	USD	Trade Payables
	EUR	3,619,673	51,261,815	1,866,188	26,428,949	--	--		
Beban Akrua	USD	6,851,876	92,829,221	6,460,010	86,796,700	6,348,188	87,573,257	USD	Accrued Expenses
Utang Bank Jangka Pendek	USD	50,000,000	677,400,000	50,000,000	671,800,000	50,000,000	943,792,959	USD	Bank Loan Current Liabilities
Bagian Lancar Atas									
Liabilitas Jangka Panjang :									
Utang Bank	USD	24,248,374	328,516,973	24,248,374	325,801,155	18,415,582	254,042,959		
Liabilitas Jangka Panjang									Long - Term Liabilities
Utang Bank	USD	65,995,124	894,101,937	50,396,804	677,131,456	51,781,538	714,356,404	USD	Bank Loans
Utang Obligasi	USD	495,210,323	6,709,109,457	494,636,180	6,645,931,711	500,000,000	6,897,500,000	USD	Obligation Bond
Total Liabilitas			8,882,132,299		8,446,041,964		9,319,685,593		Total Liabilities
Aset (Liabilitas) Bersih			(7,830,468,994)		(8,172,202,362)		(8,150,774,205)		Net - Assets (Liabilities)

Analisis Sensitivitas

Pergerakan yang mungkin terjadi terhadap nilai tukar Rupiah terhadap mata uang Dolar Amerika Serikat pada tanggal akhir tahun dapat meningkatkan (mengurangi) nilai ekuitas atau laba rugi sebesar nilai yang disajikan pada tabel. Analisis ini dilakukan berdasarkan varians nilai tukar mata uang asing yang dipertimbangkan dapat terjadi pada tanggal laporan posisi keuangan dengan semua variabel lain adalah konstan.

Sensitivity Analysis

Movement that may occur towards Rupiah exchange rate against United States Dollar at year end that could increase (decrease) the equity or profit or loss amount are presented in table. The analysis was conducted based on the variance of foreign currency exchange rates that were considered to happen on the reporting date with all other variables are held constant.

Tabel berikut menunjukkan sensitivitas perubahan kurs Dolar Amerika Serikat terhadap laba bersih dan ekuitas Grup:

The following table shows the sensitivity of the United States Dollar exchange rate changes on net income and the Group equity:

46. Instrumen Keuangan dan Manajemen Risiko
Keuangan (Lanjutan)

46. Financial Instrument and Financial Risks
Management (Continued)

	Perubahan Nilai Tukar <i>Change in Exchange Rates</i>	Basis Poin/ <i>Basis Point</i>	Sensitivitas/ <i>Sensitivity</i>	
			Ekuitas/ <i>Equity</i> Rp	Laba (Rugi)/ <i>Profit (Loss)</i> Rp
31 Desember 2017/ <i>December 31, 2017</i>	Meningkat/ <i>Appreciates</i>	100	68,856,586	68,856,586
	Terdepresiasi/ <i>Depreciates</i>	100	(68,856,586)	(68,856,586)
31 Desember 2016/ <i>December 31, 2016</i>	Meningkat/ <i>Appreciates</i>	100	(33,878,327)	(33,878,327)
	Terdepresiasi/ <i>Depreciates</i>	100	33,878,327	33,878,327
31 Desember 2015/ <i>December 31, 2015</i>	Meningkat/ <i>Appreciates</i>	100	(196,550,711)	(196,550,711)
	Terdepresiasi/ <i>Depreciates</i>	100	196,550,711	196,550,711

3. Risiko Tingkat Suku Bunga

Risiko suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa datang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan suku bunga pasar.

Grup melakukan pengawasan terhadap dampak pergerakan tingkat suku bunga untuk meminimalisasi dampak *negative* terhadap Grup.

Untuk mengukur risiko pasar atas pergerakan suku bunga, Grup melakukan analisa pada profil jatuh tempo aset dan liabilitas berdasarkan jadwal perubahan suku bunga.

3. Interest Rate Risk

Interest rate risk is the risk that fair value of future cash flow of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rate.

The Group monitors the impact of interest rate movements to minimize the negative impact on the Group.

To measure market risk on interest rate movement, the Group analyzed the interest rate movement margin and maturity profile of asset and liabilities based on interest rate change schedule.

	2017 Rp	2016 Rp	2015 Rp	
Aset Keuangan	2,752,861,675	1,848,690,379	2,653,298,762	Financial Assets
Liabilitas Keuangan	(11,280,611,394)	(9,820,664,322)	(8,487,719,301)	Financial Liabilities
Total Aset (Liabilitas)				Total Assets (Liabilities)
- bersih	(8,527,749,719)	(7,971,973,943)	(5,834,420,539)	- net

Analisis sensitivitas terhadap risiko suku bunga:

Sensitivity analysis on interest rate risk:

	2017 Rp	2016 Rp	2015 Rp	
Tingkat bunga tetap				Fixed rate
Aset Keuangan	2,752,861,675	1,848,690,379	2,653,298,762	Financial Assets
Liabilitas Keuangan	(11,280,611,394)	(9,820,664,322)	(8,487,719,301)	Financial Liabilities
Total	(8,527,749,719)	(7,971,973,943)	(5,834,420,539)	Total
Tingkat bunga mengambang				Variable rate
Aset Keuangan	2,807,918,909	1,885,664,187	2,706,364,738	Financial Assets
Liabilitas Keuangan	(11,506,223,622)	(10,017,077,608)	(8,657,473,687)	Financial Liabilities
Total Aset (Liabilitas)				Total Assets (Liabilities)
- bersih	(8,698,304,713)	(8,131,413,421)	(5,951,108,949)	- net

**46. Instrumen Keuangan dan Manajemen Risiko
Keuangan (Lanjutan)**

**46. Financial Instrument and Financial Risks
Management (Continued)**

Kenaikan suku bunga 2% akan menurunkan ekuitas dan laba atau rugi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 masing-masing sebesar (Rp170.554.994), (Rp159.439.763) dan (Rp116.688.411). Penurunan 2% suku bunga untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 akan memiliki sama tetapi berlawanan efek, atas dasar bahwa semua variabel lainnya tetap konstan.

A 2% increase in interest rates would have decreased equity and profit or loss for the periods ended December 31, 2017, 2016 and 2015 by (Rp170,554,994), (Rp159,439,763) and (Rp116,688,411) respectively. A 2% decrease in interest rates for the periods ended December 31, 2017 and 2016 would have the equal but opposite effect, on the basis that all other variables remained constant.

4. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Grup tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi liabilitasnya.

4. Liquidity Risk

Liquidity risk in the arising when the cash flow position of the Group is not enough to cover the liabilities which become due.

Dalam pengelolaan risiko likuiditas, Manajemen memantau dan menjaga jumlah kas dan setara kas yang dianggap memadai untuk membiayai operasional Perusahaan dan Entitas Anak untuk mengatasi dampak evaluasi berkala atas proyeksi arus kas dan arus kas aktual, termasuk jadwal jatuh tempo utang, dan terus mendapatkan sumber pendanaan yang optimal.

In the managing liquidity risk, the Management monitors and maintains a level of cash and cash equivalents deemed adequate to finance the Company and Subsidiaries operations and to mitigate the affects of fluctuation in cash flows. The Management also regularly evaluates the projected and markets for opportunities to obtain optimal funding sources.

Rincian jatuh tempo liabilitas keuangan yang dimiliki adalah sebagai berikut:

Details of the maturities of financial liabilities are as follows:

31 Desember 2017	Kurang dari 3	3 bulan sampai	Lebih dari 1	Total	December 31, 2017
	bulan/Less than 3	1 tahun/ 3 months up to 1	tahun/ More than		
	months	year	1 years		
Utang Usaha	1,111,357,491	--	--	1,111,357,491	Trade Accounts Payable
Utang Lancar Lain-lain	3,343,819	--	--	3,343,819	Other Current Liabilities
Beban Akrua	824,294,545	--	--	824,294,545	Accrued Expenses
Utang Bank	4,571,501,937	--	--	4,571,501,937	Bank Loans
Uang Titipan	131,237,654	--	--	131,237,654	Fund Retained
Surat Berharga Yang Diterbitkan	--	--	6,709,109,457	6,709,109,457	Securities Issued
Total	6,641,735,446	--	6,709,109,457	13,350,844,903	Total

31 Desember 2016	Kurang dari 3	3 bulan sampai	Lebih dari 1	Total	December 31, 2016
	bulan/Less than 3	1 tahun/ 3 months up to 1	tahun/ More than		
	months	year	1 years		
Utang Usaha	883,289,693	--	--	883,289,693	Trade Accounts Payable
Utang Lancar Lain-lain	2,265,071	--	--	2,265,071	Other Current Liabilities
Beban Akrua	833,461,820	--	--	833,461,820	Accrued Expenses
Utang Bank	3,174,732,610	--	--	3,174,732,610	Bank Loans
Uang Titipan	80,309,518	--	--	80,309,518	Fund Retained
Surat Berharga Yang Diterbitkan	--	--	6,645,931,711	6,645,931,711	Securities Issued
Total	4,974,058,712	--	6,645,931,711	11,619,990,423	Total

**46. Instrumen Keuangan dan Manajemen Risiko
Keuangan (Lanjutan)**

**46. Financial Instrument and Financial Risks
Management (Continued)**

31 Desember 2015	Kurang dari 3	3 bulan sampai	Lebih dari 1	Total	December 31, 2015
	bulan/Less than 3	1 tahun/ 3 months up to 1	tahun/More than		
	months	year	1 years		
Utang Usaha	1,067,426,848	--	--	1,067,426,848	Trade Accounts Payable
Utang Lancar Lain-lain	4,267,956	--	--	4,267,956	Other Current Liabilities
Beban Akrua	713,178,003	--	--	713,178,003	Accrued Expenses
Utang Bank	1,658,149,363	--	--	1,658,149,363	Bank Loans
Uang Titipan	92,227,491	--	--	92,227,491	Fund Retained
Surat Berharga Yang Diterbitkan	--	--	6,829,569,938	6,829,569,938	Securities Issued
Total	3,535,249,661	--	6,829,569,938	10,364,819,599	Total

5. Risiko Harga

Risiko harga adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan sebagai akibat perubahan harga pasar, terlepas dari apakah perubahan tersebut disebabkan oleh faktor-faktor spesifik dari instrumen individual atau penerbitannya atau faktor-faktor yang mempengaruhi seluruh instrumen yang diperdagangkan di pasar.

Grup terkena dampak risiko harga yang terutama diakibatkan oleh pengadaan dan pemeliharaan fasilitas pelabuhan dan peralatan yang merupakan komponen utama biaya produksi. Harga pengadaan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain permintaan pasokan, nilai tukar kondisi geografis dan nilai tukar. Dampak risiko harga tersebut mengakibatkan kenaikan biaya produksi. Grup tidak serta merta dapat mengalihkan kenaikan harga tersebut kepada pelanggannya.

Kebijakan Grup untuk meminimalkan risiko harga adalah antara lain dengan melakukan kerjasama usaha dan pembelian bersama antara Grup kepada pemasok agar mendapatkan harga yang menguntungkan.

6. Risiko Investasi

Risiko investasi adalah tingkat potensi kerugian yang timbul karena perolehan hasil investasi yang diharapkan tidak tercapai sesuai dengan yang direncanakan. Besarnya tingkat risiko yang dimasukkan dalam penilaian investasi akan mempengaruhi besarnya hasil yang diharapkan pemodal.

5. Price Risk

Price risk is a risk of fluctuations in the value of financial instruments as a result of changes in market price, whether those changes are caused by factors specific to the individual instrument or its issues or factors affecting all instruments traded in the market.

Company and subsidiaries are affected by price risk that are primarily attributable to the procurement and maintenance of port facilities and equipment which are the major component of production costs. Procurement prices are influenced by several factors, such as rising demand and exchange rates. The impact of this price risk, results in the increasing production costs. The Company and subsidiaries are unable to transfer these price increases directly to its customers.

Company and subsidiaries set policies to minimize price risk, such as by conducting joint operations and joint purchase between the Company and subsidiaries to suppliers in order to obtain a favorable price.

6. Investment Risk

Level of investment risk is the potential loss arising from the acquisition of the expected investment returns are not achieved as planned. The level of risk that is included in the valuation of investment will affect the expected results financiers.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) AND
SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2017, 2016 and 2015
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

**46. Instrumen Keuangan dan Manajemen Risiko
Keuangan (Lanjutan)**

**46. Financial Instrument and Financial Risks
Management (Continued)**

Grup terkena dampak risiko investasi yang terutama diakibatkan oleh fasilitas utang obligasi. Pada bulan September 2014 perusahaan melakukan penawaran *Global Bond*. Perusahaan menargetkan untuk meraih USD500,000,000 (angka penuh) yang digunakan untuk pembiayaan proyek pengembangan fasilitas pelabuhan dan issued pada tanggal 1 Oktober 2014. Pembayaran obligasi dilakukan secara penuh saat jatuh tempo.

The Group is affected by the investment risk is mainly due to the bond debt facilities. In September 2014 the company made an offer Global Bonds. The company targets to achieve USD500,000,000 (full amount) used for financing the development of port facilities and issued on October 1, 2014. The bonds made in full at maturity.

Tingkat bunga sebesar 4,875% per tahun dan dibayar setiap 6 bulanan, dimulai 1 Oktober 2014 sampai 30 September 2022.

An interest rate of 4.875% per annum and payable every 6 months, starting October 1, 2014 until September 30, 2022.

The Bank of New York Mellon bertindak sebagai wali amanat. Per tanggal 8 September 2014 obligasi tersebut mendapatkan peringkat BBB- dari *Fitch* dan BB+ dari *Standard & Poor*.

The Bank of New York Mellon acts as trustee. As of the date of 8 September 2014 bonds get BBB- from BB+ from Fitch and Standard & Poor's.

Kebijakan Grup untuk meminimalkan risiko investasi adalah antara lain dengan melakukan penempatan sisa utang obligasi yang belum digunakan pada rekening untuk pembayaran proyek Grup yang akan jatuh tempo.

The Group policy is to minimize investment risks are, among others, with the placement of the rest of the bonds that have not been used to account for the payment of the maturing project of the Group.

**b. Nilai Wajar Instrumen Keuangan
Estimasi nilai wajar**

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan dan pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan.

**b. Fair Value of Financial Instruments
Fair value estimation**

The fair value of financial assets and financial liabilities must be estimated for recognition and measurement or for disclosure purposes.

PSAK 60, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan" mensyaratkan pengungkapan atas pengukuran nilai wajar dengan tingkat hirarki nilai wajar sebagai berikut:

PSAK 60, "Financial Instruments: Disclosures" requires disclosure of fair value measurements by level of the following fair value measurement hierarchy:

- a. Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (Tingkat 1);
- b. Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya derivasi dari harga) (Tingkat 2); dan
- c. Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi) (Tingkat 3).

- a. *Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities (Level 1);*
- b. *Inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (as prices) or indirectly (derived from prices) (Level 2); and*
- c. *Inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (unobservable inputs) (Level 3).*

**46. Instrumen Keuangan dan Manajemen Risiko
Keuangan (Lanjutan)**

**46. Financial Instrument and Financial Risks
Management (Continued)**

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif ditentukan berdasarkan kuotasi nilai pasar pada tanggal pelaporan. Kuotasi nilai pasar yang digunakan Perusahaan untuk aset keuangan adalah harga penawaran (*bid price*), sedangkan untuk liabilitas keuangan menggunakan harga jual (*ask price*). Instrumen keuangan ini termasuk dalam Tingkat 1.

The fair value of financial instruments traded in active markets is based on quoted market prices at the reporting date. The quoted market price used for financial assets held by the Company is the current bid price, while financial liabilities use ask price. These instruments are included in Level 1.

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian tertentu. Teknik tersebut menggunakan data pasar yang dapat diobservasi sepanjang tersedia, dan seminimal mungkin mengacu pada estimasi. Apabila seluruh input signifikan atas nilai wajar dapat diobservasi, instrumen keuangan ini termasuk dalam Tingkat 2.

The fair value of financial instruments that are not traded in an active market is determined using valuation techniques. These valuation techniques maximise the use of observable market data where it is available and rely as little as possible on estimates. If all significant inputs required to fair value an instrument are observable, the instrument is included in Level 2.

Jika satu atau lebih input yang signifikan tidak berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi, maka instrumen tersebut masuk ke dalam Tingkat 3.

If one or more of the significant inputs is not based on observable market data, the instrument is included in Level 3.

Teknik penilaian tertentu digunakan untuk menentukan nilai instrumen keuangan mencakup:

Specific valuation techniques used to value financial instruments include:

- Penggunaan harga yang diperoleh dari bursa atau pedagang efek untuk instrumen sejenis dan;
- Teknik lain seperti analisis arus kas yang didiskonto digunakan untuk menentukan nilai instrumen keuangan lainnya.

- *The use of quoted market prices or dealer quotes for similar instruments and;*
- *Other techniques, such as discounted cash flows analysis, are used to determine fair value for the remaining financial instruments.*

Tabel di bawah ini menggambarkan nilai tercatat dan nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan yang tercatat pada laporan posisi keuangan pada periode yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015:

The table below shows the carrying values and fair values of the assets and financial liabilities recorded in the statements of financial position for the periods ended December 31, 2017, 2016 and 2015:

**46. Instrumen Keuangan dan Manajemen Risiko
Keuangan (Lanjutan)**

**46. Financial Instrument and Financial Risks
Management (Continued)**

	31 Desember/ December 31,						
	2017		2016		2015		
	Nilai tercatat/ Carrying amount	Nilai wajar/ Fair Value	Nilai tercatat/ Carrying amount	Nilai wajar/ Fair Value	Nilai tercatat/ Carrying amount	Nilai wajar/ Fair Value	
Aset keuangan:							Financial assets:
Kas dan Setara Kas	2,750,527,471	2,750,527,471	1,815,986,830	1,815,986,830	2,618,040,351	2,618,040,351	Cash and Cash Equivalents
Kas yang Dibatasi Penggunaannya	5,149,595	5,149,595	33,213,107	33,213,107	42,244,106	42,244,106	Restricted Cash
Investasi Jangka Pendek	10,988,190	10,988,190	4,917,631	4,917,631	--	--	Short Term Investment
Piutang Usaha	826,503,926	826,503,926	527,309,534	527,309,534	462,789,268	462,789,268	Trade Receivables
Piutang Lain-lain	222,121,081	222,121,081	226,364,778	226,364,778	39,092,771	39,092,771	Other Receivables
Aset Tidak Lancar Lainnya - Uang Jaminan	15,599,021	15,599,021	7,995,430	7,995,430	6,520,505	6,520,505	Other Non - Current Assets - Security Deposits
Total	3,815,290,263	3,815,290,263	2,607,791,880	2,607,791,880	3,162,166,496	3,162,166,496	Total
Liabilitas keuangan:							Financial liabilities:
Utang Usaha	1,111,357,491	1,111,357,491	883,289,693	883,289,693	1,067,426,848	1,067,426,848	Trade Accounts Payable
Utang Bank	4,571,501,937	4,571,501,937	3,174,732,610	3,174,732,610	1,658,149,363	1,658,149,363	Bank Loans
Utang Lancar Lain-lain	3,343,819	3,343,819	2,265,071	2,265,071	4,267,956	4,267,956	Other Current Liabilities
Beban Akrua	824,294,545	824,294,545	833,461,820	833,461,820	713,178,003	713,178,003	Accrued Expenses
Uang Titipan	131,237,654	131,237,654	80,309,518	80,309,518	92,227,491	92,227,491	Fund Retained
Surat Berharga Yang Diterbitkan	6,709,109,457	6,709,109,457	6,645,931,711	6,645,931,711	6,829,569,938	6,829,569,938	Securities Issued
Total	13,350,844,903	13,350,844,903	11,619,990,423	11,619,990,423	10,364,819,599	10,364,819,599	Total

Nilai wajar kas dan setara kas, piutang, utang dan beban akrual mendekati nilai tercatat karena jangka waktu jatuh tempo yang singkat atas instrumen keuangan tersebut.

Fair value of cash and cash equivalents, receivables, payables and accruals expenses approximate their carrying amount largely due to short-term maturities of these instruments.

Nilai wajar atas sebagian besar aset dan liabilitas keuangan mendekati nilai tercatat karena dampak pendiskontoan yang tidak signifikan.

The fair value of most of the financial assets and liabilities approximates their carrying amount, as the impact of discounting is not significant.

Telah menjadi kebijakan Grup bahwa tidak akan ada perdagangan dalam instrumen keuangan yang akan dilakukan.

It is has been the subsidiaries' policy that trading in financial instruments shall be undertaken.

47. Pengelolaan Modal

47. Capital Management

Grup mengelola risiko permodalan untuk memastikan Grup mampu melanjutkan kelangsungan usaha sehingga memaksimalkan imbal hasil pada pemegang saham dan pemangku kepentingan serta memelihara optimalisasi saldo utang dan ekuitas.

The Group manages risk on capital to ensure the Group ability to continue as a going concern in order to maximize returns for shareholders, and stakeholders to maintain an optimal loan balance and equity.

Struktur permodalan Grup seluruhnya berasal dari ekuitas dan pinjaman bank, obligasi dan pemasok.

The Group's capital structure entirely from equity and trade payables from bank, bonds and suppliers.

47. Pengelolaan Modal (Lanjutan)

47. Capital Management (Continued)

Direksi Grup secara berkala melakukan reviu struktur permodalan Perusahaan. Sebagai bagian reviu, Direksi mempertimbangkan biaya permodalan dan risiko terkait.

Directors regularly review the Group's capital structure. As part of the review, Directors consider cost of capital and its related risk.

**48. Sumber Ketidakpastian Estimasi dan
Pertimbangan Akuntansi yang Penting**

**48. Source of Estimation Uncertainty and
Critical Accounting Judgment**

Grup membuat estimasi dan asumsi mengenai masa depan. Estimasi dan pertimbangan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan terus dievaluasi berdasarkan pengalaman historis dan faktor lainnya, termasuk ekspektasi dari peristiwa masa depan yang diyakini wajar. Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula. Asumsi dan pertimbangan yang memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas diungkapkan di bawah ini.

The Group makes estimation and assumptions concerning the future. Estimation and considerations used in the preparation of financial statements continue to be evaluated based on historical experience and other factors, including expectations of future events that are believed reasonable. Although these estimates are based on management's best knowledge of current events and actions, actual results may differ from those estimates. Assumptions and considerations have a significant effect on the carrying amount of assets and liabilities are disclosed in below.

i. Estimasi dan Asumsi Akuntansi yang Penting

Asumsi utama masa depan dan sumber utama ketidakpastian estimasi lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini. Grup mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Perusahaan. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

i. Critical Accounting Estimates and Assumptions

The main assumptions of the future and the main source of estimation uncertainty on another reporting date that have significant risk of material adjustment to the carrying value of an asset and a liability for the following year is disclosed below. The Group based its assumptions and estimation on parameters that are available at the time the financial statements drawn up. Assumptions and the situation regarding future developments may change due to changes in the market or the situation beyond the control of the company. The changes are reflected in the related assumptions at the time of the occurrence.

Estimasi Umur Manfaat Aset Tetap dan Aset Takberwujud - Hak Konsesi Pengusahaan TTL, APBS dan BMS

Grup melakukan penelaahan berkala atas masa manfaat ekonomis aset tetap dan hak konsesi pengusahaan berdasarkan faktor - faktor seperti kondisi teknis perkembangan teknologi di masa depan dan masa konsesi. Hasil operasi di masa depan akan dipengaruhi secara material atas perubahan estimasi ini yang diakibatkan oleh perubahan faktor yang telah disebutkan di atas. Nilai tercatat aset tetap dan aset tidak berwujud disajikan di Catatan 15 dan 17.

Estimated of Useful Lives of Property, Equipment, and Intangible Asset - TTL, APBS and BMS Concession Rights

The Group periodically reviews the useful lives of the fixed assets and concession rights expectation based on technical specification and technology development in the future and the length of concession. Operating results in the future will be affected by the estimated changes of those factors. Carrying amount of property, equipment, and intangible asset are disclosed in Notes 15 and 17.

**48. Sumber Ketidakpastian Estimasi dan
Pertimbangan Akuntansi yang Penting
(Lanjutan)**

**48. Source of Estimation Uncertainty and
Critical Accounting Judgment (Continued)**

Estimasi Margin Konstruksi

Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku mensyaratkan pendapatan konstruksi diakui sebesar nilai wajarnya. Grup menentukan profit atau margin konstruksi dalam menghitung nilai wajar pendapatan konstruksi tersebut berdasarkan estimasi terbaik manajemen yang dihitung dengan model tertentu.

Estimated of Construction Margin

The accepted Interpretation of Accounting Standard required that the construction revenue recognized at their fair value. The Group does determined the profit or construction margin in calculating the fair value of construction.

Imbalan Kerja

Nilai kini liabilitas imbalan pasca kerja tergantung pada beberapa faktor yang ditentukan dengan dasar aktuarial berdasarkan beberapa asumsi. Asumsi yang digunakan untuk menentukan biaya (penghasilan) pensiun neto mencakup tingkat diskonto. Perubahan asumsi ini akan mempengaruhi jumlah tercatat imbalan pasca kerja.

Employment Benefits

The present value of the post-employment benefits obligations depends on a number of factors that are determined on an actuarial basis using number of assumptions. The assumptions used in determining the net cost (income) for pensions include the discount rate. Any changes in these assumptions will impact the carrying amount of post - employment benefits obligations.

Grup menentukan tingkat diskonto yang sesuai pada akhir periode pelaporan, yakni tingkat suku bunga yang harus digunakan untuk menentukan nilai kini arus kas keluar masa depan estimasian yang diharapkan untuk menyelesaikan liabilitas. Dalam menentukan tingkat suku bunga yang sesuai, Perusahaan mempertimbangkan tingkat suku bunga obligasi pemerintah yang didominasi dalam mata uang imbalan akan dibayar dan memiliki jangka waktu yang serupa dengan jangka waktu liabilitas yang terkait.

The Group determines the appropriate discount rate at the end of each reporting period. This is the interest rate that should be used to determine the present value of estimated future cash outflows expected to be required to settle the obligations. In determining the appropriate discount rate, the Company considers the interest rates of government bonds that are dominated in the currency in which the benefits will be paid and that have terms to maturity approximates the terms of the related obligation.

Asumsi kunci liabilitas imbalan pascakerja sebagian ditentukan berdasarkan kondisi pasar saat ini.

Key assumptions for post-employment benefit obligations are based in part on current market conditions.

ii. Pertimbangan penting dalam penentuan kebijakan akuntansi

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Grup yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan.

ii. Significant Judgments in Determination of Accounting Policy

These following judgments were made by management in relation to the adoption of accounting policies of the Group which has the most significant impact on the recognized amount in the financial statement.

Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Perusahaan menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan bila definisi yang ditetapkan PSAK No. 50 (Revisi 2014) dipenuhi.

Classification Financial Asset and Liability

The Company determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in PSAK No. 50 (Revised 2014).

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**48. Sumber Ketidakpastian Estimasi dan
Pertimbangan Akuntansi yang Penting
(Lanjutan)**

Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Perusahaan seperti diungkapkan pada Catatan 45.

Cadangan kerugian nilai piutang

Grup mengevaluasi akun tertentu jika terdapat informasi bahwa pelanggan tertentu tidak dapat memenuhi kewajiban keuangannya. Dalam hal tersebut, Grup mempertimbangkan, berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada, jangka waktu hubungan dengan pelanggan, kualitas jaminan yang diterima dan status kredit dari pelanggan berdasarkan catatan kredit pihak ketiga yang tersedia dan faktor pasar yang telah diketahui, untuk mencatat cadangan yang spesifik atas jumlah piutang pelanggan guna mengurangi jumlah piutang yang diharapkan dapat diterima oleh Grup.

Cadangan yang spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika tambahan informasi yang diterima mempengaruhi jumlah cadangan penurunan nilai piutang.

Bila Grup memutuskan bahwa tidak terdapat bukti obyektif atas penurunan nilai pada evaluasi individual atas piutang usaha, baik yang nilainya signifikan maupun tidak, Grup menyertakannya dalam kelompok piutang usaha dengan risiko kredit yang serupa karakteristiknya dan melakukan evaluasi kolektif atas penurunan nilai. Karakteristik yang dipilih mempengaruhi estimasi arus kas masa depan atas kelompok piutang usaha tersebut karena merupakan indikasi bagi kemampuan pelanggan untuk melunasi jumlah terutang.

Arus kas masa depan pada kelompok piutang usaha yang dievaluasi secara kolektif untuk penurunan nilai diestimasi berdasarkan pengalaman kerugian historis bagi piutang usaha dengan karakteristik risiko kredit yang serupa dengan piutang usaha pada kelompok tersebut.

Pengakuan dan Pengukuran Aset
Takberwujud Hak Konsesi - TTL, APBS dan
BMS

ISAK No. 16 menjelaskan pendekatan untuk membukukan perjanjian konsesi jasa akibat dari penyediaan jasa kepada publik.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) AND
SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2017, 2016 and 2015
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

**48. Source of Estimation Uncertainty and
Critical Accounting Judgment (Continued)**

Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Company's accounting policies disclosed in Note 45.

The allowance of impairment of receivables

The Group evaluates specific accounts where it has information that certain customers are unable to meet their financial obligations. In these cases, the Group uses judgment, based on the best available facts and circumstances, including but not limited to, the length of its relationship with the customer, quality of collateral received and the customer's current credit status based on any available third party credit reports and known market factors, to record specific allowance for customers against amounts due to reduce its receivable amounts that the Group expects to collect.

These specific allowances are reevaluated and adjusted as additional information received affects the amounts of allowance for impairment losses on trade receivables.

If the Group determines that no objective evidence of impairment occurred for an individually assessed trade receivables, whether significant or not, it includes the asset in a group of financial assets with similar credit risk characteristics and collectively assesses them for impairment. The characteristics chosen are relevant to the estimation of future cash flows for groups of such trade receivables by being indicative of the customers' ability to pay all amounts due.

Future cash flows in a group of trade receivables that are collectively evaluated for impairment are estimated on the basis of historical loss experience for the trade receivables with credit risk characteristics similar to those in the group.

Recognition and Measurement of Intangible
Asset - TTL, APBS and BMS

ISAK No. 16 outlines an approach to account for service concession arrangement arising from entities providing public services.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**48. Sumber Ketidakpastian Estimasi dan
Pertimbangan Akuntansi yang Penting
(Lanjutan)**

ISAK No. 16 mengatur bahwa operator (pihak penerima konsesi jasa) tidak membukukan infrastruktur sebagai aset tetap, namun diakui sebagai aset keuangan dan/atau aset takberwujud.

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia memberikan hak, kewajiban dan keistimewaan kepada Grup termasuk kewenangan dalam pendanaan, desain, konstruksi, operasi dan pemeliharaan Fasilitas Pelabuhan APBS, Terminal Teluk Lamong (TTL), Terminal Berlian Manyar (BMS) dan Terminal Gilimas (Catatan 2r). Pada akhir masa konsesi jasa, Kelompok Usaha harus menyerahkan Fasilitas Pelabuhan kepada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia tanpa biaya, dalam keadaan beroperasi dan kondisi yang baik, termasuk setiap dan semua tanah yang diperlukan, pekerjaan, fasilitas pelabuhan yang secara langsung berkaitan dan berhubungan dengan pengoperasian fasilitas Pelabuhan.

Grup berpendapat bahwa Perjanjian Konsesi memenuhi kriteria sebagai model aset takberwujud, di mana aset konsesi diakui sebagai aset takberwujud sesuai dengan PSAK 19, "Aset Takberwujud".

Grup diharuskan oleh ISAK 16 untuk menyajikan unsur pendapatan yang merefleksikan pendapatan dari jasa konstruksi atas aset konsesi atau peningkatan kemampuan aset konsesi yang dilakukan selama tahun/periode berjalan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015, Grup mengakui pendapatan dari jasa konstruksi atas aset konsesi masing masing sebesar Rp126.676.775, Rp1.299.565.577 dan Rp1.785.768.720.

Grup mengakui pendapatan konstruksi aset konsesi dan biaya konstruksi atas aset konsesi sesuai dengan PSAK No. 34. Kelompok Usaha mengukur pendapatan konstruksi atas aset konsesi pada nilai wajar atas imbalan yang diterima atau akan diterima dan menambahkan margin, berdasarkan estimasi terbaik manajemen yang dihitung dengan model tertentu.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) AND
SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2017, 2016 and 2015
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

**48. Source of Estimation Uncertainty and
Critical Accounting Judgment (Continued)**

ISAK No. 16 provides that the operator (concession right beneficiary) should not account for the infrastructure as fixed assets, but should recognize a financial asset and/or an intangible asset.

Ministry of Transport of the Republic of Indonesia granted the Group, the rights, obligations and privileges including authority in finance, design, construct, operate and maintain the Port Facility of APBS, Lamong Bay Terminal (TTL), Manyar Berlian Terminal (BMS) and Gilimas Terminal (Note 2r). Upon expiry of the service concession period, the Group shall handover the Port Facility to the Ministry of Transport of the Republic of Indonesia at no cost, in good operating condition and conditions, including any and all necessary land, employment, port facilities directly related to the operation of the Port facility.

The Group has made judgment that the Concession Agreement qualifies under the intangible asset model, wherein the concession asset is recognized as an intangible asset in accordance with PSAK 19, "Intangible Assets".

The Group is required by ISAK 16 to present an income line reflecting the income from construction or improvements to concession assets made during the year/period in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income. For the year ended December 31, 2017, 2016 and 2015, the Group recognized construction revenue amounting to Rp126,676,775, Rp1,299,565,577 and Rp1,785,768,720, respectively.

The Group recognizes construction revenue of concession asset and construction costs of concession asset in accordance with PSAK No. 34. The Group measures construction revenue at the fair value of the consideration received or to be received and will add the margin, based on management estimation calculated in certain model, in determining the initial toll road tariff before the toll road is operated.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**48. Sumber Ketidakpastian Estimasi dan
Pertimbangan Akuntansi yang Penting
(Lanjutan)**

Grup mengakui aset takberwujud sejauh Grup memiliki hak (lisensi) untuk membebankan pengguna jasa publik. Suatu hak untuk membebankan pengguna jasa publik. Suatu hak untuk membebankan pengguna jasa publik bukan merupakan hak tanpa syarat untuk menerima kas karena jumlahnya bergantung pada sejauh mana publik menggunakan jasa.

Sifat imbalan yang diberikan oleh pemberi konsesi kepada Grup akan ditentukan dengan mengacu pada syarat kontrak dan, jika ada, hukum kontrak yang relevan.

Provisi untuk biaya perbaikan alat fasilitas pelabuhan dan docking kapal

Grup melakukan penelaahan atas provisi biaya perbaikan alat fasilitas pelabuhan dan docking kapal pada akhir periode laporan.

Dalam penentuan jumlah provisi untuk biaya perbaikan alat fasilitas pelabuhan dan docking kapal diperlukan estimasi dan asumsi yang signifikan karena terdapat banyak faktor yang mempengaruhi jumlah terhutang pada akhirnya. Faktor-faktor tersebut mencakup estimasi untuk waktu dan jumlah biaya untuk aktivitas alat fasilitas pelabuhan dan operasional kapal, perubahan teknologi, perubahan peraturan, peningkatan biaya dibandingkan dengan tingkat inflasi dan perubahan tingkat bunga diskonto. Ketidakpastian tersebut dapat mengakibatkan jumlah pengeluaran aktual di masa mendatang dapat berbeda dengan jumlah yang dicadangkan saat ini. Jumlah provisi pada akhir periode pelaporan merupakan estimasi terbaik manajemen atas nilai kini dari biaya perbaikan masa mendatang yang diperlukan.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) AND
SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2017, 2016 and 2015
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

**48. Source of Estimation Uncertainty and
Critical Accounting Judgment (Continued)**

The Group recognized intangible assets to the extent that the Group owner right (license) to charge the public. A right to charge users of the public service. A right to charge users of the public service is not an unconditional right to receive cash because the amount depends on the extent to which the public using the service.

The nature of the rewards given by the concession principal to the Group will be determined by reference to the terms of the contract and, if applicable, the relevant contract law.

Provision for the cost of repair tool port facilities and ship docking

The Group assesses its provision for the cost of repair tool port facilities and ship docking at end of reporting period.

Significant estimates and assumptions are made in determining the provision for the cost of repair tool port facilities and ship docking as there are numerous factors that will affect the ultimate liability payable. These factors include estimates of the extent and costs of activity tools for port facility and vessel operations, technological changes, regulatory changes, cost increases as compared to the inflation rates and changes in discount rates. Those uncertainties may result in future actual expenditure different from the amounts currently provided. The provision at end of reporting period represents management's best estimate of the present value of the future restoration costs required.

49. Informasi Penting Lainnya

49. Other Important Information

Perusahaan

1. Pada tahun 2012, Perusahaan memperoleh Hibah peralatan X-Ray and CCTV pada cabang Banjarmasin, Tanjung Emas - Semarang dan Tanjung Benoa - Bali dari Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan yang belum dapat dioperasikan (kecuali X-Ray di Benoa) karena saat ini belum ditetapkan /diserahterimakan kepada Perusahaan. Atas hal tersebut Perusahaan telah mengkonfirmasi status peralatan tersebut melalui Surat Dirut Perusahaan kepada Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan No. 05.0203/09/PIII-2012 tanggal 31 Agustus 2012 dan berdasarkan Surat tersebut juga telah diadakan rapat oleh Kementerian Perhubungan pada hari Kamis, 13 Desember 2012, dengan membahas status peralatan tersebut.

Berdasarkan Surat dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut No. UM.002/8/9/DJPL.13 tanggal 14 Februari 2013 perihal pemberitahuan Tindak lanjut *For The Project For Improvement of Port Security System* diinformasikan bahwa pada saat ini sedang dalam pelaksanaan proses pembuatan Berita Acara Serah Terima Operasional (Bastro) di Kementerian Perhubungan yang selanjutnya akan di proses menjadi PMN (Penyertaan Modal Negara) dan selanjutnya akan diserahterimakan kepada perusahaan.

2. Berkaitan dengan penggunaan tanah HPL milik Perusahaan yang digunakan untuk pembangunan jalan tol Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa oleh PT Jasamarga Bali Tol (Entitas Asosiasi), Tim Pengadaan Tanah Ruas jalan Tol Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa (TPT) menyampaikan surat ke Kasubdit Pengadaan Tanah Departemen Pekerjaan Umum mengenai hal pendataan sbb :

Pemilik/landowners	Luas/land area	NJOP	Appraisal	Keterangan/Information
PT Pelindo III (darat /land)	522 m ² /sqm	1,227,744,000	2,589,120,000	
PT Pelindo III (perairan/ waters)	41.490 m ² /sqm	-	-	Dalam proses P2T/ In the process P2T

Kesimpulan Rapat Pembahasan Pembebasan Tanah HPL, tanggal 31 Oktober 2013 :

- a. Ada persepsi berbeda terhadap mekanisme perhitungan nilai UGR terhadap penguasaan obyek tanah HPL.

The Company

1. In 2012, the Company obtained grant X-Ray equipment and CCTV in Banjarmasin branch, Tanjung Emas - Semarang and Tanjung Benoa - Bali from General Director of Sea Transport, Ministry of Transportation, which are not yet put into operation because it has not been received by the Company (Except X-Ray at Benoa). The Company has confirmed the status of the equipments through the Company's President letter to General Director of Sea Transport, Ministry of Transportation, No. 05.0203/09/PIII-2012 dated August 31, 2012. Based on that letter, a meeting was also conducted by the Ministry of Transportation on Thursday, December 13, 2012, to discuss the status of the equipments.

Based on the letter from General Directorate of Sea Transport, Ministry of Transportation, No. UM.002/8/9/DJPL.13 dated February 14, 2013 regarding the notification on Follow-up For The Project Improvement of Port Security System informed that it is currently under process of making Operational Handover (Bastro) in the Ministry of Transportation which will be further processed into PMN (State Capital) and will be handed over to the company.

2. In connection with the Company's use of the HPL land used for the construction of highways Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa PT Jasamarga Bali Tol (Associate), Land Acquisition Team toll road section Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa (TPT) delivered a letter to the Head of Sub Land Acquisition Department of Public Works regarding the data collection as follows:

HPL Land Acquisition Discussion Meeting, dated October 31, 2013 stated that:

- a. There are different perceptions on the UGR value calculation mechanism of the control of HPL ground objects.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

49. Informasi Penting Lainnya (Lanjutan)

- b. Untuk tanah perairan dangkal yang pengelolaannya adalah menjadi tanggung jawab Perusahaan Cabang Benoa, saat dipergunakan (ditimbun) tanah tersebut masih merupakan perairan sehingga luasan yang terpakai tidak diperhitungkan nilai UGR nya tetapi dilaporkan luas pemanfaatanya kepada atasan.
- c. Sepakat untuk kepastian dalam mengambil keputusan dan untuk menetapkan pemberian UGR terhadap tanah HPL yang dipakai jalan TPT dan P2T akan meminta petunjuk kepada BPKP.

Kesimpulan rapat pada point 3 tersebut di atas, telah diperoleh jawaban dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tanggal 31 Desember 2013 No.SR-10/D1/03/2013, perihal Pendapat atas Permasalahan Pengadaan Tanah pada Jalan Tol Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa (Jalan Tol Mandara), yang antara lain menyebutkan Sesuai dengan Undang-Undang No 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok - pokok Agraria, dimana pada pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa hak pengelolaan lahan tidak termasuk dalam hak-hak atas tanah. Pemberian ganti rugi yang dapat diberikan terkait hak pengelolaan lahan sesuai dengan peraturan kepala Badan Pertanahan Nasional tersebut di atas pada pasal 43 ayat (2) dan (3) hanya pembayaran ganti rugi atas hak pakai atau hak guna bangunan di atas tanah hak pengelolaan, dan ganti rugi atas bangunan dan atau tanaman dan atau benda benda lain yang berkaitan dengan tanah di atas tanah hak pakai atau hak guna bangunan yang diberikan di atas tanah hak pengelolaan.

Berkenaan dengan diterimanya surat dari BPKP tersebut, manajemen JBT akan segera menindaklanjuti pendapat BPKP tersebut dengan melakukan pembahasan dengan Tim Pengadaan Tanah Ruas jalan Tol Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa (TPT) dan hasilnya akan disampaikan kepada Dewan Komisaris dan Pemegang saham JBT.

Sampai dengan tanggal Laporan ini, keputusan uang ganti rugi terhadap tanah Hak Pengelolaan Lahan (HPL) milik Perusahaan tersebut masih dalam proses menunggu arahan dari Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) AND
SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2017, 2016 and 2015
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

49. Other Important Information (Continued)

- b. For the management of shallow water soil which is the responsibility of the Company Branch Benoa decided that due to the condition of the soil that is still watery when used the UGR value has to be ignored.
- c. Agrees to certainty in decision making and establish the UGR granting HPL the use of the land, TPT and PLT to inquire directions from BPKP.

Conclusion of the meeting on point 3, resolution has been obtained from Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) dated December 31, 2013 No. SR-10/D1/03/2013, regarding the above Opinion on Issues on Toll Road Land Acquisition Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa (Toll Road Mandara), which among other things states that in accordance with the Law No. 5 of 1960 on the basis of the basic rules - Agrarian, of which Article 16 paragraph (1) states that rights are not included in land management rights ground. Compensation can be given related to land management rights in accordance with the regulations from the head of Badan Pertanahan Nasional above in Article 43 paragraph (2) and (3) payment of just compensation for the right to use or the right to build on land management rights, and compensation for buildings and or plants or objects and other objects relating to land in the land use rights or the right to build on land with granted management rights.

With regards to the letter from the BPK, the JBT's management immediately follow the opinion of BPKP during the discussion over the issue of the Land Acquisition Team toll road section Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa (TPT) and the results were submitted to the Board and Shareholders of the JBT.

As of the date of this Report, the decision of compensation for the Land Management Rights (HPL) of the Company is still in the process of awaiting direction from the Directorate General of Highways Ministry of Public Works and Public Housing.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) AND
SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2017, 2016 and 2015
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

49. Informasi Penting Lainnya (Lanjutan)

3. Rencana Proyek reklamasi di Teluk Benoa, Kabupaten Badung, Bali menimbulkan pendapat pro dan kontra karena berbagai pertimbangan serta dampaknya kedepan.

Kondisi tersebut secara tidak langsung juga berdampak terhadap Rencana Investasi pengembangan Pelabuhan Benoa yang dilakukan Perusahaan, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Keterlambatan pelaksanaan investasi pengerukan kolam dan *turning basin* dan Dermaga Selatan - 12 M LWS sebagai bagian dari program pengembangan Pelabuhan Benoa sebagai *Tourism Hub* dan pengembangan Zona Terminal Energi.
- b. Pekerjaan Pembangunan Dermaga Curah Cair dan Gas Pelabuhan Benoa.

Keterlambatan tersebut dikarenakan belum terbitnya perijinan, yang disebabkan oleh :

- a. Rencana Induk Pelabuhan Benoa belum ditetapkan oleh Menteri Perhubungan karena masih menunggu rekomendasi Walikota Denpasar;
- b. Studi Lingkungan (Amdal Kawasan) masih belum dapat diproses lebih lanjut karena masih belum adanya penetapan Rencana Induk Pelabuhan Benoa;
- c. Surat Ijin Kerja Keruk (SIKK) dan Ijin Pembangunan Dermaga belum dapat diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan karena masih menunggu adanya studi lingkungan dari RIP yang telah ditetapkan.

Keterlambatan tersebut menyebabkan potensi:

- a. Tidak tercapainya rencana untuk melayani kapal pesiar dengan kapasitas 3.000 penumpang (LOA 300 m) yang selama ini dilayani dengan berlabuh dan ditransfer menggunakan tender boat karena keterbatasan kedalaman kolam dan *turning basin* (kolam putar);
- b. Terlambatnya program penyediaan fasilitas Terminal Energi sebagai bagian dari Program Nasional untuk konversi energi untuk pembangkit listrik yang sebelumnya menggunakan solar (HSD) menjadi menggunakan gas alam (*natural gas*) yang lebih murah.

49. Other Important Information (Continued)

3. *The reclamation project plan at Teluk Benoa, Badung District, Bali, brought pros and cons due to various considerations and the future impacts.*

The situation and condition indirectly have impacts on the Plan of Benoa Port Investment Development carried out by the company, among others:

- a. *The delay of the investment for pool dredging and turning basin and South Dermaga - 12 M LWS as part of the Benoa Port Development Program as the Tourism Hub and the development of energy terminal zone.*
- b. *The Development of Curah Cair Dock and Benoa Gas Port.*

The delay is due the fact that the permit has not been issued yet which is caused by:

- a. *The Master Plan of Benoa has not been settled by Minister of Transportation because the ministry is waiting for the recommendation of the Mayor of Denpasar;*
- b. *The environmental studies cannot be processed further because Master Plan of Benoa has not been settled yet;*
- c. *The Permit Letter of Dredging work and the Permit of dock Building have not been issued by the Ministry of Transportation because the ministry is still waiting for the environmental study from the Master Plan of Development which has been settled.*

The delay has caused the following potentials:

- a. *Not reaching the plan to serve cruise ship with capacity 3,000 passengers (LOA 300 m) which has been served with anchored and transferred by boat because of limited depth of pool and turning basin (swivel pool);*
- b. *The delay in the program of providing Energy Terminal facilities as part of the National Program for energy conversion for power plants that previously used diesel (HSD) to use natural gas is cheaper.*

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) AND
SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2017, 2016 and 2015
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

49. Informasi Penting Lainnya (Lanjutan)

Atas kondisi tersebut Manajemen Perusahaan telah melakukan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Berkoordinasi intensif dengan KSOP Benoa dalam pengurusannya rekomendasi Walikota Denpasar terhadap Rencana Induk Pelabuhan Benoa.
- b. Menyusun dokumen studi AMDAL Kawasan yang saat ini sudah dilakukan sidang Kerangka Acuan Analisa Dampak Lingkungan (KA-ANDAL) serta akan menyusun UKL-UPL di BLH Kota Denpasar sebagai percepatan pemenuhan persyaratan lingkungan terhadap pekerjaan pengerukan Turning Basin dan Dermaga Selatan serta pembangunan dermaga Curah Cair dan Gas Pelabuhan Benoa.
- c. Melengkapi persyaratan yang diperlukan untuk Surat Ijin Kerja Keruk sesuai Permenhub Nomor: PM 74 Tahun 2014 tentang perubahan atas Permenhub nomor: PM 52 Tahun 2011 tentang pengerukan dan reklamasi serta untuk perijinan pembangunan Dermaga Curah Cair dan Gas Pelabuhan Benoa.
- d. Telah diterbitkan Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut kepada Deputy Menteri Lingkungan Hidup Bidang Tata Lingkungan KLH No.PP.40/1/17/Dp-15 tanggal 28 Januari 2015 perihal Rencana Pengembangan Pelabuhan Benoa, yang menyatakan bahwa sehubungan dengan RIP Benoa yang masih dalam proses penetapan Menhub, dokumen RIP Benoa dapat dijadikan pedoman dalam Studi Lingkungan Hidup (AMDAL) pengembangan Pelabuhan Benoa, sehingga kegiatan pengembangan Pelabuhan Benoa dapat berjalan secara paralel.

Dengan telah dikeluarkannya surat dari Dirjen Direktur Jenderal Perhubungan Laut tersebut, pelaksanaan sidang Amdal kawasan yang sebelumnya terhenti dapat dilanjutkan dan direncanakan sidang komisi penilai Amdal pada bulan Februari 2015, sehingga ijin-ijin yang memerlukan dokumen lingkungan dapat pula diupayakan pemenuhannya.

49. Other Important Information (Continued)

Considering those conditons, the management of the Company has taken the following steps:

- a. Coordinate intensively with "KSOP" Benoa to deal with the process of the recommendation regarding Master Pan of Benoa from Denpasar Mayor.
- b. Arrange the document of area environmental study which at present is trial and will refer to the Outline of Environmental Impact Analysis Reference (KA-ANDAL) and arrange the UKL –UPL at the law firm Denpasar in order to accelerate the environment requiremen for the dredging work and turning Basin and South Quay, and the development of Curah Cair and Benoa Gas Energy.
- c. Completing the requirements required for the Performance Work Permit under Regulation of the Minister of Transportation Number: PM 74 of 2014 regarding the amendment to Minister of Transportation Number: PM 52 Year 2011 regarding dredging and reclamation as well as for the construction permit of the Liquid and Gas Benoa Ports Harbor.
- d. There has been an issu of the Letter of Directorate General of Marine Transportation and addressed to the Minister of Life Environment specifically Directorate of Environment Structure No.PP.40/1/17/Dp-15 dated January 28, 2015 regarding Benoa Port Development Plan, which stated that since the master plan of Benoa is still in process in the ministry of transportation, the document of Benoa Master Plan can be used as the guideline in the Life Environment Study (AMDAL) for Benoa Port development so that the development activity of Benoa Port can be carried out simultaneously.

Because of the issue of the letter from the Directorate General of Marine Transportation mentioned above, the trial of AMDAL/ environment impact analysis which was stopped, can be continued and the trial of the AMDAL examiner commission, is scheduled for February 2015 and therefore, all the permits/ licenses requiring environment document can be accomplished.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) AND
SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2017, 2016 and 2015
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

49. Informasi Penting Lainnya (Lanjutan)

4. Sehubungan dengan Rencana Perusahaan untuk membangun dan mengembangkan Pelabuhan Lembar dengan membangun terminal baru di Gilimas, Nusa Tenggara Barat sebagai Terminal multifungsi guna menunjang peningkatan pelayanan yang terintegrasi, dimana Terminal terbagi menjadi terminal penumpang, marina (*yacht dan cruise*) dan terminal barang (petikemas). Berdasarkan pada keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perijinan terpadu Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 503/02-V/03/IPR/BKPM&PT/ 2016 tanggal 11 Mei 2016, Perusahaan memperoleh Ijin Pemanfaatan Ruang Rencana Kegiatan Pengembangan Pelabuhan Gilimas - Lembar.

Perusahaan menyampaikan Surat kepada Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Lembar pada tanggal 10 April 2017 No.PM.03/05.P.III-2017, perihal permohonan Konsesi Terminal Gilimas di Pelabuhan Lembar, bahwa Perusahaan menyampaikan usulan Fee Konsesi maksimum 2,5% dengan jangka waktu Konsesi selama 78 Tahun. Diamana telah ditanggapi oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Lembar melalui Surat Nomor UM.003/01/09/KSOP.Lbr-2017 tanggal 10 April 2017.

Berdasarkan Berita Acara Pembahasan Penunjukan Perusahaan untuk Konsesi Pengoperasian Terminal Gilimas di Pelabuhan Lembar BA.352/TR.0201/P.III-2017 tanggal 29 Mei 2017 antara Perusahaan dengan Kementerian Perhubungan dengan hasil pembahasan sebagai berikut :

- a. Permohonan konsesi Perusahaan perlu dilengkapi review BPKP;
- b. Perusahaan melalui KSOP Lembar mengajukan surat permohonan review konsesi kepada BPKP;
- c. Setelah diterbitkan review BPKP, akan segera dilakukan penunjukan kepada Perusahaan untuk mengusahakan jasa kepelabuhan di Terminal Gilimas dengan menandatangani Perjanjian Konsesi;
- d. Dilakukan penyusunan draft Konsesi Pelabuhan Gilimas yang selesai pembahasannya di awal Juni 2017.

49. Other Important Information (Continued)

4. *In conjunction with the Company Plan to build and develop Port of Lembar by constructing a new terminal in Gilimas, West Nusa Tenggara as a multifunction terminal to support the enhancement of integrated services, the Terminal is divided into passenger terminal, marina (yacht and cruise), and for goods (container). Based on the decision of the West Nusa Tenggara Investment Coordinating Board and Licensing Agency No 503/02-V / 03 / IPR / BKPM & PT / 2016 dated May 11, 2016, the Company obtained an Utilization Permit for the Port of Gilimas –Lembar Development Activity Plan.*

The Company submitted a Letter to Harbourmaster Office and the Lembar Port Authority on April 10, 2017 No.PM.03 / 05.P.III-2017, regarding the request of the Gilimas Terminal Concession at the Port of Lembar that the Company submitted the Concession Fee proposal for maximum 2.5% with a term of Concession for 78 Years which had been responded by the Ministry of Transportation, Directorate General of Sea Transport, Office of the Kesyahbendaharaan and the Port of Lembar Authority through the Letter No. UM.003 / 01/09 / KSOP.Lbr-2017 dated April 10, 2017.

Based on the Minutes of Discussion on the Appointment of the Company for the Operation Concession of Gilimas Terminal at Port of Lembar BA.352 / TR.0201 / P.III-2017 dated May 29, 2017 between the Company with the Ministry of Transportation with the results as follows:

- a. *The Company concession request needed to be completed with BPKP review;*
- b. *The Company through KSOP Lembar submitted application letter for concession review to BPKP;*
- c. *After the BPKP review was published, the appointment of the Company as the port services in Gilimas Terminal shall be made by signing the Concession Agreement;*
- d. *The draft of Gilimas Port Concession was prepared and completed in early June of 2017.*

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

49. Informasi Penting Lainnya (Lanjutan)

Berdasarkan Surat Direktur Komersial dan Operasional Kepada BPKP Jawa Timur Kepada Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur tanggal 31 Mei 2017 No.KU.0102/03/P.III-2017 perihal Permohonan review atas kewajaran nilai dan jangka waktu konsesi dalam rangka perusahaan Terminal Gilimas - Pelabuhan Lembar, disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Dilakukan penyusunan draft konsesi Pelabuhan Gilimas yang selesai pembahasannya di awal Juni 2017;
- b. Perusahaan berencana untuk melakukan pembangunan Terminal Gilimas di Pelabuhan Lembar untuk dapat meningkatkan pelayanan pada Kapal Pesiar Asing, Kapang Penumpang Domestik dan Petikemas;
- c. Berdasarkan hasil studi, maka Perusahaan telah mengajukan permohonan konsesi kepada Kementerian Perhubungan dalam hal ini Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Lembar sesuai dengan Surat Direksi No.PM.03/05/P.III-2017 tanggal 10 April 2017 perihal Permohonan Konsesi Terminal Gilimas di Pelabuhan Lembar dengan Fee Konsesi adalah maksimum sebesar 2,5% dan jangka waktu konsesi adalah selama 78 Tahun;
- d. Sesuai dengan hasil Rapat, bahwa Kementerian Perhubungan meminta untuk dapat dilakukan review atas Kewajaran nilai dan jangka waktu konsesi Perusahaan Terminal Gilimas di Pelabuhan Lembar atas permohonan Perusahaan yang berdasarkan pada hasil dan kajian yang telah dilakukan oleh LPEP Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga.

Berdasarkan Surat Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Lembar Kepada Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur tanggal 6 Juni 2017 No.UM.001/01/05KSOP.Lbr-2017 perihal Permohonan Review BPKP terhadap Konsesi Terminal Gilimas Pelabuhan Lembar.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) AND
SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2017, 2016 and 2015
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

49. Other Important Information (Continued)

Based on Letter of Commercial and Operational Director to BPKP East Java Head of BPKP Representative of East Java Province on May 31, 2017 No.KU.0102/03/P.III-2017 concerning Application of review of fairness of value and term of concession in the framework of concession of Gilimas Terminal - Lembar, several things were put forward and delivered as seen below:

- a. Conducted draft of Gilimas Port concession completing the discussion in early June 2017;*
- b. The Company was planning to develop the Gilimas Terminal at Lembar to be able to improve services for Foreign Cruise Ship, Domestic Passenger Ship and Container;*
- c. Based on the result of the study, the Company has applied for concession to the Ministry of Transportation in this case Syahbandar Office and Port Authority (KSOP) Lembar in accordance with Letter of Directors Number: PM.03/05/P.III- 2017 dated April 10, 2017 regarding the Gilimas Terminal Concession Application at the Port of Lembar with the Fee of Concession 2.5% at maximum and the concession period was for 78 Years;*
- d. In accordance with the results of the Meeting, the Ministry of Transportation requested a review of the Fairness of the value and term of concession of Gilimas Terminal at the Port of Lembar upon application of the Company based on the results and studies conducted by the LPEP Faculty of Economics and Business Airlangga University.*

Based on the Letter of the Harbourmaster Office and the Lembar Port Authority to the Head of BPKP Representative of East Java Province on June 6, 2017 No.UM.001/01/05KSOP.Lbr-2017 concerning Application of Review of BPKP to Terminal Concession of Gilimas - Lembar.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) AND
SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2017, 2016 and 2015
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

49. Informasi Penting Lainnya (Lanjutan)

Berdasarkan Laporan Hasil Reviu BPKP, Perhitungan Konsesi Terminal Gilimas Pelabuhan Lembar yang dikelola oleh Perusahaan No.LR860/PW13/2/2017 tanggal 2 November 2017, Jangka waktu konsesi diusulkan selama 59 tahun.

Berdasarkan Surat Direksi Perusahaan kepada Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Lembar No.PM.03/42/P.III-2017 tanggal 21 Desember 2017, menyampaikan hasil review Masa Konsesi terminal Gilimas Pelabuhan Lembar dari PBKP bahwa Jangka waktu konsesi diusulkan 59 Tahun serta permohonan Penetapan Masa Konsesi.

Surat Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Lembar Kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut No.UM.003/01/20/KSOP-Lbr-2017 tanggal 29 Desember 2017 perihal menyampaikan laporan hasil review BPKP kepada Dirjen Hubla sebagai kelengkapan data dukung dalam pemberian konsesi kepada Perusahaan.

5. Pada tanggal 19 September 2017, DP World Asia Holdings Limited bersurat kepada Perusahaan Perihal *Closing Out Process* of PT Terminal Petikemas Surabaya, dengan pokok-pokok sebagai berikut:
1. Mulai dilakukannya proses persiapan pengakhiran kerjasama pengoperasian PT TPS yang sedianya akan berakhir pada tahun 2019;
 2. Adanya mekanisme penjualan saham DP World di PT TPS kepada Perusahaan sehingga pengakhiran kerjasama tidak akan menghilangkan eksistensi PT TPS;
 3. Mekanisme penjualan saham dan pengakhiran kerjasama akan disepakati oleh Perusahaan dan DP World selambat-lambatnya pada akhir tahun 2017.

49. Other Important Information (Continued)

Based on BPKP Report of Review Result, Calculation of Terminal Concession of Gilimas-Lembar managed by the Company No.LR 860/PW13/2/2017 dated November 2, 2017, The concession period was proposed for 59 years.

Based on Letter of the Board of Directors of the Company to Harbourmaster Office and Lembar Port Authority No.PM.03/42/P.III-2017 dated December 21, 2017, the review result of Gilimas terminal of Lembar Concession Period of PBKP was submitted that the proposed Concession is 59 Years as well as the Application for the Stipulation of the Concession Period.

Letter of Harbourmaster Office and the Lembar Port Authority to the Director General of Sea Transport No. UM.003/01/20/KSOP-.Lbr-2017 dated December 29, 2017 concerning the submission of BPKP review report to the Director General of Sea Transport as completion of supporting data in granting concession to the Company.

5. *On September 19, 2017, DP World Asia Holdings Limited sent a letter to the Company regarding Closing Out Process of PT Terminal Petikemas Surabaya, with the following items:*
1. *Starting the process of preparation for the termination of cooperation of PT TPS which was originally to end in 2019;*
 2. *There was a mechanism of the sale of shares of DP World in PT TPS to the Company so that the termination of cooperation will not eliminate the existence of PT TPS;*
 3. *The mechanism of share sale and termination of cooperation will be agreed upon by the Company and DP World no later than the end of 2017.*

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) AND
SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2017, 2016 and 2015
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

49. Informasi Penting Lainnya (Lanjutan)

49. Other Important Information (Continued)

6. Sesuai Surat Perusahaan kepada DP World No.HK.0501/173/P.III-2017 tanggal 9 Oktober 2017 Perihal *Cooperation Closing Process of PT Terminal Petikemas Surabaya*, disampaikan bahwa sesuai usulan DP World sebagaimana butir 1 di atas, dan telah dilakukan pembahasan antara Perusahaan dan DP World pada tanggal 29 September 2017 di Hongkong dengan rencana proses pengakhiran kerjasama pengoperasian PT TPS sebagai berikut :
 1. Proses pengakhiran kerjasama akan dilakukan dengan mekanisme pengalihan saham DP World di PT TPS sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, yang akan dikonsultasikan dengan konsultan hukum dan konsultan terkait lainnya;
 2. PT TPS akan tetap beroperasi dan hanya terdapat perubahan pemegang saham;
 3. Nilai saham DP World di PT TPS yang akan dialihkan kepada Perusahaan dihitung berdasarkan nilai likuidasi yang seharusnya diterima DP World pada saat berakhirnya jangka waktu kerjasama;
 4. Direncanakan akan ditandatangani Perjanjian Penyelesaian (*Settlement Agreement*) antara Perusahaan dan DP World sebelum berakhirnya tahun 2017;
 5. Seluruh proses pengakhiran kerjasama akan diselesaikan dan berlaku efektif pada tanggal 29 April 2019.
 7. Sesuai Surat No.HK.0501/178/P.III-2017 tanggal 9 Oktober 2017 Perusahaan telah menyampaikan Surat kepada Dewan Komisaris Perihal Permohonan Tanggapan Tertulis atas Proses Pengakhiran Kerjasama Pengoperasian PT TPS.
 8. Dewan Komisaris Perusahaan telah memberikan tanggapan tertulis melalui Surat No.UM-224/11/DK.P.III/2017 tanggal 2 November 2017 Perihal Tanggapan Dewan Komisaris atas Usulan Proses Pengakhiran Kerjasama Pengoperasian PT Terminal Petikemas Surabaya. Melalui surat tersebut, Dewan Komisaris Perusahaan pada prinsipnya mendukung usulan Perusahaan untuk proses pengakhiran kerjasama pengoperasian PT TPS dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
6. *In accordance with the Letter of the Company to DP World No HK.0501/173/P.III-2017 dated October 9, 2017 regarding Cooperation Closing Process of PT Terminal Petikemas Surabaya, it was stated that according to DP World proposal as point 1 above, and has been discussed between the Company and DP World on September 29, 2017 in Hong Kong with a plan to terminate the operation of PT TPS as follows:*
 1. *The process of termination of cooperation shall be carried out by the mechanism of transfer of DP World shares in PT TPS in accordance with the provisions of Indonesian law, which would be consulted with legal consultants and other relevant consultants;*
 2. *PT TPS would continue to operate and there was only a change in the shareholders;*
 3. *The value of DP World shares in PT TPS to be transferred to the Company shall be calculated based on the value of liquidation that DP World should have received at the end of the term of the cooperation;*
 4. *There was a plan to sign a Settlement Agreement between the Company and DP World before the end of 2017;*
 5. *The entire process of termination of cooperation would be completed and effective on April 29, 2019.*
 7. *In accordance with the Letter No: HK.0501/178/P.III-2017 dated October 9, 2017 the Company had submitted a Letter to the Board of Commissioners regarding Written Response Request for Termination of Cooperation Process of PT TPS.*
 8. *The Board of Commissioners of the Company had issued a written response through Letter NoUM-224/11/DK.P.III/2017 dated November 2, 2017 regarding the Response of the Board of Commissioners on the Proposal of Termination of Cooperation Process of PT Terminal Petikemas Surabaya. Through this letter, the Board of Commissioners of the Company in principle supports the proposal of the Company for the process of termination of cooperation of PT TPS but should consider the following matters:*

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) AND
SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2017, 2016 and 2015
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

49. Informasi Penting Lainnya (Lanjutan)

1. Penunjukan Konsultan Pendamping dalam rangka pengakhiran kerjasama pengoperasian PT TPS harus sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik dan ketentuan yang berlaku;
 2. Perhitungan nilai likuidasi dilakukan oleh penilai independen yang disepakati antara Perusahaan dan DP World;
 3. Dalam penetapan nilai saham DP World di PT TPS, Direksi agar menggunakan prinsip kehati-hatian dan telah mempertimbangkan seluruh aspek yang berpotensi menimbulkan kerugian perusahaan dan kepentingan negara.
9. Dalam pelaksanaan Proses Pengakhiran Kerjasama Pengoperasian PT TPS, Direksi Perusahaan telah menandatangani Pakta Integritas No.HK.01/28.1/P.III-2017 tanggal 20 November 2017 yang berisi komitmen Direksi sebagai berikut :
1. Direksi Perusahaan taat terhadap Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Perundang-undangan lainnya;
 2. Direksi Perusahaan mencegah terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
 3. Direksi Perusahaan meningkatkan kualitas pengelolaan dan pola kerja perusahaan yang didasarkan pada prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) secara berkesinambungan;
 4. Apabila Direksi Perusahaan melanggar hal-hal yang telah dinyatakan dalam Pakta Integritas ini, bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Setelah Perusahaan memperoleh Tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris, melalui Surat No.UM-224/11/DK.P.III/2017 tanggal 2 November 2017, Perusahaan mengirimkan permohonan persetujuan atas Proses Pengakhiran Kerjasama Pengoperasian PT Terminal Petikemas Surabaya kepada Menteri BUMN melalui Surat No.HK.0501/243/P.III-2017 tanggal 24 November 2017.

49. Other Important Information (Continued)

1. Appointment of Auxiliary Consultant in termination of cooperation of PT TPS should be in accordance with good corporate governance and prevailing provisions;
 2. The calculation of the value of liquidation shall be conducted by an independent appraiser agreed between the Company and DP World;
 3. In determining the value of shares of DP World in PT TPS, the Board of Directors need to use the principles of prudence and has considered all aspects that potentially cause losses of the company and the interests of the state.
9. In the execution of the Cooperation Termination Process of PT TPS, the Directors of the Company have signed the Integrity Pact No. HK.01/28.1/P.III-2017 dated November 20, 2017 which contains the commitments of the Board of Directors as follows:
1. The Board of Directors of the Company is in compliance with Law No. 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company and other Laws and Regulations;
 2. The Directors of the Company prevent Corruption, Collusion and Nepotism (KKN);
 3. The Board of Directors of the Company improves the quality of management and corporate work pattern based on the principles of Good Corporate Governance (GCG) on an ongoing basis;
 4. If the Board of Directors of the Company violates the matters stated in this Integrity Pact, they are prepared to be subject to moral sanctions, administrative sanctions and prosecuted in accordance with the provisions of applicable laws.
10. After the Company obtained a written response from the Board of Commissioners, through Letter No.UM-224/11/DK.P.III/2017 dated November 2, 2017, the Company submitted an application for Termination of Cooperation Contract of PT Terminal Petikemas Surabaya to Minister of SOE through Letter No. HK.0501 / 243 / P.III-2017 dated November 24, 2017.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) AND
SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2017, 2016 and 2015
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

49. Informasi Penting Lainnya (Lanjutan)

Pada saat ini, Perusahaan tengah menunggu Persetujuan Menteri BUMN yang diperkirakan akan terbit pada akhir Januari 2018. Setelah terbit Persetujuan Menteri BUMN, maka langkah selanjutnya adalah penandatanganan *Settlement Agreement* (Perjanjian Penyelesaian) dan *Conditional Share and Purchase Agreement* (Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat) oleh Perusahaan dan DP World.

11. Penguasaan hak atas tanah yang tumpang tindih sebagaimana hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI No.31/S/VIIXV.2/02/2005 tanggal 14 Februari 2005 sebagai berikut:

- a) Sebagian tanah Hak Pengelolaan (HPL) Perusahaan di Pelabuhan Cabang Tanjung Emas Semarang yang juga dicatat sebagai aset PT Pertamina UPPDN IV Semarang dengan nilai kurang lebih Rp40.200.000.
- b) Sebagian tanah Hak Pengelolaan (HPL) Perusahaan di Pelabuhan Cabang Tanjung Emas Semarang dikuasai oleh penduduk dan telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik oleh Kantor Pertanahan Kodya Semarang dengan nilai kurang lebih Rp9.953.600.

PT Terminal Teluk Lamong (TTL)

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Luar Biasa PT Lamong Energi Indonesia (LEGI) No. 116 tanggal 22 Desember 2016, oleh Yatiningsih, SH., MH., notaris di Surabaya, Para Pemegang Saham memutuskan mengenai persetujuan peralihan saham dari PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) sebesar 4.461 lembar saham kepada TTL. Transaksi jual beli saham LEGI antara PT ADHI dengan Perusahaan, atas penjualan seluruh kepemilikan saham PT ADHI di LEGI, yaitu prosentase kepemilikan sebesar 49% kepada Perusahaan.

Perusahaan menerima Surat No. AHU-AH.01.03-0025782 tanggal 20 Januari 2017 dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia perihal penerimaan pemberitahuan perubahan peralihan saham LEGI.

49. Other Important Information (Continued)

The Company is currently waiting for the approval from the Minister of State-Owned Enterprises which is expected to be issued by the end of January 2018. After the issuance of the approval of the Minister of State-Owned Enterprises, the next step is the signing of the *Settlement Agreement and Conditional Share and Purchase Agreement* (Conditional Share and Purchase Agreement) by the Company and DP World.

11. The overlapped in committing the occupation towards the rights for the land utility as mentioned in the report No.31/S/VIIXV.2/02.2005 dated February 14, 2005 of Supreme Auditor Agency described as follows:

- a) Parts of land management right (HPL) of the Company at Tanjung Emas Port of Semarang was recorded and noted as the assets of PT Pertamina Regional Marketing Unit IV (UPPDN IV) of Semarang with value approximately Rp40,200,000.
- b) Parts of land management right (HPL) at Tanjung Emas of Semarang was occupied and claimed by residents with Certificates of Ownership released by District Land Office (BPN) of Semarang City with value approximately Rp9,953,600.

PT Terminal Teluk Lamong (TTL)

Based on the Deed of Extraordinary Shareholders PT Lamong Energi Indonesia (LEGI) No. 116 dated December 22, 2016 by Yatiningsih, SH., MH., notary in Surabaya, Shareholders decided on the approval of transfers of shares from PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) amounting to 4,461 shares to TTL. Sale and purchase transaction shares of LEGI between PT ADHI and the Company, on the sale of the entire shareholding PT ADHI in LEGI, that is the percentage of ownership by 49% to the Company.

The Company received letter No. AHU-AH.01.03-0025782 dated January 20, 2017 from Decree of Minister of Law and Human Rights of Republic of Indonesia regarding of receipt of the notification behalf changes of the LEGI's shareholders.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) AND
SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2017, 2016 and 2015
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

49. Informasi Penting Lainnya (Lanjutan)

49. Other Important Information (Continued)

PT Lamong Energi Indonesia (LEGI)

1. Perubahan kedua atas perjanjian tersebut berdasarkan Addendum tanggal 9 Mei 2016. Perubahan tersebut berlaku efektif sejak tanggal 1 Juni 2016.

Beberapa perubahan sebagai berikut:

- a. "Tanggal Operasi Komersial Terjadwal" berarti sehubungan dengan Kapasitas Pertama adalah tanggal 1 Februari 2017 dan sehubungan dengan Kapasitas Kedua adalah tanggal 1 Desember 2017.
- b. Perubahan ketentuan yang berkaitan dengan definisi yang berlaku pada periode BOT dan O&M.
- c. BOT akan berlaku pada saat Jangka Waktu BOT (yaitu sejak Tanggal Siap Untuk Komisioning Unit Pembangkit pertama dan berakhir pada tanggal dimana masing-masing Unit Pembangkit sudah mencapai Tanggal Pengalihan dan sebelum Jangka Waktu O&M).
- d. Jangka Waktu O&M setelah berakhirnya Jangka Waktu BOT dan Jasa O&M akan berlaku pada saat Jangka Waktu O&M yaitu setelah Unit Pembangkit pertama melewati Tanggal Pengalihan dan akan berakhir pada saat Unit Pembangkit mencapai 119.999 jam operasi, untuk masing-masing Unit Pembangkit.
- e. Mengubah ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Tarif O&M dan Jaminan Pembayaran.
- f. Mengubah jadwal tanggal operasi komersial, untuk Engine No.1 dan No. 2 pada 1 Februari 2017, Engine No.3 dan No. 4 pada 1 Desember 2017.

2. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Luar Biasa PT Lamong Energi Indonesia (LEGI) No. 116 tanggal 22 Desember 2016, oleh Yatiningsih, SH., MH., Notaris di Surabaya, Para Pemegang Saham memutuskan mengenai persetujuan peralihan saham dari PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) sebesar 4.459 lembar saham kepada TTL. TTL menerima Surat No. AHU-AH.01.03-0025782 tanggal 20 Januari 2017 dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia perihal penerimaan pemberitahuan perubahan peralihan saham di PT LEGI.

PT Lamong Energi Indonesia (LEGI)

1. Second amendment of this agreement is based on Amendment dated May 9, 2016. Those changes effective on June 1, 2016.

Those changes are as follows:

- a. "Scheduled Commercial Operation Date" means with respect to the First Capacity is February 1, 2017 and with respect to the Second Capacity is December 1, 2017.
- b. Amend provisions related to the applicable definitions for the BOT and O&M period.
- c. BOT shall be valid during the BOT Period (which is the period commencing from the Ready for Commissioning Date of the first Generating Unit and concluding on the date when each Generating Unit has reached Transfer Date and prior to the O&M Period).
- d. The O&M Period upon the expiry of BOT Period and the O&M Service shall commence on the O&M Period, which is when the first Generating Unit passed the Transfer Date and shall end when 119,999 operating hours is reached, for the each of Generating Unit.
- e. Amend all provisions related to O&M Tariff and Security of Payment.
- f. Changes of scheduled commercial date, of Engine No.1 and No.2 on February 1, 2017, and Engine No.3 and No.4 on December 1, 2017.

2. Based on the Deed of Extraordinary Shareholders of PT Lamong Energi Indonesia (LEGI) No. 116 dated December 22, 2016 by Yatiningsih, SH., MH., Notary in Surabaya, Shareholders decided on the approval of transfers of shares from PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) amounting to 4,459 shares to TTL. TTL received letter No. AHU-AH.01.03-0025782 dated January 20, 2017 from Decree of Minister of Law and Human Rights of Republic of Indonesia regarding the receipt of notification on the changes on behalf of PT LEGI's shareholders.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) AND
SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2017, 2016 and 2015
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

49. Informasi Penting Lainnya (Lanjutan)

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Luar Biasa PT LEGI No. 35 tanggal 7 Juni 2017, oleh Yatiningsih, SH., MH., Notaris di Surabaya, para Pemegang Saham menyetujui dan mengesahkan pemindahan hak atas saham PT LEGI kepada Koperasi Pegawai Pelabuhan Indonesia III sebanyak 91 lembar saham atau senilai Rp91.000.000. Perubahan tersebut telah dicatat dalam sistem administrasi Badan Hukum berdasarkan surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-AH.01.03-0151490 tanggal 11 Juli 2017 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan peralihan saham di PT LEGI.

49. Other Important Information (Continued)

Based on Extraordinary Shareholders' Deed of Shareholders of PT LEGI No. 35 dated June 7, 2017, by Yatiningsih, SH., MH., Notary in Surabaya, the Shareholders approved and authorized the transfer of rights on PT LEGI shares to Koperasi Pegawai Pelabuhan Indonesia III for 91 shares or Rp91,000,000. The amendment was recorded in the legal system of the Legal Entity based on a letter from the Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AU-AH.01.03-0151490 dated July 11, 2017 regarding the receipt of notification on the change of share transfer in PT LEGI.

50. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

PT Pelindo Husada Citra (PHC)

Berdasarkan surat No. 503/689.A/436.7.17/2018 tanggal 18 Januari 2018, Perusahaan mendapatkan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan diseluruh wilayah Republik Indonesia.

50. Events After The Reporting Period

PT Pelindo Husada Citra (PHC)

Based on No. 503/689.A/436.7.17/2018 dated January 18, 2018, the Company obtained license Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) from Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu to conduct business trading activities through the Republic of Indonesia.

51. Transaksi Nonkas

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015, terdapat beberapa akun dalam laporan keuangan konsolidasian yang penambahannya merupakan aktivitas yang tidak mempengaruhi arus kas. Akun-akun tersebut adalah sebagai berikut:

51. Non-Cash Transactions

As of the period ended December 31, 2017, 2016 and 2015, there are several accounts in the consolidated financial statements that are recognized but does not affect cash flows. The accounts are as follows:

	2017 Rp	2016 Rp	2015 Rp	
Penambahan Uang Muka Kontraktor melalui Utang Bank	161,766,847	312,779,414	502,060,034	Addition of Contractor Advanced by Bank Loans
Kompensasi Uang Muka Kontrak	77,808,507	730,281,579	587,655,879	Contractor Advanced Compensation
Tambahan Aset Takberwujud Melalui Uang Muka Kontraktor	890,292,028	--	750,181,251	Additional Intangible Assets by Contractor Advances
Tambahan Aset Tetap Melalui Utang	182,768,242	399,897,374	347,671,166	Additional Fixed Assets by Loans
Tambahan Aset Takberwujud Melalui Utang	45,150,043	156,579,613	196,426,419	Additional Intangible Assets by Loans
Tambahan Aset Tetap Melalui Uang Muka Kontraktor	--	141,224,199	93,333,526	Additional Fixed Assets by Contractor Advances
Penjualan Aset Tetap melalui Piutang	25,970,996	--	--	Sale of Fixed Assets Through Receivables
Penjualan Properti Investasi melalui Piutang	7,723,000	--	--	Sale of Investment Property Through Receivables
Total	1,391,479,663	1,740,762,179	2,477,328,275	Total

**52. Reklasifikasi Akun - akun dalam Laporan
Keuangan Kosolidasian**

**52. Reclassification of Accounts in the
Consolidated Financial Statements**

Beberapa akun dalam laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 telah direklasifikasi sesuai dengan sifat transaksi dan klasifikasi dalam laporan keuangan per 31 Desember 2017.

Some accounts in the consolidated financial statements for the years ended December 31, 2016 and 2015 have been reclassified in accordance with the nature of transaction and classification in the financial statement as of December 31, 2017.

Dampak reklasifikasi laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

The impact of the reclassification of financial statement for the years ended December 31, 2016 and 2015 are as follows:

	31 Desember 2016/ December 31, 2016			
	Sebelumnya Reklasifikasi/ Before Reclassified	Penyajian Kembali/ Reclassification	Setelah Reklasifikasi / As Reclassified	
	Rp	Rp	Rp	
ASET				ASSETS
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan Setara Kas	1,820,904,461	(4,917,631)	1,815,986,830	Cash and Cash Equivalents
Kas yang Dibatasi Penggunaannya	33,213,107	--	33,213,107	Restricted Cash
Investasi Jangka Pendek	--	4,917,631	4,917,631	Short Term Investment
Piutang Usaha				Trade Receivables
Pihak Berelasi	24,671,000	18,615,454	43,286,454	Related Parties
Pihak Ketiga	411,540,871	72,482,209	484,023,080	Third Parties
Piutang Lain-lain				Other Receivables
Pihak Berelasi	191,968,284	--	191,968,284	Related Parties
Pihak Ketiga	34,396,494	--	34,396,494	Third Parties
Persediaan	25,152,456	--	25,152,456	Inventories
Uang Muka	1,176,361,747	--	1,176,361,747	Advances
Biaya Dibayar di Muka	71,536,742	--	71,536,742	Prepaid Expenses
Pajak Dibayar di Muka	130,469,123	--	130,469,123	Prepaid Taxes
Pendapatan yang Masih Akan Diterima	91,097,663	(91,097,663)	--	Accrued Revenues
Aset Tetap yang Dimiliki untuk Dijual	955,584	--	955,584	Fixed Assets held for Sale
Total Aset Lancar	4,012,267,532	--	4,012,267,532	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR				NON - CURRENT ASSETS
Total Aset Tidak Lancar	18,169,284,732	--	18,169,284,732	Total Non - Current Assets
TOTAL ASET	22,181,552,264	--	22,181,552,264	TOTAL ASSETS
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS JANGKA PENDEK				CURRENT LIABILITIES
Total Liabilitas Jangka Pendek	3,080,828,706	--	3,080,828,706	Total Current Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG				NON - CURRENT LIABILITIES
Total Liabilitas Jangka Panjang	9,455,243,958	--	9,455,243,958	Total Non - Current Liabilities
TOTAL LIABILITAS	12,536,072,664	--	12,536,072,664	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS				EQUITY
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk				Equity Attributable to Owners of the Parent
Modal Saham	1,018,953,000	--	1,018,953,000	Share Capital
Tambahkan Modal Disetor	22,500,000	39,960,000	62,460,000	Additional Paid in Capital
Saldo Laba:				Retained Earnings:
Dicadangkan	6,425,012,655	(1,127,907,840)	5,297,104,815	Appropriated
Belum Dicapangkan	1,037,329,721	--	1,037,329,721	Unappropriated
Penghasilan Komprehensif Lain	--	1,127,907,840	1,127,907,840	Other Comprehensive Income
Total Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk	8,503,795,376	39,960,000	8,543,755,376	Total Equity Attributable to Owners of the Parent
Kepentingan Nonpengendali	1,141,684,224	(39,960,000)	1,101,724,224	Non - Controlling Interest
Total Ekuitas	9,645,479,600	--	9,645,479,600	Total Equity
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	22,181,552,264	--	22,181,552,264	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

**52. Reklasifikasi Akun - akun dalam Laporan
Keuangan Kosolidasian (Lanjutan)**

**52. Reclassification of Accounts in the
Consolidated Financial Statements (Continued)**

	31 Desember 2015/ December 31, 2015			
	Sebelumnya Reklasifikasi/ Before Reclassified	Penyajian Kembali/ Reclassification	Setelah Reklasifikasi / As Reclassified	
	Rp	Rp	Rp	
ASET				ASSETS
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan Setara Kas	2,618,040,351	--	2,618,040,351	Cash and Cash Equivalents
Kas yang Dibatasi Penggunaannya	42,244,106	--	42,244,106	Restricted Cash
Investasi Jangka Pendek	--	--	--	Short Term Investment
Piutang Usaha				Trade Receivables
Pihak Berelasi	47,745,236	33,212,391	80,957,627	Related Parties
Pihak Ketiga	341,808,878	40,022,763	381,831,641	Third Parties
Piutang Lain-lain				Other Receivables
Pihak Berelasi	19,732,086	--	19,732,086	Related Parties
Pihak Ketiga	19,360,685	--	19,360,685	Third Parties
Persediaan	24,934,487	--	24,934,487	Inventories
Uang Muka	1,160,713,389	--	1,160,713,389	Advances
Biaya Dibayar di Muka	68,797,859	--	68,797,859	Prepaid Expenses
Pajak Dibayar di Muka	102,895,964	--	102,895,964	Prepaid Taxes
Pendapatan yang Masih Akan Diterima	73,235,154	(73,235,154)	--	Accrued Revenues
Aset Tetap yang Dimiliki untuk Dijual	1,382,834	--	1,382,834	Fixed Assets held for Sale
Total Aset Lancar	4,520,891,029	--	4,520,891,029	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR				NON - CURRENT ASSETS
Total Aset Tidak Lancar	14,449,716,408	--	14,449,716,408	Total Non - Current Assets
TOTAL ASET	18,970,607,437	--	18,970,607,437	TOTAL ASSETS
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS JANGKA PENDEK				CURRENT LIABILITIES
Total Liabilitas Jangka Pendek	3,161,666,628	--	3,161,666,628	Total Current Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG				NON - CURRENT LIABILITIES
Total Liabilitas Jangka Panjang	8,103,570,724	--	8,103,570,724	Total Non - Current Liabilities
TOTAL LIABILITAS	11,265,237,352	--	11,265,237,352	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS				EQUITY
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk				Equity Attributable to Owners of the Parent
2016 dan 2015	1,018,953,000	--	1,018,953,000	2016 and 2015
Tambahkan Modal Disetor	22,500,000	39,960,000	62,460,000	Additional Paid in Capital
Saldo Laba:				Retained Earnings:
Dicadangkan	4,814,894,108	4,488,047	4,819,382,155	Appropriated
Belum Dicapangkan	702,533,323	--	702,533,323	Unappropriated
Penghasilan Komprehensif Lain	--	(4,488,047)	(4,488,047)	Other Comprehensive Income
Total Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk	6,558,880,431	39,960,000	6,598,840,431	Total Equity Attributable to Owners of the Parent
Keperluan Nonpengendali	1,146,489,654	(39,960,000)	1,106,529,654	Non - Controlling Interest
Total Ekuitas	7,705,370,085	--	7,705,370,085	Total Equity
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	18,970,607,437	--	18,970,607,437	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

52. Reklasifikasi Akun - akun dalam Laporan
Keuangan Kosolidasian (Lanjutan)

52. Reclassification of Accounts in the
Consolidated Financial Statements (Continued)

			31 Desember 2016/ December 31, 2016					
	Sebelumnya Reklasifikasi/ Before Reclassified	Penyajian Kembali/ Reclassification	Setelah Reklasifikasi / As Reclassified					
	Rp	Rp	Rp					
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN				CONSOLIDATED STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME				
Bagian Laba Entitas Asosiasi	44,608,948	(5,985)	44,602,963	Equity In Net Gain of Associates				
Pendapatan (Beban) lainnya - Bersih	(184,358,102)	5,985	(184,352,117)	Other Income (Expenses) - Net				
LABA TAHUN BERJALAN	<u>1,512,316,930</u>	<u>--</u>	<u>1,512,316,930</u>	NET INCOME FOR THE YEAR				
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	<u>2,652,509,978</u>	<u>--</u>	<u>2,652,509,978</u>	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR				
			31 Desember 2016/ December 31, 2016					
	Sebelumnya Reklasifikasi/ Before Reclassified	Penyajian Kembali/ Reclassification	Setelah Reklasifikasi / As Reclassified					
	Rp	Rp	Rp					
LAPORAN ARUS KAS KOSOLIDASI				THE CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS				
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES				
Penerimaan Kas dari Pelanggan	7,533,956,365	(88,627,718)	7,445,328,647	Cash Received from Customers				
Pembayaran Kas kepada Pemasok Karyawan dan Lainnya	(4,564,884,151)	4,564,884,151	--	Cash Paid to Suppliers, Employees and Others				
Penerimaan Kas dari Non Pelanggan	--	88,627,718	88,627,718	Cash Received from Non Customers				
Pembayaran Kas kepada Pemasok	--	(3,765,240,761)	(3,765,240,761)	Cash Paid to Suppliers				
Pembayaran Kas kepada Karyawan	--	(578,159,842)	(578,159,842)	Cash Paid to Employees				
Pembayaran Kas Lainnya	--	(221,483,548)	(221,483,548)	Others Cash Paid				
Pembayaran Pajak Penghasilan	(716,095,687)	--	(716,095,687)	Payment For Corporate Income Tax				
Penempatan Kas yang dibatasi Penggunaannya	11,662,487	--	11,662,487	Placement of Restricted Cash				
Penempatan Investasi Jangka Pendek	--	(4,917,631)	(4,917,631)	Placement of Short Term Investment				
Penerimaan Bunga Deposito	83,011,977	--	83,011,977	Interest on Deposit Received				
Penerimaan Restitusi Pajak	81,349,835	--	81,349,835	Receipts Tax Restitution				
Pembayaran Bunga Pinjaman	(475,081,906)	--	(475,081,906)	Payment for Interest				
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	<u>1,953,918,920</u>	<u>(4,917,631)</u>	<u>1,949,001,289</u>	<u>Net Cash Provided by Operating Activities</u>				
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES				
Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Investasi	<u>(3,126,250,615)</u>	<u>--</u>	<u>(3,126,250,615)</u>	<u>Net Cash Used In Investing Activities</u>				
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES				
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	<u>588,730,350</u>	<u>--</u>	<u>588,730,350</u>	<u>Net Cash Provided by Financing Activities</u>				
KAS DAN SETARA KAS - AKHIR TAHUN	<u>1,815,986,830</u>	<u>--</u>	<u>1,815,986,830</u>	CASH AND CASH EQUIVALENTS-AT END OF YEAR				

**52. Reklasifikasi Akun - akun dalam Laporan
Keuangan Kosolidasian (Lanjutan)**

**52. Reclassification of Accounts in the
Consolidated Financial Statements (Continued)**

	31 Desember 2015/ December 31, 2015			
	Sebelumnya Reklasifikasi/ Before Reclassified	Penyajian Kembali/ Reclassification	Setelah Reklasifikasi / As Reclassified	
	Rp	Rp	Rp	
LAPORAN ARUS KAS KOSOLIDASI				THE CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan Kas dari Pelanggan	9,016,334,339	(771,790,806)	8,244,543,533	Cash Received from Customers
Pembayaran Kas kepada Pemasok Karyawan dan Lainnya	(4,696,236,000)	4,696,236,000	--	Cash Paid to Suppliers, Employees and Others
Penerimaan Kas dari Non Pelanggan	--	771,790,806	771,790,806	Cash Received from Non Customers
Pembayaran Kas kepada Pemasok	--	(3,282,922,518)	(3,282,922,518)	Cash Paid to Suppliers
Pembayaran Kas kepada Karyawan	--	(606,156,910)	(606,156,910)	Cash Paid to Employees
Pembayaran Kas Lainnya	--	(807,156,573)	(807,156,573)	Others Cash Paid
Pembayaran Pajak Penghasilan	(911,862,105)	--	(911,862,105)	Payment For Corporate Income Tax
Penempatan Kas yang dibatasi Penggunaannya	(22,374,106)	--	(22,374,106)	Placement of Restricted Cash
Penerimaan Bunga Deposito	95,065,328	--	95,065,328	Interest on Deposit Received
Penerimaan Restitusi Pajak	1,769,440	--	1,769,440	Receipts Tax Restitution
Pembayaran Bunga Pinjaman	(234,308,396)	--	(234,308,396)	Payment for Interest
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	3,248,388,500	--	3,248,388,500	Net Cash Provided by Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Investasi	(3,859,773,771)	--	(3,859,773,771)	Net Cash Used In Investing Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	(567,282,137)	--	(567,282,137)	Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities
KAS DAN SETARA KAS - AKHIR TAHUN	2,618,040,351	--	2,618,040,351	CASH AND CASH EQUIVALENTS END OF YEAR

**53. Standar Akuntansi yang Sudah Diterbitkan
namun Belum Berlaku Efektif**

**53. Accounting Standards Issued but Not Yet
Effective**

DSAK-IAI telah mengesahkan beberapa standar baru, amandemen dan penyesuaian atas standar, serta interpretasi atas standar namun belum berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada 1 Januari 2017.

DSAK-IAI has issued several new standards amendments and improvements to standards, and interpretations of the standards but not yet effective for the period beginning on January 1, 2017.

Standar baru, amandemen dan penyesuaian atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2018, yaitu:

New standards, amendments and improvement to standards which effective for the periods beginning on or after January 1, 2018. Are as follows:

**53. Standar Akuntansi yang Sudah Diterbitkan
namun Belum Berlaku Efektif**

**53. Accounting Standards Issued but Not Yet
Effective**

- PSAK No. 16 (Amandemen 2015): "Aset Tetap"
- PSAK No. 69: "Agrikultur"
- PSAK No. 2 (Amandemen 2016): "Laporan Arus Kas"
- PSAK No. 46 (Amandemen 2016): "Pajak Penghasilan tentang Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi yang Belum Direalisasi"
- PSAK No. 13 (Amandemen 2017): "Properti Investasi"
- PSAK No. 53 (Amandemen 2017): "Pembayaran Berbasis Saham"
- PSAK No. 15 (Penyesuaian 2017): "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama"
- PSAK No. 67 (Penyesuaian 2017): "Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain"

Interpretasi atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2019, dengan penerapan dini diperkenankan, yaitu:

- ISAK No. 33: "Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka"

Standar baru dan amandemen standar berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2020 dengan penerapan dini diperkenankan, yaitu :

- PSAK No. 71: "Instrumen Keuangan"
- PSAK No. 72: "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan"
- PSAK No. 73: "Sewa"
- PSAK No. 62 (Amandemen 2017): "Kontrak Asuransi"
- PSAK No. 15 (Amandemen 2017): "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama"

Hingga tanggal laporan keuangan konsolidasian ini diotorisasi, Grup masih melakukan evaluasi atas dampak potensial dari penerapan standar baru, amandemen standar dan interpretasi standar tersebut.

- *PSAK No. 16 (Amendment 2015): "Property, Plant and Equipment"*
- *SFAS No. 69: "Agriculture"*
- *PSAK No. 2 (Amendment 2016): "Statements of Cash Flows"*
- *PSAK No. 46 (Amendment 2016): "Income Tax regarding Deferred Tax Assets Recognition for Unrealised Loss".*
- *PSAK No. 13 (Amendment 2017): "Investment Property"*
- *PSAK No. 53 (Amendment 2017): "Share Based Payment"*
- *PSAK No. 15 (Improvement 2017): "Investment in Associates and Joint Ventures"*
- *PSAK No. 67 (Improvement 2017): "Disclosure of Interests in Other Entities"*

Interpretation of standards which effective for the periods beginning on or after January 1, 2019, with early adoption is permitted, are as follows:

- *PSAK No. 71: "Financial Instrument"*

New standards and amendments to standards effective for periods beginning on or after January 1, 2020 with early adoption is permitted, are follows:

- *PSAK No. 71: "Financial Instrument"*
- *PSAK No. 72: "Revenue from Contract with Customer"*
- *PSAK No. 73: "Lease"*
- *PSAK No. 62 (Amendment 2017): "Insurance Contract"*
- *PSAK No. 15 (Amendment 2017): "Investment in Associates and Joint Ventures"*

Untill the date of the consolidated financial statement is authorized, the Group is still evaluating the potential impact of the adoption of new standards, amendments to standards and interpretations of these standards.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**54. Tanggung Jawab dan Otorisasi Penerbitan
Laporan Keuangan**

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian yang diotorisasi untuk terbit pada tanggal 26 Februari 2018.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) AND
SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

*For the Years Ended
December 31, 2017, 2016 and 2015
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)*

**54. Responsibility and Authorization for
Issuance of the Financial Statements**

The Management of the Company is responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements that were authorized to be published on February 26, 2018.